

LAPORAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH (RPJPD)

PROVINSI SUMATERA BARAT

2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 telah dapat diselesaikan. KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ini disusun merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, yang menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Serentak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat wajib menyusun KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS pada saat RPJPD disusun, untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan/atau Program RPJPD, sudah mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Lebih lanjut hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada pasal 2 huruf a bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 juga disampaikan bahwa laporan KLHS RPJPD dimanfaatkan untuk Penyusunan Dokumen RPJPD.

Proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi.

Atas nama Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada tim dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program di Provinsi Sumatera Barat.



Padang, Desember 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Ruang Lingkup	I-6
1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJPD.....	I-6
1.6. Sistematika Pelaporan KLHS RPJPD	I-10
BAB II DASAR TEORI	
2.1. Teori Perkembangan Wilayah	II-1
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	II-7
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-8
2.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II-9
2.5. Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	II-10
2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH)	II-10
2.5.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Kerusakan Lingkungan Hidup	II-12
2.5.3. Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup	II-13
2.5.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	II-14
2.5.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	II-14
2.5.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati/Biodiversity	II-15
2.6. Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat	II-16
2.6.1. Pengembangan Pusat Kegiatan	II-16
2.7. Sejarah Pembentukan Provinsi Sumatera Barat	II-17
2.8. Perkembangan dan Interaksi Antar Wilayah Provinsi Sumatera Barat	II-17

BAB III KONDISI UMUM DAERAH

3.1. Kondisi Geografis, Sosial Budaya dan Ekonomi	III-1
3.1.1. Kondisi Geografis	III-1
3.1.1.1. Wilayah Perencanaan	III-1
3.1.2. Kondisi Sosial Budaya	III-4
3.1.2.1. Demografi	III-4
3.1.2.2. Tingkat Pendidikan	III-10
3.1.2.3. Kesehatan	III-15
3.1.2.4. Aspek Pelayanan Air Minum	III-19
A. Jaringan Air Bersih	III-19
B. Akses Sanitasi	III-21
3.1.3. Kondisi Ekonomi	III-23
3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-23
3.1.3.2. Pertumbuhan PDRB	III-26
3.1.3.3. Indeks Gini	III-28
3.1.3.4. Angka Kemiskinan	III-31
3.1.3.5. Tingkat Pengangguran	III-40
3.2. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH)	III-50
3.2.1. Wilayah Fungsional	III-50
3.2.1.1. Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi Alami	III-52
3.2.1.2. Hidrologi	III-66
3.2.1.3. Hidrogeologi	III-74
3.2.1.4. Geologi	III-75
3.2.1.5. Geomorfologi	III-77
3.2.1.6. Topografi	III-77
3.2.1.7. Klimatologi	III-80
3.2.1.8. Kawasan Karst	III-83
3.2.1.9. Penggunaan Lahan	III-87
3.2.1.10. Ekosistem Pesisir	III-89
3.2.2. Kondisi Lingkungan (Enam Muatan KLHS)	III-108
3.2.2.1. Daya Dukung Daya Tampung Air	III-108
3.2.2.2. Jasa Lingkungan Ketersediaan Air	III-112
3.2.3. Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Proyeksi 2045	III-115
3.2.3.1. Daya Dukung Air	III-115
3.2.3.2. Pangan	III-118
3.2.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam	III-122
3.2.4.1. Kawasan Hutan	III-122
3.2.4.2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)	III-129
3.2.4.3. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	III-130

3.2.5. Keanekaragaman Hayati	III-141
3.2.5.1. Upaya Pelestarian	III-175
3.2.6. Adaptasi Perubahan Iklim	III-145
3.2.6.1. Rencana FOLU Net Sink Sumatera Barat	III-145
3.2.6.2. SIDIK	III-153
3.2.7. Kondisi dan Resiko Kebencanaan	III-154
1. Gempa Bumi	III-159
2. Tsunami	III-166
3. Kebakaran Hutan dan Lahan	III-168
4. Banjir	III-171
5. Banjir Bandang	III-174
6. Cuaca Ekstrim	III-177
7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	III-179
8. Kekeringan	III-181
9. Likuefaksi	III-184
10. Gunung Api	III-187
11. Gerakan Tanah	III-194
3.2.8. Indeks Keberlanjutan Lingkungan Hidup	III-198
3.2.8.1. Indeks Jasa Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	III-198
3.2.8.2. Indeks Keselamatan, Mutu Hidup dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat	III-199
3.2.8.3. Kuadran keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat	III-200
3.3. Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB	III-203
3.3.1. Kondisi Umum Keuangan Daerah	III-203
3.4. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Indikator TPB	III-212

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1. Capaian TPB	IV-3
4.1.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	IV-3
4.1.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ...	IV-18
4.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	IV-26
4.1.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	IV-38
4.1.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	IV-45
4.1.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	IV-52
4.1.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal,	

Berkelanjutan, dan Modern	IV-61
4.1.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	IV-65
4.1.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	IV-73
4.1.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	IV-79
4.1.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	IV-85
4.1.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	IV-95
4.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	IV-103
4.1.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	IV-107
4.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	IV-113
4.1.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	IV-118
4.1.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	IV-135
4.2. Rekapitulasi Capaian TPB	IV-144

BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA OPD

5.1. Analisis Isu Strategis	V-1
5.1.1. Analisis Isu Strategis dari Lingkungan Hidup	V-2
5.1.2. Analisis Isu Strategis dari Capaian Indikator TPB	V-3
5.1.3. Analisis Isu Strategis dari KLHS Lainnya	V-4
A. Isu dari KLHS RTRW	V-4
B. Isu dari RPPLH Provinsi	V-5
5.1.4. Isu Strategis dari hasil Konsultasi Publik	V-6
5.1.5. Penetapan Isu Paling Strategis	V-9
5.2. Analisis Proyeksi Capaian Indikator TPB sampai dengan Tahun 2045	
5.3. Analisis Capaian TPB Berdasarkan OPD	V-99
5.4. Analisis Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	V-201
5.4.1. Analisis proyeksi Capaian TPB Pilar Sosial	V-202
5.4.2. Analisis Capaian TPB Pilar Ekonomi	V-203
5.4.3. Analisis Capaian TPB Pilar Lingkungan	V-204
5.4.4. Analisis Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	V-205

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Isu Paling Strategis	VI-1
6.1.1. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke-1 :	

Peningkatan Alih Fungsi Lahan	VI-3
6.1.2. Analisis Skenario Isu Paling Strategis ke-2 : Fluktuasi Debit dan Kualitas sungai	VI-19
6.1.3. Analisis Skenario terkait isu paling strategis ke-3 : Tingginya Intensitas Bencana	VI-22
6.1.4. Analisis Skenario terkait Isu Paling Strategis ke-4 : Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah.....	VI-30
6.1.5. Analisis Skenario terkait isu paling strategis ke-5 : Belum Termanfaatkannya Keanekaragaman Hayati secara Adil dan Berkelanjutan	VI-42
6.1.6. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke-6 : Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut	VI-46
6.2. Analisis Skenario dan Rekomendasi Capaian TPB	VI-50
6.3. Rekomendasi TPB yang tidak selaras/belum dilaksanakan Belum Mencapai Target/tidak ada data	VI-50

BAB VII : KESIMPULAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat	I-9
-----------	--	-----

BAB III KONDISI UMUM DAERAH

Tabel 3.1	Wilayah Administratif Provinsi Sumatera barat	III-2
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Selama 10 Tahun Terakhir di Provinsi Sumatra Barat	III-4
Tabel 3.3	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk	III-5
Tabel 3.4	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat	III-7
Tabel 3.5	Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2045	III-7
Tabel 3.6	Tingkat Kepadatan Penduduk Pada Tahun 2045 di Provinsi Sumatera Barat	III-8
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022	III-10
Tabel 3.8	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	III-12
Tabel 3.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Se Sumatra Tahun 2017-2022 .	III-13
Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Tahun 2021-2022.....	III-14
Tabel 3.11	Pencapaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada RPJMD Tahun 2021-2026	III-16
Tabel 3.12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat.....	III-20
Tabel 3.13	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat	III-21
Tabel 3.14	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatra Barat Tahun 2018-2022 (persen)	III-24
Tabel 3.15	Struktur PDRB Provinsi Sumatera Barat Perbandingan Nasional Dalam Kurun Waktu 2018 s.d. 2022	III-26
Tabel 3.16	Gini Ratio Provinsi di Sumatra dan Indonesia Tahun 2020-2022	III-30
Tabel 3.17	Indeks Gini Ratio Menurut Kab/Kota se Sumatra Barat Tahun 2017-2022	III-31
Tabel 3.18	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	III-33

Tabel 3.19	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022 (Persen)	III-36
Tabel 3.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	III-38
Tabel 3.21	Jumlah Penduduk Miskin Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa) Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)	III-39
Tabel 3.22	Persentase Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (%) Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)	III-40
Tabel 3.23	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2020-2022	III-41
Tabel 3.24	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal di Sumatera Barat (%).....	III-45
Tabel 3.25	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Brat Tahun 2018-2022 (Kondisi Agustus) (%)	III-46
Tabel 3.26	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Kondisi Agustus 2022)	III-50
Tabel 3.27	Ekoregion, Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) Sumatera Barat	III-54
Tabel 3.28	Bentang Alam Pada Wilayah Fungsional Provinsi Sumatera Barat	III-61
Tabel 3.29	Daftar Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Barat	III-66
Tabel 3.30	Daftar Sungai di Provinsi Sumatera Barat	III-67
Tabel 3.31	Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat	III-74
Tabel 3.32	Struktur Geologi di Provinsi Sumatra Barat	III-75
Tabel 3.33	Jenis Kemiringan Lereng di Provinsi Sumatera Barat	III-77
Tabel 3.34	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Berdasarkan Bulan Selama 10 Tahun Terakhir Provinsi Sumatera Barat	III-81
Tabel 3.35	Data Kabupaten/Kota dalam Wilayah Studi Karst di Provinsi Sumatera Barat	III-85
Tabel 3.36	Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Barat	III-87
Tabel 3.37	Luas Hutan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat	III-89
Tabel 3.38	Penghitungan Struktur Komunitas Mangrove	III-90
Tabel 3.39	Penghitungan Struktur Komunitas Mangrove di Batang Gasan	III-92
Tabel 3.40	Penghitungan Struktur Komunitas Spesies Mangrove	III-92
Tabel 3.41	Penghitungan Struktur Komunitas Spesies Mangrove Kab. Mentawai	III-94
Tabel 3.42	Luas Ekosistem Terumbu Karang Provinsi Sumatera Barat	III-97
Tabel 3.43	Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Pesisir Selatan	III-98
Tabel 3.44	Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kota Padang	III-99
Tabel 3.45	Kondisi Penutupan Karang Kabupaten Padang Pariaman	III-101
Tabel 3.46	Kondisi Penutupan Karang Kota Pariaman	III-101

Tabel 3.47	Kondisi Penutupan Kabupaten Agam	III-102
Tabel 3.48	Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Pasaman Barat	III-102
Tabel 3.49	Kondisi Persentase Tutupan Terumbu Karang Hidup Kab. Kepulauan Mentawai	III-103
Tabel 3.50	Luasan Padang Lamun Menurut Kabupaten/Kota	III-104
Tabel 3.51	Kepadatan Lamun <i>Thalassia hemprichii</i> di Kabupaten Pesisir Selatan	III-104
Tabel 3.52	Kepadatan Lamun <i>Thalassia hemprichii</i> di Kota Padang	III-104
Tabel 3.53	Lokasi dan Potensi Padang Lamun di Kbaupaten Pasaman Barat	III-105
Tabel 3.54	Sebaran Padang Lamun di Kabupaten Kepulauan Mentawai	III-105
Tabel 3.55	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air	III-109
Tabel 3.56	Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem) Provinsi Sumatera Barat	III-113
Tabel 3.57	Status Air di Provinsi Sumatera Barat	III-116
Tabel 3.58	Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi Sumatera Barat	III-121
Tabel 3.59	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat (Tahun 2019)	III-124
Tabel 3.60	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat (Tahun 2020)	III-125
Tabel 3.61	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat (Tahun 2021)	III-125
Tabel 3.62	Tutupan Lahan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat	III-127
Tabel 3.63	Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	III-129
Tabel 3.64	Luas PIPPIB Sumatera Barat Priode 1 Tahun 2023	III-129
Tabel 3.65	Penggunaan Kawasan Hutan provinsi Sumatera Barat s.d tahun 2023 ..	III-131
Tabel 3.66	Jenis Pemanfaatan/Pemegang Izin	III-135
Tabel 3.67	Pemanfaatan Kawasan hutan	III-136
Tabel 3.68	Arahan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	III-138
Tabel 3.69	Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031	III-139
Tabel 3.70	Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perKabupaten/Kota	III-139
Tabel 3.71	Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan berdasarkan fungsi	III-140
Tabel 3.72	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2031	III-141
Tabel 3.73	Luas dan Persentasi Kerusakan Ekosistem Gambut Sumatera Barat	III-144
Tabel 3.74	Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	III-144
Tabel 3.75	Aspek dan Kebijakan Pelestarian Keanekaragaman Hayati	III-144
Tabel 3.76	Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030	III-146
Tabel 3.77	Perbandingan Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi	III-148
Tabel 3.78	Persentase Keterpaparan Penduduk Terhadap Resiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	III-156

Tabel 3.79	Daerah Rawan/Potensi Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat	III-162
Tabel 3.80	Tingkat Resiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat	III-166
Tabel 3.81	Tingkat Kerawanan Tsunami Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	III-168
Tabel 3.82	Tingkat Resiko Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat	III-168
Tabel 3.83	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	III-169
Tabel 3.84	Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	III-171
Tabel 3.85	Tingkat Kerawanan Banjir berdasarkan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	III-172
Tabel 3.86	Tingkat resiko Bencana Banjir di provinsi Sumatera Barat	III-174
Tabel 3.87	Tingkat resiko bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera barat	III-175
Tabel 3.88	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di provinsi Sumatera Barat	III-177
Tabel 3.89	Tingkat Resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Sumatera Barat	III-179
Tabel 3.90	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat	III-181
Tabel 3.91	Tingkat Resiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Sumatera Barat	III-182
Tabel 3.92	Potensi Bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Barat	III-184
Tabel 3.93	Tingkat Resiko Bencana kekeringan di Provinsi Sumatera Barat	III-184
Tabel 3.94	Tingkat Kerentanan Bencana Likuefaksi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	III-187
Tabel 3.95	Tingkat Resiko Bencana Likuefaksi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	III-212
Tabel 3.96	Tingkat Kerawanan Bencana Gunung api	
Tabel 3.97	Tingkat Resiko Bencana letusan Gunung api kerinci Provinsi Sumatera Barat	III-213
Tabel 3.98	Tingkat Resiko Bencana Letusan Gunung Api Talamau Provinsi Sumatera Barat	III-215
Tabel 3.99	Tingkat Resiko Bencana Letusan Gunung Api Talang Provinsi Sumatera Barat	III-216
Tabel 3.100	Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Barat	
Tabel 3.101	Skor dan Kelas Indeks Jasa Lingkungan Eksisting di Provinsi Sumatera Barat	III-222
Tabel 3.102	Indeks Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan (KMK) Provinsi Sumatera Barat	III-224
Tabel 3.103	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp Juta)	III-224
Tabel 3.104	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp Juta)	III-206
Tabel 3.105	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp Juta)	III-208

Tabel 3.106	Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024 (Rp Juta)	III-209
Tabel 3.107	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp juta)	III-209
Tabel 3.108	Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB	III-212

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tabel 4.1	Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat	IV-5
Tabel 4.2	Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat	IV-19
Tabel 4.3	Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat	IV-27
Tabel 4.4	Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat	IV-39
Tabel 4.5	Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat	IV-46
Tabel 4.6	Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat	IV-53
Tabel 4.7	Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat	IV-62
Tabel 4.8	Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat	IV-66
Tabel 4.9	Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat	IV-74
Tabel 4.10	Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat	IV-80
Tabel 4.11	Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat	IV-86
Tabel 4.12	Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat	IV-96
Tabel 4.13	Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat	IV-104
Tabel 4.14	Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat	IV-108
Tabel 4.15	Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat	IV-114
Tabel 4.16	Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat	IV-119
Tabel 4.17	Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat	IV-136
Tabel 4.18	Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	IV-136

BAB V ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA OPD

Tabel 5.1	Uji Silang Kondisi Lingkungan Hidup dengan TPB	V-3
Tabel 5.2	Isu Berdasarkan Gap TPB	V-4
Tabel 5.3	Crosscutting TPB dengan Isu KLHS RTRW	V-5
Tabel 5.4	Crosscutting TPB dengan Isu RPPLH	V-6
Tabel 5.5	Penetapan Ranking Isu TPB Prioritas	V-6
Tabel 5.6	TPB Prioritas	V-7
Tabel 5.7	Daftar Isu Panjang	V-7
Tabel 5.8	Isu paling Strategis Keterkaitan dengan Indikator TPB	V-7
Tabel 5.9	Rekapitulasi Status Capaian proyeksi Indikator TPB	V-9
Tabel 5.10	Capaian Indikator Proyeksi Indikator TPB	V-12
	TPB 1 : Tanpa kemiskinan	V-12
	TPB 2 : Tanpa Kelaparan	V-22

	TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	V-28
	TPB 4 : Pendidikan Berkualitas	V-34
	TPB 5 : Kesenjangan gender	V-38
	TPB 6 : Air bersih dan sanitasi layak	V-41
	TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	V-45
	TPB 8 : Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	V-47
	TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	V-53
	TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan	V-56
	TPB 11 : Kota dan pemukiman berkualitas	V-59
	TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	V-66
	TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim	V-70
	TPB 14 : Ekosistem Lautan	V-72
	TPB 15 : Ekosistem daratan	V-75
	TPB 16 : Perdamaian Keadilan dan perkembangan yang Tangguh	V-78
	TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan	V-93
Tabel 5.11	Rekapitulasi Capaian TPB Berdasarkan OPD	V-99
Tabel 5.12	Capaian Proyeksi Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD	V-104
	TPB 1 : Tanpa kemiskinan	V-104
	TPB 2 : Tanpa Kelaparan	V-115
	TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	V-122
	TPB 4 : Pendidikan Berkualitas	V-128
	TPB 5 : Kesenjangan gender	V-132
	TPB 6 : Air bersih dan sanitasi layak	V-137
	TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	V-141
	TPB 8 : Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	V-143
	TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	V-149
	TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan	V-152
	TPB 11 : Kota dan pemukiman berkualitas	V-156
	TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	V-165
	TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim	V-169
	TPB 14 : Ekosistem Lahan	V-171
	TPB 15 : Ekosistem daratan	V-174
	TPB 16 : Perdamaian Keadilan dan perkembangan yang Tangguh	
	TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan	V-195
Tabel 5.13	Rekapitulasi Capaian TPB berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	V-201
Tabel 5.14	Rekapitulasi Proyeksi TPB Berdasarkan Pilar Sosial	V-202
Tabel 5.15	Rekapitulasi Proyek Capaian TPB berdasarkan Pilar Ekonomi	V-203
Tabel 5.16	Rekapitulasi Capaian TPB Pilar Lingkungan	V-204
Tabel 5.17	Rekapitulasi Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Hukum dan Tata	

kelola	V-205
--------------	-------

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2045

Tabel 6.1	Indek Kualitas Lahan (IKL) tahun 2021-2022 se Sumatera Barat	VI-5
Tabel 6.2	Indek Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 s/d tahun 2022	VI-5
Tabel 6.3	Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat tahun 2020	VI-7
Tabel 6.4	Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat tahun 2021	VI-8
Tabel 6.5	Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat tahun 2022	VI-10
Tabel 6.6	Rekapitulasi RHL	VI-17
Tabel 6.7	Rekapitulasi RHL di Kawasan	VI-18
Tabel 6.8	Potensi Dampak Bencana di Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	VI-23
Tabel 6.9	Jumlah Sampah Terkelola berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022	VI-34
Tabel 6.10	Timbulan Sampah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota	VI-36
Tabel 6.11	Proyeksi Timbulan sampah betrdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat	VI-36
Tabel 6.12	Keterkaitan masalah persampahan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)	VI-38
Tabel 6.13	Analisis DPSIR dalam permasalahan persampahan di Provinsi Sumatera barat	VI-41
Tabel 6.14	Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) dan Kawasan Konservasi Perairan nasional (KKPN) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 .	VI-47
Tabel 6.15	Persentasi Kawasan Konservasi Laut Provinsi Sumatera Barat	VI-48
Tabel 6.16	Analisis Skenario Capaian TPB	VI-48
	TPB 1 : Tanpa kemiskinan	VI-48
	TPB 2 : Tanpa Kelaparan	VI-57
	TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	VI-63
	TPB 4 : Pendidikan Berkualitas	VI-68
	TPB 5 : Kesenjangan gender	VI-72
	TPB 6 : Air bersih dan sanitasi layak	VI-77
	TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau	VI-83
	TPB 8 : Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	VI-85
	TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur	VI-90
	TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan	VI-93
	TPB 11 : Kota dan pemukiman berkualitas	VI-96
	TPB 12 : Komsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	VI-102
	TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim	VI-106

TPB 14 : Ekosistem Lahan	VI-108
TPB 15 : Ekosistem daratan	VI-110
TPB 16 : Perdamaian Keadilan dan perkembangan yang Tangguh	VI-112
TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan	VI-124

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Metode Penyelenggaraan KLHS RPJPD	I-9
------------	---	-----

BAB III KARAKTERISTIK WILAYAH

Gambar 3.1.	Peta Administrasi Sumatera Barat	III-3
Gambar 3.2	Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2017-2022	III-11
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2016-2022	III-22
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2022	III-25
Gambar 3.5	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022	III-28
Gambar 3.6	Garis Kemiskinan Antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat, Tahun 2017-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	III-31
Gambar 3.7	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	III-32
Gambar 3.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2018 - September 2022	III-34
Gambar 3.9	Jumlah dan persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat di Sumatera Barat Tahun 2018-2022	III-36
Gambar 3.10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat, Tahun 2018-2022 (Kondisi Februari 2022) (%)	III-37
Gambar 3.11	Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022	III-46
Gambar 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Agustus)	III-47
Gambar 3.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2022	III-48
Gambar 3.14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2016-Agustus 2022 (Persen)	III-48
Gambar 3.15	Peta Wilayah Fungsional Provinsi Sumatera Barat	III-51
Gambar 3.16	Peta Karakteristik Bentang Alami (KBA) Provinsi Sumatera Barat	III-64
Gambar 3.17	Peta Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) Provinsi Sumatera Barat	III-65
Gambar 3.18	Peta DAS Sumatera Barat	III-69
Gambar 3.19	Indeks Pencemaran Air Sungai di Sumatera Barat	III-70

Gambar 3.20	Beban Pencemar Sungai Batang Agam pada Sub DAS Batang Agam	III-71
Gambar 3.21	Indeks Kualitas Air Sumatera Barat.....	III-71
Gambar 3.22	Indeks kualitas air Sumatera barat menurut waktu (2020-2022).	III-72
Gambar 3.23	Indeks Kualitas Air Laut Sumatera Barat Menurut Waktu (2020-2022)	III-73
Gambar 3.24	IKLH Sumatera Barat Menurut Waktu (2020-2022)	III-73
Gambar 3.25	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sumatera Barat	III-78
Gambar 3.26	Peta Topografi Provinsi Sumatera Barat	III-79
Gambar 3.27	Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi Sumatera Barat	III-80
Gambar 3.28	Peta Curah Hujan Provinsi Sumatera Barat	III-82
Gambar 3.29	Grafik Fungsi Kawasan Hutan Pada Kawasan Karst	III-83
Gambar 3.30	Peta Kawasan Karst	III-86
Gambar 3.31	Peta Penggunaan Lahan	III-88
Gambar 3.32	Peta Ekosistem Pesisir Kondisi Tutupan Mangrove	III-96
Gambar 3.33	Pera sebaran Ekosistem Terumbu Karang	III-100
Gambar 3.34	Peta Persebaran Ekosistem Padang Lamun	III-107
Gambar 3.35	Peta DDTLH Air Provinsi Sumatera Barat	III-111
Gambar 3.36	Peta Jasa Lingkungan Ketersediaan air provinsi sumatera barat	
Gambar 3.37	Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat	III-114
Gambar 3.38	Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2025	III-118
Gambar 3.39	Proyeksi Luas Panen dengan Skenario Business as Usual (BAU) .	
Gambar 3.40	Skenario Ketersediaan Padi di Sumatera Barat	III-119
Gambar 3.41	Perbandingan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Barat ...	III-125
Gambar 3.42	Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Barat	III-126
Gambar 3.43	Indeks Tutupan Hutan	III-127
Gambar 3.44	Peta PIPPIB Sumatra Barat Priode 1 Tahun 2023	III-128
Gambar 3.45	Peta Penggunaan Kawasan Hutan di Sumatera Barat	III-129
Gambar 3.46	Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat	III-130
Gambar 3.47	Peta Kerentanan Provinsi Sumatra Barat	III-131
Gambar 3.48	Peta Kerentanan Provinsi Sumatera Barat	III-132
	Indeks Resiko Bencana Antar Waktu di Provinsi Sumatera Barat	
Gambar 3.49	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	III-133
Gambar 3.50	Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	III-134
Gambar 3.51	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir	
Gambar 3.52	Peta Kerentanan Banjir Bandang di Sumatera Barat	III-135
Gambar 3.53	Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat	

Gambar 3.54	Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Sumatera Barat	III-136
Gambar 3.55	Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Sumatera Barat	III-137
Gambar 3.56	Peta Kawasan Kerentanan Bencana Likuefaksi	III-138
Gambar 3.57	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api	III-139
Gambar 3.58	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	III-140
Gambar 3.59	Simulasi Kuadran Keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Tingkat Nasional	III-141
Gambar 3.60	Simulasi Kuadran Keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Tingkat Pulau/Kepulauan	III-142

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Gambar 4.1	Rekapitulasi Capaian TPB Sumatera Barat	IV-2
	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Pilar Pembangunan	IV-III

BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Gambar 5.1	Kerangka Analisis dan Pemingkatan Isu prioritas TPB	V-2
Gambar 5.2	Capaian TPB Berdasarkan penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026	V-201
Gambar 5.3	Proyeksi Capaian TPB Berdasarkan Pilar Sosial	V-202
Gambar 5.4	Proyeksi Capaian TPB Berdasarkan Pilar Ekonomi	V-203
Gambar 5.5	Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Lingkungan	V-204
Gambar 5.6	Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola Capaian TPB Proyeksi tahun 2026 berdasarkan Pilar	V-205

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Gambar 6.1	Alur Fikir Mengatasi permasalahan isu paling strategis	VI-1
Gambar 6.2	Indeks Kualitas lahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022	VI-6
Gambar 6.3	Luas lahan kritis	VI-12
Gambar 6.4	Pertumbuhan luas lahan kritis	VI-13
Gambar 6.5	Luas lahan sangat kritis	VI-13
Gambar 6.6	Pertumbuhan Luas Lahan Sangat Kritis	VI-14
Gambar 6.7	Peta Akses Lahan Terbuka	VI-15
Gambar 6.8	Pemulihan lahan akses terbuka bekas kegiatan tambang emas ilegal dengan tanaman kaliandra bekerjasama dengan PT.Semen Padang	VI-19

Gambar 6.9	Indeks kualitas air (IKA) Prov.Sumatera Barat	VI-21
Gambar 6.10	Persentase jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di provinsi sumatera barat	VI-32
Gambar 6.11	Persentase sampah terkelola di Provinsi Sumatera Barat	VI-35
Gambar 6.12	Skenario capaian persentasi sampah tertangani di Provinsi Sumatera Barat	VI-38
Gambar 6.13	Pemanfaatan spesies jenis liar di Indonesia	VI-44
Gambar 6.14	Luas Perhutanan Sosial di Sumatera Barat	VI-44
Gambar 6.15	Peta Distribusi perhutanan sosial di Sumatera Barat	VI-45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Tim Pokja KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

Lampiran 2 Kompetensi Tenaga Ahli

Lampiran 3 Pendokumentasian KLHS

Lampiran 4 Panjaminan Kualitas KLHS RPJPD

Lampiran 5 KAK

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan. RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Penyusunan RPJPD merupakan upaya nyata perwujudan pembangunan daerah yang menjadi bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045. RPJPD periode 2005-2025 akan segera berakhir bertepatan dengan momen Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, setiap bakal calon kepala daerah harus menyusun visi dan misi sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD yang baru (periode 2025-2045).

Pada tahun 2024 seluruh Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Serentak Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

dias, Menteri Dalam Negeri melalui surat tersebut menegaskan bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah wajib melakukan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun perubahannya, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun perubahannya.

Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 dan mengingat masa berlaku Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 juga sudah hampir selesai kurun waktunya, maka sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, dan kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Maka, berdasarkan hal tersebut Provinsi Sumatera Barat dipandang wajib untuk menyusun dan melaksanakan KLHS RPJPD pada Tahun 2023 ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Lebih lanjut hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pada pasal 2 huruf a bahwa KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau evaluasi salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 juga disampaikan bahwa laporan KLHS RPJPD dimanfaatkan untuk Penyusunan Dokumen RPJPD.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah adalah suatu proses yang esensial untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup. Di tengah tantangan perubahan iklim dan masalah lingkungan global, daerah-daerah perlu berperan aktif dalam mengurangi dampak negatif pembangunan. KLHS berperan dalam membantu daerah untuk merespons perubahan iklim dan menjaga ekosistem lokal. KLHS juga membantu mengidentifikasi sumber daya alam yang harus



dilestarikan, seperti hutan, air, dan lahan pertanian. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya melibatkan aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. KLHS memungkinkan daerah untuk mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap kualitas hidup penduduknya. Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, penyusunan KLHS harus diintegrasikan secara mendalam dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu sebabnya KLHS bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga sebuah langkah bijak dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 yaitu terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 .
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat.
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan KBA dan KVA Peta Wilayah Ekoregion Indonesia.
 17. Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/5112/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD.
22. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 660.11.2/754/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045.

Adapun tujuan dari penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan masukan guna:

1. Memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat khususnya rencana teknokratik telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kualitas RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam memberikan kontribusi terhadap materi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilakukan melalui:
 - a. Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang meliputi penyusunan profil kondisi umum daerah dan daya dukung lingkungan, analisis pencapaian TPB dan analisis peran stakeholder pembangunan dalam perwujudan TPB;
 - b. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan keluaran alternatif proyeksi kondisi tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga



meneluarkan perumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategi daerah;

- c. Peningkatkan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan cakupan analisis yang dilakukan dalam pembuatan laporan KLHS RPJPD yaitu:

1. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, yang meliputi penyajian kondisi umum daerah, capaian indikator TPB, dan pembagian peran. Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
2. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

1.5. Sistematika Pembuatan KLHS RPJPD

Sistematika Pembuatan KLHS RPJPD merupakan tata urutan/mechanisme dalam pembuatan KLHS RPJPD terdiri dari :

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJPD

Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJPD dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Tim pembuat KLHS RPJPD dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Tim pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJPD. Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) melibatkan Akademisi dan pihak terkait lainnya. Untuk surat keputusan pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-214-2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.



2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tahap ini Tim Penyusun melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

- a. Kondisi umum daerah yang paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
- b. Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
- c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tahap ini Tim Pembuat KLHS melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan batasan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJPD yaitu Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- a. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
- b. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan dengan memperhatikan:
 - pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Alternatif proyeksi menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Isu strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



- d. Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- e. Sasaran strategis berupa kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

Hasil tahap penyusunan skenario pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), dimana tim pembuat KLHS menyampaikan hasil penyusunan arah kebijakan pendukung TPB untuk dapat diketahui, didukung dan disetujui oleh publik.

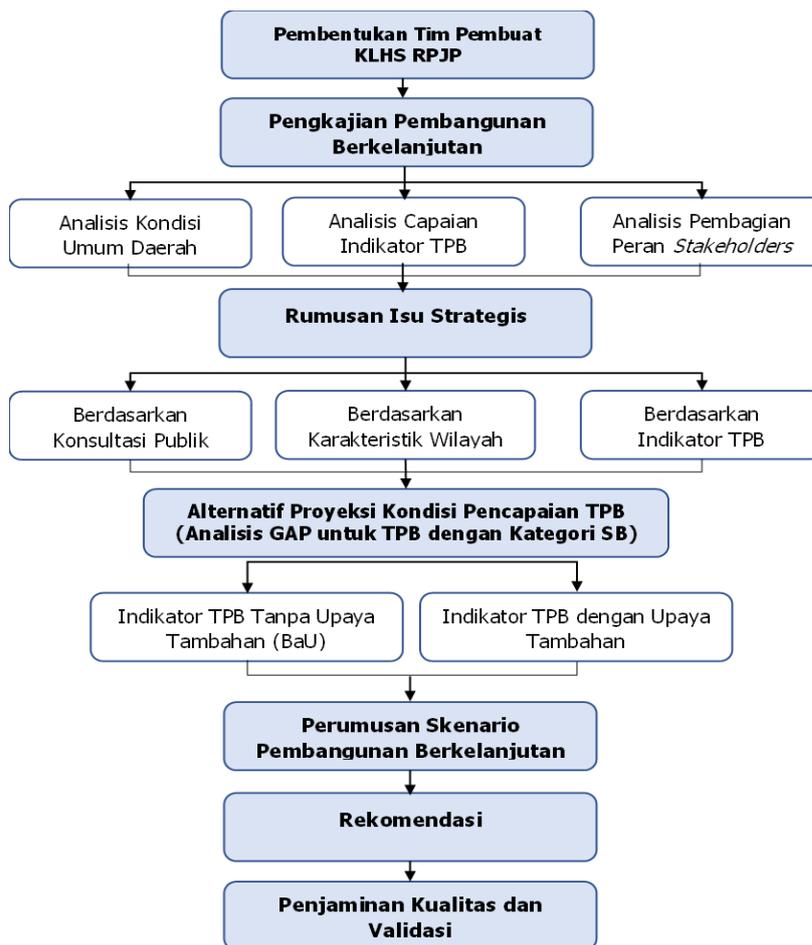
4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi

- a. Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJPD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJPD dan kualitas substansi KLHS RPJPD.
- b. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJPD dibuktikan dengan:
 - ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD;
 - jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJPD;
 - berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - laporan KLHS RPJPD.
- c. Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJPD pada isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJPD ditanda tangani oleh kepala daerah.
- e. Laporan KLHS RPJPD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada gambar berikut dapat dilihat alur penyelenggaraan KLHS RPJPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



Gambar 1.1. Metode Penyelenggaraan KLHS RPJPD

Untuk lingkup kegiatan ini juga tertuang dalam jadwal kegiatan yang terlampir pada Tabel 1.1 berikut ini. Dan juga dilakukan pertemuan tim dengan agenda pertemuan awal penjelasan proses KLHS, penyusunan jadwal kegiatan dan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini terdokumentasi pada Lampiran 3 bagian A, B dan bagian C.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun 2023													
		Bulan ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat														
II	Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan														



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Kegiatan	Tahun 2023											
		Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konsultasi publik												
	Kondisi umum daerah												
	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan												
	Pembagian Peran												
III	Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan												
	Alternatif proyeksi kondisi TPB												
	Perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Daerah												
	Konsultasi Publik												
IV	Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi												

Sumber : Analisis Tim Pokja 2023

1.6. Sistematika Pelaporan KLHS RPJPD

Laporan Akhir pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat ini, terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan penjelasan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika pelaporan dari dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

BAB II : DASAR TEORI

Berisi penjelasan tentang teori yang digunakan pada laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : KONDISI UMUM DAERAH

Berisi penjelasan tentang gambaran kondisi secara umum wilayah kajian baik itu kondisi fisik wilayah, demografis, kondisi keuangan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Sumatera Barat, peran Filantropi serta peran pemangku kepentingan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Berisi penjelasan tentang hasil capaian indikator pembangunan berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat terhadap indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan serta dikelompokkan menurut pilar dan status capaian masing-masing indikator yaitu capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut kategori capaian dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut pilar.

BAB V : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Berisikan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD) serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB yang menjadi tugas, pokok dan fungsi OPD. Dalam bab ini dijabarkan capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD; analisis capaian indikator berdasarkan DDDT dan proporsi anggaran; serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB.

BAB VI : ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2045

Berisikan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari DDDT serta ketercapaian terhadap TPB. Pada bab ini terdiri dari : alternatif skenario dan rekomendasi DDDT daerah; alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMD (sebelumnya), serta indikator yang belum memiliki data; alternatif skenario tanpa upaya tambahan (BAU-business as usual) yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJPD (sebelumnya). Rekomendasi untuk RPJPD yang didasarkan rumusan isu strategis yang disusun. Rekomendasi ditujukan untuk misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu tambahan rekomendasi yang ditujukan untuk keseluruhan dokumen RPJPD untuk beberapa bagian termasuk latar belakang, kondisi umum serta isu strategis Provinsi Sumatera Barat.



BAB VII : KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dari laporan KLHS RPJPD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis DDDT daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta kesimpulan rekomendasi bagi Provinsi Sumatera Barat

Bab II

DASAR TEORI

2.1. Teori Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah menurut Kindleberger dan Herrick, perkembangan didefinisikan sebagai semua perbaikan dalam kesejahteraan materi masyarakat. Perkembangan berikatan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya melalui perubahan struktur ekonomi misalnya dari pertanian ke industri dan selanjutnya jasa (Nurzaman, 2012). Sehingga, perkembangan ekonomi merupakan sebab dan juga akibat dari adanya perkembangan teknologi dan berdampak pada kehidupan sosial pada sisi tata ruang wilayah atau kota. Menurut Hirschman dalam Nurzaman (2012) perkembangan adalah proses perubahan dari satu tipe ekonomi menuju ke tipe ekonomi yang lain yang juga lebih baik, sedangkan dalam pelaksanaannya banyak ditemukan bahwa perkembangan wilayah yang tidak seimbang sehingga. Hirschman berpendapat bahwa terjadinya ketidakseimbangan tersebut terjadi dalam banyak aspek diantaranya yaitu memilih urutan investasi, ketidakseimbangan dalam pembangunan prasarana dan perkembangan sektor produksi langsung. Perkembangan wilayah juga dapat diukur dari jumlah dan ketersediaan sarana yang dapat mendukung kegiatan penduduk diwilayah tersebut. Semakin berkembang atau maju suatu wilayah, maka akan semakin banyak jumlah sarana penunjang kegiatan bagi penduduk di wilayah tersebut (Bakri, Ali dan Natalia, 2016).

Faktor – Faktor Perkembangan Wilayah Menurut Hill dan Williams dalam Husain (2008) untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perkembangan wilayah, diperlukan variabel yang cukup banyak macamnya yang berfungsi untuk menilai suatu daerah. Berkaitan dengan analisis variabel-variabel ekonomi perlu ditambahkan indikator-indikator yang mengacu pada Kebutuhan Fisik Minimum (Minimum Physical Needs), yang terdiri dari tiga area kunci indikator sosial yang mempengaruhi nilai perkembangan suatu daerah yaitu kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan. Adapun aspek-aspek didalam perkembangan wilayah, diantara lainnya;

a. Aspek Ekonomi

Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinu merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi



perkembangan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang dapat diukur dan obyektif, adanya perluasan tenaga kerja, modal, serta volume perdagangan dan konsumsi. Perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga (Jhingan 1983, dalam Husain, 2008).

b. Aspek sosial

Faktor manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkembangan wilayah yang menekankan pada efisiensi. Dalam mengetahui perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial, kemiskinan (poverty) merupakan indikator yang digunakan dalam menilai perkembangan suatu wilayah (Hill and Williams 1995, dalam Husain, 2008). Perkembangan wilayah diiringi pula dengan perkembangan pendidikan. Melalui pendidikan yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Infrastruktur

Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Grigg dalam Husain, 2008).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah, perkembangan pola, dan struktur wilayah atau kota secara umum sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Branch, 1995). Faktor fisik internal terdiri dari:

- a. Keadaan geografis, yakni pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Kota pantai misalnya akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dengan perkembangan awal di sekitar pelabuhan. Oleh karenanya, kota demikian memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai simpul distribusi jalur transportasi pergerakan manusia dan barang.
- b. Tapak (site), merujuk pada topografi kota/ wilayah. Sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan



- demikian pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal.
- c. Fungsi kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota/ wilayah yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan, akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal.
 - d. Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota/ wilayah, karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakter fisik dan masyarakat kota.
 - e. Unsur-unsur umum lainnya seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih, dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Faktor fisik internal yang mempengaruhi perkembangan pola dan struktur wilayah atau kota yaitu fungsi primer dan sekunder kota yang tidak terlepas dan keterkaitan dengan daerah lain.

Pengembangan wilayah dapat terjadi dan erat kaitannya dengan potensi dan faktor pendukung yang ada pada wilayah tersebut. Menurut Winaryo dan Sugiri (2012), faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Dikuatkan dengan pendapat menurut Nachrowi dan Suhandonjo (1999) dalam Kuncoro (2014) terdapat tiga komponen wilayah yang harus diperhatikan dalam pengembangan wilayah yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Sedangkan menurut pendapat, Djakapermana (2010) mengatakan bahwa banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam kesisteman pemanfaatan ruang wilayah, yaitu sumber daya alam, sumber daya buatan, lingkungan hidup, serta komponen pendukung dan pembentuk wilayah lainnya. Dilihat dari kedua pendapat tersebut, sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan komponen-komponen utama dalam upaya pengembangan wilayah yang dibantu oleh sumber daya buatan dan teknologi.

Sumber daya buatan menurut Rustiadi et.al, (2011) menjelaskan bahwa sumber daya buatan dalam upaya pengembangan wilayah merupakan suatu bentuk infrastruktur pendukung dalam kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan. Selain dari ketiga elemen tersebut, menurut Turohman (2014), pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang disusun sebelumnya, sehingga, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen utama dalam pengembangan wilayah terdiri atas empat elemen yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan atau infrastruktur, dan kebijakan daerah.



a. Sumber daya Alam (SDA)

Sumber daya alam menurut Rustiadi et.al (2011) secara umum diklasifikasikan atas dua macam, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resource). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat exhaustible (sumberdaya strok) seperti logam, minyak bumi, mineral, batu bara, dan gas adalah sumber daya dengan supply terbatas, setiap eksploitas sumberdayanya akan menurunkan cadangan dan ketersediaannya. Sedangkan sumber daya yang dapat diperbaharui merupakan sumberdaya yang supply nya dapat mengalami regenerasi secara terus-menerus baik secara biologi maupun non biologis. Sumber daya alam merupakan potensi suatu wilayah atau kawasan yang berasal dari lahan, laut, hutan, minyak dan lain sebagainya yang memiliki sifat mendasar. Masing-masing daerah atau wilayah memiliki potensi kawasan yakni potensi sumber daya alam yang menonjol. Sumber daya alam tersebut biasanya menjadi sumber dari sektor-sektor basis dan menjadi penting untuk dikembangkan.

Menurut Djakapermana (2010), pengelolaan sumber daya lahan yang tidak hati-hati untuk kepentingan sesaat dan tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seringkali membawa kerusakan prasarana, bangunan, dan fisik lingkungan serta bencana bagi masyarakat. Sumber daya alam dalam upaya pengembangan wilayah dilihat dari aspek pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan lahan sebaik mungkin. Menurut Djakapermana (2010), aspek lingkungan dan ekonomi secara bersinergi memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Nilai lingkungan tidak hanya bergantung pada nilai pasar pemanfaatan langsung saja, melainkan juga bergantung pada seluruh fungsi sumberdaya lain yang menghasilkan nilai secara ekonomis setinggi-tingginya. Beberapa daerah memiliki sumberdaya dan ketersediaan lahan yang sesuai dengan budidaya kawasannya.

Menurut Rustiadi et.al (2011), ada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya kelautan dan ada juga beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya hutan atau minyaknya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing daerah memiliki sumberdaya alam yang berbeda-beda dan memiliki ketersediaan menonjol yang berbeda-beda pula. Sumber daya alam seringkali dikaitkan dengan potensi lahan suatu kawasan, lahan dianggap sebagai sumber daya alam yang paling dominan dalam sistem ekologi dan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Djakapermana (2010) bahwa, pemanfaatan ekonomi harus dikur dengan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan suatu kawasan, dengan memperhatikan fungsi



lingkungan yang terdiri atas fungsi intrinsik yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekstrinsik yakni terdiri atas fungsi sosial, ekonomi, dan arsitektural.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penggerak suatu kegiatan dalam upaya pengembangan. Sumberdaya manusia dinilai berdasarkan kualitas pekerja dalam suatu kegiatan. Seperti yang diungkapkan oleh Rustiadi et.al (2011) bahwa jumlah dan kualitas pekerja yang meningkat dan jika terlibat sebagai faktor produksi dengan menghasilkan output yang baik akan mempercepat pembangunan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka perlu adanya arahan pengembangan pada elemen sumberdaya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja dalam mempercepat pengembangan suatu wilayah. Pada sumber daya manusia dalam upaya pengembangan wilayah, terdapat beberapa indikator yang harus dicermati, yaitu ditinjau dari tingkat pendidikan dan banyaknya pekerja yang bekerja pada kegiatan dalam sektor-sektor tertentu.

Menurut Juairini (2015), rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan kawasan dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan, dalam hal ini diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaku usaha dan untuk menarik lebih banyak generasi muda berkimpung dalam usaha tersebut. Sumber daya manusia menjadi tolak ukur penggerak dalam kegiatan, hal ini ditandai dengan pengaruh banyaknya jumlah penduduk, termasuk struktur umur angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Rustiadi et.al (2011) bahwa, jumlah dan komposisi penduduk merupakan bagian dalam demografi yang terdiri atas fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Pada dasarnya menurut UNDP (1995) dalam Rustiadi et.al (2011) pembangunan manusia dianggap sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Pembangunan manusia juga terdiri atas pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi, dan sosial hingga pada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif. Sehingga, berdasarkan pendapat tersebut, Rustiadi et.al (2011) membagi paradigma pembangunan manusia terdiri atas dua sisi yaitu:

1. Pertama, formasi kapabilitas manusia seperti taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan.
2. Kedua, pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik.



Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan pembangunan manusia sebagai sumberdaya pengembangan wilayah. Manusia tidak hanya dianggap sebagai tenaga kerja namun menjadi tolak ukur yang tidak tunggal, hal ini dapat diketahui dengan banyaknya aspek yang menjadi penggerak, yakni kesehatan, pendidikan, keterampilan, jumlah penduduk, dan umur yang dikaitkan dengan kemampuan produktivitas, kultural, sosial, ekonomi, dan politik.

c. Sumber Daya Buatan (Infrastruktur)

Sumber daya buatan dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sosiokultur, dimana salah satu infrastruktur yang terpenting adalah jalan. Menurut Rustiadi et.al (2011) nilai suatu lahan dalam infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kesuburan (*fertility*) dan *sustainability/ capability* tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor lokasi terutama yang berkaitan dengan *aksesibilitas*. Sedangkan, sosiokultur merupakan kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri pada suatu organisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada upaya pengembangan wilayah, infrastruktur menjadi salah satu elemen penting. Yang mana, infrastruktur menjadi suatu sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kegiatannya baik kebutuhan ekonomi maupun sosial melalui penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik yang berkaitan lainnya.

Menurut Kodoatie (2005) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi - fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitas tujuan - tujuan ekonomi dan sosial. Sementara itu, menurut Hanafie (2010) dalam Harahap (2011) adanya infrastruktur ekonomi yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur esensial bagi agribisnis dan perekonomian pedesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar, komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Kemudian, berdasarkan penelitian Harahap (2011), terdapat infrastuktur dasar yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat pertanian yaitu infrastuktur transportasi, infrastruktur produksi pertanian, dan infrastuktur pemasaran pertanian.



2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang No 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pemerintah daerah pada tahun 2023 memulai menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang mana RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 UU nomor 25 Tahun 2004 sehingga RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

Tahapan penyusunan RPJPD, adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan;

Persiapan penyusunan RPJPD, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. Orientasi mengenai RPJPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, dan kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Penyusunan rancangan awal RPJPD, mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. Analisis permasalahan pembangunan daerah;
- c. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. Perumusan visi dan misi daerah;



- f. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- g. KLHS;

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis daerah;
- d. Visi dan misi daerah;
- e. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- f. Penutup.

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah gerakan untuk memelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan. Aksi ini merupakan komitmen global dan nasional yang mencakup 17 tujuan. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Untuk memudahkan pelaksanaan, 17 Tujuan TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu (1). Pilar pembangunan sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2). Pilar pembangunan ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; (3). Pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, dan (4). Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya



Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pemutakhiran sasaran nasional TPB serta memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB di tingkat daerah, serta mendorong skema pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan TPB

2.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan wilayah. KLHS memuat kajian antara lain: (a). Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (b). Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; (c). Kinerja layanan/jasa ekosistem; (d). Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; (e). Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f). Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS menjadi dasar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan suatu Kebijakan, Rencana maupun Program.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Sedangkan KLHS RPJPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, dijelaskan bahwa KLHS RPJPD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD.

Mekanisme KLHS, sesuai Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa secara teknis KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: (1) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (2) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan (3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan mekanisme KLHS RPJPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yang diterangkan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Pembuatan KLHS RPJPD dilakukan dengan mekanisme: (1) pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD; (2) pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; (3) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD.



Muatan KLHS, sesuai Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa KLHS memuat kajian antara lain: (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (3) kinerja layanan/jasa ekosistem; (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, muatan KLHS terdapat dalam Pasal 17 yang memuat: gambaran umum kondisi daerah, berupa: (a) aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah; (b) aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; (c) aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan (d) aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan

2.5. Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH)

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan di Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya pada pasal 12 dimana menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Selain itu dalam pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan juga bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , Rencana Panjang Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada pasal 19 juga menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Dengan kata lain Daya Dukung



dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menjadi inti dari dari kegiatan KLHS dan RPPLH atau lebih jauh lagi menjadi *core business* dari Kelembagaan lingkungan hidup.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, terkait dengan RPJPD, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2009, pada Pasal 10 bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM. Namun pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

2.5.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut PP nomor 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

Risiko lingkungan didefinisikan sebagai sebuah kesempatan/pelempuan suatu proses alam atau suatu kejadian alam akan menghasilkan dampak negatif kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan. Bahasan terkait dengan risiko lingkungan biasanya dipisahkan menjadi dua bahasan, yaitu peluang atau probabilitas kejadian dan dampak yang mungkin ditimbulkan. (Disarikan dari James S. Reichard.2011.*Environmental Geology*.)

Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 47 UU No 32 Tahun 2009 ayat (2) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Sementara ayat (2) huruf b, menjelaskan bahwa "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Lebih lanjut pada ayat (2) huruf c, dijelaskan bahwa "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran



informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Nomor: 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (2) huruf b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

2.5.3. Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup

Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Atau dengan kata lain, Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein et.al., 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu dan ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian

Jasa ekosistem adalah segala keuntungan yang didapatkan dari suatu ekosistem, khususnya yang terkait dengan kesejahteraan manusia (Woodruff dan Bendor, 2016). Barier (1991) dalam Djajadiningrat, ST dkk., (2011) mengelompokkan manfaat ekosistem alami secara umum ke dalam kategori nilai guna (*use value*) dan nilai bukan guna (*non use value*). Nilai guna adalah nilai yang timbul dari penggunaan barang dan jasa ekosistem (Contanza dkk., 1998) sedangkan nilai bukan guna diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari kesenangan terhadap suatu barang dan tidak berhubungan dengan manfaat lain yang diperoleh atas barang tersebut. Manfaat atau keuntungan yang manusia dapatkan dari suatu ekosistem dan yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia lebih dikenal dengan istilah jasa ekosistem (Woodruff dan Bendor, 2016)

Kinerja layanan/ jasa ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam manfaat, yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millennium Ecosystem Assessment (2005).



Untuk penilaian DDDT ekosistem, Millennium Ecosystem Assessment (MEA), (2005) mendefinisikan 4 (empat) kategori dasar jasa ekosistem, yaitu :

- a. Jasa penyediaan (*provisioning*); menyediakan pangan, air bersih, serat kayu, dan bahan bakar;
- b. Jasa pengaturan (*regulating*); mengatur tingkat iklim, tata air dan banjir, penyakit, dan pemurnian air.
- c. Jasa budaya (*cultural*); menyediakan potensi estetika, ekoturisme, dan ruang hidup;
- d. Jasa pendukung (*supporting*); mendukung daur ulang unsur hara, pembentukan tanah dan produksi primer;

Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem tersebut, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terdiri dari dua konsep input data yang meliputi landuse/landcover dan ekoregion dan satu konsep output yaitu jasa ekosistem.

2.5.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Tertuang di Pasal 33 Ayat 3, "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Semua sudah ada aturan yang dibuat untuk kita selalu belajar dari aturan. Dr. Said Sa'ad Marthon (2007 : Hal : 67) dalam bukunya Ekonomi Islam Di tengah krisis ekonomi global memaparkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pertumbuhan ekonomi, umat islam disyariatkan untuk memanfaatkan bumi seoptimal mungkin. Keoptimalan tentunya dapat bermuara dari kesejahteraan dari setiap umat manusia yang diwujudkan dengan indikator kesejahteraan kita bersama. Tidak terciptanya disparitas yang jauh antara pendapatan setiap individu. Jika kita menelusuri lebih dalam, masih banyak essensi dari alam yang dapat kita pelajari agar kita menjadi bijaksana untuk bertindak. Alam memberi kesejahteraan jika kita efisien mengelola dan akan efektif hasil yang kita dapat sesuai dengan target yang kita inginkan, akhirnya

Sumber daya alam (SDA) menurut beberapa sumber merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai bahan untuk proses produksi yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sedangkan secara yudiris yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 bahwa sumber daya alam adalah unsur



lingkungan hidup terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati pembentuk suatu ekosistem.

Pemanfaatan sumber daya yang efisien, tepat sasaran dan sekaligus menentukan indikator peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan target penghematan biaya produksi. Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana dan berwawasan lingkungan harus didorong menjadi arus utama (mainstream) dalam sistem pembangunan nasional, sehingga sumber daya alam yang terbatas dan lingkungan yang semakin rentan tetap dapat memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk Indonesia dengan pertumbuhan populasinya yang kian tahun terus mengalami peningkatan. Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan.

Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam ;

- a. Pemanfaatan sumber daya alam nabati, antara lain : sebagai sumber bahan pangan, sumber sandang (seperti: kapas) dan sebagai tanaman hias.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam hewani, antara lain: sebagai sumber bahan pangan dan sandang, sebagai benda-benda hasil seni dan kerajinan tangan manusia, dan meningkatkan nilai kehidupan dan nilai budaya manusia.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam barang tambang, antara lain : a) minyak bumi, digunakan untuk bahan bakar kendaraan, tenaga penggerak mesin pabrik, dan penerangan tanah; b) gas alam, digunakan untuk bahan bakar rumah tangga dan industri; serta c) batu bara, digunakan untuk bahan bakar pemberi tenaga dan bahan mentah untuk cat, obat-obatan, wangi-wangian, bahan peledak dan lain sebagainya.

Sumber daya alam tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan sesuai peraturan-peraturan yang mengikat semua pihak agar dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang Panjang.

2.5.5. Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi



sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil.

Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi. Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.

2.5.6. Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati/ Biodiversity

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan, serangga, burung dan mikro organisme) dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Pengertian atau definisi keanekaragaman hayati menurut Medrizam dkk, (2004) dalam Abidin et al., (2020), Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup serta antara mereka dengan lingkungannya. Menurut Widjaja et al., (2014), Keanekaragaman hayati dapat diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, binatang, dan mikroba.

Keanekaragaman hayati (kehati) terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu : 1) tingkat genetika, 2) tingkat spesies dan 3) tingkat ekosistem. Polusi dan pencemaran lingkungan, pembangunan perkotaan dan industrialisasi, limbah, penggundulan hutan, dan beberapa aktivitas manusia lainnya terhadap lingkungan semakin membuat ketidakseimbangan alam yang memicu munculnya potensi yang mengganggu kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Hal ini juga dikaitkan dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan emisi gas rumah kaca yang dapat membuat suhu permukaan bumi semakin hangat.

Semakin hangatnya suhu permukaan bumi menyebabkan sejumlah stok es di kutub mencair, lalu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut. Hal ini berpotensi menenggelamkan sejumlah wilayah padat penduduk di permukaan bumi. Pemanasan global juga menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mendorong semakin sering terjadinya bencana alam seperti badai dan tsunami, banjir, dan kekeringan



2.6. Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat

2.6.1. Perkembangan Pusat Kegiatan

Berdasarkan letak, Provinsi Sumatera Barat adalah gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), serta pelabuhan laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 Kabupaten dan 2 Kota yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing wilayah tersebut adalah: 1) Kota Padang, 2) Kota Pariaman, 3) Kabupaten Pesisir Selatan, 4) Kabupaten Agam, 5) Kabupaten Pasaman Barat, 6) Kabupaten Padang Pariaman, dan 7) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Program perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Pengembangan dan penataan PKN ; Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung- Pariaman (Palapa).
- b. Pengembangan PKW ; Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Muara Siberut, Kota Payakumbuh dan Tuapejat.
- c. Pengembangan PKL ; Pulau Punjung, Tapan, Simpang Empat dan Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Aro Suka, Painan, Padang Aro, Lubuk Basung, Muara Sijunjung, Batusangkar, Sari Lamak, dan Kambang.

PKN, PKW, dan PKL perlu didukung oleh ketersediaan serta fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.

1. PKN

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah pelabuhan laut internasional, bandar udara pengumpul, terminal regional tipe A, pasar induk antar wilayah, rumah sakit umum kelas A, perguruan tinggi, serta prasarana perumahan permukiman yang meliputi jaringan air minum lintas wilayah, tempat pembuangan akhir sampah regional, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

2. PKW

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap PKW terdiri dari terminal penumpang tipe B dan atau, pelabuhan udara pengumpan atau pelabuhan laut nasional, pasar regional, rumah sakit umum kelas B, perguruan tinggi serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum lintas wilayah, tempat pembuangan akhir sampah



regional, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

3. PKL

Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki setiap PKL (Pulau Punjung, Tapan, Simpang Empat dan Lubuk Sikaping, Padang Panjang, Aro Suka, Painan, Padang Aro, Lubuk Basung, Muara Sijunjung, Batusangkar, Sari Lamak, Kambang) terdiri dari terminal regional tipe C dan atau, pelabuhan laut regional/lokal, pasar lokal, rumah sakit umum kelas C, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan air minum, tempat pembuangan akhir sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

2.7. Sejarah Pembentukan Provinsi Sumatera Barat

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958, Ibu Kota Provinsi dipindahkan ke Padang.

Tanggal 31 Juli 1958 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau" yang kemudian di cabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

2.8. Perkembangan dan Interaksi Antar Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tahapan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rostow terdiri dari lima tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari 1) tahap masyarakat tadisional, 2)



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

tahap prasyarat lepas landas, 3) tahap lepas landas, 4) tahap menuju kematangan dan 5) tahap konsumsi tinggi.

Berdasarkan tahapan pembangunan Rostow tersebut, Provinsi Sumatera Barat masih berada dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat masih dalam tahapan prasarat lepas landas. Hal tersebut dapat kita lihat pada beberapa wilayah di Sumatera Barat masih menggunakan teknologi konvensional dalam peningkatan hasil produksi pertaniannya belum menggunakan teknologi moderen. Beberapa wilayah lainnya inovasi teknologi dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian sudah meningkat dan industri-industri manufaktur juga mulai berkembang. Beberapa wilayah memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi, sedangkan wilayah lainnya masih memiliki pendapatan perkapita yang rendah. Tahapan ini merupakan masa transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan (Jhingan 2016).

Berdasarkan data pendapatan per-kapita masyarakat dapat kita lihat beberapa wilayah memiliki pendapatan per-kapita yang lebih rendah dari pendapatan per-kapita provinsi. Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan per-kapita yang lebih rendah dari pendapatan per-kapita Provinsi adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan dan Pasaman Barat.

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan perlu dilakukan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi wilayah yang bersangkutan (Sumpeno 2011). Pengembangan kawasan atau wilayah merupakan gambaran tentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat.

Interaksi wilayah dengan jumlah utilitas perkotaan dapat di lihat ada keterkaitan jumlah utilitas perkotaan dengan jumlah penduduk sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Martines dan Masron (2020). Salah satu alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal adalah kelengkapan infrastruktur di suatu wilayah. Hal ini dapat kita lihat Kabupaten Dharmasraya yang memiliki jumlah utilitas perkotaan yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Hal tersebut juga terjadi untuk wilayah Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang lemah dengan pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Pariaman yang lebih kecil dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

terhadap pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah utilitas perkotaan yang ada di Kabupaten Pasaman lebih sedikit dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Kelengkapan infrastruktur suatu wilayah menjadi alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal.

Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat berdasarkan variabel utilitas perkotaan adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan dalam kelas kuat adalah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan lemah adalah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar.

Interaksi wilayah variabel jumlah penduduk memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Hasil analisis interaksi wilayah variabel utilitas perkotaan memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Kabupaten/ kota tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat karena pada wilayah tersebut keberadaan utilitas perkotaan yang masih sangat minim, hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Interaksi wilayah dengan pendapatan per-kapita memperlihatkan kekuatan hubungan lemah dan sangat lemah dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Sawahlunto. Pada wilayah-wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian pada wilayah tersebut agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Bab III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1. Kondis Geografis, Sosial Budaya dan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Geografis

3.1.1.1. Wilayah Perencanaan

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98°36' BT - 101°53' BT dan 0°54' LU - 3°30' LS dan dilalui garis katulistiwa (garis lintang nol derajat/garis equator) yang berada di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas daratan Provinsi Sumatera Barat ± 4.211.954,20 Ha dan luas perairan (laut) ± 5.288.242,00 Ha dengan total panjang garis pantai ± 2.285,00 km. Wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	:	Provinsi Riau dan Jambi
Sebelah Selatan	:	Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat	:	Samudera Hindia dan Jambi

Berdasarkan letak, Provinsi Sumatera Barat adalah gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), serta Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, 179 Kecamatan dengan 259 Kelurahan dan 760 Nagari. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 kabupaten dan 2 kota yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing wilayah tersebut adalah: 1) Kota Padang, 2) Kota Pariaman, 3) Kabupaten Pesisir Selatan, 4) Kabupaten Agam, 5) Kabupaten Pasaman Barat, 6) Kabupaten Padang Pariaman, dan 7) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tabel berikut dapat dilihat luas kota dan kabupaten administrasi Provinsi Sumatera Barat.



Secara administratif pemerintahan, Provinsi Sumatera Barat di bagi menjadi 19 kabupaten/kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu 601.135 Ha dan jumlah kecamatan terbanyak terdapat pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu 17 kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat

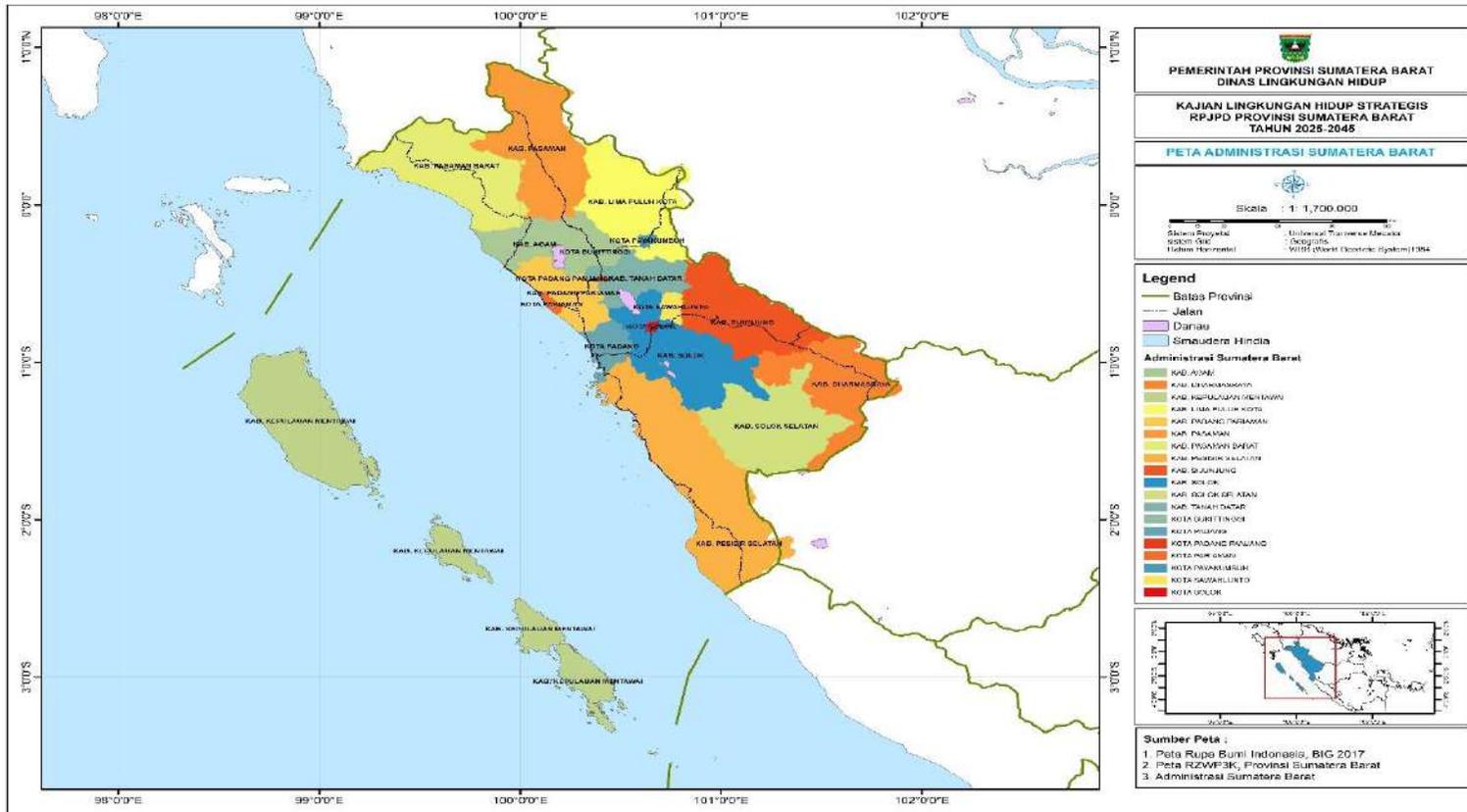
No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Jumlah Kecamatan
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	598.322,2	10
2	Kabupaten Pesisir Selatan	604.564,9	15
3	Kabupaten Solok	359.040,4	14
4	Kabupaten Sijunjung	315.058,0	8
5	Kabupaten Tanah Datar	137.718,9	14
6	Kabupaten Padang Pariaman	134.226,6	17
7	Kabupaten Agam	222.627,0	16
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	327.340,5	13
9	Kabupaten Pasaman	390.244,4	12
10	Kabupaten Solok Selatan	328.214,4	7
11	Kabupaten Dharmasraya	292.092,5	11
12	Kabupaten Pasaman Barat	385.299,3	11
13	Kota Padang	69.433,7	11
14	Kota Solok	5.872,0	2
15	Kota Sawahlunto	23.194,5	4
16	Kota Padang Panjang	2.356,0	2
17	Kota Bukittinggi	2.417,3	3
18	Kota Payakumbuh	7.455,2	5
19	Kota Pariaman	6.476,7	4
	Provinsi Sumatera Barat	4.211.954,2	179

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2024

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 3.1.



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



Gambar 3.1. Peta Administrasi Sumatera Barat

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, BIG 2017, Peta RZWP3K Provinsi Sumbar dan Administrasi Sumatera Barat 202



3.1.2. Kondisi Sosial Budaya

3.1.2.1 Demografi

Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 5.580.232 jiwa dengan rincian berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 2.810.407 jiwa dan perempuan 2.769.825 jiwa dengan sex ratio 101,47 dan kepadatan penduduk 132,82 per km². Rincian jumlah penduduk selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Selama 10 Tahun Terakhir di Provinsi Sumatera Barat

No	Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Sex ratio
1	2012	2.455.782	2.501.937	4.957.719	117,21	98,16
2	2013	2.515.942	2.550.534	5.066.476	119,78	98,64
3	2014	2.550.392	2.581.490	5.131.882	121,33	98,80
4	2015	2.584.192	2.612.097	5.196.289	122,85	98,93
5	2016	2.617.273	2.642.255	5.259.528	124,35	99,05
6	2017	2.649.599	2.671.890	5.321.489	125,81	99,17
7	2018	2.681.113	2.700.964	5.382.077	127,38	99,27
8	2019	2.711.772	2.729.425	5.441.197	129,51	99,35
9	2020	2.786.360	2.748.112	5.534.472	131,73	101,39
10	2021	2.810.407	2.769.825	5.580.232	132,82	101,47
11	2022	2 841 802	2 798 827	5.640.629	131,73	101,54

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2012-2022



Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitu juga dengan kepadatan penduduk dan sex ratio juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3.3. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Perkembangan Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (r) %
		2015 (Jiwa)	2020 (Jiwa)	2021 (Jiwa)	2022 (Jiwa)	
1	Kab. Kep. Mentawai	85.295	87.623	88.389	89.401	1,15
2	Kab. Pesisir Selatan	450.186	504.418	509.618	561.518	1,36
3	Kab. Solok	363.684	391.497	394.237	397.892	0,92
4	Kab. Sijunjung	222.512	235.045	237.313	240.317	1,28
5	Kab. Tanah Datar	344.828	371.704	373.693	376.276	0,70
6	Kab. Padang Pariaman	406.076	430.626	433.018	436.129	0,73
7	Kab. Agam	476.881	529.138	534.202	540.905	1,26
8	Kab. Lima Puluh Kota	368.985	383.525	385.634	388.375	0,72
9	Kab. Pasaman	269.883	299.851	303.103	307.425	1,44
10	Kab. Solok Selatan	159.796	182.027	184.854	188.649	2,06
11	Kab. Dharmasraya	223.112	228.591	231.217	234.713	1,52
12	Kab. Pasaman Barat	410.307	431.672	436.313	442.479	1,42



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	Perkembangan Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (r) %
		2015 (Jiwa)	2020 (Jiwa)	2021 (Jiwa)	2022 (Jiwa)	
1	Kota Padang	902.413	909.040	913.448	919.145	0,63
2	Kota Solok	66.106	73.438	74.469	75.850	1,86
3	Kota Sawahlunto	60.186	65.138	65.687	66.413	1,11
4	Kota Padang Panjang	50.883	56.311	56.971	57.850	1,55
5	Kota Bukittinggi	122.621	121.028	121.588	122.311	0,60
6	Kota Payakumbuh	127.820	139.576	141.184	143.325	1,53
7	Kota Pariaman	84.709	94.284	95.294	96.719	1,50
	Jumlah	5.196.283	5.534.532	5.580.232	5.640.629	1,09

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2012-2022

Berdasarkan data penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis proyeksi penduduk hingga tahun 2045. Proyeksi penduduk menggunakan metode geometri. Dalam metode proyeksi ini, pertumbuhan penduduk diasumsikan mengikuti deret geometri/Pertumbuhan konstan untuk jangka waktu tertentu. Adapun rumus proyeksi penduduk dengan metode geometri sebagai berikut:

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

Keterangan:

P_n = Proyeksi penduduk tahun tertentu

P_o = Penduduk awal tahun

1 = konstanta

r = angka pertumbuhan penduduk

n = rentang tahun

Berdasarkan rumus tersebut, maka hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 5.640.629 jiwa, tahun 2026 merupakan tahun terakhir capaian RAD TPB Sumatera Barat adalah 5.939.173 jiwa, tahun 2030 masa capaian TBP target nasional adalah 6.205.457 jiwa, tahun 2035 adalah 6.557.406, Tahun 2040 adalah 6.931.964 dan tahun 2045 adalah 7.330.733 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Penduduk (r)	2022	2026	2030	2035	2040	2045
		%	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)
Kabupaten								
1	Kep. Mentawai	1,15	89.401	93.585	97.965	103.729	109.832	116.294
2	Pesisir Selatan	1,36	561.518	592.693	625.600	669.313	716.082	766.118
3	Solok	0,92	397.892	412.738	428.137	448.197	469.197	491.181
4	Sijunjung	1,28	240.317	252.859	266.057	283.526	302.142	321.980
5	Tanah Datar	0,70	376.276	386.923	397.871	411.993	426.616	441.758
6	Padang Pariaman	0,73	436.129	449.004	462.259	479.380	497.135	515.547
7	Agam	1,26	540.905	568.686	597.894	636.523	677.647	721.428
8	Lima Puluh Kota	0,72	388.375	399.682	411.317	426.340	441.910	458.050
9	Pasaman	1,44	307.425	325.519	344.678	370.220	397.654	427.122
10	Solok Selatan	2,06	188.649	204.681	222.075	245.910	272.304	301.531
11	Dharmasraya	1,52	234.713	249.312	264.820	285.567	307.940	332.066
12	Pasaman Barat	1,42	442.479	468.152	495.315	531.495	570.319	611.978
Kota								
1	Padang	0,63	919.145	942.527	966.504	997.335	1.029.150	1.061.979
2	Solok	1,86	75.850	81.653	87.899	96.384	105.687	115.888
3	Sawahlunto	1,11	66.413	69.411	72.545	76.661	81.012	85.609
4	Padang Panjang	1,55	57.850	61.521	65.425	70.655	76.303	82.403
5	Bukittinggi	0,60	122.311	125.273	128.307	132.202	136.216	140.352
6	Payakumbuh	1,53	143.325	152.300	161.837	174.602	188.374	203.232
7	Pariaman	1,50	96.719	102.654	108.953	117.374	126.445	136.217
	Jumlah	1,09	5.640.629	5.939.173	6.205.457	6.557.406	6.931.964	7.330.733

Sumber : Tim Pokja KLHS RPJPD Sumatera Barat 2025 - 2045, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah proyeksi penduduk pada tahun 2046 sebesar 7,3 juta, dan distribusi penduduk terbesar berada pada Kota Padang yaitu sebesar 1,06 juta penduduk.

Tabel 3.5. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2045

No	Tahun	Proyeksi Penduduk (jiwa)		
		Tinggi	Moderat	Rendah
1	2012	4.957.719	4.957.719	4.957.719
2	2013	5.066.476	5.066.476	5.066.476
3	2014	5.131.882	5.131.882	5.131.882
4	2015	5.196.289	5.196.289	5.196.289
5	2016	5.259.528	5.259.528	5.259.528



No	Tahun	Proyeksi Penduduk (jiwa)		
		Tinggi	Moderat	Rendah
6	2017	5.321.489	5.321.489	5.321.489
7	2018	5.382.077	5.382.077	5.382.077
8	2019	5.441.197	5.441.197	5.441.197
9	2020	5.534.472	5.534.472	5.534.472
10	2021	5.580.232	5.580.232	5.580.232
11	2022	5.640.629	5.640.629	5.640.629
12	2023	5.713.893	5.713.893	5.701.010
13	2026	5.933.685	5.939.173	5.886.060
14	2030	6.226.741	6.205.457	6.142.169
15	2035	6.593.060	6.557.406	6.478.034
16	2040	6.959.380	6.931.964	6.832.263
17	2045	8.086.905	7.330.733	7.205.863

Sumber : Tim Pokja KLHS RPJPD Sumatera Barat 2025 - 2045, 2023

Untuk mengukur tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat digunakan asumsi berdasarkan hasil analisa, adapun tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah:

- Kepadatan sangat tinggi : > 1.500 Jiwa/km²
- Kepadatan tinggi : 1.001 – 1.500 jiwa/km²
- Kepadatan sedang : 501 – 1.000 jiwa/km²
- Kepadatan rendah : 0 - 500 jiwa/km²

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 3.6. Tingkat Kepadatan Penduduk pada Tahun 2045 di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas	Jumlah	Kepadatan	Tingkat Kepadatan
		Kabupaten (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	
A. Kabupaten					
1	Pesisir Selatan	5.749,89	116.294	20	Rendah
2	Solok	3.738,00	766.118	204	Rendah
3	Sijunjung	3.130,80	491.181	156	Rendah
4	Tanah Datar	1.336,00	321.980	241	Rendah
5	Padang Pariaman	1.328,79	441.758	332	Rendah
6	Agam	2.232,30	515.547	230	Rendah



No	Kabupaten/Kota	Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Tingkat Kepadatan
		(Km2)	(Jiwa)	(Jiwa)	
7	Lima Puluh Kota	3.354,30	721.428	215	Rendah
8	Pasaman	3.957,63	458.050	115	Rendah
9	Kepulauan Mentawai	6.011,35	427.122	71	Rendah
10	Dharmasraya	3.023,25	301.531	99	Rendah
11	Solok Selatan	3.346,20	332.066	99	Rendah
12	Pasaman Barat	3.887,77	611.978	157	Rendah
B. Kota					
1	Padang	694,96	1.061.979	1.528	Sangat Tinggi
2	Solok	57,64	115.888	2010	Sangat Tinggi
3	Sawahlunto	273,45	85.609	313	Rendah
4	Padang Panjang	23,00	82.403	3.582	Sangat Tinggi
5	Bukittinggi	25,24	140.352	5.560	Sangat Tinggi
6	Payakumbuh	80,43	203.232	2.526	Sangat Tinggi
7	Pariaman	73,36	136.217	1.856	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Pokja KLHS RPJPD Sumatera Barat 2025 - 2045, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2045 tingkat kepadatan penduduk di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh sangat tinggi, dan Kota Pariaman sangat tinggi, serta kabupaten/kota lainnya berada pada tingkat kepadatan rendah. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat.



Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	234.756	223.842	458.598
2	5-9	231.957	222.683	454.640
3	10-14	247.063	232.704	479.767
4	15-19	254.311	236.915	491.226
5	20-24	248.368	232.153	480.518
6	25-29	241.685	224.984	466.669
7	30-34	226.205	215.041	441.246
8	35-39	210.988	202.099	413.087
9	40-44	194.878	190.496	385.374
10	45-49	177.050	175.669	352.719
11	50-54	155.766	159.199	314.965
12	55-59	133.366	138.961	272.327
13	60-64	108.389	117.542	225.931
14	65-69	81.940	92.780	174.720
15	70-74	51.173	62.232	113.405
16	75+	43.910	71.527	115.437
	Jumlah	2.841.802	2.798.827	5.640.629

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat didominasi pada usia produktif (15-64) tahun yaitu sebanyak 3.798.814 jiwa.

3.1.2.2. Tingkat Pendidikan

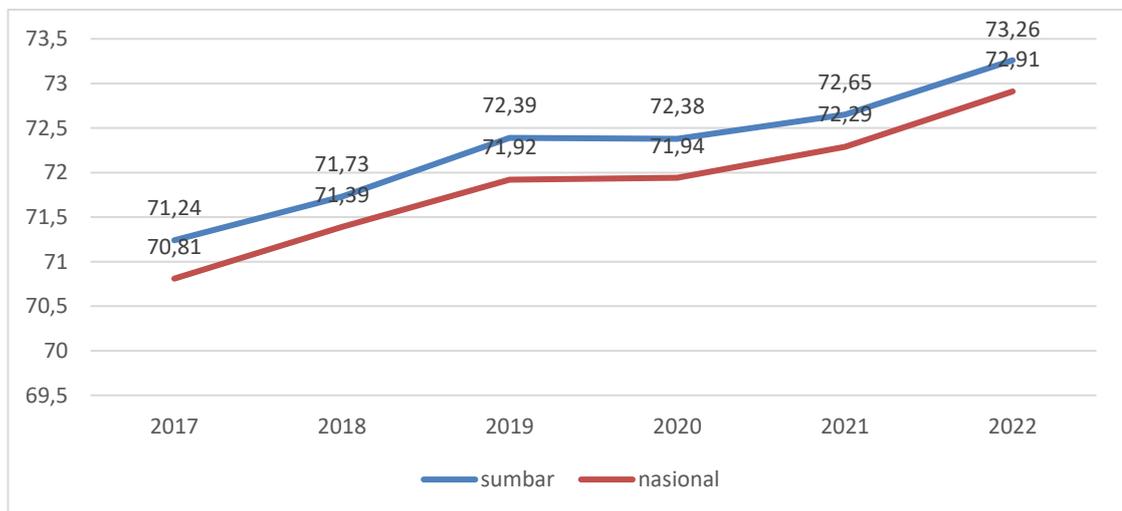
Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 mencapai 73,26, meningkat 0,61 poin (0,84 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72.65). Data dari tahun 2016 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat relatif meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas rata-rata Nasional.

Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan



hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk hidup hingga 69,90 tahun, lebih lama 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 14,10 tahun. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 14,09 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,07 tahun menjadi 9,18 tahun pada tahun 2022. Pada dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat dari 10,79 juta tahun 2021 menjadi 11,13 juta pada tahun 2022.

Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.2. Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2017-2022



Tabel 3.8. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	KOMPONEN IPM	TAHUN									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		NAS	SUM BAR								
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	69,01	71,2	69,31	68,78	71,06	69,01	71,2	69,31	69,90	71,85
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,95	12,91	14,01	13,94	12,85	13,95	12,91	14,01	14,10	13,10
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,76	8,17	8,92	8,72	8,1	8,76	8,17	8,92	9,18	8,69
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta/Org/Tahun)	10.638	11.059	10.950	10.306	10.664	10.638	11.059	10.950	11.130	11.479
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		71,73	71,39	72,39	71,24	70,81	71,73	71,39	72,39	72,91	73,26
PERTUMBUHAN IPM		0,69	0,82	0,92	0,72	0,90	0,69	0,82	0,92	0,61	0,62

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Jika diperhatikan dari capaian komponen pembentuknya, pada umumnya semua komponen pembentuk IPM menunjukkan capaian yang lebih baik daripada rata-rata Nasional kecuali untuk umur harapan hidup saat lahir dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2022, capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Barat baru mencapai 9,18 tahun, artinya hanya sampai tamat SMP. Capaian ini sedikit lebih baik dari Rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,69 tahun. Faktor yang mendukung meningkatnya lama sekolah antara lain dapat ditekannya angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah diberbagai daerah.

Selain itu capaian Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat pada Tahun 2022 sebesar 14,10 tahun juga jauh lebih baik dibandingkan capaian nasional yang pada tahun yang sama mencapai 13,10 tahun. Ini menunjukkan adanya optimisme masyarakat di Sumatera Barat akan kondisi pendidikan kedepannya.



Namun capaian Umur Harapan Hidup di Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 69,90 tahun lebih rendah daripada capaian nasional sebesar 71,85 tahun. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pola hidup sehat.

Begitupun dengan capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Sumatera Barat pada tahun 2022 yang mencapai Rp.11.130 juta perkapita/tahun juga lebih rendah dengan capaian di nasional yang sebesar Rp.11.479 juta perkapita/tahun.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM pada Provinsi lainnya di Pulau Sumatera maka capaian IPM Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori tinggi dan berada diposisi 3 (tiga) setelah Kepulauan Riau dan Riau, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Sumatera Tahun 2017-2022

PROVINSI/NASIONAL	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80
2. Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
3. Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
4. Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
5. Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14
6. Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90
7. Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16
8. Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45
9. Kep.Bangka Belitung	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24
10. Kep.Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46
NASIONAL	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : Dokumen RKPD Prov. SUMBAR, 2023

Peningkatan capaian IPM Sumatera Barat juga ditopang dengan kenaikan IPM pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, IPM tertinggi di Sumatera Barat yakni Kota Padang sebesar 83.29 dan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 62.19, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2022

KAB/KOTA	UHH		RLS		HLS		PENGELUARAN RIIIL		IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kab. Kep.Mentawai	64.73	64,93	7.20	7,48	12.89	12,89	6.321	6 567	61.35	62,19
Kab. Pesisir Selatan	70.96	71,25	8.27	8,43	13.33	13,35	9.270	9 686	70.03	70,84
Kab. Solok	68.79	69,19	7.87	7,89	13.05	13,30	10.215	10 539	69.24	70,02
Kab. Sijunjung	66.36	66,70	8.12	8,30	12.38	12,64	10.389	10 582	67.86	68,69
Kab. Tanah Datar	70.12	70,49	8.62	8,90	14.34	14,59	10.616	10 695	72.46	73,29
Kab. Padang Pariaman	68.97	69,34	7.88	8,16	13.68	13,93	11.050	11 159	70.76	71,63
Kab. Agam	72.53	72,89	8.97	8,98	13.88	13,88	9.662	10 171	72.57	73,29
Kab. Lima Puluh Kota	69.84	70,08	8.07	8,08	13.30	13,40	9.668	10 035	69.68	70,28
Kab. Pasaman	67.59	67,96	8.10	8,11	12.81	13,05	8.440	8 619	66.77	67,41
Kab. Solok Selatan	68.01	68,38	8.32	8,41	12.72	12,73	10.367	10 560	69.23	69,71
Kab. Dharmasraya	71.53	71,90	8.55	8,56	12.44	12,51	11.324	11 650	71.76	72,30
Kab. Pasaman Barat	67.94	68,25	8.27	8,55	13.68	13,69	9.089	9 381	68.76	69,57
Kota Padang	73.69	73,93	11.59	11,60	16.53	16,54	14.540	14 889	82.90	83,29
Kota Solok	73.73	74,06	11.04	11,35	14.33	14,34	12.168	12 515	78.41	79,23
Kota Sawahlunto	70.10	70,40	10.32	10,43	13.18	13,42	10.195	10 537	72.88	73,73
Kota Padang Panjang	72.82	73,02	11.63	11,92	15.07	15,07	10.754	11 153	77.97	78,78
Kota Bukittinggi	74.50	74,82	11.34	11,63	14.98	14,99	13.331	13 633	80.70	81,42
Kota Payakumbuh	73.84	74,14	10.81	10,82	14.27	14,29	13.317	13 687	79.08	79,53
Kota Pariaman	70.38	70,67	10.67	10,78	14.55	14,61	12.818	13 150	77.07	77,65
Prov. Sumatera Barat	69.59	69,90	9.07	9,18	14.09	14,10	10.790	11 130	72.65	73,26

Sumber : Dokumen RKPDP Prov. SUmbar, 2023

Sejak tahun 2018, Kota Bukittinggi mengikuti Kota Padang menjadi kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$) menjadi sebanyak 12, dengan status "sedang" (capaian $60 \leq IPM < 70$) sebanyak 5, dan tidak ada lagi kabupaten/ kota dengan status "rendah" ($IPM < 60$).



3.1.2.3. Kesehatan

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas tersebut dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan. Peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan kepada tindakan promotif dan preventif sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif. Perkembangan capaian layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target IKD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Pencapaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ HB Sa'anin Padang)	1:875	1:875	1:875	1/727	1:875	1:875	1:875	1:875
Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	97,4	97,4	97,8	97,8	98,2	98,5	98,9	100
Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	77,3	71,72	78,5	75,33	80	82	84	86
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	14,5	10,2	13	9,7	11,5	10	8,5	7
Akses Keluarga	83	82,24	86	85,19	89	92	95	100



Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)								
Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	70	53,9	75	87,19	80	85	90	95
Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	82,48	82,32	86,1	86,16	88,2	90,3	92,4	95

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Pada RPJMD Tahun 2021-2026, indikator urusan kesehatan ditetapkan antara lain adalah Rasio daya tampung rumah sakit rujukan, yang merupakan perbandingan jumlah tempat tidur perawatan terhadap 1000 penduduk dalam suatu wilayah dan satuan waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah ketersediaan tempat tidur terhadap daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk dan untuk penambahan pembangunan rumah sakit baru. Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 1:875, dapat tercapai sebesar 1:727.

Untuk indikator Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit daerah yang menjadi kewenangan provinsi (RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD Pariaman, RSUD M. Natsir). Tingkat akreditasi yang dimaksud adalah tingkat akreditasi paripurna yang dinilai oleh lembaga/komisi akreditasi rumah sakit yang berwenang. Dari target capaian sebesar 100 % pada tahun 2022, maka dapat tercapai 100%.

Untuk melihat Pelayanan yang diberikan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, dilakukan penghitungan Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Indikator ini ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan renkon bencana dan mengetahui jumlah korban dan daerah terdampak untuk meminimiliasi jumlah korban akibat bencana.

Hasil capaian tahun 2022 adalah sebesar 100% dari rencana target sebesar 100 %. Pencapaian ini didorong karena indicator kinerja ini merupakan SPM Provinsi dan harus di dukung dengan anggaran yang maksimal.

Selanjutnya juga terdapat indicator Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang dinilai dari Jumlah



orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Dengan capaian ini diharapkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar dan terlindunginya kelompok berisiko. Hasil capaian tahun 2022 adalah sebesar 100 %, sesuai dengan Target 100 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena hal ini merupakan SPM Provinsi yang didukung dengan alokasi anggaran yang cukup besar dan pada tahun 2022, KLB dimaksud adalah adanya pandemic covid 19 yang juga menjadi prioritas darurat nasional dan banyaknya dukungan dalam penanganannya baik dari Pemerintah Pusat dan Swasta.

Untuk indikator persentase Puskesmas yang terakreditasi dilakukan untuk melihat mutu dan kualitas Puskesmas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna, untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 97,8%, dengan realisasi sebesar 97,8% pencapaian ini disebabkan karena adanya motivasi dari Puskesmas untuk meraih akreditasi.

Selanjutnya target persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes dilakukan untuk melihat Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan oleh tim minimal 2 (dua) orang yang terdiri dari dokter dan bidan atau dokter dan perawat atau 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Untuk Tahun 2022, capaian adalah sebesar 75,33%, dan target yang ditetapkan adalah 78,5%, capaian ini tidak bisa dicapai disebabkan karena masih ada persalinan yang ditolong oleh non tenaga Kesehatan seperti yang dilakukan oleh dukun beranak.

Pada persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang dilihat dari ibu hamil dengan resiko kekurangan energi kronik (KEK) yang ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, capaian tahun 2022 adalah sebesar 9,7%. Pencapaian ini disebabkan karena penjarangan pada Ibu hamil oleh tenaga Kesehatan dan kader kesehatan. Penghitungan ini sangat penting karena mempengaruhi menurunkan resiko balita stunting dan mencegah resiko kematian pada ibu dan bayi.

Untuk melihat Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), dilakukan dengan menilai keluarga yang memiliki akses terhadap Fasilitas sanitasi dasar (jamban sehat) yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri/bersama. Tujuan indicator ini dihitung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penyakit yang



berbasis lingkungan khususnya sanitasi. Untuk Tahun 2022, capaian target adalah sebesar 85,19%, dan tidak mencapai sesuai dengan Target yang ditetapkan yakni sebesar 86 % yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena belum optimalnya dukungan dari beberapa Kabupaten/Kota dalam sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan terhadap pembangunan jamban, belum optimalnya pendataan masyarakat terhadap pembangunan jamban dan adanya program yang tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, terkait persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan yang ditujukan untuk terbentuknya Herd Immunity pada populasi dan tidak terjadinya penyakit PD3I (Penyakit Dapat Di Cegah Dengan Imunisasi). Untuk Tahun 2022, capaian sebesar 87,19%, dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75%. Pencapaian ini disebabkan karena adanya koordinasi dengan lintas sector yakni kepala daerah, dinas Pendidikan, kementerian agama, MUI, PKK dalam mnedgedukasi masyarakat dalam Imunisasi, adapaun permasalahan dalam meningkatkan IDL ini adalah adanya Isu negatif terkait kehalalan imunisasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi terutama bagi tumbuh kemang balita, kurangnya pencatatan akuratnya pencatatan terumana di posyandu, banyaknya isu yang beredar di sosial media bahwa imunisasi bukan merupakan hal yang penting, serta minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%), yang dilihat dari penduduk yang mempunyai Jaminan Kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP), Pekerja Penerima Upah (PPU). Adapun capaian Tahun 2022 adalah sebesar 86,18 %, dari target sebesar 86,10% dari yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena adanya beberapa kabupaten/kota yang telah mencapai taget Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2022, yakni menjadi 8 (delapan) Kabupaten/kota, meningkatnya Penerima Bantuan Mandiri dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam jaminan Kesehatan.

Selain pencapaian target tersebut, Angka capaian penemuan dan pengobatan TBC Sumatera Barat juga masih berada dibawah target nasional. Pada tahun 2020, capaian penemuan dan pengobatan kasus TBC sebesar 27%. Capaian ini tidak mencapai target nasional sebesar 75%. Pada tahun 2021 capaian penemuan dan pengobatan TBC sebesar 36%, masih dibawah target nasional sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 49%, namun masih dibawah target nasional yakni sebesar 90%. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi



semua pihak untuk meningkatkan capaian penemuan dan pengobatan TBC di wilayah Sumatera Barat.

3.1.2.4. Aspek Pelayanan Air Minum

A. Jaringan Air Bersih

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan (SDGs).

Berikut persentase rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2022.

Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Prov.Sumbar

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak			
		2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	51.99	35.83	55.46	63,21
2	Kab. Pesisir Selatan	80.16	87.08	76.23	85,83
3	Kab. Solok	81.90	79.08	78.09	81,02
4	Kab. Sijunjung	68.68	61.23	64.12	70,27
5	Kab. Tanah Datar	84.62	85.63	86.50	87,80
6	Kab. Padang Pariaman	85.55	88.73	86.09	88,22
7	Kab. Agam	83.45	88.04	87.46	92,80
8	Kab. Lima Puluh Kota	76.23	74.75	68.93	71,33
9	Kab. Pasaman	70.10	70.98	82.57	75,77
10	Kab. Solok Selatan	69.02	77.04	81.01	77,46
11	Kab. Dharmasraya	58.85	69.93	70.27	69,61
12	Kab. Pasaman Barat	63.84	69.56	81.47	77,76
13	Kota Padang	96.76	98.51	95.52	97,93
14	Kota Solok	96.18	97.83	96.55	97,17
15	Kota Sawahlunto	85.61	91.25	88.27	92,75
16	Kota Padang Panjang	97.44	96.58	98.45	98,09
17	Kota Bukittinggi	98.69	100.00	97.05	98,56



No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak			
		2019	2020	2021	2022
18	Kota Payakumbuh	98.90	98.76	99.43	98,83
19	Kota Pariaman	95.04	95.61	97.69	95,46
	Provinsi Sumatera Barat	81.44	83.37	83.40	85,23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak diperoleh data Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 mengalami peningkatan hingga tahun 2022 yaitu sebesar 85,23%. Dengan kabupaten/kota yang memiliki persentase tertinggi terhadap akses sumber air minum layak adalah Kota Payakumbuh sebesar 98,83 %, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 63,21%.

Memantau akses penduduk terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Indikator ini merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No 6 (enam) mengenai air bersih dan sanitasi, nomor indikator 6.1.1. (a) dengan target pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum dan terjangkau bagi semua dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak adalah meningkat menjadi 100%.

B. Akses Sanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu



Tabel 3.13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Kab/Kota Prov.Sumbar

No	Kabupaten/Kota	Persentase					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Kep. Mentawai	30,07	42,97	51,29	61,73	71,05	69,09
2	Kabupaten Pesisir Selatan	60,53	61,53	66,93	71,51	71,4	73,68
3	Kabupaten Solok	31	43,7	44,29	50,36	47,63	57,28
4	Kabupaten Sijunjung	45,9	51,54	68,69	64,95	72,63	74,14
5	Kabupaten Tanah Datar	30,85	42,77	61,06	62,86	53,73	57,49
6	Kabupaten Padang Pariaman	41,17	40,02	50,58	59,72	55,86	59,76
7	Kabupaten Agam	61,16	67,55	67,19	71,58	77,25	74,84
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	39,99	42,68	47,02	53,86	55,69	64,19
9	Kabupaten Pasaman	26,19	28,49	40,24	40,9	45,26	42,81
10	Kabupaten Solok Selatan	39,47	49,38	51,14	59,17	58,57	55,33
11	Kabupaten Dhamasraya	56,8	65,4	71,27	84,16	81,71	81,09
12	Kabupaten Pasaman Barat	38,09	46,22	61,77	63,65	70,28	68,98
13	Kota Padang	76,14	74,51	79,98	82,5	80,13	76,81
14	Kota Solok	80,92	85,86	85,63	89,19	91,4	92,47
15	Kota Sawahlunto	77,95	82,68	81,98	80,77	86,45	86,86
16	Kota Padang Panjang	72,12	70,33	71,59	72,15	73,01	77,42
17	Kota Bukittinggi	89,64	91,21	86,32	90,25	89,93	85,09
18	Kota Payakumbuh	80,42	80,25	84,35	87,75	89,49	87,10
19	Kota Pariaman	75,4	78,06	77,71	81,81	79,56	82,91
	Sumatera Barat	52,77	57,17	63,98	68,11	68,68	69,27

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Berdasarkan data diatas persentase akses layanan sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan, artinya sudah ada peningkatan serta kesadaran masyarakat dalam aspek Kesehatan terutama peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022 kabupaten/kota yang memiliki tingkat akses layanan sanitasi tertinggi adalah Kota Payakumbuh dengan persentase 87,10 %. Sedangkan kabupaten/kota terendah adalah Kabupaten Pasaman dengan persentase 42,81 %

Akses sanitasi layak merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 6 (enam) mengenai air bersih dan sanitasi dengan nomor indikator

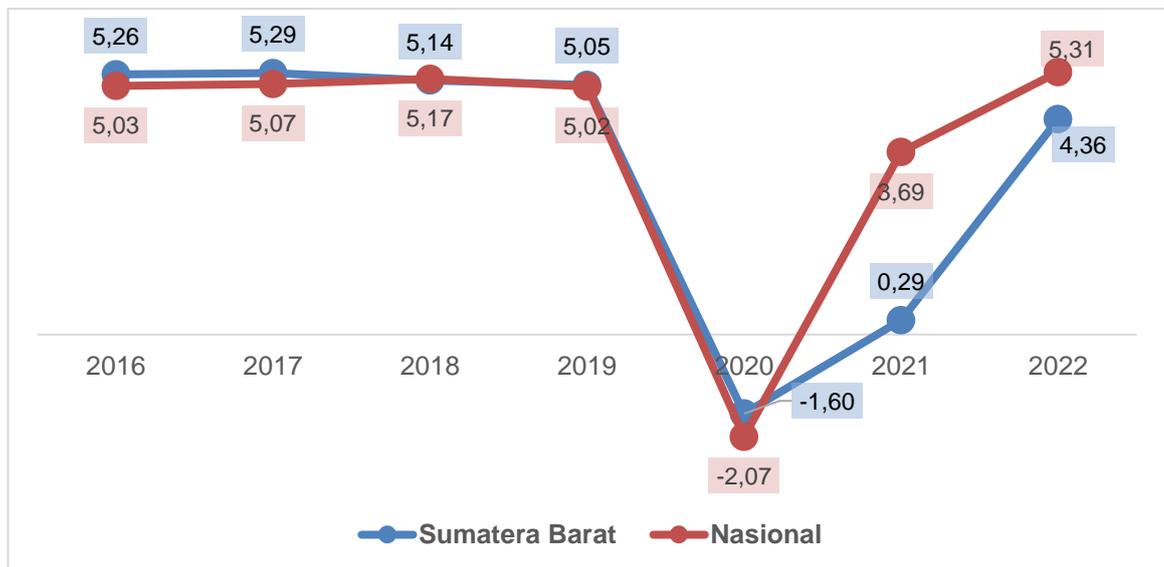


6.2.1.(b) dengan target tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan dengan target meningkat menjadi 100%.

3.1.3. Kondisi Ekonomi

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni tahun 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat stagnan cenderung melambat dan menurun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% dan terus mengalami penurunan hingga hanya puncaknya mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,6% akibat dampak dari adanya pandemi covid 19. Dengan dilakukannya upaya pemulihan ekonomi secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun pertumbuhan ekonomi nasional dan juga Sumatera Barat mengalami rebound dengan kondisi yang lebih baik dengan pertumbuhan yang signifikan. Dan dengan dilakukannya program-program pemulihan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2022, maka rebound pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dapat terjaga dan ditingkatkan laju pertumbuhannya. Hal ini terlihat pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69% sedangkan Sumatera Barat sebesar 0,29% dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,31% dan Sumatera Barat sebesar 4,36%.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Pertumbuhan Ekonomi di 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2022 seluruhnya mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yakni pada Kabupaten Padang Pariaman dengan capaian 6,87%, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 4,94%, Kota Bukittinggi dengan capaian sebesar 4,68%. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi terendah yakni Kabupaten Sijunjung dengan capaian 3,95%, diikuti dengan Kota Sawahlunto sebesar 3,98 dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 4,02% dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 4,02%.

Tabel 3.14. Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Persen)

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	4,91	4,76	-1.85	2.88	4.94
2	Kab. Pesisir Selatan	5,35	4,81	-1.11	3.37	4.02
3	Kab. Solok	5,22	5,07	-1.14	3.31	4.31
4	Kab. Sijunjung	5,09	4,83	-1.10	3.15	3.95
5	Kab. Tanah Datar	5,07	5,01	-1.12	3.30	4.20
6	Kab. Padang Pariaman	5,46	2,51	-10.46	2.18	6.87
7	Kab. Agam	5,26	4,81	-1.37	3.70	4.21
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,26	5,10	-1.16	3.33	4.04
9	Kab. Pasaman	5,00	4,84	-0.87	3.39	4.09
10	Kab. Solok Selatan	5,03	4,89	-1.24	3.35	4.02
11	Kab. Dharmasraya	5,31	4,98	-1.39	3.42	4.28
12	Kab. Pasaman Barat	5,24	4,49	-1.34	3.75	4.17
13	Kota Padang	6,09	5,68	-1.86	3.66	4.33
14	Kota Solok	5,68	5,53	-1.42	3.56	4.60
15	Kota Sawahlunto	5,52	5,34	-1.27	2.49	3.98
16	Kota Padang Panjang	5,73	5,59	-1.44	3.46	4.39
17	Kota Bukittinggi	6,02	5,88	-1.74	3.61	4.68
18	Kota Payakumbuh	6,05	5,92	-1.65	3.59	4.52
19	Kota Pariaman	5,50	5,33	-1.32	3.53	4.55
	Sumatera Barat	5,16	5,05	-1,60	3,29	4,36
	NASIONAL	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2022, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada :

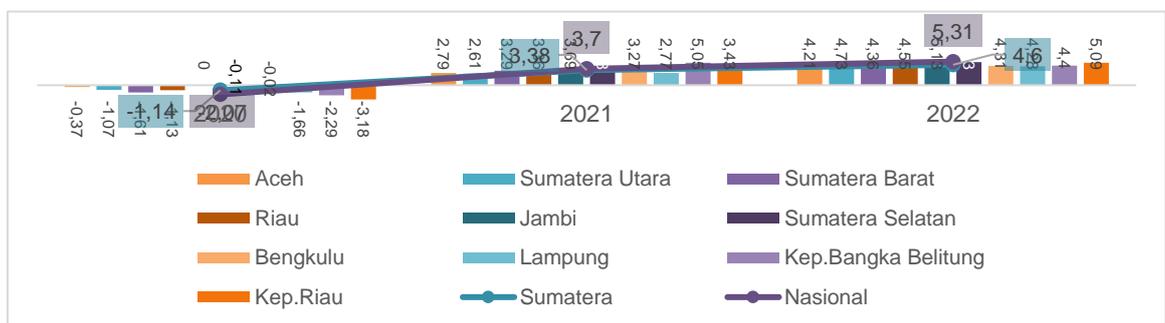


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,36% sebanyak 12 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Sawahunto.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,36% namun dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2022 sebesar 5,31% sebanyak 6 (enam) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2022 sebesar 5,31% sebanyak 1 (satu) Kabupaten yakni Kabupaten Padang Pariaman.

Posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Sumatera Barat sebesar 4,36% hanya lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang sebesar 4,21%, Provinsi Bengkulu sebesar 4,31% dan Provinsi Lampung sebesar 4,28%, serta jika di rata-ratakan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi yang berada di Pulau Sumatera Barat (sebanyak 10 Provinsi) sebesar 4,6%, maka laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat juga masih di bawah rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2022



3.1.3.2. Pertumbuhan PDRB

Kontribusi keuangan daerah Sumatera Barat yang terbesar dilihat dari struktur PDRB menurut lapangan usaha (atas dasar harga berlaku) 5 tahun terakhir adalah dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang mendominasi pada kisaran 21-23%, disusul oleh sektor pedagang besar & eceran; reparasi, mobil & sepeda motor pada kisaran 15-15% dan sektor transportasi dan pergudangan pada kisaran 10-12%.

Tabel 3.15. Struktur PDRB Provinsi Sumatera Barat Perbandingan Nasional Dalam Kurun Waktu 2018 s.d 2022

Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		PROV	NAS								
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	23,18	12,81	22,17	12,72	22,38	13,7	21,71	13,28	21,2	12,4
B	Pertambangan dan Penggalian	4,26	8,08	4,29	7,26	4,27	6,44	4,2	8,98	4,09	12,22
C	Industri Pengolahan	9,09	19,86	8,37	19,7	8,64	19,88	8,81	19,25	8,54	18,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	1,19	0,11	1,17	0,1	1,16	0,1	1,12	0,1	1,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09	0,06
F	Konstruksi	9,64	10,53	10,09	10,75	10,19	10,71	10,2	10,44	10,06	9,77
G	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor	15,31	13,02	15,8	13,01	15,79	12,93	15,77	12,97	16,5	12,85
H	Transportasi & Pergudangan	12,66	5,38	12,6	5,57	10,44	4,47	10,3	4,24	10,88	5,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	2,78	1,42	2,78	1,24	2,55	1,27	2,43	1,35	2,41
J	Informasi dan Komunikasi	5,47	3,77	5,82	3,96	6,44	4,51	6,62	4,41	6,68	4,15
K	Jasa Keuangan	3,01	4,15	2,9	4,24	3,04	4,51	3,28	4,51	3,23	4,13
L	Real Estate	1,96	2,74	2,01	2,77	2,06	2,94	2,05	2,94	2,02	2,49
M,N	Jasa	0,43	1,8	0,44	1,92	0,44	1,91	0,43	1,91	0,42	1,74



Kategori	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		PROV	NAS								
	Perusahaan										
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,92	3,65	6,13	3,62	6,71	3,76	6,9	3,77	6,52	3,09
P	Jasa Pendidikan	4,2	3,25	4,34	3,3	4,7	3,56	4,64	3,56	4,62	2,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,07	1,42	1,1	1,62	1,3	1,69	1,3	1,65	1,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,93	1,81	2	1,95	1,88	1,96	1,95	1,96	2,05	1,81
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tahun 2018-2022 bahwa Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan tidak ada pergeseran sama sekali terhadap lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar (maupun yang memberikan kontribusi terkecil) terhadap PDRB selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,58%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,20%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 21,71%, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 16,50%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 10,88%, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 10,30%.

Jika dibandingkan dengan Nasional maka, Struktur PDRB nasional didominasi oleh Lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 18,34%; Lapangan usaha

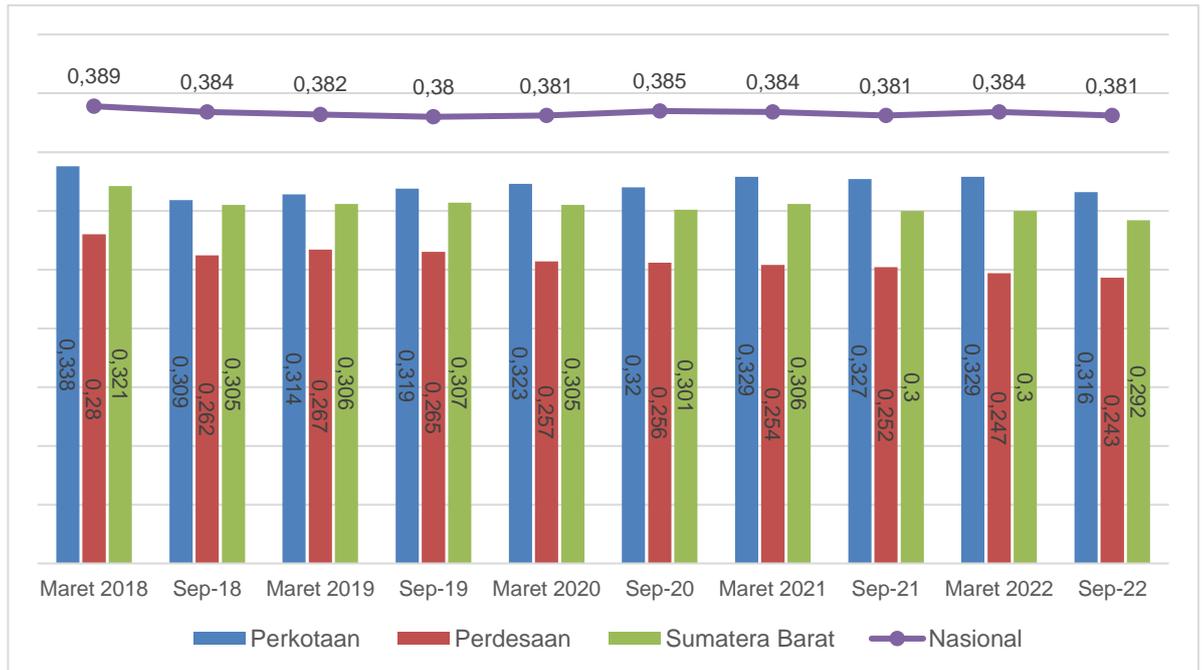


Pedagang Besar & Eceran; Reparasi, Mobil & Sepeda Motor sebesar 12,85%; Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 12,40%; Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,22%, dan Lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,77%.

3.1.3.3. Indeks Gini

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dan secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang. Pencapaian Gini Ratio Sumatera Barat pada tahun 2022 kondisi bulan Maret adalah sebesar 0.300 dan mengalami penurunan pada September 2022 menjadi 0,292, sedikit lebih baik sedikit dibandingkan capaian Gini Ratio pada tahun 2021 sebesar 0.306 (menurun sebesar 0.006 poin). Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. SUMBAR, 2023

Gambar 3.5. Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Pada Maret 2022, Gini Ratio perkotaan adalah 0,329 naik 0,002 poin dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,327 namun pada September 2022 mengalami penurunan dengan capaian 3,316. Di daerah perdesaan, kondisi September 2022 merupakan capaian paling rendah yakni sebesar 0,243. Rendahnya ketimpangan di perdesaan salah satunya diakibatkan masih homogenya kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas masih bergera pada sektor pertanian. Sedangkan di Perkotaan, dengan basis ekonomi yang di dominasi dengan Perdagangan dan jasa sehingga aktifitas ekonomi masyarakat cenderung variative sehingga juga mengakibatkan tingkat pendapatan antara penduduk juga akan sangat berbeda.

Salah satu upaya yang lain yang dapat dilakukan untuk menekan angka ketimpangan pendapatan (gini ratio), yakni belanja modal pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar tidak difokuskan pada wilayah perkotaan saja. Perlu ditingkatkan kordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda dalam



perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dilakukan secara merata di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi nomor 3 terendah dengan nilai Gini Ratio sebesar 0.292. Provinsi dengan nilai Gini Ratio paling rendah adalah Provinsi Kepulauan Belitung sebesar 0.255 dan diikuti dengan Aceh sebesar 0.291.

Tabel 3.16. Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2022

NO	PROVINSI	2020		2021		2022	
		MARET	SEPT	MARET	SEPT	MARET	SEPT
1	Aceh	0.323	0.319	0.324	0.323	0.311	0.291
2	Sumatera Utara	0.316	0.314	0.314	0.313	0.312	0.326
3	Sumatera Barat	0.305	0.301	0.306	0.300	0.300	0.292
4	Riau	0.329	0.321	0.326	0.327	0.326	0.323
5	Jambi	0.320	0.316	0.321	0.315	0.320	0.335
6	Sumatera Selatan	0.339	0.338	0.341	0.340	0.339	0.330
7	Bengkulu	0.334	0.323	0.326	0.321	0.315	0.315
8	Lampung	0.327	0.320	0.323	0.314	0.314	0.313
9	Kep. Bangka Belitung	0.262	0.257	0.256	0.247	0.236	0.255
10	Kepulauan Riau	0.339	0.334	0.343	0.339	0.342	0.325
INDONESIA		0.381	0.385	0.384	0.381	0.384	0.381

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2022 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,354 dan juga Kota Bukittinggi dengan capaian 0.314, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0.208 dan Kabupaten Pasaman dengan capaian 0,230. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.17. Indeks Gini Ratio menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017-2022

No	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	0.319	0.306	0.306	0.305	0.321	0.233
2	Kab. Pesisir Selatan	0.299	0.255	0.336	0.273	0.253	0.246
3	Kab. Solok	0.294	0.303	0.246	0.264	0.246	0.243
4	Kab. Sijunjung	0.333	0.300	0.285	0.277	0.270	0.243
5	Kab. Tanah Datar	0.262	0.288	0.293	0.269	0.250	0.251
6	Kab. Padang Pariaman	0.280	0.296	0.278	0.273	0.269	0.245
7	Kab. Agam	0.279	0.257	0.297	0.257	0.272	0.298
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.262	0.283	0.251	0.278	0.244	0.208
9	Kab. Pasaman	0.260	0.266	0.238	0.222	0.248	0.230
10	Kab. Solok Selatan	0.299	0.309	0.330	0.310	0.277	0.253
11	Kab. Dharmasraya	0.252	0.264	0.295	0.307	0.268	0.287
12	Kab. Pasaman Barat	0.286	0.290	0.278	0.280	0.261	0.277
13	Kota Padang	0.338	0.344	0.283	0.258	0.343	0.354
14	Kota Solok	0.299	0.296	0.312	0.312	0.277	0.288
15	Kota Sawahlunto	0.299	0.310	0.271	0.286	0.295	0.314
16	Kota Padang Panjang	0.300	0.290	0.289	0.300	0.306	0.296
17	Kota Bukittinggi	0.313	0.337	0.322	0.394	0.286	0.317
18	Kota Payakumbuh	0.303	0.302	0.267	0.265	0.316	0.311
19	Kota Pariaman	0.301	0.316	0.276	0.325	0.301	0.272
	Sumatera Barat	0.318	0.321	0.306	0.305	0.306	0.300

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

3.1.3.4. Angka Kemiskinan

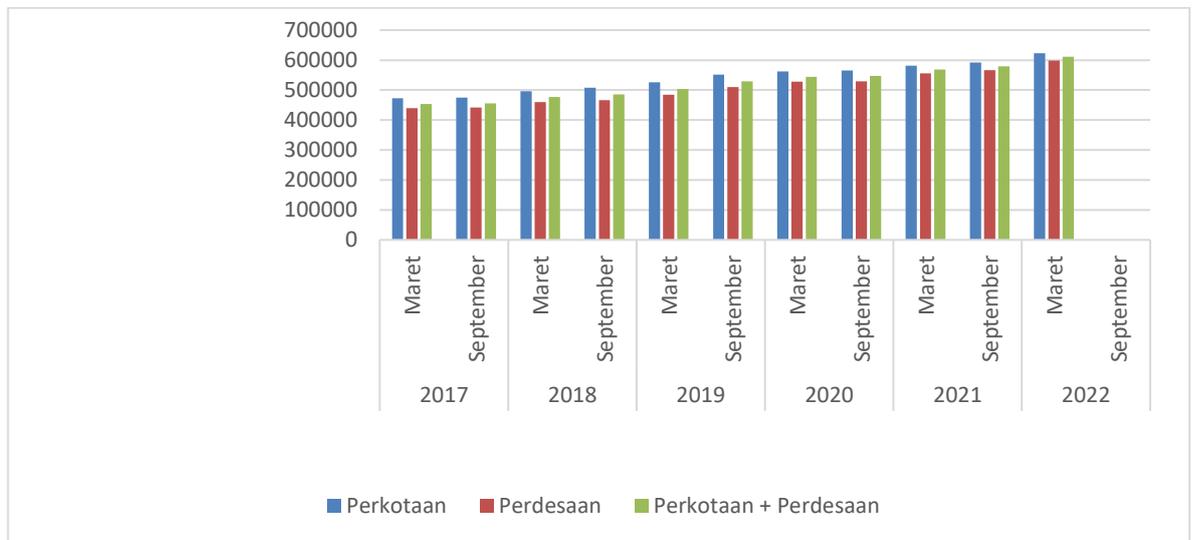
Kemiskinan memiliki definisi dan konsep yang sulit dirumuskan karena memiliki sifat dan penyebab yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan tetapi dalam kenyataannya selalu menjadi permasalahan besar bagi suatu daerah, baik itu pada daerah perkotaan maupun pada daerah perdesaan. Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah standar minimum yang diperlukan seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan bukan pangan.



Lebih lanjut menurut BPS, masalah kemiskinan dapat berhubungan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti kondisi pendidikan, sosial demografi, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan mengetahui kondisi karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan atau program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan antar daerah tempat tinggal baik perkotaan dan perdesaan juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada periode Maret dan September serta setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.6. Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat, Tahun 2017-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasis pada sektor pertanian, begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilisasi dan



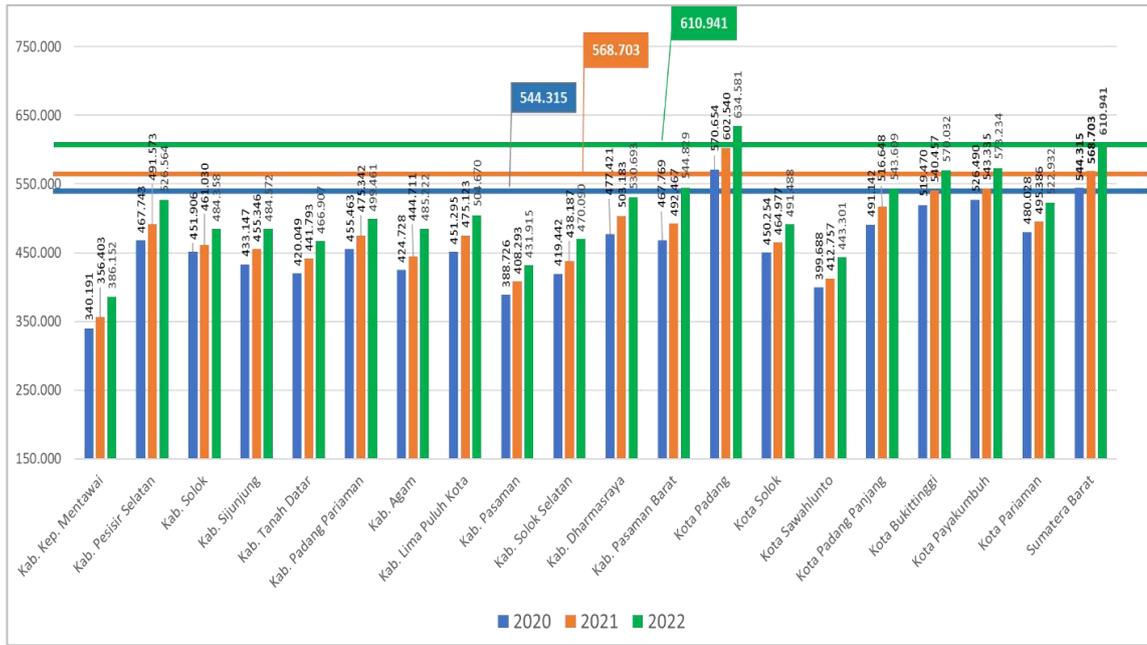
tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus di penuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi.

Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasiskan perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18. Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	294.284	310.033	340.191	356.403	386.152
2	Kab. Pesisir Selatan	409.882	431.817	467.743	491.573	526.564
3	Kab. Solok	408.570	415.649	451.906	461.030	484.358
4	Kab. Sijunjung	379.046	400.861	433.147	455.346	484.572
5	Kab. Tanah Datar	369.833	379.041	420.049	441.793	466.907
6	Kab. Padang Pariaman	402.960	411.182	455.463	475.342	499.461
7	Kab. Agam	341.372	379.304	424.728	444.711	485.222
8	Kab. Lima Puluh Kota	388.689	403.030	451.295	475.123	504.670
9	Kab. Pasaman	334.800	347.153	388.726	408.293	431.915
10	Kab. Solok Selatan	364.498	387.438	419.442	438.187	470.090
11	Kab. Dharmasraya	414.096	439.117	477.421	503.183	530.693
12	Kab. Pasaman Barat	402.877	417.742	467.769	492.467	544.829
13	Kota Padang	507.042	534.857	570.654	602.540	634.581
14	Kota Solok	414.673	440.618	450.254	464.977	491.488
15	Kota Sawahlunto	354.665	374.615	399.688	412.757	443.301
16	Kota Padang Panjang	438.075	450.377	491.142	516.648	543.609
17	Kota Bukittinggi	459.371	475.755	519.470	540.457	570.032
18	Kota Payakumbuh	462.243	482.184	526.490	543.335	573.234
19	Kota Pariaman	431.368	446.514	480.028	495.386	522.932
	Sumatera Barat	476.554	503.652	544.315	568.703	610.941

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023



Sumber : Dokumen RKPDP Prov. Sumbar, 2023

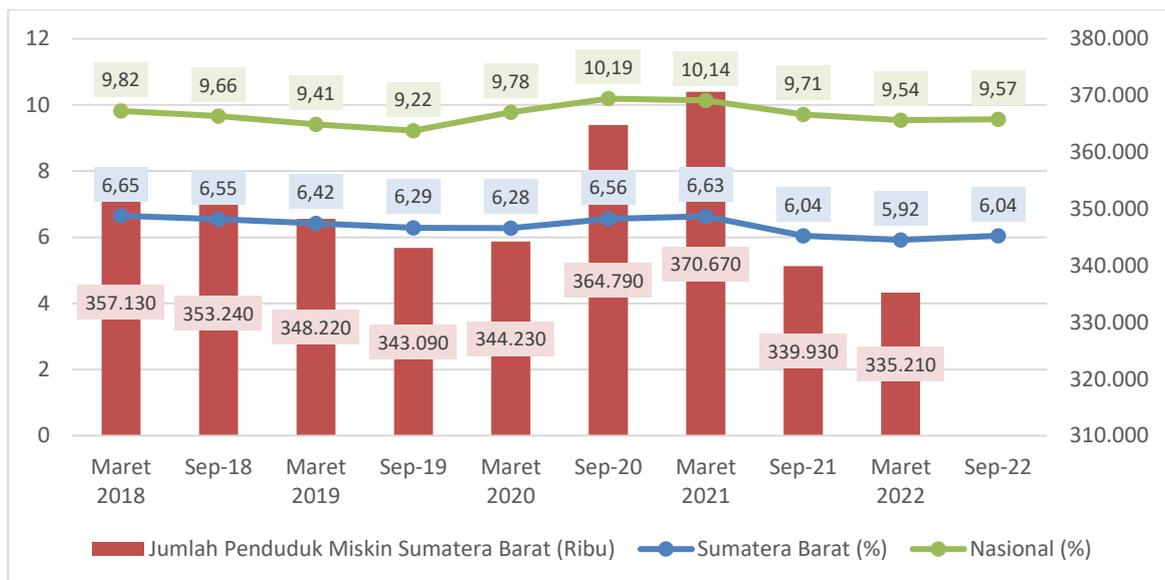
Gambar 3.7. Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2022, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp.634.581 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang.

Secara umum, pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret 2018 sebesar 6,65% dan mengalami penurunan terendah menjadi 5,92% pada bulan Maret 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada kondisi September 2022 sebesar 6,04%. Selama kurun tersebut, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat juga dapat diturunkan dari dari 357.13 ribu jiwa (Maret 2018), menjadi 335,21 ribu jiwa (Maret 2022).



Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawa rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2018 sebesar 9,82%, mengalami kenaikan akibat dampak pandemic covid 19 menjadi 10,19% pada September 2021 namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi September tahun 2022 mencapai 9,57%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.8. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Maret 2018 – September 2022

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatera maka capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak tahun 2017-2022 relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sejak adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020, maka secara signifikan dan merata seluruh capaian tingkat kemiskinan di Provinsi se Sumatera mengalami kenaikan terutama pada kondisi September 2020 dan Maret 2021, dan secara bersamaan juga mengalami penurunan pada capaian Maret 2021 hingga kondisi September 2022 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.19. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2022 (Persen)

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022	
	Mar	Sept								
ACEH	15,97	15,68	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64	14,75
SUMATERA UTARA	9,22	8,94	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42	8,33
SUMATERA BARAT	6,65	6,55	6,42	6,29	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92	6,04
RIAU	7,39	7,21	7,08	6,90	6,82	7,04	7,12	7,00	6,78	6,84
JAMBI	7,92	7,85	7,60	7,51	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62	7,70
SUMATERA SELATAN	12,80	12,82	12,71	12,56	12,66	12,98	12,84	12,79	11,90	11,95
BENGKULU	15,43	15,41	15,23	14,91	15,03	15,30	15,22	14,43	14,62	14,34
LAMPUNG	13,14	13,01	12,62	12,30	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57	11,44
KEP. BANGKA BELITUNG	5,25	4,77	4,62	4,50	4,53	4,89	4,90	4,67	4,45	4,61
KEP. RIAU	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03
INDONESIA	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54	9,57

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

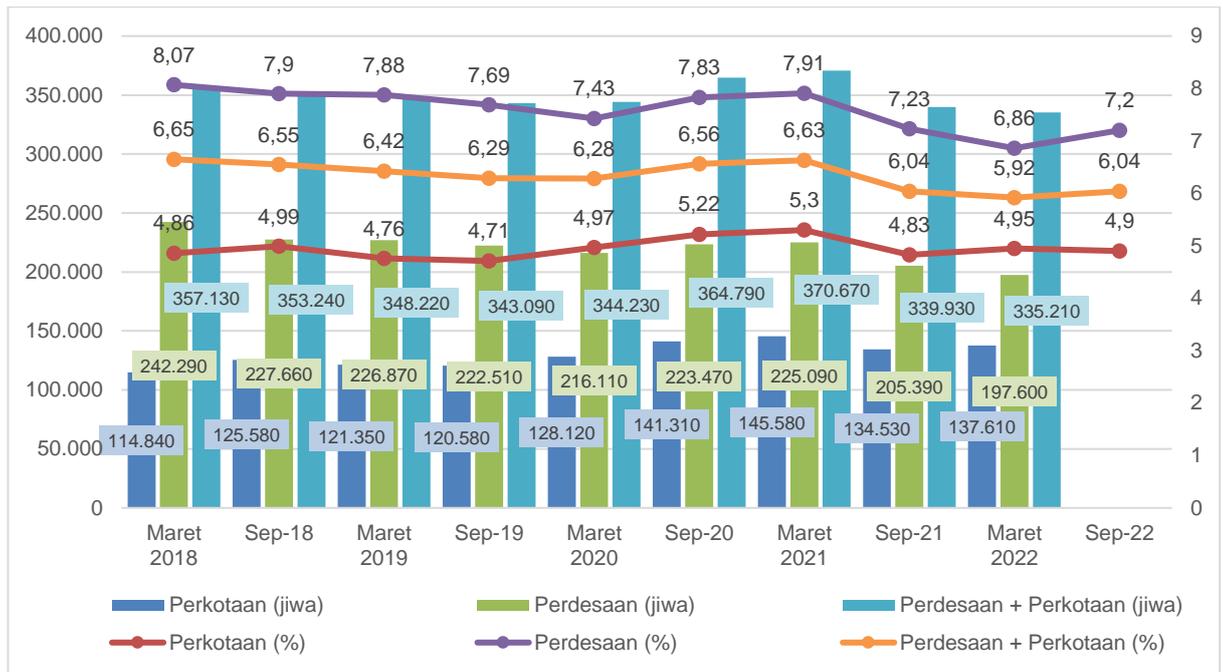
Jika dirinci berdasarkan karakteristik wilayahnya, penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat lebih besar proporsinya bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Data dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa rata-rata sekitar dua per tiga penduduk miskin bermukim di kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan perdesaan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 lalu justru lebih banyak berdampak ke peningkatan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan. Tingkat kemiskinan perkotaan naik dari 4,71% di kondisi September tahun 2019 ke angka 5,22% di September tahun 2020 atau naik 0,51% dan mengalami kenaikan pada kembali pada kondisi Maret 2021 menjadi 5,30% atau naik dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,08% atau naik sebesar 0,59%, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan pada kondisi September 2019 sebesar 7,69% meningkat menjadi 7,83% di September 2021 atau naik sebesar 0,14% saja dan juga mengalami kenaikan di kondisi Maret 2021 menjadi 7,91% atau naik sebesar 0,08% jika dibandingkan September 2021 atau naik sebesar 0,22% jika dibandingkan kondisi September 2019.

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hingga awal tahun 2021 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas



ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Perkotaan pada kondisi Maret 2022 sebesar 4,95%, begitupun pada daerah Perdesaan juga mengalami penurunan pada kondisi Maret 2022 menjadi 6,86%. Namun pada kondisi September 2022, tingkat kemiskinan di Perdesaan mengalami peningkatan menjadi 7,20% dibandingkan daerah perkotaan justru mengalami penurunan menjadi lebih baik di angka 4,90%.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.9. Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat di Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara



penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P1			
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	-	-	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P2			
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	-	-	-

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sepertiga jumlah penduduk miskin berada pada daerah perdesaan yang dominan berada pada wilayah Kabupaten, sedangkan daerah perkotaan cenderung lebih kecil. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 42.370 jiwa, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 33.780 jiwa dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 32.910 jiwa.

Meskipun Kota Padang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat namun dari tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata Provinsi dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,26%. Capaian tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13.74%. Adapun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21. Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribuan Jiwa) Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)

No	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	12.99	13.22	13.37	14.31	13,74
2	Kab. Pesisir Selatan	34.92	36.51	35.46	37.41	33,78
3	Kab. Solok	32.89	29.74	29.28	30.36	27,16
4	Kab. Sijunjung	16.55	16.65	16.28	16.81	15,07
5	Kab. Tanah Datar	18.48	16.20	15.34	15.89	14,91
6	Kab. Padang Pariaman	33.20	29.48	28.98	30.41	26,44
7	Kab. Agam	32.92	33.10	33.31	34.26	31,33
8	Kab. Lima Puluh Kota	26.47	26.64	26.43	28.51	26,00
9	Kab. Pasaman	20.31	20.22	20.29	21.57	19,94



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
10	Kab. Solok Selatan	11.85	12.49	12.39	13.41	11,81
11	Kab. Dharmasraya	15.42	15.49	15.70	17.60	15,08
12	Kab. Pasaman Barat	31.83	31.53	31.64	34.97	32,91
13	Kota Padang	44.04	42.44	42.17	48.44	42,37
14	Kota Solok	2.29	2.29	1.99	2.31	2,28
15	Kota Sawahlunto	1.48	1.35	1.36	1.52	1,47
16	Kota Padang Panjang	3.11	3.00	2.84	3.28	2,89
17	Kota Bukittinggi	6.32	6.00	6.01	6.98	6,16
18	Kota Payakumbuh	7.69	7.68	7.74	8.66	8,08
19	Kota Pariaman	4.40	4.20	3.66	3.99	3,80
	Sumatera Barat	357.13	348.22	344.23	370.67	335,21

Sumber : Dokumen RKPDP Prov. Sumbar, 2023

Tabel 3.22. Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%) Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	14.44	14.43	14.35	14.84	13,97
2	Kab. Pesisir Selatan	7.59	7.88	7.61	7.92	7,11
3	Kab. Solok	8.88	7.98	7.81	8.01	7,12
4	Kab. Sijunjung	7.11	7.04	6.78	6.80	6,00
5	Kab. Tanah Datar	5.32	4.66	4.40	4.54	4,26
6	Kab. Padang Pariaman	8.04	7.10	6.95	7.22	6,25
7	Kab. Agam	6.76	6.75	6.75	6.85	6,22
8	Kab. Lima Puluh Kota	6.99	6.97	6.86	7.29	6,59
9	Kab. Pasaman	7.31	7.21	7.16	7.48	6,85
10	Kab. Solok Selatan	7.07	7.33	7.15	7.52	6,51
11	Kab. Dharmasraya	6.42	6.29	6.23	6.67	5,56
12	Kab. Pasaman Barat	7.34	7.14	7.04	7.51	6,93
13	Kota Padang	4.70	4.48	4.40	4.94	4,26
14	Kota Solok	3.30	3.24	2.77	3.12	3,02
15	Kota Sawahlunto	2.39	2.17	2.16	2.38	2,28
16	Kota Padang Panjang	5.88	5.60	5.24	5.92	5,14
17	Kota Bukittinggi	4.92	4.60	4.54	5.14	4,46
18	Kota Payakumbuh	5.77	5.68	5.65	6.16	5,66
19	Kota Pariaman	5.03	4.76	4.10	4.38	4,13
	Sumatera Barat	6.65	6.42	6,28	6,63	5,92
	NASIONAL	13,10	9,22	10,19	10,14	9,57

Sumber : Dokumen RKPDP Prov. Sumbar, 2023



3.1.3.5. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4,14 juta orang, naik sebanyak 61,32 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja dan pada Agustus 2022 jumlah Angkatan kerja sebesar 2,87 juta orang atau sekitar 69,32% dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 1,27 juta orang yang melakukan aktifitas sekolah, berumah tangga atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 yang sebanyak 2,87 juta orang terdiri dari 2,69 juta orang penduduk yang bekerja dan 180,11 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 106,88 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 106,72 ribu orang, sementara pengangguran naik sebanyak 0,16 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 69,30%, naik 1,58 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 3.23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2020-2022

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2020		2021		2022	
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
Penduduk Usia Kerja	Ribu Org	3.986,24	4.016,78	4.047,44	4.077,63	4.222,98	4.138,95
Angkatan Kerja	Ribu Org	2.900,09	2.772,13	2.768,67	2.761,39	2.871,63	2.868,27
Bekerja	Ribu Org	2.747,82	2.581,52	2.584,12	2.581,44	2.694,60	2.688,16
Pengangguran	Ribu Org	152,27	190,61	184,56	179,95	177,21	180,11
Bukan Angkatan Kerja	Ribu Org	1.086,16	1.244,64	1.278,77	1.316,24	1.351,35	1.270,68



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2020		2021		2022	
		Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	5,25	6,88	6,67	6,52	6,17	6,28
Perkotaan	%	6,45	9,27	9,81	8,65	8,27	9,54
Perdesaan	%	4,14	4,71	3,80	4,50	4,23	3,26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,41	69,01	68,41	67,72	68,00	69,30
Laki-laki	%	83,58	82,08	81,25	80,67	80,55	82,58
Perempuan	%	62,19	56,24	55,85	55,04	55,43	56,28

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

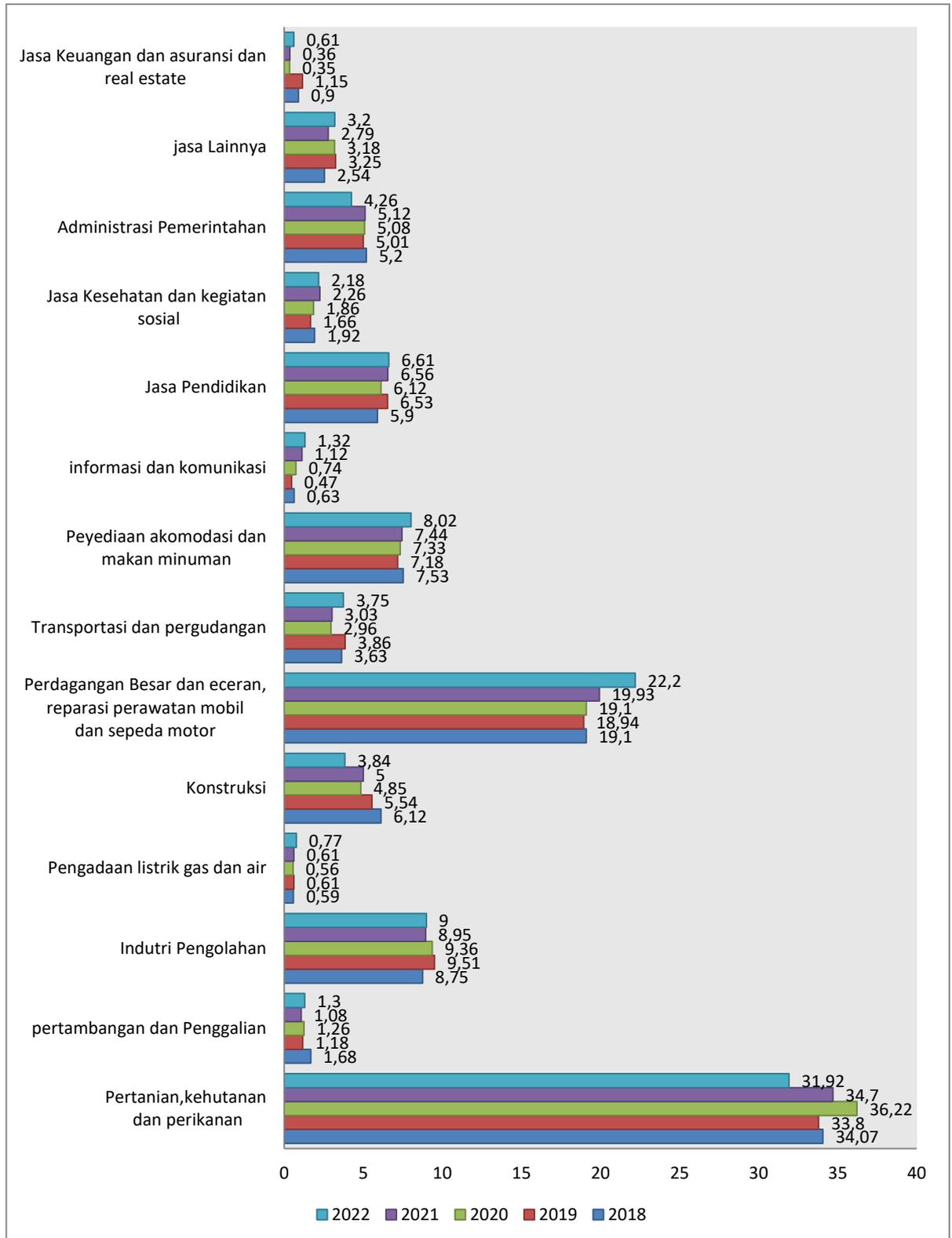
Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 82,58 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,28 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,92 dan 1,24 persen poin.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Data BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa pada kondisi bulan Februari 2022 BPS Provinsi Sumatera Barat, lima lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 31,92%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 22,20%; Industri Pengolahan sebesar 9,00%; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,02%; dan jasa pendidikan sebesar 6,61%. Lima kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2021 adalah Perdagangan Besar dan Eceran (2,27 persen poin); transportasi dan pergudangan (0,77 persen poin); Penyediaan akomodasi dan makan minum (0,58 persen poin); jasa lainnya (0,41 persen poin); dan Pertambangan dan penggalian (0,22 persen poin), dan Sementara terdapat empat lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-2,78 persen poin); konstruksi (-1,16 persen poin); Administrasi pemerintahan (-0,86 persen poin); dan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (-0,08 persen poin).



Pada konsi Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Barat hampir sama dengan kondisi Februari 2022 yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 34,96%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,21%; dan Industri Pengolahan sebesar 8,58%. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan Agustus 2021, sebagian besar pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (44,08 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (28,83 ribu orang); dan Akomodasi dan Penyedia Makan dan Minum (20,49 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor Konstruksi turun sebesar 14,24 ribu orang.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sumbar, Thn 2018 - 2022 (Kondisi Feb. 2022) (%)



Pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Sumatera Barat paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,27%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,47%. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,26% poin dan 0,04% poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada pekerja keluarga yaitu sebesar 0,91% poin. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2022, penduduk Sumatera Barat yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,75 juta orang (65,26%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,93 juta orang (34,74%). Dibandingkan Agustus 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,49% poin.

Tabel 3.24. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Sumatera Barat (%)

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Kegiatan Formal	35,48	37,87	33,72	35,23	34,74
1	Buruh/karyawan/pegawai	31,45	33,76	30,13	31,80	31,27
2	Berusaha dibantu buruh tetap	4,03	4,11	3,59	3,43	3,47
B	Kegiatan Informal	64,52	62,13	66,28	64,77	65,26
1	Berusaha sendiri	20,18	20,82	20,84	21,06	24,32
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	18,90	17,00	18,05	16,62	16,12
3	Pekerja keluarga/tak dibayar	13,17	12,89	16,05	15,32	14,41
4	Pekerja bebas di pertanian	6,65	6,58	6,55	6,76	5,92
5	Pekerja bebas di non pertanian	5,62	4,85	4,79	5,01	4,48

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 32,94%. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 15,97%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan



dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami kenaikan persentase terbesar yaitu 1,91% poin. Sementara penduduk bekerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan persentase terbesar yaitu turun 1,99% poin.

Tabel 3.25. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Tahun 2018- 2022 (Kondisi Agustus) (%)

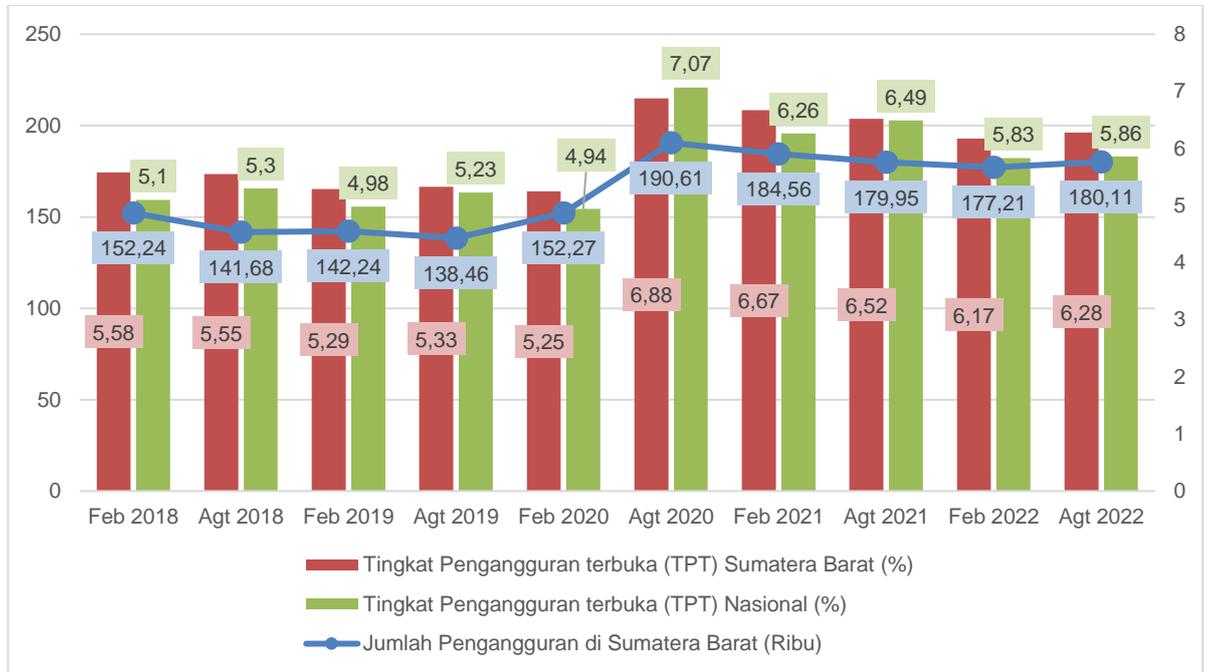
No	Pendidikan Tertinggi	Agustus				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD ke Bawah	36,18	34,77	33,25	32,27	32,94
2	Sekolah Menengah Pertama	18,70	17,61	18,67	17,55	17,48
3	Sekolah Menengah Atas	20,10	20,84	21,60	21,56	23,46
4	Sekolah Menengah Kejuruan	10,70	10,66	10,77	12,14	10,15
5	Diploma I/II/III	3,80	3,81	3,74	3,86	3,18
6	Universitas	10,52	12,32	11,96	12,64	12,81
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Jika melihat perkembangan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat pada Tahun maka cenderung menurun dari Februari tahun 2016 pada angka 6,32% menjadi 5,25% pada kondisi Februari 2020. Namun dengan adanya pandemic Covid 19 pada awal Maret 2020 membuat tingkat pengangguran di Sumatera Barat meningkat menjadi 6,88% pada kondisi Agustus 2020. Beberapa upaya menjaga ketahanan ekonomi serta pemulihan ekonomi yang dilakukan secara perlahan mampu menurunkan kembali tingkat pengangguran di Sumatera Barat menjadi 6,67% pada kondisi Februari 2021, turun menjadi 6,52% pada kondisi Agustus 2021 dan terakhir menjadi 6,17% pada kondisi Februari 2022 dan mengalami kenaikan pada kondisi Agustus 2022 menjadi 6,28%, Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Namun demikian, meskipun terdapat penurunan capaian Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat selama pemulihan ekonomi dengan dengan beberapa upaya perbaikan namun angka tingkat pengangguran di Sumatera Barat selalu diatas rata-rata capaian tingkat pengangguran Nasional sejak tahun 2016-2022.



Adapun perkembangan jumlah pengangguran di Sumatera Barat dan perbandingan tingkat pengangguran Sumatera Barat dengan Nasional dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

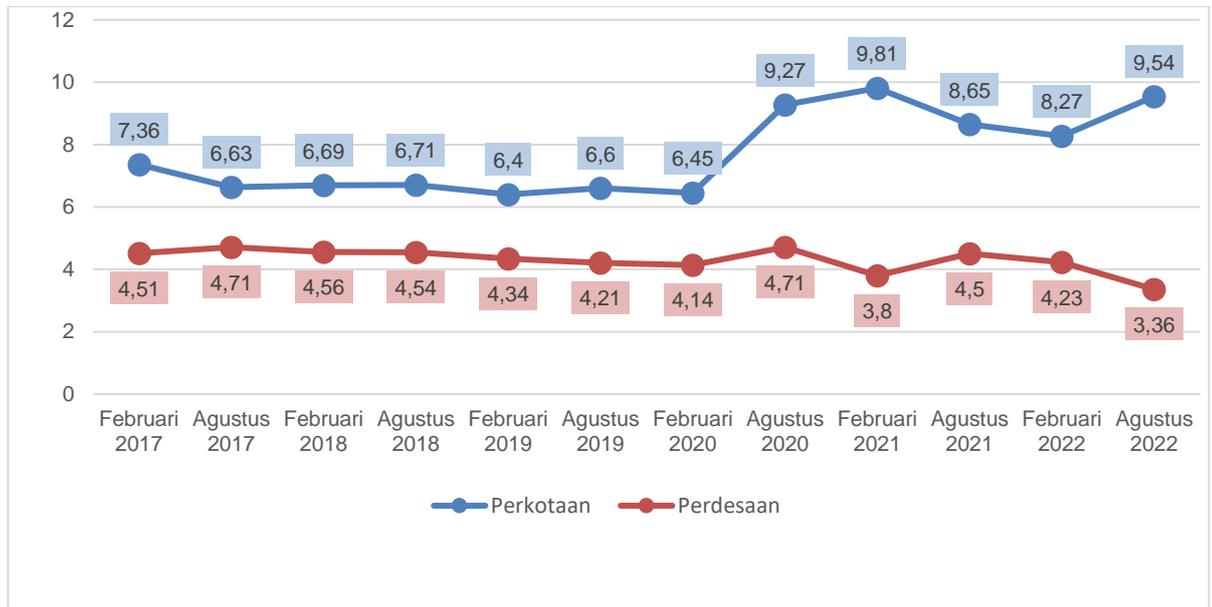
Gambar 3.11. Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Jika melihat capaian tingkat pengangguran di Sumatera Barat maka tingkat pengangguran di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Hal ini didasarkan dengan struktur ekonomi di Sumatera Barat yang lebih dari 20% berada pada sektor lapangan usaha pertanian yang dominan berada di daerah perdesaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan struktur perkotaan yang lebih dominan dengan sektor perdagangan, industri dan jasa. Pada kondisi Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan sebesar 9,54% dibandingkan dengan Perdesaan sebesar 3,26%.

Jika berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat pengangguran penduduk berkelamin perempuan relatif lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini dikarenakan sebagian besar perempuan bekerja pada level pekerja bukan pada level manajer, salah satunya adalah karena tingkat Pendidikan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Berikut capaian tingkat pengangguran di daerah perkotaan dan

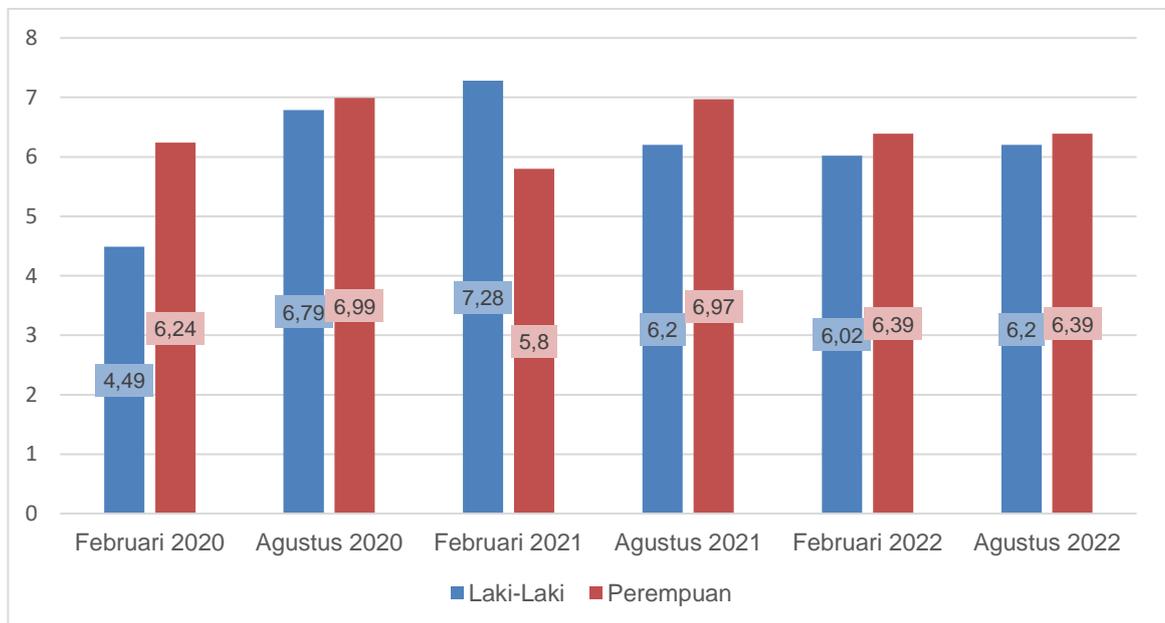


perdesaan serta tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin di Sumatera Barat.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Agustus)

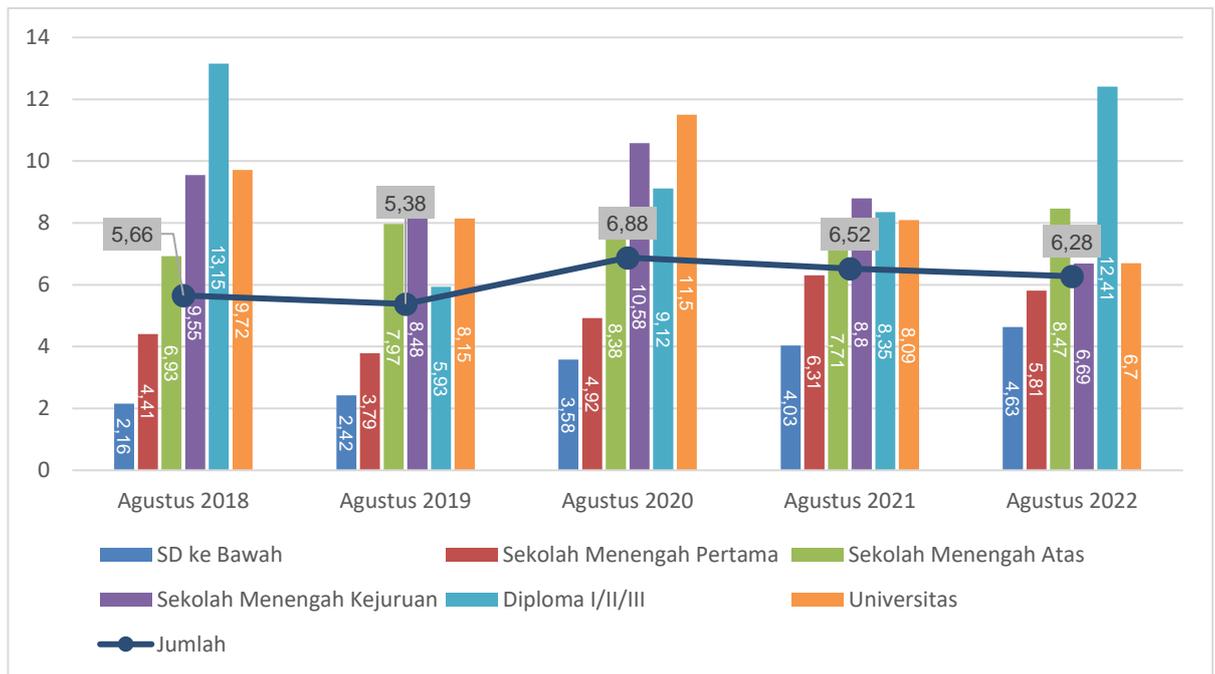


Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2020-2022



Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas adalah yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,47%. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 4,63%. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT terjadi pada tingkat SMP, SMK, Diploma I/II/ III dan Universitas. penuruna terbesar adalah TPT dari tamatan SMK yang turun sebesar 2,11 persen poin. TPT yang mengalami kenaikan adalah TPT dari tamatan SD ke bawah, dan SMA masing-masing naik sebesar 0,60 dan 0,76 persen poin.



Sumber : Dokumen RKPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi Agustus 2016 - Agustus 2022 (Persen)

Jika dilihat pada masing-masing Kabupaten/Kota maka tingkat pengangguran tertinggi pada kondisi Agustus 2022 berada di Kota Padang sebesar 11,69 persen dan capaian dengan tingkat pengangguran terendah yakni di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1,39 persen. Adapun capain tingkat pengangguran pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.26. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Kondisi Agustus 2022)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kepulauan Mentawai	2.31	2.92	3.98	2.79	1,39
2	Kab. Pesisir Selatan	6.03	6.02	7.00	5.97	4,61
3	Kab.Solok	6.12	4.72	4.65	4.67	5,89
4	Kab. Sijunjung	3.22	3.64	5.30	3.57	4,87
5	Kab. Tanah Datar	4.01	3.20	4.79	4.63	5,91
6	Kab. Padang Pariaman	7.03	6.08	8.13	8.41	6,6
7	Kab. Agam	4.93	4.78	4.61	5.06	4,93
8	Kab. Lima Puluh Kota	2.73	2.30	3.03	2.25	3,72
9	Kab. Pasaman	6.04	5.28	5.04	4.92	5,38
10	Kab. Solok Selatan	5.84	4.91	5.62	4.84	3,71
11	Kab. Dharmasraya	4.02	5.06	5.31	5.00	6,23
12	Kab. Pasaman Barat	3.36	4.74	4.69	5.02	6,33
13	Kota Padang	9.29	8.74	13.64	13.37	11,69
14	Kota Kota Solok	6.03	7.06	8.35	5.15	3,90
15	Kota Sawahlunto	5.92	6.84	8.20	6.38	5,00
16	Kota Padang Panjang	5.35	4.38	7.22	4.90	4,84
17	Kota Bukittinggi	7.24	6.20	7.51	6.09	4,90
18	Kota Payakumbuh	3.95	4.13	6.68	6.47	5,16
19	Kota Pariaman	5.82	5.48	5.73	6.09	5,19
SUMATERA BARAT		5.66	5.38	6.88	6.52	6,28

Sumber : Dokumen RKPDP Prov. Sumbar, 2023

Dari tabel diatas terlihat secara umum tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat berdasarkan daerah, pengangguran terbuka tertinggi berada di Padang sebanyak 11,69%, Kabupaten Padang Pariaman 6,60%. Yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai 1,39 persen, dan secara akumulasi provinsi, tercatat pada Agustus 2022 sebanyak 6,28 persen atau turun 0,24 poin dibandingkan periode yang sama pada 2021. Setelah pandemic covid-19 terjadi perbaikan ekonomi dengan ditandainya meningkatnya jumlah pekerja dan menurunnya pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Dari data BPS, hingga Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,14 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 2,87 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 di Sumbar mencapai 180,11 ribu orang



3.2. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

3.2.1. Wilayah Fungsional

Lingkup wilayah kajian dan analisis KLHS tidak hanya mempertimbangkan wilayah administrasi sebagai wilayah perencanaan, namun juga juga wilayah fungsional sebagai wilayah ekologis yang akan terpengaruh terhadap maupun akibat rencana penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah fungsional ini didasari atas data wilayah ekoregion, wilayah sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT) yang mempengaruhi kondisi perairan Provinsi Sumatera Barat dengan luas 13.908.457,91 Ha. Luas tersebut termasuk Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.



3.2.1.1. Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi Alami

Ekoregion berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan interaksi sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :

- a. Karakteristik bentang alam;
- b. Daerah aliran sungai;
- c. Iklim;
- d. Flora dan fauna;
- e. Sosial budaya;
- f. Kelembagaan masyarakat; dan
- g. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Mengacu pada surat SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1 : 250.000, wilayah ekoregion, Karakteristik Vegetasi Alami dan Karakteristik Bentang pada wilayah fungsional Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2, Tabel 3.3, Gambar 3.3 dan Gambar 3.4

Merujuk terhadap isi Undang-Undang PPLH tersebut, maka identifikasi bentang lahan geografis memegang peranan penting dalam penyusunan satuan ekoregion sebagai kerangka dasar bagi perumusan seluruh kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dan pengendaliannya. Dengan kata lain, bahwa satuan ekoregion dapat dideskripsikan sebagai satuan ekosistem berbasis bentangan alam atau bentang lahan (*natural landscape*) yang diintegrasikan dengan batas wilayah administrasi (regional) dan beberapa komponen lingkungan yang dipandang penting bagi suatu wilayah administrasi.



Tabel 3.27. Ekoregion, Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) Sumatera Barat

Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
Dataran Fluvial Sumatera	Dataran fluvial bermaterial aluvium	203.194,94	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	41.142,41
	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	847,02	Vegetasi hutan gambut	50.903,50
	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	133.877,77	Vegetasi hutan kerangas pamah	71.201,79
	Dataran organik bermaterial gambut	25.850,23	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	602.077,47
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	18.200,51	Vegetasi hutan pantai	133.877,77
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	49.178,90	Vegetasi mangrove	847,02
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	667.093,09	Vegetasi terna rawa air payau	1.891,03
	Lembah sungai bermaterial aluvium	108.297,67	Vegetasi terna rawa air tawar	258.814,85
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	864,03	Vegetasi terna rawa gambut	8.224,22
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	5.414,23	Vegetasi terna tepian sungai	32.283,45
	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	6.710,61	Vegetasi terna tepian sungai payau	18.265,50
Dataran Gambut Sumatera	Dataran fluvial bermaterial aluvium	38.410,25	Vegetasi hutan gambut	77.315,40
	Dataran organik bermaterial gambut	77.315,40	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3.523,46
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	5.286,55	Vegetasi terna rawa air tawar	23.021,31
			Vegetasi terna rawa gambut	17.152,03
Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	Dataran fluvial bermaterial aluvium	15.718,78	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	2.147,67
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	473.691,00	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	489.991,40
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	581,62		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	2.147,67		



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	27.009,06	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	27.009,06
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	18.995,70	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	21.113,57
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	5.318,95	Vegetasi hutan pegunungan atas	172,12
			Vegetasi hutan pegunungan bawah	3.028,97
Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan	Danau	22.072,60	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	19.427,15
	Dataran fluvial bermaterial aluvium	11.230,67	Vegetasi hutan batugamping pamah	3.832,78
	Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam	4.604,42	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	722.206,67
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	5.938,77	Vegetasi hutan gambut	2.727,99
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	19.970,76	Vegetasi hutan kerangas pamah	497,63
	Lembah sungai bermaterial aluvium	266,35	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	464.274,26
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3.340,80	Vegetasi hutan pegunungan atas	175.636,44
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	37.312,53	Vegetasi hutan pegunungan bawah	986.698,80
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	449,54	Vegetasi hutan pegunungan subalpine	913,43
	Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	10.519,57	Vegetasi terna rawa air tawar	2.372,50
	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	17.499,50	Vegetasi terna rawa gambut	406,62
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	291.921,52	Vegetasi terna tepian danau	22.072,60
	Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	668.282,08		
	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	3.832,78		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	755.595,31		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	263.821,94		



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	139.158,18		
	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	34.690,10		
	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	109.563,10		
	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	996,35		
Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	Danau	9.584,89	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	27.241,78
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	224,08	Vegetasi hutan pegunungan atas	39.698,55
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	163,59	Vegetasi hutan pegunungan bawah	241.887,25
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	2.594,27	Vegetasi hutan pegunungan subalpine	708,32
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	31.192,97	Vegetasi terna tepian danau pegunungan	11.174,00
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	6.298,18		
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	35.511,76		
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	105.100,42		
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	708,32		
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	117.469,45		
	Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik	638,67		
	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	315,28		
	Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	10.908,04		



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
Perbukitan Karst Sumatera	Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	2.430,08	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	70.706,61
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	2.677,14	Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst	9.672,67
	Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	60.378,60	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	1.571,49
	Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	424,17	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	3.109,64
	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	17.570,61	Vegetasi hutan pegunungan bawah	424,17
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	1.571,49		
	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	432,50		
Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan	Dataran fluvial bermaterial aluvium	11.791,05	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	11.797,05
	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	263,36	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4.205,60
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik	51.299,25	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	836.665,18
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	9.782,14	Vegetasi hutan gambut	8.757,12
	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	32.699,97	Vegetasi hutan kerangas pamah	696,91
	Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam	110.142,59	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	958.681,22
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	12.735,48	Vegetasi hutan pantai	263,36
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	138.360,03	Vegetasi hutan pegunungan bawah	25.146,68
	Lembah sungai bermaterial aluvium	10.111,62	Vegetasi hutan tepian sungai	1.102,53
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	1.787,44	Vegetasi hutan tepian sungai payau	578,71



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	4.712,39	Vegetasi savana lahan kering pamah	13.566,16
	Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	1.258,09	Vegetasi terna rawa air tawar	9.009,10
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	47.248,15	Vegetasi terna tepian sungai	2.064,15
	Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	26.433,85		
	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	924,37		
	Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	751,84		
	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	380,92		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	517.095,17		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	2.566,59		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	9.171,63		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	292.286,84		
	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	188.438,58		
	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	280.810,94		
	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	55.429,84		
	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	66.051,65		
Perbukitan Struktural Kompleks Mentawai	Dataran fluvial bermaterial aluvium	19.342,31	Vegetasi hutan batugamping pamah	1.829,91
	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	5.458,39	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	509.083,41
	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	10.674,98	Vegetasi hutan pantai	10.674,98
	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	1.829,91	Vegetasi hutan tepian sungai	11.384,79
	Lembah sungai bermaterial aluvium	12.137,06	Vegetasi hutan tepian sungai payau	18.312,86



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	316.365,66	Vegetasi mangrove	5.458,39
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	192.717,76	Vegetasi tera rawa air tawar	1.781,72
Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	Dataran fluvial bermaterial aluvium	2.286,93	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	524,22
	Dataran organik bermaterial gambut	271,38	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	4.603,61
	Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam	126,39	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	31.531,68
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	156.200,10	Vegetasi hutan gambut	271,38
	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	4.990,42	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	382.044,57
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	807,66	Vegetasi hutan pegunungan bawah	22.893,98
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	109.630,58	Vegetasi tera rawa air tawar	2.286,93
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	7.003,48		
	Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	4.603,61		
	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	1.538,45		
	Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik	316,76		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	775,94		
	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	4.672,28		
	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	8.740,29		
	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	11.898,14		
	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	1.047,65		



Ekoregion	KBA	LUAS (Ha)	KVA	LUAS (Ha)
	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	129.246,33		
Danau	Danau	12.149,14	Vegetasi terna tepian danau	9.774,31
			Vegetasi terna tepian danau pegunungan	2.374,83
TOTAL		7.578.630,63	Total	7.578.630,63

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021



Tabel 3.28. Bentang Alam Pada Wilayah Fungsional Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah Ekoregion	Wilayah Administrasi		Fungsi Kawasan Hutan Dominan	Nama Karakteristik Bentang Alam Ekoregion
1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera (Wilayah Laut)	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan		
		Sumatera Barat	Pasaman Barat, Agam, Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan		
		Bengkulu	Muko-muko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Seluma		
2	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Pantai Barat Sumatera	Sumatera Utara	Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan	Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna
		Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan,		
		Bengkulu	Bengkulu Utara		
3	Ekoregion	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Hutan Lindung, Hutan	Dataran Fluvial Sumatera



No	Nama Wilayah Ekoregion	Wilayah Administrasi		Fungsi Kawasan Hutan Dominan	Nama Karakteristik Bentang Alam Ekoregion
	Kompleks Perbukitan Struktural Siranggas-Batang Gadis	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Produksi	Dataran Gambut Sumatera Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
4	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Tesso Nilo - Bukit Dua Belas	Sumatera Utara	Padang Lawas	Hutan Produksi	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Gambut Sumatera Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
		Sumatera Barat	Dharmasraya		
		Riau	Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singgigi, Pelalawan		
		Jambi	Batang Hari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, merangin		
5	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Bukit Rimbang-Bukit Baling Dangku-Bukit Tiga Puluh	Sumatera Utara	Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,	Hutan Produksi	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Gambut Sumatera Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
		Sumatera Barat	Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Payakumbuh Sawahlunto, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar		
		Riau	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan		

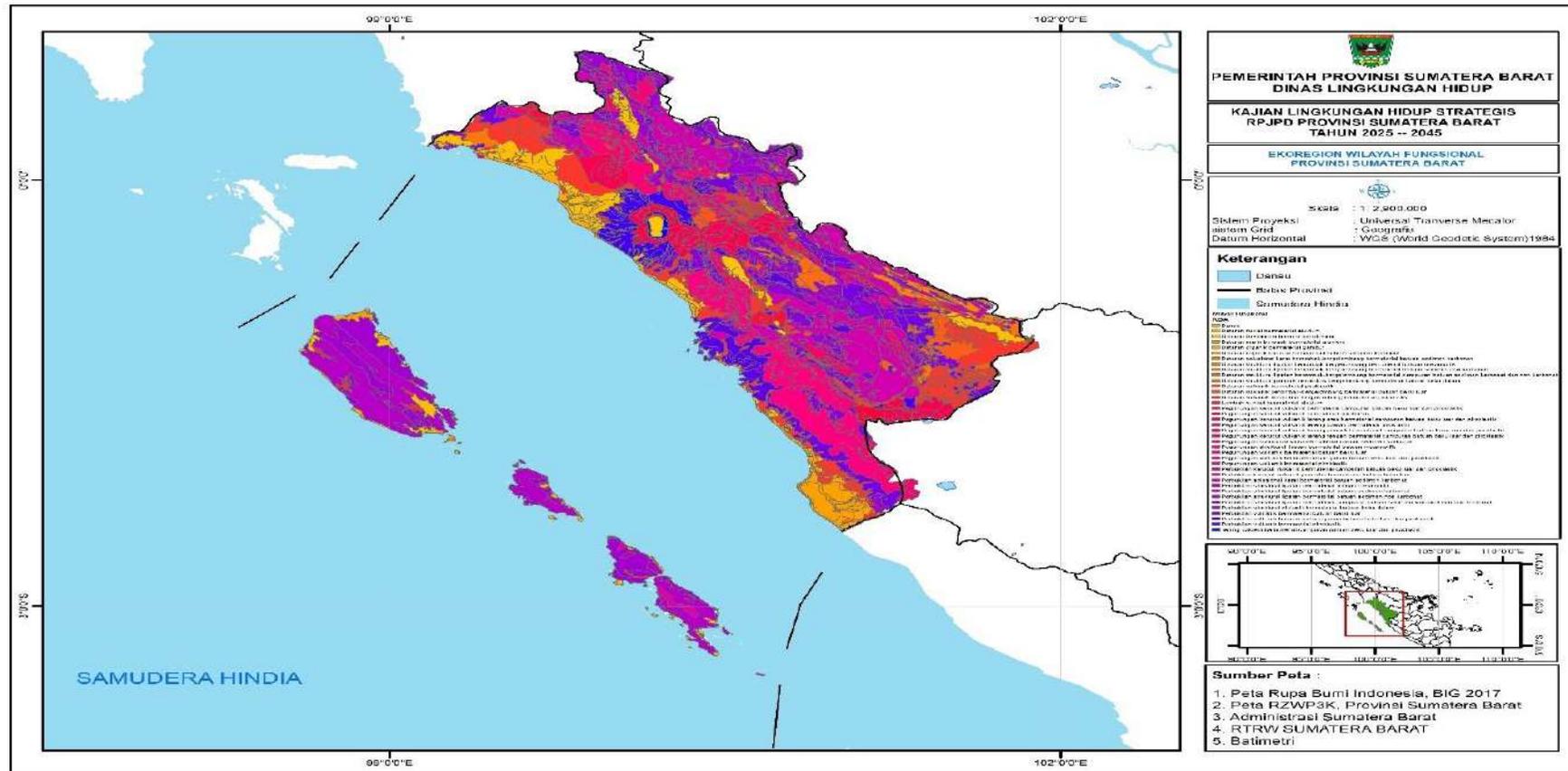


No	Nama Wilayah Ekoregion	Wilayah Administrasi		Fungsi Kawasan Hutan Dominan	Nama Karakteristik Bentang Alam Ekoregion
			Singgigi, Rokan Hulu		
		Jambi	Batang Hari, Bungo, Jambi, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo		
6	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Bukit Barumun - Malampah Alahan Panjang	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir	Hutan Lindung, Hutan Produksi	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
		Sumatera Barat	Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat		
		Riau	Kampar, Rokan Hulu		
7	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Maninjau Utara Selatan - Gunung Sado	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Gambut Sumatera Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
		Sumatera Barat	Agam, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar		
8	Ekoregion	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Hutan Lindung, Hutan	Dataran Denudasional Kompleks Bangka



No	Nama Wilayah Ekoregion	Wilayah Administrasi		Fungsi Kawasan Hutan Dominan	Nama Karakteristik Bentang Alam Ekoregion
	Kompleks Dataran Fluvial Air Bangis	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Produksi	Belitung-Natuna Dataran Fluvial Sumatera Dataran Gambut Sumatera Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
9	Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Kerinci Seblat - Bukit Barisan Selatan	Sumatera Barat	Dharmasraya, Padang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Lindung	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan
		Jambi	Bungo, Kerinci		
		Bengkulu	Muko-muko		
10	Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Muko-Muko - Air Alas	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Hutan Produksi	Dataran Fluvial Sumatera Dataran Gambut Sumatera Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan
		Bengkulu	Muko-muko		

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021



Gambar 3.16. Peta Karakteristik Bentang Alami (KBA) Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2023



3.2.1.2. Hidrologi

Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai mencapai lebih kurang 3.303 sungai dengan 606 sungai telah teridentifikasi. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 (Sembilan) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri, dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Singkarak, Maninjau, Di atas, Di bawah dan Talang). Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar dengan luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 km², sedangkan Danau Di atas (3.150 km²), Danau di Bawah (1.400 km²) dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Wilayah Sumatera Barat merupakan hulu bagi sungai-sungai besar yang ada di pulau Sumatera, sehingga keberadaan tutupan hutan dalam wilayah ini sangat berperan dalam menjaga keutuhan aliran sungai tersebut. Sungai-sungai besar yang mempunyai hulu di daerah Sumatera Barat adalah Sungai Batang Kuantan, Batang Hari dan Indragiri Rokan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaan daerah aliran sungai yang ada pada wilayah Sumatera Barat dikelola oleh tiga Balai Pengelola DAS (BPDAS), yakni :

- a. BPDAS-HL Agam Kuantan mengelola sejumlah 384 DAS dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat
- b. BPDAS-HL Batang Hari mengelola sejumlah DAS dengan wilayah kerja Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. BPDAS-HL Indragiri Rokan mengelola sejumlah 84 DAS dengan wilayah kerja Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Tabel 3.29. Daftar Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Barat

No	Nama DAS/Sub DAS	Lokasi	Luas Wilayah DAS (m ²)
1	Air Haji	Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok Selatan	41.116
2	Air Dingin	Kab. Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Padang	12.802,81
3	Arau	Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Padang	17.467,47
4	Kuranji	Kota Solok, Kota Padang	22.469,58
5	Batang Kapas	Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok	39.004,73
6	Gasam Gadang	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman	8.866,52
7	Kambang	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan	48.031,66
8	Ulakan	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar	11.548,42
9	Pelangai	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan	48.857,43
10	Sikabau	Kab. Pasaman Barat	53.177,47
11	Surantih	Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok, Kab. Solok Selatan	29.726,88
12	Aia Ilang	Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang	3.129,05
13	Bungus	Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang	4.662,37



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Nama DAS/Sub DAS	Lokasi	Luas Wilayah DAS (m ²)
14	Timbulun	Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang	1.769,60
15	Anai	Kab. Agam, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar	70.052,38
16	Mangau	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar	28.830,64
17	Naras	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman	19.478,98
18	Antokan	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman	52.982,77
19	Masang Kiri	Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar	169.198,20
20	Tarusan	Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok	43.449,66
21	Pisang	Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan	3.455,41
22	Bayang	Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok	52.892,27
23	Kinali	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman	37.966,91
24	Manggung	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman	3.216,90
25	Pariaman	Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman	3.216,50
26	Indragiri	Kab. Agam, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya	192.952,85
27	Batang Hari	Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kota Solok, Kab. Solok Selatan	835.452,16
28	Rokan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	221.154,02
29	Kampar	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kota Solok, Kota Padang	269.979,55
30	Sibunian	Mandailing Natal, Kab. Pasaman Barat	13.195,72
31	Batang Tomak	Kab. Pasaman Barat	16.451,99
32	Indrapura	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan	215.519,54
33	Silaut	Kerinci, Kab. Pesisir Selatan, Muko-muko	37.155,40
34	Menjanto Selagan	Kab. Pesisir Selatan	326,94
35	Pasaman	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	162.830,29

Sumber :Pengelolaan dan Profil Kehati Sumatera Barat, 2019

Tabel 3.30. Daftar Sungai (Nama, Luas DAS, Debit Maks dan Debit Minimum) di Provinsi Sumatera Barat

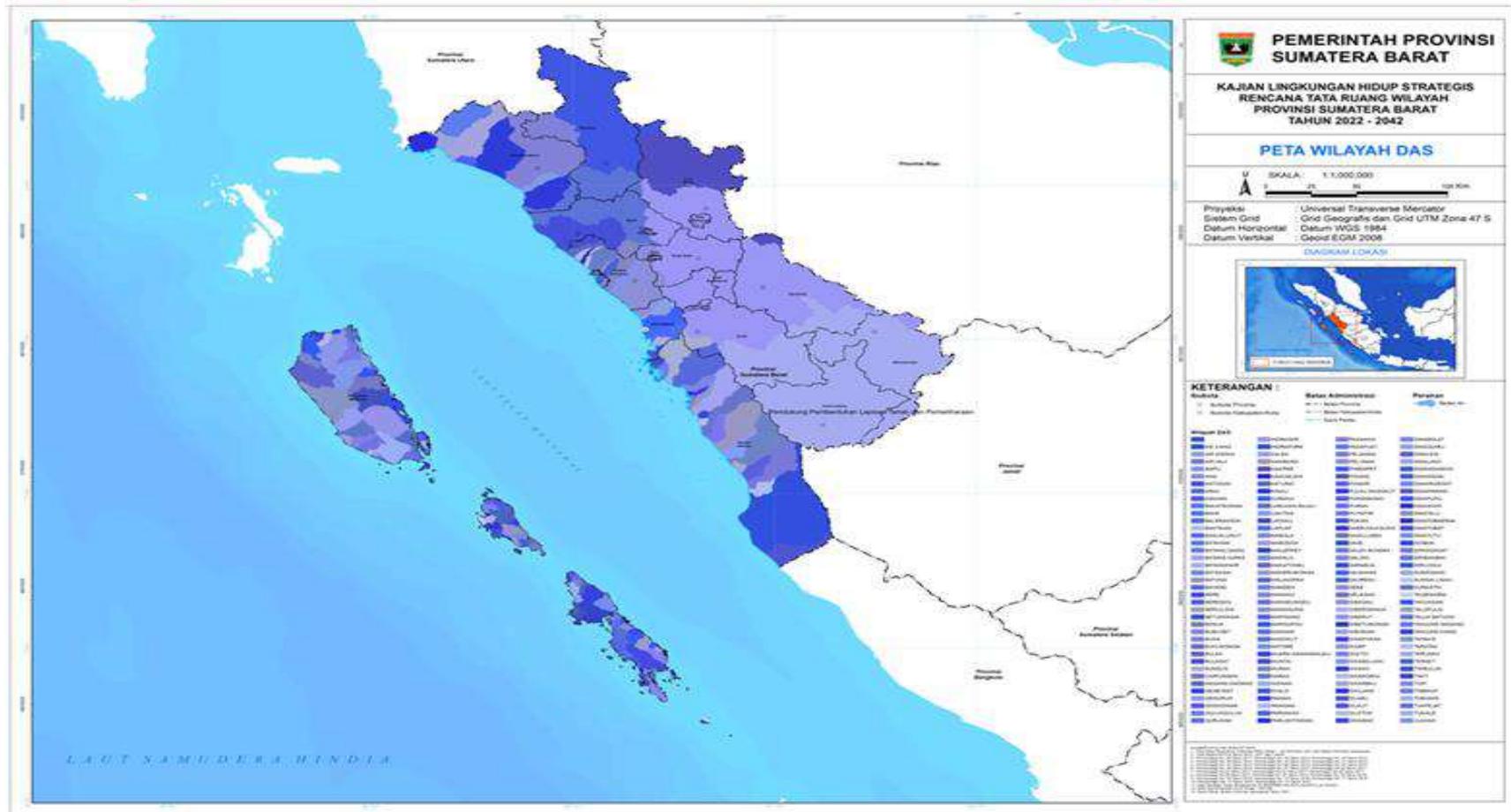
No	Nama Sungai	Luas DAS (km ²)	Debit Maks (m ³ /detik)	Debit Min (m ³ /detik)
1	Batang Agam	272,5	76,62	5,57
2	Batang Ampu	58	12,26	1,29
3	Batang Anai	71,9	21,49	0,86
4	Batang Antokan	200	44,57	1,6
5	Batang Batahan	312	104,49	33,62
6	Batang Hulu Masang	400	32,15	7,74
7	Batang Kalulukan	45,6	62,09	1,32
8	Batang Kapar	63	16,79	7,75



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Nama Sungai	Luas DAS (km ²)	Debit Maks (m ³ /detik)	Debit Min (m ³ /detik)
9	Batang Lampasi	122	23,73	0,94
10	Batang Lembang	152,5	2,1	0,79
11	Batang Lahat	686,2	3,76	0,14
12	Batang Mangau	214,2	15,78	4,4
13	Batang Masang	436	64,42	8,57
14	Batang Naras	51,8	34,41	2,2
15	Batang Ombilin	2.215	514,24	0,49
16	Batang Palangki	611,2	175,93	25,49
17	Batang Patimah	401	148,29	4,28
18	Batang Selo	328,3	73,24	1,27
19	Batang Sikabau	132,5	74,63	4,57
20	Batang Sikilang	156	136,39	3,32
21	Batang Sinamar	1.421	279,05	12,22
22	Batang Sontang	100	2,07	0,47
23	Batang Sukam	511,3	317,91	1,48
24	Batang Sumani I	572,5	95,53	2,18
25	Batang Sumani II	535	50,55	4,87
26	Batang Sumpur Malalo	169,9	40,87	3,83
27	Batang Sumpur Batu Batindih	306	58,34	8,87
28	Batang Tongar I	250	44,48	2,97
29	Batang Tongar II	206	41,81	1,36

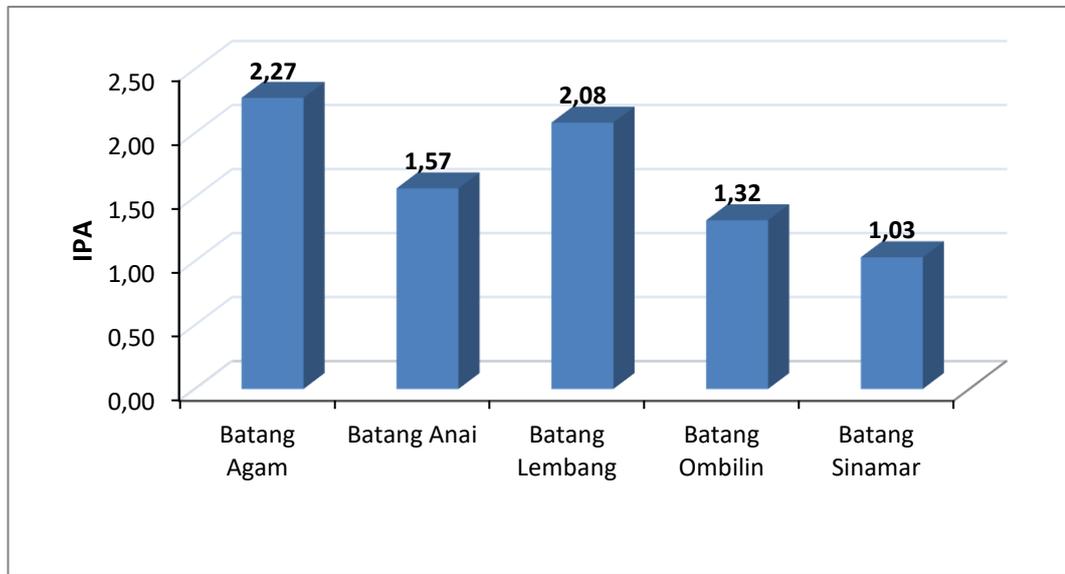
Sumber :Pengelolaan dan Profil Kehati Sumatera Barat, 2019



Gambar 3.18. Peta DAS Sumatera Barat
 Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023-2043



Status mutu air sungai di Sumatera Barat berada pada kategori “tercemar ringan” dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) sebesar 1,65. Nilai ini merupakan hasil perhitungan menggunakan Metode Indeks Pencemaran, mengacu kepada KepMenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.



Sumber: DLH Prov. Sumbar, 2022.

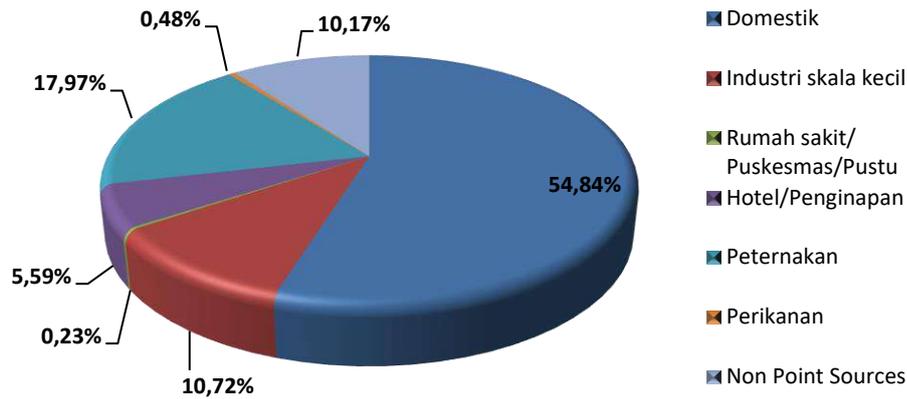
Gambar 3.19. Indeks Pencemaran Air Sungai di Sumatera Barat

Merujuk kepada PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH maka sungai-sungai di Sumatera Barat terkategori tercemar ringan, yaitu berada pada range nilai $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, kualitas air sungai di Sumatera Barat, umumnya tergolong cukup baik, kecuali sungai tertentu yang mendapat tekanan cukup tinggi baik oleh kegiatan domestik, industri, pertambangan, pertanian maupun aktifitas lainnya.

Perubahan kuantitas air sungai berbeda untuk masing-masing sungai, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah topografi, kondisi DAS, dan pengaruh dari aktifitas manusia.

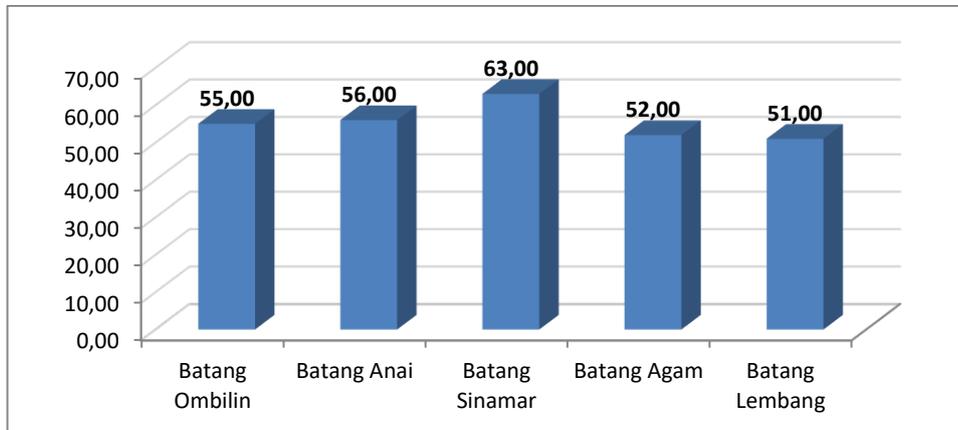
Salah satu sungai strategis Sumatera Barat yang cukup mendapat tekanan dari berbagai aktifitas manusia adalah Sungai Batang Agam. Sungai ini melintasi 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Sekitar 54,84% sumber pencemar Sungai Batang Agam adalah aktifitas domestik.



Sumber: DLH Prov. Sumbar, 2022

Gambar 3.20. Beban Pencemar Sungai Batang Agam Pada Sub DAS Batang Agam

Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), sungai-sungai di Sumatera Barat terkategori “sedang” dengan berada pada range nilai $50 \leq x < 70$, menurut PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

Gambar 3.21. Indeks Kualitas Air Sumatera Barat

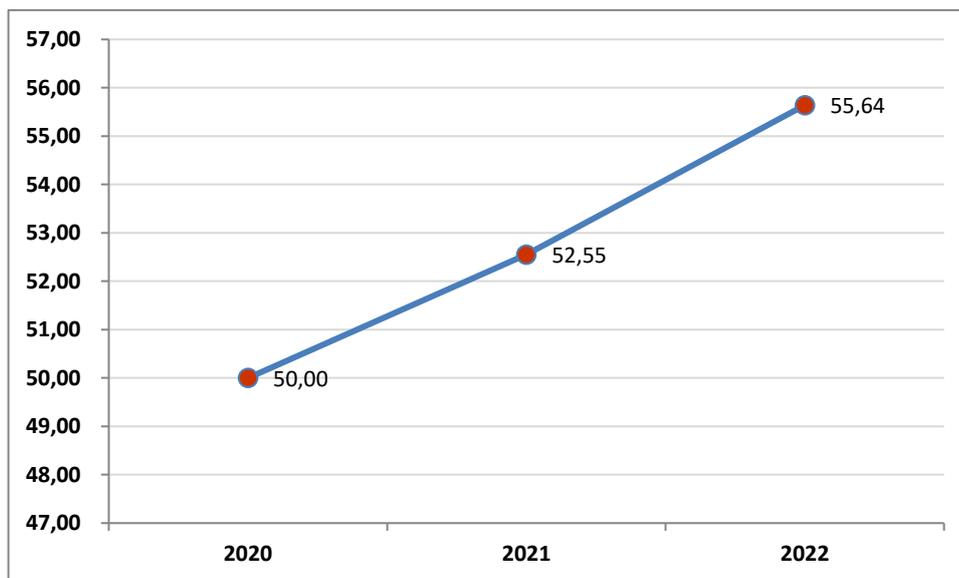
Pada grafik di atas, Sungai Batang Sinamar memiliki nilai IKA terbaik, karena sungai ini mulai dari hulu hingga hilirnya yang bermuara ke Sungai Batang Ombilin, dilalui oleh hutan yang betebing dan curam.

Sungai Batang Lembang yang melintasi dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Solok dan Kota Solok, banyak mendapat tekanan dari aktifitas pertanian dan domestik, serta industri skala kecil.



Keberadaan dan aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) yang merupakan penyumbang beban pencemar terbesar Danau Maninjau yaitu sekitar 91,62% dengan jumlah KJA pada tahun 2021 sebanyak 17.417 petak KJA. Jumlah KJA ini sudah melewati ambang batas yang telah ditetapkan oleh Perda Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 yaitu sebanyak 6.000 petak KJA. Pakan ikan yang ditebar di sekitaran perairan mengendap di dasar danau membentuk sedimen organik sebanyak ± 9.324 ton/tahun atau terakumulasi sebanyak 261.072 ton selama 28 tahun semenjak tahun 1991.

Dari hasil pemantauan kualitas air laut terhadap 7 (tujuh) kabupaten/kota, konsentrasi pencemarnya melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, yaitu parameter Total Suspended Solid (TSS) dan Amonia yang pada umumnya ditemukan di daerah wisata. Untuk parameter TSS melebihi bakumutu pada daerah wisata pantai di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan untuk parameter amonia melebihi bakumutu terdapat pada daerah wisata di Kota Padang, Kota Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

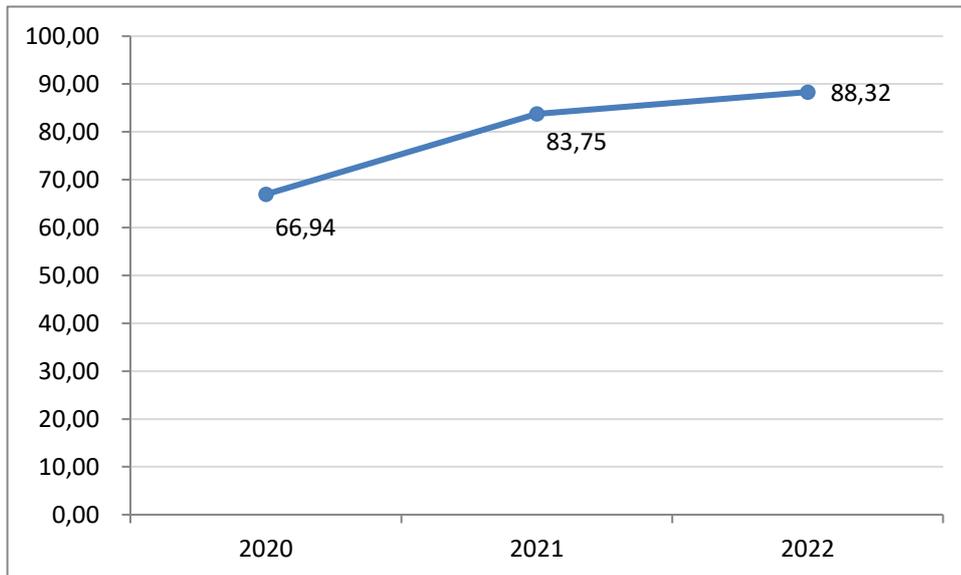


Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

Gambar 3.22. Indeks Kualitas Air Sumatera Barat Menurut Waktu (2020-2022)

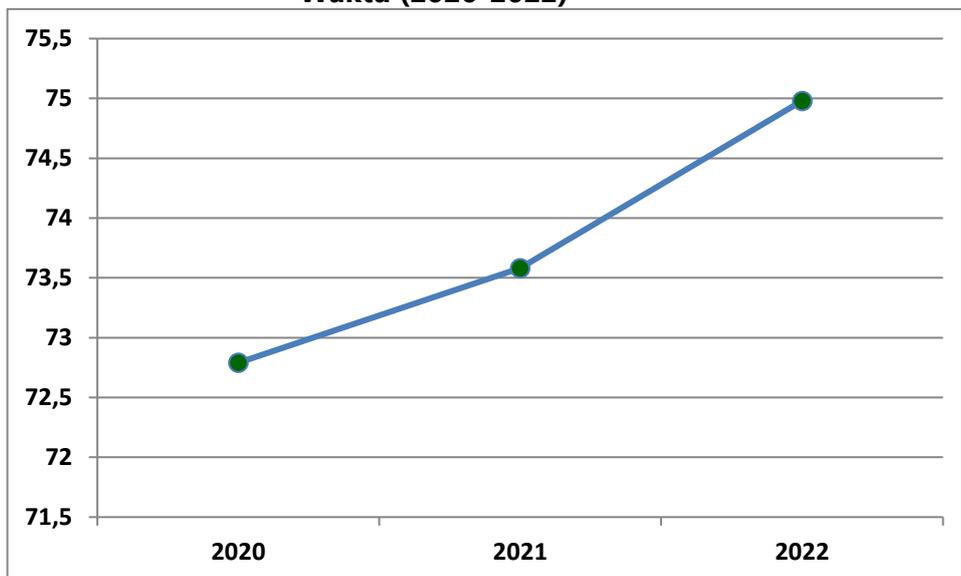


Jika dilihat dari grafik diatas, maka Indeks Kualitas Air (IKA) Sumatera Barat dengan kecenderungan membaik dari tahun 2020 hingga tahun 2023.



Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

Gambar 3.23. Indeks Kualitas Air Laut Sumatera Barat menurut Waktu (2020-2022)



Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

Gambar 3.24. IKLH Sumatera Barat menurut Waktu (2020-2022)

Sejalan dengan kondisi IKA, maka jika dilihat dari grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diatas, maka kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat dengan kecenderungan membaik.



3.2.1.3. Hidrogeologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Berikut daftar CAT di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.31. Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat

No	Nama CAT	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan	
				a	B
1	Natal-Ujunggading	282.500	1. Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandihiling Natal 2. Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat		X
2	Lubuk Sikaping	21.700	1. Kabupaten Pasaman	X	
3	Padang Pariaman	533.100	1. Kabupaten Pasaman Barat 2. Kabupaten Padang Pariaman 3. Kabupaten Agam 4. Kota Padang 5. Kabupaten Tanah Datar 6. Kabupaten Solok 7. Kota Pariaman	X	
4	Bukittinggi	29.600	1. Kota Bukittinggi 2. Kabupaten Agam 3. Kabupaten Tanah Datar	X	
5	Payakumbuh	66.800	1. Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Kota Payakumbuh 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kabupaten Agam	X	
6	Alang Lawas	16.700	1. Kabupaten Tanah Datar 2. Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Kabupaten Sijunjung 4. Kota Sawahlunto	X	
7	Batusangkar	43.200	1. Kabupaten Tanah Datar 2. Kota Padang Panjang	X	
8	Solok	132.500	1. Kota Solok 2. Kota Padang 3. Kabupaten Tanah Datar 4. Kabupaten Solok	X	
9	Muaro Bungo	551.000	1. Provinsi Sumatera Barat a. Kabupaten Dhamasraya b. Kabupaten Solok Selatan 2. Provinsi Jambi a. Kabupaten Bungo b. Kabupaten Tebo c. Kabupaten Merangin		X



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Nama CAT	Luas	Lokasi	Keterangan
			d. Kabupaten Batanghari	
10	Painan-Lubuk Pinang	1.046.000	1. Provinsi Sumatera Barat a. Kabupaten Solok Selatan b. Kabupaten Solok c. Kabupaten Pesisir Selatan d. Kota Padang 2. Provinsi Jambi a. Kabupaten Kerinci b. Kabupaten Merangi 3. Provinsi Bengkulu a. Kabupaten Bengkulu Utara b. Kabupaten Muko-muko	X
11	Kayu Aro-Padang Aro	281.000	1. Provinsi Sumatera Barat a. Kabupaten Solok b. Kabupaten Solok Selatan c. Kabupaten Dhamasraya 2. Provinsi Jambi a. Kabupaten Kerinci b. Kabupaten Bungo	X

Sumber : Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017

Ket :

a : Lintas Kab/Kota

b : Lintas Provinsi

3.2.1.4. Geologi

Struktur Geologi di Provinsi Sumatera Barat adalah berupa batuan yang memiliki banyak manfaat dalam hal pertambangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.32. Struktur Geologi di Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama	Keterangan
1	MLt	Batubara
2	MPip	Batu Granit
3	Muw	Batu Meta Volcanic Campur Batu Gamping
4	PCKl	Batu sabah campur batu gamping
5	PCKs	Batu sabak campur kuarsa
6	Pps	Batu gamping campur batu tufa vulcanic
7	pTd	Batu Diabas Basalt
8	pTgs	Batu Serpentin
9	pTgt	Batu Kwarsa
10	pTps	Batu filit, kwarsa campur batu lanau
11	Puku	Batu Sabak
12	Qh	Alluvium



No.	Nama	Keterangan
13	Qpt	Batu apung tufa
14	Qta	Batu Lanau
15	QTta	Batu andesit campur tufa
16	Qvmt	Batu Andesit
17	Qvte	Batu lava/lahar
18	TLs	Batu gamping
19	Tmda	Batu Dasit
20	TMiab	Batu Granodiorit
21	Tmid	Batu phirit campur diorit
22	Tmbt	Shallow marine environment
23	Tmisp	Batu Diorit
24	Tmou	Batu napal dan lempung
25	Tmpb	Batu Napal Campur Gamping
26	Tmpsa	Batu tupa, lanau dan lempung
27	Tms	Batu kuarsa campur batu lanau
28	Tmv	Batu Volcanic
29	Tos	Batu Napal Campur Andesit

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2043



3.2.1.5. Geomorfologi

Geomorfologi Sumatera Barat secara umum merupakan deretan pegunungan bukit barisan dimana terdapat gunung api aktif pada bagian baratnya dan pada bagian timur berupa dataran alluvial yang merupakan sedimentasi dari pegunungan bukit barisan. Sumatera Barat dengan bentang alam yang memiliki tipe lahan landai, datar dan berbukit-bukit. Dengan bentuk lahan berupa Denudasional, Fluvial, Karst, Marine, Struktural dan Vulkanik. Mayoritas geomorfologi adalah Denudasional, yaitu suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak masa batuan (*mass wating*) dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi (yang menyebabkan kenaikan permukaan bumi).

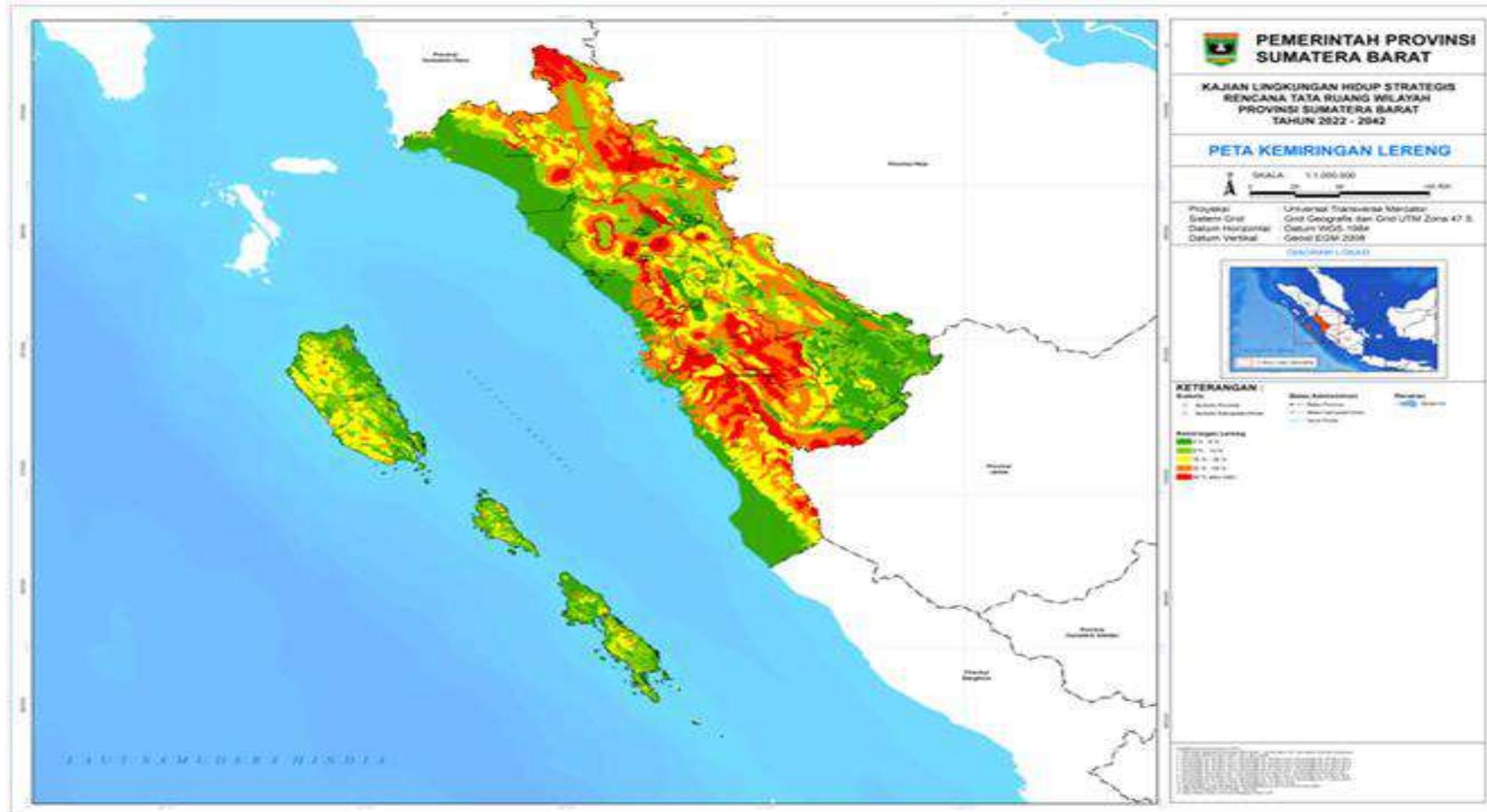
3.2.1.6. Topografi

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kondisi topografi yang sebagian berupa dataran tinggi yang berada pada ketinggian 0 - 3.805 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng 0% - >40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.33. Jenis Kemiringan lereng di Provinsi Sumatera Barat

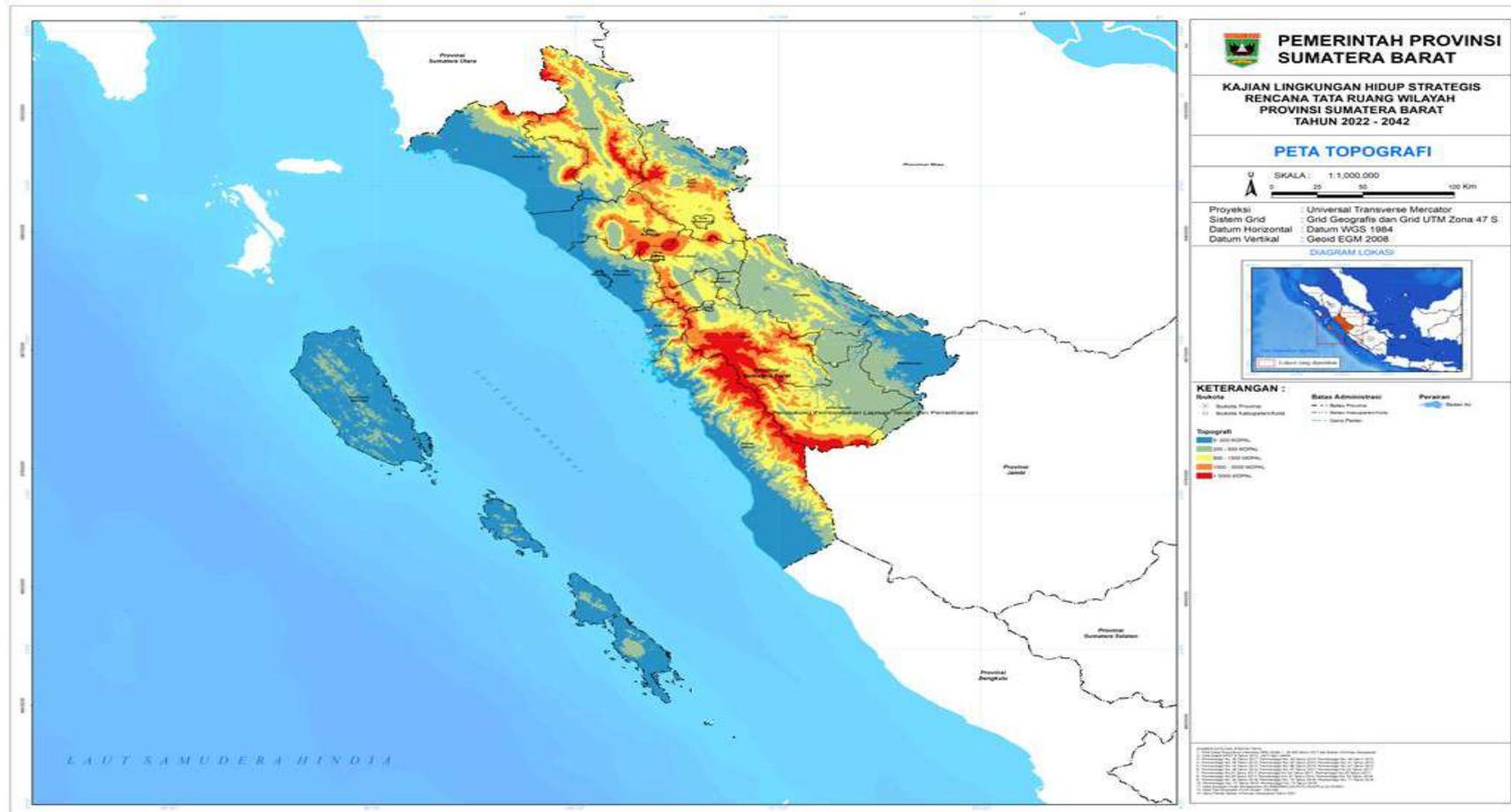
No	Lereng	Luas	%	Keterangan
1	0 % - 8 %	1.184.980,40	28,1	Datar
2	8 % - 14 %	760.059,00	18,1	Landai
3	15 % - 25 %	854.675,80	20,3	Agak Curam
4	25 % - 40 %	994.570	23,6	Curam
5	40 % atau lebih	417.669	9,9	Sangat Curam
	Jumlah	4.211.954,20	100	

Sumber : Pengolahan Data DEMNAS BIG Tahun 2018



Gambar 3.25. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



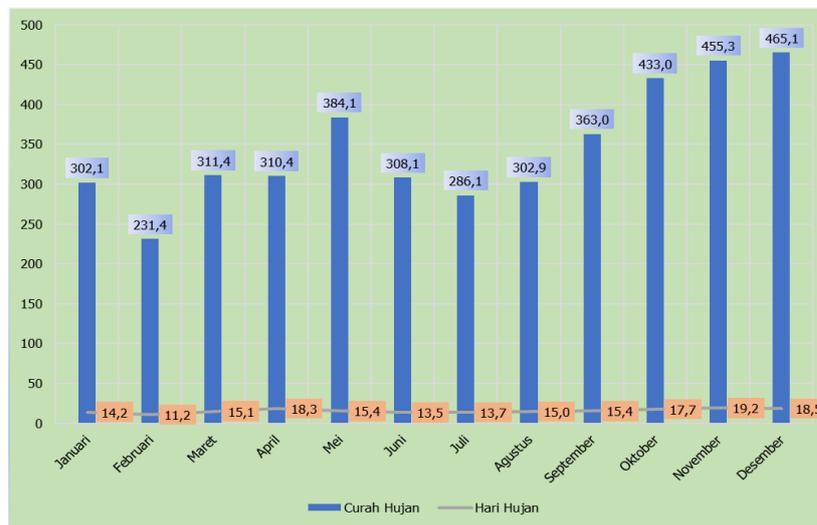
Gambar 3.26. Peta Topografi Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



3.2.1.7. Klimatologi

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam iklim tropika basah. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt-Fergusson, daerah ini dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B, dan C. Sumatera Barat memiliki kisaran suhu antara 18°C-34°C dengan suhu rata-rata ±25,5°C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5°C - 7°C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 79%- 87% dengan kecepatan angin 1,25 0 7,72 knot. Tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Sedangkan rata-rata hujan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.



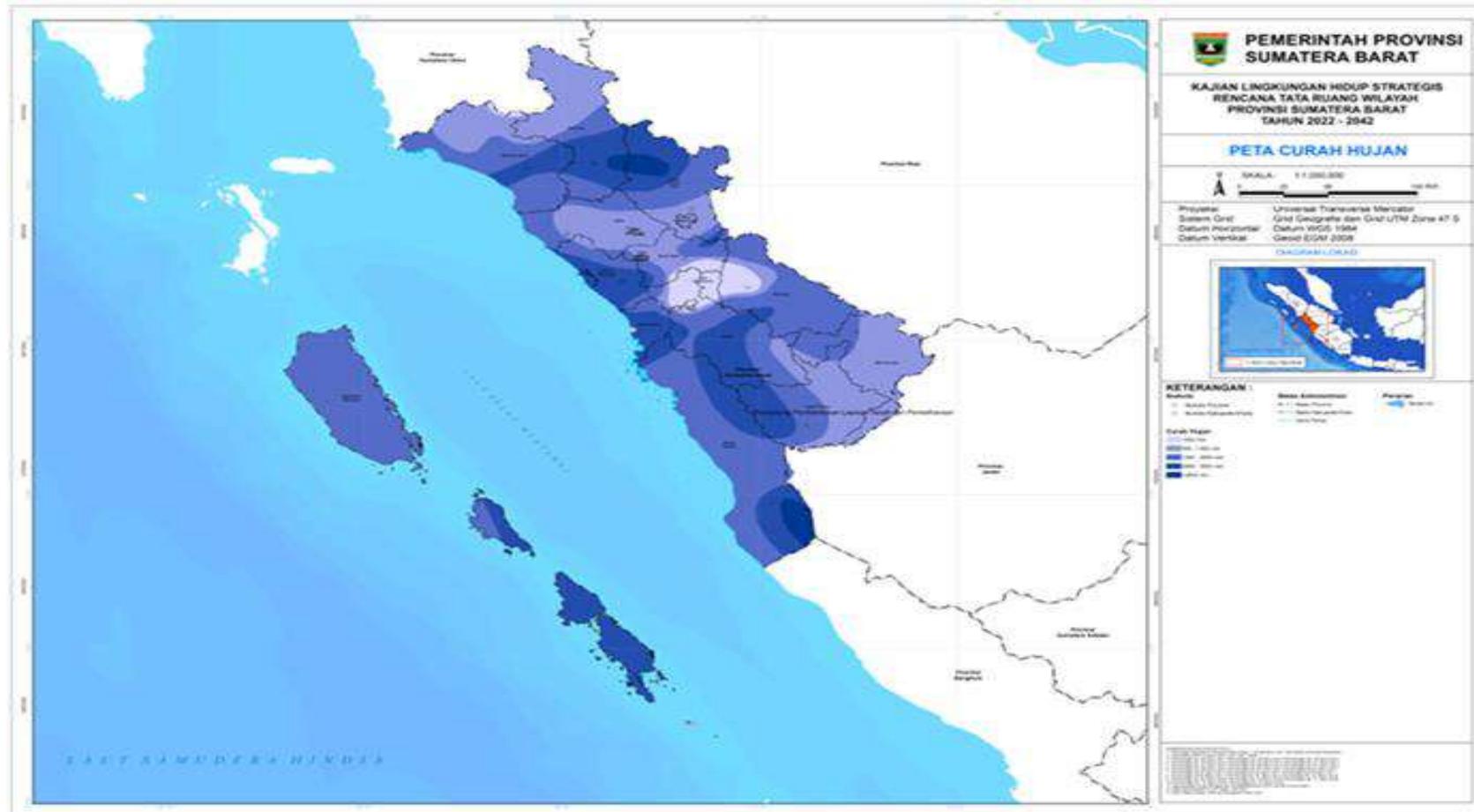
Gambar 3.27. Grafik Curah Hujan dan Hari Hujan Prov. Sumatera Barat
Sumber : Hasil Analisis, 2022



Tabel 3.34. Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Berdasarkan Bulan Selama 10 Tahun Terakhir Provinsi Sumatera Barat

NO	BULAN	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Curah hujan (mm)	Hari hujan																		
1	Januari	291	10	258	16	233,4	11	450	18	154,4	10	273	17	443,9	14	332,3	17	174,30	19	391,90	23
2	Februari	129	8	204	4	324	10	183	11	292,4	9	106	12	203,4	12	80,3	9	413,80	13	225,20	18
3	Maret	222	9	301	10	479,5	17	231	10	267,8	19	297	17	377,2	18	438,2	24	414,00	18	351,80	25
4	April	450	19	286	17	431,3	19	266	19	361,5	16	252	20	227,9	22	235	17	340,90	17	323,60	20
5	Mei	330	18	196	12	617,9	19	644	15	435,9	19	147	11	459,2	19	467,6	16	233,60	17	271,20	18
6	Juni	373	15	300	15	762,1	14	151	9	233	9	428	17	199,2	15	239,6	14	492,30	24	315,80	17
7	Juli	250	12	171	11	524,6	16	385	12	157,8	13	240	11	324,4	19	180,6	14	300,50	11	500,90	19
8	Agustus	128	12	363	17	638,5	17	535	19	140,1	15	126	14	188,5	15	369,6	21	473,90	17	626,10	18
9	September	287	13	113	11	582,1	26	544	17	383,2	19	58	6	680,3	21	531,4	16	674,50	21	167,00	11
10	Oktober	563	16	92	11	754,1	22	309	13	756,7	24	185	11	443	17	269,1	21	687,90	26	141,90	19
11	November	412	20	352	15	206,6	16	951	24	582,4	22	130	9	644,5	23	278,1	20	734,00	27	150,10	21
12	Desember	326	17	406	17	520,9	22	223	8	462,7	13	398	23	245,7	17	679,5	21	413,50	20	160,00	21

Sumber : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2014-2023, 2024



Gambar 3.28. Peta Curah Hujan Provinsi Sumatera Barat
Sumber : Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



3.2.1.8. Kawasan Karst

Karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), aliran bawah permukaan dan gua-gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu kapur (*gamping*). Karst (diadaptasi dari bahasa Belanda), Karst yang dikenal di Indonesia diadopsi dari bahasa Yugoslavia/Slovenia, lewat istilah geologi internasional yang dipakai dalam bahasa Belanda. Istilah aslinya adalah *krast* yang merupakan nama suatu kawasan di perbatasan antara Yugoslavia dengan Italia timur laut, dekat wilayah pariwisata Trieste (Adji et al., 1999).

Daerah karst terbentuk oleh pelarutan batuan pada litologi tertentu, terutama batuan karbonat dan dolomit dimana ada bagian yang kondisinya cenderung terbentuk gua (*favourable*). Daerah seperti ini disebut karst asli. Daerah karst dapat juga terbentuk oleh proses cuaca, kegiatan hidraulik, pergerakan tektonik, air dari pencairan salju dan pengosongan batu cair (*lava*). Secara ekologi, ekosistem Karst berperan dalam proses penyimpanan dan pemasokan air tanah yang sangat dibutuhkan oleh kawasan yang berada di bawahnya karena keberadaan gua-gua dan sungai-sungai bawah tanah. Ekosistem karst juga merupakan habitat spesies-spesies endemik flora maupun fauna sebagai sumber daya genetik yang fungsinya belum banyak diketahui dan masih perlu dikaji secara ilmiah. Secara ekonomi, ekosistem karst juga merupakan produsen batu kapur yang sangat banyak kegunaannya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Ekosistem Karst menjadi penting dan strategis keberadaannya karena terdapat sumberdaya alam bernilai tinggi di dalamnya, yaitu:

1) Sumberdaya Mineral

Salah satu sumberdaya mineral yang terbesar di kawasan karst adalah batuan karbonat. Batuan karbonat merupakan sumberdaya mineral yang penting baik sebagai bahan bangunan, batu hias, dan industri. Sebagai bahan bangunan batuan karbonat digunakan untuk fondasi rumah, jalan, jembatan, dan isian bendungan. Pemanfaatan terbesar batugamping di Indonesia adalah sebagai bahan baku semen. Batuan karbonat juga digunakan sebagai bahan baku industri dalam pembuatan karbid, peleburan baja, bahan pemutih, soda abu, penggosok, pembuatan logam magnesium, pembuatan alumina, plotasi, pembasmi hama, penjernih air, bahan pupuk, dan keramik. Manfaat batuan karbonat terutama marmer yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai batu hias, yaitu sebagai lantai, dinding, atau cinderamata.



2) Sumberdaya Lahan

Lahan yang berpotensi cukup tinggi di kawasan karst adalah di lembah-lembah atau dolin pada daerah karst. Potensi lahan semakin lebih baik apabila proses-proses fluvial mulai bekerja disamping proses solusional. Tanah yang berkembang di lembah-lembah atau dolin pada umumnya *terarosa* dengan tekstur lempungan, kedalaman sedang, warna kemerah-merahan. Lahan di kawasan karst, terutama di daerah lembah dapat ditanami tanaman semusim lahan kering atau sawah tadah hujan. Disamping itu, lahan di daerah tersebut sangat sesuai untuk tanaman jati. Beberapa komoditas pertanian lain saat ini banyak diusahakan oleh masyarakat

3) Sumberdaya Air

Sifat akifer karst yang unik dan sukar untuk diprediksi, akifer yang berupa lorong konduktif, permeabilitas batuan yang tidak seragam, serta banyaknya retakan yang menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam satuan tubuh perairan karst merupakan suatu hal yang menantang untuk diteliti serta dikaji lebih dalam. Akifer yang unik menyebabkan sumberdaya air di kawasan karst terdapat sebagai sungai bawah tanah, mataair, danau dolin/telaga, dan muara sungai bawah tanah (*resurgence*). Kawasan karst disinyalir merupakan akifer yang berfungsi sebagai tandon terbesar keempat setelah dataran aluvial, vulkan, dan pantai. Walaupun saat ini dirasa masih terlalu mahal untuk memanfaatkan sungai bawah tanah, dimasa mendatang akifer karst merupakan sumber air yang dapat diharapkan.

4) Sumberdaya Hayati

Sumberdaya hayati kawasan karst terutama yang telah berkembang menjadi karst yang menonjol adalah kehidupan hayati di ekosistem goa. Walaupun tidak melimpah, kehidupan gua memiliki arti penting terutama dalam ilmu pengetahuan. Ekosistem goa telah menjadi obyek kajian yang menarik bagi ahli ilmu biologi untuk mempelajari pola adaptasi fauna dari lingkungan terang ke lingkungan gelap abadi. Disamping itu, goa merupakan habitat burung Walet dengan sarangnya yang sangat mahal nilai jualnya.

5) Sumberdaya *Landscap*

Lanksekap di kawasan karst mempunyai nilai keindahan dan keunikan yang tinggi, baik di permukaan (*eksokarst*) maupun bawah permukaan (*endokarst*). Di permukaan, kawasan karst dihiasi oleh ribuan kubah-kubah karst atau menara karst dengan sesekali ditemukan ngarai yang terjal, dolin, dan danau dolin. Keindahan panorama karst juga dapat dijumpai apabila karst berbatasan dengan laut dengan membentuk tebing-tebing terjal (*cliff*). Keindahan di bawah permukaan kawasan karst didapatkan pada goa-goa



beserta ornamennya. Goa-goa tersebut dapat berupa goa vertikal (*shaft*), *cimne*, maupun goa horinsontal. Sedangkan ornamen (*speleothem*) yang dimiliki goa sangat bervariasi baik bentuk, warna, dan ukurannya. Keunikan lain dari goa adalah terdapatnya ruangan bawah tanah (*chamber*) dan sungai di beberapa goa dengan bendungan alamnya. Luas ruangan bawah tanah bisa mencapai satuan hektar, walaupun dipermukaan hanya berdiameter satu atau dua meter.

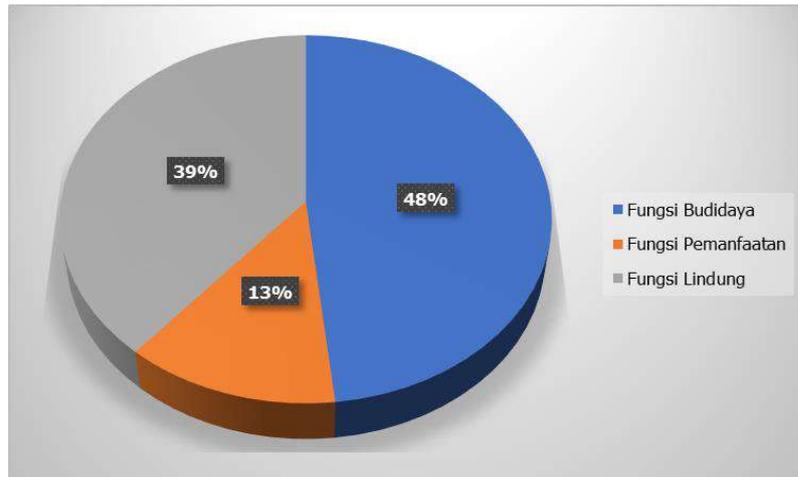
Keberadaan ekosistem karst di Sumatera Barat tersebar hampir merata. Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada, 16 di antaranya yang berada di *mainland* (daratan Sumatera) memiliki singgungan dengan ekosistem karst. Tabel berikut ini merupakan daftar lokasi ekosistem karst di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.35. Data Kabupaten/Kota dalam Wilayah Studi Karst di Provinsi Sumatera Barat

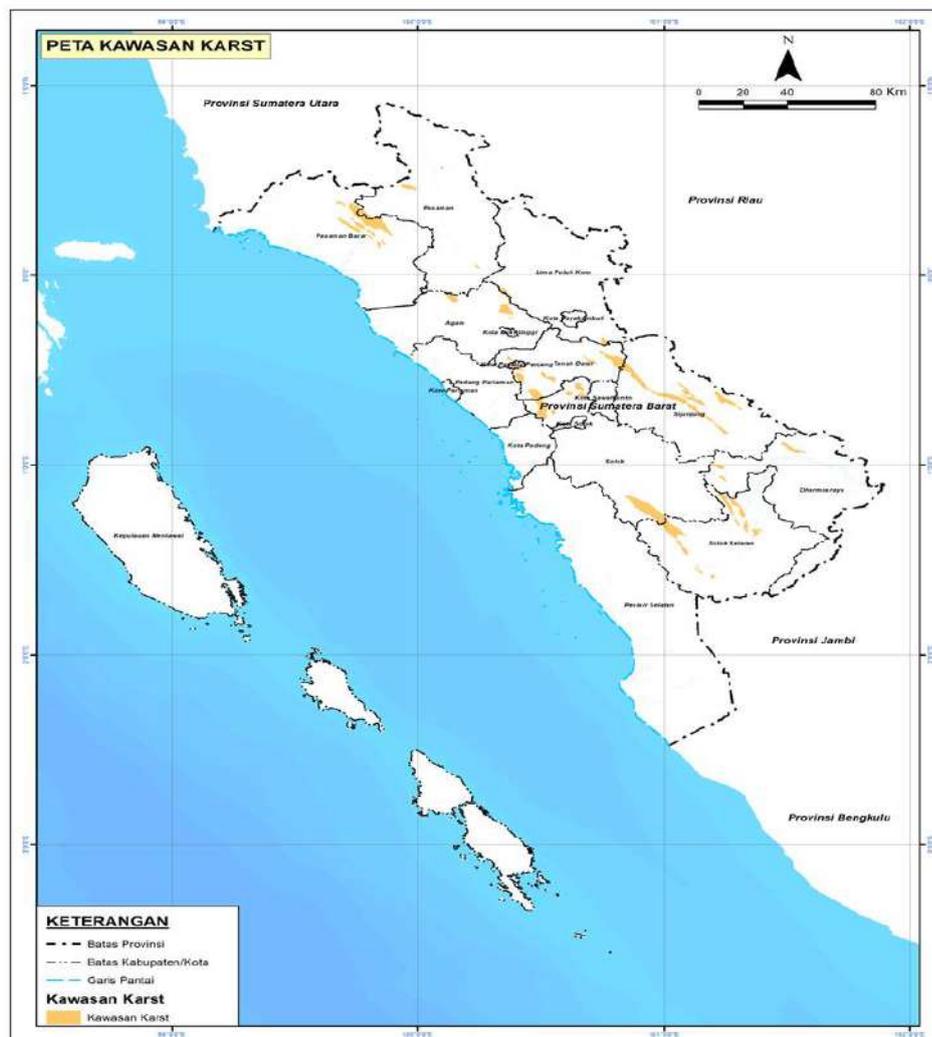
No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder
1	Kabupaten Solok	141.312,85	26.826,00	43.302,00
2	Sijunjung	138.476,57	5.987,50	48.587,50
3	Tanah Datar	92.787,26	11.062,10	20.385,00
4	Solok Selatan	86.621,64	8.383,50	48.707,00
5	Pasaman Barat	60.607,39	2.016,20	20.943,40
6	Dharmasraya	57.594,97	1.975,50	12.791,60
7	Agam	57.020,98	2.080,60	20.261,20
8	Lima Puluh Kota	43.595,57	-	14.158,20
9	Pasaman	29.903,05	2.666,70	15.388,30
10	Sawahlunto	13.031,13	-	501,9
11	Padang	12.428,03	5.380,40	1.886,50
12	Padang Pariaman	8.442,59	3.309,50	2.729,30
13	Payakumbuh	3.238,70	-	136,2
14	Pesisir Selatan	3.117,77	2.617,40	16,6
15	Kota Padang Panjang	2.241,71	-	530,6
16	Kota Solok	1.803,82	-	249,5
	Luas Total	752.224,03	72.305,40	250.574,80

Sumber : Dokumen Karst Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel di atas hasil penafsiran tutupan hutan pada kawasan karst Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 seluas 332.880 Ha, kondisi hutan yang masih primer adalah 72.305 ha (22%) dan hutan sekunder mencapai 250.574 ha (78%). Berdasarkan gambar dibawah ini 48% ekosistem karst di Sumatera Barat berada pada kawasan dengan fungsi area penggunaan lain. Kondisi ini menyebabkan daerah tersebut rentan terhadap perubahan seperti penambangan, pertanian, perladangan dan lain-lain.



Gambar 3.29. Grafik Fungsi Kawasan Hutan pada Kawasan Karst



Gambar 3.30. Peta Kawasan Karst

Sumber : Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



3.2.1.9. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 30 tahun mengalami perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan adalah penggunaan lahan perkebunan dan permukiman secara rincin dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.37 dan Gambar 3.34 berikut.

Tabel 3.36. Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Barat

Penggunaan Lahan	Tahun			
	1990	2000	2011	2020
Bandara/Pelabuhan	487,684	558,395	662,669	435,643
Hutan Lahan Kering Primer	597.349,434	594.977,672	581.283,775	592.537,748
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.687.588,994	1.529.004,138	1.344.927,269	1.202.961,855
Hutan Mangrove Primer	12.565,400	290,468	12.462,253	12.685,240
Hutan Mangrove Sekunder	2.578,260	31.439,673	1.902,528	3.361,440
Hutan Rawa Primer	3.287,540	338,217	1.735,316	1.096,725
Hutan Rawa Sekunder	176.794,800	98.925,533	46.548,552	26.336,891
Hutan Tanaman	7.176,400	857,166	8.656,308	44.922,117
Lahan Terbuka	5.453,823	21.074,674	34.316,555	11.821,166
Perkebunan	115.254,510	224.879,096	382.794,165	521.503,164
Permukiman	27.075,741	140.913,510	29.717,996	60.348,600
Permukiman Transmigrasi	700,770	175,469	754,479	1.565,016
Pertambangan	1.458,468	1.301,994	1.917,018	2.638,658
Pertanian Lahan Kering	402.113,364	423.138,014	507.182,857	483.123,715
Pertanian Lahan Kering Campur	666.886,071	707.025,739	706.924,097	722.039,884
Rawa	527,437	877,438	855,654	1.245,394
Sawah	245.850,217	252.541,789	240.005,001	243.280,128
Semak Belukar	180.919,680	159.555,404	254.171,817	224.070,975
Semak Belukar Rawa	43.171,120	13.624,501	20.235,193	18.243,875
Tambak	0.000	0.000	25,147	25,147
Tubuh Air	31.793,438	7.534,263	31.954,505	39.469,947
Lain lain	2.140,849	2.140,849	2.140,849	-
Luas Total	4.211.954,20	4.211.954,20	4.211.954,20	4.211.954,20

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2022



3.2.1.10. Ekosistem Pesisir

1. Mangrove

Mangrove (hutan bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Dalam tinjauan siklus biomassa, hutan mangrove memberikan masukan unsur hara terhadap ekosistem air, menyediakan tempat berlindung dan tempat asuhan bagi anak-anak ikan, tempat kawin/pemijahan, sumber makanan utama bagi organisme air di daerah mangrove adalah dalam bentuk partikel bahan organik (detritus) yang dihasilkan dari dekomposisi serasah mangrove (seperti daun, ranting dan bunga) dan lainnya. Selama proses dekomposisi, serasah mangrove berangsur-angsur meningkat kadar proteinnya dan berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai organisme pemakan deposit seperti moluska, kepiting dan cacing polychaeta. Konsumen primer ini menjadi makanan bagi konsumen tingkat dua, biasanya didominasi oleh ikan-ikan buas berukuran kecil selanjutnya dimakan oleh juvenil ikan predator besar yang membentuk konsumen tingkat tiga. Hutan mangrove berperan penting dalam menyediakan habitat bagi aneka ragam jenis-jenis komoditi penting perikanan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari siklus hidupnya. Jadi jelaslah bahwa Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir.

Berdasarkan analisis data tahun 2022 luas hutan mangrove Sumatera Barat seluas 11.613,42 Ha. Mangrove di Sumatera Barat terdiri mangrove non lindung seluas 7.333,37 Ha dan mangrove lindung seluas 4.280,05 Ha. Wilayah kabupaten/kota pesisir yang memiliki ekosistem mangrove terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 9.279,24 Ha. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas ekosistem mangrove terkecil adalah Kota Pariaman yaitu dengan luas 29,11 Ha. Untuk lebih jelasnya tentang luas kondisi ekosistem mangrove di masing-masing kabupaten/kota pesisir Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.37. Luas Hutan Mangrove di Provinsi Sumatera Barat.

No	Kabupaten/Kota	Luas Mangrove (Ha)	Luas Mangrove Lindung (Ha)	Luas Total (Ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	758,08	70,89	828,97
2	Kota Padang	109,32	6,76	116,08
3	Kabupaten Padang Pariaman	33,89	-	33,89



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

4	Kota Pariaman	29,11	-	29,11
5	Kabupaten Agam	85,13	126,21	211, 34
6	Kabupaten Pasaman Barat	338,41	776,38	1.114,79
7	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.979,43	3.299,81	9.279,24
Total		7.333,37	4.280,05	11.613,42

Sumber: Hasil analisis tahun 2022

Secara umum mangrove di dominasi oleh *Rhizophora apiculata* dari setiap lokasi pengambilan data sampling nilai yang tertinggi dapat ditemukan di lokasi Teluk Betung dengan Kepadatan 9566,67 (ind/ha) sedangkan yang terendah terdapat pada Pulau Marak dengan kepadatan 2500,00 (ind/ha) distribusi nilai disajikan dengan (KR) Kerapatan Relatif dan (NP) Nilai Penting, hal ini di pengaruhi oleh substrat dasar yang kebanyakan lumpur berpasir yang secara ekologi cocok untuk jenis tersebut dapat disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.38. Penghitungan Struktur Komunitas Mangrove.

Lokasi	Jenis	Jumlah	K (ind/ha)	KR	F	FR	BA	D	DR	NP (%)
Teluk Betung	<i>R.a</i>	94	3133,33	94,95	1,00	50,00	4119,73	13,73	71,80	216,75
	<i>S.a</i>	2	66,67	2,02	0,33	16,67	1443,94	4,81	25,17	43,85
	<i>B.g</i>	3	100,00	3,03	0,67	33,33	173,81	0,58	3,03	39,39
	Jumlah	99	3300,00	100,00	2,00	100,00	5737,48	19,12	100,00	300,00
Panasahan	<i>R.a</i>	235	7833,33	99,58	1,00	75,00	6611,96	22,04	91,57	266,14
	<i>S.a</i>	1	33,33	0,42	0,33	25,00	609,03	2,03	8,43	33,86
	Jumlah	236	7866,67	100,00	1,33	100,00	7220,99	24,07	100,00	300,0
Pulau Marak	<i>R.a</i>	75	2500,00	70,09	1,00	25,00	3359,92	11,20	72,02	167,11
	<i>S.a</i>	2	66,67	1,87	0,67	16,67	730,02	2,43	15,65	34,18
	<i>B.g</i>	18	600,00	16,82	1,00	25,00	307,21	1,02	6,58	48,41
	<i>A.c</i>	4	133,33	3,74	0,67	16,67	59,20	0,20	1,27	21,67
	<i>L.r</i>	8	266,67	7,48	0,67	16,67	209,07	0,70	4,48	28,62
	Jumlah	107	3566,67	100	4,00	100	4665,42	15,55	100	300
Kapo Kapo	<i>R.a</i>	84	2800,00	61,76	1,00	50,00	2387,92	7,96	58,33	170,10
	<i>R.m</i>	52	1733,33	38,24	1,00	50,00	1705,64	5,69	41,67	129,90
	Jumlah	136	4533,33	100,00	2,00	100,00	4093,56	13,65	100,00	300,0
Pulau Cubadak	<i>R.a</i>	156	5200,00	98,73	1,00	75,00	4625,95	15,42	99,22	272,95
	<i>B.g</i>	2	66,67	1,27	0,33	25,00	36,43	0,12	0,78	27,05
	<i>C.t</i>	2	66,67	1,27	0,33	25	33,81	0,11	0,73	26,99
	Jumlah	160	5266,67	100,00	1,33	100,00	4696,19	15,54	100,00	300,0
Teluk	<i>R.a</i>	224	7466,67	98,68	1,00	75,00	4876,32	16,25	99,11	272,79



Lokasi	Jenis	Jumlah	K (ind/ha)	KR	F	FR	BA	D	DR	NP (%)
Mandeh	<i>C.t</i>	3	100,00	1,32	0,33	25,00	43,61	0,15	0,89	27,21
	Jumlah	227	7566,67	100,00	1,33	100,00	4919,93	16,40	100,00	300,0
Teluk Betung	<i>R.a</i>	287	9566,67	89,41	1,00	42,86	3210,12	10,70	84,35	216,61
	<i>R.s</i>	32	1066,67	9,97	1,00	42,86	587,18	1,96	15,43	68,25
	<i>C.t</i>	2	66,67	0,62	0,33	14,29	8,43	0,03	0,22	15,13
	Jumlah	321	10700,00	100	2,33	100	3805,72	12,69	100,00	300
Teluk Mandeh II	<i>R.a</i>	235	7833,33	100,00	1,00	100	8016,84	26,72	100	300,00
	Jumlah	235	7833,33	100	1,00	100	8016,84	26,72	100,00	300
Sungai Nyalo	<i>R.a</i>	113	3766,67	40,65	1,00	18,75	3854,37	12,85	66,39	125,79
	<i>S.h</i>	73	2433,33	26,26	1,00	18,75	809,67	2,70	13,95	58,96
	<i>C.t</i>	31	1033,33	11,15	1,00	18,75	353,27	1,18	6,08	35,99
	<i>L.l</i>	29	966,67	10,43	1,00	18,75	447,29	1,49	7,70	36,89
	<i>A.c</i>	30	1000,00	10,79	0,67	12,50	322,16	1,07	5,55	28,84
	<i>P.p</i>	1	33,33	0,36	0,33	6,25	12,43	0,04	0,21	6,82
	<i>A.f</i>	1	33,33	0,36	0,33	6,25	6,44	0,02	0,11	6,72
Jumlah	278	9266,67	100,00	5,33	100,00	5805,63	19,35	100,00	300,00	
Sungai Pinang	<i>R.a</i>	176	5866,67	81,86	1,00	42,86	5976,06	19,92	89,71	214,42
	<i>L.l</i>	7	233,33	3,26	0,67	28,57	351,78	1,17	5,28	37,11
	<i>A.c</i>	31	1033,33	14,42	0,33	14,29	316,00	1,05	4,74	33,45
	<i>B.a</i>	1	33,33	0,47	0,33	14,29	17,90	0,06	0,27	15,02
	Jumlah	215	7166,67	100,00	2,33	100,00	6661,74	22,21	100,00	300,00

Sumber: Bappeda Kab. Pesisir (2015)

Keterangan :

K	: Kerapatan	KR	: Kerapatan Relatif
F	: Frekuensi	FR	: Frekuensi Relatif
BA	: Basal Area	D	: Dominasi
DR	: Dominasi Relatif	NP	: Nilai Penting

Kabupaten Padang Pariaman

Kondisi mangrove yang diteliti adalah di Batang Gasan. Dilihat dari nilai (NP) Nilai Penting maka yang tertinggi yaitu dari jenis *Aegiceras floridum* dengan persentase 250,00 dengan kerapatan individu 666,67 (ind/ha) dan di lokasi pertama ini hanya di dominasi oleh jenis tersebut sedangkan di lokasi lain terdiri dari beberapa jenis seperti *Sonneratia alba* dan *Hibiscus tiliaceus* namun kepadatan yang tertinggi ada pada dilokasi ke tiga sebesar 2600,00 (ind/ha) dapat dilihat pada Tabel 3.40.



Tabel 3.39. Penghitungan Struktur Komunitas Mangrove di Batang Gasan

Lokasi	Jenis	Jumlah	K (ind/ha)	KR	F	FR	BA	D	DR	NP (%)
1	<i>Aegiceras floridum</i>	40	666,67	100,00	0,50	50,00	894,227	1,49	100,00	250,00
	-	0	0,00	0,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Jumlah	40	666,67	100,00	1,00	100,00	894,227	1,49	100,00	300,00
2	<i>Aegiceras floridum</i>	85	1416,67	96,59	1,00	75,00	1623,95	2,71	41,35	212,94
	<i>Sonnerati a alba</i>	3	50,00	3,41	0,33	25,00	2303,30	3,84	58,65	87,06
	Jumlah	88	1466,67	100,00	1,33	100,00	3927,25	6,55	100,00	300,0
3	<i>Aegiceras floridum</i>	156	2600,00	89,14	1,00	50,00	3711,7	6,19	35,70	174,84
	<i>Sonnerati a alba</i>	16	266,67	9,14	0,83	41,67	6596,50	10,99	63,44	114,25
	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	3	50,00	1,71	0,17	8,33	89,11	0,15	0,86	10,90
	Jumlah	175	2916,67	100,00	2,00	100,00	10397,3	17,33	100,00	300,00

Sumber: KKPD Kab. Padang Pariaman (2015).

Keterangan :

- K : Kerapatan
- F : Frekuensi
- BA : Basal Area
- DR : Dominasi Relatif
- KR : Kerapatan Relatif
- FR : Frequen Relatif
- D : Dominasi
- NP : Nilai Penting

Kabupaten Pasaman Barat

Pada Struktur vegetasi mangrove sejati dan bukan mangrove sejati yang terdapat di Pulau Tamiang, Pulau Harimau, dan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat memiliki tingkatan nilai yang tertinggi 260,10 pada nilai penting dengan jenis *R. Stylosa* terdapat pada Pulau Tamiang yang berdekatan dengan Pulau Panjang dengan nilai kerapatan relatif 93,33 jenis ini juga terdapat pada pulau - pulau lain memiliki tingkat kapadatan yang cukup tinggi dan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.40. Penghitungan Struktur Komunitas Spesies Mangrove.

No	Spesies	KR	RF	DR	NP (%)
	Tamiang				
	Pohon				
1	<i>R. stylosa</i>	71,15	51,87	69,69	192,98
2	<i>R. apiculata</i>	7,14	10,00	8,08	25,22
3	<i>R. mucronata</i>	4,28	10,00	8,08	22,36
4	<i>B. asiatica</i>	4,28	10,00	5,05	19,33



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	Spesies	KR	RF	DR	NP (%)
5	<i>P. tectorius</i>	4,28	10,00	4,04	18,32
6	<i>C. nucifera</i>	1,42	10,00	3,03	14,45
	Sapling				
1	<i>R. stylosa</i>	93,33	71,55	95,22	260,10
2	<i>P. apiculata</i>	2,00	13,79	3,49	19,28
3	<i>B. asiatica</i>	2,00	13,79	1,16	16,95
4	Seedling:				
5	<i>R. stylosa</i>	100,00	100,00	-	200,00
	Pulau Harimau				
1	Pohon:				
2	<i>R. apiculata</i>	83,11	14,05	92,66	229,82
3	<i>R. mucrona</i>	9,06	7,56	13,76	30,41
4	<i>R. stylosa</i>	2,59	7,56	4,58	14,73
5	<i>X. granatum</i>	2,59	7,56	3,66	13,81
	Sapling:				
1	<i>R. apiculata</i>	47,36	29,33	53,77	130,46
2	<i>R. mucronata</i>	26,31	23,55	21,69	79,55
3	<i>S. frutescens</i>	1,83	5,78	10,37	17,98
4	<i>D. umbellatum</i>	5,26	5,78	4,71	15,21
5	<i>G. speciosa</i>	2,63	5,78	1,88	10,29
6	<i>F. rukam</i>	1,05	5,78	1,88	8,71
7	<i>D. heterophyllacea</i>	1,05	5,78	0,94	7,77
8	<i>X. granatum</i>	1,05	5,78	0,94	7,77
	Seedling:				
1	<i>X. granatum</i>	20,61	36,84	-	57,54
2	<i>S. hydrophyllacea</i>	13,49	36,84	-	50,33
3	<i>L. littorea</i>	13,49	12,28	-	25,77
4	<i>R. apiculata</i>	2,88	12,28	-	15,16
	Pulau Panjang				
	Pohon:				
1	<i>R. mucronata</i>	35,89	18,03	39,06	92,98
2	<i>R. stylosa</i>	32,05	27,32	16,74	76,11
4	<i>S. alba</i>	6,41	27,32	26,51	60,24
5	<i>R. apiculata</i>	14,10	18,08	6,97	39,10
6	<i>H. tilliaceous</i>	7,69	8,74	5,58	22,01
	Sapling:				
1	<i>R. stylosa</i>	44,44	79,51	52,00	175,95
2	<i>R. apiculata</i>	24,44	39,27	48,00	111,71
	Seedling:				
1	<i>R. apiculata</i>	100,00	100,00	-	200,00

Sumber : Bappeda Kab. Pasaman Barat

Keterangan :

- K : Kerapatan
- F : Frekuensi
- BA : Basal Area
- DR : Dominasi Relatif
- KR : Kerapatan Relatif
- FR : Frekuensi Relatif
- D : Dominasi
- NP : Nilai Penting



Kabupaten Mentawai

Dari hasil pengukuran di setiap lokasi *Rhizophora mucronata* mendominasi dengan nilai tertinggi pada kepadatan mencapai 1900 (ind/ha) jenis ini berada pada barisan terdepat pada ekosistem yang langsung berhadapan dengan laut lepas sedangkan nilai terendah yaitu *Rhizophora apiculata* dan *Ceriops tagal* dengan nilai kerapatan 100 (ind/ha) hal ini mempengaruhi nilai penting dari dominasi beberapa jenis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.42.

Tabel 3.41. Penghitungan Struktur Komunitas Spesies Mangrove Kabupaten Mentawai.

Pulau Pagai Utara dan Selatan					
No	Lokasi/Jenis	K (ind/ha)	KR (%)	DR (%)	NP (%)
	Desa Sikakap				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	1200	100	100	200
	Desa Sikakap				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	900	81.8	82.6	164.4
2	<i>Ceriops tagal</i>	200	18.2	17.4	35.6
	Desa Sinakak				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	700	63.6	83.6	147.2
2	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	300	27.3	9.7	36.9
3	<i>Bruguiera cylindrical</i>	100	9.1	6.8	15.9
Pulau Siberut					
No	Lokasi/Jenis	K (ind/ha)	KR (%)	DR (%)	NP (%)
	Desa Katurai				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	1000	58.8	53.5	112.3
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	700	41.2	46.5	87.7
	1. Desa Katurai				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	100	5.9	9.4	15.3
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	400	23.5	18.2	41.7
3	<i>Rhizophora apiculata</i>	1200	70.6	72.4	143.0
	2. Desa Katurai				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	1000	58.8	53.5	112.3
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	700	41.2	46.5	87.7
	3. Desa Katurai				
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	1900	100	100	200
	Desa Muara Siberut				
2	<i>Bruguiera cylindrica</i>	600	40	44.1	84.1
3	<i>Rhizophora stylosa</i>	900	60	55.9	115.9
	Desa Maileppet				
2	<i>Rhizophora mucronata</i>	1200	85.7	88.6	174.3
3	<i>Ceriops decandra</i>	200	14.3	11.4	25.7
Pulau Siberut					



No	Lokasi/Jenis	K (ind/ha)	KR (%)	DR (%)	NP (%)
	Desa Cimpungan				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	1700	100	100	200
	Desa Saibi Samukop				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	200	25.0	2.6	27.6
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	200	25.0	3.2	28.2
3	<i>Rhizophora apiculata</i>	100	12.5	0.8	13.3
4	<i>Sonneratia caseolaris</i>	200	25.0	91.8	116.8
5	<i>Ceriops tagal</i>	100	12.5	1.5	14.0
	Desa Saibi Samukop				
1	<i>Rhizophora mucronata</i>	600	37.5	40.4	77.9
2	<i>Rhizophora stylosa</i>	500	31.3	32.8	64.0
3	<i>Ceriops tagal</i>	400	25.0	21.0	46.0
4	<i>Bruguiera cylindrica</i>	100	6.3	5.8	12.1
	Desa Silaguma				
1	<i>Sonneratia caseolaris</i>	200	25.0	91.8	116.8
2	<i>Ceriops tagal</i>	100	12.5	1.5	14.0

Sumber: BPSPL Padang (2015).

Keterangan :

- Kerapatan (K),
- Kerapatan Relatif (KR)
- Dominansi Relatif (DR)
- Nilai Penting (NP)



Gambar 3.32. Peta Ekosistem Pesisir Kondisi Tutupan Mangrove
 Sumber : Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2022



2. Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan produktif dengan keanekaragaman jenis biota sangat tinggi. Terumbu Karang membentuk kerangka kapur yang terdiri dari CaCO_3 dan di dalam polyp karang terdapat zooxanthella yang merupakan symbion karang. Zooxanthelia ini berupa algae bersel satu yang membantu dalam pembentukan kerangka kapur.

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang sangat penting. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makanan, daerah asuhan dari berbagai biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah serta merupakan sumber berbagai makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Terumbu karang juga mempunyai nilai estetika sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari. Disamping itu secara fisik, terumbu karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi. Oleh karena itu perlu adanya konservasi dan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara ekosistem terumbu karang tersebut dan habitat yang berasosiasi di sekitarnya agar berada dalam kondisi yang baik. Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkesinambungan sangat penting, artinya ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan di wilayah pesisir.

Berdasarkan Tabel 3.42. menunjukkan bahwa luas Ekosistem terumbu karang di wilayah perairan laut Sumatera Barat adalah 39.619,42 Ha. Luas Ekosistem terumbu karang terluas berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 34.515,43 Ha, sedangkan yang terendah terdapat di Kota Pariaman, yaitu 10,95 Ha. Untuk lebih jelasnya kondisi luas Ekosistem terumbu karang dimasing-masing kabupaten/kota pesisir Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.42. Luas Ekosistem Terumbu Karang Provinsi Sumatera Barat.

No	Kabupaten/ Kota	Areal (ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2.238,15
2	Kota Padang	957,23
3	Kabupaten Padang Pariaman	268,47
4	Kota Pariaman	261,72
5	Kabupaten Agam	120,48
6	Kabupaten Pasaman Barat	1.257,94
7	Kabupaten Kep. Mentawai	34.515,43
Jumlah		39.619,42

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2018)



Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi terumbu karang yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong dalam kondisi baik persen penutupan yang tertinggi terdapat pada Pulau Baringin dengan penutupan 83,00 persen sedangkan yang terendah terdapat di pulau Aua Gadang bagian timur dengan persen penutupan 5,00 hal ini dikarenakan kondisi dasar perairan yang dipengaruhi oleh substrat dasar yang berpasir dan pecahan karang yang sudah mati, selain itu juga dipengaruhi dengan kompetisi ruang dalam perebutan makana yang di dominasi oleh Terumbu karang yang lebih besar. Untuk data rinci kondisi terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.43. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Lokasi	Persentase (%)	Kondisi
1	Pulau Aua Gadang Barat	74,27	Baik
	Selatan	41,40	Sedang
	Timur	5,00	Buruk
	Utara	18,80	Buruk
2	Pulau Aua Ketek	31,97	Sedang
3	Pulau Baringin	85,63	Sangat baik
4	Pulau Karabak Gadang	-	-
5	Pulau Karabak Ketek Barat	52,53	Baik
	Selatan	83,00	Sangat Baik
	Timur	57,07	Baik
	Utara	59,13	Baik
7	Pulau Katang-Katang	70,30	Baik
8	Pulau Penyu Barat	12,13	Buruk
	Selatan	22,20	Buruk
	Timur	78,47	Sangat baik
	Timur	59,07	Baik
9	Pulau Gosong	39,20	Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan (2015).

Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kota Padang

Dari kondisi terumbu karang yang ada di pulau – pulau dibawah ini maka dapat dilihat kondisi dalam tergolong buruk sampai sangat baik. Pulau Bindalang persen penutupan sangat baik dengan 77,13, Pulau Sibonta 9,33 %, Pulau

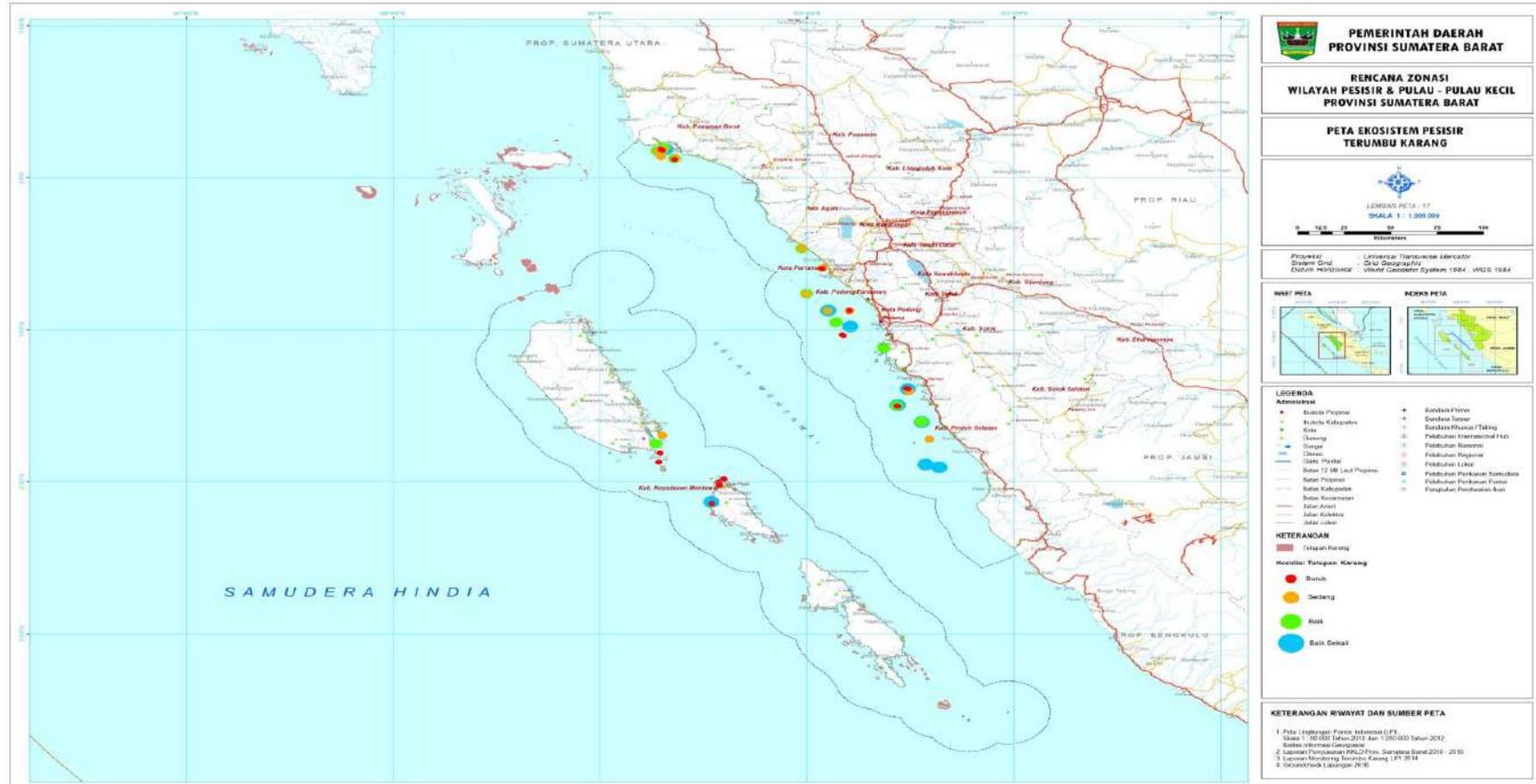


Pasumpahan 15,53 %, Pulau Toran 3,67 %, Pulau Pandan 65,50 % dan Pulau Air 55,60 % dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.44. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kota Padang.

No	Lokasi	Persentase	Kondisi
1	Pulau Bindalang	77,13	Sangat baik
2	Pulau Sibonta	9,33	Buruk
3	Pulau Sikuwai	13,93	Buruk
4	Pulau Sironjong	6,07	Buruk
5	Pulau Pasumpahan	15,53	Buruk
7	Pulau Setan	-	-
8	Pulau Ula	-	-
9	Pulau Sirandah	35,97	Sedang
10	Pulau Pandan*	65,50	Baik
11	Pulau Pieh*	33,67	Sedang
12	Pulau Air*	55,60	Baik
13	Pulau Bando*	53,60	Baik
14	Pulau Toran*	3,67	Buruk

Sumber: DKP Provinsi Sumbar (2021) dan Loka KKPN Pekanbaru (2020)*



Gambar 3.33. Peta Sebaran Ekosistem Terumbu Karang
 Sumber : Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2022



Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Padang Pariaman

Terumbu karang yang ditemukan di perairan Kecamatan Batang Gasan adalah terumbu karang tepi (*fringing reef*) dan terumbu karang penghalang (*barrier reef*). berbentuk gosong. Kedalamannya berkisar antara 3 sampai 15 meter pada kondisi pasang naik terbesar dan dapat muncul kepermukaan pada saat surut terendah terbesar. Diperkirakan ada lebih kurang 15 gosong terumbu karang di kawasan ini yang terletak membujur dari utara ke selatan sepanjang Kecamatan Batang Gasan, dengan sendirinya berperan sebagai benteng dari pengerusan pantai, hal ini dibuktikan bahwa kawasan pantai di depan terumbu karang mengalami penambahan lahan (abrasi) Tabel dibawah ini.

Tabel 3.45. Kondisi Penutupan Karang Kabupaten Padang Pariaman

No	Lokasi	Persen penutupan	Kondisi
1	Stasiun 1 Gosong Kariang	46	Baik
2	Stasiun 2 Gosong Kariang	56	Baik
3	Stasiun 3 Gosong Kariang	27	Sedang
4	Stasiun 4 Gosong Kariang	42	Sedang
5	Pulau Pieh	46,20	Sedang
7	Pulau Bando	44,73	Sedang

Sumber: DKP Provinsi Sumbar (2015).

Pada kondisi terumbu karang di Kabupaten Padang Pariaman banyak terdapat di daerah Gosong yang mana pada daerah ini biasanya kondisi karang relatif bagus ini buktikan dari empat gosong dua gosong dalam kondisi baik dan yang dua lagi kondisi sedang.

Kondisi Terumbu Karang Kota Pariaman

Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Kasiak tergolong kategori buruk dan sedang dengan persentase dari 10,27 % sampai 28,93 % di karenakan kondisi perairan yang tidak mendukung dari segi ekologi dan aktifitas masyarakat yang di luar kontrol dapat mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.46. Kondisi Penutupan Karang Kota Pariaman

No	Lokasi	Persen penutupan	Kondisi
1	Pulau Kasiak Selatan	28,93	Sedang
2	Pulau Kasiak Utara	14,87	Buruk
3	Pulau Ujuang	14,37	Buruk



4	Pulau Tengah	10,27	Buruk
5	Pulau Angso	12,47	Buruk

Sumber: DKP Provinsi Sumbar (2021).

Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Agam

Kabupaten Agam hanya memiliki Dua Pulau yaitu Pulau Tengah dan Pulau Ujuang dengan persentase penutupan tergolong kondisi baik dengan penutupan berkisar antara 48 – 55,5 persen.

Tabel 3.47. Kondisi Penutupan Kabupaten Agam

No	Lokasi	Persen penutupan	Kondisi
1	Pulau Tengah	48,0	Baik
2	Pulau Ujuang	55,5	Baik

Sumber: BPSPL Padang (2011).

Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Pasaman Barat

Dari hasil survey kondisi terumbu karang di Kabupaten Pasaman Barat tergolong kondisi sedang dari persen penutupan berkisar antara 2,5 % sampai dengan 50% Tabel 3.48.

Tabel 3.48. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Pasaman Barat

No	Lokasi	Persentase	Kondisi
1	Barat Pulau Pangka	45,00	Sedang
2	Selatan Pulau Pangka	35,00	Sedang
3	Barat Pulau Pigago	50,00	Sedang
4	Utara Pulau Pigago	25,00	Sedang
5	Timur Pulau Pigago	45,00	Sedang
6	Barat Pulau Taluo	36,00	Sedang
7	Utara Pulau Taluo	30,00	Sedang
8	Timur Pulau Taluo	25,00	Sedang

Sumber: DKP Provinsi Sumatera Barat (2021).

Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Kepulauan Mentawai

Secara umum perairan pantai Kepulauan Mentawai banyak dijumpai sebaran terumbu karang. Pada perairan Pantai Timur Mentawai umumnya dijumpai terumbu karang tepi (*freengings reefs*) yang tidak merata. Sementara pada beberapa desa pesisir juga dijumpai terumbu karang yang bersifat tersebar (*patchy reefs*). Pada sisi barat perairan kepulauan Mentawai dijumpai terumbu



karang tepi (*freenging reefs*) yang relatif merata. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Lokasi	Persentase (%)	Kondisi
1	Selatan Pulau Simakakang	28,67	Sedang
2	Timur Pulau Awera	2,3	Buruk
3	Timur Pulau Panjang (Pulau Siburu)	2,4	Buruk
4	Pesisir Pukarayat	2,67	Buruk
5	Pulau Pitojat Sabeu	44,13	Sedang
6	Pantai Masilok	6,0	Buruk
7	Pulau Libut	44,68	Sedang
8	Pulau Nyangnyang	1,40	Buruk
9	Pulau Botik	1,73	Buruk

Sumber : LIPI (2019)

Pada Tabel 3.49 di atas kondisi terumbu karang masih tergolong kondisi buruk dan sedang yang nilainya berkisar antara 1,73 – 44,68 persen. Pada Pulau Siberut bagian selatan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Karang *Pocillopora verrucosa* merupakan jenis yang paling dominan, diikuti oleh karang dari marga *Porites* dan *Favia*.

3. Padang Lamun

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga, berbuah, berdaun dan berakar sejati yang telah menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut dangkal. Lamun tumbuh pada dasar perairan laut yang berlumpur, berpasir dan berbatu. Hamparan tumbuhan lamun biasanya ditemui di tepi pantai, membentuk sebuah ekosistem tersendiri yang disebut padang lamun. Umumnya ekosistem padang lamun terletak diantara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Manfaat ekosistem padang lamun antara lain adalah sebagai tempat mencari makan, hidup dan memijah bagi berbagai jenis biota bentik dan ikan, dan juga merupakan daerah yang kaya bahan organik yang berasal dari serasah daun lamun. Secara ekologis, ekosistem lamun berfungsi sebagai penyaring sampah daratan dan meredam energi gelombang sehingga bisa mengurangi tingkat erosi pantai.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2015) menunjukkan bahwa luas padang lamun yang ada di perairan laut Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 532 ha, dan yang terluas terdapat di



Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 500 ha. Sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 2 Ha. Luasan ekosistem padang lamun di beberapa perairan laut kabupaten/kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Tabel dibawah ini,

Tabel 3.50. Luasan Padang Lamun Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Luas Lamun (ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2
2	Kota Padang	5
3	Kabupaten Padang Pariaman	-
4	Kota Pariaman	-
5	Kabupaten Agam	-
6	Kabupaten Pasaman Barat	25
7	Kabupaten Kep. Mentawai	500
Jumlah		532

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2015).

Kabupaten Pesisir Selatan

Lamun (seagrass) yang merupakan salah satu sistem ekologi di wilayah laut atau pesisir merupakan tumbuhan berbunga (angiospermae) memiliki rhizome daun dan akar sejati yang hidup terendam dalam laut, berkolonisasi pada suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang dihasilkan secara seksual Lamun yang ada di Pesisir Selatan hanya ada di Batu Kalang, namun keberadaan lamun dahulunya ada di beberapa titik seperti Pulau Cubadak dan Pulau Setan.

Tabel 3.51. Kepadatan Lamun *Thalassia hemprichii* di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Persen Penutupan	Kondisi
1	Batu kalang	25,10	Miskin

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2015).

Kota Padang

Lamun di Kota Padang terdapat di Pulau Pasumpahan dan Taman Nirwana. Jenis yang ada adalah *Thalassia hemprichii*.

Tabel 3.52. Kepadatan Lamun *Thalassia hemprichii* di Kota Padang.

No	Kabupaten/ Kota	Persen Penutupan	Kondisi
1	Pulau Pasumpahan	15,23	Miskin
2	Taman Nirwana	42,25	Kurang Kaya/Kurang Sehat

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2015).



Kabupaten Pasaman Barat

Potensi Padang Lamun di perairan Kabupaten Pasaman Barat relatif sedikit, hanya di beberapa kawasan terutama di pulau-pulau kecil dan di daerah Teluk. Di Pulau Panjang jenis lamun yang ada adalah *Thalassia hemprichii*, *Enhalus acroides* dan *Halodule pinofilia* pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.53. Lokasi dan Potensi Padang Lamun di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Lokasi	Potensi Padang Lamun (ha)	Kondisi	Jenis
1.	Pulau Panjang, Stasiun 1	36,25	Kurang kaya/kurang sehat	<i>Thalassia hemprichii</i> , <i>Enhalus acroides</i> dan <i>Halodule pinofilia</i> .
2.	Pulau Panjang, Stasiun 2	70,71	Kaya/sehat	
3.	Pulau Panjang, Stasiun 3	60,0	Kaya/sehat	

Sumber: Universitas Bung Hatta (2020)

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Padang Lamun di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Saumanganyak, Matobe, Masilok, Malilimok, Nyangnyang dan beberapa daerah pesisir lainnya. Lokasi dan sebaran Padang lamun terdapat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.54. Sebaran Padang Lamun di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pulau	Desa	Jenis	Tutupan (%)	Kondisi
Siberut	Dusun Masilok	<i>Halodule uninervis</i> , <i>Cymodocea serrulata</i> , <i>Thalassia hemprichii</i>	43,18	Kurang kaya/ kurang sehat
	Dusun Malilimok	<i>Halodule uninervis</i> , <i>Cymodocea serrulata</i> , <i>Cymodocea rotundata</i> , <i>Thalassia hemprichii</i>	16,3	Miskin
	Pulau Nyangnyang	<i>Halodule uninervis</i> , <i>Cymodocea serrulata</i> ,	40,34	Kurang kaya/ kurang sehat



Pulau	Desa	Jenis	Tutupan (%)	Kondisi
		<i>Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii</i>		
Sipora	Pulau Simakakang	<i>Halodule uninervis, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Thalassia hemprichii</i>	10,27	Miskin
	Pukarayat	<i>Halodule uninervis, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Thalassia hemprichii</i>	14,4	Miskin
Pagai Utara	Dusun Pasapat, Desa Saumanganya	<i>Cymodocea serrulata, Thalassia hemprichii</i>	17,56	Miskin
	Dusun Cempungan, Desa Matobe	<i>Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata</i>	18,41	Miskin

Sumber :LIPI dan Universitas Bung Hatta (2019)



3.2.2. Kondisi Lingkungan (Enam Muatan KLHS)

3.2.2.1. Daya Dukung Daya Tampung Air

Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui status mutu airnya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum terlampaui status mutu airnya secara rinci yang dapat dilihat sebagaimana pada Tabel dibawah ini.



Tabel 3.55. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air

No	Kab/Kora	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Total Kebutuhan (m ³)	Status Berdasarkan Volume (m ³)	
						Belum Terlampaui	Terlampaui
1	KAB. AGAM	3.408.638.145,01	52.773.120,00	1.342.400.642,11	2.013.464.382,90	1.059.059.000,74	336.114.761,37
2	KAB. DHARMASRAYA	3.614.144.399,14	21.201.523,20	1.792.729.800,63	1.800.213.075,31	1.717.884.769,40	96.046.554,43
3	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	11.104.849.004,24	7.623.158,40	625.080.230,66	10.472.145.615,18	632.703.389,06	-
4	KAB. LIMA PULUH KOTA	3.867.664.118,81	36.724.233,60	1.199.932.803,68	2.631.007.081,52	1.106.028.572,44	130.628.464,84
5	KAB. PADANG PARIAMAN	1.593.784.764,56	39.874.118,40	958.310.605,52	595.600.040,64	557.400.059,84	440.784.664,08
6	KAB. PASAMAN	4.582.271.353,05	26.797.564,80	1.183.716.734,09	3.371.757.054,17	796.227.667,67	414.286.631,22
7	KAB. PASAMAN BARAT	5.548.556.793,78	37.825.574,40	1.987.359.235,32	3.523.371.984,06	2.001.243.302,71	23.941.507,01
8	KAB. PESISIR SELATAN	10.844.013.052,93	44.221.075,20	2.137.262.451,26	8.662.529.526,47	2.142.542.837,69	38.940.688,77
9	KAB. SIJUNJUNG	3.102.837.061,65	21.399.897,60	996.156.669,91	2.085.280.494,14	921.011.996,67	96.544.570,84
10	KAB. SOLOK	4.066.578.522,52	37.181.548,80	1.216.449.455,20	2.812.947.518,53	757.436.914,78	496.194.089,21
11	KAB. SOLOK SELATAN	4.373.172.878,57	16.649.798,40	1.149.453.159,49	3.207.069.920,67	956.859.217,06	209.243.740,83
12	KAB. TANAH DATAR	1.833.865.741,54	36.005.904,00	749.568.071,28	1.048.291.766,26	524.198.398,71	261.375.576,57
13	KOTA BUKITTINGGI	61.177.184,97	10.970.899,20	24.786.320,74	25.419.965,03	28.508.085,87	7.249.134,07
14	KOTA PADANG	962.320.031,26	78.420.873,60	171.228.918,84	712.670.238,82	156.538.414,68	93.111.377,76
15	KOTA PADANG PANJANG	43.909.707,05	5.418.144,00	26.702.028,67	11.789.534,39	9.528.702,85	22.591.469,81
16	KOTA PARIAMAN	153.786.315,87	8.931.686,40	120.445.394,72	24.409.234,75	52.367.496,09	77.009.585,03
17	KOTA PAYAKUMBUH	158.422.849,32	12.567.484,80	87.838.682,32	58.016.682,20	80.861.960,32	19.544.206,80
18	KOTA SAWAHLUNTO	272.219.539,75	6.050.246,40	106.172.893,85	159.996.399,49	109.003.132,35	3.220.007,90
19	KOTA SOLOK	70.668.943,20	6.151.420,80	47.096.178,57	17.421.343,83	28.841.717,69	24.405.881,68
Total		59.662.880.407,23	506.788.272,00	15.922.690.276,86	43.233.401.858,37	13.638.245.636,63	2.791.232.912,23

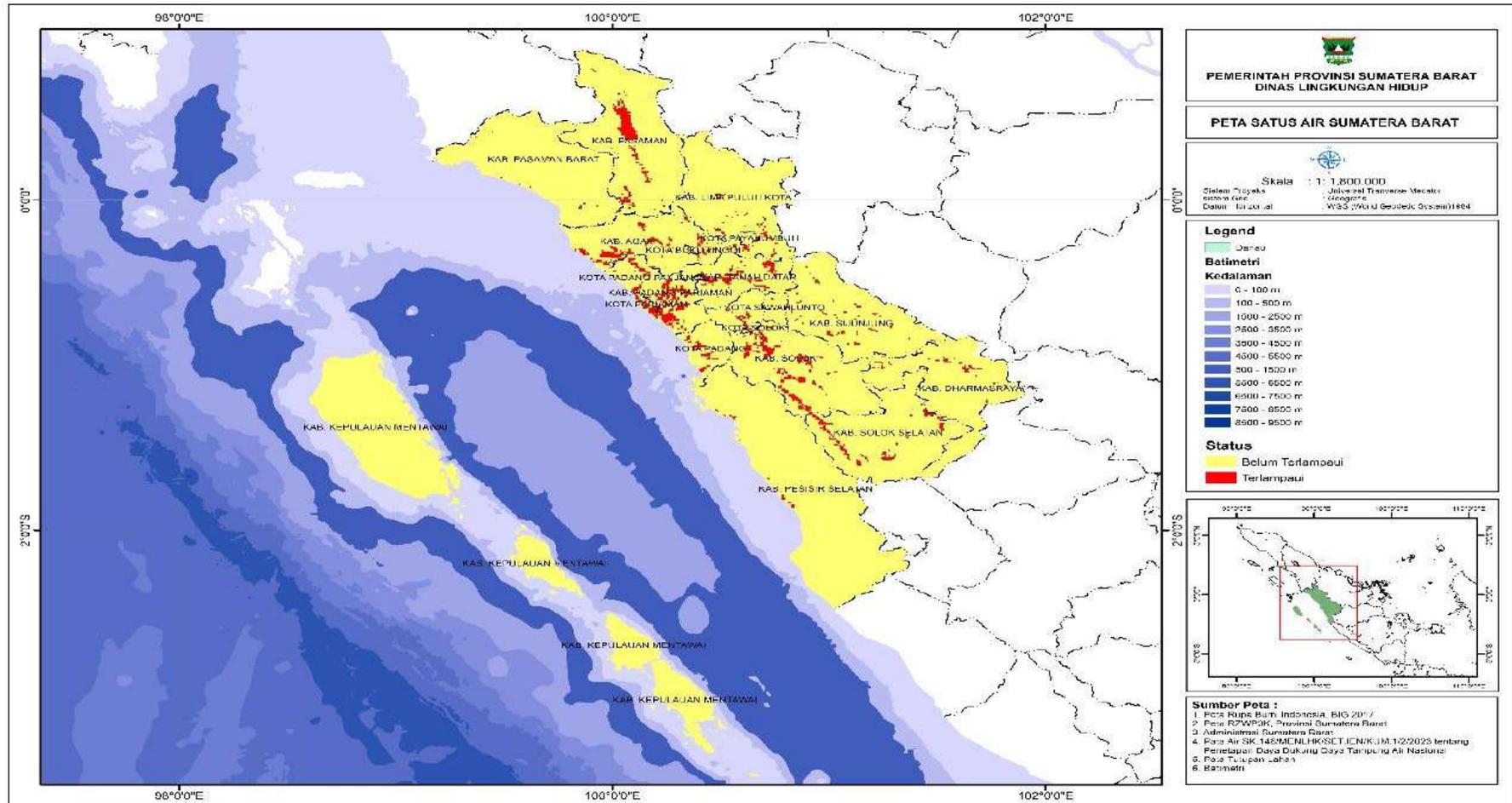


Bersambung.....

Lanjutan Tabel 3.55

No	Kab/Kora	Status Berdasarkan Luas Wilayah (Ha)		Persentase Berdasarkan Luas Wilayah	
		Belum Terlampaui	Terlampaui	Belum Terlampaui	Terlampaui
1	KAB. AGAM	219.228,91	19.118,99	5,20%	0,45%
2	KAB. DHARMASRAYA	299.155,03	6.412,07	7,10%	0,15%
3	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	598.949,65	-	14,22%	0,00%
4	KAB. LIMA PULUH KOTA	328.414,63	7.180,34	7,80%	0,17%
5	KAB. PADANG PARIAMAN	111.864,75	27.771,50	2,66%	0,66%
6	KAB. PASAMAN	382.875,98	23.251,07	9,09%	0,55%
7	KAB. PASAMAN BARAT	390.457,69	1.453,17	9,27%	0,03%
8	KAB. PESISIR SELATAN	611.413,53	2.049,96	14,52%	0,05%
9	KAB. SIJUNJUNG	318.864,24	7.095,37	7,57%	0,17%
10	KAB. SOLOK	353.000,36	29.665,87	8,38%	0,70%
11	KAB. SOLOK SELATAN	330.397,29	14.792,62	7,84%	0,35%
12	KAB. TANAH DATAR	137.199,69	14.446,53	3,26%	0,34%
13	KOTA BUKITTINGGI	3.333,75	341,92	0,08%	0,01%
14	KOTA PADANG	69.604,41	5.282,07	1,65%	0,13%
15	KOTA PADANG PANJANG	2.308,03	854,83	0,05%	0,02%
16	KOTA PARIAMAN	7.817,48	4.361,32	0,19%	0,10%
17	KOTA PAYAKUMBUH	9.060,92	854,80	0,22%	0,02%
18	KOTA SAWAHLUNTO	28.979,54	170,97	0,69%	0,00%
19	KOTA SOLOK	6.924,51	1.282,32	0,16%	0,03%
Total				100,00	100,00

Sumber : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional



Gambar 3.35. Peta DDDLTLH Air Provinsi Sumatera Barat



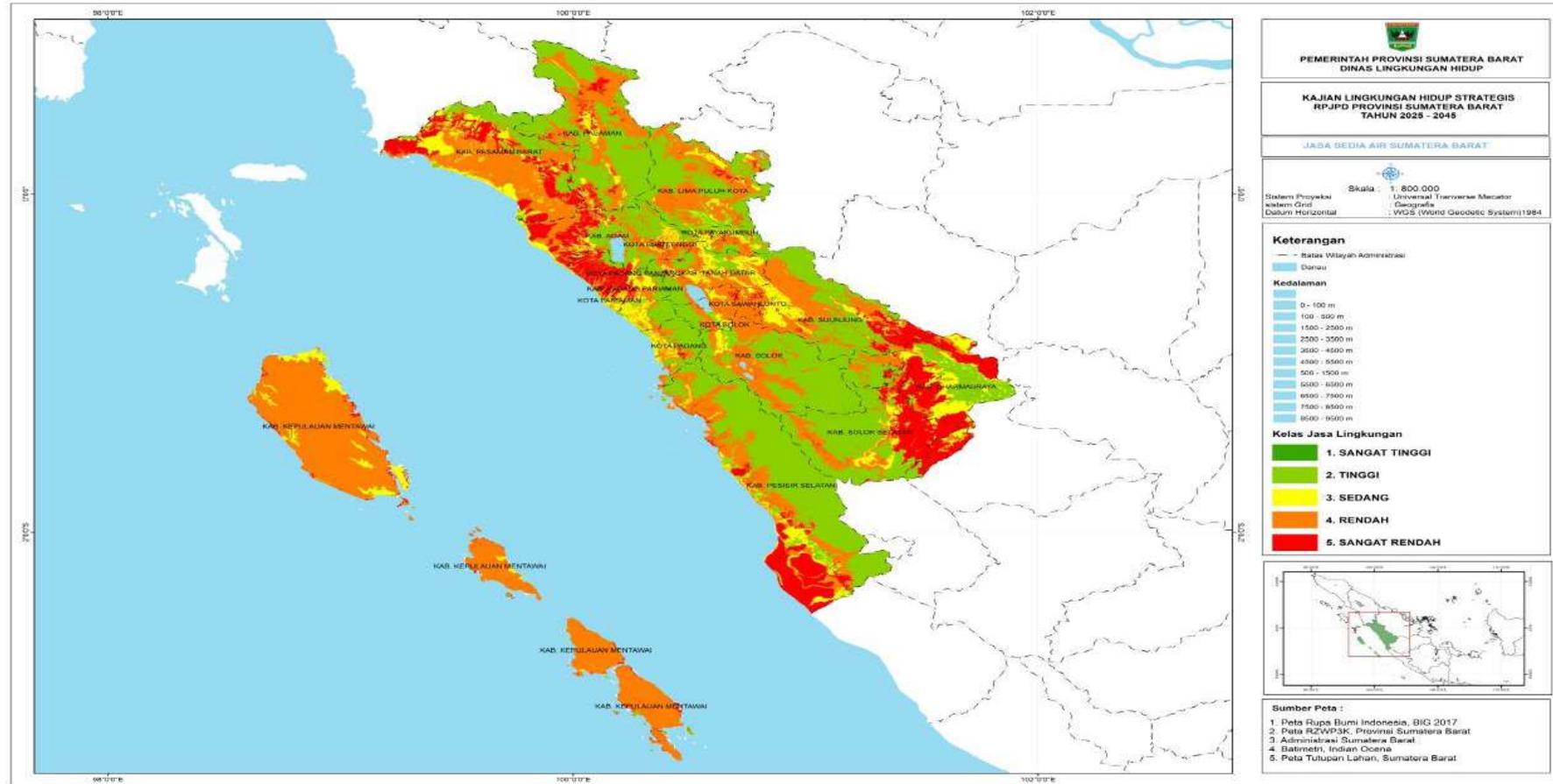
3.2.2.2. Jasa Lingkungan Ketersediaan Air

Jasa lingkungan ketersediaan air Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional, menunjukkan bahwa katagori sangat rendah sampai dengan rendah sebesar 50,03 % (2.107.144,73 Ha), katagori sedang sebesar 10,58 % (445.447,02 Ha) dan katagori tinggi sampai dengan sangat tinggi sebesar 39,04 % (1.659.332,45 Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel dan gambar berikut.



Tabel 3.56. Jasa Lingkungan Ketersediaan Air Provinsi Sumatera Barat

No	KABUPATEN/KOTA	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH	Total
1	Agam	1.175,39	82.171,69	3.201,37	6.979,31	50.176,29	223.704,06
2	Dharmasraya	2.359,70	103.648,97	58.288,18	31.326,55	106.946,77	302.570,18
3	Kepulauan Mentawai	1.630,51	7.028,60	41.113,89	521.667,76	16.457,65	587.898,41
4	Lima Puluh Kota	2.153,89	155.436,41	26.948,36	134.882,77	7.818,31	327.239,74
5	Padang Pariaman	1.456,19	33.323,68	34.727,23	17.640,32	44.486,72	131.634,13
6	Pasaman	1.017,79	222.617,50	19.504,92	131.218,39	23.644,94	398.003,54
7	Pasaman Barat	2.504,86	67.353,19	62.558,61	163.868,63	80.263,19	376.548,47
8	Pesisir Selatan	2.690,91	347.992,87	37.483,01	135.712,75	96.780,94	620.660,47
9	Sijunjung	1.328,65	128.899,61	37.899,38	110.495,17	37.478,51	316.101,32
10	Solok	6.858,87	219.082,69	12.748,72	115.708,21	3.170,37	357.568,87
11	Solok Selatan	1.674,07	179.874,08	21.588,74	49.223,73	75.438,41	327.799,02
12	Tanah Datar	6.918,09	40.872,50	39.172,55	45.022,55	5.526,45	137.512,14
13	Kota Bukittinggi	4,44	64,18	717,52	476,86	1.091,96	2.354,97
14	Kota Padang	446,39	37.903,61	10.480,12	18.596,36	1.856,55	69.283,04
15	Kota Padang Panjang	16,04	364,57	942,74	173,06	573,19	2.069,60
16	Kota Pariaman	89,23	1.278,96	5.105,41	1.804,90	1.959,79	10.238,29
17	Kota Payakumbuh	60,77	3.512,83	2.560,04	921,30	505,66	7.560,60
18	Kota Sawahlunto	141,13	-	1.534,83	19.484,24	2.552,62	23.712,82
19	Kota Solok	31,11	1.899,90	2.177,11	1.554,14	210,82	5.873,08
Total		29.282,33	1.630.050,13	445.477,02	1.553.481,30	553.663,43	4.211.954,20



Gambar 3.36. Peta Jasa Lingkungan Ketersediaan Air Provinsi Sumatera Barat



3.2.3. Analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Proyeksi 2045

3.2.3.1. Daya Dukung Air

Kebutuhan air hidup layak diasumsikan sebesar 1.600 m³/org/tahun yang merupakan kebutuhan air domestik dan menghasilkan pangan (Kriteria WHO sebesar 1.000 – 2.000 m³/org/tahun). Berdasarkan asumsi tersebut, maka pada tabel berikut dapat dilihat proyeksi kebutuhan air berdasarkan kecamatan di Provinsi Sumatera Barat.



Tabel 3.57. Status Air di Provinsi Sumatera Barat

Wilayah	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Tahun 2025				Tahun 2030			
		Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kepulauan Mentawai	3.408.638.145,01	92.521	148.033.504,50	34,18	Surplus	97.965	156.743.469,70	32,28	Surplus
Pesisir Selatan	3.614.144.399,14	537.721	860.353.049,67	6,47	Surplus	575.010	920.016.185,14	6,05	Surplus
Kabupaten Solok	11.104.849.004,24	408.789	654.062.182,64	5,77	Surplus	427.730	684.368.592,13	5,52	Surplus
Sijunjung	3.867.664.118,81	249.590	399.343.763,44	7,59	Surplus	265.847	425.354.426,14	7,12	Surplus
Tanah Datar	1.593.784.764,56	382.405	611.847.435,32	2,57	Surplus	392.842	628.546.696,83	2,51	Surplus
Padang Pariaman	4.582.271.353,05	445.617	712.987.801,55	2,12	Surplus	461.892	739.027.646,09	2,05	Surplus
Agam	5.548.556.793,78	560.114	896.182.024,44	2,37	Surplus	593.656	949.849.893,98	2,24	Surplus
Lima Puluh Kota	10.844.013.052,93	396.706	634.730.016,73	5,68	Surplus	410.991	657.585.179,57	5,49	Surplus
Pasaman	3.102.837.061,65	320.803	513.284.843,98	7,12	Surplus	344.406	551.049.443,64	6,63	Surplus
Solok Selatan	4.066.578.522,52	200.490	320.784.604,74	9,22	Surplus	221.901	355.041.044,45	8,33	Surplus
Dharmasraya	4.373.172.878,57	245.652	393.043.198,79	8,88	Surplus	265.028	424.045.263,48	8,23	Surplus
Pasaman Barat	1.833.865.741,54	461.461	738.337.615,71	5,76	Surplus	494.924	791.879.150,19	5,37	Surplus
Padang	61.177.184,97	936.347	1.498.155.698,98	0,43	Defisit	965.736	1.545.177.998,30	0,42	Defisit
Kota Solok	962.320.031,26	80.138	128.220.854,79	0,51	Defisit	87.830	140.528.313,57	0,47	Defisit
Sawahlunto	43.909.707,05	68.649	109.838.707,15	2,76	Surplus	72.545	116.071.598,21	2,61	Surplus
Padang Panjang	153.786.315,87	60.564	96.902.464,64	0,28	Defisit	65.373	104.597.334,77	0,26	Defisit
Bukittinggi	158.422.849,32	124.489	199.181.924,41	0,19	Defisit	128.205	205.127.536,70	0,18	Defisit
Payakumbuh	272.219.539,75	149.960	239.936.743,61	0,48	Defisit	161.709	258.734.776,32	0,44	Defisit
Pariaman	70.668.943,20	101.137	161.819.146,80	0,45	Defisit	108.953	174.325.178,37	0,42	Defisit
SUMATERA BARAT	9.662.880.407,23	5.823.153	9.317.045.581,87	4,49	Surplus	6.142.544	9.828.069.727,57	4,26	Surplus



Lanjutan Tabel 3.56

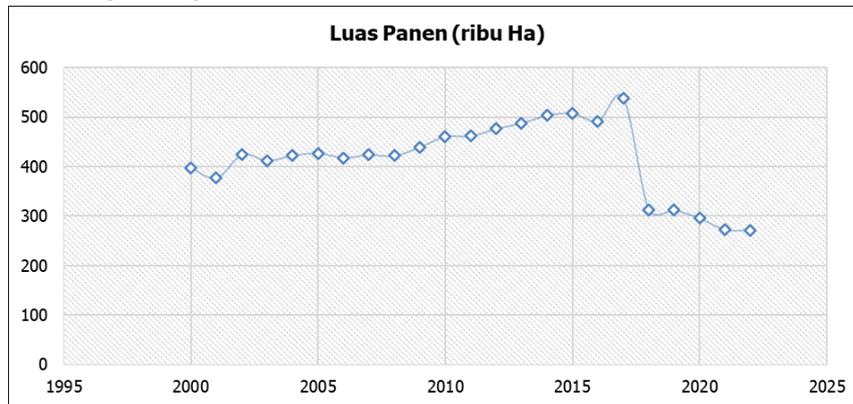
Wilayah	Tahun 2035				Tahun 2040				Tahun 2040			
	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air	Status DD Air
Kepulauan Mentawai	103.729	165.965.910,06	30,49	Surplus	109.832	175.730.978,48	28,80	Surplus	116.294	186.070.602,02	27,20	Surplus
Pesisir Selatan	614.885	983.816.796,18	5,66	Surplus	657.526	1.052.041.805,45	5,29	Surplus	703.124	1.124.998.032,87	4,95	Surplus
Kabupaten Solok	447.550	716.079.269,42	5,27	Surplus	468.287	749.259.282,18	5,04	Surplus	489.985	783.976.713,07	4,82	Surplus
Sijunjung	283.162	453.059.254,71	6,69	Surplus	301.605	482.568.596,12	6,28	Surplus	321.250	513.999.984,64	5,90	Surplus
Tanah Datar	403.564	645.701.734,27	2,44	Surplus	414.578	663.324.987,22	2,37	Surplus	425.893	681.429.234,76	2,31	Surplus
Padang Pariaman	478.762	766.018.521,63	1,98	Surplus	496.247	793.995.161,86	1,91	Surplus	514.371	822.993.569,04	1,84	Surplus
Agam	629.207	1.006.731.664,42	2,11	Surplus	666.887	1.067.019.800,25	1,99	Surplus	706.824	1.130.918.291,71	1,88	Surplus
Lima Puluh Kota	425.790	681.263.304,07	5,30	Surplus	441.121	705.794.023,18	5,11	Surplus	457.005	731.208.036,86	4,93	Surplus
Pasaman	369.745	591.592.549,24	6,18	Surplus	396.949	635.118.587,55	5,76	Surplus	426.154	681.847.025,91	5,36	Surplus
Solok Selatan	245.597	392.955.713,53	7,53	Surplus	271.825	434.919.272,60	6,80	Surplus	300.853	481.364.100,76	6,14	Surplus
Dharmasraya	285.933	457.492.677,74	7,63	Surplus	308.486	493.578.323,38	7,07	Surplus	332.819	532.510.296,16	6,55	Surplus
Pasaman Barat	530.815	849.303.320,28	5,01	Surplus	569.307	910.891.680,46	4,67	Surplus	610.591	976.946.202,51	4,35	Surplus
Padang	996.048	1.593.676.176,69	0,40	Defisit	1.027.310	1.643.696.557,26	0,39	Defisit	1.059.554	1.695.286.917,04	0,38	Defisit
Kota Solok	96.261	154.017.121,06	0,43	Defisit	105.500	168.800.670,68	0,39	Defisit	115.627	185.003.240,06	0,36	Defisit
Sawahlunto	76.661	122.658.179,98	2,47	Surplus	81.012	129.618.522,96	2,33	Surplus	85.609	136.973.836,53	2,21	Surplus
Padang Panjang	70.565	112.903.242,27	0,24	Defisit	76.168	121.868.708,62	0,22	Defisit	82.216	131.546.108,36	0,21	Defisit
Bukittinggi	132.032	211.250.626,46	0,18	Defisit	135.973	217.556.491,43	0,17	Defisit	140.032	224.050.587,47	0,17	Defisit
Payakumbuh	174.378	279.005.555,69	0,41	Defisit	188.040	300.864.465,19	0,38	Defisit	202.772	324.435.928,13	0,35	Defisit
Pariaman	117.374	187.797.726,14	0,39	Defisit	126.445	202.311.486,33	0,36	Defisit	136.217	217.946.928,03	0,33	Defisit
SUMATERA BARAT	6.482.056	10.371.289.343,82	4,04	Surplus	6.843.100	10.948.959.401,20	3,82	Surplus	7.227.191	11.563.505.635,93	3,62	Surplus



Data pada tabel di atas menunjukkan, bahwa daya dukung air sudah defisit di daerah perkotaan kecuali Kota Sawahlunto sejak tahun 2022.

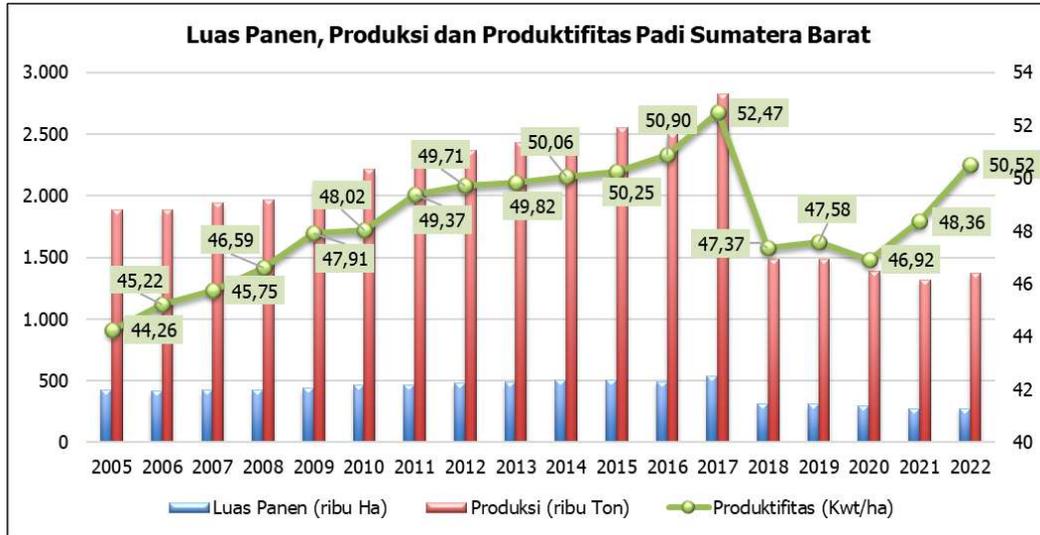
3.2.3.2. Pangan

Perkembangan sektor pertanian di Sumatera Barat masih memiliki peranan penting sebagai sektor utama.



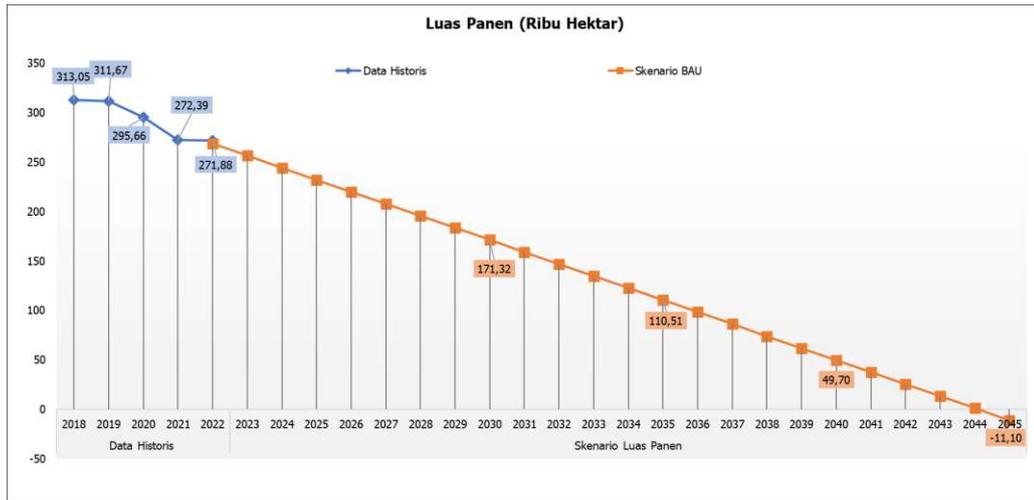
Gambar 3.1. Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan luas panen padi di Sumatera Barat, terlihat kecenderungan penurunan luas panen dalam 5 tahun terakhir. Melihat trend penurunan data, maka pada tahun 2027 berdasarkan proyeksi luas panen padi di Sumatera Barat akan mencapai 207.802 ha atau setara dengan luas LSD yang ditetapkan melalui KepMen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, Prov DIY, Prov Jatim, Prov Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Provinsi Sumatera Barat adalah 207.612,58 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Sementara produktifitas padi pada masa RPJPD 2005-2025 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2025

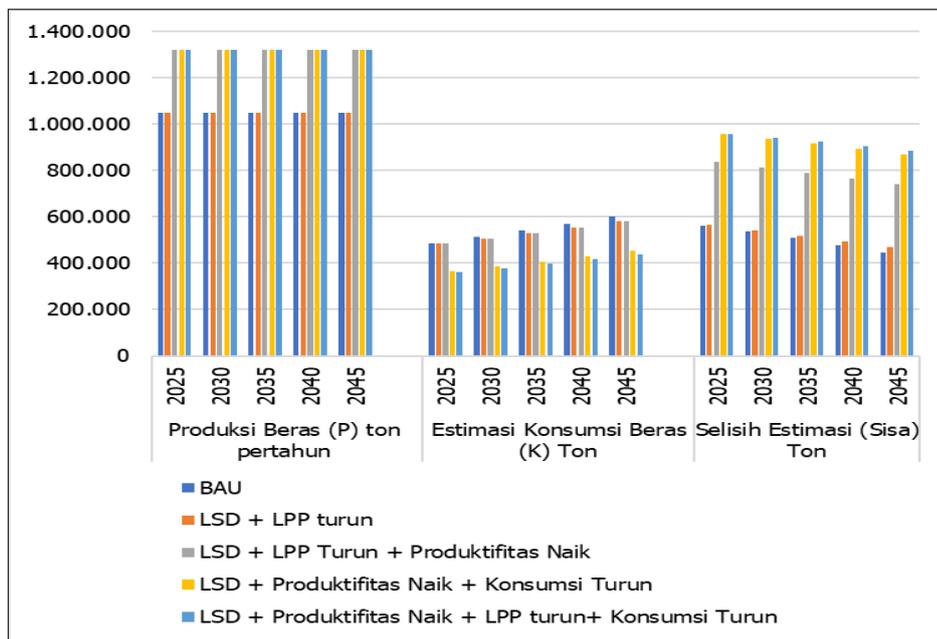
Gambar di atas menunjukkan dalam masa tiga tahun terakhir, ada peningkatan produktifitas padi di Sumatera Barat. Namun berdasarkan luas panen ada kecenderungan penurunan. Jika penurunan luas panen ini terus berlangsung, maka pada tahun 2027 luas panen padi di Sumatera Barat adalah 207.802,03 hektar yang kurang lebih sama dengan luas LSD. Dimana luas LSD adalah 207.612,58 hektar. Dan jika LSD tidak dapat dipertahankan, maka pada tahun 2045 luas panen padi akan turun menjadi beralih fungsi seutuhnya. Sumatera.bisnis.com (4 Oktober 2023) mengabarkan bahwa 4.000 lahan sawah di Sumatera Barat menghilang tiap tahunnya yang beralih fungsi menjadi kegiatan lainnya seperti permukiman, perdagangan dan lainnya. Namun berdasarkan data pada gambar berikut, menunjukkan dalam 5 tahun terakhir telah terjadi penurunan luas panen lebih kurang 41.000 hektar (setara sekitar 8.000 hektar per tahun).



(Sumber data historis : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023)

Gambar 3.3. Proyeksi Luas Panen dengan Skenario Business as Usual (BAU)

Melihat kondisi di atas, maka LSD harus dipertahankan. Pada gambar dan tabel berikut dapat dilihat proyeksi kebutuhan padi di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.4. Skenario Ketersediaan Padi di Sumatera Barat



Tabel 3.58. Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi Sumatera Barat

	Tahun	Skenario					Status
		LSD (BAU)	LSD + LPP turun	LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik	LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + Produktifitas Naik + LPP turun + Konsumsi Turun	
Estimasi Luas Sawah (LSD)	2025	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	
	2030	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	
	2035	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	
	2040	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	
	2045	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	207.612,58	
Produksi Beras (P) ton pertahun	2025	1.048.858,75	1.048.858,75	1.320.416,01	1.320.416,01	1.320.416,01	
	2030	1.048.858,75	1.048.858,75	1.320.416,01	1.320.416,01	1.320.416,01	
	2035	1.048.858,75	1.048.858,75	1.320.416,01	1.320.416,01	1.320.416,01	
	2040	1.048.858,75	1.048.858,75	1.320.416,01	1.320.416,01	1.320.416,01	
	2045	1.048.858,75	1.048.858,75	1.320.416,01	1.320.416,01	1.320.416,01	
Estimasi Konsumsi Beras (K) Ton	2025	485.883,93	483.575,89	483.575,89	364.412,95	362.681,91	
	2030	512.533,84	506.022,57	506.022,57	384.400,38	379.516,93	
	2035	540.862,74	529.665,23	529.665,23	405.647,05	397.248,93	
	2040	570.988,23	554.574,69	554.574,69	428.241,17	415.931,01	
	2045	603.036,82	580.826,26	580.826,26	452.277,61	435.619,70	
Selisih Estimasi (Sisa) Ton	2025	562.974,83	565.282,87	836.840,12	956.003,06	957.734,09	Surplus
	2030	536.324,92	542.836,18	814.393,44	936.015,63	940.899,08	Surplus
	2035	507.996,01	519.193,52	790.750,77	914.768,95	923.167,08	Surplus
	2040	477.870,52	494.284,07	765.841,32	892.174,83	904.484,99	Surplus
	2045	445.821,94	468.032,49	739.589,75	868.138,39	884.796,31	Surplus

Sumber : data diolah, 2023

Keterangan :

LPP turun 15%, Produktifitas naik menjadi 60 kuintal per hektar (6 ton per hektar) dari 50,52 kuintal per hektar (5,05 ton per hektar), konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.

Data di atas menunjukkan bahwa dengan mempertahankan luasan LSD maka Provinsi Sumatera Barat tidak akan mengalami defisit padi hingga tahun 2045.



3.2.4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

3.2.4.1. Kawasan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan hutan yang dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status Kawasan hutan, letak batas dan luas wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, secara umum luas Kawasan hutan dan konservasi perairan masih dikategorikan baik, tidak ditemukan penurunan luas Kawasan hutan secara signifikan.

**Tabel 3.59. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kab./Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2019)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2019					Luas Hutan dan Perairan
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kabupaten Kep. Mentawai	183.269,96	7.215,74	250.819,50	-	50.687,34	491.992,54
2	Kabupaten Pesisir Selatan	279.903,16	22.472,05	45.255,71	3.953,17	31.135,89	382.719,98
3	Kabupaten Solok	47.225,48	144.673,84	11.247,51	4.477,36	8.868,18	216.492,37
4	Kabupaten Sijunjung	42.348,63	78.283,88	29.298,35	20.063,52	4.473,83	174.468,21
5	Kabupaten Tanah Datar	20.107,83	19.623,90	-	9.186,80	32,95	48.951,48
6	Kabupaten Padang Pariaman	52.193,61	13.174,66	-	-	-	65.368,27
7	Kabupaten Agam	27.805,49	10.000,31	7.321,31	2.493,89	8.767,05	56.388,05
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.140,08	116.646,72	20.477,66	3.899,12	11.164,22	172.327,80
9	Kabupaten Pasaman	32.821,54	196.274,83	29.749,20	-	4.888,78	263.734,35
10	Kabupaten Solok Selatan	65.937,82	54.701,28	52.668,83	12.780,64	13.228,63	199.317,20
11	Kabupaten Dharmasraya	4.600,45	14.035,22	27.802,46	26.277,02	15.856,98	88.572,13
12	Kabupaten Pasaman Barat	259,17	74.438,77	4.580,27	18.365,69	6.263,51	103.907,41
13	Kota Padang	25.224,02	12.557,16	245,34	-	-	38.026,52
14	Kota Solok	883,06	298,96	-	-	-	1.182,02
15	Kota Sawahlunto	-	207,09	37,21	4.516,31	4.215,38	8.975,99
16	Kota Padang Panjang	3,93	241,98	-	-	-	245,91
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	0
18	Kota Payakumbuh	-	270,71	-	-	-	270,71
19	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	802.724,23	765.117,10	479.503,35	106.013,52	159.582,74	2.312.940,94

Sumber: BPS Sumatera Barat

**Tabel 3.60. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kab./Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2020)**

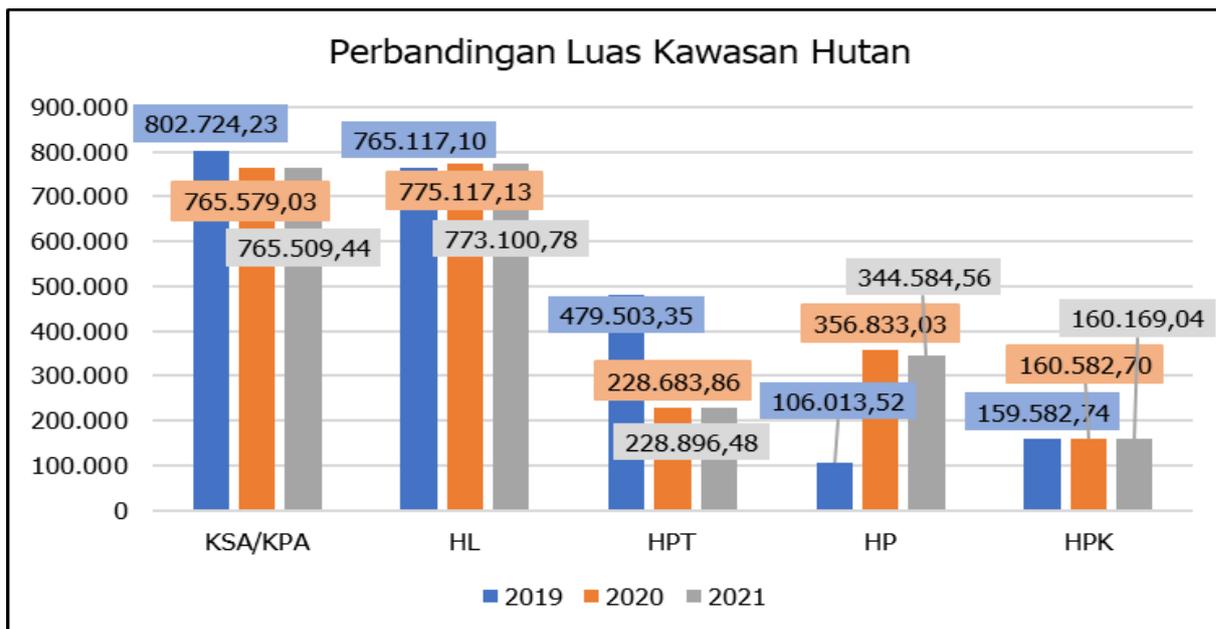
No	Kabupaten/Kota	Tahun 2020					Luas Hutan dan Perairan
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kabupaten Kep. Mentawai	183.269,96	7.215,75	-	250.819,51	50.687,34	491.992,56
2	Kabupaten Pesisir Selatan	279.903,16	22.472,06	45.255,70	3.953,16	31.135,88	382.719,96
3	Kabupaten Solok	47.376,93	145.415,45	11.313,18	4.477,36	9.868,18	218.451,10
4	Kabupaten Sijunjung	42.540,65	78.514,32	28.862,72	21.963,99	4.473,83	176.355,51
5	Kabupaten Tanah Datar	19.926,55	19.623,90	-	9.189,23	32,95	48.772,63
6	Kabupaten Padang Pariaman	15.038,13	13.174,66	-	-	-	28.212,79
7	Kabupaten Agam	27.991,32	20.000,31	7.321,31	2.491,45	8.767,04	66.571,43
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.140,09	116.646,72	20.477,67	3.899,12	11.164,21	172.327,81
9	Kabupaten Pasaman	32.821,54	196.274,83	29.749,19	-	4.888,78	263.734,34
10	Kabupaten Solok Selatan	65.937,82	54.701,27	52.668,84	12.780,63	13.228,63	199.317,19
11	Kabupaten Dhamasraya	4.256,99	13.063,19	28.172,44	24.376,58	15.856,98	85.726,18
12	Kabupaten Pasaman Barat	259,18	74.438,78	4.580,27	18.365,69	6.263,51	103.907,43
13	Kota Padang	25.224,02	12.557,16	245,33	-	-	38.026,51
14	Kota Solok	883,06	298,96	-	-	-	1.182,02
15	Kota Sawahlunto	-	207,09	37,21	4.516,31	4.215,37	8.975,98
16	Kota Padang Panjang	3,93	241,98	-	-	-	245,91
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	0
18	Kota Payakumbuh	-	270,70	-	-	-	270,70
19	Kota Pariaman	5,70	-	-	-	-	5,70
	Jumlah	765.579,03	775.117,13	228.683,86	356.833,03	160.582,70	2.286.795,75

Sumber: BPS Sumatera Barat

**Tabel 3.61. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Berdasarkan Kab./Kota di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2021)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021					Luas Hutan dan Perairan
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kabupaten Kep. Mentawai	183.269,97	7.215,75	-	250.819,51	50.687,34	491.992,57
2	Kabupaten Pesisir Selatan	278.942,06	22.411,20	45.255,70	3.953,16	31.135,88	381.698,00
3	Kabupaten Solok	47.225,49	144.673,85	11.247,52	4.477,36	9.457,76	217.081,98
4	Kabupaten Sijunjung	42.348,62	78.288,54	29.291,40	20.063,54	4.475,86	174.467,96
5	Kabupaten Tanah Datar	20.206,79	19.620,40	-	9.186,80	32,95	49.046,94
6	Kabupaten Padang Pariaman	15.042,67	13.174,66	-	-	-	28.217,33
7	Kabupaten Agam	28.869,42	20.019,11	7.321,31	2.493,89	8.767,04	67.470,77
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.140,09	116.646,72	20.477,68	3.899,12	11.162,45	172.326,06
9	Kabupaten Pasaman	32.821,54	196.647,46	29.749,19	-	4.888,78	264.106,97
10	Kabupaten Solok Selatan	65.938,65	54.687,82	52.668,78	12.780,63	13.228,63	199.304,51
11	Kabupaten Dharmasraya	4.234,08	11.769,51	27.813,97	27.813,97	15.856,98	87.488,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	353,23	74.379,22	4.580,27	4.580,27	6.260	90.152,99
13	Kota Padang	25.224,14	12.547,81	245,33	-	-	38.017,28
14	Kota Solok	883,06	298,96	-	-	-	1.182,02
15	Kota Sawahlunto	-	207,09	245,33	4.516,31	4.215,37	9.184,10
16	Kota Padang Panjang	3,93	241,98	-	-	-	245,91
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	0
18	Kota Payakumbuh	-	270,70	-	-	-	270,70
19	Kota Pariaman	5,70	-	-	-	-	5,70
	Sumatera Barat	765.509,44	773.100,78	228.896,48	344.584,56	160.169,04	2.272.260,30

Sumber: BPS Sumatera Barat



Gambar 3.5. Perbandingan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

Persentase tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat 56 %. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang memiliki persentase luas tutupan hutan terbesar di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Pariaman merupakan daerah terendah persentase dan Kota Bukittinggi tidak memiliki Kawasan hutan. Secara rinci dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.62. Tutupan Hutan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan	Persentase Tutupan Hutan
1	Kab. Kep. Mentawai	598.322,2	491.992,56	449.980,08	75,26
2	Kab. Pesisir Selatan	604.564,9	382.842,23	297.752,60	49,22
3	Kab. Solok	359.040,4	218.488,42	203.007,66	56,59
4	Kab. Sijunjung	315.058,0	176.531,14	133.495,32	42,25
5	Kab. Tanah Datar	137.718,9	48.772,64	41.571,21	30,32
6	Kab. Pdg Pariaman	134.226,6	28.212,79	25.147,15	19,26
7	Kab. Agam	222.627,0	66.571,43	55.828,92	25,08
8	Kab. Lima Puluh Kota	327.340,5	172.327,82	123.693,09	37,80
9	Kab. Pasaman	390.244,4	263.734,47	216.360,87	54,77
10	Kab. Solok Selatan	328.214,4	199.405,14	169.686,83	51,78
11	Kab. Dhamasraya	292.092,5	85.729,67	58.962,98	19,98
12	Kab. Pasaman Barat	385.299,3	103.907,64	71.180,47	18,73
13	Kota Padang	69.433,7	38.026,51	33.471,67	48,24



No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Tutupan Hutan	Persentase Tutupan Hutan
14	Kota Solok	5.872,0	1.182,02	982,81	16,74
15	Kota Sawahlunto	23.194,5	8.975,99	2.459,10	10,27
16	Kota Padang Panjang	2.356,0	245,91	537,71	25,99
17	Kota Bukittinggi	2.417,3	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	7.455,2	270,70	138,74	1,83
19	Kota Pariaman	6.476,7	37.150,92	5,70	0,01
	Jumlah	4.211.954,2	2.324.368	1.884.262,91	44,32

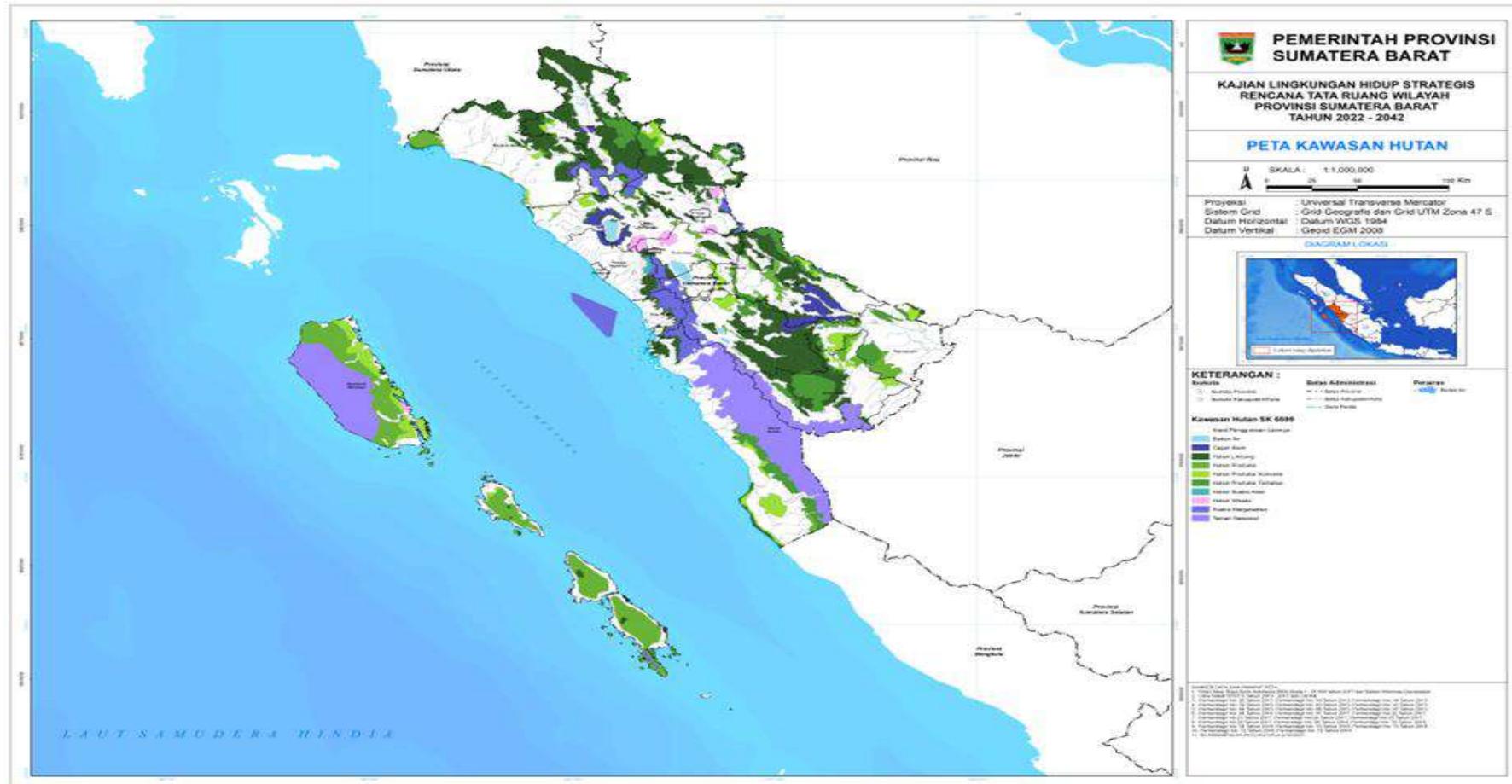
Sumber: DIKPLHD Prov Sumbar, 2022

Berdasarkan SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kawasan hutan lindung merupakan Kawasan hutan terluas di Provinsi Sumatera Barat yaitu 772.914 Ha, secara rinci Kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.63. Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Cagar Alam	73.343
2	Hutan Lindung	772.914
3	Hutan Produksi	356.630
4	Hutan Produksi Konversi	160.560
5	Hutan Produksi Terbatas	228.860
6	Hutan Suaka Alam	4.263
7	Hutan Wisata	31.964
8	Suaka Margasatwa	177.955
9	Taman Nasional	516.154
	Jumlah	2.322.643

Sumber: SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



Gambar 3.6. Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

Sumber: SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



3.2.4.2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)

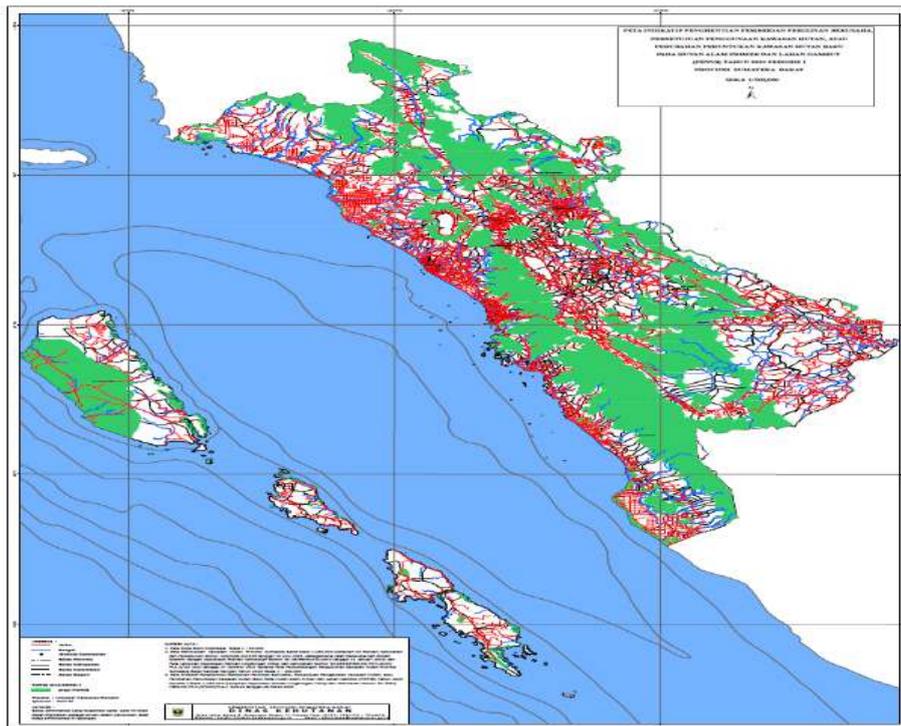
PIPIB Tahun 2023 Periode I ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023 Tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I.

Berdasarkan SK KLHK tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 19 Kabupaten/kota terdapat 17 Kab/kota termasuk PIPPIB. Terdapat 3 kategori PIPPIB di Sumatera Barat terdiri dari : PIPPIB Gambut seluas 34.788,68 Ha, PIPPIB Kawasan seluas 1.537.567,85 dan PIPPIB Primer seluas 25.192,19 Ha secara lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.64. Luas PIPPIB Sumatera Barat Priode I Tahun 2023

NO	KABUPATEN / KOTA	PIPIB 2023 REVISI I (HA)			TOTAL LUAS
		PIPIB GAMBUT	PIPIB KAWASAN	PIPIB PRIMER	
1	KAB. AGAM	2,476.39	49,085.35	342.18	51,903.92
2	KAB. DHARMASRAYA		14,644.91	152.73	14,797.65
3	KAB. KEP. MENTAWAI		190,894.80	9,214.46	200,109.26
4	KAB. LIMA PULUH KOTA		136,033.25	378.55	136,411.80
5	KAB. PADANG PARIAMAN		27,705.34	204.28	27,909.62
6	KAB. PASAMAN		226,891.50	3,627.34	230,518.83
7	KAB. PASAMAN BARAT	2,316.01	74,882.87	4,623.57	81,822.44
8	KAB. PESISIR SELATAN	29,996.29	302,479.43	50.74	332,526.46
9	KAB. SIJUNJUNG		121,366.77	880.80	122,247.57
10	KAB. SOLOK		192,944.26	3,333.84	196,278.11
11	KAB. SOLOK SELATAN		120,728.84	1,630.19	122,359.02
12	KAB. TANAH DATAR		39,473.20	485.63	39,958.83
13	KOTA PADANG		38,094.51	220.85	38,315.35
14	KOTA PADANG PANJANG		605.95		605.95
15	KOTA PAYAKUMBUH		347.29		347.29
16	KOTA SAWAHLUNTO		206.89		206.89
17	KOTA SOLOK		1,182.71	47.02	1,229.72
	Grand Total	34,788.68	1,537,567.85	25,192.19	1,597,548.72

Sumber : KLHK Tahun 2023



Gambar 3.7. Peta PIPPIB Sumatera Barat Priode I Tahun 2023

3.2.4.3. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Seluas 3.011,736 Ha sebagai bentuk dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sarana dan prasarana kebutuhan air, penerangan dan jalan serta kegiatan mendukung pertumbuhan ekonomi. Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.65. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT s.d TAHUN 2023

No.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PENGGUNA	JENIS PENGGUNAAN	LOKASI	FUNGSI HUTAN	LUAS (Ha)	PERSETUJUAN PPKH			MASA BERLAKU IZIN	SAMPAI BERLAKU IZIN	KET.
							PEJABAT PEMBERI IZIN	NOMOR	TANGGAL			
1	Kota Padang	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sumbar 2x100 MW dan Sarana Penunjangnya	Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kec. Bungus Teluk Kabung	HL	51,192	Menteri Kehutanan	SK.424/Menhut-II/2009	14 Juli 2009	20 tahun	20 29	PT. PLN IP UPT Teluk Sirih
2	Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih	Nagari Sungai Buluh, Kec. Batang Anai	HL	0,0575	Menteri Kehutanan	SK.647/Menhut-II/2010	22 November 2010	20 tahun	20 30	
3	Kabupaten Pasaman Barat	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang - Air Bangis	Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	HL dan HP	122,01	Menteri Kehutanan	SK.411/Menhut-II/2012	2 Agustus 2012	20 tahun	20 32	
4	Kota Padang	Walikota Padang	Pembangunan Jalan Baringin - Kalampaian	Kelurahan Baringin, Kec. Lubuk Kilangan dan Kelurahan Bungus Timur, Kec. Bungus Teluk Kabung	HL	17,05	Menteri Kehutanan	SK.560/Menhut-II/2012	5 Oktober 2012	Selama digunakan	-	
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan Jalan Menuju Lokasi	Nagari Galugua, Kec. Kapur IX	HPK	8,37	Menteri Kehutanan	SK.639/Menhut-II/2013	24 September 2013	Selama digunakan	-	

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



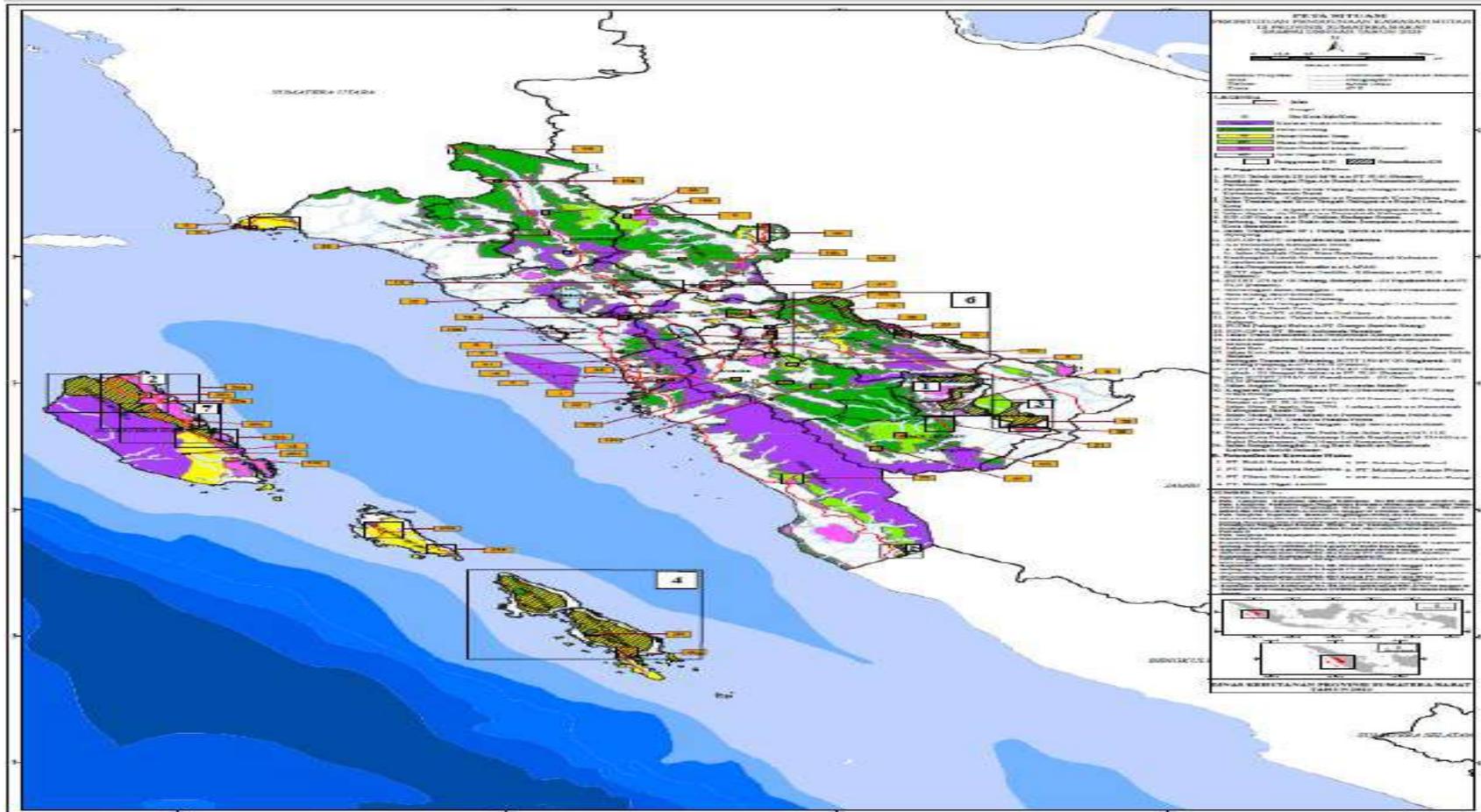
No.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PENGGUNA	JENIS PENGGUNAAN	LOKASI	FUNGSI HUTAN	LUAS (Ha)	PERSETUJUAN PPKH			MASA BERLAKU IZIN	SAMPAI BERLAKU IZIN	KET.
							PEJABAT PEMBERI IZIN	NOMOR	TANGGAL			
			Transmigrasi Koto Tengah Galugua									
6	Kabupaten Solok	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan Jalan Aie Luo - Kipek	Nagari Aie Luo, Kec. PayungSekaki	HPT	4,40	Ka. Badan Koordinasi PenanamanModal Prov. Sumatera Barat a.n.	522-870-2013	12 Nopember 2013	Selama digunakan	-	
7	Kabupaten Solok	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan Jalan Sapan - Air Dingin	Nagari Air Dingin, Kec. Lembah Gumanti	HPT	0,571	Ka. Badan Koordinasi PenanamanModal Prov. Sumatera Barat a.n.	522-871-2013	12 Nopember 2013	Selama digunakan	-	
8	Kabupaten Solok Selatan	PT. Galian Endapan Buana	Operasi Produksi Galena dan Sarana Penunjangnya	Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kec. Sangir Batang Hari	HP	153,89	Menteri Kehutanan	SK.489/Menhut- II/2014	26 Mei 2014	26 Mei 2014 s.d 2 Januari 2028 (14 Tahun)	20 28	
9	Kota Sawahlunto	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung, Intake Air Baku dan Jalan Sumpahan	Desa Kubang Utara Sikabau, Kec. Lembah Segar	HPK	3,65	Ka. Badan Koordinasi PenanamanModal Prov. Sumatera Barat a.n. Gubernur Sumatera Barat	522-657-2014	26 Agustus 2014	20 tahun	20 34	
10	Kabupaten Sijunjung	Bupati Sijunjung	Pembangunan Jalan Menuju Lokasi	Nagari Padang Tarok, Kec. Kamang Baru	HPK	14,48	Menteri Kehutanan	SK.26/Menhut- II/2015	16 Januari 2015	Selama digunakan	-	

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



No.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PENGGUNA	JENIS PENGGUNAAN	LOKASI	FUNGSI HUTAN	LUAS (Ha)	PERSETUJUAN PPKH			MASA BERLAKU IZIN	SAMPAI BERLAKU IZIN	KET.
							PEJABAT PEMBERI IZIN	NOMOR	TANGGAL			
			Transmigrasi SP 1 Padang Tarok									
11	Kabupaten Pasaman Barat	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Bijih Besidan Jalan Tambang	Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat	HP	102,22	Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal	56/1/IPPKH/PMDN /2015	21 Desember 2015	21 Desember 2015 s.d 4 Agustus 2026 (11 tahun)	20 26	
12	Kabupaten Solok	Bupati Solok	Pembangunan Jalan Jalur Kapujan - Rimbo Data dan Jalur Garabak Data - Batu Bajanjang	[1] Nagari Rangkiang Luluh Kec. Tigo Lurah dan Nagari Sungai Nanam Kec. Lembah Gumanti [2] Nagari Garabak Data dan Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah	HL	11,45	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.423/Menlhk/Setje n/PLA.0/6/2016	7 Juni 2016	Selama digunakan	-	
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Pembangkit Listrik Biomasa	Desa Matotonan, Kec. Siberut Selatan	HP	5,29	Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal	1/1/IPPKH/D/2016	14 Juli 2016	20 tahun	20 36	

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, 2023



Gambar 3.8. Peta Penggunaan Kawasan Hutan di Sumatera Barat



Dalam pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Barat dilakukan dimana pemanfaatan kayu pada kawasan hutan umumnya dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kehutanan terdiri dari kegiatan pemanfaatan kayu, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial. Pemanfaatan kayu pada kawasan hutan umumnya dilakukan oleh korporasi dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), sedangkan pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan dalam bentuk izin Kayu Rakyat (KR). Pemanfaatan kayu oleh korporasi di Sumatera Barat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada wilayah kerja UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI), Kabupaten Sijunjung pada wilayah kerja UPTD KPHL Sijunjung (Unit V), Kabupaten Solok Selatan pada wilayah kerja UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII), Kabupaten Dharmasraya pada wilayah kerja UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII) dan Kabupaten Pesisir Selatan pada wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX). Pemanfaatan kayu oleh korporasi di Sumatera Barat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.66. Jenis Pemanfaatan/Pemegang Izin

NO	Jenis Pemanfaatan/ Pemegang Izin	Luas (Ha)	Keterangan
I	IUPHHK-HA	183.330	
1	PT Salaki Summa Sejahtera	47.605	SK Menhut No. SK.413/Menhut-II/2004 tanggal 19-10-2004, s/d Tahun 2049 Status : Aktif
2	PT Minas Pagai Lumber	78.000	SK Menhut No.SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18-07-2013, s/d Tahun 2056 Status : Aktif
3	PT Multi Karya Lisun Prima	28.885	SK Menhut No. SK.347/Menhut-II/2011 tanggal 30-06-2011, s/d Tahun 2056 Status : Aktif
II	IUPHHK-HT	65.433	
1	PT Bukit Raya Mudisa	28.617	SK Menhutbun No. 257/Kpts-II/2000 tanggal 23-08-2000, s/d Tahun 2042 Status : Aktif
2	PT Dhara Sylva Lestari	15.357	SK Menhut No.SK.621/Menhut-II/2009 tanggal 5-10-2009, s/d Tahun 2069 Status : Aktif
3	PT Sukses Jaya Wood	1.584	SK Menhut No.SK.776/Menhut-II/2014 tgl 16 September 2014, s/d Tahun 2069 Status : Aktif
4	PT Biomass Andalan Energi	19.875	SK MenLHK No. SK.619/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018 Status : Aktif
	JUMLAH	219.923	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan berupa komoditi getah pinus, rotan, sarang burung walet, lebah madu, jasa lingkungan (ekowisata, air dan aliran air). Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dilakukan dengan



mekanisme perhutanan sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta Hutan Desa/Hutan Nagari (HD/HN). Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.67. Pemanfaatan Kawasan Hutan

NO	Jenis Pemanfaatan	s/d Tahun 2012 (Ha)	s/d Tahun 2019 (Ha)	Ket.
1	Hutan Desa/Hutan Nagari (HD/HN)	2.738	176.620	
2	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	5.345	6.935	
3	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	14.556	28.418	
4	Kemitraan Kehutanan	-	404	
	Jumlah	22.639	212.412	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

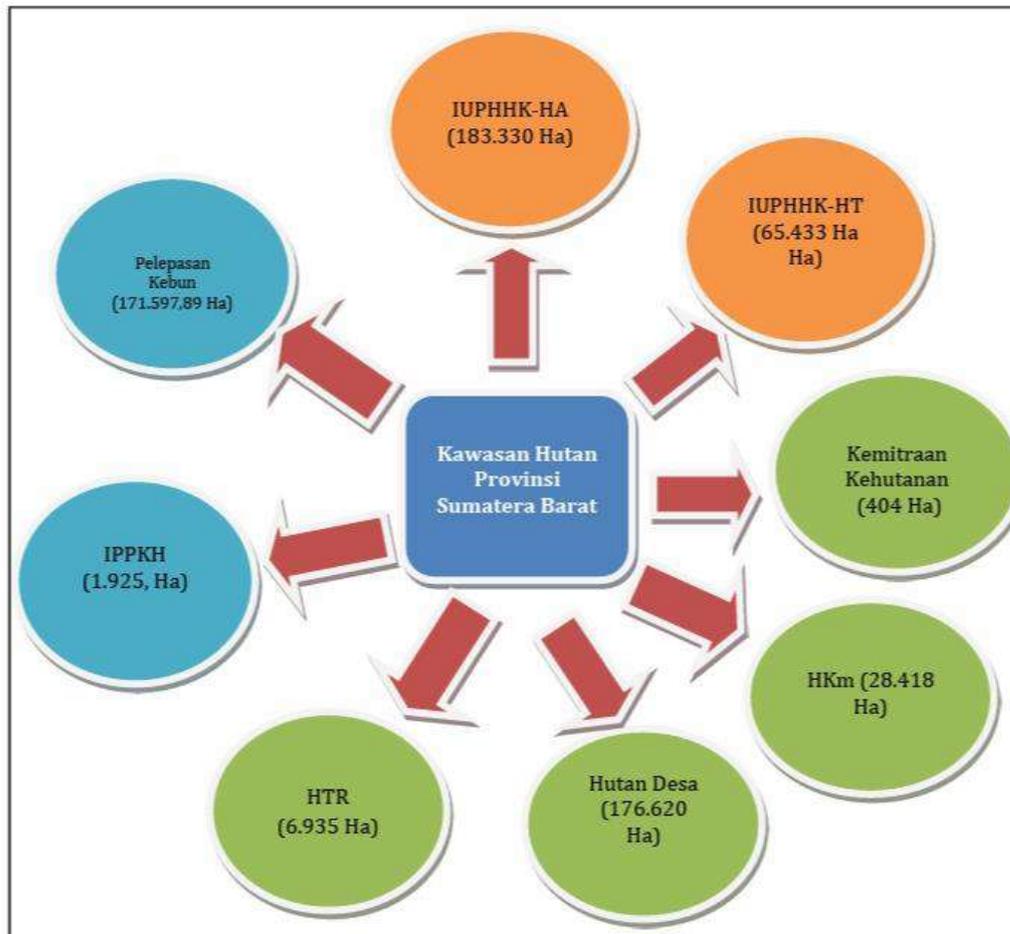
Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di wilayah Sumatera Barat didominasi oleh Hutan Desa (Hutan Nagari) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pola pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat selain HN, HTR, HKm dan Kemitraan Kehutanan, juga terdapat pola Hutan Adat seperti halnya Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau seluas \pm 35 Ha di Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1852/ MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tgl 14 Maret 2019 dengan status bukan kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain (APL) . Hutan adat lainnya yang sedang diinisiasi oleh Pemprov Sumbar yaitu di daerah Malalo Kabupaten Tanah Datar dan di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara nasional, Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat sebelum tahun 2012 didominasi oleh hutan tanaman rakyat seluas 631.628 dan diikuti oleh hutan kemasyarakatan seluas 43.387 hektar dengan total luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat seluas \pm 678.414 Ha. Tetapi kondisi s/d Bulan Desember 2018 pemanfaatan hutan berbasis masyarakat didominasi oleh hutan desa seluas 1.281.049,00 Ha dan Hutan Kemasyarakatan seluas 645.594,00 dengan total luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat mencapai \pm 2.537.163,70. (RKTN 2011-2030).

Sedangkan Penggunaan kawasan hutan untuk mengakomodasi kegiatan kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kegiatan yang menggunakan kawasan hutan di Sumatera Barat adalah pertambangan (batu bara, batu kapur, emas, galena), prasarana transportasi (jalan, pelabuhan), jaringan listrik/energi dan jaringan telekomunikasi. Penggunaan kawasan hutan di Sumatera Barat diprediksi akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk



mendukung sarana dan prasarana masyarakat serta meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam kawasan hutan. Data penggunaan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2018 seluas 1.925,10 Ha. Hal ini menurun dari pada tahun 2012 seluas 180.355 Ha. Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Statistik Dishut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Gambar 3.9. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

Dengan pertimbangan kontribusi ekologi, ekonomi dan sosial budaya, maka disusunlah arahan kebijakan pengurusan kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang sejalan dengan arahan pengurusan hutan nasional seperti yang tertuang dalam RKTN 2011-2030. RKTN memberikan enam arahan pengurusan hutan dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Arahan tersebut dipandang sesuai dengan kondisi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.68. Arahan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan**

NO	Arahan	Pemanfaatan
1	Kawasan untuk Konservasi	Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain HTR, HKm, HD, Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan kriteria 6 jenis arahan pengurusan hutan Provinsi Sumatera Barat tersebut, telah dilakukan analisa keruangan (spasial) dan hasilnya disajikan dalam Tabel 3.71. Hasil analisis menunjukkan bahwa empat arahan dominan adalah kawasan untuk konservasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut dan



kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi. Dua arahan lainnya adalah untuk prioritas rehabilitasi dan non kehutanan yang jumlahnya tidak terlalu besar masing masing sekitar 6,60% dan 4,72%. Rekapitulasi arahan kawasan hutan dalam RKTP Sumatera Barat Tahun 2012 2031 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.69. Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031

No	Arahan/Rencana	Jumlah (Ha)	Persen (%)
1	Kawasan untuk Konservasi (Arahan I)	766.897,38	33,00
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut (Arahan II)	409.995,43	17,64
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi (Arahan III)	153.078,39	6,59
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi (Arahan IV)	335.657,05	14,44
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat (Arahan V)	547.630,00	23,56
6	Kawasan untuk Non Kehutanan (Arahan VI)	110.689,71	4,76
Jumlah			

Tabel 3.70. Rekapitulasi Arahan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 per Kabupaten/Kota.

No	Kabupaten/Kota	Luas Arahan (Ha)						Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Agam	23.758	3.801	4.808	-	25.632	8.389	66.388
2	Dharmasraya	4.557	15.478	1.235	34.648	24.655	8.000	88.572
3	Kepulauan Mentawai	177.481	44.535	32.492	192.010	27.478	18.003	492.000
4	Lima Puluh Kota	19.308	17.006	28.920	1.454	95.149	10.491	172.328
5	Padang Pariaman	51.158	6.388	1.722	-	6.100	-	65.368
6	Pasaman	30.658	76.683	15.529	18.311	119.668	2.886	263.734
7	Pasaman Barat	205	21.430	2.112	252	60.111	19.797	103.907
8	Pesisir Selatan	270.147	32.609	15.188	14.488	38.319	11.970	382.720
9	Sijunjung	40.289	41.706	16.579	31.761	37.402	6.731	174.468
10	Solok	45.147	110.635	10.526	2.513	39.474	9.197	217.492
11	Solok Selatan	60.038	20.495	7.293	40.094	62.951	8.446	199.317
12	Tanah Datar	18.418	9.311	12.459	122	6.189	2.452	48.951
13	Kota Padang	24.847	8.601	3.112	-	1.466	-	38.027
14	Kota Padang Panjang	4	242	-	-	-	-	246
15	Kota Payakumbuh	-	5	2	-	255	9	271
16	Kota Sawahlunto	-	773	1.101	4	2.779	4.319	8.976
17	Kota Solok	883	297	2	-	-	-	1.182
	Total	766.897	409.995	153.078	335.657	547.630	110.690	2.323.948

Sumber : Perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031



Tabel 3.71. Distribusi Arahana Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi.

NO	ARAHAN/RENCANA	FUNGSI KAWASAN HUTAN (HA)					JUMLAH (HA)
		HK	HL	HP			
				TERBATAS	TETAP	KONVERSI	
1	Kawasan untuk Konservasi	766.897,38	-	-	-	-	766.897,38
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	311.654,86	18.959,88	5.291,36	74.089,33	409.995,43
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	35.826,87	55.667,96	16.926,02	44.657,54		153.078,39
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	2,59	97.658,60	237.988,90		335.650,09
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	401.899,62	94.547,77	48.339,20	2.843,42	547.630,00
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	5.892,10	591,60	20.556,04	83.649,97	110.689,71
	Jumlah	802.724,25	775.117,13	228.683,87	356.833,03	160.582,72	2.323.941,00

Sumber : Perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031

Tabel 3.72. Arahana Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Tahun 2031.

No	Arahana/Rencana	Fungsi Kawasan (Ha)				Jumlah
		HK	HL	HP		
				Terbatas	Tetap	
1	Kawasan untuk Konservasi	766.897	-	-	-	766.897
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	311.657	18.960	5.291	335.909
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	35.827	55.668	16.926	44.660	153.081
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	-	97.659	224.759	322.418
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	401.900	94.548	61.208	557.655
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	187.981
7	Jumlah	802.724	769.225	228.092	335.918	
8	Luas Efektif 2031	2.135.960				

Sumber : Perubahan RKTP Sumatera Barat Tahun 2012-2031



3.2.5. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah istilah yang meliputi tiga komponen yaitu: Keanekaragaman ekosistem, Keanekaragaman spesies, dan Keanekaragaman genetik. Dengan demikian bila kita berbicara tentang keanekaragaman hayati Sumatera Barat maka itu berarti kita membicarakan tentang ketiga komponen tersebut. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, ketiga komponen tersebut perlu menjadi perhatian baik dalam upaya pemanfaatan secara berkelanjutan maupun upaya pelestariannya. Oleh karena itu perlu diketahui lebih dahulu lebih jauh tentang kondisi, penyebab degradasi, peluang pemanfaatan berkelanjutan, dan langkah-langkah pelestariannya.

a. Keanekaragaman Ekosistem

Menurut Whitten (1987) Keanekaragaman Ekosistem di Sumatera sangat beragam. Keanekaragaman ekosistem Sumatera Barat secara umum mencerminkan kelompok yang dimaksud oleh Whitten antara lain yaitu:

- Hutan bakau
- Hutan daerah Pesisir
- Rawa Gambut
- Hutan Dataran Rendah
- Hutan Pegunungan
- Ekosistem danau
- Ekosistem Sungai

Kondisi ekosistem-ekosistem ini relatif telah mengalami penurunan kualitas sebagaimana dapat dilihat dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat 2022. Disampaikan antara lain, adanya rawa gambut, mangrove, dan hutan daerah pesisir yang terdegradasi sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi. Rawa gambut misalnya, yang terdapat pada beberapa lokasi telah mengalami kerusakan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.75.

Tabel 3.73. Luas dan Persentase Kerusakan Ekosistem Gambut Sumatera Barat

Lokasi	Luas (Ha)	Persentase Kerusakan
Kabupaten Pesisir Selatan	12.247,06	99,54%
Kabupaten Pasaman Barat	1.940	88,14%
Kabupaten Agam	8.625	95,00 %

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sementara, sebagian dari ekosistem mangrove juga sudah mengalami penurunan kerapatan, sebagaimana dapat dilihat pada kerapatan tutupan mangrove di Kabupaten Padang Pariaman yang hanya mencapai 78,30%, dan terus mengalami degradasi sebagai akibat pembukaan tambak udang.

Penurunan kualitas air pada ekosistem danau serta sungai juga telah terjadi. Danau Maninjau misalnya tergolong danau yang kualitas airnya telah mengalami penurunan signifikan sejak dua puluh tahun terakhir. Hampir semua sungai yang melewati kawasan pemukiman juga mengalami penurunan kualitas. Sementara itu perluasan lahan pertanian dan perkebunan telah mengakibatkan penurunan luas hutan dataran rendah di berbagai lokasi di Sumatera Barat.

b. Keanekaragaman Spesies (Jenis).

Sumatera Barat memiliki keanekaragaman spesies yang tergolong tinggi baik untuk hewan maupun untuk tumbuhan. Sekitar 792 spesies tumbuhan, 261 jenis ikan, 295 jenis burung, dan 129 jenis mammalia dilaporkan telah teridentifikasi (lihat DIKPLHD, 2022) Tingginya keanekaragaman spesies tersebut berkorelasi dengan beragamnya keanekaragaman ekosistem, sebagaimana dikemukakan terdahulu. Sebagai akibat penurunan kualitas habitat maka spesies-spesies hewan telah semakin jarang dijumpai. Spesies mammalia besar seperti badak Sumatera, tapir, harimau yang sering diteliti diketahui telah mengalami penurunan populasi. Untuk tumbuhan jenis- jenis Dipterocarpaceae yang dalam laporan survey ekosistem Bukit Barisan (*PSLH Unand, 1984*) masih sering ditemukan, beberapa tahun sesudahnya dari beberapa kajian diketahui semakin langka (*Tamin, Arbain, 2008*).

Selama tahun 2022 sampai tahun 2023 telah terjadi konflik antara satwa liar seperti Harimau dan Buaya di beberapa kabupaten kota. Peningkatan konflik ini menandakan adanya kerusakan home range satwa yang terjadi akibat kegiatan manusia.

c. Keanekaragaman Genetik.

Sumatera Barat juga tergolong memiliki keanekaragaman genetik yang tinggi. Baik keanekaragaman genetik hewan maupun tumbuhan. Hasil penelitian Syofrinaldi (2021) menuliskan setidaknya 75 varietas padi lokal terdapat di Sumatera Barat. Varietas tersebut seperti Junjuang, Anak Daro, Caredek, dll masih banyak dijumpai. Namun introduksi varietas baru hasil



pemuliaan yang dilepaskan ke petani secara bertahap menggerus keberadaan varietas lokal tersebut. Secara umum, telah terjadi erosi genetik varietas padi. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman karet, kulit manis, dan cabe.

Berdasarkan kondisi di atas, ketiga komponen Keanekaragaman hayati tersebut telah mengalami penurunan kualitas. Degradasi tersebut terjadi sebagai akibat beberapa hal dibawah ini:

- Eksploitasi berlebihan
- Pengembangan Infrastruktur
- Introduksi spesies baru
- Pencemaran air, tanah, dan udara
- Perubahan iklim global

Untuk Sumatera Barat pengembangan perkebunan sawit di beberapa lokasi merupakan salah satu faktor utama penurunan tipe ekosistem seperti ekosistem gambut dan penurunan jumlah individu dan jenis hewan serta tumbuhan. Sementara itu, pemanfaatan hutan dataran rendah dan hutan pantai untuk pengembangan pemukiman, tambak, dan infra struktur jalan menjadi penyebab utama degradasi keanekaragaman hayati tersebut. Pencemaran danau dan sungai juga telah mengakibatkan penurunan populasi dan jenis ikan tertentu, seperti rinuak (*Raspbora sp*) dan beberapa ikan lain.

Peluang Pemanfaatan Berkelanjutan

Jika dilihat dari potensi yang ada, pemanfaatan keanekaragaman hayati mempunyai peluang yang cukup besar. Hampir semua aspek Bioprospeksi (istilah untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan) terdapat di Sumatera Barat. Peluang tersebut secara garis besar mencakup 4 (empat) aspek utama yaitu:

- Keanekaragaman hayati untuk obat
- Keanekaragaman hayati untuk makanan
- Keanekaragaman hayati untuk energi baru terbarukan
- Keanekaragaman hayati pendukung Ekowisata

Beberapa contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati telah dilakukan, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.74. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati**

No	Aspek Pemanfaatan	Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan (contoh)
1.	Keanekaragaman Hayati untuk Obat dan Supplement	Sungkai, Tumbuhan Sarang Semut (Myrmecodia), Mengkudu, Sirih, Benalu, Sambiloto, Keladi Tikus, Bengkuang dan puluhan tanaman obat tradisional lainnya yang diketahui memiliki bahan aktif.
2	Keanekaragaman Hayati Untuk Makanan	
	Sumber Karbohidrat	Padi, jagung, sagu, keladi, kentang, Ubi Jalar, Ubi Kayu
	Bahan Perasa	Jeruk (berbagai sub spesies), Salimpauang, Cabe, Tebu, Asam Kandis.
	Bahan Pewarna	Kunyit, Buah Naga, Pandan dll
	Bumbu	Serai, Salam, Jahe, Lengkuas, Cengkeh, Lada.
3	Keanekaragaman hayati untuk Energi	Sawit, Kelapa, Jarak, Beberapa Leguminosae dll.
4	Keanekaragaman hayati untuk pendukung Ekowisata	Rafflesia, Amorphophallus, Burung Merak, Harimau, Kelinci Sumatera, Kura-Kura, dan berjenis-jenis bunga-bunga

3.2.5.1. Upaya Pelestarian

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selain diperlukan kebijakan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan diperlukan pula upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian ini sekurang-kurangnya mencakup empat aspek pendekatan, yaitu:

- Regulasi
- Teknologi
- Ekonomi
- Budaya

Untuk masing-masing aspek perlu dipertimbangkan arah kebijakan tertentu sebagaimana di cantumkan dalam Tabel 3.77 berikut.

Tabel 3.75. Aspek dan Kebijakan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Aspek	Arah Kebijakan Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Regulasi	Mengembangkan aturan pelestarian ekosistem diluar dan didalam kawasan lindung
	Mengimplementasikan aturan pemeliharaan spesies yang telah



	ada dan mengembangkan aturan lokal
	Mengembangkan regulasi konservasi genetik berbasis kearifan lokal
Teknologi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelestarian ekosistem dan fungsinya (sumur resapan, kolam bioretensi dll)
	Meningkatkan teknologi konservasi spesies baik in situ maupun ex situ.
	Meningkatkan teknologi pelestarian genetik baik ex situ maupun in situ
Ekonomi	Mengembangkan insentif dan disinsentif ekonomi untuk pelestarian ekosistem, spesies, dan genetik
	Meningkatkan kerjasama imbal jasa lingkungan antar stake holder
	Mengembangkan kerjasama luar negeri dalam pelestarian keanekaragaman hayati
Budaya	Revitalisasi kearifan lokal untuk pelestarian keanekaragaman hayati
	Mendorong pengembangan budaya berbasis keanekaragaman hayati lokal (ukiran, tarian, nyanyian, dan arsitektur)
	Mengembangkan budaya apresiasi ekosistem, flora, dan fauna

3.2.6. Adaptasi Perubahan Iklim

3.2.6.1. Rencana FOLU Net Sink Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang merupakan inisiatif pembangunan yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan serta penurunan emisi. PRK dikembangkan dari serangkaian program, kebijakan dan komitmen pemerintah terkait penanganan perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional. Inisiatif PRK tercantum dalam prioritas pembangunan nasional pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan inisiatif ini juga akan dikembangkan ke dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) upaya pengurangan emisi GRK Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui sistem AKSARA dan menunjukkan pencapaian potensi penurunan emisi GRK mencapai 16,46 juta ton CO₂eq sampai dengan tahun 2020. Potensi capaian tersebut berdasarkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) sektor prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian (berbasis lahan dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 16,37 juta ton CO₂eq) energi, industri transportasi (berbasis energi dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 0,04 juta ton CO₂eq) dan



pengolahan limbah (berbasis pengelolaan limbah dengan pengurangan emisi masih kecil sekali.

Hasil perhitungan nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2030 menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan mitigasi yang diusulkan diproyeksikan dapat menurunkan emisi hingga 9,72% dari BAU baseline pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Sumatera Barat dalam menangani perubahan iklim di daerah. Adapun hasil rekapitulasi nilai baseline dan estimasi penurunan emisi GRK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.76. Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline 2030 (tonCO2eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2030	
		tonCO2eq	%
Pertanian	1.533.653	369.772	24,11
Kehutanan	132.184.477	11.117.529	8,41
Energi & Transportasi	10.960.000	2.625.018	23,95
Limbah	1.175.300	62.500	5,32
Total	145.178.490	14.112.319	9,72

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Arahan dalam data spasial untuk Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terhitung seluas 1.044.126,60 ha yang tersebar ke dalam sembilan aksi mitigasi yang terdiri dari Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral pada areal seluas 6.737,18 ha; Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi pada areal seluas 4.794,04 ha; Pembangunan Hutan Tanaman pada areal seluas 4.658,28 ha; Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) pada areal seluas 135.251,09 ha; Penerapan RIL-C pada areal seluas 2.170,55 ha; Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada areal seluas 45.834,41 ha; Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada areal seluas 22.042,80 ha; Pengelolaan Tata Air Gambut pada areal seluas 13.017,92 ha; dan Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada areal seluas 809.620,32 ha.

Data analisis perbandingan ini dapat memberikan informasi dan justifikasi pelaksanaan agenda FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pelaporan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Hasil analisis spasial



menunjukkan bahwa, terdapat beberapa lokasi arahan nasional yang tidak digunakan oleh sub-nasional dengan beberapa justifikasi, seperti adanya perbedaan batas wilayah provinsi, perpindahan lokasi sasaran untuk beberapa aksi mitigasi, perbedaan batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain, dan justifikasi lainnya yang berbeda antara arahan dari nasional dengan arahan dari sub-nasional. Hasil analisis dari data perbandingan arahan luas area sasaran FOLU Net Sink 2030 menurut aksi mitigasinya selengkapnya disajikan Tabel dibawah ini.



Tabel 3.77. Perbandingan Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi Mitigasi Berdasarkan Arahan Nasional dan Arahan Sub-Nasional di Provinsi Sumatera Barat

No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahan Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
RO1	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral	6.737,18	3.390,07	3.347,11	<p>Arahan RO1 dari nasional lebih luas 3.347,11 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan RO1 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 3.116,61 ha.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 3.620,39 ha, dan seluas 3.505,83 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 275,71 ha.</p>
RO2	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut	-	-	-	Tidak terdapat arahan RO2 baik dari nasional maupun dari sub nasional untuk Sumatera Barat.
RO3	Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi	4.794,04	2.175,74	2.618,30	<p>Arahan RO3 dari nasional lebih luas 2.618,30 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan RO3 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 2.167,96 ha.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan</p>



No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahannya (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
					<p>sub-nasional terhitung seluas 2.624,52 ha, dan seluas 20,10 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 7,65 ha.</p>
RO4	Pembangunan Hutan Tanaman	4.658,28	-	4.658,28	<p>Terdapat arahan RO4 dari nasional untuk Sumatera Barat seluas 4.658,28 ha. Namun tidak terdapat arahan untuk sub nasional.</p>
RO5	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)	135.251,09	131.294,59	3.956,50	<p>Arahan RO5 dari nasional lebih luas 3.956,50 ha dari arahan sub nasional.</p> <p>Areal arahan RO5 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 16.404,12 ha.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 5.014,39 ha, dan seluas 19,34 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 114.752,42 ha.</p>
RO6	Penerapan RIL-C	2.170,55	130.923,68	(128.753,13)	<p>Arahan sub nasional untuk RO6 masih bertampalan dengan</p>



No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahana Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
					<p>RO5. Sehingga luasan antara RO5 dan RO6 pada arahan sub nasional tidak jauh berbeda dan gap pada RO6 lebih luas dari arahan nasional.</p> <p>Areal arahan RO6 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 2.167,96 ha.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 128.613,32 ha.</p>
RO7	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	45.834,41	34.072,07	11.762,34	<p>Arahan RO7 dari nasional lebih luas 11.762,34 ha dari arahan sub nasional.</p> <p>Areal arahan RO7 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 35.123,75 ha.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 10.696,26 ha, dan seluas 13,67 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 8.178,05 ha.</p>
RO8	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa	22.042,80	7.751,22	14.291,58	<p>Arahan RO8 dari nasional lebih luas 14.291,58 ha dari arahan sub nasional.</p>



No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahana Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
	Rotasi				<p>Tidak ada areal arahan RO8 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional. Artinya, untuk aksi mitigasi RO8, lokasi yang dipilih tidak berdasarkan arahan nasional.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 22.051,69 ha, dan seluas 686,07 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 7.766,18 ha.</p>
RO9	Pengelolaan Tata Air Gambut	13.017,92	-	13.017,92	<p>Terdapat arahan RO9 dari nasional untuk Sumatera Barat seluas 13.017,92 ha. Namun tidak terdapat arahan untuk sub nasional.</p>
RO10	Pelaksanaan Restorasi Gambut	-	-	-	<p>Tidak terdapat arahan RO10 baik dari nasional maupun sub nasional untuk Sumatera Barat.</p>
RO11	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	809.620,32	805.609,83	4.010,49	<p>Arahan RO11 dari nasional lebih luas 4.010,49 ha dari arahan sub nasional.</p> <p>Areal arahan RO11 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 783.215,51 ha.</p>



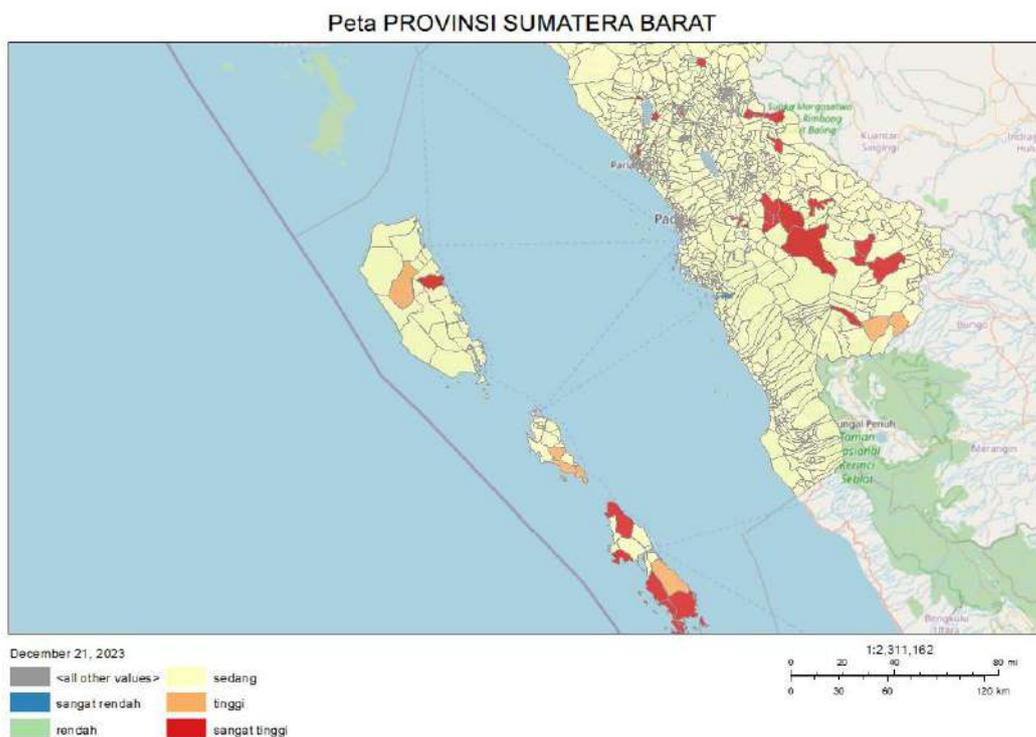
No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arah Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
					<p>Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 26.271,59 ha, dan seluas 9.039,79 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p> <p>Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 23.937,69 ha, dan seluas 2.415,07 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau.</p>
RO12	Pengelolaan Mangrove	-	1,61	(1,61)	<p>Tidak ada arahan RO12 dari nasional. Namun terdapat arahan sub nasional seluas 2,29 ha untuk RO12 di Sumatera Barat.</p> <p>Arahan untuk RO12 disesuaikan dengan Peta Mangrove Nasional dan terdapat areal seluas 0,56 ha pada arahan RO12 dari sub nasional yang bersesuaian dengan Peta Mangrove Nasional.</p>
Total		1.044.126,60	1.115.218,81	(71.092,22)	<p>Arahan sub nasional lebih luas 71.092,22 ha dari arahan nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena arahan sub nasional untuk aksi ENR dengan RIL-C masih berada pada lokasi yang bertampalan.</p>

Sumber: Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, 2022; Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; Analisis Data, 2022



3.2.6.2. SIDIK

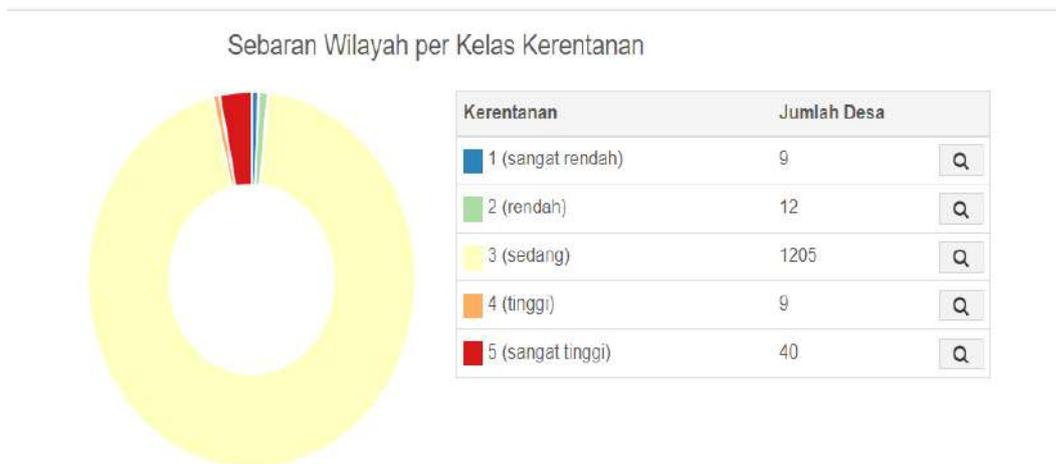
Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indicator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, maka KLHK mengembangkan Sistem Informasi Data dan Indeks Kerentanan (SIDIK) Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan data SIDIK, kondisi kerentanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada peta berikut :



Gambar 3.10. Peta Kerentanan Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan Gambar 3.54. menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki 40 desa/nagari yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap perubahan iklim lokasi tersebut ditandai dengan warna merah dan 9 nagari/desa yang memiliki kerentanan kategori tinggi (warna coklat). Sedangkan kategori kerentanan sangat rendah terdapat 9 nagari/desa (warna biru) dan 12 nagari/desa kategori rendah (warna hijau) serta sekitar 1.205 kategori sedang (warna kuning) dari jumlah total 1.275 nagari/desa di Sumatera Barat. Dengan rincian sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3.11. Peta Kerentanan Provinsi Sumatera Barat

3.2.7. Kondisi dan Resiko Kebencanaan

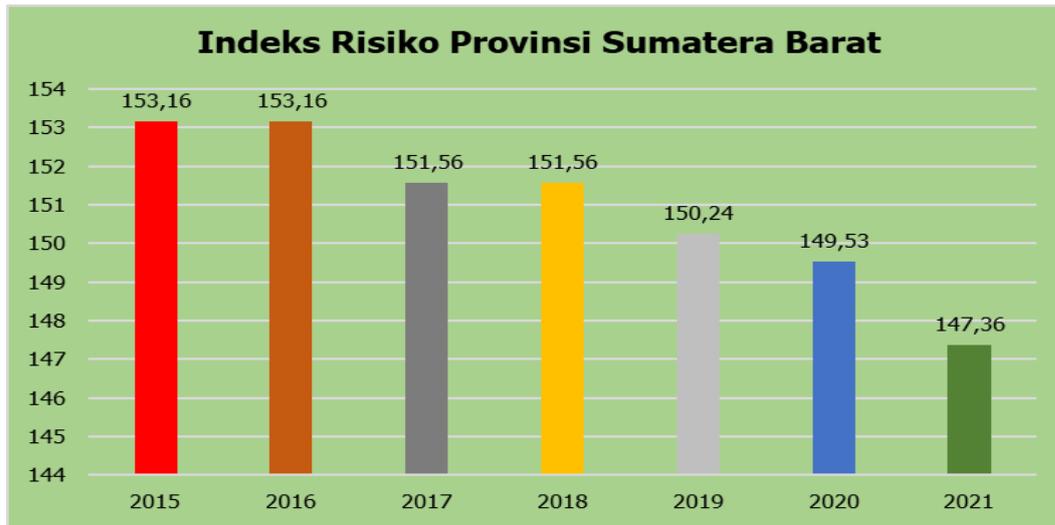
Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan.

Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki potensi bencana yang perlu diwaspadai seperti wilayah Mentawai yang memiliki potensi gempa besar yang disebut dengan Mentawai Megathrust. Gempa bumi yang cukup besar pernah terjadi pada tanggal 30 September 2009 yang berkekuatan 7,6 SR dan gempa susulan dengan kekuatan 6,9 SR. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2022, bencana



yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 didominasi oleh bencana puting beliung, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks resiko bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai 147,36.

Berdasarkan nilai indeks resiko Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan dari 153,16 menjadi 147,36, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BNPB (IRBI,2021)

Gambar 3.12. Indeks Resiko Bencana Antar Waktu di Provinsi Sumatera Barat

Pengkajian resiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen resiko yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat resiko bencana suatu Kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Dilihat dari persentase penduduk (jiwa terpapar) berdasarkan ancaman bencana di Provinsi Sumatera Barat bahwa tingkat kapasitas daerah terhadap ancaman bencana sebagian besar tergolong rendah sedangkan beberapa kabupaten kota dengan tingkat kapasitas daerah tergolong sedang. Ancaman bencana berdasarkan data IRBI 2021 seperti banjir, banjir bandang, covid-19, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, likuifaksi, tanah longsor dan tsunami. Potensi penduduk yang cukup banyak terpapar akibat ancaman bencana seperti gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim. Sedangkan indeks resiko berdasarkan jenis bencana dapat dilihat pada Tabel



Tabel 3.78. Persentase Keterpaparan Penduduk terhadap Resiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Tingkat Kapasitas Daerah	Persentase keterpaparan (jiwa) Bencana di Provinsi Sumatera Barat										
				Banjir	Banjir Bandang	Covid-19	Cuaca Ekstrem	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gempa Bumi	Kekeringan	Letusan Gunung Api	Likuifaksi	Tanah Longsor	Tsunami
1	Kabupaten Kep. Mentawai	90.904	Rendah	27%	3%	21%	69%	27%	100%	63%	-	-	11%	40%
2	Kabupaten Pesisir Selatan	515.549	Rendah	61%	22%	43%	80%	56%	100%	100%	-	80%	8%	9%
3	Kabupaten Solok	392.338	Rendah	15%	13%	3%	49%	-	100%	100%	2%	37%	25%	-
4	Kabupaten Sijunjung	240.079	Rendah	40%	23%	30%	50%	-	70%	79%	-	10%	24%	-
5	Kabupaten Tanah Datar	374.431	Sedang	5%	8%	61%	61%	-	99%	91%	2%	7%	14%	-
6	Kabupaten Padang Pariaman	325.898	Rendah	33%	9%	56%	80%	21%	98%	100%	-	42%	8%	2%
7	Kabupaten Agam	524.561	Rendah	19%	9%	46%	37%	4%	100%	68%	1%	18%	14%	2%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	388.585	Rendah	24%	10%	57%	65%	-	91%	3%	-	41%	13%	-
9	Kabupaten Pasaman	243.681	Rendah	25%	19%	14%	69%	-	10%	24%	-	25%	14%	-
10	Kabupaten Solok Selatan	181.661	Rendah	27%	22%	43%	24%	-	96%	100%	1%	56%	14%	-
11	Kabupaten Dhamasraya	226.264	Rendah	38%	3%		89%	-	56%	38%	-	50%	2%	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	436.298	Tinggi	37%	8%	46%	88%	19%	100%	52%	-	28%	2%	4%
13	Kota Padang	918.463	Sedang	54%	21%	92%	94%	36%	100%	100%	-	84%	4%	4%
14	Kota Solok	76.272	Rendah	59%	32%	37%	97%	-	100%	100%	-	78%	1%	-
15	Kota Sawahlunto	66.962	Rendah	6%	18%	58%	9%	-	98%	100%	-	8%	66%	-
16	Kota Padang Panjang	59.998	Rendah	2%		89%	79%	-	100%	100%	-	-	5%	-
17	Kota Bukittinggi	128.944	Rendah	7%	1%	98%	3%	-	100%	83%	-	-	2%	-
18	Kota Payakumbuh	138.303	Rendah	37%	7%	82%	95%	-	99%	-	-	95%	-	-
19	Kota Pariaman	95.519	Sedang	51%	2%	93%	100%	47%	100%	100%	-	65%	-	7%

Sumber: BNPB (IRBI,2021)



LanjutanIndeks Resiko Ancaman Berdasarkan Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Banjir		Gempa Bumi		Tsunami		Kebakaran Hutan dan Lahan		Tanah Longsor		Gelombang Ekstrim dan Abrasi		Kekeringan		Cuaca Ekstrim		Letusan Gunung Api	
		Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas
1	Kab. Kep. Mentawai	36	tinggi	32,4	tinggi	19,2	Tingg	24	tinggi	24	tinggi	36	tinggi	12	sedang	13,6	Tinggi	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	23,23	tinggi	13,94	tinggi	15,48	tinggi	15,48	tinggi	15,48	tinggi	15,48	tinggi	14,45	tinggi	8,77	sedang	-	-
3	Kab. Solok	-	-	32,4	tinggi	-	-	36	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	13,6	tinggi	7,2	sedang
4	Kab. Sijunjung	-	-	21,6	tinggi	-	-	36	tinggi	12	sedang	-	-	24	tinggi	13,6	tinggi	-	-
5	Kab. Tanah Datar	-	-	32,4	tinggi	-	-	36	tinggi	12	sedang	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	7,2	sedang
6	Kab. Padang	24,19	tinggi	14,52	tinggi	16,13	Tingg	24,19	tinggi	8,06	sedang	15,05	tinggi	16,13	tinggi	9,14	sedang	4,84	sedang
7	Kab. Agam	27,01	tinggi	24,31	tinggi	-	-	27,01	tinggi	9	sedang	18	tinggi	18	tinggi	10,2	sedang	5,4	sedang
8	Kab. Lima Puluh	-	-	21,6	tinggi	-	-	36	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	-	-
9	Kab. Pasaman	35,19	tinggi	31,67	tinggi	-	-	35,19	tinggi	35,19	tinggi	-	-	23,46	tinggi	13,29	tinggi	-	-
10	Kab. Solok Selatan	-	-	32,4	tinggi	-	-	36	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	13,26	Tinggi	7,2	sedang
11	Kab. Dhamasraya	31,39	tinggi	18,83	tinggi	-	-	31,39	tinggi	10,46	sedang	-	-	20,92	tinggi	11,86	sedang	-	-
12	Kab. Pasaman Barat	36	tinggi	21,6	tinggi	24	Tingg	36	tinggi	24	tinggi	24	tinggi	24	tinggi	13,6	Tinggi	-	-
13	Kota Padang	36	tinggi	21,6	tinggi	24	Tingg	36	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	20,4	Tinggi	-	-
14	Kota Solok	-	-	32,4	tinggi	-	-	36	tinggi	12	sedang	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	7,2	sedang
15	Kota Sawahlunto	-	-	21,6	tinggi	-	-	30	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	-	-
16	Kota Padang	-	-	32,4	tinggi	-	-	24	tinggi	12	sedang	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	7,2	sedang

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



No	Kab/Kota	Banjir		Gempa Bumi		Tsunami		Kebakaran Hutan dan Lahan		Tanah Longsor		Gelombang Ekstrem dan Abrasi		Kekeringan		Cuaca Ekstrem		Letusan Gunung Api	
		Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas
17	Kota Bukittinggi	-	-	32,4	tinggi	-	-	36	tinggi	24	tinggi	-	-	24	tinggi	13,6	Tinggi	-	-
18	Kota Payakumbuh	-	-	21,6	tinggi	34,8	Tingg	-	-	11,6	sedang	-	-	23,2	tinggi	13,6	Tinggi	-	-
19	Kota Pariaman	33,6	tinggi	21,6	tinggi	24	Tingg	22,4	tinggi	11,2	sedang	-	-	22,4	tinggi	13,6	Tinggi	-	-

Sumber: IRBI, 2021



1. Gempa Bumi

Ancaman gempa bumi di Sumatera itu bukan hanya bersumber dari Mentawai Megathrust saja, ada 3 (tiga) sumber ancaman gempa bumi di Sumatera, yaitu ; Pertama di daerah subduksi pertemuan antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia (lokasi Megathrust Mentawai), kedua di Mentawai Fault System (MFS), dan yang ketiga di Sumatera Fault System (SFS) atau lebih populer dengan istilah sesar Sumatera. Sumber gempa dari sesar ini berada di darat memanjang dari Provinsi Lampung sampai ke Banda Aceh sepanjang ± 1900 km dan melewati beberapa kabupaten di Sumatera Barat antara lain : Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi dan Kab. Pasaman. Tentunya ancaman bencana gempa bumi yang bersumber dari sesar Sumatera ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sejarah mencatat kejadian gempa bumi tahun 2007 terjadi dalam kurun waktu 2 jam, terjadi 2 kali gempa bumi merusak dengan pusat gempa di 0.55°LS , 100.47°BT (16 km Barat Daya Batusangkar) dengan kekuatan 6.4 SR dan di 0.47°LS , 100.49°BT (11 km Barat Daya Batusangkar) dengan kekuatan 6.3 SR yang telah menelan korban jiwa sebanyak 67 orang dan 826 orang korban luka serta 43.719 kerusakan bangunan di Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan Solok.

Pada Bulan Februari tahun 2022 terjadi gempa dengan magnitudo 6,1 SR di Pasaman Barat akibat aktifitas Sesar Sumatera, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak.

Secara umum, tatanan tektonik di Sumatera dicirikan oleh tiga sistem tektonik. Ketiga sistem tektonik tersebut, yaitu; Zona Subduksi antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System (MFS) dan Sumatera Fault System (SFS) atau sesar Sumatera. Jalur subduksi lempeng tektonik India-Australia dan Eurasia di Indonesia memanjang dari pantai barat Sumatera sampai ke selatan Nusa Tenggara. Pada sistem subduksi Sumatera dicirikan dengan menghasilkan rangkaian busur pulau depan (forearc islands) yang non vulkanik (Pulau Simeulue, Nias, Banyak, Batu, Siberut hingga Pulau Enggano). Lempeng India-Australia menunjam ke bawah lempeng Benua Eurasia dengan kecepatan $\pm 50-60$ mm/tahun. Batas antar 2 (dua) lempeng ini terdapat zona subduksi dangkal atau yang disebut sebagai "Megathrust Subduction Sumatera" inilah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat karena diprediksi masih menyimpan potensi gempabumi dengan magnitudo 8.9 SR di zona ini yang populer dengan istilah Mentawai Megathrust.



a. Mentawai Fault System (MFS)

Selain jalur tumbukan dua lempeng tektonik, di sebelah barat pantai Sumatera Barat terdapat juga Mentawai Fault Sistem. Mentawai Fault Sistem adalah sesar mendatar yang disebabkan adanya proses penunjaman miring di sekitar Pulau Sumatera. Sesar Mentawai berada di laut memanjang disekitar pulau-pulau Mentawai dari Selatan Hingga ke Utara menerus hingga ke sekitar Utara Nias.

b. Sumatera Fault System (SFS).

Sumatera fault system atau Sesar Sumatera terjadi akibat adanya lempeng India-Australia yang menabrak bagian barat pulau Sumatera secara miring, sehingga menghasilkan tekanan dari pergerakan ini. Karena adanya tekanan ini, maka terbentuklah sesar Sumatera atau disebut juga "The Great Sumatera Fault" yang membelah pulau Sumatera membentang mulai dari Lampung sampai Banda Aceh, sesar ini menerus sampai ke Laut Andaman hingga Burma. Patahan ini merupakan daerah rawan gempa bumi dan tanah longsor. Sesar Sumatera merupakan sesar strike slip berarah dekstral yang terdiri dari 20 segmen utama sepanjang tulang punggung Sumatera (*Sieh and Natawidjaja, 2002*).

Jalur patahan Sumatera bisa dikenal dari kenampakan bentang alam di sepanjang jalur, dan ditandai oleh kenampakan bukit-bukit dan danau-danau yang terjadi karena pergeseran pada sesar tersebut. Jalur patahan sepanjang ± 1900 Km ini melintasi punggung pulau Sumatera sepanjang Bukit Barisan. Sejarah mencatat sudah cukup banyak kejadian gempa bumi dengan magnitudo besar yang terjadi di sekitar patahan Sumatera.

c. Segmen Sesar di Sumatera Barat

Sesar Sumatera ini membelah melalui wilayah Sumatera Barat yang terbagi menjadi beberapa segmen sesar. Adapun di Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (empat) segmen patahan aktif yang merupakan bagian dari sistem sesar Sumatera, dan ada 3 (tiga) segmen lagi yang bagian ujung segmennya berada di perbatasan wilayah Sumatera Barat dan ini dapat juga mempengaruhi aktifitas kegempaan di wilayah Sumatera Barat yaitu : Segmen Angkola, Segmen Barumon. Ke-dua segmen tersebut berada di wilayah Sumatera Utara dan Segmen Siulak di Jambi. Segmen Angkola ujung selatannya berada di dekat Lembah Batang Pasaman, begitu juga Segmen



Barumun bagian Selatan. Segmen ini berada di perbatasan Sumatera Barat, Pasaman.

Sedangkan Segmen Siulak overlap dengan Segmen Suliti di wilayah Solok Selatan, sedangkan 4 (empat) segmen yang berada di Sumatera Barat, yaitu :

d. Segmen Sumpur ($0.1^{\circ}\text{N} \sim 0.3^{\circ}\text{N}$)

Segmen Sumpur terletak di Daerah Rao, Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Segmen Sumpur memiliki panjang patahan ± 35 Km, Segmen Sumpur di bagian Utara berujung pada sisi Selatan Depresi Sumpur, di Selatan Panti, kemudian menyusir Lembah Batang Sumpur ke Tenggara, Salabawan, hingga Bonjol, menyusuri Sungai Silasung dan pergeseran segmen Sumpur berkisar 23-24 mm/tahun. Segmen Sumpur melewati Kota Lubuk Sikaping, pada segmen ini tahun 1977 pernah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5.5 SR

e. Segmen Sianok ($0.7^{\circ}\text{S} \sim 0.1^{\circ}\text{N}$)

Segmen Sianok mempunyai panjang patahan ± 90 Km berada di sekitar Ngarai Sianok Kota Bukittinggi sampai Tenggara Danau Singkarak melewati sisi Timur Danau, dan pergeseran patahan berkisar 23 mm/tahun. Kota Bukittinggi termasuk kota yang rawan gempa bumi darat yang bersumber dari patahan Segmen Sianok. Pada Segmen Sianok pernah terjadi 2 kali gempa bumi pada tanggal 6 Maret 2007 dengan Magnitude 6.4 SR dan 6.3 SR dan Gempa terbesar pernah tercatat pada segmen ini yaitu pada 4 Agustus 1926 dengan pusat hancuran antara Bukittinggi dan Danau Singkarak.

f. Segmen Sumani ($1.0^{\circ}\text{S} \sim 0.5^{\circ}\text{S}$)

Segmen Sumani memiliki panjang patahan ± 60 Km, ujung Utara segmen ini berada di sisi Utara Danau Singkarak, menyusir sisi Barat Daya danau tersebut melintasi daerah Kota Solok, Sumani, Selayo dan berakhir di Utara Danau Diatas, sebelah Tenggara Gunung Talang. Gempa merusak tercatat terjadi pada 9 Juni 1943, M 7.4, di bawah Danau Singkarak dan menghasilkan pergeseran horizontal sejauh 1 m 4 (*D. Hilaman Natawijaya dkk. 1995*), dan gempa pada 6 Maret 2007 juga telah menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang segmen ini dari Sumani hingga Selayo.



g. Segmen Suliti (1.75°S ~1.0°S)

Segmen Suliti mempunyai panjang patahan sekitar 90 Km dan pergeserannya berkisar ± 23 mm/tahun. Ujung Utara segmen berada pada Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan lebar zona 4 km pada wilayah tersebut. Patahan Sumatera pada segmen ini menelusuri lembah S. Suliti ke Tenggara hingga anak-anak Sungai Liki di Barat Laut Gunung Kerinci.

Gempa bumi yang terjadi tahun 2007 di wilayah Sumatera Barat berpusat di darat sekitar 19 km barat daya Kabupaten Tanah Datar, dengan kekuatan 5,8 SR pada kedalaman 33 km, dan berdurasi 49,8 detik. Gempa ini terasa sampai di wilayah Riau dengan kekuatan III-IV MMI. Selain itu gempa pada Episentrum sekitar 16 km Barat Daya Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar juga mengguncang (dirasakan) hingga Singapura dengan kekuatan 6,6 SR.

Selanjutnya gempa yang terjadi di Kabupaten Solok mengakibatkan belasan rumah roboh, termasuk satu bangunan SD, Tanjung Binguang Kabupaten Solok. Kerusakan lain adalah belasan rumah warga menjadi roboh dan rusak di Kecamatan Kubung dan Sumani. Korban meninggal akibat gempa ini untuk mencapai 70 orang, dan luka-luka 49 orang. Kawasan barat Sumatera masih menyimpan potensi gempa besar, terutama perairan barat Lampung, perairan Enggano, perairan Siberut, dan perairan Simeulue.

Gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatera yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-VII MMI (Modified Mercally Intensity) mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk mengetahui daerah rawan/potensi gempa bumi dan sumber gempa dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 3.79. Daerah Rawan/Potensi Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gempa
1.	Kota Padang	Bungus Teluk Kabung	Gempa Laut
		Padang Barat	Gempa Laut
		Padang Selatan	Gempa Laut
		Koto Tengah	Gempa Laut
		Padang Utara	Gempa Laut



No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gempa
2.	Kabupaten Solok	Gunung Talang	Gempa Darat
		Lembang Jaya	Gempa Darat
		Bukit Sundi	Gempa Darat
		Kubung	Gempa Darat
		IX Koto Sei. Lasi	Gempa Darat
		X Koto Diateh	Gempa Darat
		X Koto Singkarak	Gempa Darat
		Payung Sekaki	Gempa Darat
		Lembah Gumanti	Gempa Darat
		Pantai Cermin	Gempa Darat
		Junjung Sirih	Gempa Darat
		Danau Kembar	Gempa Darat
		Hiliran Gumanti	Gempa Darat
		Tigo Lurah	Gempa Darat
3.	Kabupaten Solok Selatan	Sungai Pagu	Gempa Darat
		Koto Parik Gadang Diateh	Gempa Darat
		Sangir	Gempa Darat
4.	Kota Solok	Tanjung Harapan	Gempa Darat
		Lubuk Sikarah	Gempa Darat
5.	Kabupaten Agam	IV Koto	Gempa Darat
		IV Angkek Canduang	Gempa Darat
		Palupuah	Gempa Darat
		Matur	Gempa Darat
		Palembayan	Gempa Darat
		Banuhampu	Gempa Darat
		Kamang Magek	Gempa Darat
		Tanjung Mutiara	Gempa Darat
		Tanjung Raya	Gempa Darat
		Tilatang Kamang	Gempa Darat
		Baso	Gempa Darat
6.	Kota Bukittinggi	Mandiingin Koto Salayan	Gempa Darat
		Guguk Panjang	Gempa Darat
		Aur Birugo Tigobaleh	Gempa Darat
7.	Kabupaten Padang Pariaman	2 x 11 Enam Lingkung	Gempa Darat
		Ulakan Tapakis Timur	Gempa Darat
		Lubuk Alung	Gempa Darat
		Batang Anai	Gempa Darat
8.	Kota Pariaman	Pariaman Selatan	Gempa Laut
		Pariaman Tengah	Gempa Laut
		Pariaman Utara	Gempa Laut
		Pariaman Timur	Gempa Laut
9.	Kabupaten Dharmasraya	Sungai Rumbai (Bagian Barat Daya)	Gempa Darat



No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gempa
10.	Kabupaten Limapuluh Kota	Gunung Mas	Gempa Darat
11.	Kabupaten Tanah Datar	Pariangan (bag. Utara)	Gempa Darat
		Rambatan	Gempa Darat
		X Koto	Gempa Darat
		Batipuh	Gempa Darat
		Batipuh Selatan	Gempa Darat
		Salimpaung	Gempa Darat
		Tanjung Emas	Gempa Darat
		Lima Kaum	Gempa Darat
		Sungai Tarab	Gempa Darat
		Tanjung Baru	Gempa Darat
12.	Kabupaten Pasaman Barat	Talamau	Gempa Darat
		Gunung Tleh	Gempa Darat
		Lembah Malintang	Gempa Darat
		Ranah Balingka	Gempa Darat
13.	Kabupaten Pasaman	Rao	Gempa Darat
		Rao Selatan	Gempa Darat
		Rao Utara	Gempa Darat
		Mapat Tunggul Selatan	Gempa Darat
		Bonjol	Gempa Darat
		Lubuk Sikaping, Panti	Gempa Darat
		Duo Koto	Gempa Darat
		Padang Gelugur	Gempa Darat
		Simpang Alahan Mati	Gempa Darat
		Tigo Nagari	Gempa Darat
14.	Kabupaten Pesisir Selatan	Ranah Pesisir	Gempa Darat
		IV Jurai	Gempa Darat
		Lengayang	Gempa Darat
		Pancung Soal	Gempa Darat
15.	Kota Padang Panjang	Bukit Padang	Gempa Darat
		Padang Panjang Barat	Gempa Darat
		Padang Panjang Timur	Gempa Darat
16.	Kabupaten Kep. Mentawai	Siberut Selatan	Gempa Laut
		Siberut Utara	Gempa Laut
		Siberut Barat Daya	Gempa Laut
		Siberut Barat	Gempa Laut
		Siberut Tengah	Gempa Laut
		Sipora Utara	Gempa Laut
		Sipora Selatan	Gempa Laut
		Pagai Selatan	Gempa Laut
		Pagai Utara	Gempa Laut
Sikap	Gempa Laut		

Sumber: Laporan Kebencanaan BPBD, 2018



Bencana gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk memiliki kelas risiko Sedang dan Tinggi. Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung termasuk ke dalam kelas risiko Sedang. Sedangkan kabupaten/kota lainnya termasuk ke dalam kelas risiko Tinggi. Oleh karena itu, kelas risiko bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan Tinggi.

Tabel 3.80. Tingkat Resiko Bencana Gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	SIJUNJUNG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	TANAH DATAR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	PADANG PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	LIMA PULUH KOTA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	PASAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	KEPULAUAN MENTAWAI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	DHARMASRAYA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
12	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	KOTA SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	KOTA SAWAHLUNTO	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4	KOTA PADANG PANJANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	KOTA BUKITTINGGI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6	KOTA PAYAKUMBUH	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	KOTA PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026



2. Tsunami

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 18 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan tsunami (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral). Tumbukan antara dua lempeng besar yakni Lempeng Samudera Hindia - Australia dengan Lempeng Benua Asia menyebabkan terbentuknya patahan sepanjang 1.650 km di pantai barat Sumatera, yang disebut dengan Mentawai Fold Zone. Tumbukan yang terjadi dapat menimbulkan gempa yang berpotensi terjadinya tsunami. Kawasan rawan tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat termasuk Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori zona kerawanan yaitu:

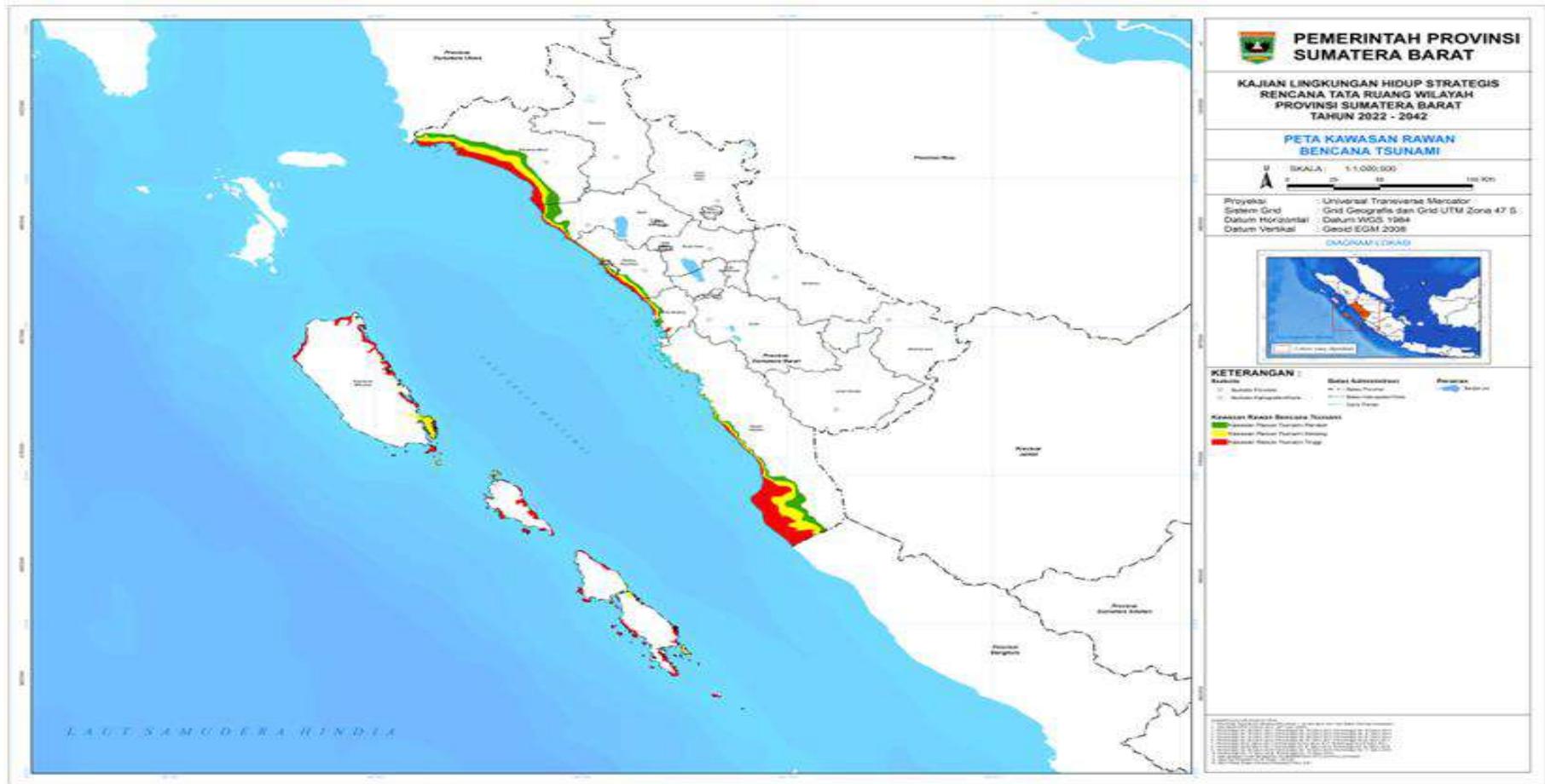
- Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl;
- Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal;
- Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Potensi daerah rawan tsunami tinggi terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.81. Tingkat Kerawanan Tsunami Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Kerawanan Tsunami					
		Rendah (Ha)	%	Sedang (Ha)	%	Tinggi (Ha)	%
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	542.170	91%	26	0%	56.129	9%
2	Kabupaten Agam	213.063	96%	3.940	2%	5.608	3%
3	Kabupaten Padang Pariaman	123.285	92%	4.605	3%	6.329	5%
4	Kabupaten Pasaman Barat	314.231	82%	34.884	9%	35.738	9%
5	Kabupaten Pesisir Selatan	494.969	82%	38.981	6%	69.387	12%
6	Kota Padang	62.996	91%	2.473	4%	3.790	5%
7	Kota Pariaman	3.569	55%	1.118	17%	1.794	28%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.13. Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



Bencana tsunami berpotensi mengancam 7 (tujuh) kabupaten/kota yang daerahnya berada di pesisir Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota Pariaman tergolong pada kelas risiko Tinggi untuk bencana tsunami. Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki kelas risiko Sedang. Jika dilihat dari rekapan keseluruhan kelas bahaya Tinggi, kerentanan Tinggi dan kelas kapasitas Sedang maka kelas risiko bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi.

Tabel 3.82. Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	PADANG PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	KEPULAUAN MENTAWAI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	KOTA PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan).



Tabel 3.83. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	AGAM	99.056	25.213	5.746	130.015	SEDANG
2	DHARMASRAYA	51.662	150.274	71.610	273.546	TINGGI
3	KEPULAUAN MENTAWAI	511.673	47.620	4.364	563.657	RENDAH
4	LIMA PULUH KOTA	311.573	6.183	0	317.756	RENDAH
5	PADANG PARIAMAN	72.573	2.070	0	74.643	RENDAH
6	PASAMAN	269.663	8.669	4.005	282.338	RENDAH
7	PASAMAN BARAT	156.590	162.126	24.249	342.964	SEDANG
8	PESISIR SELATAN	161.268	85.524	48.760	295.552	TINGGI
9	SIJUNJUNG	238.354	51.997	311	290.662	SEDANG
10	SOLOK	233.409	5.493	146	239.048	RENDAH
11	SOLOK SELATAN	182.250	71.806	5.192	259.248	SEDANG
12	TANAH DATAR	86.970	2.702	0	89.672	RENDAH
B	Kota					
1	KOTA BUKITTINGGI	335	0	0	335	RENDAH
2	KOTA PADANG	18.904	72	0	18.976	RENDAH
3	KOTA PADANG PANJANG	631	0	0	631	RENDAH
4	KOTA PARIAMAN	1.091	0	0	1.091	RENDAH
5	KOTA PAYAKUMBUH	2.700	0	0	2.700	RENDAH
6	KOTA SAWAHLUNTO	18.143	1.328	83	19.555	RENDAH
7	KOTA SOLOK	3.352	0	0	3.352	RENDAH
	Provinsi Sumatera Barat	2.420.198	621.077	164.465	3.205.740	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah 3.205.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.420.198 Ha, kelas sedang seluas 621.077 Ha, serta kelas tinggi adalah seluas 164.465 Ha.



Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Gambar 3.14. Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat untuk kabupaten/kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah seluas 511.673 Ha.

Sementara Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas sedang seluas 162.126 Ha. Sedangkan, Kabupaten dengan luas tertinggi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Dharmasraya seluas 71.610 Ha.

Bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. 1 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko Rendah, kelas risiko Sedang terdapat di 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 kota, 1 (satu) kabupaten yang memiliki kelas risiko Tinggi. Dapat disimpulkan berdasarkan rekapitulasi pengkajian kelas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan Tinggi.



Tabel 3.84. Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	SIJUNJUNG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	TANAH DATAR	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	PADANG PARIAMAN	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
6	AGAM	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
7	LIMA PULUH KOTA	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
8	PASAMAN	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
9	KEPULAUAN MENTAWAI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
10	DHARMASRAYA	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
12	PASAMAN BARAT	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
B	Kota				
1	KOTA PADANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
2	KOTA SOLOK	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
3	KOTA SAWAHLUNTO	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA PADANG PANJANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
5	KOTA BUKITTINGGI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
6	KOTA PAYAKUMBUH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
7	KOTA PARIAMAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Sumatera Barat 2022-2026*

4. Banjir

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan /daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu. Banjir bandang (galodo) dan tanah longsor adalah suatu fenomena alam yang jamak. Bencana banjir terjadi bukan hanya karena faktor alamiah, namun juga disebabkan karena campur tangan manusia. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di



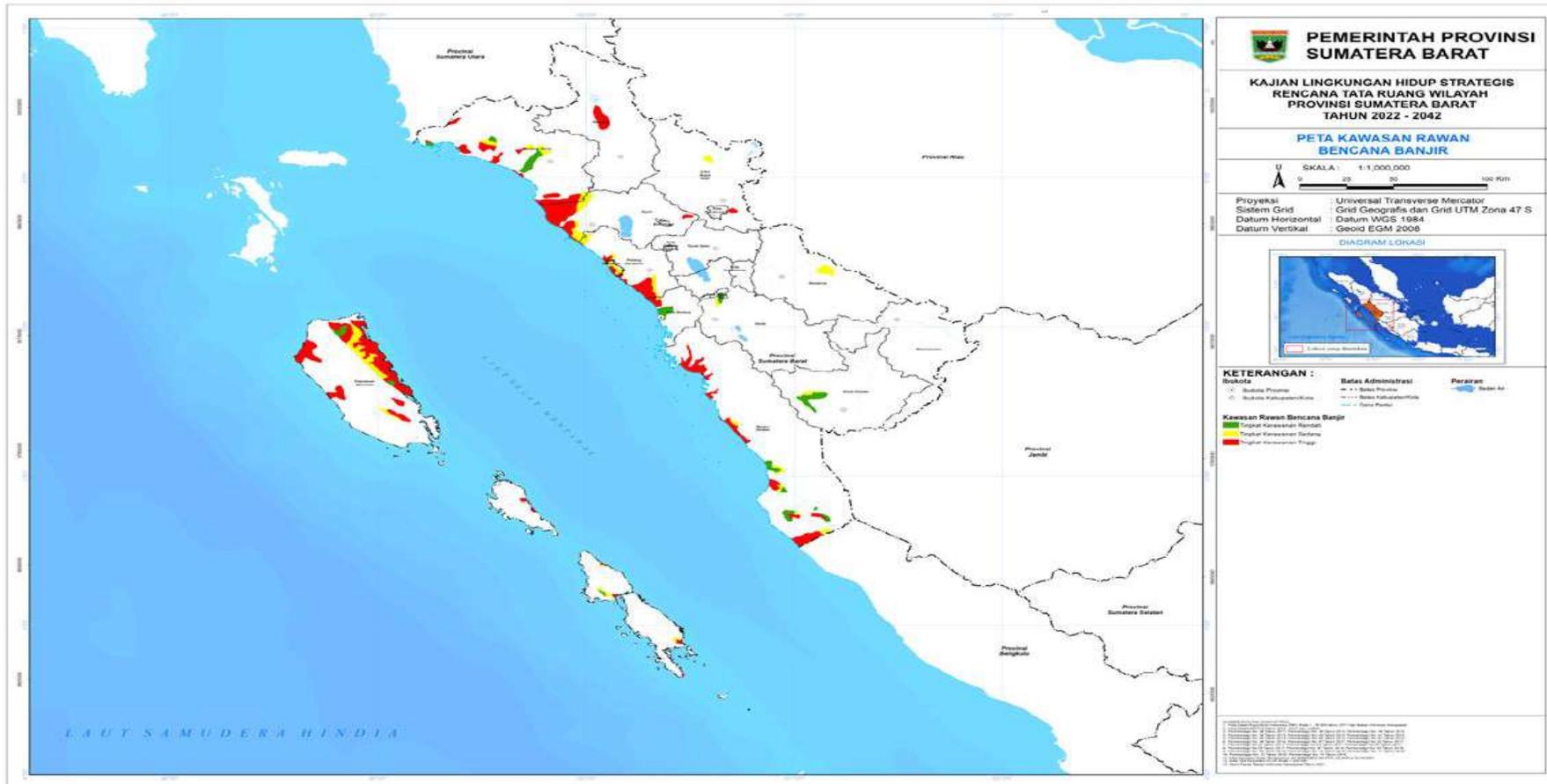
sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Di samping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami banjir. Kawasan rawan banjir di Sumatera Barat terdapat pada kawasan-kawasan yang berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengannya yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang bagian hulunya berupa kawasan gundul. Kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan tinggi di Provinsi Sumatera Barat seperti Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Pariaman.

Tabel 3.85. Tingkat Kerawanan Banjir Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kerawanan Banjir							
		Tidak ada (Ha)	%	Rendah (Ha)	%	Sedang (Ha)	%	Tinggi (Ha)	%
1	Kabupaten Kep. Mentawai	495.893	83%	5.460	1%	23.040	4%	73.933	12%
2	Kabupaten Pesisir Selatan	549.741	91%	9.428	2%	6.866	1%	37.302	6%
3	Kabupaten Solok	357.017	99%	1.028	0,29%	995	0,28%	-	-
4	Kabupaten Sijunjung	310.164	98%	-	-	4.894	2%	-	-
5	Kabupaten Tanah Datar	137.719	100%	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Padang Pariaman	112.184	84%	-	-	7.532	6%	14.503	11%
7	Kabupaten Agam	181.319	81%	-	-	10.793	5%	30.499	14%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	323.554	99%	-	-	2.022	1%	1.422	0,43%
9	Kabupaten Pasaman	380.782	98%	-	-	12	0,00%	9.451	2%
10	Kabupaten Solok Selatan	317.481	97%	8.694	3%	2.040	1%	-	-
11	Kabupaten Dhamasraya	292.092	100%	-	-	-	-	-	-
12	Kabupaten Pasaman Barat	340.845	89%	10.184	3%	8.774	2%	25.051	7%
13	Kota Padang	59.861	86%	5.470	8%	483	1%	3.445	5%
14	Kota Solok	4.787	82%	1.085	18%	-	-	-	-
15	Kota Sawahlunto	23.195	100%	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	2.356	100%	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	2.417	100%	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	7.798	100%	-	-	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	1.257	19%	-	-	2.772	43%	2.453	38%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.15. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir
 Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



Bencana banjir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan kelas bahaya dan kerentanan yang beragam. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa kelas risiko banjir di Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kelas Sedang dan Tinggi. Terdapat 2 (dua) kabupaten dan 6 (enam) kota yang memiliki kelas risiko banjir Sedang. Sedangkan 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota I memiliki kelas risiko Tinggi. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi.

Tabel 3.86. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	SIJUNJUNG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	TANAH DATAR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	PADANG PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	LIMA PULUH KOTA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	PASAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	KEPULAUAN MENTAWAI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	DHARMASRAYA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	SOLOK SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
12	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2	KOTA SOLOK	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	KOTA SAWAHLUNTO	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4	KOTA PADANG PANJANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
5	KOTA BUKITTINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
6	KOTA PAYAKUMBUH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
7	KOTA PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Sumatera Barat 2022-2026*

5. Banjir Bandang

Salah satu pemicu terjadinya banjir bandang adalah tingginya curah hujan atau hujan ekstrem yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan curah hujan tertinggi di Indonesia, memiliki risiko tinggi akan terjadinya bencana banjir bandang ini. Berdasarkan data tahun 2014 hingga tahun 2022, bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi sebanyak 107 kejadian. Frekuensi kejadian banjir bandang tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 26 kejadian, diikuti pada tahun 2018 sebanyak 19 kejadian dan pada tahun 2020 sebanyak 17 kejadian. Sisanya merata terjadi setiap tahunnya selama rentang 2014 – 2022 tersebut dengan kisaran jumlah kejadian sebanyak 5 sampai 9 kejadian per tahunnya.



Kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana banjir bandang selama rentang waktu 2014 – 2022 tersebut (diurut dari yang terbanyak frekuensinya) adalah Kab Sijunjung (25 kejadian), Kab. Solok (16 kejadian), Kab. Limapuluh Kota (14 kejadian), Kab. Agam (13 kejadian), Kab. Tanah Datar (10 kejadian), Kab. Padang Pariaman (9 kejadian), Kab. Pasaman (7 kejadian), Kab. Solok Selatan (6 kejadian), Kab. Pasaman Barat (3 kejadian), Kab. Dharmasraya (2 kejadian), Kab. Pesisir Selatan (1 kejadian), dan Kota Sawahlunto (1 kejadian). Kabupten/kota lainnya tidak pernah tercatat mengalami kejadian banjir bandang selama kurun waktu tersebut.

Potensi bencana banjir bandang dapat terjadi hampir di 18 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat kecuali Kota Padang Panjang. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kota tergolong kelas risiko Sedang. Sedangkan 12 (dua belas) kabupaten dan 3 (tiga) kota lainnya memiliki kelas risiko Tinggi. Meskipun demikian, kelas risiko bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi.

Tabel 3.87. Tingkat Resiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	SIJUNJUNG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4	TANAH DATAR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	PADANG PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	LIMA PULUH KOTA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	PASAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	KEPULAUAN MENTAWAI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	DHARMASRAYA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	SOLOK SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
12	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	KOTA SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	KOTA SAWAHLUNTO	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4	KOTA BUKITTINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
5	KOTA PAYAKUMBUH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
6	KOTA PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Sumatera Barat 2022-2026*



Gambar 3.16. Peta Kerentanan Banjir Bandang di Sumatera Barat
 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026



6. Cuaca Ekstrim

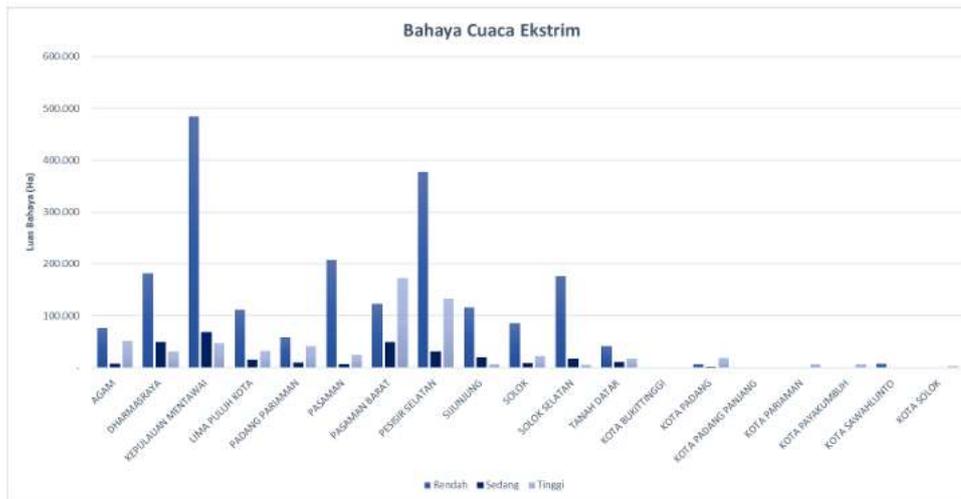
Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Sumatera Barat, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.88. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	AGAM	76.084	7.836	51.673	135.593	TINGGI
2	DHARMASRAYA	181.526	49.018	30.990	261.534	TINGGI
3	KEPULAUAN MENTAWAI	483.868	68.490	47.017	599.375	RENDAH
4	LIMA PULUH KOTA	111.065	14.975	32.780	158.819	TINGGI
5	PADANG PARIAMAN	58.757	10.091	41.428	110.276	TINGGI
6	PASAMAN	208.163	5.975	24.594	238.732	TINGGI
7	PASAMAN BARAT	123.010	48.978	172.810	344.797	TINGGI
8	PESISIR SELATAN	377.787	31.391	133.046	542.224	TINGGI
9	SIJUNJUNG	115.688	19.641	6.441	141.769	RENDAH
10	SOLOK	85.148	8.498	21.579	115.225	TINGGI
11	SOLOK SELATAN	176.272	17.886	5.204	199.361	RENDAH
12	TANAH DATAR	41.165	10.696	17.382	69.243	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BUKITTINGGI	602	48	30	681	RENDAH
2	KOTA PADANG	6.721	1.398	18.245	26.363	TINGGI
3	KOTA PADANG PANJANG	770	201	1.164	2.135	TINGGI
4	KOTA PARIAMAN	38	81	6.493	6.613	TINGGI
5	KOTA PAYAKUMBUH	273	705	6.445	7.424	TINGGI
6	KOTA SAWAHLUNTO	7.736	328	283	8.348	RENDAH
7	KOTA SOLOK	705	655	2.732	4.093	TINGGI
Provinsi Sumatera Barat		2.055.378	296.892	620.335	2.972.605	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah seluas 2.972.605 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.055.378 Ha, pada kelas sedang seluas 296.892 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 620.335 Ha.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Gambar 3.17. Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Sumatera Barat untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dan pada kelas sedang terdapat di Kepulauan Mentawai dengan luas masing-masing sebesar 483.868 Ha dan 68.490 Ha. Adapun wilayah yang memiliki luas potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kabupaten Pasaman Barat yaitu seluas 172.810 Ha.

Bencana cuaca ekstrim (angin kencang) berpotensi terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat risiko Sedang dan Tinggi. Terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 2 (dua) kota yang memiliki tingkat risiko Sedang, pada DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA NASIONAL – PROVINSI SUMATERA BARAT 2022-2026 HAL. 71, Sementara kabupaten/kota lainnya tergolong tingkat risiko Tinggi. Secara keseluruhan, tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.89. Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	SIJUNJUNG	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	TANAH DATAR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5	PADANG PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	LIMA PULUH KOTA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8	PASAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9	KEPULAUAN MENTAWAI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
10	DHARMASRAYA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11	SOLOK SELATAN	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
12	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	KOTA SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3	KOTA SAWAHLUNTO	RENDAH	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA PADANG PANJANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5	KOTA BUKITTINGGI	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
6	KOTA PAYAKUMBUH	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7	KOTA PARIAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis bencana, (<http://www.bnpb.go.id>)).

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat, seperti pada tabel berikut.



Tabel 3.90. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya			Total	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A Kabupaten						
1	AGAM	215	235	114	564	SEDANG
2	KEPULAUAN MENTAWAI	24.121	0	0	24.121	RENDAH
3	PADANG PARIAMAN	204	88	394	686	TINGGI
4	PASAMAN BARAT	1.045	635	600	2.280	SEDANG
5	PESISIR SELATAN	2.584	459	1.653	4.696	TINGGI
B Kota						
1	KOTA PADANG	1.253	39	103	1.395	RENDAH
2	KOTA PARIAMAN	127	43	123	293	TINGGI
Provinsi Sumatera Barat		29.549	1.499	2.988	34.035	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 34.035 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 29.549 Ha, pada kelas sedang seluas 1.499 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 2.988 Ha.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Gambar 3.18. Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Sumatera Barat



Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah seluas 24.121 Ha, kelas sedang tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat seluas 635 Ha dan kelas tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 1.653 Ha.

Bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di 7 kabupaten/kota di pesisir Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota dikategorikan memiliki kelas risiko Rendah terdapat 1 (satu) kabupaten, kelas risiko Sedang di 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota, sedangkan kelas risiko Tinggi di 2 (dua) kabupaten. Oleh sebab itu berdasarkan rekapan pengkajian untuk kelas risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi.

Tabel 3.91. Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	PADANG PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3	AGAM	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	KEPULAUAN MENTAWAI	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
5	PASAMAN BARAT	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2	KOTA PARIAMAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

8. Kekeringan

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

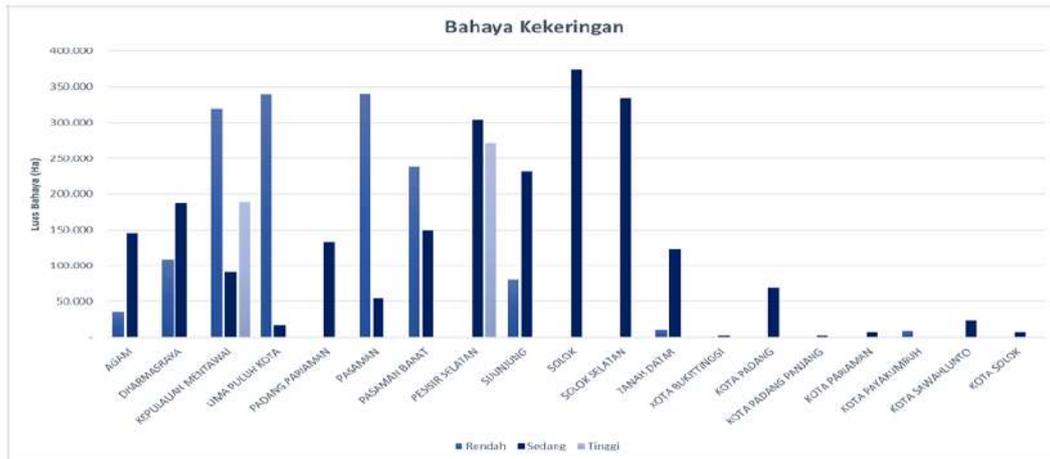
**Tabel 3.92. Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Sumatera Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya			Total	Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	AGAM	34.968	145.462	0	180.430	SEDANG
2	DHARMASRAYA	108.951	187.162	0	296.113	SEDANG
3	KEPULAUAN MENTAWAI	320.247	91.588	189.300	601.135	TINGGI
4	LIMA PULUH KOTA	339.846	17.268	0	357.114	SEDANG
5	PADANG PARIAMAN	0	133.251	0	133.251	SEDANG
6	PASAMAN	340.505	54.258	0	394.763	SEDANG
7	PASAMAN BARAT	239.059	149.718	0	388.777	SEDANG
8	PESISIR SELATAN	0	303.945	271.044	574.989	TINGGI
9	SIJUNJUNG	81.470	231.570	0	313.040	SEDANG
10	SOLOK	0	373.800	0	373.800	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	786	333.834	0	334.620	SEDANG
12	TANAH DATAR	9.484	124.126	0	133.610	SEDANG
B	Kota					
1	KOTA BUKITTINGGI	581	1.943	0	2.524	SEDANG
2	KOTA PADANG	0	69.366	0	69.366	SEDANG
3	KOTA PADANG PANJANG	0	2.300	0	2.300	SEDANG
4	KOTA PARIAMAN	0	6.613	0	6.613	SEDANG
5	KOTA PAYAKUMBUH	8.522	0	0	8.522	RENDAH
6	KOTA SAWAHLUNTO	0	23.193	0	23.193	SEDANG
7	KOTA SOLOK	0	7.129	0	7.129	SEDANG
Provinsi Sumatera Barat		1.484.420	2.256.525	460.344	4.201.289	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Barat ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Sumatera Barat ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah 4.201.289 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.484.420 Ha, kelas sedang seluas 2.256.525 Ha dan kelas tinggi seluas 460.344 Ha.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Gambar 3.19. Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Sumatera Barat

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman adalah kabupaten dengan luas bahaya kekeringan tertinggi kelas rendah dengan luas 340.505 Ha. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi pada kelas sedang adalah Kabupaten Solok seluas 373.800 Ha. Untuk kabupaten/kota dengan luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Pesisir Selatan seluas 271.044 Ha.

Bencana kekeringan secara umum meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari rekapitulasi kelas risiko untuk bencana kekeringan di kelas risiko Rendah terdapat 1 (satu) kota, kelas risiko Sedang terdapat 16 (enam belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan kelas risiko Tinggi terdapat di 2 (dua) kabupaten. Jika dilihat dari kesimpulan kelas risiko tingkat Provinsi Sumatera Barat maka untuk kekeringan tergolong kelas risiko bencana kekeringan Tinggi.



Tabel 3.93. Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Provinsi Sumatera Barat

	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	SOLOK	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	SIJUNJUNG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	TANAH DATAR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	PADANG PARIAMAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	AGAM	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
7	LIMA PULUH KOTA	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
8	PASAMAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
9	KEPULAUAN MENTAWAI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	DHARMASRAYA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
11	SOLOK SELATAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
12	PASAMAN BARAT	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
B	Kota				
1	KOTA PADANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2	KOTA SOLOK	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	KOTA SAWAHLUNTO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA PADANG PANJANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
5	KOTA BUKITTINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
6	KOTA PAYAKUMBUH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
7	KOTA PARIAMAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
	Provinsi Sumatera Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

9. Likuefaksi

Kota Padang secara geografis terletak di wilayah pesisir pantai barat Sumatera (Gambar 1), merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan aktifitas masyarakat banyak terpusat di kota tersebut. Banyak objek vital dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang mendukung kehidupan di Kota Padang tertumpu di wilayah pesisir pantai barat Sumatera tersebut, karena kota Padang terletak di wilayah pesisir pantai barat Sumatera maka memiliki kerentanan bahaya gempa bumi yang tinggi karena di sebelah timur Kota Padang terdapat zona subduksi Sumatera yang bergerak sekitar 40 s/d 70 mm per tahun (Natawidjaja, 2004). Pada 30 September 2009 telah terjadi gempa yang cukup besar di Sumatera Barat dengan dengan kekuatan 7,6 SR pada kedalaman 71 km yang mengakibatkan banyak bangunan di kota Padang dan sekitarnya runtuh karena kekuatan getaran yang cukup tinggi (Setyonegoro, 2013).

Geologi pantai barat Sumatera pada bagian pesisir hingga perbukitan secara umum terbentuk oleh endapan sedimen yang berumur kuartar dengan susunan lapisan pasir kerikilan-lempung, lanau, pasir yang dapat mencapai ketebalan mulai 5 meter hingga mencapai 200 meter (Kastowo et al., 1994) sehingga bisa menimbulkan dampak likuefaksi. Likuefaksi adalah fenomena perubahan perilaku lapisan pasir yang jenuh air menjadi seperti cairan akibat



beban getaran gempa bumi. syarat-syarat terjadinya peristiwa likuefaksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu lapisan tanahnya berupa pasir atau lanau, lapisan tanahnya jenuh air, lapisan tanahnya bersifat terurai atau gembur (tidak padat) (Muntohar, 2010).

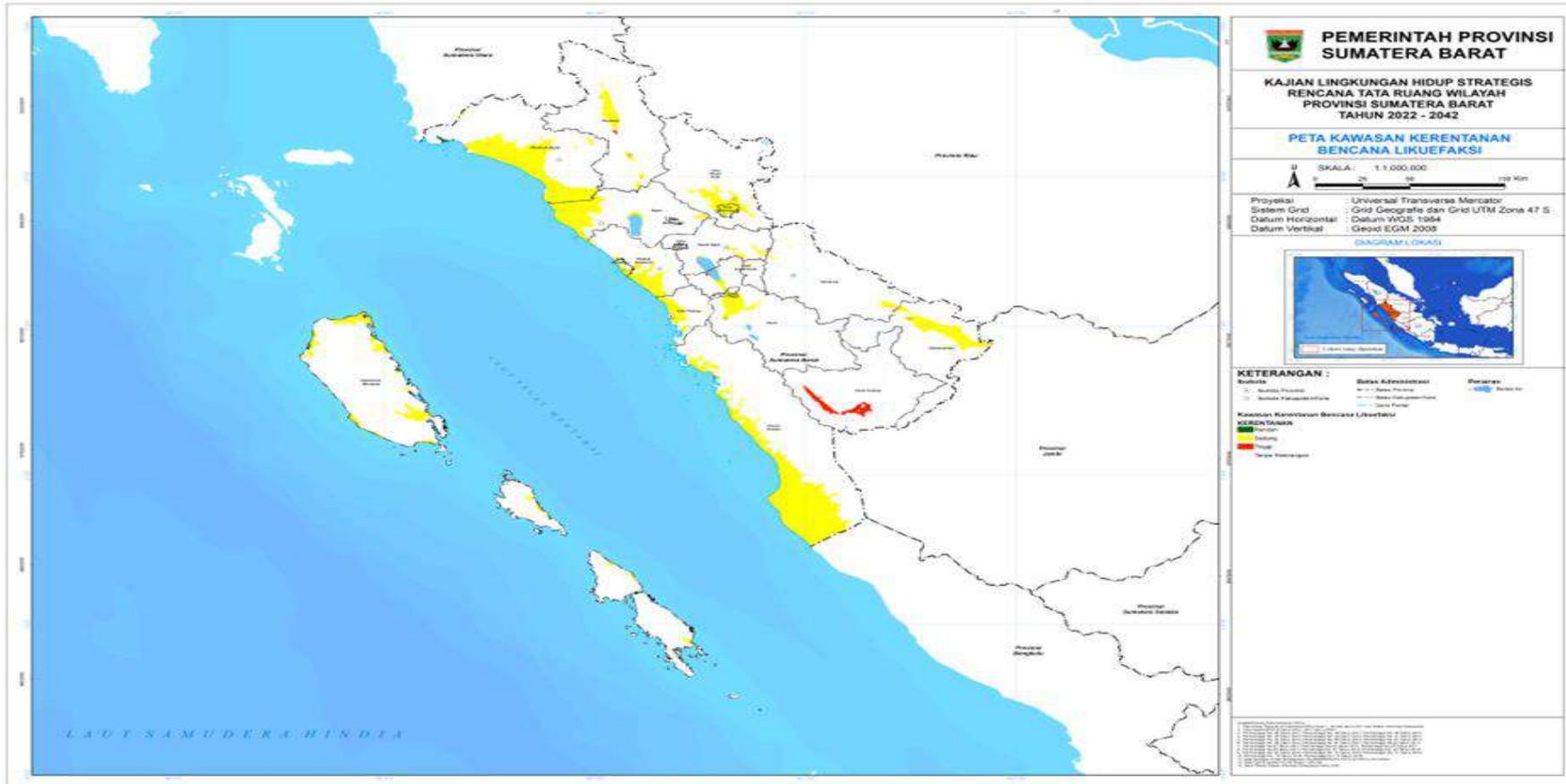
Meskipun terdapat lapisan tanah yang berpotensi likuefaksi dan sejumlah peristiwa gempa bumi besar di Kota Padang. Bencana akibat likuefaksi kemungkinan akan sangat signifikan mengingat aktifitas tektonik di busur Sumatera dan kepadatan penduduk dan bangunan di wilayah pesisir Kota Padang tersebut. Kota Padang yang berada di wilayah pesisir rawan terhadap bahaya likuefaksi (Chang et al., 2004). Berikut daerah kabupaten/kota yang berisiko untuk terjadi likuefaksi.

Tingkat kerawanan bencana likuefaksi di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar berada pada kategori tidak rawan, namun ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan kategori tinggi seperti Kota Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan

Tabel 3.94. Tingkat Kerentanan Bencana Likuefaksi Berdasarkan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kerentanan Likuefaksi							
		Tidak Rentan (Ha)	%	Rendah (Ha)	%	Sedang (Ha)	%	Tinggi (Ha)	%
1	Kab. Kep. Mentawai	555.976	93%	416,5585	0,1%	38.215	6%	3.718	1%
2	Kab. Pesisir Selatan	421.943	70%	-	-	178.029	30%	3.364	1%
3	Kab. Solok	339.551	95%	-	-	19.100	5%	389	0,1%
4	Kab. Sijunjung	310.796	99%	-	-	4.262	1%	-	-
5	Kab. Tanah Datar	133.150	97%	-	-	4.432	3%	138	0,1%
6	Kab. Padang Pariaman	107.159	80%	-	-	26.217	20%	843	1%
7	Kab. Agam	172.440	77%	-	-	49.383	22%	788	0,4%
8	Kab. Lima Puluh Kota	306.810	94%	-	-	20.188	6%	-	-
9	Kab. Pasaman	371.080	95%	-	-	18.670	5%	495	0,1%
10	Kab. Solok Selatan	313.494	96%	-	-	-	-	14.720	4%
11	Kab. Dharmasraya	257.249	88%	-	-	34.843	12%	-	-
12	Kab. Pasaman Barat	272.918	71%	1.405	0,4%	109.238	28%	1.294	0,3%
13	Kota Padang	52.758	76%	-	-	15.924	23%	578	1%
14	Kota Solok	3.955	67%	-	-	1.917	33%	-	-
15	Kota Sawahlunto	22.635	98%	-	-	559	2%	-	-
16	Kota Padang Panjang	2.356	100%	-	-	-	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	2.417	100%	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	1.403	18%	-	-	6.395	82%	-	-
19	Kota Pariaman	3.132	48%	-	-	3.071	47%	279	4%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.20. Peta Kawasan Kerentanan Bencana Likuefaksi
 Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



Bencana Likuefaksi berpotensi memapar 16 kabupaten/kota (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi dan Padang Panjang) di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang tergolong pada kelas risiko Tinggi. Sedangkan kabupaten/kota lainnya tergolong ke dalam kelas risiko Sedang. Dengan kelas kapasitas Sedang dan kelas kerentanan Tinggi maka kelas risiko bencana likuefaksi di Provinsi Sumatera Barat adalah Tinggi.

Tabel 3.95. Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PESISIR SELATAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2	SOLOK	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	SIJUNJUNG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
4	TANAH DATAR	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5	PADANG PARIAMAN	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6	AGAM	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
7	LIMA PULUH KOTA	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
8	PASAMAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
9	DHARMASRAYA	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
10	SOLOK SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
11	PASAMAN BARAT	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
B	Kota				
1	KOTA PADANG	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
2	KOTA SOLOK	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
3	KOTA SAWAHLUNTO	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4	KOTA PAYAKUMBUH	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
5	KOTA PARIAMAN	SEDANG	SEDANG	RENDAH	SEDANG
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

10. Gunung Api

Daerah Sumatera Barat memiliki beberapa gunung api aktif, yaitu Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Tandikek dan Gunung Kerinci. Secara grafis, seluruh gunung api aktif tersebut berada di zona bukit barisan dan berasosiasi atau berhubungan erat dengan patahan besar Sumatera atau sesar Semangko. Bahaya gunung api umumnya meliputi:

- Bahaya Primer
 - Bahaya primer gunung api meliputi ancaman-ancaman yang langsung diakibatkan oleh peristiwa letusan gunung api, yaitu:
 - Awan panas atau pyroclastic flow, merupakan aliran material panas yang terjadi akibat guguran atau longsor material panas di puncak gunung api.
 - Guguran/aliran lava pijar. Jatuhan material letusan (debu, pasir hingga kerikil dan batu termasuk lava/batu pijar).



- Bahaya sekunder, yaitu banjir bandang lahar.
Bahaya sekunder umumnya terjadi setelah adanya letusan gunung api dan tumpukan material baru yang tidak stabil atau sisi-sisi lereng tidak stabil atau rentan di sekitar lereng hingga puncak gunung api. Tumpukan material tersebut dapat berubah menjadi aliran sedimen atau banjir bandang pada sungai-sungai yang hulunya mengarah ke wilayah di sekitar gunung api.

Berdasarkan standarisasi peta bahaya gunung api di Indonesia, peta kerawanan bencana gunung api di bedakan menjadi tiga tipe Kawasan Rawan Bencana (KRB), yaitu:

- Kawasan Rawan Bencana I: Kawasan berpotensi terhadap aliran lahar hujan dan adanya kawasan pada radius tertentu berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar
- Kawasan Rawan Bencana II: Kawasan berpotensi terlanda awan panas, lava dan lahar hujan, dan adanya kawasan pada radius tertentu berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.
- Kawasan Rawan Bencana III: Selalu terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun, dan adanya kawasan pada radius tertentu selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.

Keberadaan kantong-kantong air di wilayah puncak atau lereng gunung api juga dapat menjadi ancaman ketika kantong-kantong air tersebut sudah jenuh dan dinding-dinding penahan sudah tidak dapat lagi menahan beban dan tekanan. Hal ini dapat memicu jebolnya kantong-kantong air tersebut dan menyebabkan banjir bandang di daerah hilir gunung api. Dengan adanya ancaman dari kantong-kantong air ini, maka keberadaannya harus dipetakan dan dimasukkan kedalam peta ancaman gunung api sebagai salah satu sumber ancaman pada Peta KRB gunung api.

Gunung api aktif tipe B yang terdapat di wilayah Sumatera Barat yaitu:

- a. Gunung Talamau, mempunyai ketinggian 2913 meter (dml), terletak di bagian Selatan. Bahaya Gunung Talamau secara umum terbagi dalam dua (2) bagian (Berita berkala Vulkanologi, 1990), yaitu:
 - Daerah Bahaya,
Menyebar pada daerah dalam dengan radius ± 5 km dari titik pusat kawah dengan penambahan luas cenderung ke daerah lembah atau kearah Selatan – barat. Dilihat dari panjang radius maka daerah yang



termasuk kedalam daerah bahaya adalah Batu Baringkok, Pamatong Gunung dan Banjarlawas.

- Daerah Waspada,
Merupakan daerah perluasan bagian luar dari Daerah Bahaya dengan radius ± 10 km dari titik pusat kawah. Dilihat dari radius yang dicapai maka daerah yang termasuk dalam Daerah Waspada adalah Suka Menanti, Simpang, Lubuk Landur dan Ladang Rimbo.
- b. Gunung Malintang, berada di Barat Laut dari Gunung Talantau. Bahaya Gunung Malintang secara umum terbagi dalam dua (2) bagian, yaitu:
- Daerah Bahaya,
Menyebar pada daerah dalam dengan radius ± 5 km dari titik pusat kawah dengan penambahan luas cenderung ke arah Selatan. Dilihat dari panjang radius maka daerah yang termasuk kedalam daerah Bahaya adalah Banjarsuluk, Ulubarang Tengah, Rantau Bangunan dan Biluran Gadang.
 - Daerah Waspada,
Merupakan daerah perluasan bagian luar dari Daerah Bahaya dengan radius ± 10 km dari titik pusat kawah dengan tambahan panjang dari aliran lahar akibat dari hujan dan pendingin lava diperkirakan mencapai radius ± 30 km dari titik pusat kawah kearah Selatan. Dilihat dari radius yang dicapai maka daerah yang termasuk dalam Daerah Waspada adalah daerah Pagambiran, Batu Sundung, Rabajulu, Banjar Lawas, Paraman Cubadak dan Gunung Malintang.
- c. Gunung Kerinci, $101^{\circ}15'52''$ BT $1^{\circ}41'50''$ LS mempunyai ketinggian 3800 meter (dml), terletak 10 km ke arah Barat dari Gunung Tujuh. Bahaya Gunung Kerinci secara umum terbagi dalam dua bagian (Berita berkala Vulkanologi, 1990), yaitu:
- Daerah Bahaya,
Menyebar pada daerah dalam dengan radius ± 5 km dari titik pusat kawah.
 - Daerah Waspada,
Merupakan daerah perluasan bagian luar dari Daerah Bahaya dengan radius ± 10 km dari titik pusat kawah dengan tambahan panjang dari aliran lahar akibat dari hujan dan pendingin lava diperkirakan mencapai radius ± 30 km dari titik pusat kawah kearah Selatan. Dilihat dari radius yang dicapai maka daerah yang termasuk dalam Daerah Waspada



adalah daerah Pagambiran, Batu Sundung, Rabajulu, Banjar Lawas, Paraman Cubadak dan Gunung Malintang.

- d. Gunung Marapi - mempunyai ketinggian 2.891 meter (dml), terletak di bagian Timur, secara geografis terletak pada posisi $100^{\circ} 28' 17''$ BT dan $0^{\circ} 22' 47,72''$ LS. Bahaya Gunung Marapi secara umum terbagi dalam dua bagian (Berita berkala Vulkanologi, 1990), yaitu:
- Daerah Bahaya,
Menyebar pada daerah dalam dengan radius ± 5 km dari titik pusat kawah dengan penambahan luas cenderung ke daerah lembah atau kearah Selatan – barat. Dilihat dari panjang radius maka daerah yang termasuk kedalam daerah Bahaya adalah Pandak, GK. Kapatuhan, Gandung dan BT. Pauh Kambah.
 - Daerah Waspada,
Merupakan daerah perluasan bagian luar dari Daerah Bahaya dengan radius ± 10 km dari titik pusat kawah dengan tambahan panjang dari aliran lahar akibat dari hujan dan pendingin lava diperkirakan mencapai radius ± 20 km dari titik pusat kawah ke arah Timur, Selatan dan Utara. Dilihat dari radius yang dicapai maka daerah yang termasuk dalam Daerah Waspada adalah Bungakotalu, Kotagadis, Bukittinggi, Padang Panjang, Taman dan Batusangkar.
- e. Gunung Tandikat berada di Barat Daya dari Gunung Marapi. Bahaya G. Tandikat secara umum terbagi dalam dua (2) bagian, yaitu :
- Daerah Bahaya,
Menyebar pada daerah dalam dengan radius ± 5 km dari titik pusat kawah dengan penambahan luas cenderung ke arah Selatan. Dilihat dari panjang radius maka daerah yang termasuk kedalam daerah Bahaya adalah Bt. Andalas, Lambek, Bt. Manyampoleng dan Paraman Talang.
 - Daerah Waspada,
Merupakan daerah perluasan bagian luar dari Daerah Bahaya dengan radius ± 10 km dari titik pusat kawah dengan tambahan panjang dari aliran lahar akibat dari hujan dan pendingin lava diperkirakan mencapai radius ± 30 km dari titik pusat kawah ke arah Selatan. Dilihat dari radius yang dicapai maka daerah yang termasuk dalam Daerah Waspada adalah daerah Kampung Tengah, Malalak, Paladangan Randah, Paraman Talang, Tobasi Baruk, Kapala Halang dan Kayu tanam.

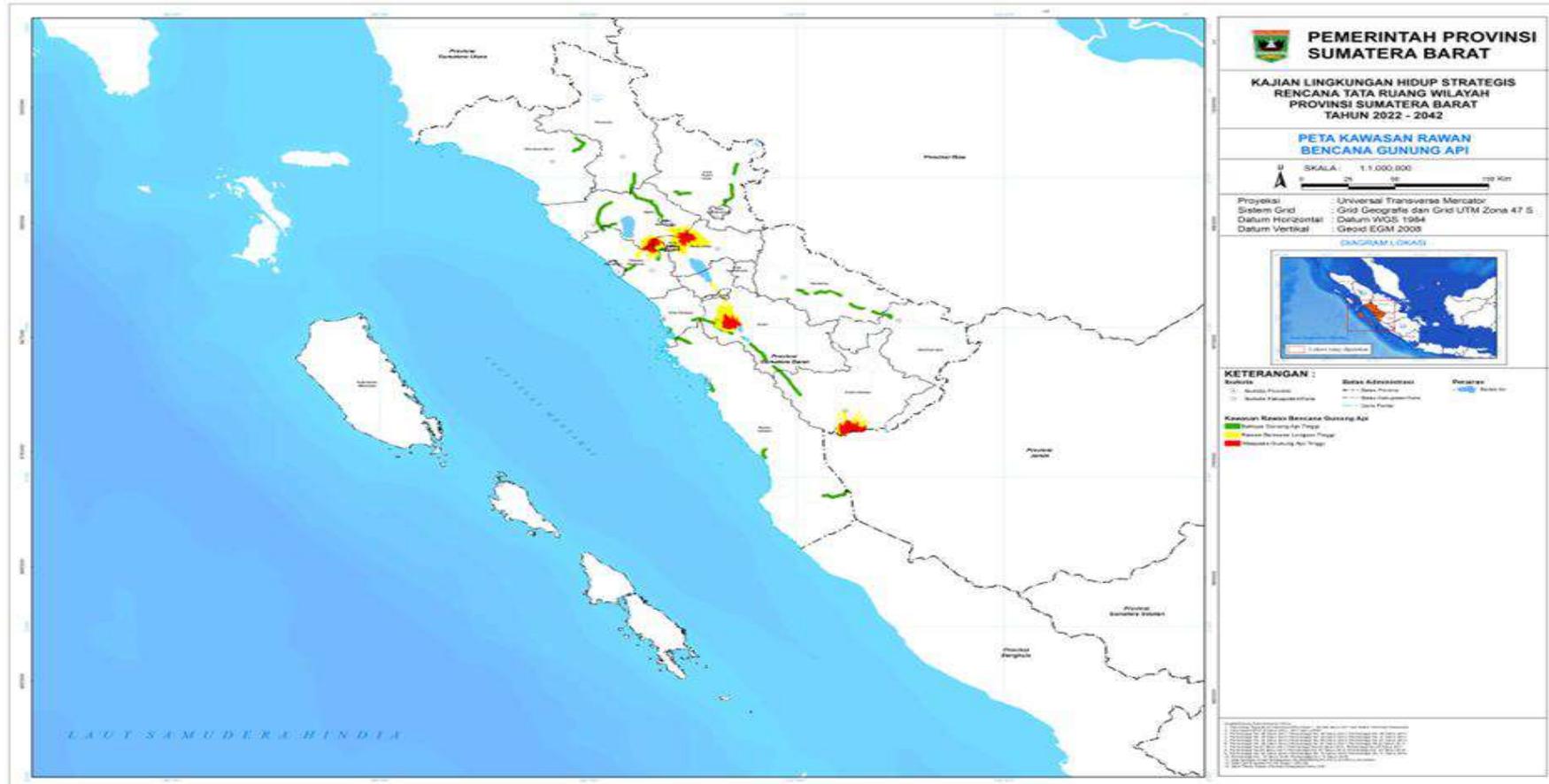


Kawasan kerawanan bencana gunung api di Provinsi Sumatera Barat sebagian besar berada pada kategori bahaya. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Bukittinggi tidak berada pada Kawasan rawan bencana gunung api.

Tabel 3.96. Tingkat Kerawanan Bencana Gunung Api

No	Kabupaten/Kota	Kawasan Kerawanan Bencana Gunung Api					
		Bahaya	%	Rawan	%	Waspada	%
1	Kab. Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	8.978	100%	-	-	-	-
3	Kab. Solok	7.500	25%	14.915	50%	7.439	25%
4	Kab. Sijunjung	8.552	100%	-	-	-	-
5	Kab. Tanah Datar	579	2%	16.887	69%	6.927	28%
6	Kab. Padang Pariaman	3.354	35%	3.860	40%	2.486	26%
7	Kab. Agam	12.275	51%	8.415	35%	3.416	14%
8	Kab. Lima Puluh Kota	8.027	100%	-	-	-	-
9	Kab. Pasaman	2.882	100%	-	-	-	-
10	Kab. Solok Selatan	4.465	20%	7.969	37%	9.375	43%
11	Kab. Dhamasraya	1.416	100%	-	-	-	-
12	Kab. Pasaman Barat	3.452	100%	-	-	-	-
13	Kota Padang	2.369	100%	-	-	-	-
14	Kota Solok	-	-	324	100%	-	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-
16	Kota Padang Panjang	214	23%	731	77%	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18	Kota Payakumbuh	6	100%	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	100	100%	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.21. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



Bencana Letusan Gunung api Kerinci hanya berpotensi terjadi di Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat dengan kelas bahaya Tinggi, kelas kerentanan Tinggi, dan kelas kapasitas Rendah. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki bahaya Letusan Gunung api Kerinci dengan kelas resiko Tinggi.

Tabel 3.97. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung api Kerinci Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	SOLOK SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Bencana Letusan Gunung api Marapi melingkupi 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun daerah yang terdampak Letusan Gunung api Marapi adalah Kabupaten Agam, Tanah Datar yang berada pada kelas resiko Tinggi dan Kota Padang Panjang berada pada kelas resiko Rendah. Berdasarkan hasil pengkajian maka secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Barat memiliki bahaya Letusan Gunung api Marapi dengan kelas resiko Tinggi.

Tabel 3.98. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung api Marapi Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	TANAH DATAR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	AGAM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA PADANG PANJANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Bencana Letusan Gunung api Talamau berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat dengan kelas bahaya Tinggi, kelas kerentanan Tinggi, dan kelas kapasitas Rendah. Jika dilakukan pengkajian di Provinsi Sumatera Barat memiliki bahaya Letusan Gunung api Talamau dengan kelas resiko Tinggi.



Tabel 3.99. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung api Talamau Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	PASAMAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2	PASAMAN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

Bencana Letusan Gunung api Talang hanya berpotensi terjadi di Kota Solok dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dengan kelas bahaya Tinggi, kelas kerentanan Tinggi, dan kelas kapasitas Rendah. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki bahaya Letusan Gunungapi Talang dengan kelas resiko Tinggi.

Tabel 3.100. Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung api Talang Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/kota		Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1	SOLOK	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
1	KOTA SOLOK	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
Provinsi Sumatera Barat		TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2022-2026

11. Gerakan Tanah

Gerakan tanah merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam, akan tetapi dengan masuknya unsur manusia dengan segala aktivitasnya, maka nilainya dapat berubah menjadi suatu bencana alam. Pengaruh geologi sangat besar dalam proses terjadinya suatu gerakan tanah ditunjang faktor lain dari aktivitas manusia, hewan, air, tumbuhan, gempa bumi dan sebagainya. Pengertian gerakan tanah (mass movement) dengan longsor (Landslide) mempunyai kesamaan. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula, gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsor. Dari definisi gerakan tanah dapat disimpulkan bahwa longsor adalah bagian dari gerakan tanah.



Secara umum faktor penyebab terjadinya gerakan tanah dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu :

- a. Faktor geologi meliputi; sudut/kemiringan lereng, kerapatan sungai, litologi, struktur geologi
- b. Faktor non geologi, meliputi; tataguna lahan/budaya manusia, curah hujan

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia.

Daerah berpotensi tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat umumnya dijumpai di daerah perbukitan barisan atau daerah berbukit dengan kemiringan lereng yang terjal dan umum terjadi pada daerah yang secara geologi tersusun oleh batuan-batuan vulkanik yang bersifat lepas atau yang telah mengalami pelapukan dengan banyak adanya retakan/ rekahan. Kondisi tersebut apabila terletak di atas lapisan yang kedap air (lapisan gelincir) pada saat hujan turun dengan curah hujan yang tinggi dapat dipastikan akan terjadi longsor.

Berdasarkan data tingkat kerawanan bencana gerakan tanah, Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori tingkat kerawanan sedang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.101. Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah di Provinsi Sumatera Barat

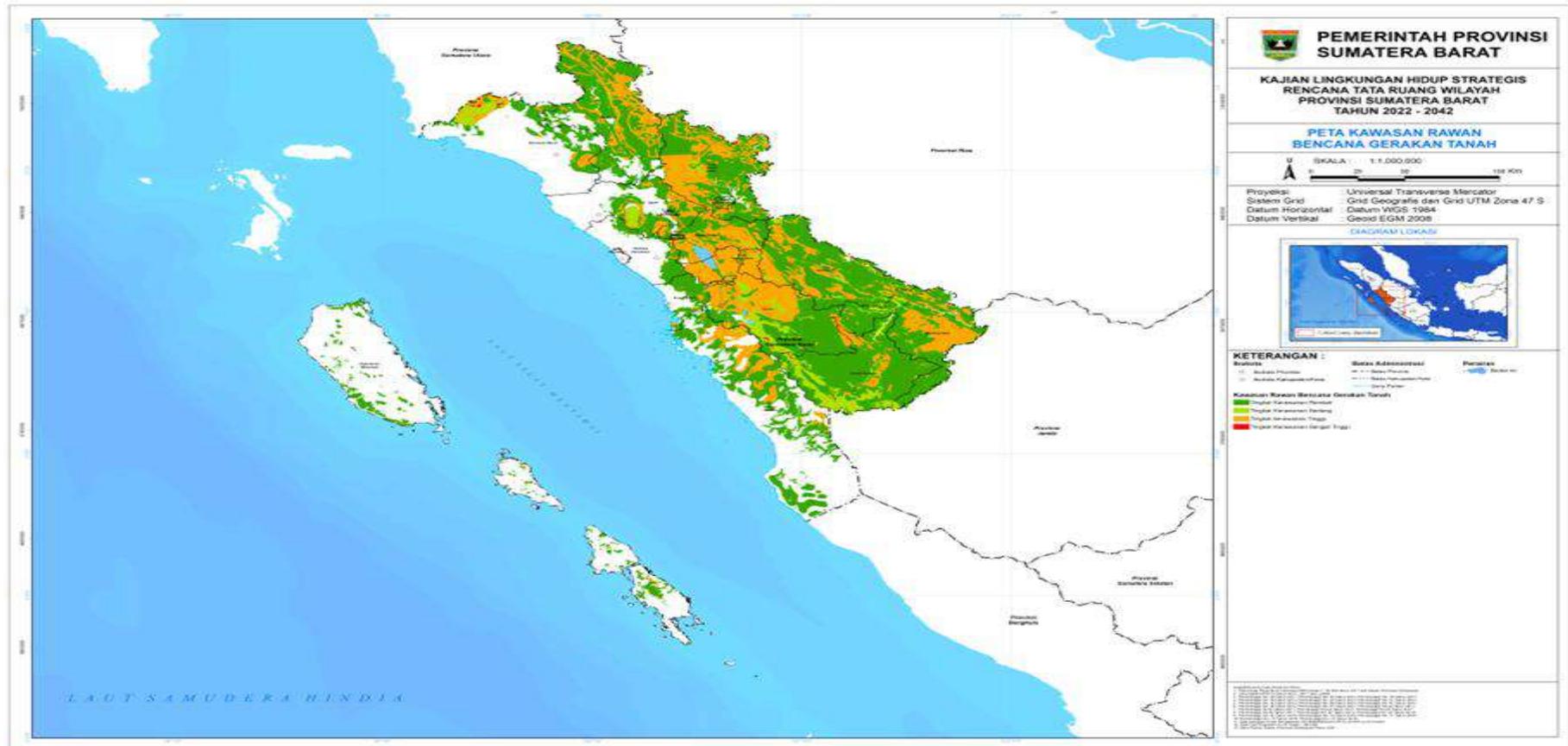
No	Kab/Kota	Tingkat Kerawanan Bencana Gerakan Tanah									
		Tidak ada	%	Sangat Rendah	%	Rendah	%	Sedang	%	Tinggi	%
1	Kab. Kep. Mentawai	19.3170	4,61	50.189	1,20	-	-	354.539	8,47	-	-
2	Kab. Pesisir Selatan	11	0,00	169.214	4,04	113.260	2,71	309.133	7,38	7.035	0,17
3	Kab. Solok	6.459	0,15	10.177	0,24	108.840	2,60	222.323	5,31	11.241	0,27
4	Kab. Sijunjung	5	0,00	46.015	1,10	202.797	4,84	61.007	1,46	865	0,02
5	Kab. Tanah Datar	6.858	0,16	12.371	0,30	92.998	2,22	24.420	0,58	1.071	0,03
6	Kab. Padang Pariaman	-	-	36.813	0,88	62.551	1,49	27.608	0,66	5.755	0,14
7	Kab. Agam	9.759	0,23	41.877	1,00	108.461	2,59	44.051	1,05	15.711	0,38
8	Kab. Lima Puluh Kota	306	0,01	50.183	1,20	112.350	2,68	128.382	3,07	30.930	0,74
9	Kab. Pasaman	2	0,00	-	-	40.482	0,97	228.670	5,46	117.489	2,81
10	Kab. Solok Selatan	12	0,00	56.236	1,34	135.257	3,23	133.602	3,19	2.677	0,06
11	Kab. Dhamasraya	13	0,00	145.097	3,47	125.506	3,00	15.767	0,38	-	-

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



12	Kab. Pasaman Barat	149	0,00	131.305	3,14	157.394	3,76	79.480	1,90	15.310	0,37
13	Kota Padang	8	0,00	16.673	0,40	16.521	0,39	27.086	0,65	8.953	0,21
14	Kota Solok	3	0,00	2.804	0,07	2.223	0,05	842	0,02	-	-
15	Kota Sawahlunto	16	0,00	-	-	10.976	0,26	9.299	0,22	2.904	0,07
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	2.298	0,05	58	0,00	-	-
17	Kota Bukittinggi	-	-	1.655	0,04	171	0,00	442	0,01	149	0,00
18	Kota Payakumbuh	-	-	7.345	0,18	453	0,01	-	-	-	-
19	Kota Pariaman	-	-	5.719	0,14	730	0,02	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3.22. Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Sumber: Materi Teknis RTRW 2023-2043 Provinsi Sumatera Barat



3.2.8. Indeks Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Merujuk kepada Dokumen Materi Teknis Penentuan dan Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Provinsi Sumatera Barat yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023, keberlanjutan Lingkungan Hidup di lihat dari indeks Jasa lingkungan, indeks keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan serta kuadran keberlanjutan. Adapapun sintesis keberlanjutan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.8.1. Indeks Jasa Lingkungan Provinsi Sumatera Barat

Jasa Lingkungan Hidup dikompositkan menjadi indeks yang terdiri dari Jasa Pengatur Air, Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, dan Jasa Pendukung Kehati. Nilai komposit ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi suplai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Selain itu, indeks jasa lingkungan juga mampu memberikan kondisi pada suatu lokasi yang dapat ditingkatkan maupun tetap dilindungi fungsinya. Berikut adalah gambaran singkat mengenai IJLH secara nasional berbasis unit analisis Provinsi Sumatera Barat.

1. IJLH Pengatur Air: Rata-rata IJE Tata Air di Provinsi Sumatera Barat adalah 2,137. Hal ini mencerminkan secara agregat pengatur air pada provinsi ini berkualitas rendah yang mempengaruhi kemampuannya dalam mengatur siklus hidrologi secara berkala.
2. IJLH Penyedia Air: IJLH Penyedia Air di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 2,593. Hal ini mencerminkan secara agregat penyedia air di Provinsi Sumatera Barat memiliki kualitas rendah kemampuannya dalam menyediakan air termasuk kapasitas penyimpanan.
3. IJLH Pendukung Kehati: Keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Barat, mencapai nilai rata-rata 2,373. Hal ini mencerminkan secara agregat lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat berkualitas rendah dalam menyediakan habitat untuk pembiakan, makan dan istirahat bagi kehati serta spesies transien.
4. IJLH Penyedia Pangan: Rata-rata IJLH Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah 2,354. Hal ini mencerminkan secara agregat lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat berkualitas rendah kapasitasnya dalam ketersediaan bahan produksi primer untuk pangan.



5. IJLH Gabungan: Rata-rata IJLH Gabungan Provinsi Sumatera Barat adalah 2,359. IJLH Gabungan menggambarkan proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Hal ini mencerminkan bahwa secara agregat di Provinsi Sumatera Barat berkualitas rendah fungsi lingkungan hidupnya. Sehingga ada beberapa wilayahnya yang perlu dipulihkan maupun ditingkatkan kinerjanya guna mencapai kondisi lebih optimum untuk mendukung kebutuhan fisiologis penduduknya.

Distribusi tingkat IJLH di Provinsi Sumatera Barat bisa sangat bervariasi. Beberapa pulau/kepulauan mungkin memiliki tingkat "Sedang" yang dominan dalam semua tiga komponen IJLH.

Tabel 3.102. Skor dan Kelas Indeks Jasa Lingkungan Eksisting di Provinsi Sumatera Barat

Pulau/Kepulauan	IJLH					Kelas IJLH Gabungan
	Pengatur Air	Penyedia Air	Kehati	Pangan	Gabungan	
Sumatera Barat	2.137	2.593	2.373	2.354	2.359	Rendah
Sumatera	2,223	2,704	2,421	2,704	2,505	Rendah
Nasional	3,371	3,060	3,210	3,011	3,160	Sedang

Sumber: Dokumen D3TLH Prov. Sumbar, KLHK 2023

3.2.8.2. Indeks Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat

Kondisi keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat akan berbeda dengan provinsi-provinsi yang lainnya, karena memiliki keunikan yang beragam baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penyusunan D3TLH, Provinsi Sumatera Barat memiliki kondisi kesejahteraan sosial di bawah rata-rata nasional. Dimana nilai yang didapatkan berdasarkan komposit dari skor kesejahteraan, mutu hidup, dan keselamatan, Provinsi Sumatera Barat memiliki indeks KMK sebesar 0,50 memiliki nilai predikat sedang dan berada di bawah dari nilai nasional dengan nilai 0,52.



**Tabel 3.103. Indeks Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan (KMK)
Provinsi Sumatera Barat**

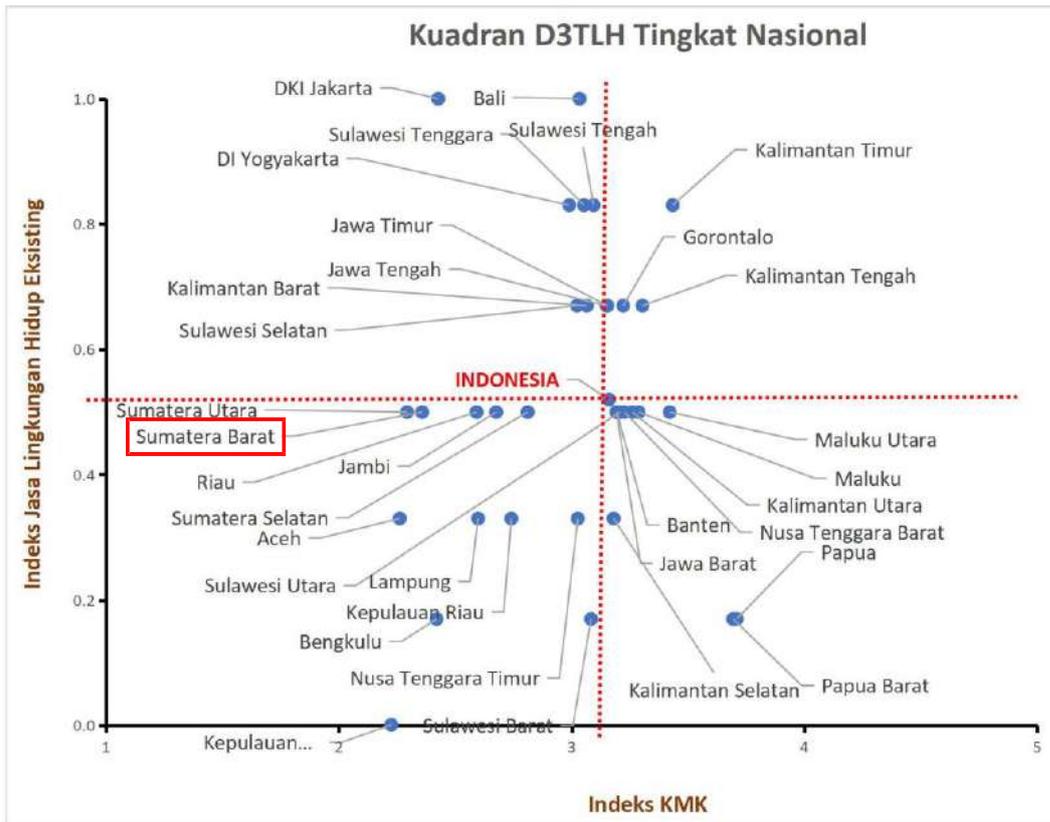
Provinsi	Indeks Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan (KMK)					Predikat
	Skor Keselamatan	Skor Mutu Hidup	Skor Kesejahteraan	Rata Hitung Indeks KMK	Normalisasi Indeks KMK	
Sumatera Barat	3	4	3	3,33	0,50	Sedang
Pulau Sumatera	2,80	3,40	3,00	3,07	0,37	Rendah
Nasional	3,41	3,59	3,12	3,37	0,52	Sedang

Sumber: Dokumen D3TLH Prov. Sumbar, KLHK 2023

Provinsi Sumatera Barat memiliki predikat sedang karena dipengaruhi oleh rendahnya skor keselamatan dipengaruhi oleh tingginya IRBI Provinsi Sumatera Barat yang berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, kondisi mutu hidup di Provinsi baik dari IPM di bawah rata-rata nasional, namun demikian IPM Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil dari karakter ruang budaya berada di bawah rata-rata nasional dengan nilai sebesar 0,99. Pada kondisi kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat memiliki predikat sedang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya laju IHI dan TPT di Provinsi Sumatera Barat, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3.2.8.3. Kuadran Keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat

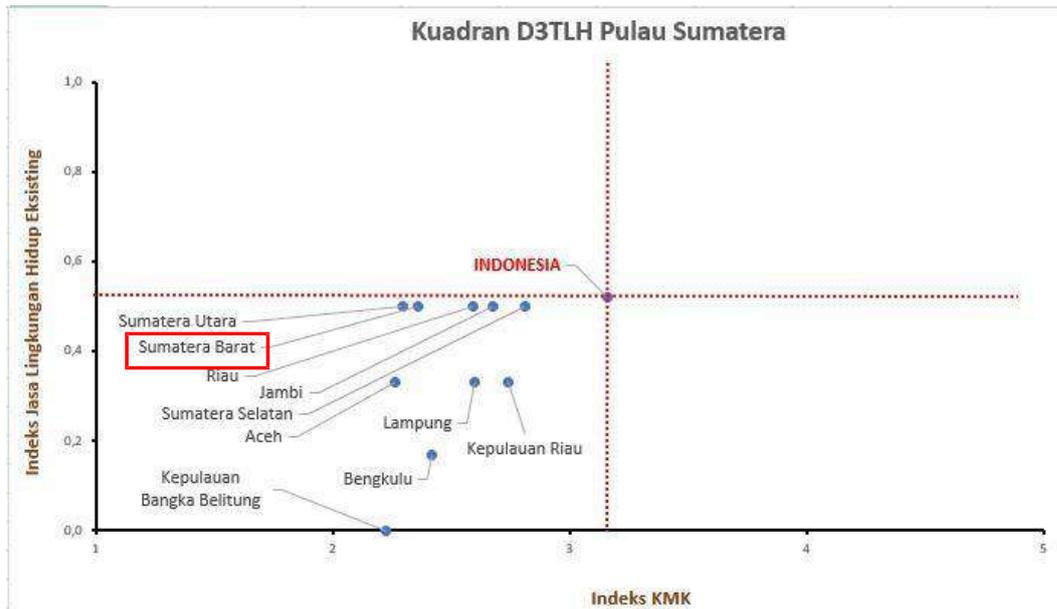
Kuadran keberlanjutan adalah konsep yang menggambarkan posisi suatu wilayah dalam mendukung aspek lingkungan hidup dan masyarakatnya menuju kondisi keberlanjutan. Sumbu X diwakili oleh indeks jasa lingkungan hidup, sumbu Y diwakili oleh Indeks KMK. Berikut merupakan gambar kuadran keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat apabila dilihat berdasarkan ruang lingkup nasional dan ruang lingkup Pulau Sumatera.



Sumber: Dokumen D3TLH Prov. Sumbar, KLHK 2023

Gambar 3.23. Simulasi Kuadran Keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat terhadap Tingkat Nasional

Provinsi Sumatera Barat berada pada Kuadran IV yang berarti Provinsi Sumatera Barat berada pada predikat "Tantangan Ekologis". Predikat tersebut menandakan bahwa Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) eksisting berada di bawah rata-rata nasional, sehingga memerlukan pemulihan dan juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan jasa lingkungan hidup karena fungsinya sudah mulai menurun. Selain itu, Indeks Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan (KMK) eksisting juga berada di bawah rata-rata nasional, maka perlu mengoptimalkan akses terhadap hunian layak, nilai IPM, karakter ruang budaya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan mengurangi risiko bencana serta tingkat pengangguran terbuka agar semakin menuju keselamatan, bermutu hidup, dan sejahtera. Apabila dilihat dari lingkup nasional, hampir 50% provinsi di Indonesia berada di kuadran yang sama dengan Provinsi Sumatera Barat.



Sumber: Dokumen D3TLH Prov. Sumbar, KLHK 2023

Gambar 3.24. Simulasi Kuadran Keberlanjutan Provinsi Sumatera Barat terhadap Tingkat Pulau/ Kepulauan

Berdasarkan gambar di atas, posisi Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Provinsi yang berada di Kuadran IV. Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki predikat “Tantangan Ekologis”, yang menandakan bahwa Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) eksisting berada di bawah rata-rata nasional, sehingga perlu adanya pemulihan dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan jasa lingkungan hidup karena fungsinya sudah mulai menurun. Selain itu, Indeks Keselamatan, Mutu Hidup, dan Kesejahteraan (KMK) eksisting juga berada di bawah rata-rata nasional, maka perlu mengoptimalkan akses terhadap hunian layak, nilai IPM, karakter ruang budaya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan mengurangi risiko bencana serta tingkat pengangguran terbuka agar semakin menuju keselamatan, bermutu hidup, dan sejahtera.



3.3. Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB

3.3.1. Kondisi Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah selanjutnya ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja pelaksanaan APBD berhubungan dengan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2018-2022. Dalam periode tersebut terjadi 3 (tiga) perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan APBD. Perubahan pertama sehubungan dengan tambahan kewenangan daerah provinsi sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Tambahan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari



7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017. Perubahan kedua, Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 berdampak besar terhadap pelaksanaan APBD, tidak hanya penyesuaian jumlah Dana Alokasi Umum tetapi juga kebijakan refocussing Belanja Daerah. Perubahan ketiga, pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Penambahan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat sebagai yang dijelaskan di atas mengakibatkan peningkatan pendapatan dana alokasi umum yang signifikan. Hal ini terjadi karena jumlah ASN merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah. Akibat penambahan jumlah pegawai tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang juga meningkat signifikan. Demikian juga dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur Belanja Daerah; terjadi lonjakan yang signifikan terhadap Belanja Tidak Terduga. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai PP 12 tahun 2019 selanjutnya akan dikutip dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, sebagai dijabarkan di bawah ini.

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka Pendanaan (RPJMD Tahun 2021-2026) diasumsikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional pasca Covid-19 (pemberlakuan aktivitas PPKM) yang pada Tahun 2023 kondisi Covid-19 sudah semakin melandai sehingga perputaran roda perekonomian pada Tahun 2023 juga diharapkan tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang anjlok pada -1,60 % pada Tahun 2020 sudah kembali berada pada pertumbuhan yang positif sejak Tahun 2021 yakni tumbuh sebesar 3,29 %. Kondisi ini pertumbuhan ekonomi yang positif ini semakin membaik pada Tahun 2022 yakni tumbuh sebesar 3,64 % pada Triwulan I, 5,08 % pada Triwulan II dan 4,54 % pada Triwulan III Tahun 2022. Dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat diharapkan



target rata-rata pertumbuhan PAD Tahun 2021-2026 sebesar 7,2 % dapat terwujud. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 2.875.219.000.000,-

2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer tersebut berupa Dana Bagi Hasil , DAU, Dana Alokasi Khusus dan dana-dana transfer lainnya. Sesuai dengan RPJMD maka pendapatan transfer diproyeksikan tumbuh 1,63 % sehingga pada Tahun 2024 pendapatan dana transfer di proyeksikan sebesar Rp.4.360.283.000.000,-. Proyeksi penerimaan dana transfer tidak dapat dipastikan terealisasi sesuai RPJMD tetapi realisasinya mengacu kepada penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang juga merupakan Pendapatan dari Dana Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat/sejenis. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, organisasi dan swasta sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Sesuai RPJMD pertumbuhan penerimaan pada komponen ini pada Tahun 2024 diharapkan tumbuh 1,36%.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dituangkan pada Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai berikut:



Tabel 3.104. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp juta)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENDAPATAN DAERAH	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.149,76	6.706.054,85	6.122.357,61	0,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.275.090,07	2.328.432,87	2.255.072,99	2.551.900,55	2.848.247	1,06
Pendapatan Pajak Daerah	1.797.677,16	1.872.933,99	1.809.809,96	2.060.852,02	2.407.807	1,08
Pendapatan Retribusi Daerah	19.506,41	19.475,96	7.926,60	9.102,05	11.889	0,88
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.374,33	94.938,38	94.747,26	81.266,83	100.651	1,05
Lain-lain PAD Yang Sah	376.532,17	341.084,54	342.589,17	400.679,64	461.211	1,05
PENDAPATAN TRANSFER	4.002.064,21	4.045.668,56	4.046.974,19	4.128.407,47	3.188.121	0,94
Dana Perimbangan	3.930.814,21	4.027.349,12	4.002.552,88	4.077.691,92	3.160.399	0,95
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	131.766,54	106.119,22	145.620,97	182.002,55	176.649	1,08
Dana Alokasi Umum	2.014.646,64	2.076.398,19	1.891.323,98	1.952.740,33	1.877.995	0,98
Dana Alokasi Khusus	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.607,94	1.844.831,70	1.105.756	0,89
Transfer Dari Pusat Lainnya	71.250,00	18.319,45	44.421,31	50.715,54	-	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.250,00	18.319,45	44.421,31	50.715,54	-	
Transfer Antar Daerah						
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.133,35	16.235,77	62.102,58	76.462,38	85.990	1,54
Pendapatan Hibah	15.133,35	15.024,97	57.535,78	-	77.319	1,50
Bantuan Keuangan	-	1.210,80	4.566,80	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	8.671	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 0,99%. Penurunan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi pada Tahun 2020, yakni penurunan sebesar -0,41 % dan Tahun 2022 sebesar -8,70%. Sedangkan kenaikan pertumbuhan pendapatan daerah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 1,56 %, Tahun 2021 sebesar 5,37 %.

Adapun penyebab terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 terjadinya penurunan besaran realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari sebelumnya (Tahun 2019) sebesar Rp.2.076.398.191.000,- menjadi sebesar Rp.1.891.323.979.000 atau turun sebesar - 8,91%.

Penurunan realisasi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) juga kembali terjadi pada Tahun 2022 dari sebelumnya Tahun 2021 sebesar Rp.1.952.740.330.000,- menjadi sebesar Rp.1.877.995.000.000,- pada tahun 2022 atau penurunan realisasi DAU sebesar -3,83 %.

Terjadinya penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak / bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar Rp.182.002.550.000,- menjadi sebesar Rp.176.649.000.000,- pada Tahun 2022 atau turun sebesar -2,94 %.

Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui menurunnya pendapatan masyarakat pada Tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penurunan pendapatan dari pajak daerah sebesar - 3,15 %.

Akibat adanya penurunan alokasi Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai program dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari upaya tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil melakukan lompatan kenaikan penerimaan PAD setiap tahunnya, yaitu pada Tahun 2021 realisasi PAD meningkat sebesar 13,16% dan Tahun 2022 realisasi PAD meningkat sebesar 11,61%.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kesehatan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli



daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan tersebut.

Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow program yang merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran money follow program juga mendukung pendekatan penyusunan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas), money follow program diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program/kegiatan non prioritas. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2024.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.105. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp juta)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
BELANJA DAERAH	6.267.376,23	6.551.278,88	6.408.293,79	6.468.906,65	6.304.304,21	1,00
Belanja Operasi	4.360.888,77	4.576.156,01	4.460.427,08	4.728.173,16	4.137.693,97	0,99
Belanja Pegawai	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32	2.093.837,76	2.078.501,67	1,00
Belanja Barang dan Jasa	1.489.060,37	1.524.405,21	1.229.706,71	1.703.252,65	1.980.942,86	1,07
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	819.237,02	880.838,34	1.149.133,05	931.082,75	67.416,43	0,54
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	10.833,00	
Belanja Modal	1.099.701,41	1.062.230,45	736.888,36	666.352,12	965.288,14	0,97
Belanja Tidak Terduga	2.168,89	1.945,91	455.660,79	71.352,13	197,19	0,55
Belanja Tidak Terduga	2.168,89	1.945,91	455.660,79	71.352,13	197,19	0,55
Belanja Transfer	804.617,17	910.946,51	765.317,56	1.003.029,24	1.206.916,56	1,11
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	796.770,50	877.337,64	764.437,56	963.100,94	1.123.088,17	1,09
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	7.846,67	33.608,87	880,00	39.928,30	83.828,39	1,81
SURPLUS/ (DEFISIT)	24.911,40	(160.941,68)	(44.228,03)	237.146,80	(182.496,03)	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat



Selama periode 2018 s.d 2022 pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah 1% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 total realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 2,18% dari tahun anggaran 2019. Kemudian pada tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,95%, sedangkan untuk tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 2,54%. Realisasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 3.106. Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan 2024 (Rp juta)

Uraian	2023	2024
BELANJA OPERASI	4.549.768,27	
Belanja Pegawai	2.324.767,03	
Belanja Barang dan Jasa	2.036.514,74	
Belanja Subsidi	6.500	
Belanja Hibah	181.986,51	
BELANJA MODAL	1.037.235,70	
BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000,00	
BELANJA TRANSFER	1.132.256,72	
BELANJA DAERAH	6.789.260,69	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2023 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp. 6,789 Triliun dengan komposisi 1) Belanja operasi sebesar Rp. 4,550 Triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah, 2) belanja Modal, 3) Belanja tidak terduga, dan 4) Belanja Transfer.

Tabel 3.107. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rp juta)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	530.424,08	563.774,67	337.485,66	261.533,76	483.680,53	0,98
Penggunaan SiLPA	530.424,08	502.062,67	332.762,66	261.533,76	483.680,53	0,98
Pinjaman Dalam Negeri	-	61.712,00	4.723,00	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	53.430,00	74.441,10	32.407,00	15.000,00	20.000,00	0,78
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	53.430,00	20.413,10	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,78
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam	-	54.028,00	12.407,00	-	-	



Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
Negeri						
PEMBIAYAAN NETTO	476.994,08	489.333,57	305.078,66	246.533,76	463.680,53	0,99
SISA LEBIH PEMBIAAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	501.905,48	328.391,90	256.028,62	483.680,53	281.184,50	0,87
KOREKSI SiLPA	-	-	-	-	-	
SISA LEBIH PEMBIAAAN ANGGARAN	501.905,48	328.391,90	256.028,62	483.680,53	281.184,50	0,87

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat bahwa pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,98%. Penurunan yang sangat signifikan adalah pada tahun 2022 yakni sebesar 41,87%, untuk tahun 2020 penurunan sebesar 40,14% dan pada tahun 2021 sebesar 22,51%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Realisasi penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penggunaan SiLPA. Penyebab terjadinya SiLPA tersebut terutama karena adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan juga karena pelampauan penerimaan PAD. Pelampauan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

Adapun kondisi kemampuan keuangan daerah digambarkan melalui kapasitas fiskal daerah, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Selanjutnya kapasitas fiskal daerah ini oleh Kementerian Keuangan dipetakan untuk mendapatkan gambaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Provinsi Sumatera Barat mempunyai rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,411 dengan kategori sangat rendah. rasio KFD sebesar angka tersebut merupakan angka terendah ketiga dari 8 provinsi di pulau Sumatera, yaitu setelah Provinsi Bengkulu (1,019)



dan Provinsi Jambi (1,239). Rasio KFD Provinsi Sumatera Barat ini kurang dari setengah rasio KFD 2 daerah/provinsi dengan rasio sangat tinggi se Indonesia, yaitu Provinsi Papua Barat (3,952) dan DKI Jakarta (3,007). Untuk lebih jelasnya perbandingan rasio KFD dari 34 provinsi di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut.

A. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No	Nama Daerah	Rasio KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	1,789	Sedang
2	Prov. Sumatera Utara	2,019	Sedang
3	Prov. Sumatera Barat	1,411	Sangat Rendah
4	Prov. Riau	2,215	Tinggi
5	Prov. Jambi	1,239	Sangat Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	1,890	Sedang
7	Prov. Bengkulu	1,019	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	1,580	Rendah
9	Prov. DKI Jakarta	3,007	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	2,546	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	1,947	Sedang
12	Prov. DI Yogyakarta	1,230	Sangat Rendah
13	Prov. Jawa Timur	1,952	Sedang
14	Prov. Kalimantan Barat	1,873	Sedang
15	Prov. Kalimantan Tengah	2,314	Tinggi
16	Prov. Kalimantan Selatan	2,339	Tinggi
17	Prov. Kalimantan Timur	2,786	Sangat Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	1,348	Sangat Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	1,311	Sangat Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	1,511	Rendah
21	Prov. Sulawesi Tenggara	1,284	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	1,761	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1,465	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1,470	Rendah
25	Prov. Maluku	1,796	Sedang
26	Prov. Papua	2,543	Sangat Tinggi
27	Prov. Maluku Utara	2,633	Sangat Tinggi
28	Prov. Banten	2,934	Sangat Tinggi
29	Prov. Bangka Belitung	1,506	Rendah
30	Prov. Gorontalo	1,350	Sangat Rendah
31	Prov. Kepulauan Riau	1,621	Rendah
32	Prov. Papua Barat	3,952	Sangat Tinggi
33	Prov. Sulawesi Barat	1,548	Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	1,841	Sedang

Sumber: PMK 193/PMK.07/2022

Inti dari penguatan kapasitas fiskal daerah adalah peningkatan pendapatan daerah, dan pengurangan porsi belanja pegawai. Apabila anggaran belanja pegawai semakin meningkat setiap tahun anggaran, maka kemampuan kapasitas fiskal juga akan berkurang. Selain mengurangi nilai rasio KFD, peningkatan belanja pegawai akan berpengaruh pada minimnya porsi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, dan berkurangnya alokasi untuk belanja barang dalam upaya meningkatkan aset daerah. Jika proporsi belanja pegawai naik,



maka untuk meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai rasio KFD, maka pendapatan daerah juga harus ditingkatkan.

3.4. Peran pemangku Kepentingan dalam Pencapaian Indikator TPB

Kontribusi dari masing-masing para pihak non pemerintah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian indikator TPB di Provinsi Sumatera Barat. Tabel para pihak non pemerintah aktif yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.108. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB

TPB	Kategori	Peran
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	NGO dan Perusahaan Swasta	Kegiatan NGO dan dana CSR dari perusahaan swasta, ikut mendukung pencapaian tujuan 1, antara lain dalam bentuk: pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, pelatihan untuk penyandang disabilitas, penyediaan layanan air bersih,
Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi dan pertanian berkelanjutan	NGO dan Perusahaan Swasta	Kegiatan NGO dan perusahaan swasta, ikut mendukung pencapaian tujuan 2, antara lain dalam bentuk: peningkatan gizi anak, meningkatkan kematangan pasangan usia muda dalam berumah tangga, edukasi dan pendampingan ibu menyusui, pembentukan kebun pangan keluarga
Tujuan 3: menjamin kehidupan yang sehat	NGO dan Perusahaan Swasta	Kegiatan NGO dan perusahaan swasta, ikut mendukung pencapaian tujuan 3, antara lain dalam bentuk: peningkatan layanan konseling menyusui, edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi, meningkatkan pemahaman pasangan suami istri terkait manfaat dan fungsi alat kontrasepsi, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan rutin ibu dan anak.
Tujuan 4: menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif	NGO, Perusahaan swasta, perguruan tinggi, kedutaan besar negara asing	Kegiatan NGO perusahaan swasta, perguruan tinggi dan kedutaan besar negara asing ikut mendukung pencapaian tujuan 4, antara lain dalam bentuk: penyediaan beasiswa, bantuan pelunasan tunggakan siswa, peningkatan kemampuan berbahasa asing, peningkatan literasi.
Tujuan 5: Kesetaraan gender	Kedutaan besar negara asing, NGO	Kedutaan besar negara asing dan NGO ikut mendukung pencapaian tujuan 5, antara lain dalam bentuk: peningkatan kesadaran terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, pembinaan remaja Perempuan, penguatan calon legislative Perempuan, pendampingan kelompok Perempuan, advokasi dukungan menyusui.



Tujuan 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	NGO, Perusahaan swasta	NGO, Perusahaan swasta ikut mendukung pencapaian tujuan 7, antara lain dalam bentuk: perbaikan jaringan listrik di desa dan membangun jaringan gas di desa
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	NGO, Perusahaan swasta, perguruan tinggi	NGO, Perusahaan swasta, perguruan tinggi ikut mendukung pencapaian tujuan 8, antara lain dalam bentuk: peningkatan kualitas SDM, pelatihan perencanaan usaha, pelatihan pendaftaran dan penerbitan NIB sistem OSS, fasilitasi pembentukan dan pelatihan kelompok usaha dan koperasi.
Tujuan 9: membangun infrastruktur yang Tangguh, industry inklusif serta mendorong inovasi	NGO, Perusahaan swasta	NGO, Perusahaan swasta Bersama-sama pemerintah ikut mendukung pencapaian tujuan 9, antara lain dalam bentuk: Pembangunan jalan dan irigasi, membangun sarana prasarana lingkungan desa wisata
Tujuan 10: mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	NGO	NGO ikut mendukung pencapaian tujuan 10, antara lain dalam bentuk: pelatihan perencanaan, pendirian dan manajemen koperasi (?)
Tujuan 11: menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, Tangguh, berkelanjutan	Perguruan tinggi	Perguruan tinggi ikut mendukung pencapaian tujuan 11, antara lain dalam bentuk: pelestarian budaya dan potensi pariwisata
Tujuan 13: mengambil Tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim	NGO	NGO ikut mendukung pencapaian tujuan 11, antara lain dalam bentuk: melaksanakan dan memfasilitasi akses pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota FPRB, mendorong pembentukan dan aktivasi FPRB kab/kota, kampanye PRB, edukasi dan peningkatan kapasitas kepada sekolah dan generasi muda dalam kesadaran akan perubahan iklim
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan	Perguruan tinggi	Perguruan tinggi ikut mendukung pencapaian tujuan 16, antara lain dalam bentuk: memasukkan Pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran, Kerjasama penelitian dan pengabdian dan dalam penguatan isu anti korupsi
Tujuan 17: menguatkan sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	NGO	NGO ikut mendukung pencapaian tujuan 17, antara lain dalam bentuk: edukasi tentang ekspor impor kepada UMKM dan pelatihan ekonomi digital.



untuk Pembangunan berkelanjutan		
---------------------------------------	--	--

Sumber : DOKumen RAD TPB Sumatera Barat, 2021 - 2026



Bab IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga lingkungan akan tetap terjaga untuk menopang hidup generasi yang akan datang. Sedangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);



7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan KeanekarDharmasrayaan Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2019-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.



TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4.1. Capaian TPB

Hasil evaluasi TPB/SDG's di Provinsi Sumatera Barat atas tujuan TPB/SDG's dengan indikator pada tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 melalui pendekatan penyelarasan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Secara lebih rinci berikut ini adalah hasil evaluasi capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan hasil pemetaan berdasarkan komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17. Hasil capaian ini didapatkan dari data yang disampaikan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.

4.1.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Dalam rangka mencapai tujuan Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030, terdapat 12 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 127 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mengentaskan kemiskinan ekstrim, mengurangi setengah proporsi masyarakat miskin di semua dimensi, penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar,



mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber dan membuat kerangka kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 15 indikator SDGs pada TPB No. 1, 12 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 12 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 66 indikator yang terdiri dari 6 indikator makro, 18 IKU, dan 42 IKD. Dari 66 indikator tersebut, 50 indikator telah tercapai dan 16 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 3 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.1
Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%		6,04	6,28	6,04	Tercapai
	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		358,76	356,45	343,82	Tercapai
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		358,76	356,45	343,82	Tercapai
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.			Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12%				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%		23,30	18,44	25,2	Belum tercapai
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%		85,78	53,8	0,38	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	IKD	%		53,9	75	87,19	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(%)							
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.			Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019				
	RPJMD - Persentase Masyarakat	IKD	%		82,32	86,1	86,18	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	yang mempunyai jaminan kesehatan (%)							
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta)				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%		45,76	41,95	50,46	Tercapai
<p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.			Sudah terbagi menjadi beberapa target indikator dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM		72,56	72,74	73,26	Tercapai
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%	9,09	9,18	9,18	Tercapai
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun		69,62	69,80	69,90	Tercapai
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai		72,65	72,74	73,26	Tercapai
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%	9,07	9,18	9,18	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun		69,59	69,8	69,90	Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%		83,40	82	83,78	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%		68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	Tercapai
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%		97,4	97,8	97,8	Tercapai
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		82,24	86	85,19	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%		53,9	75	87,19	Tercapai
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio		75,03	75	75	Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	Meningkatnya	83,40	82	82,26	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%				
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%	68,68	82	82,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%		66,97	60	61,11	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		9,21	17	14,36	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%		47,24	56	67,21	Tercapai
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,674	0,668	0,662	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio		99,91	99,5	99.98	Tercapai
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%		95,59	53	75	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks		0,46	0,49	0,50 target BNPB (target rpjmd 0,62 tidak tercapai,	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
							penilaian mandiri 0,64 dari inaris)	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang		98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	Belum tercapai
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		107,61	100,99	110,37	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		102,44	103,47	108,85	Tercapai
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta		46255	47872	49678	Tercapai
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		9,74	5	6,5	Tercapai
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		17,31	5	11,16	Tercapai
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%		-1,41	2,14	4,8* (data sementara)	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%		NA	2,4	1,6	Belum tercapai
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%		NA	6,54		Belum tercapai
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra		530	368	289	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		6,7	5	6,5	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%		46,15	8,6	20	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%		6,65	2,02	73,68	Tercapai
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik	IKD	BUMD		70	51	51	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Desa Klasifikasi Maju							
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/ Desa		381	410	417	Tercapai
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%		2,65	17,94	17,98	Tercapai
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%		3,92	2	1,72	Belum tercapai
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%		54,72	20	20	Tercapai
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit		20	40	40	Tercapai
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha		38174	41373	40653	Belum tercapai
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.								
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	miskin dan rentan.							



4.1.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan pada tahun 2030, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 28 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, meningkatkan kapasitas produktif pertanian, memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dan membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Dapat disimpulkan bahwa dari 16 indikator SDGs pada TPB No. 2, 11 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 11 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 28 indikator yang terdiri dari 16 IKU, dan 12 IKD. Dari 28 indikator tersebut, 21 indikator telah tercapai dan 7 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 5 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.2
Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).			Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17%				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%		23,30	18,44	25,2	Tercapai
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,55	79,13	79,45	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%		86,41	92	84,02	Belum tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		912699	833.110	610.296	Belum tercapai
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		83,8	82,5	89.80	Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau			Menurunnya				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.			proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 %				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,55	79,13	79,45	Tercapai
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%		86,41	92	84,02	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		912.699	833.110	610.296	Tercapai
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		83,8	82,5	89.80	Tercapai
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.			Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28%				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%		23,30	18,44	25,2	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Belum tercapai
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.			Menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5%				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%		23,30	18,44	25,2	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Belum tercapai
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 dan tingkat				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,55	79,13	79,45	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		912699	833.110	610.296	Belum tercapai
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		83,8	82,5	89,80	Tercapai
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.			Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28%				
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Belum tercapai
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga			(tidak ada dalam				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan			lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		107,61	100,99	110,37	Tercapai
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		102,44	103,47	108,85	Tercapai
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		9,74	5	6,5	Tercapai
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		17,31	5	11,16	Tercapai
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		6,7	5	6,5	Tercapai
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		107,61	100,99	110,37	Tercapai
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		102,44	103,47	108,85	Tercapai
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		9,74	5	6,5	Tercapai
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		17,31	5	11,16	Tercapai
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		6,7	5	6,5	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
	2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.							
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
	2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.			(tidak ada dalam lampiran Perpres				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				59/2017)				
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.								
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.								



4.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, terdapat 22 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 33 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 33 indikator SDGs pada TPB No. 3, 22 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 22 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 24 indikator yang terdiri dari 1 IKU, dan 23 IKD. Dari 24 indikator tersebut, 14 indikator telah tercapai dan 10 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 11 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.3

Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).			Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%		71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.							
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 %	71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.			Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%		71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%		53,9	75	87,19	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%		71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.			Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5%				Tidak selaras
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000			Menurunnya				Tidak



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	penduduk.			prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245				selaras
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.			Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300				Tidak selaras
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.			Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).				Tidak selaras
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko	IKD	%		100	100	100	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pada situasi KLB provinsi (%)							
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.			Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35 dan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.			Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				tahun 2019 menjadi 35.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.			Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%)				Tidak selaras
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.			Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).				Tidak selaras
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun.			Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).				
3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis			Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210				Tidak selaras
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca			Meningkatnya				Tidak



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	rehabilitasi.			jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/di bantu pada tahun 2019 menjadi 85				selaras
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.								
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.			Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas				Tidak selaras
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.			Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				2019 menjadi 66%				
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%		50,60	62,58	52,41	Belum tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.			Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).				
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%		11,8	19,1	12,2	Tercapai
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).			Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).				
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks		2,6	2,7	2,46	Tecapai
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan								



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%		71,72	78,5	75,33	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		10,2	13	9,7	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		82,24	86	85,19	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%		53,9	75	87,19	Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%		83,40	82	82,26	Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%		82,32	86,1	86,18	Tercapai
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.			Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91%				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,67	0,668	0,662	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,674	0,668	0,662	Belum tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%		82,32	86,1	86,18	Tercapai
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%		70,25%	73,7	77,42	Tercapai
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).			Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95%				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%		82,32	86,1	86,18	Tercapai
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%		53,9	75	87,19	Tercapai
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



4.1.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan berkualitas pada tahun 2030, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 13 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, akses yang sama terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan keterampilan, menghilangkan disparitas gender, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 17 indikator SDGs pada TPB No. 4, 7 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 7 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 13 indikator yang terdiri dari 4 IKU dan 9 IKD. Dari 13 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 10 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 10 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.4
Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%)				Tidak selaras
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).				Tidak selaras
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.			Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun		9,07	9,18	9,18	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK)	IKD	%		103,47	93,22	77,17	Belum



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat							tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%		50,94	52,38	48,62	Belum tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%		50,94	32,77	28,55	Belum tercapai
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.			Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun		9,07	9,18	9,18	Belum tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%		103,47	93,22	77,17	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%		50,94	52,38	48,62	Belum tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%		50,94	32,77	28,55	Belum tercapai
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.			Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				pada tahun 2019 menjadi 77,2%				
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.			Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2%				Tidak selaras
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.			Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 %				
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang		98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%		3,92	2	1,72	Belum tercapai
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).			Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				36,73 %				
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019				
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%		77,19	73,42	77,19	Tercapai
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.			Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1%				
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%		NA	58,2	43,52	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%		NA	27,4	60,48	Tercapai
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun.			Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15- 59 tahun pada tahun 2019.				Tidak selaras
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).							
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
<p>4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.</p>								
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
<p>4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>								
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.			Meningkat				Tidak selaras



4.1.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Pada tujuan 5 yaitu kesetaraan gender pada tahun 2030, terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dari tujuan 5 ini dapat disimpulkan bahwa dari 14 indikator SDGs pada TPB No. 5, 7 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 7 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 12 indikator yang terdiri dari 0 IKU dan 12 IKD. Dari 12 indikator tersebut, semuanya telah tercapai. Selanjutnya terdapat 7 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga didefinisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.5
Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.			Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%		3,87	4,15	8,33	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%		10,77	10,76	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%		14,03	11,54	20	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70%				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.			Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun				
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia		22,2	21,8	22,5	Tercapai
5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.			Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun				Tidak selaras
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.								
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.			Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%		10,77	10,76	10.77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%		14,03	11,54	20	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.			Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)				
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%		15,38	11,54	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%		14,03	11,54	20	Tercapai
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.			Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%				Tidak selaras
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait			Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kesehatan seksual dan reproduksi.			mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi				
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat			(tidak ada dalam				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.			lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%		3,87	4,15	8,33	Tercapai
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota		17	17	17	Tercapai
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat		Utama	Utama	Utama	Tercapai



4.1.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 15 indikator SDGs pada TPB No. 6, 9 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 9 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 14 indikator yang terdiri dari 4 IKU dan 10 IKD. Dari 14 indikator tersebut, 6 indikator telah tercapai dan 8 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 6 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.6
Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.			Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%				
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%		83,40	82	83,78	Tercapai
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%		83,40	82	82,26	Tercapai
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%		82,26%	82	82,05	Tercapai
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan			Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	sabun.			tahun 2019 menjadi 100%				
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%		68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		82,24	86	85,19	Belum tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%		68,68	82	82,05	Tercapai
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman			Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%		-	83	82,26	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		237.536	261.290	298983	Tercapai
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		4	10	11	Tercapai
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman			Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%		-	83	82,26	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		237.536	261.290	298983	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		4	10	11	Tercapai
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku			Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		79,10	87,16	74,98	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		80,75	77,43	75,59	Belum tercapai
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku			Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		79,10	87,16	74,98	Belum tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		80,75	77,43	75,59	Belum tercapai
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.			Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif				Tidak selaras
6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.			Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif				
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya			Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).				Tidak selaras
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya			Pemberian insentif penghematan air				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).				
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.								
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai				
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%		65,66	66,51	66,60	Tercapai
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas			Internalisasi 108				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.			Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).				
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%		58,50	53,78	58,60	Tercapai
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%		58,50	53,78	58,60	Tercapai
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.			Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019				
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%		NA	37,3	37,3	Tercapai
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%		NA	37,5	37,3	Belum tercapai



4.1.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Target-target tersebut meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 9 indikator SDGs pada TPB No. 7, 4 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 4 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 5 IKD. Dari 5 indikator tersebut, semua indikator telah tercapai. Selanjutnya terdapat 5 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.7
Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.			Meningkat menjadi 96,6%				
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio		99,91	99,5	99,98	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%		99,91	99,5	99,98	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.			Meningkat menjadi 1.200 KWh				Tidak selaras
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.			1,1 juta sambungan rumah tangga				Tidak selaras
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.			Bauran energi terbarukan				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				mencapai 10-16% pada tahun 2019				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%		28,19	29	29	Tercapai
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%		28,19	29	29	Tercapai
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.								
7.3.1*	Intensitas energi primer.			Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%		28,19	29	29	Tercapai
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%		28,19	29	29	Tercapai
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih								
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang								
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)			(tidak ada dalam lampiran Perpres				

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				59/2017)				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%		28,19	29	29	Tercapai
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%		28,19	29	29	Tercapai



4.1.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, target-target nya terdiri dari mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 23 indikator SDGs pada TPB No. 8, 11 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 11 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 15 indikator yang terdiri dari 4 Indikator Makro, 4 IKU dan 7 IKD. Dari 15 indikator tersebut, 9 indikator telah tercapai dan 6 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 12 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.8
Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.			Meningkat				
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%		3,29	3,40	4,36	Tercapai
8.1.1.(a)	PDB per kapita.			Meningkat menjadi lebih dari Rp. 50 juta				
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta		31,36	32	32,37	Tercapai
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta		45,35	48,29	50,59	Tercapai
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa			Meningkat				Tidak selaras
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.			Menurun (mendekat)				
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		120	540	540	Tercapai
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	200	-	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		300	400	265	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		50	100	0	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	Tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	Tercapai
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			Meningkat				Tidak selaras
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin			Meningkat				Tidak selaras
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan			51%				
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%		NA	2,4	1,6	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%		3,92	2	1,72	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%		3,92	2	1,72	Belum tercapai
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		120	540	540	Tercapai
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	200	-	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		300	400	265	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		50	100	0	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	Tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	Tercapai
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengaruh.								
8.4.1	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan			Tersusunnya dokumen strategi				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen				
8.4.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.			Meningkat				Tidak selaras
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.			Menurun				
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%			6,6	6,28	Tercapai
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.			Menurun				
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).			Meningkat				Tidak selaras
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).			Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri				Tidak selaras
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%		45,76	41,95	50,46	Tercapai
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%		9,26	12,36	19,2	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%		45,76	11,26	50,46	Tercapai
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.			Meningkat menjadi 8%				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%		1,27	1,24	1,3	Tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.			Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)				
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%		-100	1,5	500	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%		-100	2,5	2,5	Tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.			Meningkat				
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%		-40,23	1,5	1,5	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%		-40,23	3	3	Tercapai
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.			Meningkat				Tidak selaras



4.1.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Target pencapaian SDGS No 9 terdiri dari pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 19 indikator SDGs pada TPB No. 9,6 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 6 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 8 indikator yang terdiri dari 4 IKU dan 4 IKD. Dari 8 indikator tersebut, 2 indikator telah tercapai dan 6 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 13 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.9
Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,67	0,668	0,662	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,674	0,668	0,662	Belum tercapai
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.			Meningkatnya kemantapan jalan nasional rnerjadi 97%				
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%		75,034	75	71,39	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio		75,03	75	75	Tercapai
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%		75,034	75	75	Tercapai
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.			1000 Km (skala nasional)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.			Bertambah 3.258 km				Tidak selaras
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.			Meningkatnya jumlah bandara sebanyak 21 unit.				Tidak selaras
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.			Meningkat				
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	Tercapai
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	Tercapai
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.			24 pelabuhan (skala nasional)				
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	Tercapai
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.			Meningkat				Tidak selaras
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.			Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB				Tidak selaras
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.			Meningkat				Tidak selaras
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			Meningkat				
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%		8,81	8,75		Belum tercapai
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra		530	368	289	Belum tercapai
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun		11,36	15,7	20,93	Tercapai
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha		38174	41373	40653	Belum tercapai
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha		38.174	41373	40653	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		-	1.636	1645	Tercapai
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.			Meningkat				
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		300	400	265	Belum tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	Tercapai
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	Tercapai
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.			Menurun				Tidak selaras
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.			Menurun menjadi mendekati 26%				Tidak selaras
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.			Meningkat				Tidak selaras
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).			Meningkatnya proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) sebanyak 20%				Tidak selaras



4.1.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Target-target tersebut terdiri dari mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 25 indikator SDGs pada TPB No. 10, 8 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 8 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 7 indikator yang terdiri dari 2 Indikator Makro dan 5 IKD. Dari 7 indikator tersebut semuanya telah tercapai. Selanjutnya terdapat 17 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.10
Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Rasio Gini.			Menurun menjadi 0,36				
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks			0,31	0,315 (2021)	Tercapai
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			Menurun menjadi 7-8%				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa			356,45	335,21	Tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.			80 kabupaten (skala nasional)				
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%		46,15	8,6	20	Tercapai
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.			Meningkatnya Desa Mandiri menjadi 6.444 desa				
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%		6,65	2,02	73,68	Tercapai
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.			Menurunnya jumlah daerah				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				tertinggal menjadi 37 kabupaten.				
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.			Meningkat				Tidak selaras
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.			Menurun menjadi 14%				Tidak selaras
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.			Menurun				Tidak selaras
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.			Terlaksananya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban dengan terbitnya 2.250 surat keterangan korban				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				penangarnErn pelanggaran HAM berat				
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.			Meningkat menjadi 87				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai		73	68,01	78,51	Tercapai
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			Ada				Tidak selaras
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.			(tidak ada dalam lampiran Perpres				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				59/2017)				
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%		45,76	41,95	50,46	Tercapai
10.4.2	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.								
10.5.1	Financial Soundness Indicator.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.								
10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan			(tidak ada dalam				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	migran yang baik.			lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang		13	35	-	Belum tercapai
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.7.3	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
10.7.4	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



4.1.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Target TPB No. 11 tersebut terdiri dari meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 29 indikator SDGs pada TPB No. 11, 11 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 11 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 26 indikator yang terdiri dari 7 IKU dan 18 IKD. Dari 26 indikator tersebut, 13 indikator telah tercapai dan 13 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 18 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.11
Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70%				
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%		83,40	82	83,78	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%		68,68	82	69,2	Belum tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%		83,40	82	82,26	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%		68,68	82	69,2	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%		82,26%	82	82,05	Tercapai
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik			Meningkat menjadi 32%				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,67	0,668	0,662	Belum tercapai
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang		18127254	19000000	18650012	Belum tercapai
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum			Ada				Belum tercapai
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,67	0,668	0,662	Belum tercapai
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang		18127254	19000000	18650012	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk			Minimal 20 kota sedang (skala nasional)				Tidak selaras
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)			Ada				Tidak selaras
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu		10790	10916	11130	Tercapai
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			Menurun				
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%		95,59	53	75	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat	IKD	%		100	100	100	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	bencana							
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%		100	71	71	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		3	10	10	Tercapai
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa		2	10	10	Tercapai
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar			Persentase potensi kehiangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB) sebesar 0,10%				Tidak selaras
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB			Menurun				Tidak selaras
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota			Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan				Tidak selaras
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya			Meningkat menjadi 80%				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%		66,97	60	61.11	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		9,21	17	14,36	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%		47,24	56	67,21	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%		63,06	60	61.1	Tercapai
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang	Indikator Progul	persen		1	1	1	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	terlaksana							
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola			Meningkat/ ada				Tidak selaras
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)			Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 kurang dari 40 mikrogram/m3				Tidak selaras
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10			Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10 kurang dari 40 mikrogram/m3				Tidak selaras
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50.				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		79,10	87,16	target RPJMD 77,43 capaian 74,98	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		80,75	77,43	75,59	Belum tercapai
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua			Meningkat/ ada				Tidak selaras
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.								
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.								
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030			Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan 18 kegiatan per				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				tahunnya				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana			Ada				Tidak selaras
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.								
11.c.1	-							
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai



4.1.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target TPB No. 12 terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 20 indikator SDGs pada TPB No. 12, 7 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 7 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 11 indikator yang terdiri dari 1 IKU dan 10 IKD. Dari 11 indikator tersebut, 6 indikator telah tercapai dan 5 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 13 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.12
Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan			Tersusunnya dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sebanyak 10 dokumen (kumulatif).				Tidak selaras
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.								
12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		9,21	17	14,36	Belum tercapai
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%		47,24	56	67,21	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%		63,06	60	61.1	Tercapai
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional	Indikator Progul	persen		1	1	1	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana							
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa		4	13	15	Tercapai
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri			Meningkatnya persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri sebesar 20% (10 ton)				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%		-	83	82,26	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		237.536	261.290	298983	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		4	10	11	Tercapai
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline			Meningkatnya persentase penurunan tingkat konsumsi bahan bakar perusak ozon dari baseline sebesar 25,25%				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		0	100	0	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%		-	83	82,26	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		237.536	261.290	298983	Tercapai
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		4	10	11	tercapai
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.			Meningkatnya jumlah limbah 83 yang terkelola sebesar 539,8 juta ton (kumulatif). Tahun dasar 2018: 367,3 juta ton				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh	IKD	Rasio		0	100	0	Belum



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	SPALD regional							tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%		-	83	82,26	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun			261.290	298983	Tercapai
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota			10	11	Tercapai
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang			Jumlah sampah yang dikelola secara nasional mencapai 339,4 juta ton (kumulatif).				
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			20 ton per hari (skala nasional)				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%		66,97	60	61.11	Tercapai
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		9,21	17	14,36	Belum tercapai
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%		47,24	56	67,21	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%		63,06	60	61.1	Tercapai
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan								



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya			Meningkatnya perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH menjadi 100				Tidak selaras
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			Meningkat				Tidak selaras
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional								
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah			Meningkat				Tidak selaras
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa			Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebanyak 25 produk				Tidak selaras
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk			Meningkatnya jumlah satuan pendidikan formal				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.			dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit				
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup			Meningkat				Tidak selaras
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks		88,33	84,5	90,48	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks		95,24	81	90,9	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		90,45	92	93,49	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		90,18	86	91,98	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		91,38	92	92,57	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		88,34	92	88.58	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/ Rasio		100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		4	50	58	Tercapai
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.								
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)			Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan menjadi 19,3 GW				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%		28,19	29	29	Tercapai
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%		28,19	29	29	Tercapai
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
12.b.1	Mengimplementasikan perangkat akuntansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata berkelanjutan			Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi melalui peningkatan jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development mencapai 22 lokasi.				Tidak selaras
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development			22 lokasi				Tidak selaras



4.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Target TPB No. 13 tersebut terdiri pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 9 indikator SDGs pada TPB No. 13, 3 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 3 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 5 indikator yang terdiri dari 5 IKD. Dari 5 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 2 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 6 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.13
Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang			Menurun				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%		100	71	71	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%		100	100	100	Tercapai
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		3	10	10	Tercapai
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras			Ada				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030							
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana			Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		6,25	25	18,75	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%		100	71	71	Tercapai
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications			Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019				
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



4.1.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Tujuan 14 yaitu pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan, terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU fising, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 12 indikator SDGs pada TPB No. 14, 5 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 5 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 3 indikator yang terdiri dari 3 IKD. Dari 3 indikator tersebut, semua indikator telah tercapai. Selanjutnya terdapat 7 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.14
Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi								
14.1.1	(a) Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)kepadatan sampah plastik terapung			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%		66,97	60	61.11	Tercapai
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%		63,06	60	61.1	Tercapai
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif								
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan			Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional				
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton		481143,69	477.362	503.950,37	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%		0,19	0,99	6,62	Tercapai
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton		219.570,30	222693	226589,29	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%		5,56	3,33	6,66	Tercapai
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton		261.573,39	262256	277361,08	Tercapai
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton		64,9	67	1046,97	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%		100%	6,49	7,5	Tercapai
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton		9.118	16652	17500	Tercapai
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan			Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%		37,24	47,06	48	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan		7	7	6	Belum tercapai
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang	Indikator	M2		140,40	250	300	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	direhabilitasi	Program						
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%		37,24	47,06	48	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasa n		7	7	6	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%		NA	37,5	37,3	Belum tercapai
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)			Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha				Tidak selaras
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha			Meningkat menjadi 87%				
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP	IKD	%		84,34	82	85	Tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku							
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%		84,34	82	85	Tercapai
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara								
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil			Ada				Tidak selaras
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan			Meningkat				Tidak selaras
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi			Meningkat				Tidak selaras
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want								
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Sea)							



4.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 12 indikator SDGs pada TPB No. 15, 7 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 7 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 5 indikator yang terdiri dari 5 IKD. Dari 5 indikator tersebut, 5 indikator telah tercapai. Selanjutnya terdapat 5 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.15
Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan				
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks		64,20	60,98	63,98	Tercapai
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks		64,20	60,98	63,98	Tercapai
15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi		1	10	1	Belum tercapai
	15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari							Tidak selaras
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju			Meningkat menjadi				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
				100.000 ha (skala nasional)				
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit		20	40	40	Tercapai
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit		20	20	20	Tercapai
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan			Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas				
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%		0,48	1,29	1,29	Tercapai
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%		2,55	2,85	2,95	Tercapai
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.								
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi		1	10	1	Belum tercapai
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks		64,20	60,98	63,98	Tercapai
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks		64,20	60,98	63,98	Tercapai
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal								
15.7.1	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan								
15.9.1	(a)Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan			Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat				Tidak selaras
	(b) integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau			Meningkatnya pemanfaatan				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi			keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat				
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis			Meningkat				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi		1	10	1	Belum tercapai



4.1.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Untuk mencapai tujuan 16, targetnya terdiri dari mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 50 indikator SDGs pada TPB No. 16, 27 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 27 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 46 indikator yang terdiri dari 14 IKU dan 32 IKD. Dari 46 indikator tersebut, 28 indikator telah tercapai dan 18 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 23 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai.



Tabel 4.16
Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.			Menurun				Tidak selaras
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			Menurun				
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai		3,03	3,01	2,05	Belum tercapai
16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.			Menurun				Tidak selaras
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.			Menurun				
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus		0	3	1	Belum tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai		3,03	3,01	2,05	Tercapai
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.			Menurun				Tidak selaras
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.			Menurun				



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai		3,03	3,01	2,05	Belum tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.			Meningkat				Belum tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai		3,04	3,1	2,18	Belum tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai		3,03	3,01	2,05	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%		13,66	10	13,90%	Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%		13,66	10	8,86	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%		13,66	10	13,90%	Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%		13,66	10	8,86	Belum tercapai
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir			Menurun				Tidak selaras
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.			Menurun				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%		100	84	100	Tercapai
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya			Menurun				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%		100	84	100	Tercapai
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.			Menurun				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%		100	84	100	Tercapai
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.			Menurun				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.			Menurun				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%		100	84	100	Tercapai
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		67,21	65,85	61,98	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan,	IKD	Rasio		19,88	16	11,73	Tercapai

LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	termasuk TPPO (rasio per 100							
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio		3,13	2,12	3,58	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		66,1512	65,23	59,64	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%		100%	84	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%		100	84	100	Tercapai
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi			Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%		100	100	100	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.3.3	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).			Meningkat menjadi 4,0				Tidak selaras
16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap							Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.							
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.			Meningkat				Tidak selaras
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.			Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%				
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks		68,89	68,5	69,88	Tercapai
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B			Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%				
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat		BB (77,52)	BB	BB (78,02 sumber data Masih data sementara)	Tercapai
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah		6	8	8	Tercapai
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah		6	8	8	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB B			Menjadi 80%				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks		68,89	68,5	69,88	Tercapai
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.			Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks		88,33	84,5	90,48	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks		95,24	81	90,9	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		90,45	92	93,49	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		90,18	86	91,98	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		91,38	92	92,57	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%		88,34	92	88,58	Belum tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio		100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	Tercapai
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP)	Indikator Progul	unit		4	50	46	Belum tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak							
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		4	50	53	Tercapai
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		4	50	57	Tercapai
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		4	50	59	Tercapai
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		4	50	58	Tercapai
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).			Meningkat				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		65,12	59,12	65,48	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%		10,77	10,76	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%		14,03	11,54	20	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).			Meningkat				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		65,12	59,12	65,48	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%		15,38	11,54	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%		14,03	11,54	20	Tercapai
16.7.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai		73	68,01	78,51	Tercapai
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		65,12	59,12	65,48	Tercapai
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai		73	68,01	78,51	Tercapai
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.			Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4%				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%		88,01	86,62	101,47	Tercapai
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%		36%	40	112,5	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%		95,79	94	104,25	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.			Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85%				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%		88,01	86,62	101,47	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%		95,79	94	104,25	Tercapai
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun			Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85%				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%		88,01	86,62	101,47	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%		95,79	94	104,25	Tercapai
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.								
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	HAM Internasional.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			Ada				Tidak selaras



4.1.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Untuk tujuan terakhir pada tujuan 17, targetnya terdiri dari mobilisasi sumber daya domestik, kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi, perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi dan monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa dari 30 indikator SDGs pada TPB No. 17, 8 Indikator yang selaras dengan RPJMD. Dari 8 indikator tersebut dijabarkan lagi ke dalam 16 indikator yang terdiri dari 3 IKU dan 13 IKD. Dari 16 indikator tersebut, 6 indikator telah tercapai dan 10 belum tercapai. Selanjutnya terdapat 10 indikator yang tidak selaras dengan RPJMD/tidak tersedia data. Sesuai dengan kesepakatan Pokja, indikator yang tidak selaras ini juga di definisikan sebagai indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai



Tabel 4.17
Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.			Meningkat				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		38,05	37,84	46,50	Tercapai
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%		2,37	3,58	-11,24	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		1,02	36,6	1,92	Belum tercapai
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%		13,77973 812	7,2	8,37	Tercapai
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.			Di atas 12%				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		38,05	37,84	46,50	Tercapai
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		1,02	36,6	1,92	Belum tercapai
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%		13,78	7	8,37	Tercapai
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%		13,77973 812	7,2	8,37	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai			Meningkat				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	oleh pajak domestik.							
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		38,05	37,84	46,50	Belum tercapai
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%		2,37	3,58	-11,24	Tercapai
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		1,02	36,6	1,92	Belum tercapai
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%		13,78	7	8,37	Tercapai
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%		13,77973 812	7,2	8,37	Tercapai
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.								
17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).			Menurunnya rata-rata tarif terbobot di negara Free Trade Agreement (FTA) mitra (6 negara) menjadi 6,78				Tidak selaras
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas			Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5%				
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta		3066,93	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	Tercapai
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$		"3066,93 (Juta \$)"	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	Tercapai
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.								
17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.			Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia				Tidak selaras
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek			Ada				Tidak



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.							selaras
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).			Ada				Tidak selaras
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.			Meningkat				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%		66,7	60	58,82	Belum tercapai
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.			Meningkat				



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%		66,7	60	58,82	Belum tercapai
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%		66,7	60	58,82	Belum tercapai
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%		66,7	60	68,63	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%		60	60	70,59	Tercapai
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%		66,7	60	58,82	Belum tercapai
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%		60	60	54,9	Belum tercapai
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%		66,7	60	68,63	Tercapai
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%		60	60	70,59	Tercapai
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
	b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).			Ada				Tidak selaras
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.1	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.1	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau			(tidak ada dalam				Tidak



Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional (Perpres No 59 Tahun 2017)	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)			lampiran Perpres 59/2017)				selaras
<p>17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.</p>								
17.8.1*	Persentase pengguna internet			(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				Tidak selaras



4.2. Rekapitulasi Capaian TPB

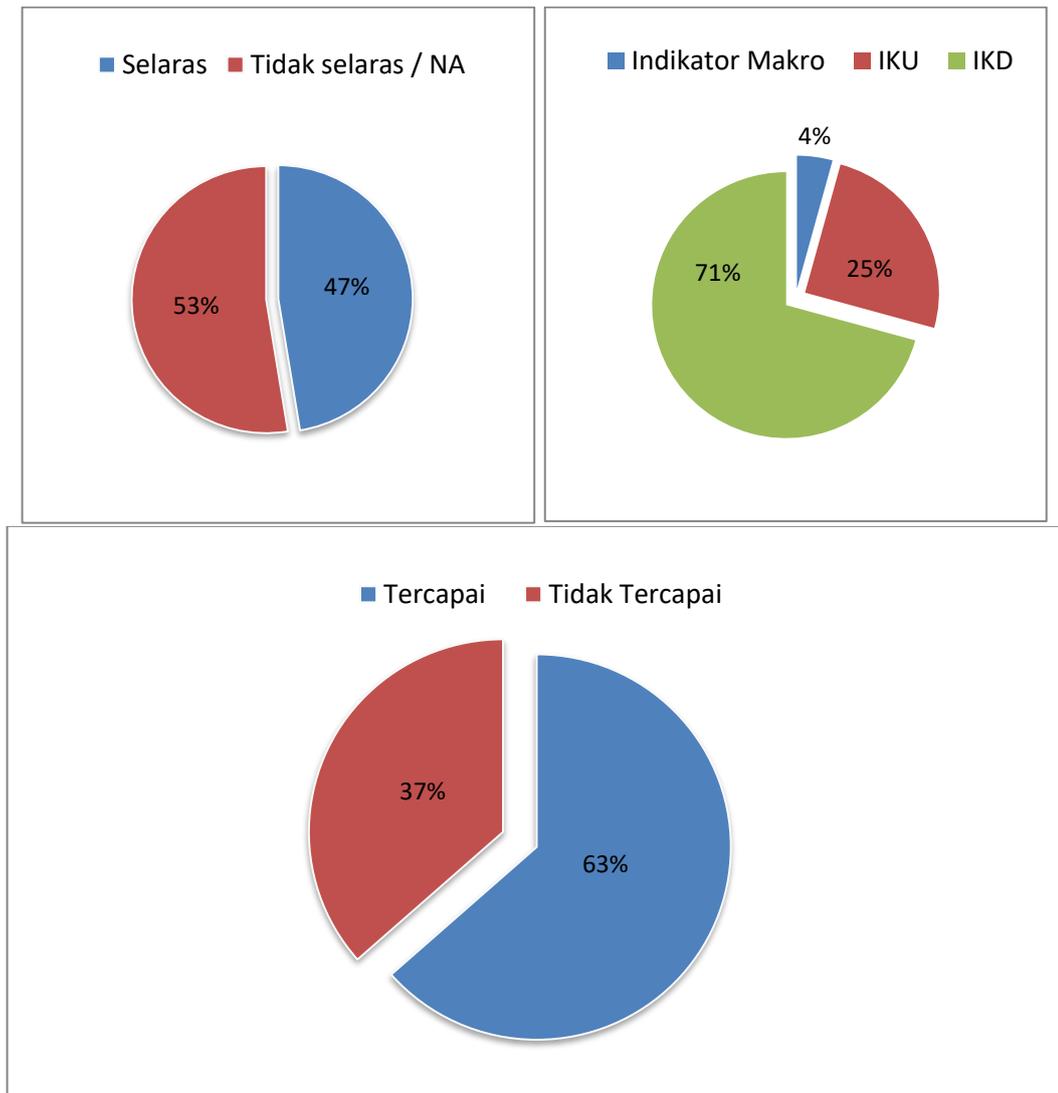
Data-data capaian TPB yang digunakan mengacu pada capaian TPB yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 – 2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah. Berdasarkan Rekapitulasi Capaian TPB pada Tabel 4.18, Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dari 17 TPB terdapat 348 indikator TPB dan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdiri dari 165 indikator yang selaras dengan dan 183 indikator yang tidak selaras/tidak tersedia data. Dari 165 Indikator yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 304 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022, yang terdiri dari 13 Indikator Makro, 76 indikator IKU, 215 indikator IKD.



Tabel 4.18 Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs dan digunakan dalam analisis KLHS RPJPD					
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
Tujuan 1	15	12	3	6	18	42	66	50	16
Tujuan 2	16	11	5	0	16	12	28	21	7
Tujuan 3	33	22	11	0	1	23	24	14	10
Tujuan 4	17	7	10	0	4	9	13	3	10
Tujuan 5	14	7	7	0	0	12	12	12	0
Tujuan 6	15	9	6	0	4	10	14	6	8
Tujuan 7	9	4	5	0	0	5	5	5	0
Tujuan 8	23	11	12	4	4	7	15	9	6
Tujuan 9	19	6	13	0	4	4	8	2	6
Tujuan 10	25	8	17	2	0	5	7	7	0
Tujuan 11	29	11	18	1	7	18	26	13	13
Tujuan 12	20	7	13	0	1	10	11	6	5
Tujuan 13	9	3	6	0	0	5	5	3	2
Tujuan 14	12	5	7	0	0	3	3	3	0
Tujuan 15	12	7	5	0	0	5	5	5	0
Tujuan 16	50	27	23	0	14	32	46	28	18
Tujuan 17	30	8	22	0	3	13	16	6	10
Total	348	165	183	13	76	215	304	193	111

Disamping analisis di atas, diketahui bahwa data yang tidak selaras dengan RPJMD/NA adalah sebanyak 183 indikator (53%) dan yang selaras adalah 165 indikator (47%). Dari 164 indikator yang selaras dengan RPJMD tersebut, sebanyak 71% merupakan Indikator Kinerja Daerah, 25% Indikator Kinerja Utama, dan 4% Indikator Makro. Dari indikator yang selaras tersebut juga dapat dinyatakan bahwa yang tercapai adalah 63% dan yang tidak tercapai 37% sebagaimana pie chart yang disajikan di bawah berikut:



Gambar 4.1 Rekapitulasi Capaian TPB Sumatera Barat

Bab V

ANALISIS CAPAIAN

INDIKATOR TPB PADA OPD

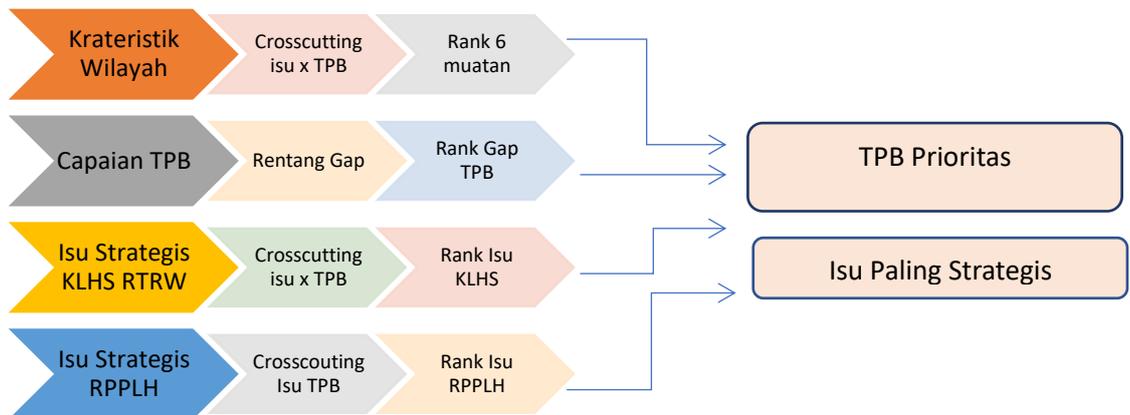
5.1. Analisis Isu Strategis

Dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, isu tidak hanya berdasarkan hasil konsultasi publik penjaringan isu namun juga mempertimbangkan isu berdasarkan ketidaktercapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, isu berdasarkan kondisi lingkungan hidup, serta isu berdasarkan kebijakan daerah.

Berdasarkan hasil pencapaian diatas terdapat 621 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022. Dari indikator tersebut terdapat 427 indikator yang tercapai, 194 indikator yang tidak tercapai, 0 indikator yang belum tersedia dan 0 indikator belum ada target dan baseline.

Pengkajian TPB mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum, serta tata kelola kelembagaan saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (baseline) dalam mencapai target setiap indikator TBP Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan analisis capaian target TPB yang tercapai sebesar 69% dari 621 indikator yang dipakai, 31% tidak tercapai, 0% belum tersedia dan 0% tidak ada target dan baseline. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lebih menggenjot upaya yang akan diambil dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adanya gap antara kondisi awal (baseline) dengan target TPB yang harus dicapai menjadi salah satu dasar dalam perumusan isu prioritas. Selain mempertimbangkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan kondisi 6 (enam) muatan lingkungan hidup dan isu dari dokumen perencanaan (Isu Strategis KLHS RTRW dan Isu Strategis KLHS RPPLH). Kerangka analisis dan pemeringkatan isu TPB untuk menentukan isu prioritas disajikan pada gambar berikut:



Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Prov. Sumbar, 2023

Gambar 5.1. Kerangka Analisis dan Pemingkatan Isu Prioritas TPB

5.1.1. Analisis Isu Strategis dari Lingkungan Hidup

Berdasarkan kajian enam muatan lingkungan hidup diperoleh isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: Isu tersebut di uji silang-kan dengan 17 target TPB. Dari hasil uji silang diperoleh TPB prioritas berturut-turut adalah (1) TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan; 2) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 15 Ekosistem Darat; 3) TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 4) TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 13 Perubahan Iklim, TPB 17 Kemitraan Mencapai Tujuan; 5) TPB 2 Tanpa Kelaparan; 6) TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 7) TPB 14 Ekosistem lautan; 8) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, TPB 5 Kesetaraan Gender; 9) TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.1. Uji Silang Kondisi Lingkungan Hidup dengan TPB

No	TPB	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air dan Fluktuasi debit di Batang Agam dan Batang Lembang	Meningkatnya Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan Permukiman	Tingginya Intensitas Bencana angin kencang, banjir dan longsor	Meningkatnya Permasalahan Sosial Akibat Perkembangan Teknologi	Terjadinya degradasi lahan, terutama di Kabupaten Pesisir selatan, dan Kabupaten Mentawai	Masih minimnya pemanfaatan potensi kehati dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Jalan	Belum Optimalnya pemanfaatan Sumber daya Kelautan	Terjadinya Kerusakan pada wilayah pesisir dan laut	Masih Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap kesehatan	Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas Terutama di Jam-Jam Sibuk	Masih maraknya illegal Logging di Masyarakat	Penurunan Potensi dan Produktifitas Hasil Pertanian	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Belum Optimalnya Peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya	Hasil 6 Muatan	Rank 6 Muatan
1	Tanpa Kemiskinan	*	*	*		*		*		*				*			7	3
2	Tanpa Kelaparan	*	*	*				*		*				*			5	5
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*			*												2	8
4	Pendidikan Berkualitas	*			*												2	8
5	Kesetaraan Gender				*									*			2	8
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*		*				*				*	*	*	8	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau						*	*		*				*	*	*	6	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							*						*	*	*	4	6
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur		*		*			*				*		*		*	6	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	*															1	9
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*	*		*	*	*						*	*	*	9	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					*					*			*	*		4	6
13	Penanganan Perubahan Iklim		*	*		*					*			*	*		6	4
14	Ekosistem Lautan					*		*	*	*				*	*		3	7
15	Ekosistem Daratan	*	*			*	*	*	*	*				*	*	*	8	2
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				*	*	*	*	*	*			*		*		7	3
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan		*		*	*		*	*	*			*		*		6	4

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

5.1.2. Analisis Isu Strategis dari Capaian Indikator TPB

Capaian indikator TPB diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian indicator TPB dengan target Perpres 59 tahun 2017. Semakin banyak indicator TPB yang belum mencapai target nasional, semakin berpotensi menjadi isu prioritas.

Dari hasil uji silang diperoleh TPB prioritas berturut-turut adalah (1) TPB 4 Pendidikan Berkualitas; 2) TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 3) TPB 17 Kemitraan Mencapai Tujuan; 4) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak; 5) TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan; 6) TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 7) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 8) TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 13 Perubahan Iklim; 9) TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, 10) TPB 1 Tanpa Kemiskinan; 11) TPB 2 Tanpa Kelaparan; 12) TPB 5 Kesetaraan Gender, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, TPB 14 Ekosistem lautan, TPB 15 Ekosistem Darat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.2. Isu Berdasarkan Gap TPB

No	TPB	Jumlah indikator TPB	Gap Data TPB	Persentase Data TPB	Rank Gap data TPB
1	Tanpa Kemiskinan	66	16	24,24%	10
2	Tanpa Kelaparan	28	7	25,00%	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	24	10	41,67%	7
4	Pendidikan Berkualitas	13	10	76,92%	1
5	Kesetaraan Gender	9	0	0,00%	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	8	66,67%	4
7	Energi Bersih dan Terjangkau	5	0	0,00%	12
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	16	6	37,50%	8
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	8	6	75,00%	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	0	0,00%	12
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	26	13	50,00%	5
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	11	5	45,45%	6
13	Penanganan Perubahan Iklim	5	2	40,00%	8
14	Ekosistem Lautan	3	0	0,00%	12
15	Ekosistem Daratan	5	0	0,00%	12
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	46	18	32,61%	9
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	16	10	62,50%	3

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

5.1.3. Analisis Isu Strategis dari KLHS Lainnya

A. Isu dari KLHS RTRW

Isu strategis KLHS RTRW Provinsi Sumatera Barat 2022 – 2042 adalah sebagai berikut : Kerusakan Wilayah pesisir dan Laut, Peningkatan Alih Fungsi Lahan, Tingginya potensi Bencana, Belum Optimalnya pengelolaan Sampah dan Penurunan Kualitas Air

Isu strategis tersebut di uji silang dengan TPB. Dari hasil uji silang diperoleh TPB prioritas berturut-turut adalah (1) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, TPB 15 Ekosistem Darat; 2) TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 13 Perubahan Iklim, TPB 17 Kemitraan Mencapai Tujuan; 3) TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur;; 4) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 5) TPB 5 Kesetaraan Gender, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.3. Crosscutting TPB dengan Isu KLHS RTRW

No	TPB	Kerusakan Wilayah pesisir dan Laut	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Tingginya potensi Bencana	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	Penurunan Kualitas Air	Isu Strategis RPJPD	Rank Isu Strategis RPJPD
1	Tanpa Kemiskinan		*	*		*	3	2
2	Tanpa Kelaparan		*	*		*	3	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera					*	1	4
4	Pendidikan Berkualitas					*	1	4
5	Kesetaraan Gender						0	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		*	*	*	*	4	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau				*		1	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				*		1	4
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur		*		*		2	3
10	Berkurangnya Kesenjangan					*	1	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan		*	*	*	*	4	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				*		1	4
13	Penanganan Perubahan Iklim		*	*	*		3	2
14	Ekosistem Lautan	*			*		2	3
15	Ekosistem Daratan	*	*	*		*	4	1
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	*					1	4
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	*	*	*			3	2

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

B. Isu dari RPPLH Provinsi

Isu strategis KLHS RTRW Provinsi Sumatera Barat 2022 – 2042 adalah sebagai berikut: Fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air, Penurunan Tutupan Hutan, Alih Fungsi Lahan, Kebencanaan, Pengelolaan Sampah yang belum optimal, Degradasi Keanekaragaman Hayati.

Dari hasil uji silang diperoleh TPB prioritas berturut-turut adalah (1) TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan; 2) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak; 3) TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 13 Perubahan Iklim, TPB 15 Ekosistem Darat; 4) TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 17 Kemitraan Mencapai Tujuan; 5) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 14 Ekosistem Lautan, TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 5) TPB 5 Kesetaraan Gender, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.4. Crosscutting TPB dengan Isu RPPLH

No	TPB	Fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air	Penurunan Tutupan Hutan	Alih Fungsi Lahan	Kebencanaan	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Degradasi keanekaragaman hayati	Isu Strategis RPJPD	Rank Isu Strategis RPJPD
1	Tanpa Kemiskinan	*	*	*	*			4	3
2	Tanpa Kelaparan	*	*	*	*			4	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*						1	5
4	Pendidikan Berkualitas	*						1	5
5	Kesetaraan Gender							0	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*	*	*		5	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau					*	*	2	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi					*		1	5
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur		*	*				2	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	*						1	5
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	*	*	*	*	*	*	6	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab					*		1	5
13	Penanganan Perubahan Iklim		*	*	*	*		4	3
14	Ekosistem Lautan					*		1	5
15	Ekosistem Daratan	*	*	*			*	4	3
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh						*	1	5
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan		*	*				2	4

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

5.1.4. Isu Strategis dari Hasil Konsultasi Publik

Dari proses cross-cutting TPB terhadap masing-masing Isu Strategis dokumen perencanaan yang ada dan terhadap isu hasil masukan tim Pokja dan peserta, dilakukan akumulasi dari jumlah terhadap hasil-hasil tersebut. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka diperoleh peringkat TPB prioritas sebagai berikut

Tabel 5.5. Penetapan Ranking Isu TPB Prioritas

No	TPB	Rank Gap data TPB	Rank Isu Kondisi Lingkungan	Rank Isu RTRW	Rank Isu RPPLH	Skor	Rank Akhir
1	Tanpa Kemiskinan	10	3	2	3	18	5
2	Tanpa Kelaparan	11	5	2	3	21	7
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	7	8	4	5	24	9
4	Pendidikan Berkualitas	1	8	4	5	18	5
5	Kesetaraan Gender	12	8	5	6	31	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	2	1	2	9	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau	12	4		4	20	6



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No	TPB	Rank Gap data TPB	Rank Isu Kondisi Lingkungan	Rank Isu RTRW	Rank Isu RPPLH	Skor	Rank Akhir
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8	6	4	5	23	8
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	4	3	4	13	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	12	9	4	5	30	11
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	1	1	1	8	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	6	6	4	5	21	7
13	Penanganan Perubahan Iklim	8	4	2	3	17	4
14	Ekosistem Lautan	12	7	3	5	27	10
15	Ekosistem Daratan	12	2	1	3	18	5
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	9	3	4	5	21	7
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3	4	2	4	13	3

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

Tabel 5.6. TPB Prioritas

Rangk Isu	No TPB	TPB
1	11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan
2	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak
3	9	Industri, inovasi dan infrastruktur
	17	Kemitraan Mencapai Tujuan
4	13	Penangan Perubahan Iklim
5	4	Pendidikan Berkualitas
	15	Ekosistem Darat
	1	Tanpa Kemiskinan

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

Dalam perumusan isu paling strategis didasarkan dari daftar isu panjang yang dirangkum dari isu dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Provinsi



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Sumatera Barat dan hasil diskusi terpumpun dengan para stakeholder terkait. Yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 5.7. Daftar Isu Panjang

No.	Isu Panjang	Sumber Isu
1	Kerusakan Wilayah pesisir dan Laut	KLHS RTRW
2	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	
3	Tingginya potensi Bencana	
4	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	
5	Penurunan Kualitas Air	
6	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air dan Fluktuasi debit di Batang Agam dan Batang Lembang	KP1
7	Meningkatnya Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan Permukiman	
8	Tingginya Intensitas Bencana angin kencang, banjir dan longsor	
9	Meningkatnya Permasalahan Sosial Akibat Perkembangan Teknologi	
10	Terjadinya degradasi lahan, terutama di Kabupaten Pesisir selatan, dan Kabupaten Mentawai	
11	Masih minimnya pemanfaatan potensi kehati dalam pertumbuhan ekonomi daerah	
12	Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Jalan	
13	Fluktuasi Kualitas dan debit air	
14	Belum Optimalnya pemanfaatan Sumber daya Kelauatan	
15	Terjadinya Kerusakan pada wilayah pesisir dan laut	
16	Masih Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap kesehatan	
17	Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas Terutama di Jam-Jam Sibuk	
18	Masih maraknya Illegal Logging di Masyarakat	
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	
20	Belum Optimalnya Peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan pariwisata	
21	Fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air	RPPLH
22	Penurunan Tutupan Hutan	
23	Alih Fungsi Lahan	
24	Kebencanaan	
25	Pengelolaan sampah yang belum optimal	
26	Degradasi keanekaragaman hayati	

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



5.1.5. Penetapan Isu Paling Strategis

Berdasarkan pembahasan pada subbab 5.1.4 diatas maka, dihasilkan isu strategis PB yang diharapkan dengan memperbaiki isu tersebut dapat memberikan dampak yang positif sehingga menciptakan sinergitas dalam pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Melalui Konsultasi Publik I dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pakar, LSM dan OPD Teknis Terkait, serta diskusi Tim Pokja, maka ditetapkan 5 (lima) isu Paling Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Alih Fungsi Lahan
2. Tingginya potensi Bencana
3. Belum Optimalnya pengelolaan Sampah
4. Masih minimnya pemanfaatan potensi kehati dalam pertumbuhan ekonomi daerah
5. Fluktuasi Kualitas dan debit air
6. Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut

Penyelesaian permasalahan Isu Paling Stretegis dilakukan dengan analisis skenario capaian indikator TPB yang terkait. Lebih lanjut akan dijelaskan pada BAB VI. Adapun ketarkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.8. Isu Paling Strategis Keterkaitan dengan Indikator TPB

No.	Isu Paling Strategis	Indikator TPB
1	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	2.1.1*, 2.1.2*, 2.3.1(a)
2	Tingginya potensi Bencana	1.5.1*, 1.5.3*, 1.5.4*, 11.5.1*, 11.b.1*, 13.1.1*,13.1.2*, 13.1.3*
3	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	11.6.1.(a), 12.3.1.(a), 12.4.2*, 12.5.1.(a), 14.1.1 (a)
4	Masih minimnya pemanfaatan potensi kehati dalam pertumbuhan ekonomi daerah	8.1.1*, 8.1.1. (a), 8.3.1.(a), 8.5.2*, 14.2.1*
5	Fluktuasi Kualitas dan debit air	1.4.1* , 6.1.1*, 6.2.1*, 6.3.1, 6.3.1.(a), 6.3.2.(a), 6.6.1*, 11.1.1.(a)
6	Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	14.5.1*, 14.6.1.(a)

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



5.2. Analisis Proyeksi Capaian Indikator TPB sampai dengan Tahun 2045

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, status capaian pelaksanaan TPB/SDG's sampai dengan tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai *baseline* berdasarkan metadata indikator TPB/SDGs dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 melalui pendekatan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Data-data capaian TPB yang digunakan mengacu pada capaian TPB yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 – 2026 dari 17 TPB terdapat 348 indikator TPB dan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdiri dari 165 indikator yang selaras dengan dan 183 indikator yang tidak selaras/tidak tersedia data. Dari 165 Indikator yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 304 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022.

Dari 304 indikator tersebut terdiri dari 13 Indikator Makro, 76 indikator IKU, 215 indikator IKD. Dengan menggunakan *baseline* data tahun 2021 dan target capaian RAD TPD (dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026) diolah dengan memproyeksikan capaian untuk masing-masing indikator hingga tahun 2030 dan 2045. Namun, tidak semua dari 304 indikator RAD yang diproyeksikan dapat disandingkan ketercapaiannya dengan target Nasional (Perpres No. 59 Tahun 2017), karena tidak semua indikator terdapat pada Lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017.

Rincian Rekapitulasi dan Status Capaian Proyeksi masing-masing Indikator TPB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.9. Rekapitulasi Status Capaian Proyeksi Indikator TPB

No.	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
		Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017	Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017			
1	Tanpa Kemiskinan	16	5	45		66
2	Tanpa Kelaparan	4	1	23		28
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	2	7		24
4	Pendidikan Berkualitas	4	4	5		13
5	Kesetaraan Gender	8	0	4		12



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
		Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017	Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017			
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	4	10		14
7	Energi Bersih dan Terjangkau	4	0	1		5
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	2	6		15
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	2	3		8
10	Berkurangnya Kesenjangan	7	0	0		7
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	7	5	14		26
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	2	7		11
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	3		5
14	Ekosistem Lautan	2	0	1		3
15	Ekosistem Daratan	2	2	1		5
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	26	0	20		46
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	0	10		16
Jumlah		115	29	160		304

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

Tabel 5.10. Capaian Indikator Proyeksi Indikator TPB

TPB 1 : Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.										
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,28	5,9	5,25	4,6	3,95	3,3	-
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8%	356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05	Tercapai
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05	Tercapai
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0	0	0	Tercapai
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53,8	56,57	61,22	65,87	70,52	75,17	-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1	0	0	0	-
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	Meningkat 17,2%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39	-	
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95	-	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39	-	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95	-
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100	100	100	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,2	100	100	100	Belum Tercapai
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	meningkat	97,8	98,7	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	meningkat menjadi 70%	78,5	84	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
	RPJMD - Rasio kemandapan jalan provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	meningkat	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	99,5	99,8	100	100	100	100	-
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53	62					-
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.										
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100	100	100	100	-
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,49	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72	-
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5	5	5	5	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	47872	55418	58.207,00	58.217,00	58.227,00	58.237,00	-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	368	401	457,00	512,00	567,00	622,00	-
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,14	2,28	2,65	3,05	3,45	3,85	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,4	4,5	8,00	11,50	15,00	18,50	-
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	14961	23053	23.936,00	23.866,00	23.796,00	23.726,00	-
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,54	7,25	8,61	9,81	11,01	12,21	-
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	Tercapai
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	51	81	131,00	181,00	231,00	281,00	-
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	410	550	775,20	994,20	1.213,20	1.432,20	-
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17,94	29,21	49,89	68,49	87,09	105,69	-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	20	20	20,00	20,00	20,00		-
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	40	100	220,00	320,00	420,00		-
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00	-
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
1.b	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.										
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 2 : Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00	-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	92	98	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	-
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,70	-
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	92	98	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	-
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00	-
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	Belum Tercapai
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.										
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.										
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.										
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.										
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.										
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.										
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.										
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.										
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.										
2.b	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.										
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.										
2.c	Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
3.2.1* (a)	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.										
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.										
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.										
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.										
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.										
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.										
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis										
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.										
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.										
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.										
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	Meningkat mjd 66%	62,58	63,92	66,04	68,19	70,34	72,49	Tercapai
3.7.2*	Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama.										
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	Menurun mjd 38%	19,1	17,6	15,10	12,60	10,10	7,60	Tercapai
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).										
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	Menurun mjd 2,28	2,7	2,61	2,46	2,31	2,16	2,01	Belum Tercapai
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100,00	100,00	100,00	100,00	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.8.1.[a] Unmet Need Pelayanan Kesehatan.											
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.											
3.8.2.a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.										
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.										
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Belum Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Belum Tercapai
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Belum Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Belum Tercapai
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.										
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	14.961	23.053	66,65	67,15	67,65	68,15	-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78	-
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	58,2	59,13	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	27,4	28,32	51,55	80,20	100,00	100,00	-
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.										
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
4.b	<p>Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.</p>										
4.b.1*	<p>Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.</p>										
4.c	<p>Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>										
4.c.1*	<p>Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.</p>										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 5 : Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.											
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60	-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	Meningkat	21,8	22,4	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.										
5.4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.										
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.										
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah										
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial										
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	Meningkat	11,54	15,09	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.										
5.a.1* (1)	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.										
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										
5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.										
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.										
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60	-
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten /Kota	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	19	20,60	22,60	24,60	26,60	-
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Utama	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
6.2 .	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
6.3 .	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
6.3.1.(A)	Persentase Limbah Cair Industri Yang Dikelola Secara Aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.										
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-
6.4 .	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.										
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.										
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya										
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya										
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.										
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).										
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.										
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53,78	58,28	65,78	73,28	80,78	88,28	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
6.6 .	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,3	83	180,00	280,00	380,00	480,00	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.										
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	Meningkat mjd 96,6%	99,5	99,8	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.										
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.										
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.										
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.										
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
7.3.1*	Intensitas energi primer.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai
7.a	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih										
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.										
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang										
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	Meningkat	3,40	4,70	5,96	7,36	8,76	10,16	Tercapai
8.1.1.(a)	PDB per kapita.										
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	Meningkat 7% pertahun	32,00	35,29	40,70	45,85	51,00	56,15	Belum Tercapai
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	48,29	56,13	69,86	83,06	96,26	109,46	-
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.										
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,40	4,50	8,00	11,50	15,00		-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,00	4,20	7,48	10,58	13,68		-
8.4	Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.										
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.										
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).										
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.										
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	Menurun	6,60	6,13	5,34	4,59	3,84	3,09	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.										
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
8.8	Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.										
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12,36	25,01	46,11	67,21	88,31	100,00	-
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.										
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 8%	1,24	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	Belum Tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.										
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	Meningkat	1,50	1,50	1,90	2,40	2,90	3,40	Tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.										
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	Meningkatnya kemantapan jalan nasional rnerjadi 97%	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	Belum tercapai
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	-
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.										
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.										
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.										
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.										
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.										
9.2	Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.										
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.										
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.										
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 21,6%	8,75	9,15	9,81	10,46	11,11	11,76	Belum Tercapai
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	Meningkat	368	401	457,00	512,00	567,00	622,00	Tercapai
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	Meningkat	15,7	16,7	18,28	19,88	21,48	23,08	Tercapai
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	Meningkat	41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.										
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.										
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.										
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.										
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.										
9.5.2* Ju	mlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.										
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Rasio Gini.											
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	Menurun menjadi 0,36	0,31	0,307	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	Tercapai
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	Menurun menjadi 7-8%	356,45	347,27	331,50	316,35	301,20	286,05	286,05	Tercapai
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	7,34	Tercapai
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	Meningkat mjd 71	68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74	Tercapai	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.											
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.										
10.5	Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.										
10.05.01	Financial Soundness Indicator.										
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.										
10.7 .	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.										
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.										
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.										
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.										
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.										
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.										
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.										
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11.2 .	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas										
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	19.000.000	23.000.000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019	-
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	19000000	23000000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019	-
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk										
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk										
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis										
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)										
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10916	11592	12.661,40	13.659,40	14.657,40	15.655,40	-
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53	62	77,00	92,00	107,00	122,00	-
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar										
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB										
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaannya										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	Belum Tercapai
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola										
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)										
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10										
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua										
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.											
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.											
11.c.1 -												
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
12.1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
s											
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.										
12.03.01 (a)?	Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)										
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan										
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.										
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
12.4.2* (a)?	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya										
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional										
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi										
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah										
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa										
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	84,5	89,5	94,28	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	81	84	89,00	94,00	99,00	100,00	-
12.a	Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	75,60	99,40	100,00	100,00	Tercapai
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan										
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	-
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications										
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 14 : Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi										
14.01.01 (a)?	Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung										
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif										
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	477.362	512.013	571,91	630,16	688,41	746,66	-
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										
14.5 P	ada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)										
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha										
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	87%	82	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14.7	Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara										
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)										
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar										
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
14.c	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want										
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 15 : Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Belum Tercapai
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya										
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)										
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari										
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	Meningkat	40	100	200,00	300,00	400,00	500,00	Tercapai
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi										
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,29	2,79	5,29	7,79	10,29	12,79	-
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	Meningkat	2,85	5,71	10,46	15,21	19,96	24,71	Tercapai
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.										
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
15.4.2*	Indeks Tutupan Hijau Pegunungan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Belum Tercapai
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal										
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal										
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan										
15.09.01 (a)?	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
(b)?	integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi										
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.										
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3	2	0,40	0,00	0,00	0,00	-
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.										
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.										
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.										
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10	40	90,00	100,00	100,00	100,00	-
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10	40	90,00	100,00	100,00	100,00	-
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun	2,1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.										
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.										
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.										
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)										
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40	-
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B										
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BB	A	A	A	A	A	-
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8	14	23,20	32,20	41,20	50,20	-
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB B										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40	-
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.										
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	84,5	89,5	93,66	98,86	100,00	100,00	-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	81	84	89,00	94,00	99,00	100,00	-
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11,54	15,09	17,93	21,48	25,03	28,58	-
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan										
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,01	69,25					-
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74	-
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-
16.a	Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.										
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.										
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34	-
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7	7	10,24	14,04	17,84	21,64	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34	-
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7	7	10,24	14,04	17,84	21,64	-
17.10	Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.										
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).										
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati										
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.										
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp)	IKD	Rp. Juta	Meningkat 5%	1420,99	1507,97	1.654,12	1.799,12	1.944,12	2.089,12	Tercapai
17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.										
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.										
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).										
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.										
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.										
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.											
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan										
b)?	mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.										
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).										
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.										
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.										



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian
						2025	2030	2035	2040	2045	
17.03.02 V	olume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.										
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.										
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.06.01 L	anggaran broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya										
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga										
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)										
17.8	Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Persentase pengguna internet										

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

5.3. Analisis Capaian TPB Berdasarkan OPD

Analisis capaian TPB berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan terhadap indikator-indikator TPB yang selaras dengan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat dan indikator-indikator tersebut terdapat dalam Lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017.

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) OPD yang terkait dengan indikator-indikator pada RAD TPB yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 5.11. Rekapitulasi Capaian TPB Berdasarkan OPD

No.	OPD Pelaksana	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah	Total
			Indikator yang Selaras RAD TPB	Indikator <i>tidak</i> Indikator yang Selaras RAD TPB				
1	Bappeda	TPB 1	18	5	-		23	75
		TPB 2	16	-	-		16	
		TPB 4	2	2	-		4	
		TPB 6	2	-	-		2	
		TPB 8	5	3	-		8	
		TPB 9	-	2	-		2	
		TPB 10	1	-	-		1	
		TPB 11	2	1	-		3	
		TPB 16	7	7	-		14	
		TPB 17	2	-	-		2	
2	Biro Perekonomian	TPB 1	1	1	-		2	7
		TPB 8	3	1	-		4	
		TPB 11	1	-	-		1	
3	Dinas Sosial	TPB 1	7		-		7	13
		TPB 4	-	1	-		1	
		TPB 10	2	-	-		2	
		TPB 11	1	-	-		1	
		TPB 13	2	-	-		2	
4	Dinas Kesehatan	TPB 1	16	3	-		19	60
		TPB 2	3	4	-		7	
		TPB 3	11	7	-		18	
		TPB 4	-	1	-		1	
		TPB 6	2	1	-		3	
		TPB 8	-	1	-		1	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	OPD Pelaksana	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah	Total
			Indikator yang Selaras RAD TPB		Indikator tidak Indikator yang Selaras RAD TPB			
		TPB 9	-	1	-		1	
		TPB 10	1		-		1	
		TPB 11	1	1	-		2	
		TPB 16	-	7	-		7	
5	Dinas Pendidikan	TPB 1	4	2	-		6	32
		TPB 2	3	-	-		3	
		TPB 4	3	8	-		11	
		TPB 8	-	1	-		1	
		TPB 9	-	1	-		1	
		TPB 16	3	7	-		10	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pencatatan Sipil dan KB	TPB 1	-	2	-		2	52
		TPB 2	3	-	-		3	
		TPB 3	2	1	-		3	
		TPB 4	-	1	-		1	
		TPB 5	12	-	-		12	
		TPB 8	-	1	-		1	
		TPB 10	1	1	-		2	
		TPB 11	3	3	-		6	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TPB 1	1	-	-		1	7
		TPB 8	2	-	-		2	
		TPB 9	1	-	-		1	
		TPB 16	3	-	-		3	
8	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	TPB 1	6	1	-		7	27
		TPB 3	1	-	-		1	
		TPB 6	4	3	-		7	
		TPB 9	1	1	-		2	
		TPB 11	2	2	-		4	
		TPB 12	-	3	-		3	
9	Dinas Lingkungan Hidup	TPB 1	2	1	-		3	22
		TPB 6	-	4	-		4	
		TPB 11	3	2	-		5	
		TPB 12	3	2	-		5	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	OPD Pelaksana	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah	Total
			Indikator yang Selaras RAD TPB		Indikator tidak Selaras RAD TPB			
		TPB 14	1	-	-		1	
		TPB 16	3	1	-		4	
10	Dinas Perhubungan	TPB 1	-	1	-		1	13
		TPB 3	-	2	-		2	
		TPB 8	3	-	-		3	
		TPB 9	-	2	-		2	
		TPB 10			-		0	
		TPB 11	1	4	-		5	
11	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	TPB 1	2	-	-		2	9
		TPB 6	1	-	-		1	
		TPB 7	5	-	-		5	
		TPB 12	1	-	-		1	
12	Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan	TPB 1	4	-	-		4	5
		TPB 11	1	-	-		1	
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TPB 10	1	-	-		1	7
		TPB 16	6	-	-		6	
14	Badan Pendapatan daerah	TPB 8	4	-	-		4	12
		TPB 11	1	-	-		1	
		TPB 17	4	3	-		7	
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TPB 8	3	-	-		3	7
		TPB 11	1	-	-		1	
		TPB 16	3	-	-		3	
16	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	TPB 1	-	2	-		2	8
		TPB 2	3	-	-		3	
		TPB 16	3	-	-		3	
17	Dinas Pariwisata	TPB 8	3	-	-		3	3
18	Badan Pengembangan SDM	TPB 1	-	1	-		1	5
		TPB 4	-	1	-		1	
		TPB 12	2	-	-		2	
		TPB 16	1	-	-		1	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	TPB 1	-	1	-		1	9
		TPB 2	6	-	-		6	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	OPD Pelaksana	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah	Total
			Indikator yang Selaras RAD TPB		Indikator tidak Selaras RAD TPB			
		TPB 14	2	-	-		2	
20	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	TPB 6	1	-	-		1	1
21	Biro Hukum	TPB 16	5	-	-		5	5
22	Biro Organisasi	TPB 16	4	-	-		4	4
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TPB 16	3	-	-		3	3
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TPB 1	4	2	-		6	12
		TPB 11	1	2	-		3	
		TPB 13	1	2	-		3	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	TPB 6	2	-	-		2	4
		TPB 11	1	1	-		2	
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	TPB 1	5	5	-		10	16
		TPB 4	-	2	-		2	
		TPB 8	1	2	-		3	
		TPB 9	-	1	-		1	
27	Dinas Kehutanan	TPB 1	3	-	-		3	10
		TPB 2	2	-	-		2	
		TPB 15	5	-	-		5	
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TPB 1	2	4	-		6	17
		TPB 2	3	-	-		3	
		TPB 8	4	-	-		4	
		TPB 9	-	2	-		2	
		TPB 10	1	-	-		1	
		TPB 11	1	-	-		1	
29	Dinas Pangan	TPB 1	7	-	-		7	30
		TPB 2	20	3	-		23	
30	Satuan Polisi Pamong Praja	TPB 1	1	-	-		1	2
		TPB 11	1	-	-		1	
31	Inspektorat	TPB 16	3	-	-		3	3
32	Dinas Penanaman Modal Perizinan	TPB 8	3	-	-		3	9
		TPB 11	1	-	-		1	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	OPD Pelaksana	Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah	Total
			Indikator yang Selaras RAD TPB		Indikator <i>tidak</i> Selaras RAD TPB			
	Terpadu Satu Pintu	TPB 16	5	-	-		5	
33	Badan Pengembangan dan Penelitian	TPB 16	3	-	-		3	3

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

Tabel 5.12. Capaian Proyeksi Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD

TPB 1 : Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.											
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,28	5,9	5,25	4,6	3,95	3,3	-	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Nakertrans
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8%	356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05	Tercapai	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05	Tercapai	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.											
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0	0	0	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfotik
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53,8	56,57	61,22	65,87	70,52	75,17	-	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1	0	0	0	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	Meningkat 17,2%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Sosial



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Sosial
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39	-	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas PTPH, Dinas PTPH, Biro Perekonomian, Dinas Pendidikan
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95	-	Bappeda, Dinas Kesehatan
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39	-	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas PTPH, Dinas PTPH, Biro Perekonomian, Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95	-	Bappeda, Dinas Kesehatan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga,
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100	100	100	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,2	100	100	100	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	meningkat	97,8	98,7	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	meningkat menjadi 70%	78,5	84	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100	100	100	100	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	meningkat	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	99,5	99,8	100	100	100	100	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.											
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												Pertanahan
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.											
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53	62					-	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Dinas Sosial
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.											
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100	100	100	100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana											
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,49	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72	-	Multisektor (Bbrp OPD terkait)
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100	100	100	100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	100	100	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.											
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5	5	5	5	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	47872	55418	58.207,00	58.217,00	58.227,00	58.237,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	368	401	457,00	512,00	567,00	622,00	-	Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,14	2,28	2,65	3,05	3,45	3,85	-	Bappeda, Biro Perekonomian , Dinas Koperasi UKM
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,4	4,5	8,00	11,50	15,00	18,50	-	Bappeda, Biro Perekonomian , Dinas Koperasi UKM
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	14961	23053	23.936,00	23.866,00	23.796,00	23.726,00	-	Bappeda, Dinas Koperasi UKM, BPSDM
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	6,54	7,25	8,61	9,81	11,01	12,21	-	Bappeda, Dinas Kominfotik, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM,
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	51	81	131,00	181,00	231,00	281,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	410	550	775,20	994,20	1.213,20	1.432,20	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17,94	29,21	49,89	68,49	87,09	105,69	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	20	20	20,00	20,00	20,00		-	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	40	100	220,00	320,00	420,00		-	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.											
1.b	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.											
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 2 : Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfo
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00	-	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	92	98	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Pangan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	-	Dinas Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,70	-	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	92	98	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Pangan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	-	Dinas Pangan
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.											
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfo
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfo
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	-	



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).											
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00	-	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00	-	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5	82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40	Belum Tercapai	Dinas Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.											
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Kesehatan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan											
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kehutanan
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.											
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.											
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.											
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.											
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.											
2.b	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.											
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.											
2.c	Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.												
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).												
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.												
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.												
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.												
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.												



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.											
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.											
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.											
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.											
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.											
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.											
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.											
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.											
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.											
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.											
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.											
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.											
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.											
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.											
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.											
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.											
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.											
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.											
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	Meningkat mjd 66%	62,58	63,92	66,04	68,19	70,34	72,49	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2*	Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama.											
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	Menurun mjd 38%	19,1	17,6	15,10	12,60	10,10	7,60	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).											
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	Menurun mjd 2,28	2,7	2,61	2,46	2,31	2,16	2,01	Belum Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.											
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 28%	13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.8.1.[a] Unmet Need Pelayanan Kesehatan.												
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.												



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
3.8.2.a	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).											
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.											
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.											
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.											
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,											
	(ii) matematika.											
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.											
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.											
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pendidikan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.											
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	14.961	23.053	66,65	67,15	67,65	68,15	-	Bappeda, Dinas Koperasi UKM, BPSDM
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78	-	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).											
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.											
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.											
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.											
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	58,2	59,13	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	27,4	28,32	51,55	80,20	100,00	100,00	-	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.											
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).											
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	-	Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												Pendidikan
4.b	Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.											
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.											
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 5 : Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.												
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.												
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												KB
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	Meningkat	21,8	22,4	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.											
5.4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.											
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.											
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah											
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												Penduduk Dan KB
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial												
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pembuat kebijakan (%)	IKD	%	Meningkat	11,54	15,09	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.											
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.											
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.											
5.a.1* (1)	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.											
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.											
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.											
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.											
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten /Kota	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	19	20,60	22,60	24,60	26,60	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Utama	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.											
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.2 .	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86	95	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.3 .	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman											
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.3.1.(A)	Persentase Limbah Cair Industri Yang Dikelola Secara Aman											
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku											
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku											
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup
6.4 .	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.											
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.											
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.											
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.											
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).											
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.											
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53,78	58,28	65,78	73,28	80,78	88,28	-	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
6.6 .	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.											
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,3	83	180,00	280,00	380,00	480,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	Meningkat mjd 96,6%	99,5	99,8	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.											
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.											
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.											
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.											
7.3.1*	Intensitas energi primer.											
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.a	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih											
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.											
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang											
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)											
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	Meningkat	3,40	4,70	5,96	7,36	8,76	10,16	Tercapai	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag
8.1.1.(a)	PDB per kapita.											
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	Meningkat 7% pertahun	32,00	35,29	40,70	45,85	51,00	56,15	Belum Tercapai	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	48,29	56,13	69,86	83,06	96,26	109,46	-	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.											
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin											
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,40	4,50	8,00	11,50	15,00		-	Bappeda, Biro Perekonomian , Dinas Koperasi UKM
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,00	4,20	7,48	10,58	13,68		-	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.4	Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	pengarah.											
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.											
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).											
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	Menurun	6,60	6,13	5,34	4,59	3,84	3,09	Tercapai	Bappeda, Dinas Nakertrans, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.											
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).											
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.8	Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.											
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.											
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12,36	25,01	46,11	67,21	88,31	100,00	-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.											
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.											
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 8%	1,24	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Pariwisata, Bapenda
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.											
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	Meningkat	1,50	1,50	1,90	2,40	2,90	3,40	Tercapai	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.											
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.											
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 97%	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	Belum tercapai	Dinas BMCKTR, Dinas Perhubungan
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	-	
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.											
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.											
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.											
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.											
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.											
9.2	Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.											
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 21,6%	8,75	9,15	9,81	10,46	11,11	11,76	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	Meningkat	368	401	457,00	512,00	567,00	622,00	Tercapai	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	Meningkat	15,7	16,7	18,28	19,88	21,48	23,08	Tercapai	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	Meningkat	41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00	Tercapai	
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.											
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.											
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.											
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.											
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.											
9.5.2* Ju	mlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.											
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Rasio Gini.											
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	Menurun menjadi 0,36	0,31	0,307	0,31	0,31	0,31	0,31	Tercapai	Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Dinas Perindag
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	Menurun menjadi 7-8%	356,45	347,27	331,50	316,35	301,20	286,05	Tercapai	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.											
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.											
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.											
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.											
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.											
10.2	Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.											
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.											
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	Meningkat mjd 71	68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												KB
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.											
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.											
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.											
10.5	Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.											
10.05.01	Financial Soundness Indicator.											
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
10.7 .	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.											
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.											
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.											
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.											
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.											
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.											
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												Desa
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
11.2 .	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.											
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi public											
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	19.000.000	23.000.000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019	-	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89	-	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	19000000	23000000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019	-	Dinas Perhubungan
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.											
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk											
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis											
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10916	11592	12.661,40	13.659,40	14.657,40	15.655,40	-	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	53	62	77,00	92,00	107,00	122,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Sosial
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar											
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolannya											
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola											
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)											
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10											
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara											
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99	-	Dinas Lingkungan Hidup
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.											
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendali



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
												an Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.											
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.											
11.c.1 -												
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
12.1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.											
s												
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.											
12.03.01 (a)?	Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)											
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan											
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.											
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline											
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
12.4.2* (a)?	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.											
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	17	23	33,00	43,00	53,00	63,00	-	Dinas Lingkungan Hidup



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.											
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya											
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional											
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa											
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.											
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.											
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	84,5	89,5	94,28	100,00	100,00	100,00	-	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres)	81	84	89,00	94,00	99,00	100,00	-	Badan Pengembangan Sumber Daya



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
				59/2017)								Manusia
12.a	Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.											
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	75,60	99,40	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan											
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Sosial
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030											
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Sosial



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana											
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun											
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 14 : Ekosistem Lahan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi											
14.01.01 (a)?	Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung											
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut											
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif											
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	477.362	512.013	571,91	630,16	688,41	746,66	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
14.5 P	ada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)											
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha											
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	87%	82	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.7	Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara											
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)											
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
14.c	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want											
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 15 : Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Belum Tercapai	Dinas Kehutanan
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya											
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.											
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari											
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	Meningkat	40	100	200,00	300,00	400,00	500,00	Tercapai	Dinas Kehutanan
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan perahun (deforestasi) (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres	1,29	2,79	5,29	7,79	10,29	12,79	-	Dinas Kehutanan



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
				59/2017)								
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	Meningkat	2,85	5,71	10,46	15,21	19,96	24,71	Tercapai	Dinas Kehutanan
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.											
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											
15.4.2*	Indeks Tutupan Hijau Pegunungan											
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Belum Tercapai	Dinas Kehutanan
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal											
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal											
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan											
15.09.01 (a)?	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan											
(b)?	integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi											
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.											
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.											
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.											
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.											
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3	2	0,40	0,00	0,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.											
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.											
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).											
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.											
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10	40	90,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	10	40	90,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.											
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun	2,1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.											
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	Menguatnya sistem perlindungan anak yang responsive terhadap keragaman karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya	65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Biro Hukum
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.											
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Biro Hukum



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.											
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.											
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.											
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).											
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.											
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40	-	Bappeda, Biro Organisasi



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B											
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BB	A	A	A	A	A	-	Bappeda, Biro Organisasi
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	8	14	23,20	32,20	41,20	50,20	-	Biro Organisasi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB B											
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40	-	Bappeda, Biro Organisasi
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.											
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.											
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	84,5	89,5	93,66	98,86	100,00	100,00	-	Bappeda, Dinas PMPTSP



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	81	84	89,00	94,00	99,00	100,00	-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).											
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-	Inspektorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Disnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfo, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).											
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-	Inspektorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Disnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfo, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	11,54	15,09	17,93	21,48	25,03	28,58	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.											
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi											
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan											
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,01	69,25					-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88	-	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.											
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.a	Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.											
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.											
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

TPB 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.											
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-	Bappeda, Bapenda
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34	-	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.											
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-	Bappeda, Bapenda
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-	Badan Pendapatan Daerah



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7	7	10,24	14,04	17,84	21,64	-	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.											
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00	-	Bappeda, Bapenda
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34	-	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27	-	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7	7	10,24	14,04	17,84	21,64	-	Badan Pendapatan Daerah
17.10	Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.											
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).											
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati											
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas											
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp)	IKD	Rp. Juta	Meningkat 5%	1420,99	1507,97	1.654,12	1.799,12	1.944,12	2.089,12	Tercapai	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.											
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.											
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.											
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).											
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.											
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs											
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.											
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.											
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.											
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan											
b)?	mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.											
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.											
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).											
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.											



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	OPD Pelaksana
						2025	2030	2035	2040	2045		
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.											
17.03.02 V	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.											
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.											
17.06.01 L	Anggaran broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya											
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga											
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.											
17.8.1*	Persentase pengguna internet											

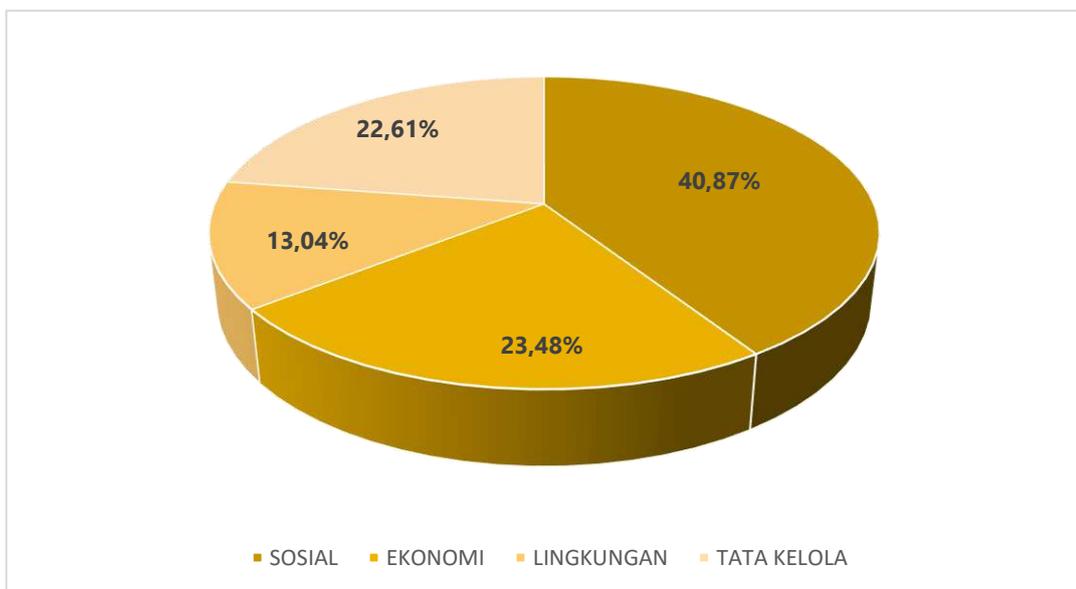
5.4. Analisis Proyeksi Capaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada bagian ini dikelompokkan berdasarkan tujuan dari empat pilar yang ada, yaitu: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Pendekatan yang dilakukan tetap berdasarkan pada RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian indikator TPB dengan indikator-indikator pada RPJMD serta proyeksi capaian TPB dengan target nasional..

Tabel 5.13. Rekapitulasi Capaian TPB berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Total	Persentase (%)
	Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017			
Sosial	47	12	84		143	40,87
Ekonomi	27	4	20		51	23,48
Lingkungan	15	13	36		64	13,04
Hukum dan Tata Kelola	26	0	20		46	22,61
	115	29	160		304	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



Gambar 5.2. Capaian TPB berdasarkan Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



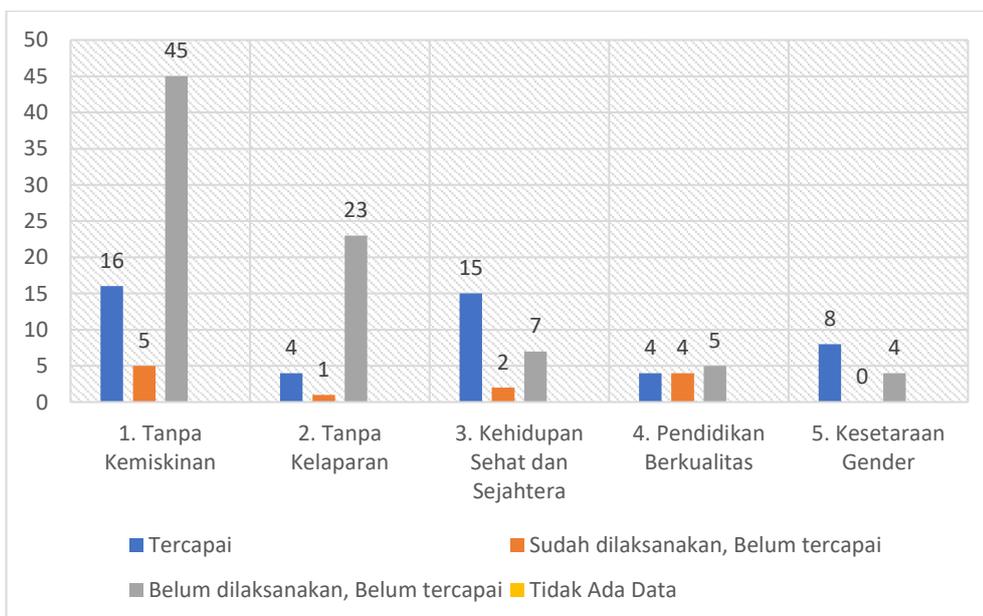
5.4.1. Analisis Proyeksi Capaian TPB Pilar Sosial

Terdapat 5 (lima) TPB pada TPB Pilar Sosial antara lain TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4 dan TPB 5. Terdapat 143 indikator TPB selaras dengan indikator pada RAD TPB namun terdapat 84 indikator yang tidak ada pada lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017. Secara rinci ketercapaian TPB pada pular sosial dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 5.14. Rekapitulasi Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Sosial

Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
	Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		
1. Tanpa Kemiskinan	16	5	45		66
2. Tanpa Kelaparan	4	1	23		28
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	2	7		24
4. Pendidikan Berkualitas	4	4	5		13
5. Kesetaraan Gender	8	0	4		12
Jumlah	47	12	84		143

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



Gambar 5.3. Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Sosial

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



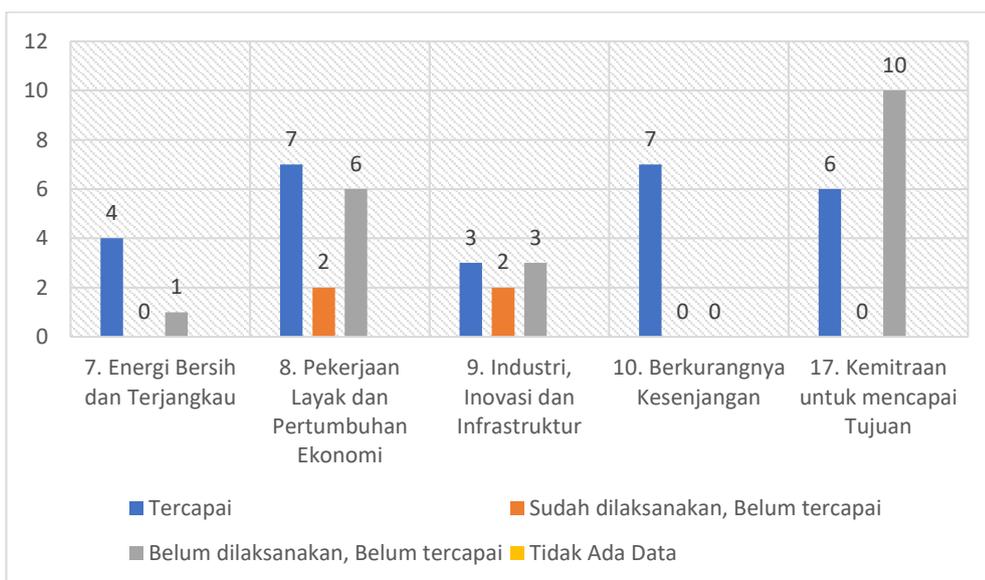
5.4.2. Analisis Capaian TPB Pilar Ekonomi

Terdapat 5 (lima) TPB pada TPB Pilar Ekonomi antara lain TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17. Terdapat 51 indikator TPB selaras dengan indikator pada RAD TPB namun terdapat 20 indikator yang tidak ada pada lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017. Secara rinci ketercapaian TPB pada pular sosial dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 5.15. Rekapitulasi Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Ekonomi

Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
	Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		
7. Energi Bersih dan Terjangkau	4	0	1		5
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	2	6		15
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	2	3		8
10. Berkurangnya Kesenjangan	7	0	0		7
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	0	10		16
Jumlah	27	4	20		51

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



Gambar 5.4. Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Ekonomi

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



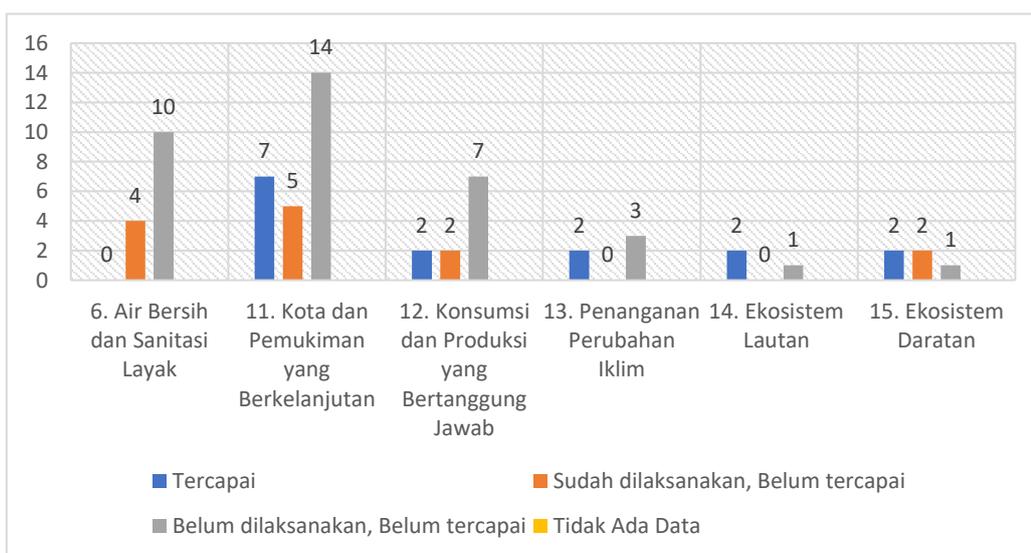
5.4.3. Analisis Capaian TPB Pilar Lingkungan

Terdapat 6 (enam) TPB pada TPB Pilar lingkungan antara lain TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14 dan TPB 15. Terdapat 64 indikator TPB selaras dengan indikator pada RAD TPB namun terdapat 36 indikator yang tidak ada pada lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017. Secara rinci ketercapaian TPB pada pular sosial dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 5.16. Rekapitulasi Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Lingkungan

Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
	Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	0	4	10		14
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	7	5	14		26
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	2	7		11
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	3		5
14. Ekosistem Lautan	2	0	1		3
15. Ekosistem Daratan	2	2	1		5
Jumlah	15	13	36		64

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



Gambar 5.5. Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Lingkungan

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



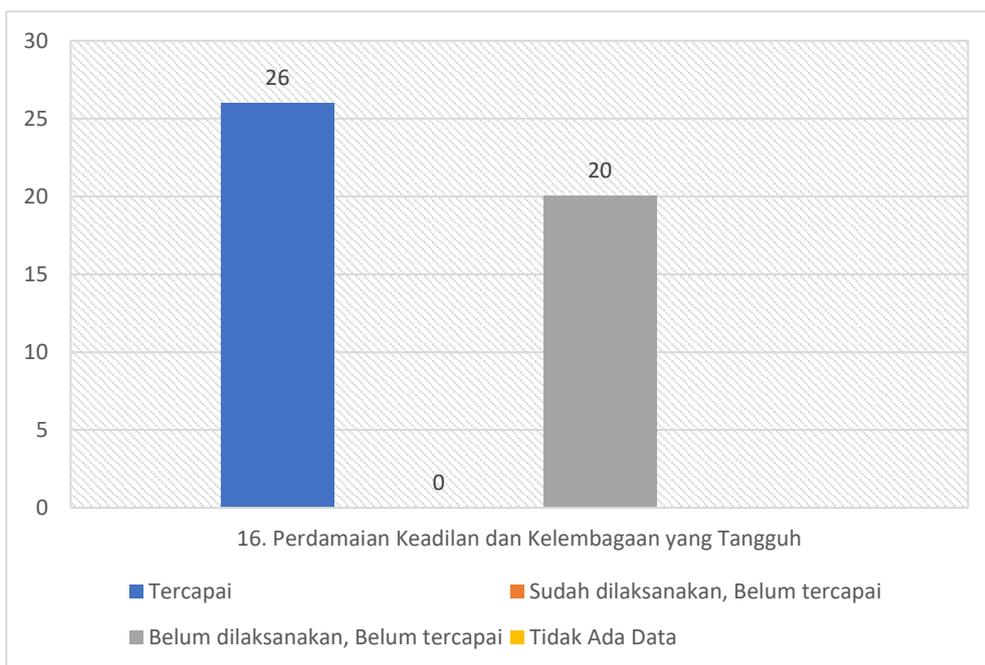
5.4.4. Analisis Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Hanya terdapat 1 (satu) TPB pada TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola yaitu TPB 16. Terdapat 64 indikator TPB selaras dengan indikator pada RAD TPB namun terdapat 36 indikator yang tidak ada pada lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017. Secara rinci ketercapaian TPB pada pular sosial dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 5.17. Rekapitulasi Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator TPB	Tercapai	Sudah dilaksanakan, Belum tercapai	Belum dilaksanakan, Belum tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
	Indikator ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		Indikator <i>tidak</i> ada pada lampiran Perpres No. 59/2017		
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	26	0	20		46
Jumlah	26	0	20		46

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023



Gambar 5.6. Proyeksi Capaian TPB berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sumber : Hasil Analisis Tim POKJA KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat, 2023

Bab VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1. Analisis Skenario dan Rekomendasi Capaian TPB

Analisis Skenario capaian TPB didasarkan kepada capaian RAD TPB yang sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, Analisis capaian TPB dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6.16. Analisis Skenario Capaian TPB

TPB 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Alternatif Skenario		Rekomendasi		
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan	
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.																	
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.																	
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	Menurun mjd 7-8%	6,28	5,9	5,25	4,6	3,95	3,3	Tercapai	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Perkimtan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Nakertrans	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-				
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																	
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05		Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan daya saing daerah			
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																	
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		356,45	347,27	331,5	316,35	301,2	286,05		Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-				
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.																	
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0	0	0	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfortik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			1. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak; 2. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak; 3. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum; 4. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah; 5. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting; 6. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat	1. Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan 3. Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%		53,8	56,57	61,22	65,87	70,52	75,17		Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-				
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1	0	0	0		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Memberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		

	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	Meningkat 17,2%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dasar anak terlanjar, disabilitas terlanjar dan lanjut usia terlanjar di dalam panti
	RPJMD - Persentase Anak terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dasar anak terlanjar, disabilitas terlanjar dan lanjut usia terlanjar di dalam panti
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dasar anak terlanjar, disabilitas terlanjar dan lanjut usia terlanjar di dalam panti
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.															
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.															
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				Sumatera Barat.
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.															
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM		72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas PTPH, Dinas PTPH, Biro Perekonomian, Dinas Pendidikan				
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan				
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun		69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95		Bappeda, Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan IPM beserta komponen pendukungnya
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai		72,74	74,16	76,24	78,29	80,34	82,39		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas PTPH, Dinas PTPH, Biro Perekonomian, Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun		69,8	70,35	71,25	72,15	73,05	73,95		Bappeda, Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak,
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan IPM beserta komponen pendukungnya
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100	100	100	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan untuk semua penduduk, baik bagi ibu, anak, remaja, pemuda dan lanjut usia.

	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,2	100	100	100	100	Belum Tercapai		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan	
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	meningkat	97,8	98,7	100	100	100	100	100	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	meningkat menjadi 70%	78,5	84	81,36	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Akses Sanitasi Layak	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		86	95	100	100	100	100	100			Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,	
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100	100	100	100	100			Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat	
	RPJMD - Rasio kemapatan jalan provinsi	IKD	Rasio		75	81	88,48	96,58	100,00	100,00	100,00			Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatnya kualitas dan infrastruktur	Penyediaan pasokan air minum	
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		17	23	33,00	43,00	53,00	63,00				Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur	Peningkatan Akses Sanitasi Layak	
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	100,00	Belum Tercapai		Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89				Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy)	
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	meningkat	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio		99,5	99,8	100	100	100	100	100			Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar,		
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.															Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%		100	100	100	100	100	100	100			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan	
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.																		
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Pemfasilitasian penyelesaian masalah dan konflik pertanahan
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%		100	100	100	100	100	100	100			Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana	
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%		53	62								Satuan Polisi Pamong Praja	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	100	100	100	100			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat	

	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	100	100	100		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.															
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015/2030															
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100	100	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana															
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks		0,49	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72		Multisektor (Bbrp OPD terkait)	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kesiapsiagaan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%		100	100	100	100	100	100		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100	100	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%		100	100	100	100	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100	100	100	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penanganan tanggap darurat
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.															
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.															
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		5	5	5	5	5	5	Belum termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan; 2. Memperluas akses pengelolaan ekosistem hutan; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 4. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi hutan dan fungsi ekosistem lainnya; 5. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60		Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43		Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta		47872	55418	58.207,00	58.217,00	58.227,00	58.237,00		Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00		Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00		Belum termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan	Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani hutan	1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan; 2. Memperluas akses pengelolaan ekosistem hutan; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; 4. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi hutan dan fungsi ekosistem lainnya; 5. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra		368	401	457,00	512,00	567,00	622,00			Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM, Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM, Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%		2,14	2,28	2,65	3,05	3,45	3,85			Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas Koperasi UKM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%		2,4	4,5	8,00	11,50	15,00	18,50			Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas Koperasi UKM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
	RPJMD - Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang		14961	23053	23.936,00	23.866,00	23.796,00	23.726,00			Bappeda, Dinas Koperasi UKM, BPSDM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Fasilitasi penumbuhan millennial entrepreneur dan Women entrepreneur
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%		6,54	7,25	8,61	9,81	11,01	12,21			Bappeda, Dinas Kominfotik, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya peran ekonomi digital	Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan melek teknologi digital, Penumbuhan dan pengembangan marketplaceFasilitasi penumbuhan pelaku e-commerce
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD		51	81	131,00	181,00	231,00	281,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa		410	550	775,20	994,20	1.213,20	1.432,20			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%		17,94	29,21	49,89	68,49	87,09	105,69			Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%		2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78			Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%		20	20	20,00	20,00	20,00				Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani hutan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial

	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit		40	100	220,00	320,00	420,00			Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Perbenihan Tanaman Hutan, Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Cara Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha		41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.															
1.b	Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.															
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.															

TPB 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).																
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfotik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Penyusunan Kebijakan tentang pencegahan stunting ditingkat Provinsi, Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan, Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/keompok masyarakat lainnya	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00		Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%		92	98	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00		Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40		Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.																

	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,70			Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%		92	98	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		833.110	871.165	232,23	0,00	0,00	0,00			Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40			Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.																
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfotik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	1. Penusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan 3. Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00			Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.																

	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	Menurun mjd 28%	18,44	12,5	1,92	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Perindag, Diskominfotik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	1. Penyusunan Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting ditingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Rembuk stunting pada tahapan perencanaan Program/Kegiatan 3. Mobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat serta dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelempok masyarakat lainnya
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00			Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).															
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks		79,13	82,05	86,90	91,50	96,10	100,00		Bappeda, Dinas Pangan, Dinas PTPH, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton		833.110	871.165	232.23	0,00	0,00	0,00		Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor		82,5	84,5	87,40	90,40	93,40	96,40		Dinas Pangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau, Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis, Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.															
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.															
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan															
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan															
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00		Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Peternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.																
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai		100,99	101,6	102,60	103,60	104,60	105,60			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai		103,47	105,03	107,63	110,23	112,83	115,43			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan,	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%		5	5	5,00	5,00	5,00	5,00			Bappeda, Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.																
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.																
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.																
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragaman dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.																
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.																

TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).																
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.																
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%		78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,	
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.																
3.2.1* (a)	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.																
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Menurunnya prevalensi stunting	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.																
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,	
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.																
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.																
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.																
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.																
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.																
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.																

	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.															
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.															
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.															
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.															
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.															
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.															
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.															
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis															
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.															
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.															
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.															
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.															
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.															
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	Meningkat mjd 66%	62,58	63,92	66,04	68,19	70,34	72,49	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya
3.7.2*	Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama.															

	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	Menurun mjd 38%	19,1	17,6	15,10	12,60	10,10	7,60	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).																
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	Menurun mjd 2,28	2,7	2,61	2,46	2,31	2,16	2,01	Tidak Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.																
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	Meningkat 70%	78,5	84	92,96	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%		13	8,5	1,00	0,00	0,00	0,00			Dinas Kesehatan			Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		86	95	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Kesehatan			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat mjd 63%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.																
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89			Dinas Perhubungan				
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89			Dinas Perhubungan				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.																
3.8.2.a	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).																

	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	86,1	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.																
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.																
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.																
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	Meningkat menjadi 95%	75	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Kesehatan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.																
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.																
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.																
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.																

TPB 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.																
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.																
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.																
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan, Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan			
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan			
4.1.2.[a]	Anak-anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.																
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	menjadi 8,8 tahun	9,18	9,47	9,97	10,47	10,97	11,47	Tercapai	Bappeda, Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	93,22	97,7	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	52,38	56,88	64,38	71,88	79,38	86,88	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan			
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	Meningkat mjd 91,63%	32,77	37,27	44,77	52,27	59,77	67,27	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan			
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.																
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.																
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.																

4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.																
	RPJMD - Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang		14.961	23.053	66,65	67,15	67,65	68,15		Bappeda, Dinas Koperasi UKM, BPSDM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Fasilitasi penumbuhan millennial entrepreneur dan Women entrepreneur
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%		2	4,2	7,48	10,58	13,68	16,78		Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).															
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.															
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).															
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).															
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.															
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.															
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.															
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.															
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%		58,2	59,13	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%		27,4	28,32	51,55	80,20	100,00	100,00		Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 715 tahun.															
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.															
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).															
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.															

	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
4.b	Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.																
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.																
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.																
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.																

TPB 5. Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.																
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%		4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB			Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.																
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.																

	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.																
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.																
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.																

	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	Meningkat	21,8	22,4	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.															
5.4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.															
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.															
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.															
5.5.1*																
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	Meningkat	10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
5.5.2*																
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	Meningkat	11,54	15,09	23,40	24,40	25,40	26,40	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.															
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.															
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.															
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.															
5.a.1* (1)	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.															
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.															
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.															
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.															

5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.																	
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.																	
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%		4,15	4,6	5,35	6,10	6,85	7,60			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten /Kota		17	19	20,60	22,60	24,60	26,60			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat		Utama	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor	Mentor			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Melaksanakan pemberian penghargaan dan pembinaan kepada ASN

TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.																
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.																
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.																
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.																
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Akses Sanitasi Layak	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%		86	95	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Kesehatan			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Akses Sanitasi Layak	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.																
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman																
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional	
6.3.1.(A)	Persentase Limbah Cair Industri Yang Dikelola Secara Aman																

	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.																
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku																
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar, Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam, Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran, Penanganan limbah B3, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, Rehabilitasi Hutan dan lahan, Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim, Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy), Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah, Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak), Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat, Meningkatkan pengawasan
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar, Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam, Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran, Penanganan limbah B3, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, Rehabilitasi Hutan dan lahan, Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim, Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy), Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah, Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak), Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat, Meningkatkan pengawasan

6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku																	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar, Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar, Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam, Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran, Penanganan limbah B3, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, Rehabilitasi Hutan dan lahan, Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim, Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy), Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah, Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak), Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat, Meningkatkan pengawasan	
6.4 .	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.																	
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.																	
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.																	
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya																	
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya																	
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.																	
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).																	
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.																	
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%		53,78	58,28	65,78	73,28	80,78	88,28			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona	
6.6 .	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.																	
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.																	
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%		37,3	83	180,00	280,00	380,00	480,00			Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona	

TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.																
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	Meningkat mjd 96,6%	99,5	99,8	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Peningkatan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.																
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.																
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.																
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.																
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.																
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.																
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan, Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi	
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.																
7.3.1*	Intensitas energi primer.																
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan, Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi	
7.a	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih																
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.																

7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang																
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)																
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	70,84	94,64	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan, Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi

TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.																
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.																
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	Meningkat	3,40	4,70	5,96	7,36	8,76	10,16	Tercapai	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	Pengembangan berbagai sektor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.																
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	Meningkat 7% pertahun	32,00	35,29	40,70	45,85	51,00	56,15	Tidak tercapai	Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya tambahan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	Pengembangan berbagai sektor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta		48,29	56,13	69,86	83,06	96,26	109,46		Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	Pengembangan berbagai sektor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat	
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.																
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa																
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.																
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.																
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.																
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin																
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan																
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%		2,40	4,50	8,00	11,50	15,00			Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas Koperasi UKM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirasaha	IKD	%		2,00	4,20	7,48	10,58	13,68			Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital	
8.4	Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.																
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.																
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan																
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).																
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.																

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.																
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	Menurun	6,60	6,13	5,34	4,59	3,84	3,09	Tercapai		Bappeda, Dinas Nakertrans, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur, Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.																
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.																
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).																
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.																
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		1. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial 2. Memfasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi 3. Optimalisasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Optimalisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat	
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.																
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.																
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.																

	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%		41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%		12,36	25,01	46,11	67,21	88,31	100,00			Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.																
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.																
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 8%	1,24	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	Tidak tercapai		Bappeda, Dinas Pariwisata, Bapenda	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan, Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P (Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah), Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan (Agrowisata, Ekowisata, Geopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal), Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata, Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.																
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	Meningkat	1,50	1,50	1,90	2,40	2,90	3,40	Tercapai		Dinas Pariwisata	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri, Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.																

	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			Dinas Pariwisata	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri, Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.																

TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.																
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.																
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan	Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan	Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas	
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.																
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%		75	81	88,48	96,58	100,00	100,00			Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	Pendistribusian pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.																
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.																
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.																
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.																
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.																
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.																
9.2	Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.																
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.																
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.																
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.																
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.																
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.																
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	Meningkat mjd 21,6%	8,75	9,15	9,81	10,46	11,11	11,76	Tidak Tercapai	Bappeda, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, Pembentukan produk hukum daerah / regulasi daerah untuk kemudahan perizinan dan kemudahan berinvestasi	

	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra		368	401	457,00	512,00	567,00	622,00			Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM, Peningkatan Kejasama pengembangan sentra IKM, Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun		15,7	16,7	18,28	19,88	21,48	23,08			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM, Peningkatan Kejasama pengembangan sentra IKM, Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha		41373	47673	50.201,00	50.211,00	50.221,00	50.231,00			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.																
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.																
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.																
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.																
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.																
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.																
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.																
9.5.2* Ju	mlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.																
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).																

TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.																
10.1.1*	Rasio Gini.																
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks		0,31	0,307	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan daya saing daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur; 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 3. Peningkatan daya saing produk ekonomi kreatif; 4. Peningkatan sertifikasi produk sehat dan halal; 5. Peningkatan pertumbuhan investasi; 6. Peningkatan peran ekonomi digital; 7. Pengembangan potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		356,45	347,27	331,50	316,35	301,20	286,05		Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan daya saing daerah	1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur; 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 3. Peningkatan daya saing produk ekonomi kreatif; 4. Peningkatan sertifikasi produk sehat dan halal; 5. Peningkatan pertumbuhan investasi; 6. Peningkatan peran ekonomi digital; 7. Pengembangan potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.																
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	Berkurang	8,6	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Percepatan pembangunan daerah tertinggal	a. Memperkuat kelembagaan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengatasi persoalan koordinasi pembangunan lintas sektoral dan lintas wilayah. b. Menyusun rencana aksi yang lebih detail tentang penguatan konektivitas di wilayah tertinggal, terutama rencana aksi untuk pembangunan infrastruktur dasar bagi kepentingan peningkatan usaha sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan. c. Merencanakan zona pengolahan komoditi unggulan untuk menciptakan terjadinya aglomerasi diantara perusahaan yang bergerak dalam perdagangan dan industri pengolahan. d. Meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal dengan daerah lainnya dan dengan pusat-pusat pertumbuhan, melalui pembangunan infrastruktur dasar. e. Meningkatkan arus perjalanan orang dan barang melalui pembangunan simpul pergerakan orang dan barang seperti terminal, pelabuhan, dermaga	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.																

	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	Meningkat	2,02	2,02	3,14	4,54	5,94	7,34	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		di daerah tertinggal. f. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.																
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.																
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.																
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.																
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.																
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.																
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.																
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	Meningkat mjd 71	68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74	Tercapai		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik (nilai)
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).																
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.																
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.																
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.																
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.																
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.																
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	Meningkat	41,95	59,31	81,36	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.																
10.5	Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.																
10.05.01	Financial Soundness Indicator.																
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.																

10.7.	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.						
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.						
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.						
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.						
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.						
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.						
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.						

TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.																
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.																
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau																
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	100,00	Belum Tercapai	Fluktuasi Debit dan Kualitas Air Sungai	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas BMCKTR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian; 2. Terwujudnya lingkungan hidup dengan kualitas yang optimal	1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum dan akses sanitasi layak; 2. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air; 3. Mengembangkan infrastruktur penyediaan air baku; 4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air; 6. Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	menjadi 100%	82	88	97,20	100,00	100,00	Belum Tercapai							
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang						
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	menjadi 100%	82	88	97,96	100,00	100,00	Belum Tercapai	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang						
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Peningkatan Akses Sanitasi Layak	
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.																
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas																
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik																
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang		19.000.000	23.000.000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil	
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum																
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio		0,668	0,691	0,74	0,79	0,84	0,89		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Pengembangan infrastruktur dan pengembangan konektivitas Sumatera Barat	

	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang		19000000	23000000	24.000.004	24.000.009	24.000.014	24.000.019		Dinas Perhubungan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.															
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk															
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk															
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis															
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)															
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)															
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu		10916	11592	12.661,40	13.659,40	14.657,40	15.655,40		Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas PTPH, Dinas Perindag	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.															
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang															
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%		53	62	77,00	92,00	107,00	122,00		Satuan Polisi Pamong Praja	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar															
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB															
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.															
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota															
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya															

	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		17	23	33,00	43,00	53,00	63,00			Dinas Lingkungan Hidup				
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	72,00	82,00	92,00	100,00	Belum Tercapai	Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	Dilakukan dengan Upaya Tambahan	Optimalisasi Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah; 2. Meningkatkan kelembagaan dalam pengelolaan sampah; 3. Peningkatan teknologi dalam pengelolaan persampahan (waste to energy, dll)
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola																
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)																
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10																
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara																
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks		87,16	88,67	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks		77,43	78,81	81,09	83,39	85,69	87,99			Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.																
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.																
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua																
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.															
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.															
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS															
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.															
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030															
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana															
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.															
11.c.1 -																
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal															
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana

TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
12.1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.																
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.																
12.03.01 (a)?	Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)																
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan																
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		17	23	33,00	43,00	53,00	63,00		Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah	
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy)	
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.																
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.																
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri																
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional	
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline																
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional	
12.4.2* (a)?	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.																
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan capaian pelayanan limbah domestik oleh SPALD regional	
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang																
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.																
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-government).	

	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%		17	23	33,00	43,00	53,00	63,00		Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	menjadi 80%	56	62	33,00	43,00	53,00	63,00	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy)
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.															
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya															
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.															
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional															
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi															
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah															
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa															
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.															
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.															
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup															
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.															
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks		84,5	89,5	94,28	100,00	100,00	100,00		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan peran dari Perangkat Daerah yang menjadi pengampu pelaksanaan 8 area perubahan (area penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan ketatalaksanaan, manajemen perubahan dan peraturan perundang undangan dan penataan Sumber Daya Aparatur).
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks		81	84	89,00	94,00	99,00	100,00		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan peran dari Perangkat Daerah yang menjadi pengampu pelaksanaan 8 area perubahan (area penataan organisasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan ketatalaksanaan, manajemen perubahan dan peraturan perundang undangan dan penataan Sumber Daya Aparatur).
12.a	Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.															
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)															

	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	Mencapai 10-16%	29	51,7	75,60	99,40	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan, Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan																
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development																

TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara																
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang																
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%		100	100	100,00	100,00	100,00	100,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana,	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015/2030																
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	Terpenuhi	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai		Dinas Sosial	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan ketersediaan, distribusi dan akses pangan agar tidak mengakibatkan kerawanan pangan.
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana																
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%		25	87,5	100,00	100,00	100,00	100,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Berkurangnya resiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional																
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications																
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun																
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)																
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)																
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim																
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.																
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup																

TPB 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi																
14.01.01 (a)?	Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung																
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut																
	RPJMD - Persentase Sampah dan L83 Terkelola	IKD	%	Meningkat	60	75	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Pengendalian dan pengelolaan sampah di Daerah Aliran Sungai, industri, dan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Penyediaan sarana dan prasana pengambilan sampah laut dan peningkatan sosialisasi penyadaran kelestarian lingkungan pesisir
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif																
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan																
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton		477.362	512.013	571.91	630,16	688,41	746,66		Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Pengembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya laut yang berkelanjutan	Pengembangan sarana dan prasana perikanan tangkap dan budidaya laut
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan																
14.5 P	ada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia																
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut				Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis ekosistem dan kesejahteraan masyarakat	1. Pengembangan kawasan konservasi dengan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumberdaya pesisir; 2. Meningkatkan penataan ruang laut dan penataan zona kawasan konservasi perairan laut; 3. Mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari darat; 4. Penegakan hukum terhadap perusak ekosistem pesisir dan laut
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)																
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)											Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut				Peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum dibidang perikanan tangkap	Peningkatan sarana dan prasarana kapal pengawas perikanan dan peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum di laut
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha																
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	87%	82	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan untuk keberlanjutan sumberdaya pesisir	Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan PPNS serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya pesisir

14.7	Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara						
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)						
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar						
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil						
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan						
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi						
14.c	Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want						
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)						

TPB 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.																
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan																
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Tidak Tercapai	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Dinas Kehutanan	-	Melakukan dengan upaya tambahan	Meningkatkan kualitas tutupan lahan	1. Peningkatan luas wilayah Rehabilitasi Hutan dan lahan; 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi areal resapan air dan DAS; 3. Peningkatan penegakan hukum terkait dengan pembakaran lahan dan pengeringan lahan gambut; 4. Peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya																
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)																
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.																
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari																
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju																
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	Meningkat	40	100	200,00	300,00	400,00	500,00	Tercapai		Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya pendapatan petani hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Perbenihan Tanaman Hutan, Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi																
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan																
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%		1,29	2,79	5,29	7,79	10,29	12,79		Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Rehabilitasi Hutan dan lahan	
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	Meningkat	2,85	5,71	10,46	15,21	19,96	24,71	Tercapai	Dinas Kehutanan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Rehabilitasi Hutan dan lahan	
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.																
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi																
15.4.2*	Indeks Tutupan Hijau Pegunungan																

	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	Meningkat	60,98	59,69	57,54	55,39	53,24	51,09	Tidak Tercapai	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Dinas Kehutanan	-	Melakukan dengan upaya tambahan	Meningkatkan kualitas tutupan lahan	1. Peningkatan luas wilayah Rehabilitasi Hutan dan lahan; 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi areal resapan air dan DAS; 3. Peningkatan penegakan hukum terkait dengan pembakaran lahan dan pengeringan lahan gambut; 4. Peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal																
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal																
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL																
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan																
15.09.01 (a)?	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan																
(b)?	integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi																
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis																

TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.																
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.																
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.																
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.																
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.																
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus		3	2	0,40	0,00	0,00	0,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.																
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.																
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.																
16.10.01	Jumlah kasus verifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.																
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.																
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).																
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.																
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			

16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.																	
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%		10	40	90,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif																	
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%		10	40	90,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.																	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiakan terhadap anak.																	
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir																	
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.																	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun	2,1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya																	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	JKD	Rasio	Menurun	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	JKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	JKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	JKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.																
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	JKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.																

	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks		65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.																	
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.																	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks		65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15			Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun	16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.																
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks			65,85	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15		Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	Menurun		16	13	8,00	3,00	0,00	0,00	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	Menurun		2	0,00	0,00	0,00	0,00	Tercapai		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks			65,23	66,73	69,23	71,73	74,23	76,73		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi																
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%			100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Hukum	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.																
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%			100	100	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Hukum	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.																
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.																
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.																

16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)																
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.																
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.																
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).																
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.																
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.																
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.																
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks		68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40			Bappeda, Biro Organisasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B																
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat		B8	A	A	A	A	A			Bappeda, Biro Organisasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah		8	14	23,20	32,20	41,20	50,20			Biro Organisasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB B																
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks		68,5	71	75,35	79,70	84,05	88,40			Bappeda, Biro Organisasi	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.																
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.																
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks		84,5	89,5	93,66	98,86	100,00	100,00			Bappeda, Dinas PMPTSP	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks		81	84	89,00	94,00	99,00	100,00			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.																
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).																
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88			Inspektorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Disnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfotik, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%		10,76	12,3	13,54	15,09	16,64	18,19			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		

16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).												Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88			Inspektorat, Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB, Dinkes, Diknas, Ditnakertrans, Diskop UKM, Disperindag, Badan Kesbangpol, DLH, Diskominfotik, BKD, Balitbang, DBMCKTR, Dinas PP dan Pertahanan, DPMD, DPTSP, Biro Hukum	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	JKD	%		11,54	15,09	17,93	21,48	25,03	28,58			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.																
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi																
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan																
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	JKD	Nilai		68,01	69,25							Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan																
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks		59,12	61,75	95,88	96,88	97,88	98,88				Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	JKD	Nilai		68,01	69,25	71,84	74,14	76,44	78,74			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.																
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	JKD	%		86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.																
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	JKD	%		86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun																
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	JKD	%		86,62	94,25	100,00	100,00	100,00	100,00			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
16.a	Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.																
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.																
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.																
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.																
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.																

TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Target 2030	Capaian 2022	Target Proyeksi Tahun					Status Capaian	Isu Strategis Terkait TPB	Instansi Pelaksana	Skenario		Rekomendasi	
						2025	2030	2035	2040	2045				BAU	Upaya Tambahan	Strategi	Arah Kebijakan
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.																
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.																
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00		Bappeda, Bapenda	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	<p>1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); 2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjangkir potensi baru yang selama ini belum terpungut.</p> <p>4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.</p> <p>5. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%		3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27		Badan Pendapatan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.																
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00		Bappeda, Bapenda	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		<p>1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); 2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan</p>	

	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27			Badan Pendapatan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjangkir potensi baru yang selama ini belum terpungut. 4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan. 5. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%		7	7	10,24	14,04	17,84	21,64			Badan Pendapatan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.																
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%		37,84	40,75	45,00	50,00	55,00	60,00			Bappeda, Bapenda	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMASAT); 2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun

	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%		3,58	3,54	3,49	3,44	3,39	3,34			Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%		36,6	40,3	1,97	2,07	2,17	2,27			Badan Pendapatan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Terwujudnyakuualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%		7	7	10,24	14,04	17,84	21,64			Badan Pendapatan Daerah	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-		

berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.

- Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menajaring potensi baru yang selama ini belum terpungut.
- Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
- Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
- Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

17.10	Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.																
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).																
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati																
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.																
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.																
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas																
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp)	IKD	Rp. Juta	Meningkat 5%	1420,99	1507,97	1.654,12	1.799,12	1.944,12	2.089,12	Tercapai	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Mewujudkan pembangunan iklim investasi yang sehat	1. Mendorong hilirisasi produk ekspor non migas; 2. meningkatkan investasi di Indonesia terutama di sektor prioritas melalui insentif baik fiskal maupun non fiskal; 3. pengembangan lembaga pengelola investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi perkembangan perekonomian Sumatera barat	
17.16	Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.																
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.																
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.																
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).																
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.																
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).																
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.																
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpelih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.																
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs																
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.																
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.																

	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.															
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.															
17.19	Pada tahun 2030, mengadalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.															
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.															
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.															
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.															
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	Meningkat	60	90	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD 2021-2026	-	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas	1. Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berdasarkan Prinsip Satu Data 3. Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan															
b)?	mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.															
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.															
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).															
17.3	Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.															

17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.						
17.03.02 V	olome pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.						
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
17.06.01 L	angganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga						
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)						
17.8	Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.						
17.8.1*	Persentase pengguna internet						



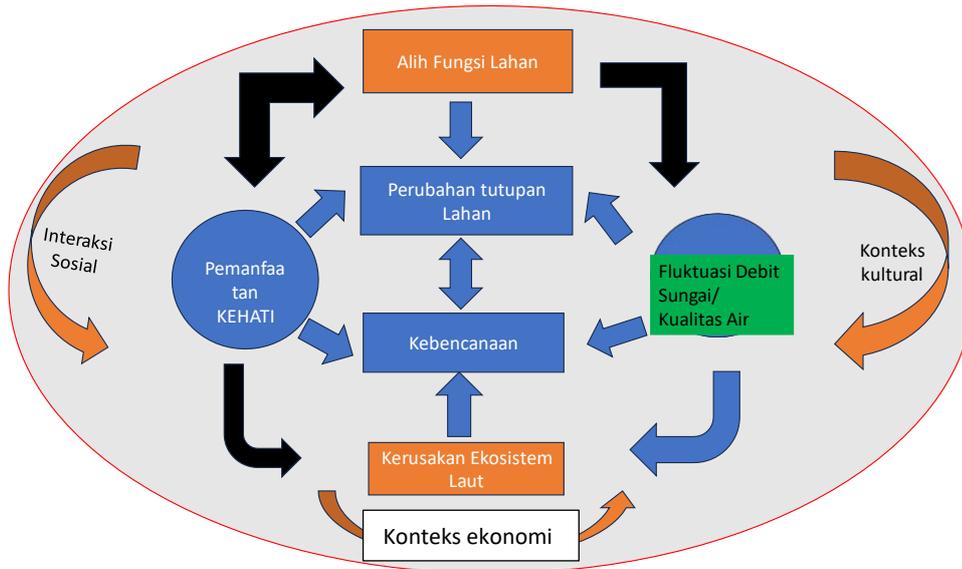
6.2. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Isu Paling Strategis

Setelah memperhatikan beberapa indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan hasil implementasi Rencana Aksi Daerah dalam pencapaian TPB dapat disampaikan telah terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan PDRB, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan prosentase penduduk miskin dan peningkatan infrastruktur jalan adalah beberapa contoh keberhasilan pembangunan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Namun di lain pihak diketahui adanya sejumlah kondisi yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas hidup tersebut. Penurunan kualitas air, perubahan tutupan lahan dari lahan berhutan menjadi Perkebunan, pemukiman dan pemanfaatan lain dan peningkatan timbulan sampah adalah hal-hal penting yang diperkirakan akan berdampak negatif dimasa datang. Hasil konsultasi publik yang dilaksanakan dalam pembuatan KLHS RPJPD 2025- 2045 juga mengungkapkan hal senada. Kondisi yang sama juga diketahui dari hasil konsultasi publik dalam penyusunan KLHS RTRW Provinsi Sumbar dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan kondisi negatif tersebut dan beberapa isu lain dari hasil konsultasi publik maka disepakati rumusan isu paling strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan
2. Fluktuasi debit Sungai dan penurunan kualitas air
3. Tingginya intensitas kebencanaan
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah
5. Belum termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan.
6. Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan laut.

Bila dicermati dengan saksama isu diatas memperlihatkan adanya keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung. Kesaling-terkaitan tersebut dapat digambarkan dengan model berikut ini (kecuali untuk isu strategis pengelolaan sampah).



Gambar 6.1 Alur Fikir Mengatasi Permasalahan Isu Paling Strategis

Gambar diatas memperlihatkan bahwa alih fungsi lahan merupakan isu yang dapat dikategorikan sebagai akar masalah. Alih fungsi lahan yang meliputi perubahan hutan sekunder menjadi lahan perkebunan, perubahan sawah menjadi pemukiman dan infra struktur jalan serta perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder akan berdampak pada debit Sungai dan kualitas air serta peningkatan frekuensi bencana. Kerusakan hutan primer dengan tutupan vegetasi yang relatif optimal akan sangat mempengaruhi kemampuan peresapan air yang selanjutnya akan berdampak pada fluktuasi debit sungai. Beberapa sungai utama, sebagaimana diungkapkan pada kondisi umum wilayah (Bab III) memperlihatkan perbedaan debit yang besar antara musim hujan dan musim kemarau. Perubahan densitas vegetasi di dataran tinggi juga mempengaruhi kualitas air. Areal yang relatif terbuka lebih berpotensi mengalami erosi. Besarnya erosi akan meningkatkan kadar padatan tersuspensi di sungai. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan sedimentasi di sungai yang berdampak pada pendangkalan sungai. Pendangkalan ini selanjutnya akan meningkatkan potensi bencana banjir dan longsor.

Perubahan jenis utama vegetasi penutup juga akan berpengaruh kepada ketersediaan pakan satwa yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan populasi satwa tertentu. Penurunan populasi satwa, misalnya satwa pemencar biji dan buah akan berakibat pada perubahan kualitas hutan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dipastikan akan terjadi penurunan kualitas ekosistem dan spesies yang merupakan bagian utama keanekaragaman hayati.



Penurunan kualitas air Sungai yang mengalir ke laut jelas akan mempengaruhi kualitas air laut, terutama kualitas air laut dibagian pesisir. Penurunan kualitas air laut akan berdampak langsung pada kualitas ekosistem mangrove dan terumbu karang serta ekosistem laut lainnya.

Dengan demikian maka arah kebijakan yang amat penting direkomendasikan untuk RPJPD 2025-2045 adalah pengendalian alih fungsi lahan. Arah kebijakan ini kemudian perlu diikuti dengan beberapa strategi. Arah kebijakan lainnya adalah terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati secara inklusif, berkelanjutan dan adil untuk peningkatan perekonomian lokal.

Tingginya potensi bencana, baik karena penurunan kualitas lingkungan (banjir, longsor) maupun karena sebab-sebab alami (gempa bumi, angin puting beliung, letusan gunung berapi) perlu diantisipasi dengan penguatan kelembagaan (aturan, organisasi) dan peningkatan resiliensi masyarakat.

Khusus isu pengelolaan persampahan diusulkan beberapa arah kebijakan yang lebih menekankan kepada peningkatan tanggung jawab produsen dan konsumen. Arah kebijakan seperti desentralisasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah untuk energi dan penggunaan lain perlu direkomendasikan untuk muatan RPJPD 2025-2045.

Secara rinci bahasan untuk masing-masing isu strategis dikemukakan sebagai berikut.

6.2.1. Analisis Skenario terkait Isu Paling Strategis Ke-1: Peningkatan Alih Fungsi Lahan

Untuk menjawab Isu Paling Strategis Ke-1: Peningkatan Alih Fungsi Lahan, diupayakan melalui Indikator TPB 5.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Merujuk pada Target Nasional pada Perpres No 59 Tahun 2017, jumlah lahan kritis yang direhabilitasi adalah 5,5 juta ha (skala nasional), sedangkan untuk provinsi Sumatera Barat sendiri belum ada penetapan jumlah lahan yang akan direhabilitasi. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa Sumatera Barat menargetkan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan meningkat.

Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur sarana/prasarana penunjang ekonomi seperti jalan dan pasar memberikan tekanan dalam bentuk kebutuhan akan lahan. Disamping itu, aktivitas produktif seperti aktivitas pertanian dan industri juga memberikan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tekanan ini memaksa terjadinya alih



fungsi lahan dan terlewatnya kemampuan lingkungan mendukung dan menampung aktivitas penggunaan lahan. Aktivitas penambangan ilegal (*illegal mining*), perambahan (*illegal logging*) dan pemanfaatan lahan dari aktivitas industri juga memberikan kontribusi terhadap alih fungsi lahan. Diperkirakan bahwa lahan sawah di Sumatera Barat telah mengalami penyusutan seluas lebih kurang 20.000 hektar akibat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan lahan terbangun. Sehingga pada tahun 2022 tersisa lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat seluas 215.000 hektar dengan produksi rata-rata 1,4 juta ton/tahun.

Tahun 2023, dari sisi tata guna lahan, perusakan lingkungan dan ekosistem juga terjadi di beberapa tempat. Walaupun belum tersedia data kuantitatif maupun kualitatif, namun secara visual, terlihat aktivitas perusakan ekosistem mangrove dalam bentuk penebangan kayu mangrove dan penambangan terumbu karang pada pulau-pulau terluar. Penambangan bahan galian jenis batuan (tanah, pasir, batu, dan kerikil) untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan juga memaksa perubahan bentang alam dan memberikan tekanan terhadap daya dukung badan air. Penambangan emas ilegal di beberapa titik di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil pantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, selain merusak bentang alam, tetapi juga meninggalkan lahan kritis bekas tambang dalam kondisi tercemar logam berat.

Perusakan lingkungan juga terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan lahan gambut. Ekosistem gambut yang sudah terekspose sangat mudah terbakar namun sulit untuk dipadamkan. Sejalan dengan itu, kebiasaan membakar dalam penyiapan lahan perkebunan atau pertanian juga memberikan kontribusi terhadap kualitas lahan

Merujuk kepada Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2023 memberikan informasi bahwa Indek Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. Indek Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2021 – 2022 se-Sumatera Barat

Kabupaten / Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
	2021	2022
KABUPATEN		
Kepulauan Mentawai	93,21	93,21
Pesisir Selatan	46,65	70,21
Solok	65,58	72,92



Kabupaten / Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	
	2021	2022
Sijunjung	70.12	65,58
Tanah Datar	52,26	52,26
Padang Pariaman	39,76	39,76
Agam	47.85	48.01
Lima Puluh Kota	62,54	62,53
Pasaman	76,78	76.56
Solok Selatan	75,07	75,07
Dharmasraya	42,70	42,70
Pasaman Barat	46,65	46,81
KOTA		
Padang	72,34	72,34
Solok	38,31	38,30
Sawahlunto	36,95	37,01
Padang Panjang	56,18	56,18
Bukittinggi	22,38	22,38
Payakumbuh	25,78	25,78
Pariaman	22,92	24,24
SUMATERA BARAT	66,24	64,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, 2021 - 2023

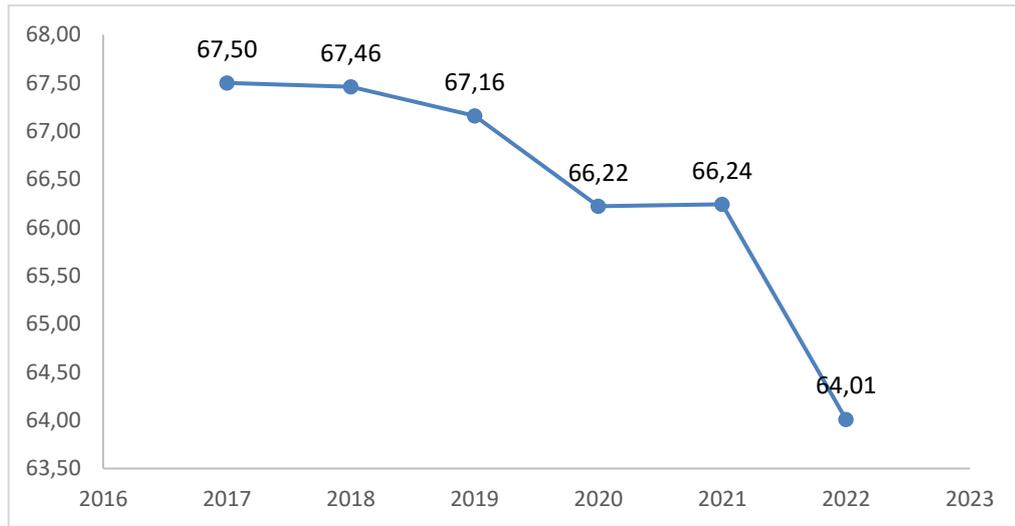
Sementara itu, kalau kita merujuk kepada website IKLH dari KLHK, memberikan informasi bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 s/d Tahun 2022

Provinsi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Barat	64,90	64,67	67,50	67,46	67,16	66,22	66,24	64,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, 2023

Melihat dari angka-angka indeks diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas lahan di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan yang cukup drastis terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2021 – 2022 secara jelas dapat dilihat sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 6.2 Indeks Kualitas Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2022

Dari sisi luas lahan kritis, berdasarkan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka secara time series menginformasikan sebagai Tabel berikut:



Tabel 6.4. Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
KABUPATEN								
Kepulauan Mentawai	8.522,44	5,74	5.872,83	496,31	108,41	33,69	105,92	607,16
Pesisir Selatan	17.074,90	1.972,19	4.657,76	1.462,30	8.507,62	3.234,34	5.288,66	987,60
Solok	20,24	384,19	117,33	627,39	-	-	145,73	121,44
Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Datar	-	18,35	298,80	22,22	-	7,30	4,48	-
Padang Pariaman	-	2011,70	1.231,25	4.368,53	-	180,97	57,77	195,62
Agam	5.636,66	3.3030,29	3.115,57	2.363,11	452,31	471,77	909,28	326,50
Lima Puluh Kota	362,98	-	59,83	-	-	-	-	-
Pasaman	1075,12	2.978,76	1.454,29	1.870,88	791,31	1.612,50	464,02	510,74
Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasaman Barat	6249,28	9.268,73	46,96	1.391,74	514,63	2.580,92	0,31	125,77
KOTA								
Padang	8,66	2.232,57	330,55	1.119,63	-	977,55	277,97	93,98
Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	38.980,28	21.902,93	17.185,18	13.722,11	10.374,28	9.099,04	7.254,14	2.968,82
	91.790,50				29.696,28			

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 6.5. Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
KABUPATEN								
Kepulauan Mentawai	5.212,00	6	5.150	118	458	33	773	0,67
Pesisir Selatan	713,00	1.975	4.622	1.330	52	2.491	5.319	961
Solok	324,00	7.423	1.120	12.669	2.723	4.213	1.349	39.750
Sijunjung	630,00	487	890	7.539	8.409	13.631	1.297	31.984
Tanah Datar	158,00	55	352	5.286	3.832	5.663	889	34189
Padang Pariaman	-	2.324	1.765	125	-	2.019	530	47



LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
Agam	807,00	4.351	2.235	18.715	972	894	1.036	4.938
Lima Puluh Kota	93,00	859	109	2.067	1.445	30.193	646	68.007
Pasaman	83,00	5.799	1.683	1.368	619	27.336	578	53.402
Solok Selatan	267,00	3.583	5.686	9.065	868	518	262	2.534
Dharmasraya	14,00	36	-	1.179	1.391	131	-	4.792
Pasaman Barat	1.535,00	8.339	-	14.979	72	1.568	-	550
KOTA								
Padang	-	1.312	63	200	-	1.272	144	39
Solok	-	-	7	5	-	149	-	3.715
Sawahlunto	38	-	-	3.114	3.512	120	-	8.144
Padang Panjang	-	1	-	16	-	-	302	1.194
Bukittinggi	-	1	-	5	-	1	-	10
Payakumbuh	-	-	-	159	-	111	-	2.369
Pariaman	-	-	-	16	-	-	-	-
JUMLAH	9.874	36.551	23.682	77.955	24.353	90.343	13.125	256.625,67
	148.062,00				384.446,67			

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023



Tabel 6.6. Luas Lahan Kritis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
KABUPATEN								
Kepulauan Mentawai				337.573,50				7.587,48
Pesisir Selatan				401.035,67				10.317,98
Solok				19.716,02				59,32
Sijunjung				0				0
Tanah Datar				12.819,65				316,58
Padang Pariaman				61.164,17				2.610,33
Agam				95.736,91				4.074,71
Lima Puluh Kota				4.600,44				0
Pasaman				79.673,11				919,01
Solok Selatan				321,86				0
Dharmasraya				0				0
Pasaman Barat				162.676,73				4.848,30
KOTA								
Padang				42.190,43				4.540,02
Solok				3,36				0
Sawahlunto				0				0
Padang Panjang				534,78				18,95
Bukittinggi				99,75				0



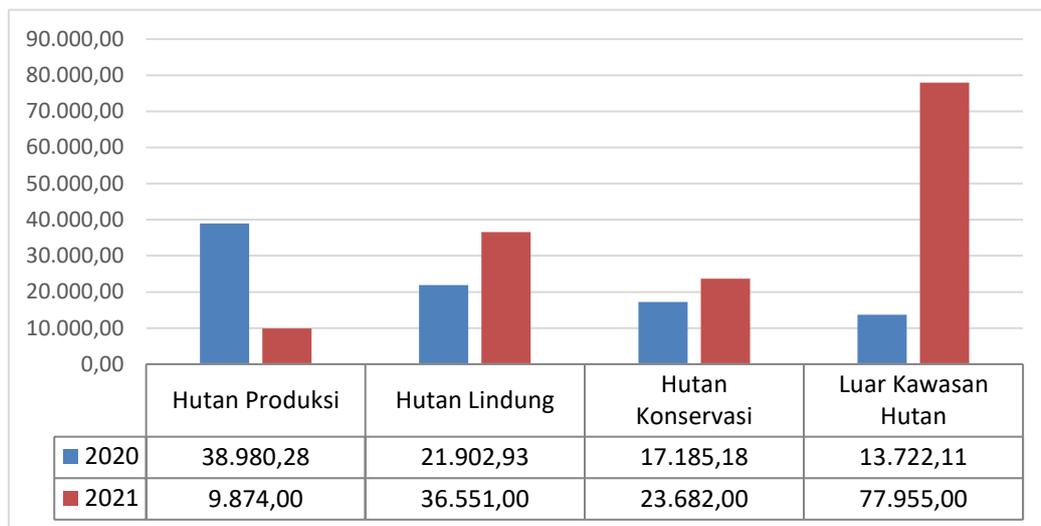
LAPORAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

KABUPATEN/KOTA	LAHAN KRITIS (Hektar)				LAHAN SANGAT KRITIS (Hektar)			
	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	HUTAN KONSERVASI	LUAR KAWASAN HUTAN
Payakumbuh				0				0
Pariaman				3.194,71				0
JUMLAH				1.221.341,09				35.292,68

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023

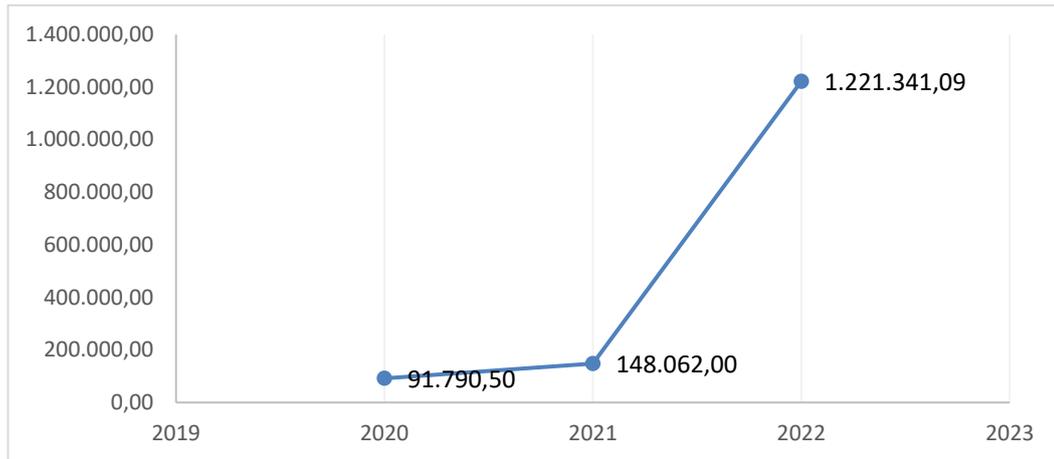


Berdasarkan tabel di atas, data tentang luas lahan kritis didalam Sumatera Barat Dalam Angka dari Tahun 2020 dan 2021 ditampilkan dengan bentuk matriks yang sama, sehingga bisa dilakukan analisis langsung. Namun data luas lahan kritis tahun 2022 ditampilkan dengan bentuk matrik yang berbeda, sehingga tidak bisa dianalisa secara langsung untuk masing-masing fungsi lahan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan luar kawasan hutan). Namun demikian, dicoba membandingkan laju pertambahan/ pengurangan luas total kawasan yang didefinisikan sebagai lahan kritis maupun sangat kritis, sebagai berikut:



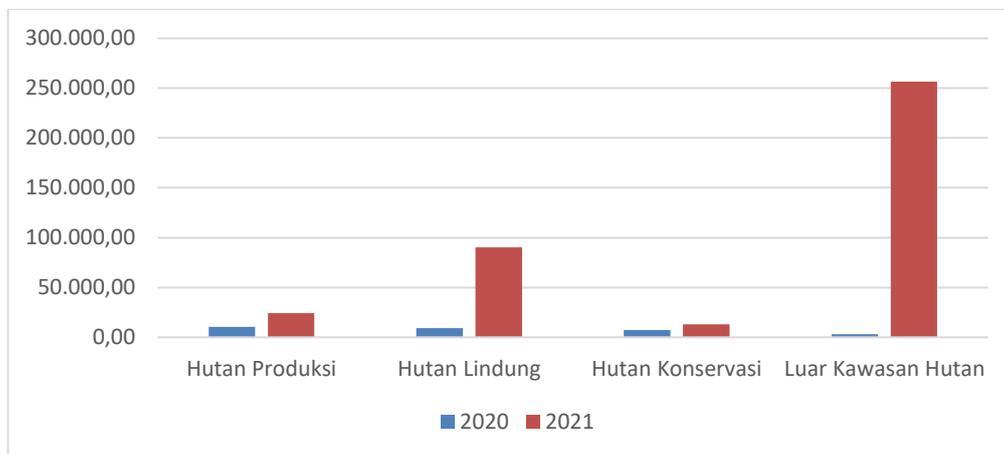
Gambar 6.3 Luas Lahan Kritis

Gambar diatas memperlihatkan bahwa terjadi pengurangan luas lahan kritis pada hutan produksi. Namun terjadi penambahan luas lahan kritis pada hutan lindung, hutan konservasi. Pertambahan luas lahan kritis terjadi pada luar kawasan hutan. Selanjutnya, secara time series kondisi pertambahan dan pengurangan lahan kritis pada semua fungsi guna lahan dari tahun 2020 - 2022 sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 6.4 Pertumbuhan Luas Lahan Kritis

Data tentang luas lahan sangat kritis didalam Sumatera Barat Dalam Angka dari tahun 2020 dan 2021 ditampilkan dengan bentuk matriks yang sama, sehingga bisa dilakukan analisis langsung. Namun data luas lahan sangat kritis tahun 2022 ditampilkan dengan bentuk matrik yang berbeda, sehingga tidak bisa dianalisa secara langsung untuk masing-masing fungsi lahan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan luar kawasan hutan). Namun demikian, dicoba membandingkan laju pertumbuhan/pengurangan luas total kawasan yang didefinisikan sebagai lahan kritis maupun sangat kritis, sebagai berikut:

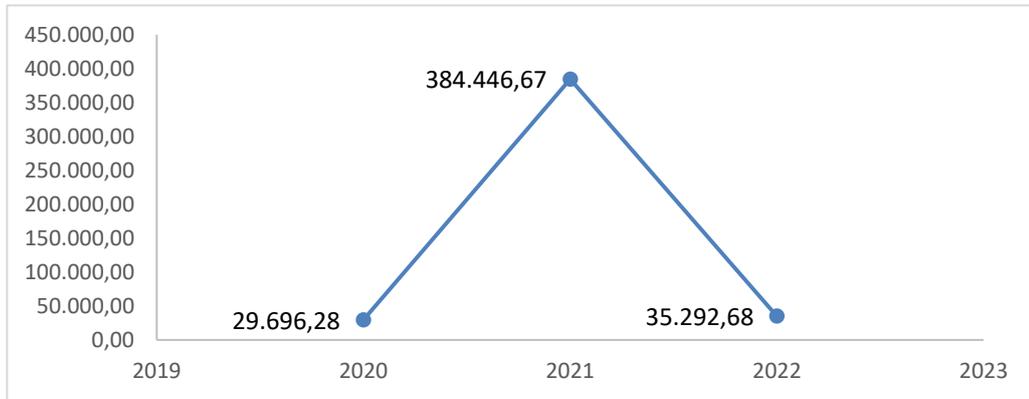


Gambar 6.5 Luas Lahan Sangat Kritis

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terjadi penambahan luas lahan sangat kritis dalam rentang waktu tahun 2020 – 2021 baik pada hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Pertambahan luas lahan kritis terjadi pada luar kawasan hutan. Selanjutnya, secara time series kondisi penambahan

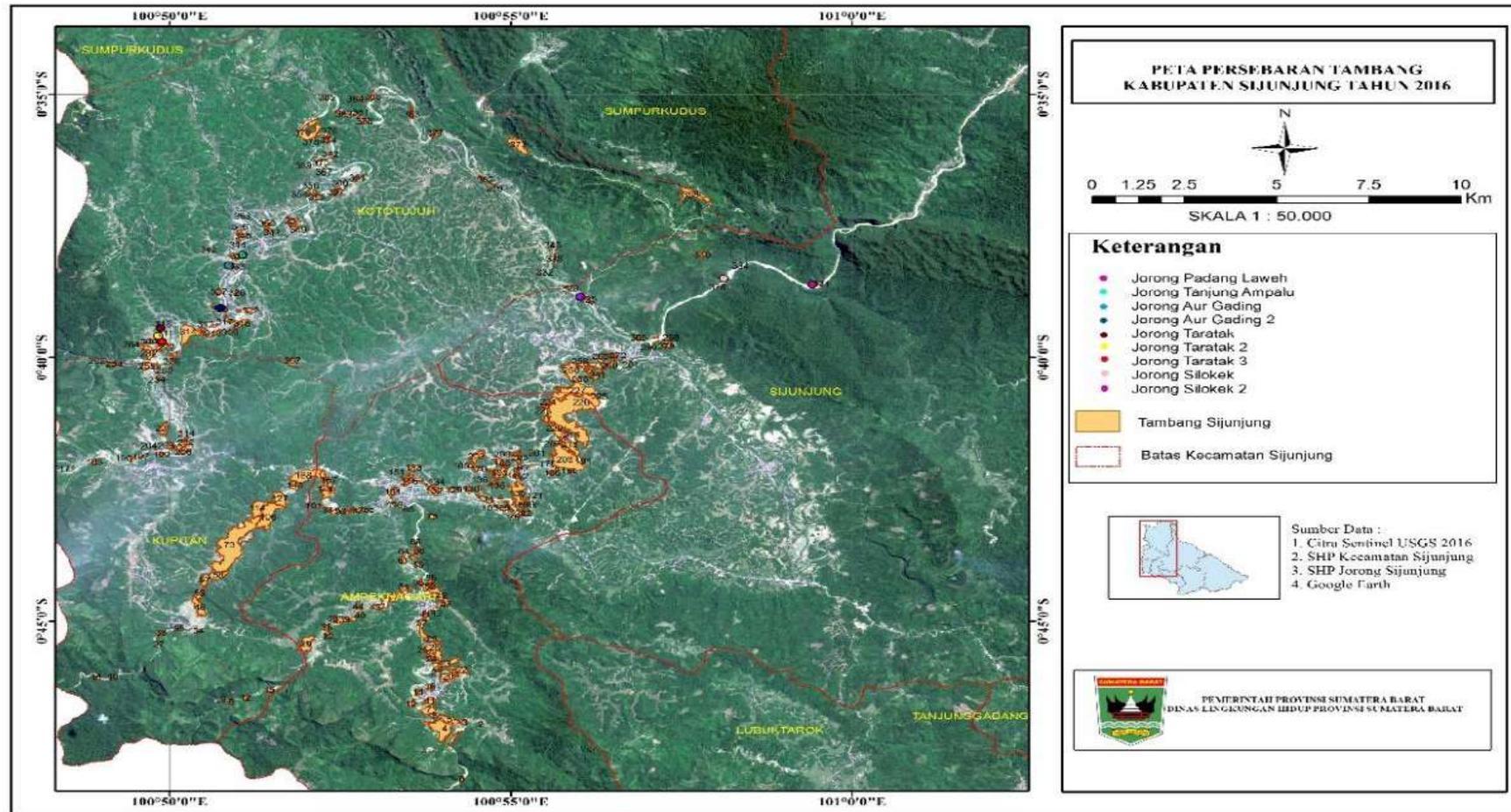


dan pengurangan lahan sangat kritis pada semua fungsi guna lahan dari tahun 2020 - 2022 sebagaimana Gambar berikut.



Gambar 6.6 Pertumbuhan Luas Lahan Sangat Kritis

Gambar diatas memberikan informasi bahwa secara total jumlah luas lahan sangat kritis bertambah dalam rentang waktu dari tahun 2020 – 2021 menjadi seluas 384.446,67 hektar. Namun dalam rentang waktu tahun 2021 – 2022 terjadi pengurangan lahan sangat kritis yang cukup drastis. Sehingga sisa lahan yang dikategorikan sebagai lahan sangat kritis pada tahun 2022 menjadi seluas 35.292,68 hektar. Sekaitan dengan lahan kritis dan lahan sangat kritis, tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat mencoba melakukan inventarisasi sebaran lahan kritis akibat aktivitas tambang emas ilegal (Lahan Akses Terbuka – LAT) di Kabupaten Sijunjung dengan metoda penginderaan jauh dengan memanfaatkan Citra Sentinel USGS 2016 dan Citra Google Earth tahun 2016. Dari penghitungan ini diperoleh sebaran LAT sebanyak 368 titik dengan total luasan 1.022 hektar.



Gambar 6.7 Peta Akses Lahan Terbuka

Sumber: Citra Sentinel USGS 2016 dan Citra Google Earth tahun 2016



Perambahan hutan secara illegal menyebabkan berkurangnya luas lahan hutan. Pengurangan vegetasi secara data yang ada juga akan menyebabkan siklus hidrologi menjadi terganggu, sehingga berdampak pada jumlah debit air sungai. Debit sungai akan berkurang pada musim kemarau dan menjadi berlebih (banjir) pada saat musim hujan. Penambangan ilegal baik lahan akses terbuka maupun sebagai pemenuhan kebutuhan akan material pembangunan seperti pembangunan jalan dan lain-lain, akan menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam yang pada akhirnya akan menambah luas lahan yang didefinisikan sebagai lahan kritis.

Pemakaian pestisida, disinfektan, dan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak terkendali pada aktivitas pemanfaatan lahan untuk pertanian, dari data uji labor terhadap kualitas air sungai-sungai yang dipantau ternyata memberikan tekanan terhadap meningkatnya cemaran dari parameter Clorin Bebas. Penurunan kualitas sumber air baku akan meningkatkan biaya pengolahan dari air baku menjadi air bersih. Perilaku masyarakat dari pemanfaatan (tata guna) lahan permukiman yang tidak mengendalikan limbah domestik dan limbah peternakan, dari data uji labor terhadap kualitas air sungai-sungai yang dipantau ternyata memberikan indikasi tekanan terhadap meningkatnya cemaran dari parameter Total Coliform dan Fecal Coli yang memberikan dampak pada kesehatan manusia (ibu dan anak). Selain itu, menurunnya kualitas sumber air baku akan meningkatkan biaya pengolahan dari air baku menjadi air bersih.

Pengelolaan Ekosistem Gambut dari usaha/kegiatan dan masyarakat, membuat lahan gambut terekspose dan menjadi mudah terbakar. Selain itu, Ekosistem Gambut mengalami penurunan kinerja sebagai salah satu kawasan penyangga cadangan air. Perusakan Ekosistem Terumbu Karang membuat ikan-ikan kehilangan tempat berlindung dan bermain. Sehingga perlahan-lahan akan mengurangi kualitas dan kuantitas tangkapan nelayan. Perusakan dan alih fungsi lahan Ekosistem Mangrove membuat hamparan ekosistem mangrove menjadi berkurang secara drastis. Pengurangan luasan Ekosistem Mangrove secara perlahan-lahan mengurangi tempat ikan melakukan pemijahan. Selain itu, kehilangan Ekosistem Mangrove sebagai pelindung daratan dari serangan air laut akan meningkatkan resiko bencana seperti abrasi pantai dan berkurangnya kualitas dan kuantitas tangkapan nelayan diperairan laut.

Kawasan industri dari pelaku usaha/kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan dengan air limbah dan udara emisinya berpotensi sebagai pelaku pencemar yang akan menurunkan kualitas badan air sebagai sumber air baku. Penurunan kualitas sumber air baku akan akan memberikan dampak kepada



kesehatan manusia (ibu dan anak) serta meningkatkan biaya pengolahan dari air baku menjadi air bersih.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai dengan kewenangan yaitu pada Areal Penggunaan Lain (APL) setiap tahunnya. Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan hutan dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Hutan Lindung (BPDAS-HL) Agam Kuantan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pemulihan Lahan Akses Terbuka dengan berkolaborasi dengan PT. Semen Padang. Adapun secara rinci kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan pada Areal Penggunaan Lain (APL) tidak hanya tanaman hutan (surian, mahoni) tetapi juga tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat seperti durian, petai, pinang, jengkol, matoa, kayu putih, lamtoro, alpokat, manggis, kayu manis, pala, kemiri, karet, kopi, cengkeh, pinang wangi dan pinang hibrida). Pelaksanaan penanaman dilakukan oleh kelompok Tani sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Rekapitulasi RHL periode 2019 s/d 2022 sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel 6.7. Rekapitulasi RHL

No	Tahun	Luas (Ha)	Bibit (Batang)	Lokasi
1	2019	203	101.500	Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Tanah Datar
2	2020	180	720.00	Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman
3	2021	435	757.802	Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam



No	Tahun	Luas (Ha)	Bibit (Batang)	Lokasi
4	2022	613	270.733	Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam Kabupaten Solok Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kota Padang Kota Sawahlunto
	Jumlah	1.431	1.202.035	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2023

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPDAS Agam-Kuantan pada areal kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Kawasan Konservasi (Taman Nasional Kerinci Seblat/TNKS) dilaksanakan secara swadaya masyarakat sebagaimana pada Tabel dibawah ini

Tabel 6.8. Rekapitulasi RHL di Kawasan

No	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi	Status Kawasan
1	2019	200	Kabupaten Agam	Hutan Lindung
2	2020	500	Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan	Hutan Produksi : 400 Ha Kawasan Konservasi (TNKS) : 100 Ha
3	2021	1000	Kabupaten Pesisir Selatan	Hutan Produksi
4	2022	550	Kabupaten Pesisir Selatan	Hutan Produksi

Sumber: BPDAS Agam-Kuantan, 2023

- Pemulihan Lahan Akses Terbuka

Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka dilakukan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah antara Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu:

- Tahun 2020 di Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung dengan tema Taman Ekowisata Berbasis Air dan Tahun 2021 dilakukan penyerahan oleh Dirjen PPKL disaksikan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman ke Kelompok Masyarakat



- b. Tahun 2021 pengembangan di Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.
- c. Tahun 2022 dilakukan pemetaan social dan penyusunan DED oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada lahan bekas kegiatan penambangan emas ilegal di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dan Tahun 2023 dilakukan penanaman kaliandra bekerjasama dengan PT. Semen Padang seluas \pm 2 Ha. Tanaman kaliandra tersebut nantinya akan dibeli oleh PT. Semen Padang dan akan dilakukan perjanjian kerjasama dengan kelompok masyarakat. Kaliandra sebagai salah satu sumber energi alternatif pengganti batubara.



Gambar 6.8 Pemulihan Lahan Akses Terbuka Bekas Kegiatan Tambang Emas Ilegal Dengan Tanaman Kaliandra Bekerjasama Dengan PT. Semen Padang

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa dengan adanya perubahan tutupan lahan dan kondisi lahan kritis yang semakin meluas, akan mengakibatkan menurunnya pembukaan areal resapan air dan meningkatnya areal yang harus direhabilitasi. Sehingga dalam hal ini, rekomendasi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada Masyarakat mengenai fungsi areal resapan air dan DAS
2. Memberikan edukasi dan penegakan hukum untuk pembukaan lahan dengan bakar dan pengeringan lahan gambut
3. Meningkatkan luas wilayah rehabilitasi
4. Meningkatkan alokasi anggaran pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi

6.2.2. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke 2 : Fluktuasi debit dan Kualitas Sungai

Sumatera Barat terdiri atas enam DAS yaitu DAS Batanghari, DAS Batang Kampar, DAS Batang Natal-Batang Batahan, DAS Batang Rokan, DAS Inderagiri-Akuaman, dan DAS Masang-Pasaman. Sumatera Barat menjadi hulu dari masing-

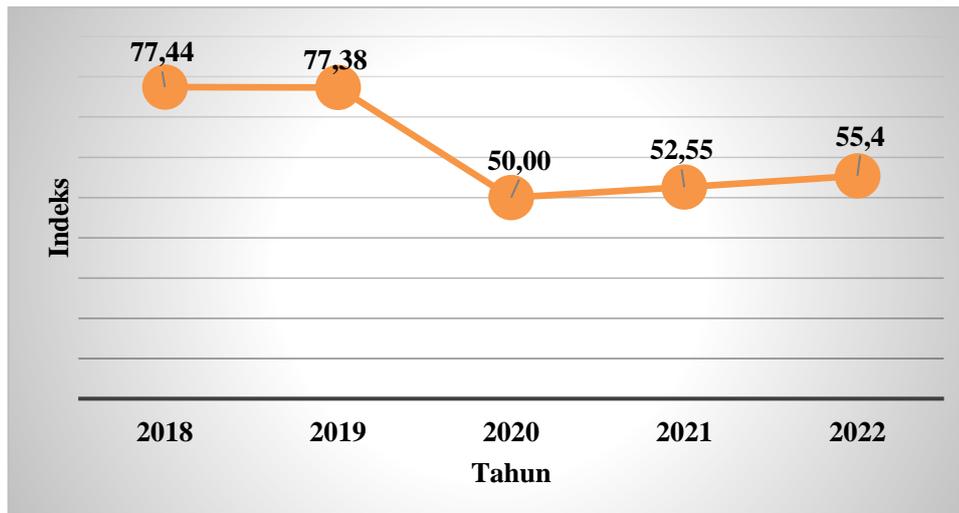


masing DAS tersebut. Empat DAS bermuara ke provinsi tetangga, dan dua DAS bermuara ke laut. Jika di bagi atas Satuan Wilayah Sungai (SWS) sesuai Permen PU No. 11A Tahun 2006 maka Sumatera Barat terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) WS yang berada utuh dalam satu kabupaten, yaitu: WS Pulau Siberut-Pagai-Sipora (Kab. Kepulauan Mentawai).
- 2) 2 (dua) WS lintas kabupaten, yaitu: WS Silaut-Tarusan dan WS Masang-Pasaman.
- 3) 1 (satu) WS strategis nasional, yaitu: WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau- Antokan (Akuaman) yang kewenangan pengelolaan WS ini berada di Pemerintah Pusat.
- 4) 5 (lima) WS lintas provinsi, yaitu:
 - a. WS Rokan (Sumatera Barat dan Riau);
 - b. WS Kampar (Sumatera Barat dan Riau);
 - c. WS Indragiri (Sumatera Barat dan Riau);
 - d. WS Batang Hari (Sumatera Barat dan Jambi); dan
 - e. WS Natal-Batahan (Sumatera Barat dan Sumatera Utara).

Dari 9 (sembilan) WS tersebut, WS Batang Hari merupakan WS terbesar di Sumatera Barat, dengan luas WS adalah 8.264,54 km². WS terkecil adalah WS Rokan, dengan luas 2.189,98 km². Potensi sumberdaya air yang paling besar berada pada WS Silaut-Tarusan sebesar 18.136,89 juta m³/tahun yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan dan Anai Sualang sebesar lebih kurang 16.499,42 juta m³/tahun.

Jumlah penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa, dengan kepadatan $\pm 131,73$ jiwa/km² dan persentase pertumbuhan mencapai 1,29 sebagai salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap kondisi kualitas sungai yang mana status mutu air sungai di Sumatera Barat tahun 2022 berada pada kategori "tercemar ringan" dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) sebesar 1,65. Nilai ini merupakan hasil perhitungan menggunakan Metode Indeks Pencemaran, mengacu kepada KepMenLH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air sedangkan berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) maka sungai-sungai di Sumatera Barat terkategori "sedang" dengan berada pada range nilai $50 \leq x < 70$, menurut PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada Gambar berikut.



Gambar 6.9 Indeks Kualitas Air (IKA) Prov. Sumatera Barat

Pada Gambar 6. 9 dapat dijelaskan bahwa formula/perhitungan IKA sejak tahun 2020 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya sehingga terjadinya koreksi nilai IKA yang seakan akan mengalami perbaikan kualitas lingkungan secara signifikan, namun jika dilihat sejak tahun 2020 nilai IKA mengalami kenaikan yang menggambarkan adanya perbaikan kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air sungai yang ada di Sumatera Barat. Kualitas air sungai berada pada “cemar ringan” atau dengan kategori “sedang” banyak di pengaruhi oleh aktivitas domestik, pertanian dan sebagian dari kegiatan industri.

Kabupaten/kota belum memiliki Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan sedangkan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa IPLT hanya sebanyak 7 (unit) yang tersebar pada 4 (empat) kota dan 3 (tiga) kabupaten, yang tentunya kondisi ini akan mempengaruhi terhadap kualitas air tanah maupun air permukaan. Limbah domestik masyarakat berupa *grey water* masih di buang ke saluran drainase yang bermuara ke sungai-sungai yang ada, sehingga tentunya akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas air sungai.

Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pencemaran air yang disebabkan pola pertanian yang masing menggunakan sistem pertanian konvensional yaitu penggunaan pupuk kimia sebagai usaha meningkatkan produksi pertanian. Total luas lahan pertanian di Sumbar yaitu 1.677.236,92 ha yang sudah melakukan pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik hanya seluas 235,978 ha atau hanya sekitar 0,014%,



melihat data tersebut tentunya masih banyaknya residu pupuk kimia yang masuk ke badan air.

Untuk menjawab isu penurunan kualitas air dapat dilakukan dengan melakukan intervensi terhadap indikator 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku dengan melakukan berbagai upaya strategi antara lain :

Sasaran Pokok/Strategi: Terwujudnya Lingkungan Hidup dengan Kualitas yang optimal

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air
2. Mengembangkan infrastruktur penyediaan air baku
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air
4. Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung

6.2.3. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke 3: Tingginya Intensitas Bencana

Berdasarkan data dari BNPB, sepanjang tahun 2017 Indonesia telah mengalami 2.372 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan hampir 2.000 kejadian bencana jika dibandingkan dengan 15 tahun terakhir. Data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 150 kejadian bencana setiap tahunnya.

Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki tingkat risiko beragam untuk seluruh jenis bencana yang dikenal di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2018 mencatatkan lebih dari 500 kejadian bencana yang berdampak langsung kepada lebih dari 210.000 jiwa penduduk. Selain itu, bencana-bencana tersebut mendatangkan kerusakan dalam berbagai tingkat pada lebih dari 340.000 rumah serta lebih dari 7500 fasilitas umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, didapatkan tingkat risiko untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat bervariasi antara sedang dan tinggi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 6.9. Potensi Dampak Bencana Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	POTENSI DAMPAK			
		LUAS BAHAYA (Ha)	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KERUGIAN (Milyar Rupiah)	KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
1. Banjir	Tinggi	1.054.891	3.527.323	12.586,10	319
2. Banjir Bandang	Tinggi	106,338	510,506	3.537,00	19,672
3.3. Cuaca Ekstrem	Tinggi	2.312.260	5.115.609	38.414,10	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	Sedang	89,137	1.294.236	-	-
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	41,303	95,551	1.698,40	13,438
6. Gempa Bumi	Tinggi	4.094.988	5.194.948	60.278,30	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	2.547.833	-	7.270,20	281,001
8. Kegagalan Teknologi	Sedang	899	41,721	-	-
9. Kekeringan	Tinggi	4.094.980	5.194.900	13.505,60	967,964
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	Tinggi	12,681	4,34	-	2,352
B. Letusan Gunung Api Talang	Tinggi	21,987	70,169	33,90	2,427
C. Letusan Gunung Api Tandikat	Tinggi	21,778	28,59	1,80	3,363
D. Letusan Gunung Api Marapi	Tinggi	19,947	66,038	173,40	5,22
11. Tanah Longsor	Tinggi	19,947	481,347	6.149,50	1.351.191
12. Tsunami	Tinggi	78,417	337,374	4.382,40	14,761

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat 2021 – 2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dampak bencana yang berpotensi di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda per bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan karakteristik bencana itu sendiri. Risiko untuk 12 jenis bencana di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini menjadi gambaran bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam dokumen RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, isu tingginya potensi bencana ini berkaitan erat dengan beberapa TPB, yaitu TPB 1 (mengakhiri kemiskinan), TPB 11 (pemukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan), dan TPB 13 (Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Untuk menjawab isu tingginya potensi bencana, sekaligus melihat kesenjangan/isu berkaitan dengan tingginya potensi bencana, dilakukan dengan



cara mengupayakan pencapaian indikator terkait dan menganalisis seberapa jauh tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) telah dicapai, khususnya untuk indikator-indikator terkait dimaksud, yaitu pada TPB 1, TPB 11, dan TPB 13. Pencapaian target indikator dilihat pada tahun 2022 (sesuai ketersediaan data) dan dibandingkan dengan proyeksi capaian pada tahun 2045, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

A. Indikator 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Berhubung data pencapaian khusus untuk indikator ini belum tersedia, maka didekati dengan indikator, sebagai berikut:

1) Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)

Realisasi pada tahun 2022 untuk indikator Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah sebesar 100%, dari 100% yang ditargetkan. Pencapaian yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya, juga dengan angka target dan realisasi yang sama. Artinya kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dan 2022 dalam hal penyediaan layanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah sangat baik, bahkan sempurna. Dengan kata lain, tidak terdapat 1 orang pun penduduk Provinsi Sumatera Barat terdampak krisis kesehatan akibat bencana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa cakupan/jangkauan pelayanan medis pada daerah-daerah yang rawan bencana juga sudah sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan di masa-masa yang akan datang, untuk menjamin terlayannya seluruh penduduk yang terdampak akibat dari bencana/berpotensi bencana. Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, untuk indikator ini tetap ditargetkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2026, dan seyogianya tetap ditargetkan 100% sampai dengan tahun 2045. Dengan pencapaian dan proyeksi target sebesar 100% setiap tahun hingga 2045, dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian indikator ini sudah dapat diupayakan dengan cara BAU (*business as usual*) dan belum memerlukan upaya tambahan.



2) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap

Realisasi tahun 2022 untuk indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap adalah sebesar 75%, dari 53% yang ditargetkan (tingkat capaian 141,5%). Sedangkan pada tahun sebelumnya, dari 50% ditargetkan, terealisasi sebesar 95,59%, atau dengan tingkat capaian 191,2%. Dari realisasi ini juga dapat disimpulkan bahwa pada baik pada tahun 2022 maupun pada tahun 2021 masih terdapat kejadian bencana kebakaran yang mana korbannya mendapatkan pelayanan penyelamatan dan/atau evakuasi melebihi dari waktu tanggap, walaupun telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini tentu wajib ditingkatkan di masa yang akan datang, karena kewajiban pemerintah dalam kondisi tanggap darurat kebakaran, ataupun bencana lainnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban sesuai waktu tanggapnya. Apabila terjadi keterlambatan maka akan berisiko menimbulkan korban jiwa/harta yang jauh lebih besar. Di dalam dokumen RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, hingga tahun 2026, untuk indikator ini belum dapat ditargetkan sebesar 100% dan hanya dapat ditargetkan sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya tanggap darurat kebakaran yang perlu disiapkan di lapangan, untuk menjamin bahwa penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dapat terlaksana sesuai waktu tanggap/SOP.

Diperlukan upaya tambahan yang cukup signifikan untuk dapat menjadikan target indikator ini sebesar 100%.

3) Persentase penanganan tanggap darurat bencana

Realisasi tahun 2022 untuk indikator persentase penanganan tanggap darurat bencana adalah 100%, dari 100% yang ditargetkan pada tahun tersebut, atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan tingkat capaian sebesar 100% maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tidak ada bencana di Sumatera Barat yang pada saat tanggap darurat tidak mendapatkan penanganan. Pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang, khususnya untuk kesesuaian penanganan dengan waktu tanggapnya pada jenis bencana kebakaran, yang mana pada indikator sebelumnya (Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap) baru dapat ditargetkan sebesar 52% di 2022 dan 65% pada tahun 2025.



Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, ntuk indikator ini tetap ditargetkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2026, dan seyogianya tetap ditargetkan 100% sampai dengan tahun 2045. Dengan pencapaian dan proyeksi target sebesar 100% setiap tahun hingga 2045, dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian indikator ini sudah dapat diupayakan dengan cara BAU (*business as usual*) dan belum memerlukan upaya tambahan.

- 4) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)

Realisasi dari indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, dari yang ditargetkan juga sebesar 100%, atau dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sama halnya tingkat pencapaiannya dengan tahun 2021, dengan angka target dan angka realisasi yang juga sama. Dengan pencapaian seperti ini dapat disimpulkan bahwa baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022 keseluruhan korban bencana alam dan sosial di Provinsi Sumatera Barat sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada saat tanggap darurat maupun setelah masa tanggap darurat berakhir.

Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, ntuk indikator ini tetap ditargetkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2026, dan seyogianya tetap ditargetkan 100% sampai dengan tahun 2045. Dengan pencapaian dan proyeksi target sebesar 100% setiap tahun hingga 2045, dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian indikator ini sudah dapat diupayakan dengan cara BAU (*business as usual*) dan belum memerlukan upaya tambahan.

- B. Indikator 1.5.3* Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)

Realisasi pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 18,75%, dari yang ditargetkan sebesar 25%, atau dengan tingkat capaian 75%. Realisasi sebesar 18,75% ini adalah berupa 3 dokumen dari 4 dokumen kebencanaan yang ditargetkan pada tahun 2022. Provinsi Sumatera Barat menargetkan penyelesaian keseluruhan 16 dokumen kebencanaan ini pada tahun 2026. Tidak diperlukan Upaya tambahan, mengingat pencapaian target indikator ini diproyeksikan sudah 100% pada tahun 2026 dan akan dipertahankan 100% hingga tahun 2045.



C. Indikator 1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana.

Berhubung data pencapaian khusus untuk indikator ini belum tersedia, maka didekati dengan indikator, sebagai berikut:

1) Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)

Realisasi pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 0,5, dari yang ditargetkan sebesar 0,49, atau dengan tingkat capaian 102%. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD sendiri juga digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Pada tahun 2026, Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai IKD sebesar 0,53 dan pada tahun 2045 ditargetkan sebesar 0,72. Belum tersedia data capaian IKD Provinsi Sumatera tahun 2022, hanya saja jika dibandingkan dengan realisasi/baseline tahun 2021 sebesar 0,46 dan target tahun 2045 tersebut, maka indikator ini diproyeksikan targetnya terus menaik, walaupun belum maksimal. Diperlukan Upaya tambahan agar indeks ini dapat mendekati angka 1 pada tahun 2045. Belum terdapat informasi yang memadai mengenai analisis pencapaian tahun 2021 untuk indikator ini, sehingga belum dapat diberikan rekomendasi ataupun upaya tambahan yang harus dilakukan ke depan.

2) Persentase penanganan pra bencana

Dalam tahapan manajemen bencana, sebagai sebuah proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman, maka fase pra bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh sebuah Bencana. Pada tahapan pra bencana ini harus melibatkan kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

Realisasi pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, atau dengan tingkat capaian 100%. Begitu juga dengan tahun sebelumnya (2021) Dimana dengan target 100%, juga dapat direalisasikan sebesar 100%. Dengan tingkat pencapaian sebesar 100% ini pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan/sumber daya



kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana di Provinsi Sumatera Barat sudah terpenuhi semuanya. Hal ini perlu dipertahankan dan dijaga di masa yang akan datang, sebagai persiapan apabila terjadi bencana, untuk menghindari korban jiwa dan harta.

Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, ntuk indikator ini tetap ditargetkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2026, dan seyogianya tetap ditargetkan 100% sampai dengan tahun 2045. Dengan pencapaian dan proyeksi target sebesar 100% setiap tahun hingga 2045, dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian indikator ini sudah dapat diupayakan dengan cara BAU (*business as usual*) dan belum memerlukan upaya tambahan.

3) Persentase penanganan tanggap darurat bencana

Realisasi pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%, atau dengan tingkat capaian 100%. Begitu juga dengan tahun sebelumnya (2021) dimana dengan target 100%, juga dapat direalisasikan sebesar 100%. Dalam situasi tanggap darurat, yang harus dilakukan adalah pengkajian cepat, menetapkan status keadaan darurat, melakukan penyelamatan dan evakuasi, memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan perlindungan dan pemulihan. Dengan tingkat pencapaian sebesar 100% ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada keseluruhan bencana di Sumatera Barat yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 sudah langsung ditangani pada masa tanggap daruratnya (meliputi pengkajian cepat, penetapan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan dan pemulihan). Pencapaian ini perlu dipertahankan di masa yang akan datang.

Di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat 2023 – 2026, ntuk indikator ini tetap ditargetkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2026, dan seyogianya tetap ditargetkan 100% sampai dengan tahun 2045. Dengan pencapaian dan proyeksi target sebesar 100% setiap tahun hingga 2045, dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian indikator ini sudah dapat diupayakan dengan cara BAU (*business as usual*) dan belum memerlukan upaya tambahan.



Kerawanan terhadap bencana

Peristiwa vulkanik dan tektonik yang terjadi sejak ribuan tahun lalu telah menjadikan Sumatera Barat sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana alam seperti banjir, erupsi gunung, longsor, gempa dan tsunami. Provinsi Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik di sebelah timur yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Garis pantai Provinsi dari Pasaman sampai ke Pesisir Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.

Bencana yang selama ini terjadi telah mengakibatkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan infrastruktur. Oleh sebab itu salah satu tantangan dalam pembangunan daerah adalah meminimalisasi kerugian akibat bencana dan mengurangi frekuensi bencana itu sendiri dengan berbagai intervensi dan program pembangunan.

Kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, baik yang ditetapkan sebagai bencana melalui keputusan Pemerintah maupun yang dianggap sebagai kejadian biasa, tercatat sebanyak 1.021 dengan taksiran kerugian total **Rp1.136.849.587.336,-**. Kejadian bencana terbanyak terdapat di Kota Padang sebanyak 143 Kejadian, Kota Bukittinggi sebanyak 98 kejadian dan Kabupaten Agam sebanyak 95 kejadian. Daerah yang paling sedikit kejadian bencana yaitu Kabupaten Solok. Peristiwa terbanyak yang sering dilaporkan dari Kabupaten/Kota adalah bencana hidrometeorologi yaitu kejadian angin kencang (674 kejadian) yang umumnya mengakibatkan pohon tumbang dan kerusakan ringan berat pada pemukiman.

Dari hasil analisis sederhana di atas untuk isu tingginya potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat, dari keseluruhan indikator TPB yang terkait, berdasarkan capaian TPB pada tahun 2022, hanya 1 indikator, yaitu indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap, yang targetnya belum tercapai. Adapun indikator lainnya targetnya pada tahun 2022 sudah tercapai bahkan ada yang tingkat capaiannya melebihi 100%. Selain itu jika dilihat dari target yang diproyeksikan/ditetapkan sampai dengan tahun 2045, dimana keseluruhan indikator terkait tersebut telah ditetapkan sebesar 100%, maka dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa (berdasarkan capaian tahun 2022 ini saja- belum ada data pembandingan dengan daerah/standar nasional, apabila ada) Provinsi Sumatera Barat sudah relatif siap dengan potensi tingginya bencana, kecuali dalam hal sumber daya tanggap darurat kebakaran yang memang masih perlu dioptimalkan kesiapan/ketersediaannya di lapangan.



6.2.4. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke 4 : Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Rencana pembangunan memberikan dampak positif dari sisi infrastruktur juga ikut mendorong pemanfaatan sumber daya cukup besar, dan aktifitas pembangunan, pariwisata serta kegiatan komersil lainnya ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya memicu peningkatan volume timbulan sampah yang tidak seimbang antara ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Disamping itu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan masalah baru, kebiasaan membuang sampah di sungai, tempat terbuka akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, ini dapat terlihat dari tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan serta pengetahuan.

Masalah lingkungan berhubungan dengan kenaikan populasi penduduk, sampah, kerusakan dan kehancuran habitat (degradasi keanekaragaman hayati), kepunahan tumbuhan dan satwa, bertambahnya kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya, polusi dan lain sebagainya. Pengelolaan lingkungan yang tidak baik menyebabkan polusi udara, jeleknya ketersediaan air bersih, penurunan kualitas sanitasi, penggunaan bahan bakar fosil yang meningkatkan naiknya gas rumah kaca. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai akibat buruknya pengelolaan sampah.

Indonesia memiliki penduduk 275,773 juta jiwa (Statistik Indonesia 2023, BPS) merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia. Sedangkan jumlah penduduk Sumatra Barat adalah 5,641 juta jiwa (2,05% dari total penduduk Indonesia) dengan laju pertumbuhan penduduk 1,09 pada tahun 2020-2022. Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan jumlah limbah padat yang dihasilkan. Limbah melepaskan gas metana jika dibuang ke lingkungan yang terbatas oksigen, seperti tempat pembuangan sampah, dan melepaskan polutan serta bahan partikel selama transportasi dan pembakaran yang tidak efisien. Methane yang dihasilkan dari penguraian limbah organik adalah penyumbang terbesar sektor limbah padat terhadap emisi GRK dan dianggap lebih kuat dari CO₂ (Bank Dunia, 2018).

Masalah sampah (limbah padat) sangat terkait dengan kemampuan manusia cendekia dan professional untuk mengelola limbah padat menjadi produk baru yang tidak berbahaya. Limbah padat yang diproses dengan cara fermentasi dan proses kimia menimbulkan bau tak sedap, dioksin, toksin dan gas CO₂, debu asbes, debu logam di udara. Limbah padat sangat erat kaitannya dengan keselamatan (*safety*), Kesehatan (*health*) dan perlindungan lingkungan



(*environmental protection*) namun tingkat kepedulian dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2018 menyatakan indeks kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah baru mencapai 0,72%. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih cenderung membakar, membuang ke badan air, menimbun atau membuang sampah di sembarang tempat.

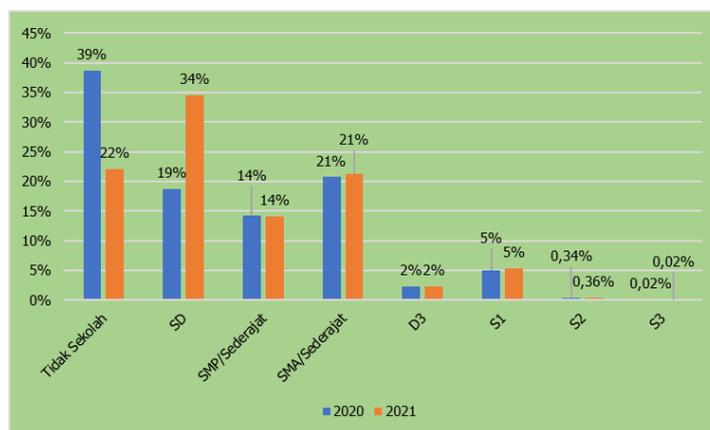
Permasalahan sampah menjadi isu yang selalu muncul dalam perencanaan di Provinsi Sumatra Barat. Sampah juga menjadi salah satu isu dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat mendukung upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Berdasarkan Konsultasi Publik 1 KLHS RPJPD Provinsi Sumatra Barat diketahui kondisi eksisting dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1. Kondisi TPA regional Payakumbuh yang sudah over capacity menyulitkan kabupaten/kota untuk membuang sampah, sementara TPA khusus kabupaten atau kota tidak tersedia;
2. TPA regional Kota Solok sesuai kondisi dan umur pemanfaatan diperkirakan tidak dapat lagi menampung timbulan sampah;
3. Terkait pengelolaan sampah, TPA Regional Kota Solok akan penuh pada bulan juni 2023;
4. Terbatas nya lahan untuk TPAS di Kota Padang Panjang agar di fasilitasi TPA regional;
5. Penumpukan sampah di sembarang tempat;
6. Belum maksimal pengelolaan sampah;
7. Banyaknya timbunan sampah;
8. Pengelolaan sampah (daerah muaro);
9. Sampah di laut (*marine debris*);
10. Sampah kiriman kab/kota yang berbatasan langsung berakibat pada banjir wilayah hilir;
11. Masih banyak sampah yang masuk ke danau;
12. Anggaran sampah yang rendah;
13. Maraknya kemasan makanan styrofoam;



14. Penganggaran pengelolaan sampah yang rendah;
15. Timbulan sampah yang tidak tertangani;
16. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah;
17. Pencemaran lingkungan persampahan;
18. Ceceran sampah disepanjang jalan lintas kabupaten/kota;
19. Pemenuhan luasan lahan TPA masih kurang;
20. Masalah penanganan sampah yang masih kurang;
21. Terkait pengelolaan sampah, yang selama ini metode ambil, angkut, buang, minim upaya pengolahan;
22. Inovasi bank sampah masih fokus mengelola sampah an organik;
23. Penegakan hukum lingkungan, pelanggaran perda untuk pengelolaan sampah. Tidak ada efek jera terhadap pelanggaran perda;
24. Sampah sebagai energi baru terbarukan (EBT). Pembangunan RDF akan dilakukan sampai tahun 2024, sehingga 2025 akan *running* RDF di Kota Padang;
25. Pemanfaat marketplace yang meningkat akan meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data DIKPLHD tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk di Sumatra Barat yang tidak sekolah masih cukup tinggi, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6.10 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatra Barat

Sumber: DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat 2021-2022



Gambar di atas menunjukkan penduduk yang tidak sekolah masih cukup tinggi dibandingkan tingkat Pendidikan lainnya, dapat dikatakan bahwa tingkat Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Semakin tinggi tingkat Pendidikan maka semakin baik juga pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Erviana dkk, terkait hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap dengan perilaku pengelolaan sampah pada pedagang buah dan sayur di Pasar Giwangan Yogyakarta, menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap pengelolaan sampah akan mempengaruhi perilaku mereka dalam mengelola sampah.

Jumlah sampah yang terkelola berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6.10. Jumlah Sampah Terkelola Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat pada Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycling Rate (D+E)/A
Kabupaten Pesisir Selatan	55.803,17	10.037,52	17,99	12.994,00	23,29	23.031,52	41,27	6.833,92	219,00	12,64
Kabupaten Solok	57.558,60	7.000,89	12,16	6.253,91	10,87	13.254,80	23,03	6.981,05		12,13
Kabupaten Sijunjung	35.513,89	7.308,77	20,58	7.365,70	20,74	14.674,47	41,32	7.287,65	65,70	20,71
Kabupaten Tanah Datar	47.057,29	8.376,95	17,80	17.054,44	36,24	25.431,40	54,04	8.127,00	584,55	18,51
Kabupaten Padang Pariaman	79.593,54	4,59	0,01	5.058,90	6,36	5.063,49	6,36	0,90		0,00
Kabupaten Agam	77.993,64	9.604,82	12,31	21.452,48	27,51	31.057,30	39,82	9.595,58		12,30
Kabupaten Lima Puluh Kota	55.954,79	11.697,77	20,91	7.665,00	13,70	19.362,77	34,60	10.629,05		19,00
Kabupaten Pasaman	44.253,04	10.974,72	24,80	15.497,90	35,02	26.472,62	59,82	2.387,95		5,40
Kabupaten Dharmasraya	37.831,10	5.709,93	15,09	30.130,75	79,65	35.840,69	94,74	1.797,22		4,75
Kabupaten Solok Selatan	26.988,68	7.248,64	26,86	4.394,60	16,28	11.643,24	43,14	7.227,00		26,78
Kota Padang	234.973,13	49.826,51	21,21	170.473,25	72,55	220.299,76	93,76	24.352,67	18,25	10,37
Kota Solok	19.810,19	3.481,43	17,57	16.296,20	82,26	19.777,63	99,84	3.332,66	18,20	16,91
Kota Sawahlunto	6.882,56	1.701,03	24,72	5.069,85	73,66	6.770,88	98,38	1.392,58	29,20	20,66
Kota Padang Panjang	17.865,14	2.709,47	15,17	14.778,12	82,72	17.487,59	97,89	530,03		2,97
Kota Payakumbuh	36.608,81	5.771,84	15,77	30.678,24	83,80	36.450,08	99,57	5.362,58	62,04	14,82
Kota Pariaman	13.963,44	1.835,78	13,15	9.855,00	70,58	11.690,78	83,72	1.835,78		13,15
Sumatera Barat	848.651,01	143.290,66	16,88	375.018,34	44,19	518.309,00	61,07	97.673,62	996,94	11,63

Sumber: sipsn.menlhk.go.id



Gambar 6.11 Persentase Sampah Terkelola Di Provinsi Sumatra Barat

Sumber: *sipsn.menlhk.go.id*

Sampah terkelola merupakan pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan table dan gambar di atas sampah terkelola tahun 2022 di Provinsi Sumatra Barat sebesar 61,07%, sedangkan tahun 2021 sampah yang terkelola sebesar 61,25% mengalami penurunan dari tahun 2021. Pengelolaan sampah akan mempengaruhi operasional pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah sedangkan kesadaran masyarakat akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah di sumber.

Dari data 2022 persentase sampah terkelola dengan baik adalah Kota Solok yakni 99,84%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 6,36%. Salah satu permasalahannya adalah sistem pengelolaan sampah terutama di sekitar Kawasan perbatasan. Lokasi Kawasan perbatasan memiliki jarak cukup jauh dari pusat kota serta belum tersedianya prasarana dan sarana persampahan yang memadai serta keterbatasan pengetahuan masyarakat yang membuat masyarakat mengelola sampah dengan cara dibakar, dikubur maupun dibuang ke badan air.



Tabel 6.11. Timbulan Sampah di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Kepulauan Mentawai	54,22	-	-
Kabupaten Pesisir Selatan	153,53	151,33	152,89
Kabupaten Solok	150,91	-	157,69
Kabupaten Sijunjung	94,34	96,37	100,84
Kabupaten Tanah Datar	120,46	128,24	-
Kabupaten Padang Pariaman	165,44	-	44,95
Kabupaten Agam	197,85	214,83	213,68
Kabupaten Lima Puluh Kota	154,89	154,23	153,3
Kabupaten Pasaman	87,86	121,24	121,24
Kabupaten Solok Selatan	69,99	73,94	-
Kabupaten Dharmasraya	103,76	102,5	128,2
Kabupaten Pasaman Barat	178,13	172,67	185,58
Kota Padang	663,48	639,41	643,76
Kota Solok	48,86	53,87	54,27
Kota Sawahlunto	18,21	18,75	18,86
Kota Padang Panjang	46,16	48	48,36
Kota Bukittinggi	123,95	126,65	123,7
Kota Payakumbuh	99,72	98,8	100,3
Kota Pariaman	61,95	-	38,26
Provinsi Sumatera Barat	2593,71	2200,83	2285,88

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Berdasarkan jumlah penduduk, dengan timbulan sampah 0,7 kg/orang/hari dapat diperkirakan timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 6.12. Proyeksi Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hari)					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
KABUPATEN						
Kepulauan Mentawai	62,58	64,76	68,58	72,61	76,88	81,41
Pesisir Selatan	361,56	376,40	402,51	430,42	460,27	492,19
Solok	278,48	286,15	299,41	313,28	327,80	342,99
Sijunjung	168,22	174,71	186,09	198,21	211,12	224,87
Tanah Datar	263,39	267,68	274,99	282,49	290,20	298,13



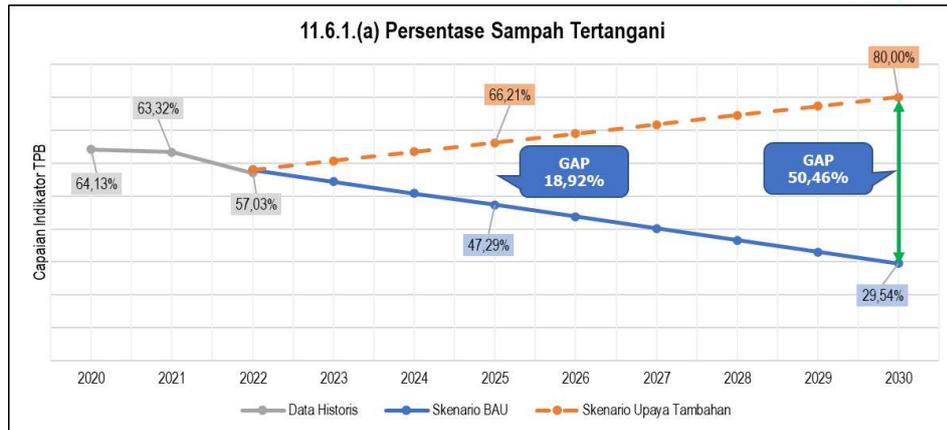
DOKUMEN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

Kabupaten/Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/hari)					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Padang Pariaman	305,29	311,93	323,32	335,13	347,37	360,06
Agam	378,63	392,08	415,56	440,45	466,82	494,78
Lima Puluh Kota	271,86	277,69	287,69	298,05	308,78	319,90
Pasaman	215,20	224,56	241,08	258,82	277,86	298,31
Solok Selatan	132,05	140,34	155,33	171,92	190,28	210,60
Dharmasraya	164,30	171,96	185,52	200,15	215,94	232,97
Pasaman Barat	309,74	323,02	346,45	371,57	398,52	427,41
KOTA						
Padang	643,40	655,44	676,02	697,23	719,12	741,69
Solok	53,10	56,10	61,48	67,38	73,85	80,94
Sawahlunto	46,49	48,05	50,78	53,66	56,71	59,93
Padang Panjang	40,50	42,39	45,76	49,40	53,32	57,55
Bukittinggi	85,62	87,14	89,74	92,42	95,18	98,02
Payakumbuh	100,33	104,97	113,20	122,06	131,63	141,94
Pariaman	67,70	70,80	76,27	82,16	88,51	95,35
SUMATERA BARAT	3.948,44	4.080,18	4.309,58	4.551,88	4.807,80	5.078,11

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data di atas diketahui penyumbang terbesar sampah di provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang untuk skala kota dan Kabupaten Agam untuk skala kabupaten. Ini sebanding dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi pada ke dua kabupaten/kota tersebut. Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dapat juga dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan maupun konsumsi perorangan yang cukup tinggi sehingga menghasilkan timbulan sampah yang lebih besar.

Timbulan sampah di Provinsi Sumatra Barat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah wisatawan yang berlibur ke Sumatra Barat. Berdasarkan data SIPSN 2023 perkiraan timbulan sampah di Sumatra Barat tahun 2022 adalah 2.285,88 ton/hari. Jika dihubungkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah tertangani, dimana target TPB berdasarkan Perpres 56 Tahun 2017, Pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota dengan target indikator 80% sampah tertangani dengan kondisi pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini maka persentase sampah yang tertangani tidak akan mencapai target TPB. Kondisi ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.12 Skenario Capaian Persentase Sampah Tertangani di Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Data Olahan, 2023

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) tidak dapat dipenuhi kecuali penanganan limbah dipenuhi sebagai prioritas. Berikut dapat dilihat keterkaitan masalah persampahan dalam pencapaian TPB/SDGs.

Tabel 6.13. Keterkaitan Masalah Persampahan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)		Keterkaitan dengan Masalah Persampahan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan)	Sebanyak 1% dari populasi perkotaan mencari nafkah dari pemulihan bahan daur ulang dari limbah
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)	Limbah makanan dari kegiatan pertanian perlu dipotong secara drastis, ataupun dapat dilakukan upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sehingga mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Sampah juga dapat mencemari udara yang kita hirup. Ketika suatu daerah tidak terjangkau layanan pengelolaan sampah, maka yang akan dilakukan adalah membuang sampah di tempat terbuka, di sempadan sungai atau membakarnya. Pembakaran sampah secara terbuka sudah menjadi hal yang lumrah. Di masa lalu mungkin bukan masalah. tetapi sekarang, dengan plastik dimana-mana, dampak kesehatan dari pembakaran terbuka adalah bencana yang akan mengganggu kesehatan. Hal ini tidak mendukung pencapaian TPB 3.



DOKUMEN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

.....

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)		Keterkaitan dengan Masalah Persampahan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)	Pengelolaan sampah berkelanjutan akan menjadi hal menarik bagi milenial, pengusaha dan kelas industri. Pengelolaan limbah memberikan peluang bagus dalam sains, teknologi dan teknik, humaniora, studi bisnis dan teknologi informasi. Hal ini tentunya mendukung TPB 4.
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender)	Perempuan khususnya dapat memperoleh manfaat besar dari peningkatan pengelolaan limbah, melalui peluang penghasilan mandiri dan melindungi keluarga mereka dari penyakit yang disebabkan oleh pembuangan dan pembakaran terbuka
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	Jika kita menginginkan air bersih dan sanitasi layak, maka perlu melihat sampah. Sampah adalah vektor utama penyakit dan menyediakan banyak tempat berkembangbiak bagi nyamuk. Sampah yang dibuang di sembarang tempat juga akan mengganggu kualitas air.
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau)	Limbah dari pembuatan produk makanan dapat diumpankan ke hewan dan sisa-sisa yang tidak dapat dimakan dapat diubah menjadi biogas dan menghasilkan energi terbarukan yang mendukung TPB 7.
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	Pengembangan pemanfaatan sampah dalam industri merupakan katalisator kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Bahan baku berbasis sampah kedepannya akan berlimpah.
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)	-
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan)	-
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	Pengelolaan sampah yang baik mendukung terwujudnya kota dan permukiman yang berkelanjutan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang	Model ekonomi yang gagal memperlakukan sumberdaya seolah olah mereka tak terbatas dan pola konsumsi yang mendukung sekali pakai



DOKUMEN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR TAHUN 2025-2045

.....

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)		Keterkaitan dengan Masalah Persampahan
	Bertanggung Jawab)	bertentangan dengan SDGs 12
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)	Penimbunan dan pembakaran sampah akan menghasilkan gas metana (CH ₄) dan CO ₂ merupakan gas rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim.
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);	Plastik telah menghancurkan planet bumi dan penumpangnya, baik saat ini dan dimasa depan. Tiga perempat dari tempat pembuangan terbuka terluas di dunia berada di pantai, menyapu material berbahaya ke laut. Kecil kemungkinan bahwa ada satu pantai di dunia yang tidak membawa residu jaring ikan plastik, puntung rokok, dan sedotan plastik ataupun sampah lainnya. Kondisi ini tentunya akan mengganggu kelestarian ekosistem laut.
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan)	Sebelum adanya plastik sekali pakai, manusia bisa membuang limbah mereka di tanah dan akan membusuk karena bumi masih memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menguraikan dan menyerap sampah. Namun saat ini, sampah plastik sekarang menyumbat saluran air dan tertelan oleh ternak. Bahan kimia merembes dari limbah buangan dalam jumlah besar, meracuni tanah, aliran dan sungai. Kehidupan di darat sebagai mana amanat TPB 15 hanya bisa sehat ketika limbah dikelola dengan benar
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)	Imbalan pengelolaan limbah jauh lebih besar daripada biayanya. Agar masyarakat makmur sebagai tempat hidup yang sehat dan tangguh, pemerintah harus segera berinvestasi. Bahkan orang miskin memilih untuk membayar pengelolaan limbah (atau berpartisipasi di dalamnya) ketika mereka melihat manfaatnya. skema tanggungjawab produsen dan yang terpenting transparansi fiskal dapat membantu memastikan semua orang membayar bagian yang adil untuk menjaga planet ini tetap bersih.
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).	Pengelolaan limbah berkelanjutan memberikan peluang ideal untuk kolaborasi dan bekerja dengan kemitraan antara orang kaya, miskin, komunitas formal dan informal, komunitas, bisnis, pemerintah dan komunitas internasional.

Sumber: Jatna Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 2021



Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sampah memberikan pengaruh kuat terhadap perwujudan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai kecuali dengan mengatasi masalah limbah yang terus berkembang. Dibutuhkan perubahan mendasar yang tidak hanya fokus pada pengelolaan limbah tetapi mencegah bertumbuhnya generasi limbah.

Berikut dapat dilihat analisis DPSIR dalam permasalahan persampahan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 6.14. Analisis DPSIR dalam Permasalahan Persampahan di Provinsi Sumatera Barat

Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Isu : Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah				
1. jumlah dan kepadatan penduduk 2. kemiskinan (TPB 1) 3. tingkat pendidikan (TPB 4) 4. Tata kelola pemanfaatan ruang	1. adanya pertumbuhan penduduk (laju pertumbuhan penduduk Sumbar : 1,09), berdasarkan metode geometrik diperkirakan jumlah penduduk sumbar pada tahun 2045 adalah 7.574.582 jiwa 2. Peningkatan kunjungan wisata (TPB 8) 3. Minimnya anggaran pengelolaan sampah 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pengelolaan lingkungan (sampah dan sanitasi) 5. Pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan (TPB 12)	1. timbulan, sumber dan komposisi sampah 2. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPB 11) 3. capaian kinerja pengelolaan sampah (TPB 11) 4. akses sanitasi layak bagi rumah tangga (TPB 1 dan TPB 6)	1. Penurunan kualitas sanitasi dan air bersih (TPB 1 dan TPB 6) 2. terancamnya daya tampung TPA (TPB 11) 3. Banjir (TPB 1, TPB 11, TPB 13) 4. Memicu peningkatan Emisi GRK (TPB 13) 5. Penurunan kesehatan masyarakat (TPB 3) 6. degradasi habitat baik di darat maupun di laut (TPB 14, TPB 15)	1. Perencanaan revisi perda tentang pengelolaan sampah 2. peningkatan pengurangan sampah berbasis masyarakat 3. pembinaan program Gerakan PBLHS di sekolah 4. penguatan program pemerintah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)



Rekomendasi Isu Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Sasaran Pokok: Terwujudnya lingkungan hidup dengan kualitas yang optimal

Strategi: Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah
2. Peningkatan Pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energi)
3. Peningkatan Kelembagaan dalam melakukan pengelolaan sampah

6.2.5. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke 5 : Belum termanfaatkannya Keanekaragaman Hayati secara adil dan berkelanjutan

Untuk menjawab Isu Paling Strategis Ke-4, yaitu Masih Minimnya Pemanfaatan Potensi Keanekaragaman Hayati Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diupayakan melalui: a) Indikator TPB 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. b) Indikator TPB 2.5.1* yaitu Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang c) Indikator TPB 2.3.1 (a) yaitu Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/ kehutanan

Dengan asumsi bahwa: a) tingginya potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati b). adanya ancaman terhadap kawasan hutan (deforestasi) untuk areal pertanian b) kurangnya pengetahuan masyarakat terkait arti penting kawasan hutan c) Rusaknya habitat varietas liar disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan akibat perubahan penggunaan lahan sehingga perlunya upaya konservasi dan perlindungan hutan d) Pemberdayaan masyarakat setempat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik

Sumber daya genetik atau plasma nutfah adalah bahan tanaman, hewan, jasad renik, yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sumber daya genetik ini mempunyai nilai yang diwujudkan dalam pemanfaatan, maupun yang masih pada taraf potensi yang

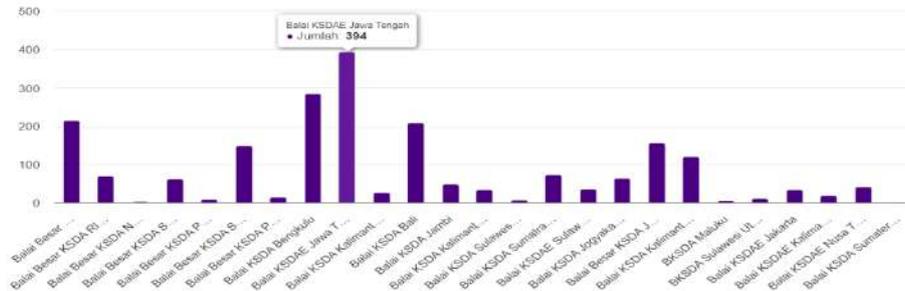


belum diketahui manfaatnya. Pada tanaman, sumber daya genetik terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman, serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan atau ternak sumber daya genetik terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan lainnya, semen, telur, embrio, hewan hidup, baik yang muda maupun yang dewasa. Sumber daya genetik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemuliaan dalam mengembangkan varietas baru tanaman atau ternak. Bahan genetik ini merupakan bahan mentah yang sangat penting bagi para pemulia tanaman, hewan dan ikan. Hingga saat ini, sumber daya genetik yang dimanfaatkan didominasi oleh budidaya tanaman perkebunan, pertanian dan hortikultura. Keanekaragaman jenis/Spesies dapat dikelompokkan menjadi spesies liar dan spesies budidaya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati tingkat genetik dan spesies jenis budidaya sejalan dengan TPB 2.5.1* yaitu Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang dan hanya dijadikan target pada RPJMD melalui program unggulan gubernur dengan tanaman yang disediakan sebanyak 23 jenis tanaman dan hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat. Sedangkan Pemanfaatan keanekaragaman hayati tingkat spesies jenis liar, berdasarkan data BKSDA Sumatera Barat tahun 2021 terdapat 2 jenis fauna yaitu Rusa Sambar dan mamalia yang dimanfaatkan melalui skema izin penangkaran. Dibandingkan dengan potensi keanekaragaman hayati Sumatera Barat yang memiliki jenis tercatat sebanyak 692 jenis tumbuhan liar dan 1.093 jenis satwa liar, baik yang hidup di daratan maupun di perairan masih besar potensi pemanfaatannya. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, pemanfaatan keanekaragaman hayati tingkat spesies tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 394 individu diikuti oleh Provinsi Bengkulu sebanyak 285 individu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebaran jumlah pemanfaatan spesies pada BKSDA di Indonesia sebagaimana gambar berikut:



Grafik DITJEN KSDAE

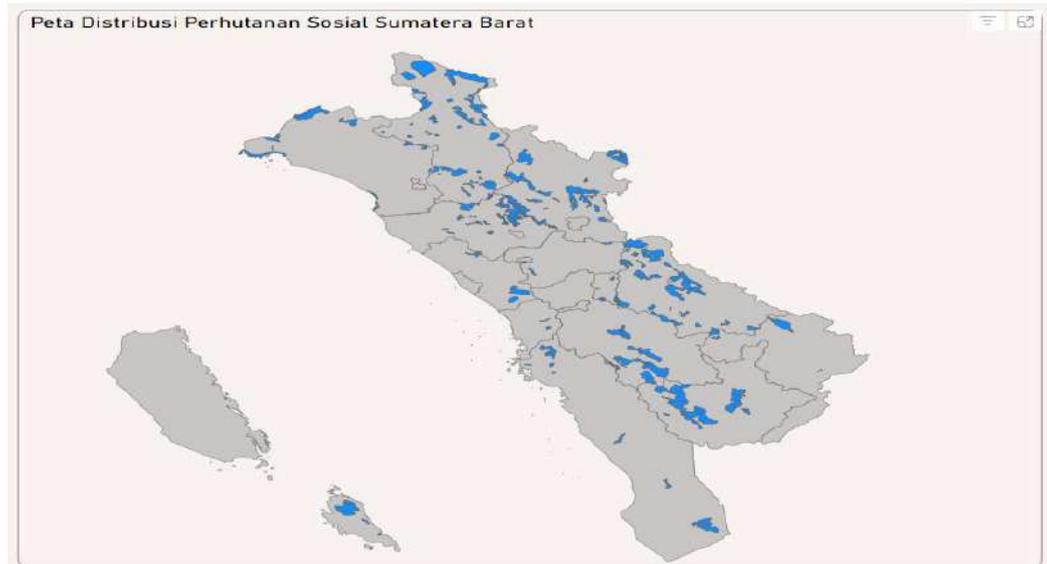


Gambar 6.13 Pemanfaatan Spesies Jenis Liar di Indonesia

Untuk Pemanfaatan keanekaragaman hayati tingkat komunitas/ekosistem, salah satunya berupa pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial di Sumatera Barat hingga tahun 2022 dengan luas areal perizinan yakni 287.554 Ha yang mencapai 169 unit kelompok sudah mendapatkan perizinan dan jumlah KK terdampak sebanyak 175.892 KK. Berdasarkan data tersebut sebaran lokasi perhutanan sosial terluas berada di Kabupaten Solok seluas 105.931 Ha sedangkan terkecil berada di Kota Payakumbuh seluas 92 Ha. Berikut grafik luas perhutanan sosial di Sumatera Barat hingga tahun 2022 yakni:



Gambar 6.14 Luas Perhutanan Sosial di Sumatera Barat



Gambar 6.15 Peta Distribusi Perhutanan Sosial di Sumatera Barat

Berdasarkan data Rencana Aksi daerah (RAD) Provinsi Sumatera Barat 2023 -2026 indikator TPB 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, indikator SDGs yang selaras dengan indikator program RPJMD ada 2 yaitu :

- a) Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial baseline data tahun 2021 sebesar 54,72 % dengan target SDGs tahun 2022 hingga tahun 2026 masing-masing sebesar 20 % per tahun dan pada tahun 2022 sudah tercapai sebesar 20%.
- b) Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit) baseline data tahun 2021 sebanyak 20 unit dengan target SDGs tahun 2022 sebesar 40 unit dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 40 unit.

Indikator TPB 2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan berdasarkan indikator SDGs yang selaras dengan indikator program RPJMD yaitu Peningkatan pendapatan petani hutan, baseline data tahun 2021 sebesar 17,31% dengan target SDGs tahun 2022 sampai tahun 2026 masing-masing sebesar 5 % per tahun dan pada tahun 2022 sudah tercapai sebesar 11,16%.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Barat dan masih luasnya kawasan hutan Negara yang dapat diakses oleh masyarakat, agar dapat



memaksimalkan potensi Keanekaragaman hayati untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga dalam hal ini, diusulkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan pemanfaatan tumbuhan dan hewan secara berkelanjutan terutama jenis lokal
2. Memperluas akses pengelolaan ekosistem terutama kawasan hutan

Untuk implementasi kebijakan diatas di rekomendasikan juga beberapa kebijakan pendukung:

1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
2. Memberikan arahan kepada Masyarakat mengenai fungsi hutan dan ekosistem penting lainnya
3. Memberikan akses hukum, akses kelembagaan, akses keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan
4. Perlunya diberikan payung Hukum agar Indikator TPB 2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang dimasukkan sebagai indikator makro.

6.2.6. Analisis Skenario Terkait Isu Paling Strategis ke 6 Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan laut.

Untuk menjawab Isu Paling Strategis Ke-6: Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan laut, diupayakan melalui Indikator TPB No. 14.5.1* dan 14.6.1 (a) yaitu Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut dan Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.

1. Indikator TPB 14.5.1* Jumlah Kawasan konservasi perairan laut

Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan berfungsi sebagai perlindungan sumberdaya genetik, perlindungan keanekaragaman hayati perairan, daerah pemijahan, daerah asuhan, daerah mencari makan, pemulihan biota dan habitat. Capaian luas kawasan konservasi perairan laut sesuai dengan target Aichi, yaitu 32,5 juta ha atau 10 % dari luas perairan Indonesia sebesar 325 juta ha. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target Aichi adalah target



keanekaragaman hayati berlangsung tahun 2011-2020. Target keanekaragaman hayati Aichi ditetapkan berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB dan terdiri dari 20 target spesifik untuk mengatasi dan memitigasi hilangnya keanekaragaman hayati di seluruh dunia.

Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat **3.409.837,37 Ha**, pada umumnya dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan (perikanan tangkap), budidaya, pariwisata, kawasan konservasi dan jalur pelayaran transportasi laut. Untuk luas kawasan konservasi perairan laut di Provinsi Sumatera Barat seluas **372.426,32 ha**. Untuk lebih jelasnya tentang luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah di masing-masing kabupaten/kota pesisir dan Kawasan Konservasi Nasional di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 6.14.

Tabel 6.15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan Konservasi	Luas (Ha)	Surat Keputusan
A.	KKPD			
1	Pesisir Selatan	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	175.583,56	Keputusan Menteri KP No 104 tahun 2021
2	Padang	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Padang	2.188,70	Keputusan Menteri KP No 105 tahun 2021
3	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi di Perairan di Batang Gasan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman	735,93	Keputusan Menteri KP No 107 tahun 2021
4	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Pariaman	11.778,22	Keputusan Menteri KP No 106 tahun 2021
5	Agam	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Agam	6.531,77	Matek Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Sumbar Tahun 2022
6	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah	6.122,14	Keputusan Menteri KP No 2 tahun



No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan Konservasi	Luas (Ha)	Surat Keputusan
		Kabupaten Pasaman Barat		2022
7	Mentawai	Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai	129.566,00	Keputusan Menteri KP No 22 tahun 2018
B	KKPN			
8	Padang, Padang Pariman, dan Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya	39.920,00	Keputusan Menteri KP No 31 tahun 2022
	Luas Total		372.426,32	

Sumber: DKP Sumbar, 2023

Tujuan ke 14 adalah ekosistem lautan terdiri 10 indikator diantaranya adalah indikator 14.5.1* yaitu jumlah luas kawasan konservasi perairan laut. Targetnya adalah pada tahun 2020 melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan lautan, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Persentasi luas kawasan konservasi di perairan laut Sumatera Barat pada tahun 2023 sudah mencapai 10, 92 %, sehingga target SDGs sudah tercapai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.16. Persentase Kawasan Konservasi Laut Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan	Luas (Ha)	Sumber Data	Persentase
1	Kawasan Konservasi Laut	372.426,32	Matek Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumbar tahun 2022	10,92%
2	Luas Perairan Sumbar 12 mil	3.409.837,37	BA Kesepakatan Kemendagri, Oktober 2021	

Sumber: DKP Sumbar, 2023

Berdasarkan data Rencana Aksi daerah (RAD) Provinsi Sumatera Barat 2023 -2026 indikator 14.5.1* jumlah kawasan konservasi perairan laut , indikator SDGs yang selaras dengan indikator program RPJMD yaitu ada 2 (dua) yaitu :

- a. Presentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan atau pulau-pulau kecil baseline data tahun 2021 sebesar 37,24% dengan target SDGs tahun 2022 sebesar 47,06% dan pada tahun 2022 tercapai sebesar 48%.



b. Jumlah kawasan konservasi yang dikelola. Baseline data tahun 2021 terdapat 7 kawasan (7 kabupaten/kota yang memiliki laut) sebagaimana tabel 1 diatas. Target SDGs tahun 2022 adalah 7 kawasan sedangkan capaian SDGs tahun 2022 masih terhitung 6 kawasan karena Kawasan Konservasi Kabupaten Agam belum ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetapi sudah tercantum dalam Matak RZWP3K Sumbar Tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 sudah tercapai karena sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 126 tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Agam.

2. Indikator TPB 14.6.1. (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Berdasarkan data Rencana Aksi Daerah Berkelanjutan Provinsi Sumatera 2023-2026 bahwa persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan pada tahun 2022 sudah tercapai. Data Baseline persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tahun 2021 adalah 84,34%, dengan target SDGs tahun 2022 adalah 82 % dan capaian SDGs tahun 2022 adalah 85%.

Dari analisis isu paling strategis 6 kerusakan ekosistem wilayah pesisir laut diatas untuk menjaga kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan kepatuhan pelaku usaha perikanan diusulkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penataan ruang laut dan penataan zona kawasan konservasi perairan laut.
2. Mengendalikan pencemaran laut yang bersumber dari darat.
3. Penegakkan hukum terhadap perusak ekosistem pesisir dan laut

Untuk implementasi kebijakan diatas direkomendasikan juga beberapa kebijakan pendukung, yaitu:

1. Meningkatkan intensitas dan cakupan area pengawasan kawasan konservasi dengan melibatkan stakeholder terkait.



2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dan laut.
3. Mendorong tumbuhnya mata pencaharian alternatif dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan laut.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan di laut
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola kawasan konservasi
6. Mengembangkan jejaring kawasan konservasi perairan laut
7. Mengembangkan monitoring secara berkala terkait kondisi ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, lamun dan mangrove).
8. Meningkatkan perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir dan sempadan pantai

6.3. Rekomendasi TPB Yang Tidak Selaras/Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target/Tidak Ada Data

Adapun rekomendasi terkait dengan TPB Yang Tidak Selaras/Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target/Tidak Ada Data, antara lain:

1. Melakukan evaluasi indikator RAD TPB Provinsi Sumatera Barat dengan menselarakan indikator TPB sesuai dengan PerPres No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan.
2. Menyusun RAD TPB Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030 sesuai dengan indikator TPB PerPres 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Bab VII

KESIMPULAN

1. Proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 yaitu terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.
2. Pelaksanaan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045 juga mempedomani arahan dari Menteri Dalam Negeri No. 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dan RPJPD.
3. Secara Administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 kabupaten dan 2 kota yang mempunyai wilayah pesisir dan laut.
4. Luas daratan Provinsi Sumatera Barat $\pm 4.201.289,00$ Ha dan luas perairan (laut) $\pm 5.288.242,00$ Ha. Sedangkan menurut SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/PLA.2/2010/2021 luas Provinsi Sumatera Barat $4.249.908,417$ Ha Total Panjang garis pantai ± 1.378 km yang terdiri dari garis pantai wilayah daratan ± 375 km, ditambah garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km. Total Panjang garis pantai $\pm 2.312,71$ km dengan luas perairan laut $\pm 37.355,46$ km² (yang diukur dari garis pantai pasang tertinggi sampai 12 mil kearah laut lepas dan/ atau kearah perairan kepulauan).
5. Secara hidrologi, Jumlah sungai mencapai lebih kurang 3.303 sungai dengan 606 sungai telah teridentifikasi. Wilayah Sumatra Barat yang dialiri



sungai ini dapat dibagi atas 9 (Sembilan) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri, dan Masang.

6. Berdasarkan data pada RAD TPB Sumatera Barat, terdapat dari 17 TPB terdapat 348 indikator TPB dan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdiri dari 165 indikator yang selaras dengan dan 183 indikator yang tidak selaras/tidak tersedia data. Indikator-indikator yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat 621 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022, yang terdiri dari 13 Indikator Makro, 76 indikator IKU, 215 indikator IKD, 173 indikator program dan 144 indikator Progul.
7. Indikator selaras RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang akan dianalisis dalam laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini terhadap proyeksi sampai tahun 2045 adalah Indikator Makro, IKU dan IKD sebanyak 304 indikator.
8. Data yang yang tidak selaras dengan RPJMD/NA adalah sebanyak 183 indikator (53%) dan yang selaras adalah 165 indikator (47%). Dari 164 indikator yang selaras dengan RPJMD tersebut, sebanyak 71% merupakan Indikator Kinerja Daerah, 25% Indikator Kinerja Utama, dan 4% Indikator Makro. Dari indikator yang selaras tersebut juga dapat dinyatakan bahwa yang tercapai adalah 63% dan yang tidak tercapai 37%.
9. Dari 304 indikator tersebut terdiri dari 13 Indikator Makro, 76 indikator IKU, 215 indikator IKD. Dengan menggunakan baseline data tahun 2021 dan target capaian RAD TPD (dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026) diolah dengan memproyeksikan capaian untuk masing-masing indikator hingga tahun 2030 dan 2045. Namun, tidak semua dari 304 indikator RAD yang diproyeksikan dapat disandingkan ketercapaiannya dengan target Nasional (Perpres No. 59 Tahun 2017), karena tidak semua indikator terdapat pada Lampiran Perpres No. 59 Tahun 2017.
10. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) OPD yang terkait dengan indikator-indikator pada RAD TPB yang selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
11. Melalui Konsultasi Publik I dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pakar, LSM dan OPD Teknis Terkait, serta diskusi Tim Pokja mempertimbangkan gap capaian TPB terhadap target nasional, kondisi 6



(enam) muatan lingkungan hidup dan isu dari dokumen perencanaan (Isu Strategis KLHS RTRW dan Isu Strategis KLHS RPPLH, maka ditetapkan 5 (lima) isu Paling Strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 yaitu (1) Alih Fungsi Lahan; (2) Fluktuasi debit Sungai dan penurunan kualitas air; (3) Tingginya intensitas kebencanaan; (4) Belum optimalnya pengelolaan sampah; (5) Belum termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan; (7) Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan laut.

12. Analisis Skenario capaian TPB didasarkan kepada capaian RAD TPB yang indikatornya disandingkan ketercapaiannya dengan target Nasional (Perpres No. 59 Tahun 2017). Indikator yang tercapai akan tetap dilaksanakan sesuai dengan target RPJMD tahun 2021-2026 (BAU) dan untuk indikator yang tidak tercapai akan dilakukan dengan Upaya Tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2008.Hill dan William Faktor Perkembangan Wilayah (Hunian) 2008.
- 2012.Winaryo dan Sugiri,Arahan Perubahan Fungsional dakam Pembangunan, 2012.
- 2012.Djakapermana Ruchyat Deni Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota, 2012.
- 2012.Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat. 2012. *Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Barat (RAD-GRK)*. BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat.. Padang.
- 2012.Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman 2012. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032*. Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman *Provinsi Sumatera Barat*. Padang.
- 2014.Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 . Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- 2015.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.. 2015. *Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2014*. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.. Padang.
- 2015.Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, 2015, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Ekosistem 2015, Pekan Baru.
- 2017.Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Draft Rancangan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021*. BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- 2018.Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018.
- 2019.Sumatera Barat Dalam angka Tahun 2019.
- 2019.Pengelolaan dan Profil Kehati Sumatera Barat, 2019.
- 2020.Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.
- 2020.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2020.
- 2020.Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020.
- 2021.Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021.
- 2022.Buku Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
- 2022.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2022.

2022.Laporan Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

2022.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2022.Laporan Pemantauan Kualitas air Sungai Skala Provinsi Tahun 2022

2022.Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2022.

2022.Laporan Pemantauan Kualitas air Sungai Skala Provinsi Tahun 2022.

2022.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022 Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional 2019-2022. <https://sipsn.men>

2023 Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023.

2023 BPS Statistik Indonesia tahun 2023.

2023 Materi Teknis RTRW dan RZWP3K Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023-2043.

Lampiran 1

SK TIM POKJA

KLHS RPJPD



KLHS RPJPD | 2025-2045
PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 660-214-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2045

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan di Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 yang terdiri dari tim penyusun dan tenaga ahli dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi di Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 MARET 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri LHK RI di Jakarta,
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Sdr. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ka Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/Lembaga terkait di Padang;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 214 - 2023

TANGGAL : 17 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2045.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	
1	Mahyeldi	Gubernur	Pengarah	Mengarahkan Tim Penyusun dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
2	Asben Hendri, SE, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan Tim Penyusun untuk melakukan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Mengarahkan serta bertanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 3. Menandatangani surat-surat/administrasi terkait penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 4. Menandatangani laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 5. Menyampaikan laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar kepada Gubernur 6. Melakukan dan menandatangani berita acara penjaminan kualitas dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
3	Medi Iswandi, ST, MM	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Melakukan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RPJPD Provinsi Sumbar
4	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Ketua Tim dalam melakukan koordinasi, proses administrasi dan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Memberi masukan dan pertimbangan dalam analisis penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
5.	Desrizal, ST,M.Si	Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris II	1. Membantu tugas Ketua Tim dan Sekretaris I dalam melakukan koordinasi, proses administrasi dan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Memberi masukan dan pertimbangan dalam analisis penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
6.	Andi Irawan, ST, MT	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberi masukan dan pertimbangan dalam analisis penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
7.	Teguh Ariefianto, ST	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberi masukan dan pertimbangan dalam analisis penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
8.	Ir.Vianti Zami, M.Si	Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberi masukan dan pertimbangan dalam analisis penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
9.	Benny Ricardo, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Bappeda 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
10.	Devi Malinda, SE, Akt, MM	Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	
11.	PM	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	
12.	PM	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPKAD 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
13	Yasri Ardi, SE	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Anggota	1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPSDM 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14	Dessi Widia, S.Si	Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Balitbang 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
15	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPBD 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
16	Yassirli Amrini, SE, ME	Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Badan Kesbangpol 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
17	PM	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BKD 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
18	Hengki Akhdiat Anwar, SE, Ak,MM,CA	Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Inspektorat 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
19	PM	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Perkimtan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
20	Ir.Andi Ikhvan, ME	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas PSDA 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
21	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas ESDM 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
22	Jusmalinda, S.Hut, M.Si	Fungsional Perencana Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Kehutanan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
23	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Perindag 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
24	Ollyandes	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
25	Agri Yoga Riwaldi, SP,M.Si	Kepala Sub.Bag.Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
26	Triawan, Ag	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Koperasi UMKM 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
27	Ir.Palastri, M.Eng	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas PUPR 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
28	Nira Susanti, SKM, MKM	Perencana Muda Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Kesehatan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
29	Siswati, SH	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Sosial 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
30	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Diskominfo 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
31	PM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas PPKBKPS 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
32	PM	Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Pariwisata 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
33	Dr.Sadrianto, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Pendidikan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
34	Rahmat Nur Wijaksono, SE, MM, M.Si	Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat		
35	Yumel.Eqia, MM.Akt	Kasubag Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Perhubungan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
36	Agung Firmansyah, S.Tr.Tra	Staf Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Perhubungan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
37	Antin Maisusanti, S.H	Kasubag Program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
38	Delvi Danus, A.Md	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Disnakertrans 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
39	PM	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di DKP 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
40	Hari F Day, SE, Sk, M.Si	Fungsional Perencana Muda Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Kebudayaan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
41	Yanita Selly Meristika, S.Kom	Sub.Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Dinas Pangan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
42	Indah Martha Eriyani, ST, MM	Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di DPPA 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
43	Amrizal, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di DPMPSTP 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
44	Basrefnaldi, SE, M.Si	Kasubag Keuangan dan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
45	PM	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Biro Hukum 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
46	Hadi Putra, S.STP, M.A.P	Kasubag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Biro Perekonomian 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
47	PM	Biro Aset Setda Provinsi Sumatera Barat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Biro Aset 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
48	Devfi Agustina, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Biro Organisasi 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
49	PM	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Biro Kerjasama dan Rantau 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
50	Dian Sulistini, S.Si, M.Sc	Pengendali Ekosistem Hutan Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BKSDA 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
51	Goeastus Fasiven, S. Hut, M.Si	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS Dirjen PDASRH Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPDASHL 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
52	Priseyola Ayunda Prima, ST, MT	Penyusun Program dan Rencana Anggaran Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BWS Sumatera V 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
53	Mochammad Bayu Moelyantono, ST.MM	Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
54	Mila Artati, S.ST, M.Stat	Fungsional Statistisi Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPS 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
55	Fortuna Maisari, SH,M.Hum	Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BNN 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
56	PM	BPJS Ketenagakerjaan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

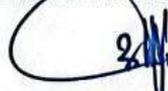
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
57	Anton Abdullah Rachmadie	Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BPJS Kesehatan 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
58	Ridwan Anhar	Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di BI 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
59	Adityawan Salam	Kepala Subbagian Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di OJK 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
60	Dessy Trianita, ST	Manajer Perencanaan dan pengembangan PDAM Kota Padang	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di PDAM 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
61	Deswita, SE	Kasubag Program Bagrenprogar Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan informasi (data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang ada di Polda 2. Melaksanakan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
62	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Sub.Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Melakukan dan mengevaluasi pengkajian pengaruh Kebijakan Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan 3. Melakukan dan mengevaluasi perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program 4. Melakukan dan mengevaluasi penyusunan rekomendasi perbaikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				<p>untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan</p> <p>5. Melaksanakan dan mengevaluasi pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p> <p>6. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS</p>
63	Irman,S,ST, MT	Kasi Perencanaan dan Evaluasi UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<p>1. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p> <p>2. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>
64	Adrian, ST	Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<p>1. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p> <p>2. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>
65	Yuli Astuti, SE,M.Si	Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<p>1. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p> <p>2. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>
66	Muhammad Arief Noviady, ST, MT	Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<p>1. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p> <p>2. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program</p>

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
67	Devi Hendra, S.Si, M.Si	Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program 2. Melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
68	Dikarama Kaula, ST, MIL	Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Mengkompilasi hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
69	Novriyanti, ST, M.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Mengkompilasi hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
70	Rosa Gustilisa, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Mengkompilasi hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
71	Dwi Elvia Ningsih, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Mengkompilasi hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
72	Liza Melinda, ST, M.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Mengkompilasi hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
73	Darma Haryeni, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2. Menyiapkan kebutuhan rapat kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 3. Membuat notulen rapat 4. Mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
74	Yulya Chartian, SKM	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Menyiapkan kebutuhan rapat kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 3. Membuat notulen rapat 4. Mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
75	Syafrida Yanti, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 2. Menyiapkan kebutuhan rapat kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar 3. Membuat notulen rapat 4. Mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
76	Junaidi, S.Ip	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2. Menyiapkan kebutuhan rapat kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 3. Membuat notulen rapat 4. Mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar
77	Feri Aldy	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2. Menyiapkan kebutuhan rapat kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 3. Membuat notulen rapat 4. Mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 214 - 2023

TANGGAL : 17 MARET 2023

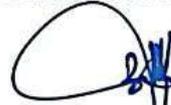
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2045.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Ardinis Arbain	Tenaga ahli Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Melakukan pendampingan terhadap tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Tenaga ahli Ilmu Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Melakukan pendampingan terhadap tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.	Eneng Fathonah, MA	Tenaga ahli SDGs/TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Melakukan pendampingan terhadap tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4.	Rahma Wirni, ST, M.Si	Tenaga ahli SDGs/TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Melakukan pendampingan terhadap tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5.	Dr. Marganof, M.Si	Tenaga ahli SDGs/TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

			2. Melakukan pendampingan terhadap tim penyusun dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
--	--	--	--

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Lampiran 2

KOMPETENSI

TENAGA AHLI



KLHS RPJPD | 2025-2045
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Dr. Ardinis Arbain
Tempat/tgl Lahir : Bukittinggi/ 14 Juni 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen Biologi FMIPA Unand
Jabatan : Dewan Pakar PSLH Unand
Alamat : Komp. Mawar Putih Blok N No. 13, Padang
Telp. Rumah : 0751- 492209
Handphone : 08126713290

Pendidikan

S1 : Biologi – UGM
S3 : Biologi botani Universitas Heidelberg, Jerman

Training/Kursus

1. Pengelolaan Fungsi Pelatihan : 1996
2. Penyusunan Renstra P.S. Lingkungan : 1998
3. Audit Lingkungan : 2010
4. Valuasi Lingkungan : 2010
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis : 2016

Karya Ilmiah/ Publikasi

1. Studi Populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat : 1998
2. DAS Sumatera Kaninchen : 1992
3. Percabangan pada Drynaria : 1995
4. Pteridophyta in Kayu Tanam Area : 1996
5. Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Mentawai. Makalah di : Maret 1997
sampaikan pada Seminar Nasional tentang Pembangunan Pulau
Pulau Kecil, Terpencil dan Strategis. Bukittinggi.

6. Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Kursus AMDAL. PSLH UNAND.
7. Biodiversitas dan Pengendalian Hama. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Seminar Regional Pestisida Ramah
Lingkungan. UNITAS.
8. Kaji Ulang Manajemen Irigasi Indonesia. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Lokakarya Penyesuaian Kelembagaan
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Petani.
Bukittinggi.
9. Autensitas Hutan Dalam Penentuan Zona Penyangga. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada interkonferensi PSL. Banda Aceh.
10. Penyesuaian kelembagaan pengelolaan Sumber daya air dan : Agustus 1997
Pemberdayaan petani (kaji ulang manajemen irigasi Indonesia)
11. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Pembagian : September 1997
Keuntungan Secara Adil dan Merata. Makalah disampaikan
pada Seminar/Sarasehan Keanekaragaman Hayati. Padang
12. Ekosistem Pesisir dan Laut. Makalah di sampaikan pada : Oktober 1997
Lokakarya Pesisir dan Pelatihan Masyarakat. Padang.
13. Masalah Lingkungan Hidup dan Kawasan Lindung di : Maret 1998
Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Diklat
Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Sumatera Barat.
Padang.
14. Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL. Makalah : April 1998
disampaikan pada Kursus AMDAL.
15. Studi Perambah Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. : April 1998
(Kab. Solok) Laporan Penelitian.
16. Studi populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat. : Oktober 1998
Bengkulu.
17. Arti Penting Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kawasan : November 1998
Penyangga. Makalah disampaikan pada Pelatihan Masyarakat
Desa Penyagga TNKS. Muaro Sijunjung.

18. Konservasi dan Pembangunan Daerah Terpadu. Studi 18 Des : 1998
ICDP TNKS. Laporan Penelitian.
19. Minyak Atsiri dari Tanaman Asli Siberut. Laporan Penelitian. : April 1998
20. Konsep Dasar Keanekaragaman Hayati. Makalah disampaikan : Juli 1999
Pada Lokakarya antara Bappedalda Sumbar dan PWI.
21. Pengendalian Pencemaran. Makalah disampaikan pada : Juli 1999
Pelatihan Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
22. Pengelolaan Limbah Padat dan Permasalahannya. Makalah : Oktober 1999
disampaikan pada Seminar tentang Pengelolaan Limbah di
Pasca Sarjana UNP.
23. Keanekaragaman Hayati di TNKS dan Kegiatan Konservasi di : November 1999
Desa-desa TNKS. Makalah di sampaikan pada Pelatihan
ICDPP-TNKS. Solok.
24. Studi Populasi Tapir (*Tapirus indicus*) di Taman Nasional : April 2000
Kerinci Seblat (Prosiding hasil penelitian)
25. Pengelolaan lingkungan hidup dan otonomi daerah : Agustus 2001
(kuliah umum Pascasarjana UNAND di UNRI)
26. Pengelolaan integratif Danau Singkarak menuju pemanfaatan : Maret 2002
Berkelanjutan (Makalah pada seminar lingkungan hidup
dampak PLTA Singkarak)
27. Interelasi aspek legalitas pengelolaan sumber daya air : September 2002
(visi irigasi no. 23)
28. Regional dialogue on water governments Bangkok Thailand : November 2002
(Participant)
29. Peningkatan kesadaran lingkungan global dan implikasinya : Agustus 2003
terhadap pengelolaan hutan dan penelitian bidang kehutanan
(prosiding nasional ke-6 MAPEKI)
30. Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup : Desember 2003
daerah tangkapan air Danau Singkarak, Kabupaten Solok.
31. Workshop tentang pelestarian tapir (di Krau, Malaysia) : 2003

32. Pengolahan limbah domestic (makalah pada diklat pengawasan serta pengendalian pencemaran) : Agustus 2004
33. Ekosistem danau dan pengelolaannya makalah pada sosialisasi maslah lingkungan hidup di Maninjau) : September 2004
34. Pengumpulan data dan informasi kulaitas lingkungan hidup Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. : Desember 2004
35. Kajian alternatif dalam Amdal (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas) : Juli 2005
36. Pelingkupan (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas) : Juli 2005
37. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya Alam berkelanjutan (Makalah pada pelatihan kader-kader lingkungan hidup Dinas Kehutanan Sumatera Barat) : Agustus 2005
38. Seminar on Engineering for environment in Bandung : November 2005
39. Studi Areal Konservasi dalam konsesi Perkebunan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. : November 2006
40. Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar : Desember 2006
41. Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas) : Juli 2007
42. Studi Ekosistem Danau Diatas. Laporan Penelitian : Oktober 2007
43. Kualitas lingkungan hidup Sumatera (Anggota tim penyusun) : Desember 2007
44. Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar : Desember 2007
45. Manusia dan Lingkungan (Makalah pada sosialisasi masalah lingkungan hidup di Padang Panjang) : Juni 2008
46. Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas) : Juni 2008
47. Sumatera Barat menuju propinsi Konservasi : Juni 2009
48. Pokok pokok pikiran untuk pengelolaan Mentawai Pasca Tsu Name. Round Table Discussion. : November 2010
49. Taman Kehati Sumatera Barat (disampaikan pada pertemuan

Pengelolaan Kehati KLH di Banjarmasin)	: November 2010
50. Tinjauan kritik MP3EI dari sudut lingkungan	: 2011
51. Status lingkungan hidup ekoregion Sumatera	: 2012

Pengalaman Kerja

1. Ketua PSLH Unand	1994-2004
2. Dekan FMIPA	2004-2008
3. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan	1999-2004
4. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan	2008-2014
5. Ketua Senat Universitas Andalas	2014-2017

Pengalaman Proyek di Bidang Lingkungan Hidup

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Padang Panjang 4. Kota Payakumbuh 5. Kota Pariaman 6. Kabupaten Agam 7. Kabupaten Limapuluh Kota 8. Kabupaten Padang Pariaman 9. Kabupaten Pasaman 10. Kabupaten Pasaman Barat 11. Kabupaten Sijunjung 12. Kabupaten Pesisir Selatan 13. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 	Tenaga Ahli	2023
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2023
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2023

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Perkotaan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman 2. Wilayah Perkotaan Lubuk Basung Kabupaten Agam 3. Wilayah Perkotaan Painan Kabupaten Pesisir Selatan Ibukota Kabupaten (IKK) Sarilamak Kabupaten Limapuluh Kota	Tenaga Ahli	2022
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung tahun 2022-2042	Tenaga Ahli	2022
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH): <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Padang Pariaman; 2. Kota Payakumbuh. 	Tenaga Ahli	2022
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Tebo	Tenaga Ahli	2022
Penyusunan Kajian Rencana Induk/ Road Map Program Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Kajian Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang Kota Payakumbuh	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH): <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Tanah Datar; 2. Kota Pekanbaru (Prov. Riau) 	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tenaga Ahli	2021

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
(RPPLH): 1. Kabupaten Solok Selatan; dan 2. Kota Sungai Penuh (Prov. Jambi)		
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota sbb: 1. Kabupaten Tanah Datar, 2. Kabupaten Padang Pariaman, 3. Kabupaten Dharmasraya, 4. Kabupaten Pesisir Selatan, 5. Kabupaten Sijunjung, 6. Kabupaten Dharmasraya, 7. Kabupaten Solok, 8. Kabupaten Pasaman 9. Kota Padang Panjang (Revisi RPJMD) 10. Kota Pariaman (Revisi RPJMD)	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): 1. Kota Bukittinggi, 2. Kota Payakumbuh (Revisi RPJMD), 3. Kabupaten Limapuluh Kota, 4. Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, 5. Kabupaten Tebo Prov. Jambi	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Solok Selatan	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota/Kabupaten:	Tenaga Ahli	2019

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Solok, 2. Kota Solok, 3. Kota Payakumbuh, 4. Kabupaten Padang Pariaman, 5. Kota Pariaman, 6. Kota Padang, 7. Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 		
<p>Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Agam, 2. Kabupaten Limapuluh Kota, 3. Kota Payakumbuh, 4. Kabupaten Tebo Provinsi Jambi 	Tenaga Ahli	2019
<p>Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Dharmasraya, 2. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 3. Kabupten Kerinci Provinsi Jambi. 	Tenaga Ahli	2019
<p>Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Barat dan 2. Kabupaten Agam 	Tenaga Ahli	2019
<p>Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang, 2. Kota Pariaman, 3. Kota Payakumbuh, 4. Kabupaten Pasaman Barat, 5. Kota Sungai Penuh (Prov. Jambi) dan 6. Kabupaten Tebo (Prov. Jambi) 	Tenaga Ahli	2018
<p>Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Padang, 2. Kota Pariaman dan 3. KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok 	Tenaga Ahli	2018

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Padang Panjang	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH): <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Barat, 2. Kota Solok, 3. Kota Padang Panjang, 4. Kabupaten Solok, 5. Kabupaten Solok Selatan, 6. Kabupaten 50 Kota, 7. Kabupaten Pesisir Selatan, 8. Kabupaten Pasaman dan 9. Kabupaten Padang Pariaman 	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 2. Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2017

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Solok 2. Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kabupaten Sijunjung 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Pasaman Barat 6. Kabupaten Solok 7. Kota Bukit tinggi 8. Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Rencana Penutupan Tambang (RPT) PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PTBA UPO)	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang	Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkotaan Arosuka Kabupaten Solok 2. Kawasan Perkotaan Rao Kabupaten Pasaman 	Tenaga Ahli	2015
Pemantauan Lingkungan Hidup Sungai Penuh PT Pertamina Geothermal Energy	Tenaga Ahli	2014

Demikianlah Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2022
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ardinis Arbain', written in a cursive style.

Dr. Ardinis Arbain

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG

DIE NATURWISSENSCHAFTLICH-MATHEMATISCHE
GESAMTFAKULTÄT

verleiht

Herrn Diplom-Biologe

ARDINIS ARBAIN

aus Ladang Lawas Bukittinggi/INDONESIEN

den Grad eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN
(DR. RER. NAT.)

nachdem er durch die Dissertation:

"Verzweigungssystem der Drynarioideae"

sowie durch die mündliche Prüfung seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen
und dabei das Gesamturteil erhalten hat:

SEHR GUT

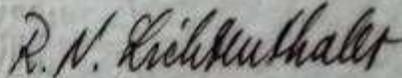
Heidelberg, den 6. Dezember 1989

DER REKTOR



(Prof. Dr. Volker Sellin)

DER DEKAN



(Prof. Dr. Rüdiger N. Lichtenthaler)





ESP3 ENVIRONMENTAL SUPPORT PROGRAMME



Certificate of Participation

This is to certify that :

Ardinis Arbain

has participated in

**STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) CAPACITY BUILDING
FOR ENVIRONMENT RESEARCH CENTRES :
TRAINING OF TRAINERS**

Solo, November 15th-18th 2016




Laksmi Wijayanti
Director of PDLKWS KLHK

ESP3 ENVIRONMENTAL SUPPORT PROGRAMME


Per Rasmussen
Programme Advisor ESP3

CV

Dr. Suparno, M.Si

Keahlian

Biologi Laut

Pendidikan

Universitas/Prodi	Minat	Lulus
S1 Perikanan IPB	Perikanan	1993
S2 Ilmu Kelautan IPB	Biologi Laut	1999
S3 Ilmu Kelautan IPB	Biologi Laut	2012



Pengalaman Menjadi Anggota Komisi/Panitia

1. Anggota Komnas Kajiskan Tahun 2020-2023
2. Komisi Amdal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023
3. Anggota Tim Komisi Validasi KLHS Provinsi Sumbar Tahun 2019-2023
4. Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021

Personal data

Dr. SUPARNO, M.Si
Kediri, 20 Januari 1969

Alamat Rumah

Wisma Indah VII, Blok J No 2,
Parupuk Tabing, Padang

Handphone

(+62) 081315887679

Email

suparnoprano@bunghatta.ac.id

Identitas Diri

1. Pekerjaan :	Dosen PNS LLDIKTI Wilayah X dpk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta
2. NIP/NIDN	196901201994031002/ 0020016909
3. Alamat Kantor	Universitas Bung Hatta. Kampus I. Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133

Tahun	Pengalaman Kegiatan
1998	Potensi Sumberdaya Hayati Calon Taman Laut Teluk Saibi Sarabua (Ketua Tim) (Taman Nasional Siberut)
2001	Potensi Sumberdaya Hayati Kelautan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Padang (Ketua Tim) (Bapeda Kota Padang)
2002	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Terumbu Karang Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Pieh dan Perairan di Sekitarnya (Anggota Tim) (Bapeda Provinsi Sumbar)
2022	Kondisi Biofisik Terumbu Karang di Perairan Provinsi Sumatera Utara (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumatera Utara)

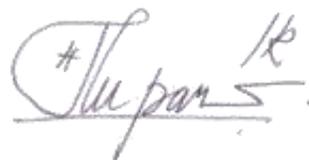
2003	Kajian Kondisi Biofisik Terumbu Karang di Perairan Pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2004	Kajian Pengembangan Wisata Bahari Di Kabupaten Nias dan Mentawai Kegiatan Coremap (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2004	Kajian Kondisi Biofisik Terumbu Karang di Perairan Pulau Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2006	Pembuatan Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan DKI Jakarta (Ketua Tim) (Pemda DKI)
2007	Identifikasi dan Penilaian Potensi Calon KKLD Kabupaten Bombana (Ketua Tim) (KKP)
2007	Pemetaan Terumbu Karang Teluk Lampung (Ketua Tim) (DKP Lampung)
2008	Penyusunan Zonasi Kabupaten Pamekasan (Ketua Tim) (KKP)
2009	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kerusakan Terumbu Karang dan Mangrove Sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008 DKI Jakarta (Ketua Tim) (Pemda DKI)
2009	Manajemen Plan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Lampung Barat (Ketua Tim) (DKP Lampung)
2010	Manajemen Plan dan Review Zonasi TWP Kapoposang (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2010	Zonasi Pesisir dan Laut Kabupaten Padang Pariaman (Ketua Tim) (BPPL Padang)
2011	Evaluasi Efektivitas Pengelolaan TWP/SAP (Anggota Tim) (KKP)
2011	Zonasi Wilayah Pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai (Ketua Tim) (BPSPL Padang)
2012	Master Plan Kawasan Konservasi Suaka Pesisir Batang Gasan (Ketua Tim) (DKP Kabupaten Padang Pariaman)
2012	Zonasi Wilayah Pesisir dan laut Kabupaten Tanjung Jabung Jambi (Ketua Tim) (BPSPL Padang)
2014	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Ketua Tim) (DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai)
2014	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2014	Penyusunan Dokumen dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus , Provinsi Lampung (Ketua Tim) (DKP Lampung)
2014	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Daerah (KKPD) Kota Padang (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2015	Zonasi Rinci Pesisir dan Laut Kabupaten Lampung Selatan (Ketua Tim) (DKP Lampung)
2015	Rencana Zonasi dan Masterplan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Pulau Nipa dan Pulau Pelampong (Anggota Tim) (KKP)
2015	Identifikasi Pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Batang-Segama, Kabupaten Lampung Timur (Ketua Tim) (DKP Lampung)
2015	Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Perikanan Berkelanjutan dan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Biak Numfor (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2015	Penyusunan Rencana Pengelolalaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pesisir Selatan (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)

2016	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Ketua Tim) (Coremap KKP)
2016	Penyusunan Kondisi Awal Biofisik Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pieh dan Laut Sekitarnya (Ketua Tim) (Loka Pekanbaru)
2016	Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pesisir Selatan (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2018	Penyusun Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatera Barat (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2019	Monitoring Terumbu karang dan Ekosistem Terkait di TWP Selat Bunga Laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai (Ketua Tim) (Coremap LIPI)
2020	Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pasaman Barat (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2020	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pagai Utara (Anggota Tim) (BPSPL Padang)
2022	Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam (ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2022	Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2023	Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kota Pariaman (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2023	Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kabupaten Pesisir Selatan (Ketua Tim) (DKP Provinsi Sumbar)
2023	Pemetaan Potensi Lobster Perairan Sumatera Barat (DKP Provinsi Sumbar)

Sertifikat Kompetensi	Tahun	Lembaga Yang Mengeluarkan
Sertifikat Asesor Kompetensi No Reg MET 000.000 619.2014	Tahun 2022	BNSP
Sertifikat Ahli Pengelola Sumberdaya Perairan No. Reg NPL 0445-2016	Tahun 2016	BNSP
Sertifikat Ahli Penilai Kondisi Padang Lamun No Reg OCE 858 00100 2019	Tahun 2019	BNSP dan LIPI
Sertifikat Kompetensi Ahli Pengelola Kawasan Konservasi Perairan No Reg KKP 039 07384 2022	Tahun 2022	BNSP

Demikian CV ini Saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menjadi Tenaga Ahli.

Padang, 4 Januari 2023



Dr. Suparno, M.Si

Institut Pertanian Bogor



Atas Berkah dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
Setelah memenuhi semua persyaratan pendidikan Doktor

Institut Pertanian Bogor

dengan ini menganugerahkan gelar

DOCTOR

Kepada

Suparno

lahir di Kabupaten Kediri tanggal 20 Januari 1969

Oleh karena itu ia mempunyai kehormatan, hak dan tanggung jawab berkaitan dengan gelar tersebut.
Bogor, tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas

Dekan Sekolah Pascasarjana,

Rektor,



Handwritten signature of Prof. Dr. Herry Suhardiganto, M.Sc.

Dr. Ir. Bahrul Syah, M.Sc. Agri-Sc. Sarjana
NIP. 19650814 199002 1 001
Prof. Dr. Herry Suhardiganto, M.Sc.
NIP. 19590910 198503 1 003



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 2164 / DDA / UGM - 001 / 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:



Nama : *Dr. Suparno, M.Si.*
Tempat dan Tanggal Lahir : *Kediri, 20 Juni 1969*
Jabatan : *Josen*
Instansi : *Universitas Bung Hatta*
Kualifikasi : *B a i k*

Pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Angkatan ke -152 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) Bekerjasama dengan Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) Indonesia pada Tanggal 24 - 28 Januari 2022 Secara Daring yang meliputi 45 Jam Pelajaran.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Kepala PSLH UGM
Ketika BKPSL
Dr. M. Pramono Hadi, M.Sc.
NIP. 196201021986021001



DAFTAR MATA PELAJARAN
PELATIHAN DASAR-DASAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
ANGKATAN KE-152 : TANGGAL 24 - 28 JANUARI 2022

No.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN
1	Pengarahan Program Diklat	2
2	Pengertian dan Manfaat AMDAL dan UKL-UPL	2
3	Proses AMDAL dan UKL-UPL	2
4	Kebijakan Terkait Penataan Ruang	2
5	Pengantar Keterkaitan antara AMDAL UKL-UPL dengan Sistem Perizinan	2
6	PUU Sektor dan Daerah yang Berkaitan dengan AMDAL, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan dan Izin Usaha/dan atau Kegiatan serta Perizinan Lainnya	2
7	Penapisan Kegiatan Wajib AMDAL dan Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	2
8	Proses Pelingkupan	3
9	Pengantar Prakiraan dan Evaluasi Dampak	2
10	Pengantar Pengelolaan dan Pemantauan	2
11	Proses Penyusunan AMDAL (RKL-RPL)	2
12	Proses Penyusunan AMDAL (ANDAL, Persetujuan Teknis dan RKL-RPL)	3
13	Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	2
14	Perubahan Persetujuan Lingkungan	2
15	Pengawasan dan Penegakan Hukum (Evaluasi Kinerja Komisi Penilai, Evaluasi LPJP dan Personil, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana)	2
16	Etika Penyusun dan Penilai AMDAL	2
17	Sistem Informasi AMDAL	2
18	Evaluasi	2
	TOTAL JAM PELAJARAN	45

Kurikulum ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Koordinator Pelatihan PSLH UGM

Dr. Endang Astuti, M.Si.
NIP. 19681223 199702 2 001

4558615



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 72104 3141 6 00000100 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Suparno

No. Reg. OCE 858 00100 2019

Telah Kompeten pada Bidang :
Is competent in the area :

Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Professional, Scientific and Technical Activities

Dengan Kualifikasi/ Kompetensi :
With Qualification/Competency :

Penilai Kondisi Padang Lamun
Assessor of Seagrass

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 26 Juni 2019

Atas nama (On behalf of) BNSP
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Pusat Penelitian Oseanografi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Research Center For Oceanography Professional Certification Body
Indonesian Institute of Sciences


Taryano, S.P., M.Si

Ketua / Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

No.	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	M.721011.001.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja <i>Implement Communication and Cooperation in the Workplace</i>
2.	M.721014.001.01	Melakukan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Padang Lamun <i>Implement Occupational Health and Safety Procedures in Seagrass Environment</i>
3.	M.721014.002.01	Melakukan Koordinasi Prasurevel Padang Lamun <i>Demonstrate the Prasurevel Coordination for Seagrass Monitoring</i>
4.	M.721014.003.01	Menyiapkan Peralatan Survei Padang Lamun <i>Prepare the equipment for Seagrass Monitoring</i>
5.	M.721014.004.01	Menentukan Koordinat Stasiun Pemantauan Padang Lamun <i>Determine the coordinate of Seagrass Monitoring Station</i>
6.	M.721014.005.01	Melakukan Pelacakan Koordinat Stasiun Pemantauan Padang Lamun <i>Demonstrate the coordinate tracking for Seagrass Monitoring Station</i>
7.	M.721014.006.01	Melakukan Pengambilan Data Lamun <i>Demonstrate Seagrass Data Collection</i>
8.	M.721014.007.01	Menganalisis Data Pemantauan Padang Lamun <i>Analyze Seagrass Observation Data</i>
9.	M.721014.008.01	Membuat Laporan Kondisi Padang Lamun <i>Create Seagrass Conditions Report</i>

Jakarta, 26 Juni 2019

Lembaga Sertifikasi Profesi Pusat Penelitian Oseanografi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Research Center for Oceanography Professional Certification Body
Indonesian Institute of Sciences



Suparno

Tanda Tangan Pemilik
(Signature of holder)

Ni Wayan Purnama Sari, S.Si., M.Si
Manajer Sertifikasi
(Certification Manager)

Daftar Unit Kompetensi

List of Unit(s) of Competency

No	Kode Unit Kompetensi Code Of Competency Unit	Judul Unit Kompetensi Title Of Competency Unit
1.	A.033101.001.01	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Dasar Pengelola Kawasan Konservasi Perairan. (Explaining the Basic Principles of Marine Conservation Area)
2.	A.033101.002.01	Menjelaskan Beberapa Proses Dan Interaksi Penting Pada Ekosistem Pesisir dan Laut (Explaining Important Interactions and Multiple Processes On Coastal And Marine Ecosystems)
3.	A.033103.001.01	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Kegiatan Pendidikan Untuk Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (Explaining the Principles of Educational Activities for Marine Conservation Area)
4.	A.033104.001.01	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Kegiatan Penerapan Hukum Untuk Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (Explaining the Principles of Law Application Activities for Marine Conservation Area)
5.	A.033105.001.01	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Kegiatan Perikanan Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Perairan (Explaining the Principles of Sustainable Fisheries Activities in Marine Conservation Area)
6.	A.033106.001.01	Menjelaskan Prinsip-Prinsip Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Konservasi Perairan (Explaining the Principles of Tourism Activities in Marine Conservation Area)
7.	A.033101.003.01	Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan (Doing Pre-planning Preparation)
8.	A.033101.004.01	Merumuskan Masalah Yang Akan Ditangani (Formulate The Problem Which Will Be Handled)
9.	A.033101.005.01	Menyusun Strategi Pengelola (Develop Manager Strategy)
10.	A.033102.001.01	Membuat Konsep Rencana Pemantauan Kawasan Konservasi Perairan (Drafting a Monitoring Plan for Marine Conservation Area)
11.	A.033101.006.01	Membuat Konsep Rencana Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif (Drafting an Effective Marine Conservation Area Management Plan)
12.	A.033101.007.01	Membuat Draft Dokumen Rencana Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (Drafting a Document for the Management of Marine Conservation Area)



Dr. Ir. Suparno, M.Si
Tanda tangan pemilik
Signature of holder

**Lembaga Sertifikasi Profesi
Kelautan dan Perikanan**
Professional Certification Agency
Marine and Fisheries

Dr. Ir. Anthon A. Djari, MS
Manager Sertifikasi
(Manager Certification)

CURRICULUM VITAE

- 1 Nama : DR. H. Marganof, M.Si
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 21 September 1965
- 3 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Alamat : Perumahan Taman Citra Berlindo II Blok DD No. 2 Batang Kabung Ganting, Kec. Koto Tengah Kota Padang 25172
- 6 Telp/HP : 082384654329
- 7 E-mail : marganofkarani@ymail.com
- 8 Pendidikan : S-1: Program Studi Kimia, FPMIPA IKIP Padang (1990)
S-2: Program Studi Kimia FMIPA, PPS-UN Malang (1999)
S-3: Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB Bogor (2007)
- 9 Bidang Keahlian : Pencemaran Lingkungan
- 10 Pelatihan : 2005 Kursus Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) A, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
2009 Kursus Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) B, Pusat Penelitian dan Lingkungan Hidup (PPLH) IPB, Bogor
2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS Bagi Konsultan KLHS-DANIDA KEMENDAGRI-ESP2 : Jakarta
2010 Bimbingan Teknis (Bintek) KLHS: *National and Local Consultant: SEA Applied in Local Development Plans*, DANIDA, *output 2.3. (SEA in Bangda)*- Jakarta: Penerapan KLHS di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang
2014 Kursus Auditor Lingkungan, PSLH UGM Yogyakarta
2016 Kursus Kompetensi ATPA No. 564 00143 2017 Sertifikat BNSP LSK-LHIATPA 2017
2020 Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ITB Bandung. Sertifikat: KLHS-9202028/I1.B04.1.1/LL/2020

11. Pengalaman Menyusun Dokumen Lingkungan (KLHS, AMDAL, UKL-UPL)

- 2021 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan *Stoen Crusher* dan AMP CV. Citra Anugerah Putra Di Kabun Dotor Korong Titian Panjang Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman
- 2020 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Penambahan Kegiatan Pertambangan Batuan Sungai Dengan Rencana Kegiatan Pembangunan *Stoen*

- Crusher* PT. Tigo Padusi Nusantara Di Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2020 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. Rara Rizky Jaya, Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya
- 2020 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan *Stoen Crusher*, *AMP* dan *Batching Plant* PT. Bungamas Perkasa Di Bukit Pulai Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 2019 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025
- 2019 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Painan 2019-2039 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
- 2019 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Kambang 2019-2039 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
- 2019 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Mandeh 2015-2035 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
- 2019 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Tapan 2015-2035 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
- 2019 : Ketua Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
- 2018 : Anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
- 2018 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2017-2037
- 2018 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Sumatera Barat 2019-2024
- 2018 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman 2017-2037
- 2018 : Ketua Tim Penyusun DPLH Klinik Pratama Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
- 2017 : Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Sumatera Barat 2017-2037
- 2017 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Sungai Gemuruh Nagari Setara Naggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2017 : Ketua Tim Penyusun DPLH Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2017 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan PT. Matra Prima Asri di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
- 2017 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Perumahan CV. Royal Pasaman di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
- 2017 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) PT. Tigo Padusi Nusantara di Kampung Koto Rawang

- Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2017 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) PT. Taruko Putra Nusantara di Jorong Mesin Gergaji Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Anggota Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Auditorium Kantor Bupati Pesisir Selatan, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Mess GOR H. Ilyas Yacub, Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan IPAL Komunal Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Non Logam (Batuan Sungai) CV. Indo Jaya Perkasa di Jorong Embacang Limus Nagari Tigo Sepakat Indropura Kecamatan Pacung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Puskesmas Air Pura Kampung Air Mati Nagari Muara Indrapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- 2016 : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Penambangan Mineral Batuan Sungai a/n Sri Wahyuni di Kampung Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
- 2016 : Ketua Tim Penyusun UKL-UPL Rencana Pembangunan Hotel Saga Murni, Sago Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2016 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi di Nagari Surantih, Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMP Kota Padang 2015-2025
- 2015 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pengambilan Mineral Non Logam/Tanah Liat (*Clay*) CV. Elok dan Son di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan Sungai CV. Merapi Anugrah Mandiri di Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

- 2015 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pembangunan Pengamanan Muara dan Pantai Salido di Nagari Sago-Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Normalisasi Batang Salido di Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2015 : Ketua Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Pengambilan Mineral Batuan/Bahan Galian C PT. Nicko Putra Utama di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Ketua Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan AMDAL Pengamanan dan Reklamasi Pantai Carocok Painan Semester I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- 2014 : Anggota Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)RPJMD Kota Padang 2014-2019
- 2013 : Anggota Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032

12. Organisasi Profesi

- 2014-2020 : Anggota Tim Pembinaan dan Supervisi Penerapan/Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat
- 2013-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat
- 2012-sekarang : Wakil Ketua INKALINDO-KLHS Provinsi Sumatera Barat
- 2010-2016 : Anggota Peneliti *Dewan Riset Daerah* (DRD) Provinsi Sumatera Barat
- 2010-sekarang : *University Networking* KLHS/Pembina Anggota Jejaring Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perguruan Tinggi se-Indonesia
- 2010-sekarang : Ketua Bidang Pengkajian Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan (PERWAKU) Provinsi Sumatera Barat
- 2015-sekarang : Direktur Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar)
- 2008-sekarang : Anggota Tim Teknis/Penilai AMDAL Kota Padang

Padang, November 2022



Dr. H. Marganof, M.Si

No. : PPsA.Ps.086.2009



Sertifikat



Menyatakan bahwa:

Dr. Marganof, M.Si.

telah LULUS dalam kegiatan:

Pelatihan Penyusun Amdal

Bogor, 02 – 24 November 2009

diselenggarakan oleh:

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup - Institut Pertanian Bogor
(PPLH-LPPM, IPB)



Rektor
Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. H. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
REKTOR NIP. 19590910 198503 1 003



Kepala
PPLH-LPPM, IPB

Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S.
NIP. 19600808 198903 1 003

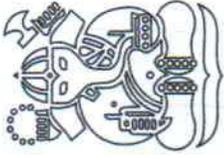
Materi Pelatihan

- ❖ Ujian Awal
- ❖ Dasar-Dasar & Krisis Ekologi
- ❖ Tipologi Ekosistem & Kerawannya
- ❖ Hukum Lingkungan
- ❖ Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- ❖ Kebijakan & Peraturan Perundang-undangan AMDAL
- ❖ Aspek Tata Ruang dalam AMDAL
- ❖ Sistematisa Penyusunan Dokumen AMDAL
- ❖ Prinsip, Proses & Metode Pelingkupan
- ❖ Metode Prakiraan Dampak
- ❖ Metode Evaluasi Dampak
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Kualitas Udara, Getaran, Kebisingan, Iklim serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Kualitas Air, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Hidrologi, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Geofisik, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Tanah, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Hidrodinamika, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Flora & Fauna Daratan, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Biota Perairan, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Sosbud, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Ekonomi, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Dampak Rencana Usaha/Kegiatan terhadap Aspek Kesehatan Masyarakat, serta Metode Pengumpulan & Analisis Datanya.
- ❖ Metode Evaluasi Dampak Kumulatif
- ❖ Teknik Konsultasi Masyarakat (Konsultasi Publik)
- ❖ Aplikasi Sistem Informasi Geografi Dalam Kajian AMDAL
- ❖ Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan
- ❖ Tata Laksana Penilaian Dokumen AMDAL
- ❖ Prinsip-Prinsip Penilaian Dokumen AMDAL
- ❖ Studi Kasus: Proses Produksi Semen PT. ITP Tbk serta Sistem Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
- ❖ Praktek Pelingkupan
- ❖ Latihan Penyusunan Dokumen KA
- ❖ Simulasi Presentasi Dokumen KA
- ❖ Perbaikan Dokumen KA
- ❖ Praktek Pengumpulan Data di Lapangan
- ❖ Analisis Data & Penulisan Dokumen ANDAL, RKL & RPL, Ringkasan Eksekutif
- ❖ Simulasi Presentasi Dokumen ANDAL, RKL & RPL
- ❖ Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL & RPL
- ❖ Ujian Akhir

Ketua Pelatihan

Ambyana. A

Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga
NIP. 19481207 198012 1 001



**PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Menyatakan bahwa

Dr. H. Marganof, M.Si.

Telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Gelombang 9 di Bandung pada tanggal 20-24 Januari 2020
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor
KLHS-9202028/11.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 24 Januari 2020
Kepala PSLH ITB,

Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.
NIP. 195609061982111001



Nama : Dr. H. Marganof, M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Sungai Naning, 21 September 1965

Tanda tangan,

**Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Gelombang 9, 20-24 Januari 2020**

Materi yang diberikan :

No	Mata Ajaran	Jumlah JPL
1	Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan	4
2	Konsep Penyusunan KLHS	4
3	Analisis 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	2
4	Analisis Pembiayaan Pembangunan	2
5	Analisis Spasial dan Sistem Informasi Geografis (SIG)	4
6	Pemanfaatan Data Ekologi dan Ekoregion	2
7	Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung	2
8	Perhitungan Jasa Ekosistem	2
9	Perhitungan Efisiensi Sumber Daya Alam	2
10	Perhitungan Risiko Lingkungan dan Kebencanaan	2
11	Perhitungan Risiko Perubahan Iklim	2
12	Perhitungan Keanekaragaman Hayati	2
13	Rekomendasi KLHS di Perkotaan dan Pedesaan	2
14	Integrasi Penyusunan KLHS kedalam Perencanaan Tata Ruang	4
15	Integrasi Penyusunan KLHS kedalam Rencana Pembangunan	4
Jumlah		40 JPL

Keterangan: 1 JPL (Jam Pelajaran) = 45 Menit

Sertifikat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan PSLH-ITB
Nomor : 002/11.B04.1.1/LL/2020 tentang Kelulusan Peserta
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Gelombang 9
Tanggal 20-24 Januari 2020

CURRICULUM VITAE



Personal Data

Name : Eneng Fathonah
Birth Date : February, 20th 1971
Address : Jl. Khatib Sulaiman Gg Kopertis Wilayah X No. 16 RT 003/RW 013 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Kode Pos 25137.
Mobile phone : 08118123201
E-mail : enengfathonah@gmail.com

Formal Education

2017 : University of Indonesia, Jakarta
Master of Public Administration
1997 : Indonesia University of Education, Bandung
Bachelor of Civil Engineering

Training and Seminar

1. Indonesia Dalam Peringkat SDG Index 2020 Dunia dan Bagaimana Merencanakan Aksi Selanjutnya, SDG Academy Indonesia (2020).
2. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Web Series (2020).
3. Strengthening the Platform of Experts and Universities in Achieving SDGs in West Sumatra, SDGs Center Andalas University, Indonesia (2020).

4. Training of Trainers (ToT) on Monitoring, Evaluation, and Reporting of SDGs Action Plan, Bappenas, Indonesia (2019).
5. Training on Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation, Bappenas, Indonesia (2018).
6. Refreshing Training on Change Management, GIZ, Indonesia (2015).
7. Training on Master Class Bureaucratic Reform, MDF-GIZ, Indonesia (2011).
8. Training of Facilitators on Creating a Common Approach of Indonesian Bureaucratic Reform, Application and Mastering Guidebooks (1, 2, 3, 7, 9), MDF-GIZ, Indonesia (2011).
9. Tax Training, GIZ, Indonesia (2011).
10. Training on IT and Knowledge Management, GTZ, Indonesia (2010) .
11. RBM Training, GTZ, Indonesia (2010).
12. Capacity WORKS Training, GTZ, Indonesia (2010).
13. Training for Knowledge Management about the Application of Knowledge Tree, GTZ, Indonesia (2010).
14. Knowledge Management Training, GTZ, Indonesia (2010).
15. Do No Harm Training, GTZ, Indonesia (2010).
16. Seminar and Exchange of Experiences – Indonesia Capacity Development for Public Administration, BVS, Germany (2008).
17. Train of Trainer on How to Design Training Programmes and Improve Your Teaching and Training Skills, Asian Management Institute-GTZ, Thailand (2008).
18. Change Management II Training, Asian Management Institute-GTZ, Indonesia (2007).
19. Complaint Management Training, GTZ, Indonesia (2007).
20. Pelatihan “Pengawasan Analisis dan Perencanaan Pembangunan oleh Organisasi Masyarakat Sipil” Satunama, Indonesia (2005).
21. Training of Facilitator “Public Service Delivery Improvement”, GTZ, Indonesia (2005).
22. Siklus Pengembangan Kapasitas Lembaga Independen Masyarakat Madani: “Manajemen Konflik”, Satunama, Indonesia (2004).
23. Siklus Pengembangan Kapasitas Lembaga Independen Masyarakat Madani: “Strategi Komunikasi untuk Pengawasan Pembangunan” Satunama, Indonesia (2004).
24. Community Development Training, Corporate Forum for Community Development (CFCD), Indonesia (2003).

Working Experience

November 2020 – present	Provincial SDGs Expert for Province of West Sumatera on the Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs – SSTC)
July – November 2020	Short-term National Consultant for supporting the development of the Replication of Public Service Innovation Guideline/Tool Box.
June 2018 – May 2020	Advisor for West Sumatera Province-Indonesia on GIZ-Support to the National Road Map 2030 and Regional Action Plans on Planning and Monitoring the SDGs Program, the Indonesia Ministry of National Planning-Jakarta.
March 2017 – June 2018	Expert on Public Policy of the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP), the Indonesian Ministry of Finance-Jakarta.
December 2016	Advisor on Project Development (short term) of Particip GmbH, Jakarta.
October 2014 – November 2016	Advisor on HR and Public Finance, GIZ-Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI), the Indonesian Ministry of Finance-Jakarta.
January 2010 – March 2013	Advisor for Bureaucracy Reform and Good Governance, GIZ-DeCGG. the Indonesian Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform-Jakarta.
January 2009 – December 2009	Senior Technical Officer for Public Service Improvement, GTZ-SfGG, the Indonesian Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform-Jakarta.
May 2005 – January 2009	Technical Officer for Public Service Improvement, GTZ-SfGG, the Indonesian Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform-Jakarta.

August 2003 – April 2005	Field Assistant for Public Service Improvement, GTZ-SfGG, the Indonesian Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform-Jakarta.
November 2001 – May 2003	Supervisor and Community Development Officer for P2MPD Project in the District of Banyumas, Central Java, PT. Bina Karya Persero, the Public Works Service Agency of Banyumas District-Central Java-Jakarta.
March 2000 – November 2000	Supervisor for Quality of Life Improvement-Strategic Urban Road Infrastructure Project (QLI-SURIP), Central Java, PT. Bina Karya Persero, the Public Works Service Agency of Semarang Municipality-Central Java.
July 1998 – December 1998	Hydrologist Assistant for Embung Tirto and Embung Coyo Feasibility Study, Central Java, PT. Bina Karya Persero, Semarang Municipality-Central Java.
April 1998 – October 1998	Supervisor for the PT. BDN Infrastructure Project, Central Java, PT. Bina Karya Persero, Semarang Municipality-Central Java.
June 1997 – March 1998	Lecturer in Civil Engineering Program, Garut Institute of Technology, the STTG Al-Musadaddiyah, Garut District-West Java.

Padang, 16th November 2020



Eneng Fathonah

Certificate of Employment

The undersigned certifies that the person mentioned below:

Name: **Eneng Fathonah**
N I P: **127906**
Working period: **01.06.2018 – 31.05.2020**

was an employee of the Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH with her last
project assignment was support the **Sustainable Development
Goals (SDGs) Secretariat**.

The last position is as **Advisor**.

Kind regards,



Margaretha Simorangkir
Human Resources Manager

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sitz der Gesellschaft Bonn und Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Deutschland
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Deutschland
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

Amtsgericht Bonn
Eintragungs-Nr. HRB 18384
Amtsgericht Frankfurt am Main
Eintragungs-Nr. HRB 12394

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Staatssekretär Martin Jäger

Vorstand
Tanja Gönner (Vorstandssprecherin)
Thorsten Schäfer-Gümbel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

1.	Nama Personil	:	Rahma Wirni. S.T., M.Si	
2.	Sertifikat Keahlian	:	Ahli Teknik Air Minum – Madya. LPJK No. 1.5.504.2.194.03.1900175	
3.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Solok, 10 Mei 1982	
4.	Hp	:	+62 813 7474 0299	
5.	Email	:	rahmawrn837@gmail.com	
6.	Alamat	:	Komplek Perumahan Dosen Unand Blok DIII-02-04, Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang	
7.	Nomor KTP	:	1372025005820021	
8.	Nomor NPWP	:	58.311.130.7.201.000	
9.	Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta, Tahun 2006 b. Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Andalas, Tahun 2013 	
10.	Pendidikan Non Formal	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Persetujuan Teknis Untuk Air Limbah PT. Ganesha Environmental & Energy Services (PT GEES) (BPUDL ITB), 2022 b. Pelatihan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), PT. Ganesha Environmental & Energy Services (PT GEES) (BPUDL ITB), 2022 c. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Analisis Lingkungan, Pusat Kebijakan Keenergian, Institut Teknologi Bandung (ITB), 2021 d. Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), Institut Teknologi Bandung (ITB), 2020 e. Pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar AMDAL di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas (UNAND) Padang, 2014 f. Pelatihan Audit Lingkungan, UGM g. Training Poka Yoke – PT. Foster Electric Indonesia, Batam h. Training Internal Auditor ISO TS, PT. BIZCOM, Batam 	

II. Pengalaman Penyusunan Dokumen Lingkungan

A. Terkait Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Penyusunan KLHS RDTR Wilayah Perkotaan Lubuk Basung Penyusunan KLHS RDTR Wilayah Perkotaan Painan Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Bukittinggi	2023
2.	Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Sijunjung	2022
3.	Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang.	2021
4.	Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kota Padang Panjang	2021
5.	Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi	2020
6.	Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJPD Provinsi Sumatera Barat	2019
7.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Bukittinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi	2018

B. Terkait Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Tenaga Ahli Kimia Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Ruas Jalan Pelita-Batu Rotok, Batu Rotok-Tepal, Tepal-Batu Dulang, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021
2.	Tenaga Ahli Kimia Penyusunan Dokumen AMDAL Solo Techno Park, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	2019
3.	Tenaga Ahli Kimia Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RS Kusta Dr Rivai Abdullah Mariana, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2018
4.	Penyusun Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pabrik PT Semen Padang untuk Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Melalui Pemanfaatan Sebagai Alternatif Substitusi Raw Material (AR) dan Bahan Bakar (AF) pada Proses Pembuatan Semen. Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang	2018
5.	Tenaga Ahli Kimia, Penyusunan DELH TUKS PT Bukit Asam, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang	2018
6.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Hotel dan Mall Padang Pariaman City, Jl Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman	2017
7.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pengembangan Hotel Grand Zuri Dumai Cabang Padang, Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang	2017

No.	Kegiatan	Tahun
8.	Penyusunan Adendum Rencana Penambahan Kegiatan Pendukung PLTU Teluk Sirih 2x112 MW, Jalan Lintas Padang – Painan KM 25 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	2017
9.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam (Bijih Besi) PT Sumber Minera Bersama, Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman	2016
10.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Jalan Jembatan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan pemberi kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	2016
11.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Islamic Center Padang Panjang	2016
12.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Toko Modern Hypermarket Giant Ekstra, PT. HERO HYPERMARKET, Padang.	2016
13.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Surya Padang Khatulistiwa, Kabupaten Sijunjung	2016
14.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Padang Sumatera Sawindo, Kabupaten Sijunjung.	2016
15.	Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	2015
16.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Oscar Padang Agro Lestari, Kabupaten Sijunjung	2015
17.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang.	2015
18.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan <i>Main Stadium</i> Sumatera Barat dengan pemberi kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	2014
19.	Penyusunan Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana <i>Shortcut</i> Sungai Suir Pertambangan Batubara PT. Sinamarinda Lintas Nusantara Kabupaten Dharmasraya	2014
20.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Agro Sukses Plantations, Kabupaten Pesisir Selatan	2014
21.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Hotel Perwata, Kota Padang	2014
22.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Padang Green City, PT. Graha Jakarta Utama Kota Padang	2013
23.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pertambangan PT. Indomining Resources Padang Laweh Kab. Dharmasraya.	2013
24.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pertambangan PT. Karya Denai Barito Kabupaten Pesisir Selatan.	2013
25.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Besi PT. Sumber Minera Bersama di Kabupaten Pasaman.	2012

C. Terkait Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Dokumen Lingkungan Lainnya

No.	Kegiatan	Tahun
1	Ketua Tim Ahli Penyusunan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Pulau Aer, Kota Padang, Provinsi	2022

No.	Kegiatan	Tahun
	Sumatera Barat. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II, Kementerian Perhubungan.	
2.	Tenaga Ahli Penyusunan UKL UPL Kegiatan Pertambangan Batuan Tras PT Yasiga Sarana Utama, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingsuang, Kabupaten Padang Pariaman	2022
3.	Tenaga Ahli Penyusunan UKL UPL Unit Produksi Pakan Ikan Mandiri, Kabupaten Pasaman. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	2022
4.	Ketua Tim Ahli Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT PLN (Persero) Unit Induk Pelaksana Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Unit Pelaksana Pembangkitan Teluk Sirih (PLTU Teluk Sirih), Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	2020-2023
5.	Penyusun Dokumen DPLH Cold Storage PPS Bungus, Kota Padang. Kementerian Kelautan dan Perikanan	2019
6.	Ketua Tim Ahli Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT PLN (Persero) Unit Induk Pelaksana Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Unit Pelaksana Pembangkitan Teluk Sirih (PLTU Teluk Sirih)	2019
7.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	2019
8.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Sijunjung untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III, RSUD Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	2019
9.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan (Ruas Jalan Muaro – Silokek) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sijunjung	2019
11.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Sinamar 3 TW di Wilayah Kerja South West Bukit Barisan, Jorong Mangkudu Kodok, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung	2019
12.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sentra IKM Garcinia Sp, Nagari Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sijunjung.	2018
13.	Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pasar Guguak Kecamatan Koto VII, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sijunjung.	2018
14.	Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017	2018
15.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Sijunjung untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawatan dan Poli Paru, RSUD Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.	2018
16.	Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung	2017
17.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pabrik Pupuk An-Organik dan Organik PT. Pupuk Andalas Indonesia, Kota Pariaman	2017
18.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Batu dan Kerikil (SIRTUKIL) Imzul Herry	2017
19.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Usaha Dan/ Kegiatan Hotel Minang Jaya Syariah	2017

No.	Kegiatan	Tahun
20.	Penyusunan UKL-UPL Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2017
21.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Pelabuhan Indonesia (II) Cabang Teluk Bayur	2017
22.	Penyusun UKL – UPL Ekplorasi Gas Metana Batu Bara PT Inti Gas Energi, Kabupaten Sijunjung	2016
23.	Penyusun SLHD Padang Panjang Tahun 2015	2016
24.	Penyusun UKL-UPL Kantor PT. Five Star, Kota Padang	2016
25.	Penyusun UKL-UPL Kantor PT. Sibon, Kota Padang	2016
26.	Penyusun UKL – UPL PLTMH Liki, Kabupaten Solok Selatan	2013
27.	Penyusun UKL – UPL Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda, Payakumbuh	2013
28.	Penyusun UKL – UPL SPBU Kinali, Kabupaten Pasaman Barat	2013
29.	Penyusun UKL – UPL SPBU Koto Lolo, Kota Sungai Penuh	2013
30.	Penyusun UKL – UPL Minang International Convention Center, Kota Padang	2013
31.	Penyusun UKL – UPL Hotel Kerinci, Kota Sungai Penuh	2013
32.	Penyusun UKL – UPL Hotel NZSW Kota Bukittinggi	2013
33.	Penyusun UKL – UPL PLTMh Pancuang Taba, Kabupaten Pesisir Selatan	2013
34.	Penyusun UKL – UPL Rencana Tambang Bijih Besi, PT. Selaras Bumi Banua, Kabupaten Tanah Datar	2013
35.	Penyusun UKL – UPL Soto Betawi Haji Halim, Kota Padang	2012
36.	Penyusun UKL – UPL Pabrik Minyak Atsiri, PT. Cassia Co-Op, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
37.	Penyusun Revisi UKL – UPL PLTD Koto Lolo, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
38.	Penyusun UKL – UPL SPBU Proklamasi, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
39.	Penyusun UKL – UPL Rencana Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kemilau Permata Sawit, Kabupaten Pesisir Selatan	2012
40.	Penyusun UKL – UPL Body Repair Oto Body, Kota Padang	2012
41.	Penyusun UKL – UPL SPBU Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan	2011
42.	Penyusun UKL – UPL SPBU Pandan Ujung, Kota Solok	2011
43.	Penyusun UKL – UPL SPBU Kumanih, Kabupaten Sijunjung	2011
44.	Penyusun DPLH SPBU Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat	2011
45.	Penyusun DPLH SPBU Batang Kapas, Kota Sungai Penuh	2011
46.	Penyusun UKL – UPL <i>Stone Crusher</i> dan AMP, PT. Lubuk Minturun Konstruksi Perkasa, Kabupaten Pasaman Barat	2011
47.	Penyusun UKL – UPL Hau'sTea Restoran, Kota Padang	2011
48.	Penyusun UKL – UPL Rumah Makan Sederhana, Kota Bukittinggi	2011
49.	Penyusun UKL – UPL Hotel Yuriko, Kota Bukittinggi	2011
50.	Penyusun UKL – UPL Rumah Makan Simpang Raya, Kota Bukittinggi	2011
51.	Penyusun UKL – UPL Gudang Material, PT Catur Sentosa Adiprana, Kota Padang	2011
52.	Penyusun DPPL Diniyah Puteri, Kota Padang Panjang	2010
53.	Penyusun DPPL SPBU Silaing Bawah, Kota Padang Panjang	2010
54.	Penyusun DPLH Hotel Garuda, Kota Padang	2010

D. Kegiatan Lainnya

No.	Pengalaman Lainnya	Tahun
1.	Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	2021
2.	Tenaga ahli perencana IPAL Domestik PLTA Singkarak	2021
3.	Tenaga ahli perencana IPAL Domestik PLTA Batang Agam	2020
4.	Tim Leader Kegiatan Jasa Penggiat Lingkungan PLTU Teluk Sirih	2020-2021

No.	Pengalaman Lainnya	Tahun
5.	Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Bukittinggi	2018
6.	Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2016	2017
7.	Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang Panjang 2015	2016
8.	Production Planner and Inventory Control (PPIC), PT. Sanwa Engineering, Batam	2009
9.	Production Planner and Inventory Control (PPIC), PT. Foster Electric Indonesia, Batam	2007-2009
10.	Kerja Praktek, PT. Indo Miwon Citra Inti pada Unit Pengolahan Limbah Cair, Lampung	2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Padang, Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Rahma Wirni., ST., MSi



PT. Ganesha Environmental
& Energy Services (PT.GEES)
(BPUDL Institut Teknologi Bandung)



SERTIFIKAT

Nomor 177/GEES-PERTEK.AL5/VI/2022

DIBERIKAN KEPADA

Rahma Wirni, S.T., M.Si.

telah mengikuti

Pelatihan Penunjang Dokumen Amdal dan SLO:
Persetujuan Teknis untuk Air Limbah

13 - 17 Juni 2022

Koordinator Pengajar

Dr. Eng. Asep Sofyan, S.T., M.T.
NIP. 197109301998021001

Direktur PT GEES

Gitta Melati, S.Mn, M.Fin



PT. Ganeshā Environmental
& Energy Services (PT.GEES)
(BPUDL Institut Teknologi Bandung)



SERTIFIKAT

Nomor 016/GEES.RPLH.7/I/2022

DIBERIKAN KEPADA

Rahma Wirni, ST., MSi

telah mengikuti

**Pelatihan Penyusunan Dokumen RPPLH
(Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Koordinator Pengajar

Dr. Eng. Asep Sofyan, S.T., M.T.

NIP. 197109301998021001

Direktur PT GEES



Gitta Melati, S.Mn, M.Fin



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PUSAT KEBIJAKAN KEENERGIAN



Bekerja sama dengan:



SERTIFIKAT

**PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
UNTUK ANALISIS LINGKUNGAN**

DIBERIKAN KEPADA

Rahma Wirni, S.T., M.Si.

Gelombang 4 pada tanggal 2 – 6 Agustus 2021 (40 JPL) dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor SIG - 4202126/IT1B07.4.5/TU.10/2021

Koordinator Pengajar,

Dr. Asep Sofyan, S.T., M.T.
NIP. 197109301998021001

Bandung, 6 Agustus 2021
Kepala PKE ITB,



Dr. Ir. Retno Gumilang Dewi, M.Env.Eng.Sc.
NIP. 196310281999032001





PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Rahma Wirni, S.T., M.Si.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 13 pada tanggal 29 Juni - 3 Juli 2020 (40 JPL)
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-13202026/IT1.B07.4.22/LL/2020

Bandung, 6 Juli 2020
Kepala PSLH ITB



Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.
NIP. 195609061982111001



Nama : Rahma Wirni, S.T., M.Si.
Tempat, Tanggal Lahir : Solok, 10 Mei 1982

Tanda tangan,

Sertifikat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan PSLH-ITB Nomor : 022/IT1.B07.4.22/LL/2020 tentang Kelulusan Peserta Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 13 Tanggal 29 Juni - 3 Juli 2020

Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Gelombang 13, 29 Juni - 3 Juli 2020 (40 JPL)

Materi yang diberikan :

No	Mata Ajaran	Jumlah JPL
1	Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
2	Peran KLHS untuk Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam RPJMD	2
3	Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	2
4	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan prioritas serta KRP	2
5	Uji Silang Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan KRP Berdampak Lingkungan Hidup	2
6	Analisis Enam Muatan KLHS Kehati	2
7	Analisis Enam Muatan KLHS Jasa Ekosistem dan Daya Dukung dan Daya Tampung	2
8	Analisis Enam Muatan KLHS Efisiensi SDA dan Analisis Risiko	2
9	Analisis Enam Muatan KLHS Risiko Perubahan Iklim	2
10	Rekomendasi KLHS RTRW dan RDTR	2
11	KLHS RZWP3K	2
12	KLHS RPJMD (Identifikasi Isu dan Analisis 17 TPB/SDGs)	3
13	KLHS RPJMD (Analisis 6 Muatan KLHS)	2
14	Rekomendasi KLHS RPJMD	2
15	Pengintegrasian KLHS Kedalam Dokumen KLHS RPJMD	3
16	Wawasan Pengelolaan Lingkungan	2
17	Daya Dukung dan Daya Tampung	2
18	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	2
19	Isu Lingkungan di Perkotaan	2
Jumlah		40

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ANDALAS
Rahma Wirni, ST.
NIM : 1021209103

lahir di Solok tanggal 10 Mei 1982 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi ILMU LINGKUNGAN Program Pascasarjana lulus pada tanggal 16 Mei 2013, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

Magister Sains (M.Si.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal tujuh September dua ribu tiga belas.

Direktur
Pascasarjana
UNIVERSITAS ANDALAS
Syafuruddin Karimi, SE., MA.
Nip : 19541009 198012 1 001



Rektor
Universitas Andalas
REKTOR
Werry Darta Taifur, SE., MA.
Nip : 19601129 198603 1 003

UNIVERSITAS ANDALAS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dengan ini menyatakan bahwa :

Rahma Wirni

NPM : 0010017411001

SALINAN / FOTO COPY INI
SESUAI DENGAN ASLINYA
PADANG 22 OCT 2010
MENGETAHUI



PASYMI, S.T., M.T.
NIK. 951 000 397

Lahir di Solok, tanggal 10 Mei 1982, telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, status terakreditasi nomor 026/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar akademik :

Sarjana Teknik (S.T.)

beserta segala hak dan kewajibannya yang melekat pada gelar tersebut.

Tanggal kelulusan 11 Februari 2006



Ir. Ija Darmana, M.T.



Padang, 30 April 2006

Rektor,

Prof. Dr. Yunazar Manjang



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 01534/DIKLAT/DS.AMDAL/012/KLH/11/2014

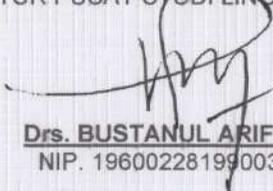
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor:KEP-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat AMDAL, menyatakan bahwa :



Nama : Rahma Wirni, ST, M.Si
Tempat dan tanggal lahir : Solok, 10 Mei 1982
Jabatan :
Instansi :
L U L U S
Kualifikasi : **Sangat Memuaskan**

Pada pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Dasar-dasar AMDAL) Angkatan I Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas dari tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2014 di Kota Padang yang meliputi 38 jam pelajaran.

Padang, 30 Oktober 2014
UNIVERSITAS ANDALAS
DIREKTUR PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP


Drs. BUSTANUL ARIFIN, M.Si
NIP. 19600228199003 1 001

PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA SOLOK

NIK : 1372025005820021

Nama : RAHMAWIRNI
Tempat/Tgl Lahir : KOTA SOLOK, 10-05-1982
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JLN. TUNAS BANGSA NO. 1
RT/RW : 002 / 005
Kel/Desa : KAMPUNG JAWA
Kecamatan : TANJUNG HARAPAN

Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 10-05-2017



KOTA SOLOK
28-05-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 58.311.130.7-201.000
RAHMAWIRNI
NIK : 1372025005820021

JL TUNAS BANGSA NO. 1 RT. 002 RW. 005
KAMPUNG JAWA TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK SUMATERA BARAT

KPP PRATAMA SOLOK

FEBRIAN**CURRENT EDUCATION**

- Fisheries and Marine Science
- Marine Fishing Technology
- Conservation Area management Plan (MPA)

FORMAL EDUCATION

Institution	Major	Period
SMK Adzkia Islamic	Automotive	2005-2008
Universitas Bung Hatta	Utilization of Fishery Resouaer	2011-2015
IPB University	Marine Fishing Technology	2017-2021

LANGUAGE PROFICIENCIES

- Indonesia : Native Language
- English : Elementary

Personal date**FEBRIAN
Padang, 1 Februari 1989**Current address**JL. Koto Baru IV. No. 27
Kecamatan Lubuak
Bagaluang
Indonesia**Handphone**(+62) 085274592033**Email**rfebryan90@gmail.com**

YEAR	Training
2013	Pelatihan Selam POSSI CMAS A1
2015	Pelatihan History and Culture
2015	Pelatihan Kompetensi Penanganan ikan Di Atas Kapal (Fishing Handling On Board)
2015	Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Hasil Perikanan (Fish Processing)
2015	Pelatihan Kompetensi Penangkapan Ikan Dengan Pukat Cincin (Purse Seine Fishing)
2015	Pelatihan Kompetensi Mesisn Kapal Perikanan (Fish Vessel Engine)
2015	Pelatihan Kompetensi Penangkapan ikan rawai Tuna (Tuna Longline Fishing)

2015	Pelatihan Sertifikat Kompetensi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Technical Expert Area Management Planning)
2016	Pelatihan Underwater Photographi dengan Jilmi Hastina
2018	Coastal and Marine Resources Managemant for Sustainable Dvelopment
2018	Pelatihan Pemetaan GIS (Geographic Information System)
2018	Pelatihan BST dan CPR di Institut Pertanian Bogor
2018	Pelatihan QGIS dan Tool Maxan
2020	Pelatihan Selam POSSI CMAS A2

YEAR	Activity
2014	Pengelolaan Perikanan Di Kawasan Danau Singkarak
2014	Pengukuran Dan Pendugaan Stok Ikan Bilih Di Danau Singkarak
2014	Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Kkpd) Pesisir Selatan
2015	Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pesisir Selatan
2015	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pesisir Selatan
2015	Rencana Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga
2015	Tim Kualitas Perairan Di Taman Wisata Perairan Pieh
2015	Penyusunan Kondisi Awal Biofisik Kawasan Taman Wisata Perairan (Twp) Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya
2016	Rencana Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat
2016	Rencana Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung
2016	Perencanaan Kima Garden Dan Survei Tutupan Karang Di Kabupaten Nias Utara
2016	Monitoring Biofisik Kkpd Selat Bunga Laut Tahun 2016 Kelautan Dan Perikanan Kab. Kep. Mentawai Provinsi Sumatera Barat
2017	Tim Kualitas Perairan Irigasi Di Tanah Datar Sumatera Barat
2017	Rehabilitasi Terumbu Karang Melalui Kolaborasi Terumbu Buatan Dan Transplantasi Karang
2018	Tim Perencanaan Tata Ruang Jakarta (GIS)
2018	Internasional Fund For Agicultural Assasment Survei Services (IFAD)
2019	Survey Teluk Jakarta
2019	Tim Pengelolan Kawasan Pesisir dan laut (PKSPL IPB) Menggunakan Tool Maxan.
2022	Kawasan Konservasi perairan daerah (KKPD) Provinsi Sumatera Barat
2022	Tim Ahli Pemetaan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam
2022	Penataan Ulang Data Biofisik Kawasan-Kawasan Konservasi Sumatera Barat. (GIS)
2023	Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kota Pariaman. Pemetaan (GIS)
2023	Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemetaan (GIS)

Survey

Tahun 2014	Survey Masyarakat Pesisir Kota Padang (Dinas Kelautan Dan Perikanan)
Tahun 2015	Survey Pangan Dalam Kontek Perikanan Dan Produk Hasil Perikanan Di Pesisir Sumatera Barat (UBH)
Tahun 2015	Survey Daerah Pesisir Dan Nelayan Sumatera Barat (Kesejahteraan Masyarakat Pesisir)
Tahun 2016	Survey Daerah Perairan Daerah Lumpo (Kabupaten Pesisir Selatan)
Tahun 2016	Survey mangrove pesisir bungus dan sungai pisang (Kota Padang)
Tahun 2017	Survey bendungan dan irigasi tanah datar (Sumatera Barat)
Tahun 2018	Survey masyarakat Nelayan daerah pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Lembaga Internasional IFAD Italy
Tahun 2019	Survey produk perikanan dan hasil perikanan rajungan Indonesia
Tahun 2019	Survei Tanggul laut Jakarta
Tahun 2021	Survey laut Indonesia Dalam Satu Peta
Tahun 2022	Survey wilayah pengelolaan WPPI Berdasarkan Potensi sumberdaya

2801883



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. QSV.0593/SER LSP-K/XII/2015

Dengan ini menyatakan bahwa
This is to certify that

FEBRIAN

Registrasi: 000.591/TUK- FPIK UBH/LSP-K/XII/2015

Telah kompeten pada Bidang
is competent in the area of

PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Marine Protected Area Management Planning

Dengan Kualifikasi:
With Qualification of:

Ahli Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Technical Expert in Marine Protected Area Management Planning

Sertifikat berlaku sampai dengan 18 Desember 2019
This certificate is valid until December 18th, 2019

Jakarta, 18 Desember 2015

Atas nama-on behalf of
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan
Director of Institute of Marine Professional Certification



Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc



Asesmen telah dilakukan terhadap unit-unit kompetensi di bawah ini:

The assessment was conducted on the following unit(s):

No.	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1	A.033101.004.01	Merumuskan masalah yang akan ditangani. <i>Formulating the problem statements of a marine protected area</i>
2	A.033101.005.01	Menyusun strategi pengelolaan. <i>Developing management strategies for a marine protected area.</i>
3	A.033102.001.01	Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan. <i>Developing a conceptual plan of monitoring and evaluation for a marine protected area.</i>
4	A.033101.006.01	Membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif. <i>Developing a conceptual effective management plan for a marine protected area.</i>
5	A.033101.007.01	Membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. <i>Developing a draft of a management plan for a marine protected area.</i>

Asesmen dilaksanakan di

The assessment was conducted at

Kampus 1 Universitas Bung Hatta

Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Assessment Center

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta

Faculty Fisheries and Marine Science, Bung Hatta University



Penerima Sertifikat
Certificate Grantee

Febrian
Febrian

Manager Sertifikasi LSP-K
Manager of Certification of LSP-K

Mochammad Farkan

Mochammad Farkan, A.Pi, SE, M.Si



**PERSATUAN OLAH RAGA SELAM
SELURUH INDONESIA**

Indonesian Subaquatic Sport Association



**CONFÉDÉRATION MONDIALE
DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES**

World Underwater Federation

INTERNATIONAL CERTIFICATE

Sertifikat Internasional

hereby certifies that

diberikan kepada

Febrian, S.Pi

Reg.No.INA.F00.A2.000695/VIII/20

has successfully completed all requirements for

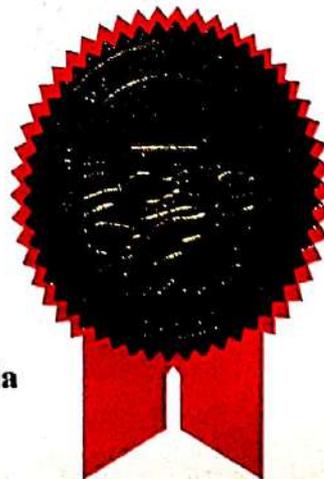
setelah memenuhi persyaratan untuk jenjang

TWO STAR SCUBA DIVER

14 / 08 / 2020
Certification Date
Tanggal sertifikasi

Mohd. Yusuf Amrullah, S.Pi.,M.Si
Reg. No. INA.F00.B1.0354
Instructor
Instruktur

Pulau Pasumpahan, Padang— Indonesia
Location, country
Lokasi, negara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si	
2.	Tempat/ Tanggal Lahir	Bukittinggi, 29 November 1973	
3.	Jenis Kelamin	Perempuan	
4.	Agama	Islam	
5.	Alamat Email	Yosmikeyusra73@gmail.com	
6.	No. Telepon	081363029929	
7.	Alamat Rumah	a. Jalan	Komplek Perumahan Wahana I Rimbo Tarok Blok J No. 4
		b. Kelurahan/Desa/Nagari	Kuranji
		c. Kecamatan	Kuranji
		d. Kabupaten/Kota	Padang
		e. Provinsi	Sumatera Barat
8.	Keterangan Fisik	a. Tinggi (Cm)	155 cm
		b. Berat badan (Kg)	55 kg

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal.

No	Sekolah/ Universitas	Tahun	Tempat
1.	SD	1986	SD 2 Kubang Putih Bukittinggi
2.	SMP	1989	SMP Negeri Padang Luar
3.	SMA	1992	SMA 2 Bukittinggi
4.	S1	1997	UNES Padang
5.	S2	2003	Unand Padang

2. Kursus/Pelatihan didalam dan diluar negeri

No	Nama Kursus/ Latihan	Tahun	Tempat
1.	The Planning, Implementation and Auditing of ISO 14001 Environmental ManagementSystem	10-12 Mei 1999	Pekanbaru
2.	Pelatihan Amdal Tipe A	19 Juni s/d 1 Juli 2000	Pekanbaru
3.	Lokakarya Bahan Olah Karet se Sumatera	12-13 Juni 2000	Padang
4.	Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup se Sumatera	6-7 Agustus 2001	Pekanbaru
5.	Workshop Peningkatan Kinerja Tim Teknis Komisi Amdal	12 Januari 2002	Padang
6.	Pelatihan Teknik Sampling dan Analisis Kualitas Udara Ambien	18-22 Maret 2002	Serpong
7.	Penilai Amdal Tipe C	30 Juni s/d 8 Juli 2003	Unand Padang
8.	Pelatihan Environmental Polution Control and Management	19 Agustus s/d 15 September 2003	Pekanbaru
9.	Environmental Protection (Waste Management)	30 Juni s/d 22 Juli 2004	Jepang
10.	Teknik Sampling Air Permukaan	2-4 Mei 2005	Pekanbaru
11.	Training of Trainer on CDM Project Development)	4-6 September 2006	Padang

12.	Pelatihan Tim Pemantauan Adipura	25-26 Agustus 2010	Medan
13.	Training of Trainer (TOT) Implementasi Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	26-29 Juli 2011	Jakarta
14.	Upgrading Anggota Komisi Penilai Amdal (KPA) Daerah	19-21 November 2013	Padang
15.	Workshop Penguatan Kerja Sama Tim	13-16 Maret 2019	Batusangkar
16.	Bimtek Integrasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup kedalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27-28 Maret 2019	Padang
17.	Bimbingan Teknis KLHS	21-25 Juli 2019	Banda Aceh
18.	Webinar Kesiapan Kampung Iklim dalam menghadapi Pandemi Covid-19	20 Mei 2020	Padang
19.	Webinar Pentingnya KLHS dalam Pengelolaan Lingkungan	23 Juni 2020	Padang
20.	Sosialisasi Sistem Informasi dan Data Indeks Kerentanan (SIDIK) secara daring	17 November 2020	Padang

3. Diklat Struktural

No	Nama Kursus/ Latihan	Tahun	Tempat
1.	LPJ	18 Januari s/d 17 Februari 1999	Secata B Kota Padang Panjang
2.	ADUM	2002	Diklat Bukittinggi
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	6 Februari s/d 26 Mei 2018	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat

III. PIAGAM PENGHARGAAN

No	Nama Penghargaan	Tahun	Pemberi Penghargaan
1.	Satyalancana Karya Satpa X Tahun	2013	Presiden RI

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

No	Keterangan	Mulai dan Sampai
1.	CPNS di Biro Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	4 Juni 1998 - 25 Agustus 1998
2.	Staf pada Bagian Lingkungan Buatan Biro Lingkungan Hidup	26 Agustus 1998 - 5 April 1999
3.	Staf Seksi Wasdal Pencemaran Lingkungan Bidang Pengendalian Bapedalada Prov. Sumbar	6 April 1999 - Desember 2008
4.	Staf subbid Pembinaan Konservasi Daya Lahan Bapedalada Prov. Sumbar	Desember 2008 -29 Januari 2012

5.	Kasubid Amdal dan UKL/UPL Bidang TLPHL Bapedalda Prov. Sumbar	30 Januari 2012 – 29 Desember 2016
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar	30 Desember 2016 – 30 Januari 2018
7.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	31 Januari 2018 – sampai sekarang

Yang membuat,



(Yosmike Yusra, SE, M.Si)

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	ANDI IRAWAN, ST, MT
2.	NIP	197812072002121003
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	SITIUNG / 07 DESEMBER 1978
4.	ALAMAT RUMAH	KOMP.GRIYA SAMITRA BLOK A NO.1 KURANJI
5.	NO TELEPON	08126719893
6.	ALAMAT KANTOR	JL.KHATIB SULAIMAN NO. 22 PADANG
7.	NO TELEPON	0751-7055231
8.	ALAMT EMAIL	andi.irawan.mt@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2002	S1	UNIV. ANDALAS - PADANG	TEK. LINGKUNGAN
2007	S2	ITS - SURABAYA	TEK. LINGKUNGAN

PELATIHAN

TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2018	PELATIHAN KLHS TERHADAP RTRW DAN RPJMD KAB/KOTA DI SUMBAR	WALHI
2019	PELATIHAN DDDTLH	DINAS PUPR PROV.SUMBAR
2019	WORKSHOP KAPASITAS INISIATIF DALAM PEMANTAUAN SAMPAH LAUT	KLHK RI
2020	PELATIHAN PEMETAAN TINGKAT DASAR MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAL QGIS	TROPIS INFO
2020	PELATIHAN PEMETAAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DRONE TINGKAT DASAR	PAPUA MAPPING CENTER
2020	PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD	KLHS CENTER SQUAD
2020	PELATIHAN DINAMIKA SISTEM KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN	IPB BOGOR

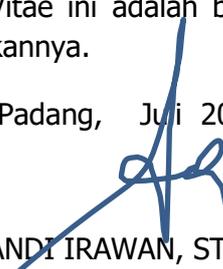
RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
STAF	KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANAMAN MODAL KAB.SIJUNJUNG	2002 S/D 2004
STAF	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.SIJUNJUNG	2004 S/D 2007

STAF	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.SIJUNJUNG	2007 S/D 2008
KASUBID PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI KAB.SIJUNJUNG	2008 S/D 2016
KASUBID PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB.SIJUNJUNG	2016 S/D 2017
STAF	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMBAR	2017 S/D 2019
FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMBAR	2019 S/D SEKARANG

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Padang, Juli 2020


(ANDI IRAWAN, ST,MT)

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	DESRIZAL
2.	NIP	19741220 201001 1003
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Tanjung Karang/ 20 DESEMBER 1974
4.	ALAMAT RUMAH	Komplek Cemara II Blok EE3 No 2 Gunung Pangilun Padang
5.	NO TELEPON	082192914299
6.	ALAMAT KANTOR	Jln Khatib Sulaiman No 22 Padang
7.	NO TELEPON	0751- 7055231
8.	ALAMT EMAIL	d3s.ical@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2001	S1	Univ. Bung Hatta	Teknik Kimia
2019	S2	Universitas Negeri Padang	Ilmu Lingkungan

PELATIHAN

TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2009	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	PPE Sumatera
2014	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pusdiklat KLH dan Pusdikrskim POLRI
2015	Mediator Kasus Lingkungan	KLHK
2022	<i>Enviromental Governance at Local Level</i>	Danida Fellowship Center, Denmark

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2017 - 2021
Sub. Koordinator Kebijakan Wilayah Dan Sektor (Fungsional Penyetaraan Administrasi)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2021 – Agustus 2022
Ka. UPTD Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Agustus 2022 - sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Padang, 3 Juli 2023



(DESRIZAL)

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	SISKA WARDENI, ST, M.Eng
2.	NIP	19810502 201001 2 028
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	BUKITTINGGI, 2 MEI 1981
4.	ALAMAT RUMAH	KOMPLEK VILLA MAHAMERU BLOK D1 NO. 4, BELIMBING
5.	NO TELEPON	082170023400
6.	ALAMAT KANTOR	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 22, PADANG
7.	NO TELEPON	0751-7055231
8.	ALAMAT EMAIL	Siska_wardeni@yahoo.com.au

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2000-2005	S1	ITB	TEKNIK KIMIA
2013-2016	S2	UGM dan IHS Erasmus University	MPKD dan Urban Management Development

PELATIHAN

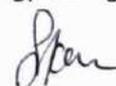
TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2011	Penilaian Amdal	KLHK
2019	Penyusunan KLHS	PSLH ITB

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2018 - 2021
Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2022-sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia bertanggung jawabkannya.

Padang, 01 Agustus 2022



SISKA WARDENI, ST, M.Eng

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	Adrian
2.	NIP	198002242006041002
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Bukittinggi/24 Februari 1980
4.	ALAMAT RUMAH	JL. Gajah Mada Gg. Kimia Depan No. 42J Padang
5.	NO TELEPON	081261575130
6.	ALAMAT KANTOR	JL. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
7.	NO TELEPON	0751 7055231
8.	ALAMAT EMAIL	adrianabahzayd@outlook.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2016	S-2	Universitas Andalas	Ilmu Lingkungan
2005	S-1	Universitas Sebelas Maret	Teknik Kimia

PELATIHAN

TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2007	Diklat Pra Jabatan	Pemda Provinsi Sumatera Barat
2007	<i>Gestion de Crise</i> (Tindakan dalam Penanggulangan Bencana)	Pemerintah Perancis – Pemda Sumatera Barat
2009	<i>Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs</i>	WWF
2010	Urban Environmental Management Course – Training Program for Young Leaders	Japan International Cooperation Agency (JICA)
2011	AMDAL Penilai	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2018	PIM IV	BPSDM - Pemda Provinsi Sumatera Barat

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Staf pada Seksi Pemulihan Lingkungan Buatan pada Bidang Pemulihan Lingkungan	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	2006 – 2008
Operator Crisis Centre Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Provinsi Sumatera Barat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Barat	2008 – 2009
Staf Sub Bagian Program pada Sekretariat	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	2009 – 2010

Staf Seksi AMDAL dan UKL-UPL pada Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	2010 – 2013
Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	2013 – 2016
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2017 – 2021
Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	2022 -

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Padang, 01 Januari 2023


ADRIAN

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	Devi Hendra,S.Si,M.Si
2.	NIP	19801231 200501 1 017
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Koto Hiling, 31 Desember 1980
4.	ALAMAT RUMAH	Jl. Hidayah II No. 2 RT.05/RW.05 Kel. Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Padang
5.	NO TELEPON	085272625987
6.	ALAMAT KANTOR	Jln. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
7.	NO TELEPON	7055231
8.	ALAMAT EMAIL	Devihendra10@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

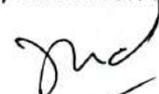
TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2007	S1	Universitas Andalas	Biologi
2015	S2	Universitas Andalas	Ilmu Lingkungan

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Staf	Kantor Camat Tanjung Baru Kab. Tanah Datar	2005 s/d 2010
Kasubag Umum dan Perencanaan	Kantor Camat Tanjung Baru Kab. Tanah Datar	2010 s/d 2012
Staf Bidang P2KSDA	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	2012 s/d 2016
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2017 s/d 2021
Fungsional Pedal Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	2021 s/d sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia bertanggung jawabkannya.

Padang, 01 Januari 2023


DEVI HENDRA

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	Rosa Gustilisa, ST
2.	NIP	198207082011012002
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Padang, 8 Juli 1982
4.	ALAMAT RUMAH	Jl. Garuda Induk No. 130
5.	NO TELEPON	082169922932
6.	ALAMAT KANTOR	Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
7.	NO TELEPON	0751-7055232
8.	ALAMAT EMAIL	<i>rosa.gustilisa@gmail.com</i>

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
2001	S1	Universitas Andalas	Teknik Lingkungan

PELATIHAN

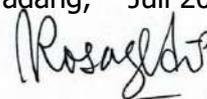
TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2012	Peningkatan Kapasitas Tim Proper	KLHK
2019	Integrasi DDDTLH ke dokumen KLHS	Pemprov Sumbar
2019	Kapasitas Inisiatif Pemantauan Sampah Laut	KLHK bekerjasama dengan RC3S
2021	Pelatihan Pembentukan Fungsional Pedal	KLHK
2023	Webinar KLHS RPJPD	EcoEdu Pusat Pelatihan Lingkungan
2023	Bimtek SILHKD dan Sosialisasi DIKPLHD Ekoregion Sumatera	KLHK dan P3ES

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Fungsional Umum	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Januari 2011 - Desember 2018
Fungsional Umum	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Januari 2019 – Maret 2019
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Maret 2019 - sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung jawabkannya.

Padang, Juli 2023



ROSA GUSTILISA, ST

CURICULUM VITAE

1.	NAMA LENGKAP	DARMA HARYENI, ST
2.	NIP	19761028 200904 2 002
3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PADANG/ 28 OKTOBER 1976
4.	ALAMAT RUMAH	Jln. IKHLAS VII NO.10 ANDALAS PADANG
5.	NO TELEPON	0813 632 16300
6.	ALAMAT KANTOR	Jln. Khatib Sulaiman Nomor 22 Padang
7.	ALAMAT EMAIL	<i>haryenidarma@gmail.com</i>

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

TAHUN	JENJANG	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/BIDANG STUDY
1995 - 2002	S1	Universitas Pasundan Bandung	Teknik Lingkungan

PELATIHAN

TAHUN	PELATIHAN	PENYELENGGARA
2009	Diklat Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2010	Diklat Prajabatan CPNSD	Pemda Kabupaten Bungo
2010	Bimbingan Teknis Pemantauan Kerusakan Tanah untuk produksi biomassa	Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera
2013	Bimbingan teknis pembinaan sekolah Adiwiyata	Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera
2015	Diklat Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Angkatan IV tahun 2015	Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2023	Webinar KLHS RPJPD	Ecoedu.id pusat pelatihan lingkungan
2023	Bimbingan Teknis SILHKD & Sosialisasi DIKPLHD Ekoregion Sumatera	Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera

RIWAYAT JABATAN

JABATAN	DINAS/OPD	TAHUN.... S/D.....
Staf	DLH Kabupaten Bungo	April 2009 – September 2017
Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan	DLH Kabupaten Bungo	September 2017 – 06 Agustus 2021
Staf	DLH kabupaten Bungo	06 agustus 2021 – 30 November 2021
Pengelola Informasi Lingkungan	DLH Provinsi Sumatera Barat	1 Desember 2021 - sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia bertanggung jawabkannya.

Padang, 03 Juli 2023



DARMA HARYENI, ST

DOKUMENTASI PENYUSUNAN KLHS RPJPD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	Hari/Tanggal	Perihal
PEMBENTUKAN TIM		
1.	11 Januari 2023	Surat Permintaan Anggota Kelompok kerja (POKJA) Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 nomor 665/81/TL-2023 tanggal 11 Januari 2023 (Surat Terlampir).
2.	17 Maret 2023	SK Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045 terbit pada tanggal 17 Maret 2023 dengan SK Nomor. 660-214-2023 (SK Tim Terlampir).
3.	20 Maret 2023	Surat Pembekalan dan Penyamaan Persepsi Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 nomor 660/641/TL-2023 tanggal 20 Maret 2023 (Surat Terlampir).



No.	Hari/Tanggal	Perihal
PENGAJIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
A. IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN DATA		
4.	Kamis, 23 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Awal Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat No. 665/350/TL-2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Undangan Rapat. (Surat Terlampir). Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Pemaparan oleh Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor mengenai masukan dari anggota Pokja terkait data-data TPB. (Daftar Hadir Terlampir).



No.	Hari/Tanggal	Perihal
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat dilaksanakan setelah masing-masing SKPD mengirimkan nama anggota POKJA, beriringan dengan diprosesnya SK Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045 RPJPD Prov. Sumbar. Rapat awal dihadiri oleh peserta rapat SKPD Provinsi Sumatera Barat terkait yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Prov, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PPKB Dukcapil, Dinas Kop dan UKM, Dispora, ESDM, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perindag, Balitbang, dll.
5.	Jumat, 24 Maret 2023	Rapat Pembekalan dan Penyamaan Persepsi Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 nomor 660/641/TL-2023 tanggal 20 Maret 2023 (Surat Terlampir)



	<ul style="list-style-type: none"> Rapat pembekalan dan penyamaan persepsi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pembekalan kepada daerah mengenai sistematika dan metodologi penyusunan KLHS RPJPD yang dihadiri oleh peserta rapat SKPD Provinsi Sumatera Barat terkait yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Prov, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Biro perekonomian, Dinas PPKBKPS, Dinas Kesehatan, Balitbang, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Dinas Sosial, Diskop UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Perwakilan dari Kab/Kota Se-Sumatera Barat. (Daftar hadir terlampir). Rapat dilaksanakan secara offline dan online (zoom meeting) yang disampaikan oleh : Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si (KemenLHK RI) dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan selanjutnya dipimpin oleh Tenaga Ahli yaitu DR. Ardinis Arbain. Rapat membahas penyamaan persepsi dan pembekalan kepada daerah mengenai sistematika dan metodologi penyusunan KLHS RPJPD.
--	--

No.	Hari/Tanggal	Perihal
B. PERUMUSAN SKENARIO TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
6.	Jumat, 28 April 2023 - 09 Juni 2023	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar (SK Narasumber Pembahas terlampir).
7.	Jumat, 28 April 2023	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/800/TL-2023 tanggal 26 April 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Sektor Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.
 <p data-bbox="331 1273 592 1360">Samsung Quad Camera Foto dg Galaxy A52s 5G saya</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Pokja. Mengundang Tim Ahli, Tim Pokja dan Non Pokja (kelompok masyarakat, LSM dan Asosiasi) terkait untuk merumuskan isu strategis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. (Surat undangan, Absensi dan Notulen Terlampir) • Setiap pakar memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat yang terkait pada isu-isu strategis provinsi sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS Revisi RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir). 		
8.	Selasa, 23 Mei 2023	2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/947/TL-2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Sektor Pertanian dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Pokja. Mengundang Tim Ahli, Tim Pokja dan Non Pokja (kelompok masyarakat, LSM dan Asosiasi) terkait untuk merumuskan isu strategis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. (Surat undangan, Absensi dan Notulen Terlampir) • Setiap pakar memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat yang terkait pada isu-isu strategis Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS Revisi RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
9.	Rabu, 03 Mei 2023	3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/812/TL-2023 tanggal 28 April 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Isu Persampahan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		 <p data-bbox="300 775 584 857">Samsung Quad Camera Foto dg Galaxy A52s 5G saya</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Pokja. Mengundang Tim Ahli, Tim Pokja dan Non Pokja (kelompok masyarakat, LSM dan Asosiasi) terkait isu persampahan yang disampaikan oleh : Sdri. Rahma Wirni untuk merumuskan isu strategis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. (Surat undangan, Absensi dan Notulen Terlampir) • Setiap pakar memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat yang terkait pada isu-isu strategis provinsi sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS Revisi RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
10.	Selasa, 09 Mei 2023	4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/844/TL-2023 tanggal 05 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Isu Penurunan Kualitas dan Kuantitas air dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.
		

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Pokja. Mengundang Tim Ahli, Tim Pokja dan Non Pokja (kelompok masyarakat, LSM dan Asosiasi) terkait isu penurunan kualitas air yang disampaikan oleh : Dr. Marganof untuk merumuskan isu strategis untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan. (Surat undangan, Absensi dan Notulen Terlampir) Narasumber Pendamping Dr. Marganof, M.Si memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat yang terkait pada isu-isu Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
11.	Senin, 22 Mei 2023	5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/946/TL-2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.
		
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh SKPD, LSM dan para pakar sesuai dengan bidangnya. (Daftar Hadir Terlampir) Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh tim ahli DR. Ardinis Arbain. Narasumber Pendamping Eneng Fathonah, MA memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat yang terkait pada isu-isu Percepatan Pencapaian TPB/SDGs sebagai masukan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
12.	Senin, 25 Mei 2023	6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/964/TL-2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Penanganan Perubahan Iklim dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh SKPD, LSM dan para pakar sesuai dengan bidangnya. (Daftar Hadir Terlampir) • Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh tim ahli DR. Ardinis Arbain. • Narasumber Pendamping Sdri. Suci Kurnia Sari, S.Sos, M.Si memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat sebagai masukan yang terkait pada isu-isu Penanganan Perubahan Iklim dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
13.	Kamis, 25 Mei 2023	7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/948/TL-2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Energi Bersih dan Terjangkau dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.
		

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh SKPD, LSM dan para pakar sesuai dengan bidangnya. (Daftar Hadir Terlampir) • Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh tim ahli DR. Ardinis Arbain. • Narasumber Pendamping Dr.Hidayat, ST, M.T, IPM memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat sebagai masukan yang terkait pada isu-isu pada Pilar Ekonomi terkait isu Energi dan Terjangkau dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).
14.	Senin, 29 Mei 2023	8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/1001/TL-2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Bidang Kesehatan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh SKPD, LSM dan para pakar sesuai dengan bidangnya. (Daftar Hadir Terlampir) • Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh tim ahli DR. Ardinis Arbain. • Narasumber Pendamping Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes, SpKKLP memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat sebagai masukan yang terkait pada isu-isu pada Bidang Kesehatan dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir).

No.	Hari/Tanggal	Perihal
15.	Jumat, 09 Juni 2023	<p>9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat FGD dengan Tim Ahli pendamping dan narasumber pembahas untuk merumuskan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar berdasarkan Surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 665/1073/TL-2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Pilar pembangunan Sosial dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar.</p>
		
<ul style="list-style-type: none"> • Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh SKPD, LSM dan para pakar sesuai dengan bidangnya. (Daftar Hadir Terlampir) • Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh tim ahli DR. Ardinis Arbain. • Narasumber Pendamping Dr.Erianjoni, S.Sos memaparkan kondisi lingkungan di Sumatera Barat sebagai masukan pada Pilar Pembangunan Sosial dalam penyusunan arah kebijakan untuk KLHS RPJPD Prov. Sumbar. (Bahan Paparan Terlampir). 		
16.	Selasa - Kamis/ 22 s/d 24 Agustus 2023	<p>Konsinyering penyusunan KLHS RPJPD berdasarkan surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 660/ 1716 /TL-2023 tanggal 18 Agustus perihal Konsinyering Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar. (Surat Terlampir).</p>
		

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		 <p>The image consists of three photographs documenting a training session. The top photograph shows a man in a blue shirt standing at the front of a room, pointing towards a whiteboard. The room has a rustic feel with a thatched roof and wooden pillars. Several people are seated at long tables, each with a laptop open. The middle photograph shows a man in a white shirt presenting to a group of people seated at long tables. A large screen at the front displays a presentation slide. The bottom photograph shows a man in a patterned shirt presenting to a group of people seated at long tables. A large screen at the front displays a presentation slide. The room has a rustic feel with a thatched roof and wooden pillars.</p>

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Konsinyering dilaksanakan di Desa wisata Kapalo Banda Taram Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dihadiri oleh tim Pokja dan diarahkan oleh Tim Ahli yaitu DR. Ardinis Arbain. (Daftar hadir terlampir) • Kegiatan konsinyering menghasilkan Rumusan arah kebijakan dan data-data TPB dari masing-masing Tim Pokja yang lebih lengkap. Pada acara ini Tim Pokja juga diminta untuk menyandingkan program-program kegiatan dinas dengan TPB yang ada, sehingga dapat menggambarkan perubahan arah kebijakan, rekomendasi, indikasi program dan lebih rinci lagi terkait KLHS RPJPD.
17.	Minggu, 9 Juli 2023	Rapat progres penyusunan KLHS RPJPD dengan tim ahli dan Tim Pokja di dinas lingkungan hidup Prov.Sumbar dengan dokumentasi dibawah ini. (surat undangan terlampir)
		

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat Progres ini dilakukan mengetahui sejauh mana proses penyusunan KLHS RPJPD ini dan apa kendala yang dihadapi.
C.		ASISTENSI DENGAN KEMENLHK RI
18.	Senin, 18 Desember 2023	Asistensi dilaksanakan berdasarkan surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 660/ 2484 /TL-2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal undangan pelaksanaan dan asistensi KLHS RPJPD Prov.sumbar Tahun 2025-2045 (Surat Terlampir).
		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Asistensi ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses penyusunan KLHS di Sumatera barat dimana KLHK melakukan kegiatan pembinaan penyusunan KLHS ke Provinsi Sumbar. Rapat dilaksanakan secara offline dan online (zoom meeting) yang disampaikan oleh : Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si (KemenLHK RI) dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan selanjutnya memaparkan laporan dokumen KLHS RPJPD prov.sumbar oleh : Desrizal, ST, M.Si selaku sekretaris pokja tim penyusun KLHS RPJPD prov.Sumbar tahun 2025-2045.

No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		
		



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepada Yth : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan
3. Kepala Bidang P2KLPHL
4. Kepala Bidang PSLB3PK
5. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
6. Kepala UPTD Persampahan
Tanggal : 17 Januari 2023
Perihal : Permintaan Nama Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar Th.2025-2045

I s i :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilakukannya Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini dapat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan KLHS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
2. Dalam proses Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dimaksud yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dibutuhkan Kelompok Kerja (POKJA) yang keanggotaannya berasal dari unsur terkait dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang dibentuk/ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk menugaskan pejabat terkait di Bidang Saudara yang akan dilibatkan dalam keanggotaan tim Pokja penyusun KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
4. Nama anggota Tim Pokja dimaksud diharapkan dapat kami terima paling lambat tanggal 20 Januari 2023 atau dikirimkan melalui email ke kwsdlhsumbar@gmail.com. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan Sdr. Rosa Gustilisa, ST (Jafung Pengendali Dampak Lingkungan), HP. 082169922932.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KEPALA,
Ir. SITLAH SYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19670928 199203 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 17 Februari 2023
26 Rajab 1444

Nomor : 665 / 350 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Rapat Awal POKJA
Penyusunan KLHS RPJPD Prov Sumbar**

Kepada Yth.:
(sebagaimana pada lampiran)
di
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis / 23 Februari 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup
Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat Pembahasan Persiapan Awal Kelompok Kerja (POKJA)
Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Perlu kami sampaikan bahwa bagi OPD yang telah mengirimkan nama anggota POKJA KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana lampiran II kiranya dapat menugaskan ybs untuk menghadiri rapat dimaksud, dan bagi OPD yang belum mengirimkan nama anggota POKJA sesuai surat permintaan kami sebelumnya, maka yang ditugaskan menghadiri rapat ini akan kami cantumkan namanya dalam SK POKJA KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM POKJA KLHS RPJPD
PROVINSI SUMATERA BARAT



ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Anggota Pokja KLHS sebagaimana lampiran II di Tempat.

Lampiran I Surat Nomor : 665 / 350 / TL-2023
Tanggal : 17 FEBRUARI 2023
Perihal : Undangan Rapat Awal Penyusunan KLHS RPJPD Prov Sumbar

Daftar Undangan:

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain (Tim Ahli)
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Eneng Fathonah, MA
4. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. KEPALA INSTANSI PROVINSI

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Prov. Sumbar
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar;
7. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar;
9. Kepala Inspektorat Prov. Sumbar;
10. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar;
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar;
13. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar;
16. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar;
17. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Sumbar;
18. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar;
19. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar;
20. Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar;
21. Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar;
23. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumbar;
24. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
25. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar;
27. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar;
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
29. Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar;
30. Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbar;

31. Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar;
32. Kepala Dinas PMPTSP Prov Sumbar;
33. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar;
34. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
35. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar;
36. Kepala Biro Aset Prov. Sumbar;
37. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar;
38. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar;
39. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar;
40. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan
41. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
42. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Prov. Sumbar;
43. Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar;
44. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Sumbar;
45. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sumbar;
46. Kepala BPJS Prov. Sumbar;
47. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
48. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat;
49. Kepala PDAM Kota Padang;
50. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

C. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV SUMBAR

1. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar)
2. Desrizal, ST, M.Si (Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar)
3. Dasril, SP, M.Si (Kepala Laboratorium Persampahan DLH Prov. Sumbar)
4. Teguh Ariefianto (Kabid PPKLPHL DLH Prov. Sumbar)
5. Ir. Vianti Zami, M.Si (Kabid PSLB3PK DLH Prov. Sumbar)
6. Siska Wardeni, ST, M.Eng (Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov. Sumbar)
7. Muhammad Arief Noviady, ST, MT (Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
8. Devi Hendra, S.Si, M.Si (Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
9. Adrian, ST, M.Si (Fungsional Perencana DLH Prov. Sumbar)
10. Irman,S,ST, MT (Kasi Perencanaan dan Evaluasi UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar)
11. Yuli Astuti, SE,M.Si (Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
12. Moch. Sidik Pramono, ST (Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan DLH Prov. Sumbar)
13. Dedi Harian, ST (Sub Koordinator Pengelolaan LB3 DLH Prov. Sumbar)
14. Dikarama Kaula, ST, MIL (Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
15. Armi B, ST, MDP (Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
16. Febri Yenti Djafri, SH, MH (Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
17. Novriyanti, ST, M.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
18. Rosa Gustilisa, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
19. Dwi Elvia Ningsih, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
20. Liza Melinda, ST,M.Si (Staf DLH Prov. Sumbar)

21. Darma Haryeni, ST, M.Si ((Staf DLH Prov. Sumbar)
22. Yulya Chartian, SKM ((Staf DLH Prov. Sumbar)
23. Syafrida Yanti, ST ((Staf DLH Prov. Sumbar)
24. Junaidi, SIP ((Staf DLH Prov. Sumbar)
25. Feri Aldy, SE ((Staf DLH Prov. Sumbar)

Lampiran II Surat Nomor : 665 / 300 / TL-2023
Tanggal : 17 FEBRUARI 2023
Perihal : Undangan Rapat Awal Penyusunan KLHS RPJPD Prov Sumbar

Tembusan:

ANGGOTA TIM POKJA KLHS RPJPD PROV SUMBAR

1. Yassirli Amrini, SE, ME (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar)
2. Hengki Akhdiat Anwar, SE, Ak, MM, CA (Inspektorat Prov. Sumbar)
3. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar)
4. Jusmalinda, S.Hut, M.Si (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)
5. Agri Yoga Riwalidi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar)
6. Nira Susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar)
7. Siswati, SH (Dinas Sosial Prov. Sumbar)
8. Sadrianto, M.Pd (Dinas Pendidikan Prov. Sumbar)
9. Yumel Eqia, MM.Akt (Dinas Perhubungan Prov. Sumbar)
10. Antin Maisusanti, SH (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar)
11. Delvi Danus, A.Md (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar)
12. Hari F. Day, SE.Ak, M.Si (Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar)
13. Yanita Selly Meristika, S.Kom (Dinas Pangan Prov. Sumbar)
14. Indah Martha Eriyani, SE, MM (Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar)
15. Amrizal, S.Sos (Dinas PMPTSP Prov Sumbar)
16. Basrefnaldi, SE, M.Si (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar)
17. Hadi Putra, S.STP, M.A.P (Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar)
18. Devfi Agustina, SE, M.Si (Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar)
19. Dian Sulistini, S.Si, M.Sc (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar)
20. Goeastus Fasiven, S. Hut, M.Si (Balai Pengelolaan DASHL Agama Kuantan)
21. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V)
22. Mila Artati, S.ST, M.Stat (BPS Prov Sumbar)
23. Fortuna Maisari, SH, M.Hum (Badan Narkotika Nasional Prov. Sumbar)
24. Anton Abdullah Rachmadie (BPJS Kesehatan Prov. Sumbar)
25. Ridwan Anhar (Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat)
26. Adityawan Salam (Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat)
27. Dessy Trianita, ST (PDAM Kota Padang)
28. Deswita, SE (Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis, 23 Februari 2023
PUKUL : 13.30 WIB s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera
ACARA : Rapat Pembahasan Persiapan Awal Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan KLHS RIJPD Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1				1
2	SUPREMO	UMK Gunung Halim	08121580767	2
3	IVAN ANASTIKA	OJK	081235302140	3
4	DAVID A. ROBERT	BAPENDWA	081277780887	4
5	Sipantul. Y	Disperindag	085263506452	5
6	Hector. L	Dinas Pendidikan		6
7	YUNUSRI	-		7
8	Dafri Agustina	BPD Organisasi	081374346404	8
9	Ridwan A	Bank Indonesia	081217177915	9
10	Jusmalinda	Dishut	085261649688	10
11	Annisa Putri	BPPW Sumbar	08277074338	11
12	YASRI AFDI	JP Perencana / BPSDM	081267173795	12
13	YISY Sinda	BPPW Sumbar	08174335507	13
14	Wah Minto Eiyani	JP Perencana / BPSDM	08126777231	14
15	Eneng Fatmahan	GLZ	08118123201	15
16	M. Yasir. G.	BPPS Ketenagakerjaan	081260811008	16
17	Baqir Naldi	Satpol PP	085263930354	17
18	Desi Wana	Banditbang	08537444590	18
19	Dessy Fianah	Perumda AM Kota Bg (PMB)	08178378087	19
20	Melisa Putri	BKD.	08136716483	20
21	Rivo Arifir	DUP		21
22	Maman	Projeksi DLH	0811607700	22
23	Yuli A.	UPID Kel. Lij.		23
24	Judy Ikhwan	TF Madya SDA BU		24
25	Muhammad Fauzan	Perencanaan pu	08116697677	25
26	Nashyudha Alim	Pedukuwan	081374792731	26
27	Wpr Chanic	BPPW Sumbar	0812720323	27
28	AFIZADI	-	08127375057	28
29	Laura Nurmanda	KU BPD Aca. Penl	081228926268	29
30	Dian S	PEH BESDA SB	081230165776	30
31	EVA TRISNA	BPOD Prov Sumbar	0811661004	31
32	PRETA	Duk. UKM Prov	08136321229	32
33	Tanjira Hily M.	Dinas Kel. Lij.	081277665515	33
34	Sandi Irawan	DLH		34
35	Pabastri	Dinas Kesehatan		35

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN/INSTRANSI	NO. IIP	TANDA TANGAN
36	Cerry M	Kabang PA 185	087211469090	36
37	KIRWAN	PROGRAM 516		37
38	Mohammad Omer	PE 5 PM		38
39	Olyyana	DPK II Kuala	003100191717	39
40	Maria Umisa	Dispora	082202594777	40
41	Ri Wulandari	"		41
42	HUTRUA A	BUSUP SUMPAP	001274798472	42
43	Musephi A.P	BWS Sum S Pky	089274061722	43
44	Eliandi Gama	Dinas Sosial	082585442166	44
45	Dani Hendon	DLH		45
46	DARMA transyeni	DLH KULON	09136321630	46
47	Junaldi	DLH Prov. Sunda	082385327224	47
48				48
49	Ayuda yati			49
50	Feri Aldy	-		50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat Awal POKJA Penyusunan KLHS RPJPD Prov Sumbar
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Waktu rapat : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt. II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat :
Ketua : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Rosa Gustilisa, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS Prov Sumbar
- Instansi Teknis Terkait
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf BidangTata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS
- d) PermenLHK nomor 69 tahun 2017 tentang pelaksanaan PP no.46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.
- e) Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembualan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- f) Surat Kemendagri No. 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : dalam rangka persiapan penyusunan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Tujuan :
 - Memastikan keanggotaan Tim Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk dimasukkan ke dalam SK Gubernur
 - Menyampaikan dan meminta masukan dari anggota POKJA terkait data-data TPB yang ada pada masing-masing instansi
2. Penyampaian materi rapat.
Penyampaian materi rapat oleh Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov. Sumbar.
3. Diskusi dan Tanya jawab.
4. Kesimpulan Rapat:
 - a. Terdapat beberapa data TPB yang diminta, tidak ada pada instansi anggota POKJA yang telah menerima tabulasi data TPB. Solusinya pada tabulasi data yang datanya tidak ada pada instansi anggota POKJA maka data akan dimintakan pada instansi lain yang memiliki data tersebut.
 - b. Terkait data yang terdapat di kabupaten/kota, diharapkan instansi anggota POKJA untuk dapat mengkoordinasikannya dengan kabupaten/kota terkait.

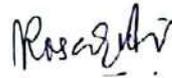
- c. Anggota POKJA diharapkan untuk melakukan evaluasi terhadap data TPB yang telah disampaikan, karena data TPB pada tabulasi yang disampaikan merupakan data penyusunan KLHS RPJMD. Anggota POKJA/OPD dapat mengecek kembali mana data yang sudah tercapai, belum tercapai dan tidak ada data.
- d. Penyusunan KLHS RPJPD saat ini menggunakan metadata indikator TPB edisi ke-2 dengan 17 TPB, 169 target TPB dan 289 indikator TPB.
- e. Data yang ada pada SDGs tidak semuanya sama dengan data yang ada pada instansi dan bahkan ada beberapa indikator yang datanya tidak dapat diukur/terdapat di Sumatera Barat dan perlu disesuaikan dengan keraifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Sehingga Tim Sekretariat akan kembali mengecek dan memilah data-data indikator yang sesuai dengan kondisi Sumatera Barat.
- f. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi Tim POKJA maka akan dibuatkan WA grup dan tabulasi data TPB untuk masing-masing instansi dalam format softcopy akan disampaikan pada WA Group.
- g. Data-data yang telah dibagikan kepada masing-masing anggota POKJA dikumpulkan dalam waktu 1 (satu) minggu.

Mengetahui:
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, SE, M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Rosa Gustilisa, ST
Penata Muda Tk. I
NIP. 19820708 201101 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 10 Maret 2023
Sya'ban 1444 H

Nomor : 665/588/TL-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Konsultasi
Publik KLHS RPJPD Prov. Sumbar

Kepada Yth.:
Sdr. (sebagaimana Terlampir)
di -
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Konsultasi Publik I, penyusunan Dokumen laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Konsultasi Publik I penyusun KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam rangka identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan.
2. Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan Konsultasi Publik I, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 13 Maret 2023
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai (diawali dengan makan siang)
Tempat : Ruang Rapat UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Acara : Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik I Dalam Rangka Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

An.Kepala
Sekretaris Tim penyusun
KLHS RPJPD Provinsi Sumbar

YOSMIKE WUSRA, SE.M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731129 199803 2 001

Lampiran

Surat Nomor : 665/588 /TL -2023

Tanggal : 10 Maret 2023

Perihal : **Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik KLHS RPJPD Prov. Sumbar**

Daftar Undangan:

1. Dr. Ardinis Arbain
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Eneng Fathonah, MA
4. Rahma Wirni, ST, M.Si
5. Dr. Marganof, M.Si
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
7. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar
8. Kepala Laboratorium Persampahan DLH Prov. Sumbar
9. Kabid PPKLPHL DLH Prov. Sumbar
10. Kabid PSLB3PK DLH Prov. Sumbar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Nomor : 665/597/TL-2023
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data pencapaian target SDGs
terkait penyusunan KLHS RPJPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Padang, 6 Maret 2023
Rajab 1444 H
Kepada Yth.:
Bpk. (Sebagaimana terlampir)
di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat awal Pokja penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar pada tanggal 23 Februari 2023 yang lalu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kesepakatan pada saat pelaksanaan rapat, OPD/Instansi terkait akan menyampaikan data-data pencapaian target SDGs ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dimana data-data tersebut dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan form isian kebutuhan data SDGs yang diperkirakan berada di Instansi Saudara. Data tersebut sangat dibutuhkan sebagai baseline data dalam menganalisis dan menetapkan Rekomendasi KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Kiranya saudara berkenan untuk mengisi form tersebut dan menyampaikan kembali data-datanya kepada kami paling lambat tanggal **13 Maret 2023**. Form tersebut juga sudah kami sampaikan pada ASN yang menghadiri rapat tanggal 23 Februari 2023 yang lalu (form terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM POKJA KLHS RPJPD
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196312091986111002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Anggota Pokja KLHS sebagaimana lampiran II di tempat;
3. Peninggal;

Lampiran I Surat Nomor : 665 /SA7/TL-2023
Tanggal : 6 Maret 2023
Perihal : Permintaan Data pencapaian target SDGs terkait penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Daftar Anggota Pokja KLHS RPJPD :

A. KEPALA INSTANSI PROVINSI

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Prov. Sumbar
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar;
7. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar;
9. Kepala Inspektorat Prov. Sumbar;
10. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar;
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar;
13. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
15. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar;
16. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar;
17. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Sumbar;
18. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar;
19. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar;
20. Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar;
21. Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar;
23. Kepala Dinas Pariwisata Prov Sumbar;
24. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
25. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar;
27. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar;
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
29. Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar;
30. Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbar;
31. Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar;
32. Kepala Dinas PMPTSP Prov Sumbar;
33. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar;
34. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
35. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar;
36. Kepala Biro Aset Prov. Sumbar;
37. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar;
38. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar;

39. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar;
40. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan
41. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
42. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Prov. Sumbar;
43. Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar;
44. Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Sumbar;
45. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Prov. Sumbar;
46. Kepala BPJS Prov. Sumbar;
47. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
48. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat;
49. Kepala PDAM Kota Padang;
50. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

B. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV SUMBAR

1. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar)
2. Desrizal, ST, M.Si (Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar)
3. Dasril, SP, M.Si (Kepala Laboratorium Persampahan DLH Prov. Sumbar)
4. Teguh Ariefianto (Kabid PPKLPHL DLH Prov. Sumbar)
5. Ir. Vianti Zami, M.Si (Kabid PSLB3PK DLH Prov. Sumbar)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 8 Maret 2023
Sya'ban 1444 H

Nomor : 665/576 /TL-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik**
KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045

Kepada Yth:
Sdr. (Sebagaimana Daftar Lampiran I)
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya proses penyusunan laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PermenLHK No. 69/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Permendagri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangkaian penyusunan laporan KLHS dibutuhkan kegiatan konsultasi publik.
2. Konsultasi Publik dimaksud dilaksanakan dalam rangka identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis / 16 Maret 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat
Jln. Koto Tinggi Padang
Acara : Konsultasi publik dalam rangka identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045
4. Konfirmasi kehadiran Saudara diharapkan dapat kami terima paling lambat pada Kamis tanggal **13 Maret 2023** yang disampaikan melalui email ke kwsdlhsumbar@gmail.com. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan Sdri. Siska Wardeni, ST, M.Eng (Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, HP. 0821 7002 3400.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROVINSI SUMBAR

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sebagaimana lampiran II

Lampiran I Surat Nomor : 665/ 576/TL-2023.

Tanggal : 8 Maret 2023

Perihal : Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045

Daftar Undangan:

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain (Universitas Andalas)
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si (Universitas Bung Hatta)
3. Dr. Marganof, M.Si (UMSB)
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA (GIZ)
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. TIM POKJA

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Prov. Sumbar
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar;
7. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar;
8. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar;
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar;
11. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar;
14. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar;
15. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Sumbar;
16. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar;
17. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar;
18. Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar;
19. Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar;
21. Kepala Dinas Pariwisata Prov Sumbar;
22. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
23. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar;
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar;
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar;
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
27. Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar;
28. Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbar;
29. Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar;
30. Kepala Dinas PMPTSP Prov Sumbar;
31. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar;
32. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
33. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar;
34. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar;
35. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan
36. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
37. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Prov. Sumbar;

38. Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar;
39. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
40. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Silokek
2. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Sianok
3. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Sawahlunto
4. Ka. Badan Pengelola Sawahlunto World Cultural Haritage
5. Ka. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Pimpinan LKAAM Sumbar
7. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Prov. Sumbar.
8. Ketua Yayasan Minang Bahari (LSM Perikanan)
9. Ketua Yayasan Cahaya Maritim (LSM Perikanan)
10. Ketua Yayasan Sea Turtle
11. Ketua PHRI Prov. Sumbar
12. Ketua Asita Prov. Sumbar
13. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Prov. Sumbar
14. Ketua HPI Prov. Sumbar
15. Ketua Yayasan Alumni Fakultas Pertanian (AFTA)
16. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
17. Ketua HKTl
18. Ketua GAPKINDO
19. Ketua GAPKI
20. Direktur WALHI Sumatera Barat
21. Direktur Q-Bar
22. Direktur Warsi
23. Ketua Yayasan Citra Mandiri Mentawai
24. Ketua Forum DAS Sumatera Barat
25. Ketua Forum Kota Bersih Kota Padang
26. Ketua Forum Kota Sehat Prov. Sumbar
27. Direktur PSLH Univ. Bung Hatta
28. Direktur PSLH UNAND
29. Direktur PSLH Univ. Muhammadiyah
30. Direktur P3KLH UNP
31. Ketua Kelompok Pengelola Ikan Pasie Nan Tigo Sipujuk
32. Ketua Asosiasi Tambak
33. Ketua Pemandu Wisata Lingkungan
34. Ketua Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim
35. Penyuluh Perikanan
36. Kelompok Tani Ripan Jaya Kecamatan Lubuk Alung (Jhoni Rizal)
37. Kelompok Tani Saiyo Kecamatan Lubuk Alung (Bainar)
38. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)
39. Kelompok Tani Karet Dharmasraya (Martin)
40. Ketua Harian Forum UMKM Sumbar (Bunda Refan)
41. Kampung Berseri Astra Tabek (Pelni Eliza)
42. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
43. BAZNAS Sumatera Barat
44. SDGs Centre Sumatera Barat

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Kabid P2KLPHL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
4. Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Lampiran II Surat Nomor : 665/ 576 /TL-2023

Tanggal : 8 Maret 2023

Perihal : Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045

Tembusan:

1. Benny Ricardo, SE (Bappeda Prov. Sumbar)
2. Devi Malindo, SE, Akt, MM (Bappeda Prov. Sumbar)
3. Yassirli Amrini, SE, ME (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar)
4. Hengki Akhdiat Anwar, SE, Ak, MM, CA (Inspektorat Prov. Sumbar)
5. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar)
6. Jusmalinda, S.Hut, M.Si (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)
7. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar)
8. Nira Susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar)
9. Siswati, SH (Dinas Sosial Prov. Sumbar)
10. Sadrianto, M.Pd (Dinas Pendidikan Prov. Sumbar)
11. Yumel Eqia, MM.Akt (Dinas Perhubungan Prov. Sumbar)
12. Antin Maisusanti, SH (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar)
13. Delvi Danus, A.Md (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar)
14. Hari F. Day, SE.Ak, M.Si (Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar)
15. Yanita Selly Meristika, S.Kom (Dinas Pangan Prov. Sumbar)
16. Indah Martha Eriyani, SE, MM (Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar)
17. Amrizal, S.Sos (Dinas PMPTSP Prov Sumbar)
18. Hadi Putra, S.STP, M.A.P (Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar)
19. Dian Sulistini, S.Si, M.Sc (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar)
20. Goeastus Fasiven, S. Hut, M.Si (Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan)
21. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V)
22. Mochammad Bayu Moelyantono, ST, MM (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar)
23. Mila Artati, S.ST, M.Stat (BPS Prov Sumbar)
24. Ridwan Anhar (Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat)
25. Adityawan Salam (Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat)

Lampiran IISurat Nomor: 665/ *576* /TL-2023

Tanggal : 8 Maret 2023

Perihal : Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJPD Prov.Sumbar 2025-2045**JADWAL ACARA KONSULTASI PUBLIK I KLHS RPJPD PROV. SUMBAR**

Hari/Tanggal : Kamis/16 Maret 2023

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Acara : *Konsultasi Publik I* dalam rangka penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Pukul (WIB)	Uraian Kegiatan/Materi	Penyaji/Pembahas/ Moderator	Keterangan
09.00 - 09.15	Pembawa Acara	Rosa Gustilisa, ST	Moderator
09.15 - 09.30	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat	Darma haryeni, ST	Sekretariat
09.30 - 11.30	Pembukaan sekaligus penyampaian Materi KLHS RPJPD	Asben Hendri, SE, MM (Kepala DLH Prov.Sumbar)	Narasumber
11.30 - 12.30	Panel 1 Pencapaian target SDGs Provinsi Sumbar Pilar Ekonomi dan Sosial	Yosmike Yusra, SE, M.Si (Kabid Tata Lingkungan DLH Prov.Sumbar)	Narasumber
12.30 - 13.30	Ishoma		
13.30 - 14.30	Panel 2 Pencapaian target SDGs Provinsi Sumbar Pilar Lingkungan Hidup dan Tata Kelola	Yosmike Yusra, SE, M.Si (Kabid Tata Lingkungan DLH Prov.Sumbar)	Narasumber
14.30 - 16.00	Penjaringan isu strategis lingkungan hidup yang dipandu oleh Tim Ahli Pendamping.	Dr. Ardinis Arbain (Tim Ahli)	
16.00 - Selesai	Penutup		

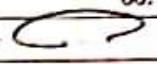
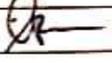
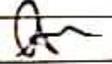
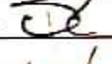
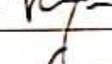
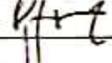
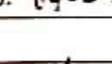
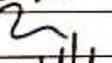
DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Maret 2023
 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
 Acara : Konsultasi Publik I dalam rangka Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045

No.	Nama	Instansi	Kabupaten/Kota	No. Telp WA	Tanda Tangan
1.	AFRIYATI	Portenir (Kaitan Seiyu)	Padang / Pariaman	085274290719	1.
2.	MARBANOF	UAI PSLH ULM Sumbang	Padang	0813 84 654329	2.
3.	Yulia Kusuma D.	DLHKPP Lab. Png Pm	Padang Pari	0831813 11073	3.
4.	SHC SPANHARUK	DLHK MH	Kab.kep. Mentawai	08211500055	4.
5.	Rikhan A	BI		081217177419	5.
6.	Putri Grestiviani	OKK		08116620730	6.
7.	Suci Kurnia Sari	PKBI Sumber	Kota Padang	081275940843	7.
8.	ERLINA L.	Dyloop UKM Sumbang	Kota Sumbang	085263168803	8.
9.	ARDINIS ARBATIN	ASCA Un and	-		9.
10.	Fakhrur Rozi	Sea Turtle Camp	Padang	082211091110	10.
11.	Devi Darius	Dierakertrans	Padang	081267145521	11.
12.	Rivo ARNIE	DPR Prov	Padang	085279129388	12.
13.	ADMIRA	DLH Bukittinggi	Bukit	085263357033	13.
14.	MISLAN	DLH	posaman barat	081261789924	14.
15.	ARMI NINGDEL	DLH	PASAMAN BARAT	08536409048	15.
16.	Yani KRI	Dibuntutan Prov.	Padang	082307157340	16.
17.	Yana Angela	DLH Dharmasraya	Dharmasraya	085272463658	17.
18.	Larniyah	DLH Dharmasraya	Dharmasraya	08126678720	18.
19.	Dei Widia	Balitbang Sumbang	Padang	08537441590	19.
20.	Avanilla Putri	DLH Kota Padang	Kota Padang	085263060277	20.
21.	RASMANEYI	-	-		21.
22.	Sisvamechi SH, MH	DLH Kota Solok	Kota Solok		22.
23.	Arif Ferdian, S.Si	-	-	081363010220	23.

No.	Nama	Instansi	Kabupaten/Kota	No. Telp WA	Tanda Tangan
24.	Alvan Patuhuan	PLH Kab. Solok	Kab. Solok	0852 6767758	24.
25.	Heleni Gema	Dinas Solok	Provinsi	082385442166	25.
26.	Fipinal	DIP Padang	Padang	081663264256	26.
27.	YASFI ALPI	BPSDM Prov-Sumbar	Padang	081267173795	27.
28.	ISRIK PERAD	Forum DAS Sum	Sumbar	08132494699	28.
29.	Maulida Zahara	ASPPi sumbar	Sumbar	085274120066	29.
30.	Robby Mula	PLP	Sumbar	085263696963	30.
31.	Rumohitun	BPPB	Sumbar	081266180204	31.
32.	Ely Hamdyanu	Distomun Fokh	Prov	082377273525	32.
33.	Naita Harlin	"	"	085263067995	33.
34.	DIFA KURNIA	Qber	Padang	08126639522	34.
35.	Yasri Amrini	Ketarriga 1	"	081389630510	35.
36.	Mirrowet	-	"	-	36.
37.	Perry Wahyud	Dredik SB	Padang	0816725524	37.
38.	Hani F Day	Disbud	Padang	0811 0600 885	38.
39.	Rahma Wanti	Tenaga Ahli	Padang	081374740299	39.
40.	Lily Sri Utma P.	BKSDA Sumbar	Padang	0812 6622 2668	40.
41.	Nuryamsi	ASITA Sumbar	Padang	081363101400	41.
42.	Fauzi BAHAR	CKRAM	Sumbar	081190892	42.
43.	Agung Firmansyah	Disnub	Prov	0853637700570	43.
44.	Indra Pruma	UMP	Padang	081266 81104	44.
45.	Indra Yandi	UNP	Padang	082279749622	45.
46.	Jusmelina	DISHUT	Padang	085261564050	46.
47.	Mel Ratihani	Putarai	Provinsi	085265345986	47.
48.	Dian S	BKSDA Sumbar	Sumbar / Padang	081230465776	48.
49.	SAMSUARDI	YTS. Mmang Bahari	PADANG	081374739959	49.
50.	Widi Utami W	Dit Padang Pariame	Padang Pariame	0816316445	50.
51.	Palastri	Pinar BKSDA	Provinsi	08126703187	51.

No.	Nama	Instansi	Kabupaten/Kota	No. Telp WA	Tanda Tangan
52.	Fita Jenita	Perwil RW			52.
53.	Erna Dewita	Dinar Perkom LH	Padang Panjang		53.
54.	Yogi Kurniawan	Dinar Perkom LH	Padang Panjang		54.
55.	Andi S	"	Pg Bg	0853 75961110	55.
56.	Afriil Mahfuzi	Ko Pukem	Padang		56.
57.	Virgini Anam	BPRW Sub-			57.
58.	Susy Hartono	DLHPP	Lima Puluh Kota	0822 0092168	58.
59.	Kimiawan Hanu	DLHPP SU Kota	"	0813 63032266	59.
60.	Eka Wangunu	"	Lima Puluh Kota	0813 4988611	60.
61.	Bebi Haruan	DLH Sumbang			61.
62.	EFNI USLINDA	PERKIMTAN SUMBAR	Kabupaten Sumbang	08126637796	62.
63.	Zulfahmi	Petimbangan	Sumbang		63.
64.	AFRIADI	BPPW Sumbang	Sumbang	081229710552	64.
65.	EMILWARTI	Pek LH Kt Bn	Pariaman	08126682440	65.
66.	yanny	"	"	081142000217	66.
67.	Yellanda Septani	"	Pasaman	082702403907	67.
68.	Rizka Attil	"	"	085213449896	68.
69.	E. Suci Loroati	LH	Pasaman	08126621777	69.
70.	XUFERDI	DLM	Pek	08527910898	70.
71.	Lisa Anisa	DLH	Pangkalbata	085214923188	71.
72.	Dodi Marl	KPMI	Pariaman	08526304637	72.
73.	Indra Medis	PSMTB PI	Pariaman	085263127981	73.
74.	JHON HENDRIAN	KELTAN RUPAN JAYA	PD. PASAMAN	081200429014	74.
75.	Arie Mahruddiyana	Dinas Perkim-LH	Sijunjung	081372527112	75.
76.	Frisa Wayu Hidayat	DPK2 LH	Sumbawa	08107036966	76.
77.	Hazintanur	DPK2 LH	Sumbang	08579491744	77.
78.	Supriyati Yusuf	DP3 AP2 KB	Sumbang	08106600775	78.
79.	Indira Milla Fyria	DP3 AD2 LH	Sumbang		79.

No.	Nama	Instansi	Kabupaten/Kota	No. Telp WA	Tanda Tangan
80.	Adharam.	DLH ppr.	pos. panna.		80. Adh
81.	ARIF	DLH Panna	Lubuk Sipin		81. 
82.	Rikep	DKP			82. 
83.	Ivan toni	DKP			83. 
84.	Abdi	DKP			84. 
85.	Yuni	DKP			85. 
86.	YEF	DKP			86. 
87.	Fika	DKP			87. 
88.	Venus	DKP			88. 
89.	Anggi	DKP	Padang		89. 
90.	Rodi	DKP	Padang		90. 
91.	ARI	DKP	Padang		91. 
92.	Fati	DKP	Padang		92. 
93.	Rani	DKP	Pdk		93. 
94.	VARMA HEAMENI	DLH PPUW	Padang		94. 
95.	RINI FAHMA PUTRI	DLH Prov			95. 
96.	ENDRIYANTO	DLH	Padang		96. 
97.	Isbia Noffhi	DLH			97. 
98.	Yulpa CL	DLH			98. 
99.	Devi Hendra	DLH			99. 
100.	Rina Rangk	DLH			100. 
101.	Andi Iwan	DLH	Padang		101. 
102.	ANDAM	DLH			102. 
103.	DOLA	DLH	m		103. 
104.	Yunistika	DLH prov.			104. 
105.	DR. Ardian Arbin	DLH			105. 
106.	DESRIZAL				106. 
107.	Junardi	DLH Prov.			107. 



NOTULEN

Acara : Konsultasi Publik I KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar
Jl. Koto Tinggi No. 9, Jail Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang

Pimpinan Acara : Kepala Dinas LH Sumbar
Notulis : Siska Wardeni, ST, M.Eng

Peserta Acara : - Tim Ahli Pendamping Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045
- Utusan dari Instansi/OPD Provinsi Sumbar (Pokja KLHS)
- PSLH Unand, UNP, UBH dan UMSB
- LSM
- Kelompok Tani, Perhimpunan Industri, dll (perwakilan masyarakat)
- Utusan dari Dinas LH Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dasar Hukum Pelaksanaan Acara :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. PP No. 46 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS.
3. Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

Mekanisme pelaksanaan Acara :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Kepala Dinas LH Sumbar.
2. Penyampaian materi KP I
Penyampaian materi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kabid Tata Lingkungan
3. Penjaringan Isu dengan dipandu oleh Tim Ahli Pendamping Penyusunan KLHS

Hasil Penjaringan Isu:

a. Isu Strategis (Fisik)

1. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana (banjir, longsor, karhutla) .
2. Penurunan kualitas air (danau, sungai) dan besarnya fluktuasi debit sungai.
3. Perubahan tutupan lahan (alih fungsi, degradasi hutan).
4. Penurunan Kualitas tanah. (ketersediaan pangan).
5. Peningkatan jumlah dan variasi sampah
6. Pencemaran Udara.
7. Degradasi KEHATI.
8. Penurunan kualitas air laut

b. Isu Strategis EKO SOS BUD POL KES

1. Rendahnya Nilai tukar Petani.

Dipindai dengan CamScanner

2. Belum optimalnya layanan kesehatan masyarakat (olr, sanitasi, makanan sehat, olah raga)
3. Kualitas transportasi publik dan lalu lintas rendah (macet, kecelakaan)
4. Meningkatnya kasus (LGBT, narkoba, kekerasan, bully)
5. UMKM, Koperasi, Nilai Tambah Produk, Penetrasi Pasar, belum optimal
6. Perlindungan terhadap Wanita belum optimal
7. Kualitas pengambilan kebijakan belum baik
8. Kualitas keberagaman relatif rendah (apresiasi antar pemahaman, Implementasi ajaran, Inklusivitas dan toleransi)
9. Penyelenggaraan wisata belum optimal
10. Layanan Pendidikan belum optimal
11. Distribusi pendapatan masih belum Ideal (miskin).

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Harweni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KP I PENYUSUNAN KLHS RPJPD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	Hari/Tanggal	Perihal
I.	KONSULTASI PUBLIK I	
1.	Kamis, 16 Maret 2023	Konsultasi Publik I KLHS RPJPD Prov.Sumbar tahun 2025-2045 dilaksanakan dalam rangka identifikasi dan Perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan laporan KLHS(Surat Undangan, Absensi dan Notulen Terlampir).



No.	Hari/Tanggal	Perihal
		 
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumbar : Asben Hendri, SE, MM dan selanjutnya konsultasi publik I dipandu oleh Tenaga Ahli yaitu DR. Ardinis Arbain • Rapat dihadiri oleh Perwakilan dari 19 Kab/Kota, OPD, dan LSM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 10 November 2023
Rabi'ul Akhir 1445 H

Nomor : 665/ 2239 / TL 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

Kepada Yth.
Sdr. (Sebagaimana Daftar Lampiran I)
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya proses penyusunan laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 telah melewati beberapa tahap penyusunan antara lain Pengolahan data TPB, Konsultasi Publik I dalam rangka menjaring isu pembangunan berkelanjutan dari *stakeholder* (Akademisi, LSM, Asosiasi, Pelaku Usaha, dll) dan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJPD.
2. Mepedomani Permendagri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan diperlukan Konsultasi Publik II.
3. Konsultasi Publik II dimaksud dilaksanakan dalam rangka menghimpun saran, pendapat dan tanggapan untuk penyempurnaan perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 20 November 2023
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Thamrin Nurdin Aula Lt. 3 Bappeda Prov. Sumatera Barat
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Acara : Konsultasi Publik II dalam rangka dan perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045
5. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan Sdri. Siska Wardeni, ST, M.Eng (Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, HP. 0821 7002 3400.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROVINSI SUMBAR

ASBEN HENDRI, SE, MM
Kepala Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sebagaimana lampiran II

Lampiran I Surat Nomor : 665/ 22 39/TL-2023
Tanggal : 10 November 2023
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS
RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045**

Daftar Undangan:

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain (Universitas Andalas)
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si (Universitas Bung Hatta)
3. Dr. Marganof, M.Si (UMSB)
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA (GIZ)
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si
6. Sdr. Febrian, S.Pi, M.Si

B. TIM POKJA

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Prov. Sumbar
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar;
7. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar;
8. Kepala Dinas Perkimtan Prov. Sumbar;
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar;
11. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar;
14. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar;
15. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Sumbar;
16. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar;
17. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar;
18. Kepala Dinas Sosial Prov. Sumbar;
19. Kepala Dinas Kominfotik Prov. Sumbar;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar;
21. Kepala Dinas Pariwisata Prov Sumbar;
22. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar;
23. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar;
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar;
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar;
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
27. Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar;
28. Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbar;
29. Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar;
30. Kepala Dinas PMPTSP Prov Sumbar;
31. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar;
32. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar;
33. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar;
34. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar;
35. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan
36. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V;
37. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Prov. Sumbar;
38. Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sumbar;
39. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
40. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Silokek
2. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Sianok
3. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Sawahlunto
4. Ka. Badan Pengelola Sawahlunto World Cultural Heritage
5. Ka. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Pimpinan LKAAM Sumbar
7. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Prov. Sumbar.
8. Ketua Yayasan Minang Bahari (LSM Perikanan)
9. Ketua Yayasan Cahaya Maritim (LSM Perikanan)
10. Ketua Yayasan Sea Turtle
11. Ketua PHRI Prov. Sumbar
12. Ketua Asita Prov. Sumbar
13. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Prov. Sumbar
14. Ketua HPI Prov. Sumbar
15. Ketua Yayasan Alumni Fakultas Pertanian (AFTA)
16. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
17. Ketua HKTl
18. Ketua GAPKINDO
19. Ketua GAPKI
20. Direktur WALHI Sumatera Barat
21. Direktur Q-Bar
22. Direktur Warsi
23. Ketua Yayasan Citra Mandiri Mentawai
24. Ketua Forum DAS Sumatera Barat
25. Ketua Forum Kota Bersih Kota Padang
26. Ketua Forum Kota Sehat Prov. Sumbar
27. Direktur PSLH Univ. Bung Hatta
28. Direktur PSLH UNAND
29. Direktur PSLH Univ. Muhammadiyah
30. Direktur P3KLH UNP
31. Ketua Kelompok Pengelola Ikan Pasie Nan Tigo Sipujuk
32. Ketua Asosiasi Tambak
33. Ketua Pemandu Wisata Lingkungan
34. Ketua Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim
35. Penyuluh Perikanan
36. Kelompok Tani Ripan Jaya Kecamatan Lubuk Alung (Jhoni Rizal)
37. Kelompok Tani Saiyo Kecamatan Lubuk Alung (Bainar)
38. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)
39. Kelompok Tani Karet Dharmasraya (Martin)
40. Ketua Harian Forum UMKM Sumbar (Bunda Refan)
41. Kampung Berseri Astra Tabek (Pelni Eliza)
42. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
43. BAZNAS Sumatera Barat
44. SDGs Centre Sumatera Barat

D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Kabid P2KLPPL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
4. Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Lampiran II Surat Nomor : 665/ 2239 /TL-2023
Tanggal : 10 November 2023
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS
RPJPD Prov. Sumbar 2025-2045**

Tembusan:

1. Benny Ricardo, SE (Bappeda Prov. Sumbar)
2. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Bappeda Prov. Sumbar)
3. Yassirli Amrini, SE, ME (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar)
4. Hengki Akhdiat Anwar, SE, Ak, MM, CA (Inspektorat Prov. Sumbar)
5. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar)
6. Jusmalinda, S.Hut, M.Si (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)
7. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar)
8. Nira Susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar)
9. Siswati, SH (Dinas Sosial Prov. Sumbar)
10. Sadrianto, M.Pd (Dinas Pendidikan Prov. Sumbar)
11. Yumel Eqia, MM.Akt (Dinas Perhubungan Prov. Sumbar)
12. Antin Maisusanti, SH (Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar)
13. Delvi Danus, A.Md (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar)
14. Hari F. Day, SE.Ak, M.Si (Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar)
15. Yanita Selly Meristika, S.Kom (Dinas Pangan Prov. Sumbar)
16. Indah Martha Eriyani, SE, MM (Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar)
17. Amrizal, S.Sos (Dinas PMPTSP Prov Sumbar)
18. Hadi Putra, S.STP, M.A.P (Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar)
19. Dian Sulistini, S.Si, M.Sc (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumbar)
20. Goeastus Fasiven, S. Hut, M.Si (Balai Pengelolaan DASHL Agama Kuantan)
21. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V)
22. Mochammad Bayu Moelyantono, ST, MM (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar)
23. Mila Artati, S.ST, M.Stat (BPS Prov Sumbar)
24. Ridwan Anhar (Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat)
25. Adityawan Salam (Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 10 November 2023
Rabi'ul Akhir 1445 H

Nomor : 665/2238 /TL-2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-3045**

Kepada Yth.
Bpk. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya proses penyusunan laporan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045, bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 telah melewati beberapa tahap penyusunan antara lain Pengolahan data TPB, Konsultasi Publik I dalam rangka menjangkau isu pembangunan berkelanjutan dari *stakeholder* (Akademisi, LSM, Asosiasi, Pelaku Usaha, dll) dan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJPD.
2. Mempedomani Permendagri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan diperlukan Konsultasi Publik II.
3. Konsultasi Publik II dimaksud dilaksanakan dalam rangka menghimpun saran, pendapat dan tanggapan untuk penyempurnaan perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 20 November 2023
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Prov. Sumatera Barat
: Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Acara : Konsultasi Publik II dalam rangka dan perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045

5. Koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan Sdr. Siska Wardeni, ST, M.Eng (Sub Koordinator Kebijakan Wilayah dan Sektor) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, HP. 0821 7002 3400.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
SELAKO KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROVINSI SUMBAR

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Sumatera Barat di Tempat.

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin, 20 November 2023
 PUKUL : 08.30 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ballroom Thamrin Nurdin Aula Lt.3 Bappeda Prov. Sumbar
 ACARA : Konsultasi Publik II dalam rangka dan Perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar Tahun 2025-2045

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	ISMAIL BERD	Forum DNS	0811661008	
2	Drs. M. NATSIR D.	LKAAH SUMBAR	081266362781	
3	Alfian Pratama	HPI Sumbar	08136302949	
4	JUFRI NUR	APKASINDO SUMBAR	0816351515	
5	LISPA JOSEVA	DBH CTM	0052630048005	
6	ADAM FATH	Komunitas	0813008899	
7	Zula Kristini D.	Koord P3K-OLTPUPP Pkg Pm	083181311073	
8	Engki	SI JFI SPADK	081322554300	
9	Yose Rizal Arman	Supvile	081374455671	
10	Ikhwan Armani	OSK	084400255334	
11	MUMARNI	PSUH UMSIB	085319643017	
12	MARGANOF	TA	082304654325	
13	ADMILIA	DH. Bli	085263304023	
14	Rizki Uchel			
15	Desi warni Simbolon	Yayasan Minang Bahari	082369317503	
16	Wahyuni Rahmadani	Yayasan Minang Bahari	081363146873	
17	Asratul Hasanah	Yayasan Citra Maedini Meulabau	082288070586	
18	Maman	DPM P3SP Prov. Sumbar	085263750940	
19	Bany Roney	Byggn K		
20	Herri Myzani	Peneliti / Balitbang	081363367820	
21	Rivo Armi	DKE PRU	085274124308	
22	SUPREMO	TA	0813500700	
23	Jhon Hendri Rizal	Keltan Riptan jag	081280929094	
24	Ipatriah.	Keltan SATHO	082172995955	
25	Dr. SaImaini J.M.S	Dinas Pdk. Prov. Sumatera Barat	081394466589	
26	Emey F	Prov ad / G12	08118123201	
27	Fehrian	UBH	085974591077	
28	Suci Kurnia Sari	Koor. Program PKBI Sumbar	081275940843	
29	Syafahzil.	ASITA SUMBAR	081363433181	
30	Arie Mahroliyana	Dinas perkim-LH S)	081372527112	
31	PATI CANTIK	Dinas BUKETA	08127997015	
32	Hfdin al			
33	Timmy	WACHI Sumbar	081288202488	

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
34	ANDRE DUL- HARTI Pur.	KABID / BAPPEDA Kaltu / B. padua		34
35	Rahma Wismi	TA pendamping		35
36	DASRI	DESOM		36
37	EMILIATI	Pik. LTI Paraman		37
38	Ridwan Anwar	BI Siantar.		38
39	SUHARDI	LHD KPP		39
40	Arlindawati	DEP Prov Sumb		40
41	MOMTA	gison		41
42	YANTI DA Pandi Sura			42
43	DEVI MACHINDA	BAPPEDA		43
44	Agung Armansyah	DISHUB		44
45	Agelhal Hefiratur	DISHUB BPS		45
46	Dwi Susanti	BPS		46
47	Arif F	DLH Kota Solok		47
48	Edo. Nopriadi	DLH Kota Solok		48
49	Puji Harti-03	Sec turtle camp		49
50	Detty Evita	Diras Prov Sumb		50
51	Ronaldi Lathiq			51
52	Piki sel.	Sekretari / Dir. mada		52
53	Ulun	DLH kota		53
54	MIRAN YANSORAN	Kabid TV / DLH Agri	0811668111	54
55	Hilma	Pedat DLH Agri		55
56	Umi	Manperes		56
57	NOFRI YANI	Cahaya Murni		57
58	MARTI	Pelaksana		58
59	Pradi Wahy	Kachin LTI		59
60	Agus Achibab	Seleksi DLH		60
61	Fadmul Pan	Dibuatkan		61
62	Azzah	DLH kota / pedat		62
63	Muti Eliza Koto	BAPPEDA PROV		63
64	Novita Sari	BAPPEDA PROV		64
65	Lisa Anisa	Pedat Anli. mud. - DLH Pyl	085214933188	65
66	Ami	DLH K. Kota. T. U	P 9 Ulang	66
67	Aleli Marsalen	Sekretari DLH KPP		67

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
71	Atri Yanti Ekapa	Medis Kes per 124	08263183334	71
72	Dusmita Assasani	staf DLH PROV		72
73	Yudha Fera	kehad DLH NPT		73
74	Alvan Pahulvan	DLH Kab. Sorolu / PEDAL	085263633768	74
7576	DEFUNIAL A.	Bappeda		75
77	RADUS EKA PUTRA	BAPPEDA		76
78	Naldi			77
79	Rogi			78
80	Juni			79
81	Doni Indra			80
82	Andiman	DLH Moan		81
83	Ardir Arbas	DLH ALH.		83
84	Yosmike Jura	DLH PROV		84
85	Feri Aldy			85
86	Yafid yau			86
87	Rui Ewa Ningsih	DLH Prov		87
88	M. Arief N	DLH SP		88
89	Yulza Charkian	DLH SB		89
90	Wahie Anasari	DLH SB		90
91	EMOKYANTO	DLH SB		91
92	Niniwidayartuti	DLH MS		92
93	Idia Nopfithi	-.-		93
94	Pisma Nadi	-.-		94
95	Andriangrah	- " -		95
96	Pina Deswita	- " -		96
97	Pencil	-.-		97
98	Mia	LSM	081267116317	98
99	Lina Oktavio	DLH.		99
100	Eddra Yunita	-.-		100
101	Prisilla	-.-		101
102	Zala Permanaesha	-.-		102
103	Ratudet Permata R.	- " -		103
104	Dentur			104
105	DHEA	LSM	082288065829	105
106	Lroni Melinda	DLH	0826747002	106
107	Citra Apru A	DLH		107
108	Widhan	DLH		108



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

BERITA ACARA

KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Ball Room Thamrin Nurdin Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan Konsultasi Publik II dalam Rangka Perumusan Arah Kebijakan dalam Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Adapun beberapa hal disampaikan sebagai berikut:

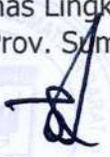
1. Konsultasi Publik ini dihadiri oleh Unsur SKPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Kelompok Masyarakat, LSM dan Asosiasi, Tim Tenaga Ahli, serta Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
2. Konsultasi Publik II ini dilakukan guna menyepakati rekomendasi, dan arah kebijakan dalam Pembuatan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, sebagaimana terlampir.
3. Daftar hadir menjadi bagian tidak terpisah dari berita acara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

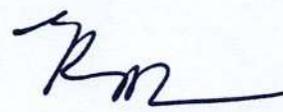
Padang, tanggal sebagaimana tersebut di atas

Diketahui Oleh,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Prov. Sumbar


Asben Hendri, SE, MM
Ketua Pokja

Perwakilan Tenaga Ahli


DR. Ardinis Arbain
Tenaga Ahli



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045
Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023
Waktu rapat : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ballrom Tharim Nurdin Aula Lt.3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.1 Padang.

Pimpinan Rapat :

Ketua : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat :

- Tim Ahli Penyusunan KLHS Prov Sumbar
- Tim penyusun/Pokja KLHS RPJPD Provinsi Sumbar
- Non Pokja (kelompok Masyarakat, LSM dan Asosiasi)
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

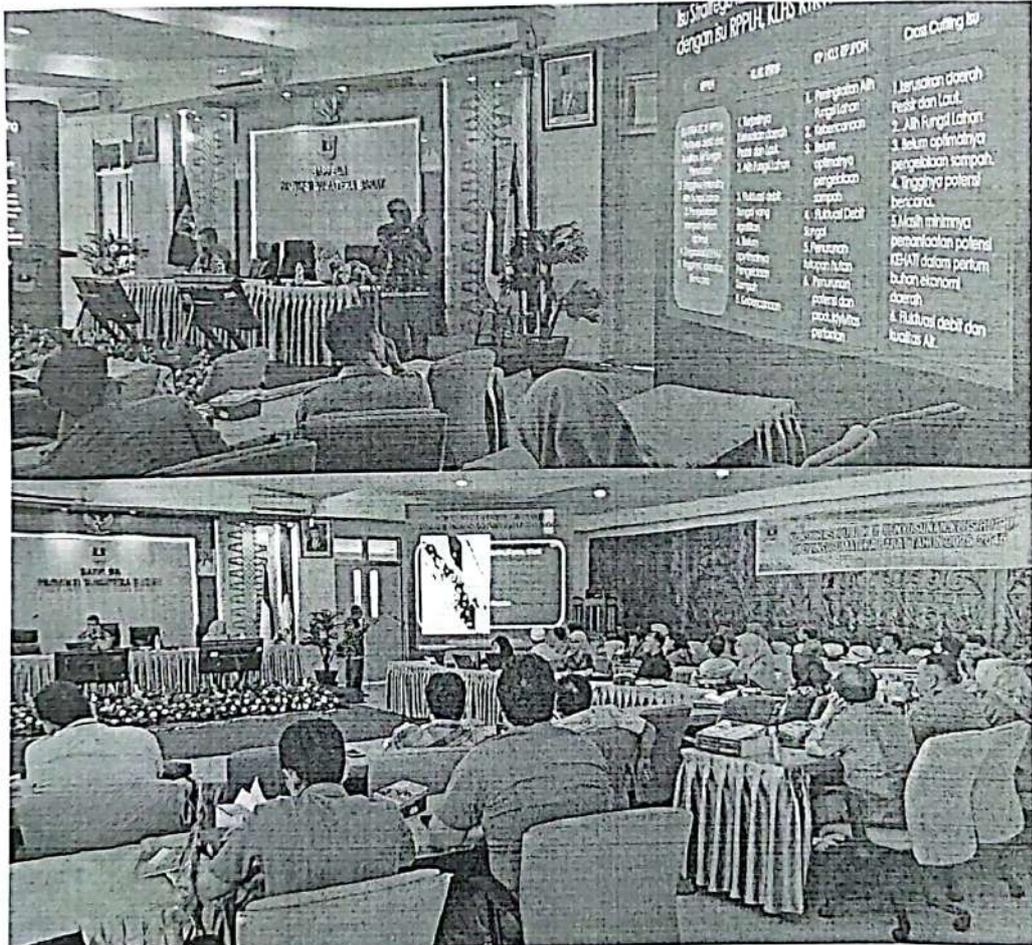
Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) PermenLHK No.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- c) Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Asben Hendri, SE, MM dan dilanjutkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu Ibu Yosmike Yusra, S.E, M.E.
 - b. Penyampaian/presentasi Konsultasi Publik II di sampaikan oleh Bapak Ardinis Arbain dan Sdr. Desrizal, M.Si
 - c. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya rapat Konsultasi Publik II dalam rangka perumusan arah kebijakan dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2025-2045.
Tujuan : Mendengar dan menerima masukan dari tim ahli, OPD, LSM dan Tim Pokja sehingga Muatan dalam dokumen KLHS RPJPD penyusunan dokumen dapat lebih sempurna.
2. Penyampaian materi rapat.
Penyampaian dan presentasi materi rapat oleh ketua Tim KLHS Provinsi Sumbar yaitu Bapak Ardinis Arbain dan Sekretaris Pokja Sdr. Desrizal, M.Si.
3. Kesimpulan Rapat.
Dari hasil pelaksanaan rapat, terdapat beberapa peran penting antara lain :

- a. Konsultasi Publik ini dihadiri oleh Unsur SKPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Kelompok Masyarakat, LSM dan Asosiasi, Tim Tenaga Ahli, serta Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
- b. Konsultasi Publik II ini dilakukan guna menyepakati rekomendasi, dan arah kebijakan dalam Pembuatan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, sebagaimana terlampir.
- c. Dokumentasi



Notulis,

Darma Haryeni, ST

Penata Tk.I

NIP. 19761028 200904 2 002

DOKUMENTASI KP II PENYUSUNAN KLHS RPJPD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2025-2045

No.	Hari/Tanggal	Perihal
II.	KONSULTASI PUBLIK II : PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJPD PROV.SUMBAR	
1.	Senin, 20 November 2023/ Konsultasi Publik II	Konsultasi Publik II dilaksanakan berdasarkan surat Ka. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar No. 660/ 2238/TL-2023 dan No. 665/2239/TL-2023 tanggal 10 November 2023 perihal Undangan Konsultasi Publik II penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar (Surat Terlampir).



No.	Hari/Tanggal	Perihal
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Konsultasi Publik II ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun saran, pendapat dan tanggapan untuk penyempurnaan perumusan arah kebijakan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat tahun 2025-2045, yang dihadiri oleh peserta rapat SKPD Provinsi Sumatera Barat terkait yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Prov, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Biro perekonomian, Dinas PPKBKPS, Dinas Kesehatan, Balitbang, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Dinas Sosial, Diskop UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Perwakilan dari Kab/Kota Se-Sumatera Barat serta perwakilan dari LSM (Surat Undangan, Daftar hadir dan BA terlampir). • Rapat dilaksanakan di Ballroom Thamrin Nurdin Aula Lt.3 Bappeda Provinsi Sumbar yang dipandu oleh : Dr. Ardinis Arbain sebagai ketua Tim ahli dan dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar : Asben Hendri, SE, MM.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 26 April 2023
Ramadhan 1444 H

Nomor : 665/ 000 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Sektor
Kelautan dan Perikanan dalam
Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar**

Yth.Sdr.

(Sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan memuat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 28 April 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Sektor
Kelautan dan Perikanan** dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT


DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal

Lampiran Surat Nomor : 665/800/TL-2023
Tanggal : 26 April 2023
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Peyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain (Universitas Andalas);
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si (Universitas Bung Hatta);
3. Dr. Marganof, M.Si (UMSB);
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA (GIZ);
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si;

B. TIM POKJA

1. Kepala Bappeda Prov. Sumbar;
2. Kepala BMCKTR Prov.Sumbar;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
5. Kepala Dinas Perhubungan Prov.Sumbar;
6. Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sumbar;
7. Winny Sayori, ST, MMP (Bappeda Prov.Sumbar);
8. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional perencana Ahli Muda Bappeda Prov.Sumbar);
9. Benny Ricardo, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov.Sumbar);
10. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov.sumbar);
11. Agung Firmansyah, S.Tr,Tra (Staf teknis Dinas Perhubungan Prov.Sumbar);
12. Dian S (Balai Konservasi SDA Prov. Sumbar);
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
14. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
15. Kabid P2KLPHL Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
16. Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
17. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
18. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
19. Armi B, ST (Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar);
20. Devi Hendra, S.Si (Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Prov.Sumbar);
21. Novriyanti, ST, M.Si (Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar);
22. Dwi Elvia Ningsih, ST (Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar);

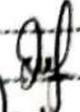
C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Prov. Sumbar.
2. Ketua Yayasan Minang Bahari (LSM Perikanan)
3. Ketua Yayasan Cahaya Maritim (LSM Perikanan)
4. Ketua Yayasan Sea Turtle
5. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Prov. Sumbar
6. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
7. Direktur WALHI Sumatera Barat
8. Direktur Q-Bar
9. Direktur Warsi
10. Ketua Yayasan Citra Mandiri Mentawai
11. Ketua Kelompok Pengelola Ikan Pasie Nan Tigo Sipujuk
12. Ketua Asosiasi Tambak
13. Penyuluh Perikanan
14. SDGs Centre Universitas Andalas Sumatera Barat
15. SDGs Centre UNP Sumatera Barat

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Jumat, 28 April 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Sektor kelautan dan Perikanan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumatera Barat.

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	KIPM	Ketua / YCMLH	081374797855	1
2	Eneng Fatholah	Prov. Adv - GIZ	08118123 201	2
3	SCI PABUO	TEKNOLOGI AHLI	08131588767	3
4	Rano Amis	DBP RO		4
5	Petihariyos	Sen turtle jambang	085263670910	5
6	Samsuardi	YKS Mining Bahan	081374739459	6
7	Fenah	Uvasta Peng. hts	081274572031	7
8	Rahma Wismi	tenaga ahli	681379990299	8
9	Ahlan	DLH Program	08126075120	9
10	Diviyanti	JPP Madya / Boppada	081374054954	10
11	Tegeh A	Kabid PkKUMH DLH		11
12	Arifin's Arifin	Toni ahli KLHS NABO	68136360479	12
13	Dwi Ewa Ningsih	Fungsional / DLH		13
14	DEVI MARGANITA	JPP	08126708343	14
15	ARMI	DLH SB		15
16	Pabstri	Kabid TR / Anas BUKAR		16
17	Beni Handa	Fungsional / DLH		17
18	Dwi Widia	Peneliti / Balitbang	085394441590	18
19	Deski Beri	SDGS UNP	08137350875	19
20	ERIANJONI	SDGS UNP	08126768892	20
21	DARMA HARYANI	DLH SUMBAR	081367216300	21
22	NOFER YANI	Cahaya Mandiri	085263923191	22
23	Au. Irawan	DLH	08126749897	23
24	Fodhilla Oktari	KI GIS	081271769374	24
25	Liza Melinda	DLH Prov	08128949002	25
26	Arief	- -		26
27	Yany Erita	- -	08122190721	27
28	Yulya Chortan	- -	085363462562	28
29	Feri	- -		29
30	Yosmike Yusra	DLH Prov	08136302385	30
31	Rosa Gustilla	DLH		31
32	Ary Nugra	MSI		32
33	EMIRAH YANI	DLH	081363255012	33
34	Reya Ananda Putra	DLH	082317792417	34
35	ANI RAHMA PUTRI	DLH	081363420328	35

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
36	Arisman	DLH		36 
37	Rini	DWI		37 
38	Dona	DWI		38 
39	ANDRI	DLH		39 
40	Ayus Firmasohan	Ptchub Numan	08536379 0058	40 
41	Bony Aden	WALHI padar	0812 8820248	41 
42	VIRGINIA	BPPW NUMAN	0812297 5052	42 
43	Ahsadi	BPPW NUMAN	0812297 5052	43 
44	Boni M	Prakes	0913633 0809	44 
45	Alan sapriker	& Bar	0822 6776 4277	45 
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71



NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov Sumbar
Hari/Tanggal : Jum'at 28 April 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt. II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat :

Ketua : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Rosa Gustilisa, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS Prov Sumbar
- Kelompok masyarakat, LSM dan Asosiasi
- Instansi Teknis Terkait
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Tim Sekretariat KLHS RPJPD Prov Sumbar

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) PP nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS
- 4) PermenLHK nomor 69 tahun 2017 tentang pelaksanaan PP no.46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.
- 5) Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 6) Surat Kemendagri No. 660/5112/Bangda tanggal 6 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : dalam rangka persiapan penyusunan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Tujuan :
 - Menginventarisir masukan dari peserta rapat terkait permasalahan dan isu yang telah didapatkan pada Konsultasi Publik I Penjaringan Isu sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 16 Maret 2023.
 - Menginventarisir masukan dari peserta terkait rekomendasi kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dalam upaya pengelolaan lingkungan untuk mencapai Tujuan Pembangunan berkelanjutan 20 tahun mendatang
2. Penyampaian materi rapat.
 - Penyampaian perkembangan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar oleh Kabid Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar.
 - Penyampaian materi FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Tim Ahli Dr. Suparno.
3. Diskusi dan Tanya jawab.

4. Kesimpulan Rapat:

- a. Terdapat beberapa masukan dari peserta rapat terkait rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan dituangkan dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
- 1) Perlunya perhatian terhadap kawasan mangrove sebagai kawasan konservasi
 - 2) Perlunya perhatian tidak saja terhadap daerah/kawasan konservasi namun juga terhadap daerah/kawasan yang bukan kawasan konservasi
 - 3) Perlunya pengakuan perlindungan terhadap daerah perikanan tradisional
 - 4) Perlunya penyatuan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan daratan
 - 5) Perlunya kebijakan untuk menghentikan setiap kegiatan yang berdampak terhadap perubahan iklim
 - 6) Perlunya edukasi pada masyarakat di kawasan pesisir
 - 7) Perlunya kajian dan kebijakan khusus terkait kegiatan tambak udang di sepanjang pesisir Sumatera Barat
 - 8) Perlu pengawasan yang lebih terkoordinasi terhadap kegiatan tambak udang
 - 9) Perlu edukasi termasuk kepada wisatawan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata
 - 10) Perlu restrukturisasi instansi /kelompok masyarakat di kawasan pesisir
 - 11) Perlu memperjelas regulasi dan tegas terhadap pemanfaatan daerah pesisir sebagai daerah wisata
- b. Masukan-masukan dari peserta FGD ini akan dirangkum dan diramu kembali oleh Tim Ahli dan Sekretariat KLHS RPJPD Provinsi Sumbar dan akan menjadi rekomendasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan dalam 20 tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Mengetahui:

Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor

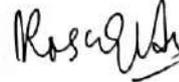


Siska Wardeni, SE, M.Si

Penata Tk.I

NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Rosa Gustilisa, ST

Penata Muda Tk. I

NIP. 19820708 201101 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 28 April 2023
Syawal 1444 H

Nomor : 665/ 812 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Terkait Isu
Persampahan dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Yth Bapak.

Bupati/Walikota Se-Sumatera Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Bapak untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/ 03 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Terkait dengan Isu Persampahan** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Bapak untuk dapat hadir pada pertemuan dimaksud sesuai dengan jadwal sebagaimana tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota se-Sumatera Barat;
3. Peringgal;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 28 April 2023
Syawal 1444 H

Nomor : 665/ 813 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Terkait Isu
Persampahan dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(Sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/ 03 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Terkait dengan Isu Persampahan** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT


ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal;

Lampiran Surat Nomor : 665/ 813/TL-2023

Tanggal : 28 April 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Terkait dengan Isu Persampahan dalam Peyusunan KLHS
RPJPD Prov.Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Dr. Marganof, M.Si
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. TIM POKJA

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar;
2. Kepala Dinas Pariwisata Prov.Sumbar;
3. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov.sumbar);
4. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional perencana Ahli Muda Bappeda Prov.Sumbar);
5. Benny Ricardo, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov.Sumbar);
6. Tiara Andini Putri, ST (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sumbar);
7. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
8. Ir.Palastri (Dinas BMCKTR Prov.Sumbar);
9. Nira susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov.Sumbar);
10. Rivo Armis (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar);
11. Mochammad Bayu Mulyanto, ST, MM (Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Prov.Sumbar);
12. Agung Firmansyah, S.Tr,Tra (Staf teknis Dinas Perhubungan Prov.Sumbar);
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
14. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
15. Kabid P2KLP HL Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
16. Kabid PSLB3PK Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
17. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar;
18. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
19. Novriyanti, ST, M.Si (Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar);

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
2. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;
3. Direktur LSM Q Bar;
4. Direktur WALHI Sumatera Barat;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Rabu, 03 Mei 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait isu persampahan dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumatera Barat.

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	YOSMIKE YUSILA	KADID TL		1
2	CHLITA BRUJANTI	DLH Padang		2
3	E. CUBH	"	08126621777	3
4	Talia Kristina D.	DLHKPP Pdg Pari	085181311073	4
5	ADMIN	DLH Bkt	085263354933	5
6	Rahman Widi	tenaga Ahli	081374740292	6
7	Hertina Andhian	DLH kota Padang	08228345 8628	7
8	Bima Adhira	BPKAD Prov	08116610276	8
9	Elvia Rinda	DKP Prov	081275266400	9
10	Tiara Andrianie Ari	D.ESDM	08122114094	10
11	Tammy Adam	WALHI Sumbang	081288202488	11
12	Beni M	Dokter	08136337884	12
13	Viktor Prasetyo	DLH Kab Abur	0811668111	13
14	Budi Sauti	BPKAD Prop	081374496944	14
15	Jaki Febriansia	UPTD Persampahan	085244211571	15
16	Margant	Ten Ahli	082784654325	16
17	Feri Andh.	Perkum kota pku		17
18	Budi Ulini	"		18
19	M. Sidik P	DLH		19
20	Edison Z.	DLH Pasbar	085262168127	20
21	M. Anu	NLH Kru	08126362811	21
22	Des. Wibiz	Balibang Sumbang	085374441590	22
23	Alan Sapriua	Perkumpulan glar	082169764042	23
24	Afrizal	BPPW Sumbang	08122575052	24
25	Vito Anu		08122289022	25
26	Palastri	DINAS AMCKTA	08126703183	26
27	Adolf Restu	DLH Abur	08526713400	27
28	Ayung Firmansyah	DISHUB Sumbang	085363790058	28
29	Adrian	DLH Prov. Sumbang	081261570130	29
30	Faza Tuh	DLH Prov Sumbang		30
31	Zulharnadi	Sede perkum-LH Sd	081261348648	31
32	Vin Oktavianus	Kab PSLB3 / - - -	08124555180	32
33	PEROZA	- " -		33
34	NEMILYARTI	Pelaksana/Dispar	081374006344	34
35	Ana	Banc. DLH		35

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
36	Yeni Susanta	Perencana / Program Dipping	081974170495	36
37	Hani Tomar	KABID / DPEKUSU	08524955469	37
38	Andri K L Ktra	APR 1001 / LH-SWL	085241013158	38
39	DARMA Haryani	DLH PROU	081363216300	39
40	Junardi	DLH Prov. Jabar	082385727224	40
41	ERIAMONG	SDGs Centr UMP	08146708952	41
42	Syafrijan	SDGs (UNP)	08126737955	42
43	Sofia Wardani	DLH SB		43
44	Ravi Hendri			44
45	Rafida Yanti			45
46	Zul Fajri	DLH AGAM		46
47	ENRIYANTO	DLH		47
48	Riswan Nasti	DLH Prov Jabar		48
49	M. Anif N	DLH SB		49
50	Febi Melinda	DLH SB		50
51	Den traine	DLH SB		51
52	Nira M	DLH SB		52
53	Bismyeni	DLH SB		53
54	Adriela	DLH SB	082383011525	54
55	Dikarane Putri			55
56	Fari Aldy			56
57	RINI RAHMA PUTRI	DLH		57
58	Debi Harian	DLH		58
59	Widia Nigum	DLH		59
60	Rosa Gusni	DLH		60
61	Yulfa Charita	DLH		61
62	EMIDAR YATI	DLH		62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71



NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Isu Persampahan dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat :

Ketua : Yosmike Yusra, SE, M.Si

Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- DLH Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan isu persampahan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan permasalahan persampahan di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi rapat.
Penyampaian materi rapat oleh Sdri. Rahma Wirmi, ST, M.Si

3. Kesimpulan Rapat.

Dari hasil pelaksanaan rapat, terdapat beberapa peran penting yang perlu dikaji lebih mendalam dalam KLHS yaitu antara lain :

- a. Analisis KLHS perlu dilaksanakan dengan menjangkau akar permasalahan.
- b. Rekomendasi KLHS agar fokus pada level pengurangan sampah dan pengembangan sektor ekonomi dan Waste To Energy seperti : pengolahan sampah melalui RDF.
- c. Salah satu rekomendasi yang penting adalah perlunya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah dan penguatan kelembagaan ditingkat lokal.

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng

Penata Tk.I

NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST

Penata Tk.I

NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 7 Mei 2023
Syawal 1444 H

Nomor : 665/ 244 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Terkait Isu
Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air
dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 09 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait dengan Isu Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN
KLHS RPJPD PROV. SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19631209 198611 1 002

Lampiran Surat Nomor : 665/ ~~344~~ TL-2023

Tanggal : 5 Mei 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Terkait dengan Isu Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air dalam
Peyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Dr. Marganof, M.Si
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. ANGGOTA POKJA :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar;
2. Kepala Balai Pengelolaan DASHL Agam Kuantan;
3. Eva Trisna, ST, M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar);
4. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar);
5. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Sumbar);
6. Benny Ricardo, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Sumbar);
7. Tiara Andini Putri, ST (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar);
8. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
9. Ir. Palastri (Dinas BMCKTR Prov. Sumbar);
10. Nira susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar);
11. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
12. Jusmalinda, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar);
13. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar);
14. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V);
15. Dessy Trianita, ST (PDAM Kota Padang);
16. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
17. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
18. Kepala Bidang P2KLP DLH Prov. Sumbar;
19. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
20. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
21. Devi Hendra, S.Si, M.Si (Subkoordinator pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
22. Armi B, ST (Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
23. Sdr/Sdri. Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar;
24. Sdr/Sdri. Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar;

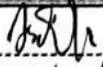
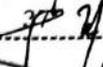
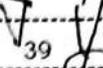
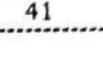
C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
2. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;
3. Direktur LSM Q Bar;
4. Direktur WALHI Sumatera Barat;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa, 09 Mei 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait isu Penurunan Kualitas air dan kuantitas air dalam penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumatera Barat.

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Andy Ikhvan	IE Madya SDA-DK Sbr	082170088442	1
2	Enny Fathomah	ASD / GIZ	08118123201	2
3	Priseyda A.P	BWS Sum V Padang	08524061722	3
4	AULIA REZKI KUSWARDI	-II-	081363175533	4
5	Dessy Triant	Perumda AN Kota Bdg	082283788389	5
6	Aten Sapriana	Perkumpulan qbar	082169764047	6
7	DESKRIZAL	DLH		7
8	Alfitri	BPDAS AG 24 Kuant	081372001925	8
9	X Novita	WALHI SUMBAR	082268107653	9
10	SALWA JAMA	DINKOS	081277633927	10
11	Rosa Guslika	DLH		11
12	Adnan	DF Perantau -DLH	08266175130	12
13	DARMA HARYEWI	DLH PROV. NABUM	081363216300	13
14	AZMI NUR	KORPORASI ATG	08126773024	14
15	DIAN HADIYANSYAH	ESDM	08137737511	15
16	Teguh A	KORPORASI P2CIPM		16
17	Diyanda Y	PSLB 3PK		17
18	Amel Izah	DLH		18
19	Uza Melanda	DLH	08126747002	19
20	Syafiqah Yanti	DLH		20
21	Dwi Ewita Mingsih	DLH	081363346122	21
22	Sisca Wardani	DLH	082170023400	22
23	Kalastri	BKCIKFR		23
24	Fari Aldy	DLH	081266111300	24
25	Jeri Hendri	DLH		25
26	Mhd Gunawan	DLH		26
27	Prisilla	DLH	08126749069	27
28	Ahmad Mulyani	DLH		28
29	Randet PR	-II-		29
30	Nenny Febrina	-II-		30
31	Viya Merry Fazy	-II-		31
32	Gusti N Hesti	-II-		32
33	Andriangah	-II-		33
34	RINI RAHMA PUTRI	-II-		34
35	RISMA MASTI	-II-		35

	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
36	Isda Noffiti	DLH		36 
37	Risa Wirde	DLH		37 
38	Huda	DLH		38 
39	ENR Riyanto	DLH		39 
40	Doni Wasmu	DLH		40 
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Isu Penurunan Kualitas Air dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan isu penurunan kualitas air.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan permasalahan penurunan kualitas air di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu penurunan kualitas dan kuantitas air oleh Sdr. Dr. Marganof
3. Poin Penting hasil FGD
 - a. Terjadi penurunan kuantitas (debit) air sungai secara signifikan. Hal ini diprediksi disebabkan oleh karena terjadinya kerusakan di daerah tangkapan air/catchment area atau karena banyaknya terdapat lahan kritis di sekitar daerah aliran sungai, baik di hulu, bantaran sungai maupun di bagian hilir sungai tersebut.

- b. Lahan Kritis di Hulu Sungai
 - Hulu Sungai Batang Arau
 - Hulu Sungai Batang Kuranji
 - Hulu Sungai Batang Air Dingin
 - Hulu Sungai Batang Kandis
- c. Status mutu air sungai di Sumatera Barat berada pada kategori "tercemar ringan" dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) sebesar 3,05 pada tahun 2021
- d. Terdapat 5 (lima) danau besar yang ada di Provinsi Sumatera Barat
 - Danau Singkarak : 1.656.000.000 m³
 - Danau Maninjau : 10.400.000.000 m³
 - Danau Diatas : 37.000.000 m³
 - Danau Dibawah : 28.000.000 m³
 - Danau Talang : 264.000 m³
- e. Isu dan Permasalahan Sumber Daya Air di Sumatera Barat
 - Ketersediaan air yang tidak merata
 - Pencemaran air
 - Pengelolaan air yang tidak efisien
 - Deforestasi dan erosi
 - Dampak perubahan iklim
 - Konflik penggunaan air
 - Keterbatasan infrastruktur air
- f. Rekomendasi Pengelolaan Sungai di Indonesia
 - Penataan ruang
 - Konservasi dan rehabilitasi
 - Pengendalian banjir
 - Peningkatan kualitas air
 - Pengelolaan sumber daya air secara terpadu
 - Penegakan hukum dan regulasi
 - Pendidikan dan penyuluhan
 - Kerjasama regional dan internasional
 - Pengembangan teknologi dan inovasi
 - Pendanaan dan investasi
- g. Rekomendasi Pengelolaan Danau
 - Memperhatikan karakteristik danau (tipologi danau, indikator kesehatan danau, aktivitas pemanfaatan danau serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat)
 - Mendukung potensi danau sebagai sumber ekonomi
 - Menegakkan hukum
 - Kemitraan
 - Pelibatan masyarakat dan komunitas dalam upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem sekitar danau
 - Penyediaan sistem informasi ekosistem danau

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor


Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,


Darma Haryeni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 19 Mei 2023
Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 665/ ~~96~~ / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Terkait
Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap data-data SDGs tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 22 Mei 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait Percepatan TPB/SDGs dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal;

Lampiran Surat Nomor: 665/ 946/TL-2023

Tanggal : 19 Mei 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Terkait dengan Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dalam
Peyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Dr. Marganof, M.Si
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA
5. Sdri. Rahma Wimi, ST, M.Si

B. ANGGOTA POKJA :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar;
2. Dinas Pariwisata Prov.Sumbar;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumbar;
4. Dr. Sadrianto, M.Pd (Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar);
5. Rivo Armis (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar);
6. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumbar);
7. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat);
8. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Provinsi Sumatera Barat);
9. Eva Trisna, ST,M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat);
10. Vera Kumiati, SE (Dinas Kop. Usaha Kecil & Menengah Provinsi Sumatera Barat);
11. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat);
12. Tiara Andini Putri, ST (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Barat);
13. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
14. Ir. Palastris (Dinas BMCKTR Prov. Sumbar);
15. Nira susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar);
16. Jusmalinda, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar);
17. Yumel Eqia, MM.Akt (Dinas Perhubungan Prov. Sumbar);
18. Siswati, SH (Dinas Sosial Prov. Sumbar);
19. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
20. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar;
21. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
22. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
23. Devi Hendra, S.Si, M.Si (Sub Koordinator pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
24. Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
25. Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
2. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin, 22 Mei 2023
 PUKUL : 13.30 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.2 Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait Percepatan TPB/SDGs dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Yosmika Yusra	DLH Prov	08136307922	1
2	Eneng F	Tim Ahli	08118123201	2
3	Marganof	Tim Ahli	082384654329	3
4	SEPTAERU	-	081315887679	4
5	Rahma Wirni	-	081374790299	5
6	Syolwani	Drsdukcapa	082390730005	6
7	M. Sidik P	Pechil Muda		7
8	DEVI MALINDA	Bappeas	08126708343	8
9	Tusiaraosa	Bappeas	085271851318	9
10	EVA TRISNA	BPOD Prov Sumbar	08116610049	10
11	Tiara Andriane P.	DESUM	08122114094	11
12	Rosa Gustilisa	DLH		12
13	DARMA HANYENI	DLH	081363216300	13
14	Siska Wardeni	DLH SB		14
15	DESRAL	DLH SB		15
16	Jusaidi	DLH SB	082385327724	16
17	TRISARY	Dirker. Ukm	081563266249	17
18	Yumel Eria	Subbing RF / Dishub		18
19	Agung. F	Agung Staf / Dishub	085363790000	19
20	Yeni Siswita	Dinas Perindag Sumbar	081370170495	20
21	Tegeh Anikhanif	Kotid / DLH Sumbar		21
22	Uta Melinda	DLH Sumbar		22
23	Xuya Chafia	-		23
24	Feri Aldy	-		24
25	Don Hendra	-		25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Percepatan Pencapaian Target SDGs dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu rapat : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Percepatan Pencapaian Target SDGs.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Percepatan Pencapaian Target SDGs di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan Percepatan Pencapaian Target SDGs oleh Sdri. Eneng Fahonah, MA
3. Poin Penting hasil FGD
 - Percepatan Pencapaian TPB/SDGs dapat dilakukan melalui:
 - a. Mengidentifikasi target dan kebijakan terkait TPB/SDGs yang menjadi prioritas, serta mempunyai keterkaitan dan menjadi daya ungkit satu sama lain.
 - b. Kolaborasi seluruh actor pembangunan/pemangku kepentingan.
 - c. Terdapat empat platform TPB/SDGs yang perlu didorong peran dan kontribusinya dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs

- d. Perguruan tinggi dan pakar, termasuk SDGs Center
 - e. Peran dan kontribusi yang dapat diberikan oleh platform perguruan tinggi dan pakar ini diantaranya Peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, policy paper/policy brief sebagai dasar policy formulation.
 - f. Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, serta media. Masyarakat dan media dapat melakukan diseminasi dan advokes, fasilitasi program, membangun pemahaman publik, serta diseminasi dan monitoring.
- Tantangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
 - a. Pemahaman konsep, kerangka dan prinsip TPB/SDGs belum merata.
 - b. Pelibatan semua pihak belum optimal.
 - c. Sinergi program kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan NSA.
 - d. Keterbatasan data dan penerjemahan indikator TPB/SDGs.
 - Rekomendasi
 - a. Mengintensifkan proses diskusi yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa isi dari KLHS RPJPD 2025-2045 dapat merefleksikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan/ actor pembangunan.
 - b. Mendorong implementasi Kolaborasi Multi Pihak untuk Pencapaian TPB/SDGs. Hal ini sesuai dengan Perpres 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
 - c. Memastikan penerapan prinsip inklusif dan no one left behind, menyelaraskan dan mengintegrasikan program prioritas pemerintah dengan program non-pemerintah,
 - d. Mengatasi masalah teknis TPB/SDGs, seperti keterbatasan sumber daya, informasi, dan sumber dana.
 - e. Mendorong peran perguruan tinggi/pakar sebagai bagian dari pentahelix dalam pelaksanaan TPB/SDGs, termasuk dalam hal ini peran SDGs Center.

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 19 Mei 2023
Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 6651/947/TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Terkait
Sektor Pertanian dalam Penyusunan
KLHS RPJPD Prov.Sumbar**

Yth.Sdr.

(Sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
- 2.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan *Penjaringan Isu Strategis* Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
- 3.Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Terkait
Sektor Pertanian** dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD RROV.SUMATERA BARAT


ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1.Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
(sebagai laporan);
- 2.Pertinggal

Lampiran Surat Nomor : 665/947/TL-2023
Tanggal : 19 Mei 2023
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Terkait Sektor Pertanian dalam Peyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain (Universitas Andalas);
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si (Universitas Bung Hatta);
3. Dr. Marganof, M.Si (UMSB);
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA (GIZ);
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si;

B. TIM POKJA

1. Dr. Endry Martius (Unand)
2. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Sumbar);
3. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat);
4. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
5. Eva Trisna, ST, M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar);
6. Vera Kurniaty, SE (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat);
7. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar);
8. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
9. Ir. Palastri (Dinas BMCKTR Prov. Sumbar);
10. Jusmalinda, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar);
11. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V);
12. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
13. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar;
14. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
15. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
16. Devi Hendra, S.Si, M.Si (Subkoordinator pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
17. Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
18. Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Direktur WALHI Sumatera Barat
2. Direktur Q-Bar
3. Direktur Warsi
4. SDGs Centre Universitas Andalas Sumatera Barat
5. SDGs Centre UNP Sumatera Barat
6. Ketua Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim
7. Kelompok Tani Ripan Jaya Kecamatan Lubuk Alung (Jhoni Rizal)
8. Kelompok Tani Saiyo Kecamatan Lubuk Alung (Bainar)
9. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)
10. Kelompok Tani Karet Dharmasraya (Martin)

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Selasa, 23 Mei 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.2 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait Sektor Pertanian dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Endang M			
2	WILLY NOPBANITA	APKASINDO SUMBAR	081374591019	
3	Josmike Jusri	DLH Prov	01363023323	
4	ARDINUS ARBAIN			
5	Mahs			
6	Jhon Hendriah	Keltan Ripanjaya	081280429094	
7	BAINAR	KELTAN SAIYO	002389568461	
8	Jal Kuf	CH PE Disbuntan	082207107340	
9	Palasni	Dinas BMCKTA		
10	DEVI MALINDA	Bappean	08126708343	
11	DESRIZAL			
12	Sista Wardani	Pinas LH PB		
13	Tegeh A			
14	Eva TRISNO	SP3D	08116610049	
15	Pisoyah A.P	PWS : 1 Indg		
16	AULIA REZKI KUSWARDI			
17	Rosa Gustilisa	DLH Prov Sbr	08216592292	
18	Marganof	TM Ahli Pdy	082384654325	
19	Yulva Cheria	DLH Prov. Sumbar		
20	DIPA KURNIA	Pertampulan Qbar	081261639527	
21	Uda Melinda	DLH Prov		
22	M. Anief	DLH SB		
23	Van Handu	DLH		
24	Junaidi	DLH PRO. Sumbar	081385327724	
25	DARMA HARYEM	DLH PROV. SUMBAR	081363216300	
26	Rahma Wini	TM Ahli	081374740295	
27	Jusmelinda	JFP / Drshut	081261964030	
28	Eucay Fathonah	Adu / GIZ	08110123201	
29	AGRI YOGAN	DISBUNTAH	081363261233	
30	Novita	WALHT SUMBAR	082268107653	
31				
32				
33				
34				
35				



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Sektor Pertanian dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Dama Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario pertanian oleh Sdr. Dr. Mahdi
3. Poin Penting hasil FGD
 - a. Pertanian masih akan memainkan peran penting dalam perekonomian Sumatera Barat 20 tahun ke depan.
 - b. Pengalaman selama 20 tahun terakhir memperlihatkan peran sektor pertanian yang besar dalam perekonomian, walau secara persentase semakin berkurang, baik kontribusi dalam pendapatan maupun serapan tenaga kerja
 - c. Jika tanpa intervensi yang berarti, kecenderungan yang sama seperti 20 tahun terakhir akan terus berlanjut
 - d. Perkembangan penduduk, perubahan teknologi, perubahan iklim dan ancaman disrupsi membuat tantangan pembangunan bidang pertanian semakin berat 20 tahun ke depan

e. Permasalahan Pertanian Sumatera Barat

- ✓ Ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia
- ✓ Kualitas tanah yang semakin rusak
- ✓ Penurunan produktifitas hasil pertanian
- ✓ Harga pupuk dan pestisida semakin mahal
- ✓ Kerusakan lingkungan, air dan tanah tercemar
- ✓ Ekosistem rusak, senyawa kimia menurunkan keragaman hayati
- ✓ Konflik agraria semakin meluas dan dalam
- ✓ Tenaga kerja sector pertanian cenderung menurun, tersisa tenaga kerja berusia tua dan berpendidikan rendah
- ✓ Deforestasi meningkat
- ✓ Komersialisasi

f. Rekomendasi

- Peningkatkan efisiensi sarana produksi:
 - ✓ Perbaiki pola tanam sehingga mengingkat penggunaan cahaya matahari dan hujan
 - ✓ Memantu hama dan penyakit sehinga hanya semprot jika sampai batas ambang (PHT)
- Penyesuaian dengan pertanian berkelanjutan
 - ✓ Pembuatan teras, mengomposkan bahan organis
 - ✓ Padukan peternakan/perikanan dengan pertanian
 - ✓ Menggunakan cara biologis untuk mengendalikan hama
- Tata ulang sistem bertani:
 - ✓ Rotasi tanaman yang baru
- Keterpaduan antara peternakan, usaha kebun dan hasil pangan

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng

Penata Tk.I

NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST

Penata Tk.I

NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 22 Mei 2023
Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 665/ 96A / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Terkait
Penanganan Perubahan Iklim dalam
Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar

Yth.Sdr.

(Sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

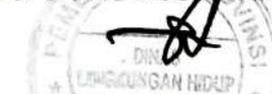
Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 25 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Terkait Penanganan Perubahan Iklim** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumbar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV.SUMATERA BARAT



ASBEN HENDRI, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal

Lampiran Surat Nomor : 665/ 969 /TL-2023

Tanggal : 25 Mei 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Terkait Penanganan Perubahan Iklim dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Prov.Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain;
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si;
3. Dr. Marganof, M.Si;
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA;
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si;
6. Sdri. Suci Kurnia Sari, S.Sos, M.Si;

B. TIM POKJA

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar;
2. Sdr. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Sumbar
4. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Sumbar);
5. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
6. Agri Yoga Riwaldi, SP, M.Si (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumbar);
7. Rivo Armis (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar);
8. Eva Trisna, ST,M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar);
9. Andi Ikhvan, ME (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar);
10. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
11. Ir. Palastri (Dinas BMCKTR Prov. Sumbar);
12. Jusmalinda, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar);
13. Nira susanti, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Prov. Sumbar);
14. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
15. Kepala Bidang P2KPLHL DLH Prov. Sumbar;
16. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
17. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
18. Devi Hendra, S.Si, M.Si (Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
19. Armi B, ST (Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
20. Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
21. Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Direktur WALHI Sumatera Barat
2. Direktur Q-Bar
3. Direktur Warsi
4. SDGs Centre Universitas Andalas Sumatera Barat
5. SDGs Centre UNP Sumatera Barat

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis, 25 Mei 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait Penanganan Perubahan Iklim dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Josmike Yusra	DLH Prov	081363029929	1
2	Suci Kurnia Sari	District Coordinator / PKBI Sumbar	081275940843	2
3	DESRIZAL			3
4	Morganof	Tim Ahli Pambags	082384654829	4
5	Erens F	" / GIZ	08118123201	5
6	Alex Saprika	Perkumpulan qbar	082169764047	6
7	Nashiyah Alfaki	PERKUMPTAN	081374792751	7
8	Adrian	DLH Program	08126157530	8
9	M. Arief	DLH SB		9
10	Annisa Wardani	PPTPH	081268117065	10
11	DARMA HARJENI	DLH NUNBAR	081363216300	11
12	Jon fahr	DLH		12
13	VIVI Adriana	staf PIH/ DINKES	082174748264	13
14	POZA Z	DLH Prov Sumbal.		14
15	Liza Melinda	DLH Prov. Sumba		15
16	DONI W	DLH PROV		16
17	Jurmalinda	JFP / DISTHU	085261964030	17
18	Raisa Azhar	DLH prov sumbar	085364631105	18
19	Dwi Elva Ningsih	DLH		19
20	Fari Aldy	-		20
21	Riska warden			21
22	Palastri	BKCEFA	08197543379	22
23	EVA TRISNA	BKPD Prov. Sumbar	08116610045	23
24	RIVO ARMIS	DKP PROV SUMBAR	08227456216	24
25	Novita	WALHI CUMBAR	082268107653	25
26	Yeni seswita	Dinas Perindas Sumbar	081374170495	26
27	AGRI YOGA P.	DIS. PERUMAS + TANAMAN	081363261233	27
28	NIRA SUCANTI	DINKES SUMBAR	085274093207	28
29	DEVI MALINDA	BAPROED	08126708343	29
30	Rahma Wini	Tim Ahli	081374740299	30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Perubahan Iklim dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darna Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario **Perubahan** Iklim oleh Sdri. Suci Kurnia Sari, S.Sos, M.Si
3. Poin Penting hasil FGD
 - a. Sumatera Barat menjadi salah satu etalasnya **bencana** di Indonesia terutama untuk bencana angin kencang, banjir dan longsor.

- b. Terdapat 5 kabupaten yang kejadian bencana tertinggi diantaranya, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat. Kelima kabupaten tersebut diakui sebagai lokasi super prioritas bencana perubahan iklim yang dirilis oleh Bappenas tahun 2019 dalam dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim.
- c. Kerugian dari bencana tersebut bervariasi, mulai dari kehilangan keluarga, aset, finansial bahkan menjadi trauma psikologis bagi sebagian orang.
- d. Hambatan utama dalam mengurangi potensi kerugian akibat perubahan iklim:
- Kebijakan, Politik, dan Pemerintahan Konsistensi terkait prioritas pencapaian tujuan nasional dalam mengurangi potensi kerugian akibat perubahan iklim.
 - Pengetahuan dan Bukti Pemerintah daerah memiliki pengetahuan terbatas tentang perubahan iklim dan intervensi penting untuk upaya pencegahan dan kuratif. Juga, pemahaman yang terbatas tentang perubahan iklim terhadap pertanian dan pengaruhnya terhadap mata pencaharian masyarakat, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 - Kapasitas dan Sumber Daya Keuangan Kurangnya kapasitas dan komitmen anggaran dari pemerintah dan insentif keuangan yang rendah untuk tindakan iklim
- e. Rekomendasi
- Pemerintah perlu membentuk unit kerja yang dapat meningkatkan koordinasi dalam menghadapi situasi perubahan iklim antar OPD dan multi pihak dengan membentuk kelembagaan dan menyusun rencana aksi yang dapat menunjang adaptasi di daerah.
 - Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi kebutuhan wilayah terdampak bencana sebagai upaya meminimalisir dampak berkepanjangan perubahan iklim
 - Pemerintah perlu memiliki Rencana Aksi Daerah dalam mengurangi dampak perubahan iklim, yang disahkan melalui peraturan kepala daerah. Rencana Aksi tersebut diantaranya memuat strategi pertanian berbasis iklim di daerah.
 - Pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran infrastruktur dan kapasitas masyarakat terutama kelompok rentan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam menghadapi perubahan iklim,
 - Perlunya pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan NGO dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng

Penata Tk.I

NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darna Haryeni, ST

Penata Tk.I

NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 09 Mei 2023
Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 665/ 948 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan berkelanjutan Pilar
Ekonomi Terkait Energi Bersih dan
Terjangkau dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Prov.Sumbar

Yth.Sdr.

(Sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis/ 25 Mei 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi **Terkait Energi Bersih dan Terjangkau** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU-KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT



ASBEN HENDRI, SE, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal

Lampiran Surat Nomor : 665/948/TL-2023
Tanggal : 17 Mei 2023
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Ekonomi Terkait Energi Bersih dan Terjangkau dalam Penyusunan
KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain;
2. Dr. Hidayat, ST, M.T, IPM;
3. Dr. Ir. Suparno, M.Si;
4. Dr. Marganof, M.Si.
5. Sdri. Eneng Fathonah, MA).
6. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si;

B. TIM POKJA

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar;
3. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Sumbar);
4. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
5. Eva Trisna, ST,M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar);
6. Ir. Andi Ikhvan, ME (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar);
7. Yeni Siswita, ST, M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar);
8. Ir. Palastri (Dinas BMCKTR Prov. Sumbar);
9. Jusmalinda, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar);
10. Priseyola Ayunda Prima, ST, MT (Balai Wilayah Sungai Sumatera V);
11. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
12. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar;
13. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
14. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
15. Fungsional Pedal Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
16. Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);

C. NON POKJA (KELOMPOK MASYARAKAT, LSM DAN ASOSIASI)

1. Direktur WALHI Sumatera Barat
2. Direktur Q-Bar
3. Direktur Warsi
4. Direktur Jemari Sakato
5. SDGs Centre Universitas Andalas Sumatera Barat
6. SDGs Centre UNP Sumatera Barat

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis, 25 Mei 2023
 PUKUL : 13.30 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.2 Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi Terkait Energi Bersih dan Terjangkau dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Jasmine Yurn	KEBUN TL DLH Prov	08136302922	1
2	SUPARNO	UMW. Bukit Khatu	08131508967	2
3	Hidayat	UMW. Bukit Khatu	08382535030	3
4	PEZERY RONALDO	KADIN gbar	085356009216	4
5	Jusmalinda	JFP / DISTRI	085261964030	5
6	Imam Hidayat U.	JFT IK / DESDM	085272967260	6
7	Benni Harpa	JAT IK / PESDM	085263899070	7
8	PEZERY RONALDO	KADIN QBAR	085356009216	8
9	Rosa Gustilisa	DLH Prov	0820992232	9
10	Abdullah M Thayib M	JEMARI Sakato	08227415640	10
11	Nashiyah Alfarid	PERKUMIHAN	081371752751	11
12	Marganof	Tim Ahli Pudep	082384654325	12
13	Pozza Z	DLH Prov Sumbar		13
14	Raisa Azharia	DLH Prov Sumbar		14
15	Aulia M	-		15
16	Darmucalis	Bappeda prov		16
17	DARMA HARYENI	DLH Prov. SUMBAR	091363216300	17
18	Dwi Ewa Ningsih	DLH		18
19	Feri Aldy	-		19
20	Pola	-		20
21	Palastri	BMCERT	08197593377	21
22	Priyogala A.P	BWS. C Padang		22
23	Alan Saprika	Persampuan gbar	082169704047	23
24	DEVI MALINDA	Bappeda	08126708343	24
25	Eva Triana	BPRD Prov. Sumbar	08116610049	25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Pembangunan Energi dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

- Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Pembangunan Energi di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
- Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario Pembangunan Energi oleh Sdr. Dr. Ir. Hidayat, S.T., M.T., IPM
- Poin Penting hasil FGD
 - Kondisi Energi Listrik di Sumatera Barat Tahun 2022
 - Konsumsi listrik di Sumbar mengalami peningkatan, khususnya pada sektor bisnis.
 - Penjualan sektor bisnis tahun 2021 mencapai 564,71 GWh
 - Penjualan sektor bisnis tahun 2022 mencapai 629,35 GWh
 - Penjualan listrik sektor bisnis meningkat sebesar 11,45% dari tahun 2021
 - Daya yang dibangkitkan mencapai 778,42 MW.
 - Beban maksimal mencapai 599,6 MW
 - Artinya masih ada cadangan pasokan 22,97% atau 178,82 MW

- Kebijakan dan Regulasi terkait energi saat ini di Sumatera Barat
 - Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan
 - Roadmap Sumbar Sebagai Lumbung Energi Hijau
 - Roadmap Pengembangan Listrik Pedesaan
 - Perda No. 11 Tahun 2019 ttg Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
 - Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
 - Rancangan Perda tentang Pengelolaan Energi
 - Peraturan Gubernur No. 41 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan di Perdesaan
 - Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 671/357/EKTL/DESDM-2022 tanggal 28 April 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Sumatera Barat
 - Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 671/453/EKTL/DESDM-2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Kompor Listrik Induksi di Sumatera Barat
- Tujuan Pembangunan Energi Sumatera Barat
 - Tercapainya kemandirian pengelolaan energi bagi Provinsi Sumatera Barat;
 - Terjaminnya ketersediaan energi daerah, yang bersumber dari pengelolaan potensi setempat dan berkelanjutan;
 - Tercapainya ketangguhan/kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan kebutuhan energi di masa depan;
 - Tercapainya diversifikasi energi baru terbarukan;
 - Tercapainya sinergitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan energi;
 - Tercapainya kesadaran pengguna energi di berbagai sektor untuk melakukan kegiatan konservasi energi;
 - Tercapainya pemanfaatan energi yang berkeadilan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat;
 - Tercapainya sarana prasarana energi dengan dukungan lintas sektor
- Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Transisi Energi Sumatera Barat
 - Harga ET yang Ekonomis
 - Percepatan Substitusi Pembangkit ET pada Pembangkit Fosil (Batu Bara, Diesel, dll.)
 - Kesiapan Sistem Grid PLN untuk Menyerap Listrik ET
 - Pemberian Kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah
 - Pemberian Insentif kepada Daerah Penghasil ET
 - Mandatori Pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah Pengembangan ET (Mengaktifkan Kembali DAK Energi Skala Kecil, dll.)
 - Dukungan Pemerintah Pusat untuk mengawal implementasi RUED

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 25 Mei 2023
5 Dzulq'adah 1444 H

Nomor : 665/1001 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Terkait
Bidang Kesehatan dalam Penyusunan
KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin / 29 Mei 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Terkait Bidang Kesehatan** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT


ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal;

Lampiran Surat Nomor : 665/100/TL-2023
Tanggal : 25 Mei 2023
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Terkait Bidang Kesehatan dalam Peyusunan KLHS RPJPD Prov.
Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, SpKKLP
2. Dr. Ardinis Arbain
3. Dr. Ir. Suparno, M.Si
4. Dr. Marganof, M.Si
5. Sdri. Eneng Fathonah, MA
6. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. OPD/INSTANSI TERKAIT DAN LSM DAN ASOSIASI :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar;
4. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar;
5. Bappeda Prov. Sumbar;
6. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumbar;
7. Dinas BMCKTR Prov. Sumbar;
8. Dinas Perimtan Prov. Sumbar;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar;
10. Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
12. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat
13. Dinas Sosial Prov. Sumbar;
14. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
15. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
16. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
17. Kepala UPTD Limbah B3 DLH Prov. Sumbar;
18. Kepala Bidang P2KLP DLH Prov. Sumbar;
19. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
20. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
21. Sdr/sdri.Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar;
22. Sdr/Sdri. Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar;
23. Dr. Muchsin Riviwanto, SKM, M.Si (Poltekes Padang);
24. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Fort De Kock Padang;
25. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
26. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;
27. Direktur LSM Q Bar;
28. Direktur WALHI Sumatera Barat;
29. Direktur Perkumpulan KB Indonesia (PKBI) Sumbar;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Senin, 29 Mei 2023
 PUKUL : 13.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Terkait Bidang Kesehatan dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Haniyati	Pertemuan Obat	082298367314	1
2	Suci Kurnia Sari	PAFI Sumbar	081275940843	2
3	M V CHSIN	Poltekkes	081374817888	3
4	Prof. Dr. dr. Rizanda	FK Unand	08126623467	4
5	Firdaus Atoum	Dusunantar	08129035078	5
6	Nurhayati	WR. I UNIV. FORT de Koch	081374306997	6
7	Rosa Gustiliza	DLH Pro	08265922912	7
8	Marganof	TA Pendamping	082384654329	8
9	Adren	LH Provinsi	08126575112	9
10	Zaharatul Y	Disperindag	085263506452	10
11	Hafiz Ahmad	"		11
12	ARMI	DLH Provinsi	081267687233	12
13	DEKIZAL	DLH Provinsi		13
14	DARMA HARMENI	DLH PROVINSI	081363216300	14
15	Jumaidi	DLH Prov. Sumsu	082785727224	15
16	Dyanda Y	DLH		16
17	IKMAN	DLH		17
18	Aji Anugrah	DLH		18
19	M. Arief N	DLH		19
20	Dwi Erita Ningsih	DLH		20
21	Novita	WALTI SUMBAR	082268107653	21
22	Desi Widi	Balitbang	085374441570	22
23	Elvia Pamela	DFP prov. Sumbar	08127526400	23
24	Siska Wardani			24
25	Davi Hendri	DLH		25
26	Yulya Ch	DLH		26
27	Yusuf Jora	DLH		27
28	Fari Aldy		081266 111 800	28
29	Enang Fatmahan	Adu / GIZ	08118123201	29
30	EVA TRISNA	BPB.D	08116610045	30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 448571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Sektor Kesehatan dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darna Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

- Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.**
 - Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
- Penyampaian materi**

Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario Sektor Kesehatan oleh Sdri. Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes, SpKKLP
- Poin Penting hasil FGD**
 - Isu kesehatan dapat menjadi salah satu fokus utama dalam RPJPD karena ada beberapa masalah kesehatan yang perlu diatasi, seperti masalah sanitasi, polusi udara, dan kepadatan penduduk yang tinggi.
 - SDGs menjadi acuan dalam menyusun RPJPD karena SDGs memiliki target-target yang terkait dengan kesehatan dan lingkungan hidup yang harus dicapai pada tahun 2030
 - Identifikasi dan analisis isu lingkungan hidup dilakukan terhadap aspek:
 - Polusi udara
 - Analisis terkait emisi industri, transportasi, dan domestik, serta mengidentifikasi polutan utama yang berpotensi merusak kesehatan masyarakat. Analisis Dampak:

- Menganalisis dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat, seperti peningkatan risiko penyakit pernapasan, iritasi mata dan saluran pernapasan, gangguan kardiovaskular, dan penurunan kualitas hidup secara umum
- Limbah
 - Analisis pengelolaan limbah industri, domestik, dan medis, praktik-praktik yang berpotensi mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat
 - Menganalisis dampak limbah terhadap kesehatan masyarakat, seperti kontaminasi air minum dan sumber air lainnya, penyebaran penyakit melalui limbah medis yang tidak dikelola dengan baik, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan laut
- Kekurangan akses air bersih
 - Menganalisis ketersediaan dan akses masyarakat terhadap air bersih termasuk ketersediaan sumber air, infrastruktur sanitasi, dan praktik pengelolaan air
 - Analisis Dampak: Menganalisis dampak kekurangan akses air bersih terhadap kesehatan masyarakat, seperti peningkatan risiko penyakit infeksi saluran pencernaan, kekurangan gizi – antara lain stunting, dan penurunan kualitas hidup
- Perubahan iklim
 - Analisis terhadap perubahan iklim termasuk peningkatan suhu, pola hujan yang tidak teratur, dan meningkatnya frekuensi bencana alam, kebakaran
 - Analisis Dampak: Menganalisis dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat, seperti peningkatan risiko bencana alam, penyebaran penyakit vektor-borne, penurunan ketersediaan pangan, dan masalah kesehatan mental akibat stres lingkungan
- d. Identifikasi target SDGs yang relevan dengan isu kesehatan dan lingkungan hidup yang dihadapi di Provinsi Sumatera Barat. Fokus pada target target yang berkaitan langsung dengan kesehatan, seperti SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan)
- e. Beberapa kebijakan yang dipertimbangkan :
 - Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan
- f. Strategi untuk Mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Strategi untuk Mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon
 - Pembangunan Energi Berkelanjutan
 - Pemulihan Lahan Berkelanjutan
 - Pengembangan Industri Hijau
 - Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 30 Mei 2023

Dzulqad'ah 1444 H

Nomor : 665/ 1039 / TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 31 Mei 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan **Pilar
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**, dalam Penyusunan
KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT


DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peninggal;

Lampiran Surat Nomor : 665/1049/TL-2023

Tanggal 10 Mei 2023

Perihal **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam Peyusunan
KLHS RPJPD Prov. Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. DR Rembrandt, S.H. M Pd
2. Dr Ardinis Arbain
3. Dr Ir. Suparno, M Si
4. Dr Marganof, M Si
5. Eneng Fathonah, MA
6. Rahma Wimi, ST, M Si

B. OPD/INSTANSI TERKAIT DAN LSM DAN ASOSIASI :

1. Kepala POLDA Sumatera Barat.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar.
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumbar.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumbar
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumbar.
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar.
9. Kepala BPKAD Provinsi Sumbar.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar.
13. Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar.
14. Kepala Dinas Perimtan Provinsi Sumbar.
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar.
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
17. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar.
18. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar).
19. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar).
20. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar.
21. Kepala UPTD Limbah B3 DLH Prov. Sumbar.
22. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar.
23. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar.
24. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar).
25. Sdr/ Sdri Febri Yenti Djafri, SH, MH (Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup selaku Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan DLH Prov. Sumbar)
26. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat.
27. SDGs Centre UNP Sumatera Barat.
28. Direktur LSM Q Bar.
29. Direktur WALHI Sumatera Barat.
30. Sdr/ sdr/ Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar.
31. Sdr/ Sdr/ Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar.

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Rabu, 31 Mei 2023
PUKUL : 13.30 WIB s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Lt.2 Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
ACARA : FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Gimmi Hendrico	Dinas Perkimtan S.Barat	085365297909	1
2	Rahmawati	Perkempolan Obar	081363464350	2
3	Sarjua Panah	KEPELNG/DANKEP	081277637927	3
4	MAREANOF	TA Pendamping	082384654325	4
5	Marroza Yohendri	KPU Kabupaten Dns Jendral	081266501200	5
6	DESEZAL			6
7	Yonmiko Jura	DLH		7
8	Agung Nugroho	PLH DLH Prov		8
9	Rahmat Ramadhani	Dinas Kebersihan dan Perumahan	085274525702	9
10	Yeni Siswita	Dinas Perindag	081370170495	10
11	Elva Rinelda	Dinas Kelautan & Perikanan Prov	081275266400	11
12	Andy Ikhwan	Dinas SDA-BK		12
13	Atik	DLH - Progn	08126075130	13
14	Ferri Vanti Jura	PLH	08124012622	14
15	Fitra	DLH PB		15
16	DARMA Hartono	DLH Prov	081363266300	16
17	Jumardi	DLH Prov	082385727724	17
18	Desi Widra	Balitbang	085374441590	18
19	Yeni Hendri	DLH Prov		19
20	Yulia Chantia	-		20
21	Feri Aldy	-	081266111300	21
22	Erang Fauzan	Adz/GIZ	08118125201	22
23	Eva TRISNA	BPRD	08116610049	23
24	Naita	WALHI Sumbar	082268107653	24
25	Rahma Wini	TTM Ateli	081374740295	25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 448571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Pilar Hukum dan Tata Kelola dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. **Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.**
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Pilar Hukum dan Tata Kelola di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. **Penyampaian materi**
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario Pilar Hukum dan Tata Kelola oleh Sdr. DR. H. Rembrandt.
3. **Poin Penting hasil FGD**
 - a. Agenda 16 menyatakan komitmen bahwa "Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, ketersediaan access ada keadilan bagi semua orang dan membangun institusi yang efektifitas, akuntabel dan inklusif di segala tingkatan".
 - b. Agenda ini memiliki 10 target; yang bisa dikategorikan kedalam tiga hal, pertama, soal menurunkan kejahatan dan jumlah korbannya serta kebijakan yang salah; kedua, menegaskan jaminan hak dasar setiap orang dan aturan main hukum serta pelaksanaannya; ketiga, memperkuat kapasitas institusi negara menjadi akuntabel, transparan dan responsif
 - c. Beberapa hal yang pada saat ini perlu kajian dan perlu diatur dalam rangka pembangunan hukum yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat sbb:
 - Peniaminan Hukum Dalam Sumber Dava Hutan

- Penjaminan Hukum Dalam Tata Guna Lahan (termasuk Tanah)
- Penjaminan Hukum Dalam Pemanfaatan Air
- Tata Kelola dan Rekayasa Birokrasi

d. Kesimpulan

- Bahwa hukum adalah suatu sistem, oleh karena hukum itu merupakan suatu sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain
- Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGD's yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, hukum, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.
- Penguasaan hutan ulayat beserta sumber daya alam yang ada didalamnya yang oleh penghulu menunjukkan adanya sistem konservasi yang sangat baik. Status ulayat menunjukkan kedudukan yang tinggi, harta ini diakui sebagai "pusaka tinggi" yang tidak bisa diperjual belikan, kecuali dalam kondisi khusus sesuai aturan adat, untuk memasukinya harus minta izin secara adat, pengambilan hasil hutan baru bisa dilakukan setelah adanya musyawarah dan mufakat diantara kaum suku yang memiliki ulayat tersebut.
- Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah

e. Rekomendasi

- Bahwa dalam merencanakan serta menciptakan hukum yang baik, maka system hukum yang ada seharusnya dikombinasikan dengan system kekerabatan yang ada dalam adat istiadat, sehingga hasilnya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat
- Bahwa dalam setiap penciptaan hukum yang baru yang sesuai dengan perkembangannya, pelibatan masyarakat hukum adat di daerah merupakan suatu kewajiban dan keterlibatannya sangat aktif. Tentu konsep dan tujuan hukum senantiasa tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, agar sesuai maksud dan tujuannya
- Bahwa masyarakat hukum adat dengan segala bentuk kekerabatannya, dan penguasaan lahan dan hutan dalam konsep Ulayat, senantiasa dipertahankan, karena konsep itu sangat bermuansa dalam pelestarian fungsi hutan dan lahan
- Bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk proses dalam pengambilan keputusan, harus transparan dan terbuka, serta bisa dipertanggung jawabkan

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I

NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Haryeni, ST
Penata Tk.I

NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 7 Juni 2023
Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 665/ 1679/ TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Sektor
Pariwisata dalam Penyusunan KLHS
RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun
2025-2045**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat / 09 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan **Sektor Pariwisata** dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV.SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peninggal;

Lampiran Surat Nomor : 665/1074/TL-2023

Tanggal : 7 Juni 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Sektor Pariwisata dalam Peyusunan KLHS RPJPD Prov. Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Prof. Dr. Ansofino, M.Si
2. Dr. Ardinis Arbain
3. Dr. Ir. Suparno, M.Si
4. Dr. Marganof, M.Si
5. Eneng Fathonah, MA
6. Rahma Wirni, ST, M.Si

B. OPD/INSTANSI TERKAIT DAN LSM DAN ASOSIASI :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Baratp;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
12. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
13. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
14. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
15. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar;
16. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
17. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
18. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
19. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;
20. Direktur LSM Q Bar;
21. Direktur WALHI Sumatera Barat;
22. Direktur WARSI Sumatera Barat;
23. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Silokek;
24. Ka. Badan Pengelola Geopark Nasional Sianok Maninjau;
25. Pimpinan LKAAM Sumbar;
26. Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Prov. Sumbar;
27. Ketua Yayasan Sea Turtle;
28. Ketua Asita Prov. Sumbar;
29. Sdr/sdri.Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar;
30. Sdr/Sdri. Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Jumat, 9 Juni 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata dalam Penyusunan KLHS RPJPD Prov.Sumbar tahun 2025-2045

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	DAFTAR TANGAN
1	Ardinis Arbes	UNANAS		1
2	Prof. Ancepri	UPGRISBA		2
3	Judi Fernandes	Kel Worsu		3
4				4
5	Layang W	Disbud	081268646190	5
6	Morganof	TA Pendamping	081384654323	6
7	Rosa Gustilosa	DLH		7
8	Sen	DLH		8
9	DEPRIZAL	DLH		9
10	Benny S	Bojopada		10
11	MAULIDA	ASPPIT	085274120066	11
12	Eka Ruba	DKP Per.	082390770223	12
13	Erie bernandi	Pendamping Ombud	081578074818	13
14	WIPA VERU	BPR	081363921346	14
15	Dr. Anurid Anur Dt. Lela	Basa LKAAM Sumbar	08126628578	15
16	Wini Febriani	Dinkes	085376446189	16
17	MEMYARTI	DINAS PARICOBATA	081874006344	17
18	Hafizh Ahman	Disperindag	08126793679	18
19	junaidi	DLH Prov. Sumbar	082385327724	19
20	Arni	DLH Prov	081-7697233	20
21	Yulha Ch	-		21
22	DARMA HARSON	DLH PROV.	081563216300	22
23	Sornika Yura	Kbid TL		23
24	Desi Widia	Balitbang	0853744441590	24
25	Novita	WALHI SUMBAR	082268107653	25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7056231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Sektor Pariwisata dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu rapat : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darna Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbang
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbang
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbang
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbang
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Sektor Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario Sektor Pariwisata oleh Sdr. Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si.
3. Poin Penting hasil FGD
 - a. Potensi Ekonomi Pariwisata Sumbang
 - Memiliki jumlah dan keberagaman destinasi wisata (alam, budaya, sejarah dan buatan) yang tersebar di kabupaten dan kota.
 - Kunjungan wisatawan didominasi oleh wisnus, kecenderungan wisatawan keluarga, terkait secara historis dan culture.
 - Pengeluaran wisnus rata rata tujuan sumbar: Rp 728,67 Ribu. Sedangkan pengeluaran wisnus rata rata asal sumbar Rp 667,74 ribu
 - Pengeluaran Wisman rata rata \$1267,34, lama tinggal minimal 1,2 hari maksimal 4 hari.
 - Jenis pengeluaran wisatawan yang dominan adalah makanan dan minuman, akomodasi, transportasi, dan cinderamata, sedangkan untuk seni pertunjukan masih rendah.

- b. Pada tahun 2018 sebelum pandemic covid 19, terdapat 80 negara yang paling dominan Wismannya datang ke wilayah Indonesia, setelah pandemic yang dominan berkurang menjadi 73 negara. Potensi wisman yang belum optimal itu adalah dari Kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin
- c. Daerah asal wisman sebelum pandemic covid 19, yang selalu datang ada 6 negara yakni: Australia, China, India, Singapore, Malaysia dan Timor Leste. Setelah pandemi, data tahun 2021 hanya 2 negara yakni Malaysia dan Timor Leste.
- d. Wisatawan manca negara yang datang ke Sumatera Barat secara terus menerus telah mengalami perubahan sejak tahun 2018 sebelum pandemic covid 19 didominasi oleh negara Malaysia, Singapore dan Australia. Ini mengalami perubahan di tahun 2022, pasca pandemic covid 19, didominasi oleh 10 negara yakni disamping Australia, Malaysia, Singapore, juga China, India, Prancis, German, USA, dan Jepang.
- e. Terdapat 6 kabupaten dan kota yang dominan kedatangan wismannya yakni: Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok Selatan. Setelah Pandemi kunjungan wisman dominan pada 5 wilayah yakni: Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Pesisir Selatan.
- f. Terdapat daerah yang memiliki kunjungan wisatawan tinggi, tetapi tingkat hunian akomodasinya rendah yakni kabupaten Padang Pariaman, Agam dan kabupaten Solok
- g. Ada 6 wilayah yang memiliki kunjungan wisnus yang tinggi yakni: Kota Padang, Kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi. Sementara pada kabupaten Solok, memiliki kunjungan wisnus yang tinggi, namun layanan hotel berbintangnya masih rendah. Tanah Datar sudah memiliki hotel berbintang yang memadai, tetapi kunjungan wisnusnya masih belum optimal.
- h. Isu strategis pembangunan kepariwisataan di Sumbar: Pariwisata halal, taman bumi (geopark), digital tourism, penguatan pengalaman wisatawan melalui atraksi dan desain ruang.
- i. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan bersamaan melalui peningkatan pariwisata dan penyediaan air bersih, Dukungan land area, peningkatan public transport ke destinasi, dan angka IPM, tetapi mengalami trade off dengan usaha pengurangan angka kemiskinan dan GDP perkapita. Pengendalian DDL pangan, pengendalian DTL pemukiman merupakan alternatif pilihan kedua setelah pariwisata, infrastruktur dan air bersih.
- j. Rekomendasi dokumen KLHS untuk meningkatkan pariwisata, pertanian, jasa dan industri, perdagangan dan infrastruktur, perlu dipilah lagi karena action profil memiliki pilihan yang berbeda kuadran, oleh karena itu, perlu dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal(kuliner lokal, agar kemiskinan rumahtangga dapat diatasi

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darna Harweni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website : <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 7 Juni 2023

Dzulqa'dah 1444 H

Nomor : 665/1073/TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Pembangunan Sosial dalam Penyusunan
KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat**

Yth.Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Pelaksanaan FGD sebagaimana point 2 (dua) di atas, akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat / 09 Juni 2023
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
Prov. Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Pilar
Pembangunan Sosial** dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon kesediaan saudara untuk dapat menugaskan pejabat yang membidangi/terkait permasalahan dan pencapaian target dan skenario SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Peringgal;

Lampiran Surat Nomor : 665/1037TL-2023

Tanggal : 7 Juni 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Sosial dalam Peyusunan KLHS RPJPD Prov.
Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Dr. Ardinis Arbain
2. Dr. Ir. Suparno, M.Si
3. Dr. Marganof, M.Si
4. Sdri. Eneng Fathonah, MA
5. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si
6. Sdr. Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si

B. OPD/SKPD dan LSM (KELOMPOK MASYARAKAT DAN ASOSIASI)

1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
12. Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar;
16. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Baratp;
18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
19. Dessi Widia, S.Si (Peneliti Pertama Balitbang Prov. Sumbar);
20. Andi Irawan, ST, MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
21. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar;
22. Kepala UPTD Limbah B3 DLH Prov. Sumbar;
23. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar;
24. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar;
25. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar);
26. Sdr/sdri.Fungsional Pedal DLH Prov. Sumbar;
27. Sdr/Sdri. Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar;
28. SDGs Centre UNAND Sumatera Barat;
29. SDGs Centre UNP Sumatera Barat;
30. Direktur LSM Q Bar;
31. Direktur WALHI Sumatera Barat;

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Jumat, 9 Juni 2023
PUKUL : 13.30 WIB s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar
ACARA : FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	(No. HP)	MARKA TANGAN
1	Ardinis Arbain	Tim Ahli	081363600457	1
2	Margana	Tim Ahli	081384654329	2
3	Sera Wardani	DLH SB	--	3
4	ILHAM WAKHY	JFT / BPBD	081374129937	4
5	Delvi Darius	JTI / Disperkertrans	08667165522	5
6	Erip Bernadi	Petempala qbr	081578074818	6
7	Wili Febriani	Banku Prov	085376446199	7
8	Firdi Rizki	JFT / BPPA	0811671353	8
9	JAMAL-AR HIL	DISDIK SUMBAR	985265166722	9
10	Muayon Chairil	Asdik Sumbar	082388843913	10
11	Hadiyah Ahman	Disperindag	00126793679	11
12	PARMA HARYENI	DLH PROV. SUMBAR	081363216500	12
13	DEARIZAN	DLH SUMBAR		13
14	Dwi Unggogeni	DP3AP2KB	081363279924	14
15	Zaki Fadraman	UPTD Persampahan	66589421571	15
16	Rahdet PR	--	085367871970	16
17	Sera Wardani	DLH SB		17
18	Juacardi	DLH Prov. Sumbar	082385327724	18
19	Desi Winda	Bekitbang	085374441590	19
20	Rosa Guslisa	DLH Prov	--	20
21	EVA TRISNA	BPBD	08116610049	21
22	Veni Siruita	Dinas Peradag	08137417495	22
23	Rahmawati	Petempuan QBR	0813634464550	23
24	Elvia Rinda	PKP Sumbar	081275266400	24
25	NENI YARTI	ANALIS PARAWISATA	081374006344	25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: dlh@sumbarprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Skenario Pilar Sosial dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023
Waktu rapat : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Lt.II Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jl.Khatib Sulaiman No.22 Padang.

Pimpinan Rapat : Yosmike Yusra, SE, M.Si
Pencatat : Darma Haryeni, ST

Peserta Rapat : - Tim Ahli KLHS RPJPD Prov Sumbar
- Tim POKJA KLHS DLH Prov. Sumbar
- SDG's Center Unand dan UNP
- LSM Lingkungan
- Kabid/Kepala UPTD Lingkup DLH Prov Sumbar
- Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
- Staf Bidang Tata Lingkungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Pimpinan Rapat.
 - a. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Penyampaian latar belakang dan tujuan pelaksanaan rapat
Latar belakang : Perlu adanya FGD/konsultasi publik terkait dengan Skenario Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan : Merumuskan isu dan skenario terkait dengan Pilar Sosial di Provinsi Sumatera Barat untuk dianalisis di dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
2. Penyampaian materi
Penyampaian materi terkait dengan isu dan skenario Pilar Sosial oleh Sdr. Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si.
3. Poin Penting hasil FGD
 - a. Isu dan Permasalahan Sosial untuk Provinsi Sumatera Barat
 - Kekerasan Seksual. Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 mencapai angka 7.468 kasus dengan 1.341 kasus dengan korban laki-laki dan 6.743 kasus dengan korban perempuan. Korban didominasi oleh perempuan dan rentang usia 13-17 tahun
 - LGBT dan HIV/ AIDS. Jumlah angka LGBT tak ada yg pasti, tetapi pernah dirilis Angka LGBT di Sumbar pada posisi tahun 2019 tercatat 18.000 orang. Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia Wilayah Sumatera Barat mengestimasi, pelaku Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) atau gay di Sumatera Barat mencapai 14.469 orang. Selanjutnya terdapat 2500 orang Waria
 - Perceraian. Terkait dengan kasus perceraian, Kementerian Agama Sumbar merilis dari 45 ribu perkawinan, 8 ribu atau sekitar 20 persen diantaranya, berakhir dengan

perceraian. Sedangkan BPS mencatat, pada tahun 2021 terjadi 9.371 kasus perceraian, dengan rincian 2.372 kasus Cerai Talak dan 6.999 kasus cerai gugat

- Pengguna Narkoba. Polda Sumbar mencatat kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding pada tahun lalu. Sepanjang tahun 2022 pihaknya 1.151 kasus penyalahgunaan narkoba dan ada 1.518 tersangka yang ditangkap. Jika dibandingkan tahun 2021 terjadi kenaikan kasus sebesar 104 kasus, untuk 10,2%, untuk pelaku bertambah 74 orang atau 5.1% Sementara pada 2021 terdapat 1.044 kasus dan menangkap 1.444 tersangka. Kasus peredaran narkoba didominasi oleh anak-anak di bawah umur
 - ODGJ. Berdasarkan data Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof HB Saanin Padang, diperoleh rekapitulasi data bulan Januari - Maret 2023 (Triwulan I) terdapat ada 7.266 pasien rawat jalan di RSJ HB Saanin Padang. Dari jumlah itu daerah asal terbanyak dari Kota Padang sebanyak 5.383 pasien atau 74 persen. Jumlah pasien poliklinik rawat jalan Januari - Maret 2023 sebanyak 7.266, dengan daerah asal terbanyak dari Kota Padang sebanyak 5.383 pasien (74 persen). Seterusnya dari Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 431 pasien (5 persen), Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 287 pasien (3 persen), Kabupaten Agam sebanyak 156 pasien (2 persen) dan dari luar Sumbar seperti Jambi, Riau, Sumatera Utara dan lainnya sekitar 2 persen.
 - Masalah Anak. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 197.134 orang itu, penduduk disabilitas Sumbar yang bekerja sebanyak 191.323 orang dengan rincian laki-laki 101.609 orang dan perempuan 89.508 orang, jumlah penganggur terbuka disabilitas sebanyak 5.811 orang. Sumatera Barat berada peringkat ke-11 diantara 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6.745 orang
 - Masalah Lansia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, tahun 2019, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Sumbar sebanyak 533.528 orang atau 9,8 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 244.890 orang dan perempuan 288.638 orang. Di Sumatera Barat, jumlah lansia 10,9 persen dari jumlah penduduk
 - Masalah LakaLantas. Data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar, angka kecelakaan tahun lalu naik 19,17 persen dibandingkan tahun 2021. Yakni, dari 2.942 kasus menjadi 3.506 kasus. kecelakaan lalu lintas (lakalantas) itu masih didominasi sepeda motor dengan jumlah 4.448 unit
- b. Analisis Permasalahan Sosial di Provinsi Sumatera Barat
- Penyebab Internal: krisis mental, masalah kepribadian, kemiskinan moral, krisis nilai-nilai, genetik/ hormonal, kesadaran hukum
 - Penyebab Eksternal: kemiskinan dan kesenjangan sosial, pendidikan nilai/ karakter, anomisitas masyarakat, ketahanan keluarga, kontrol sosial dan penegakkan hukum, kebijakan sosial
 - Dampak: traumatik/ tekanan psikologis, pms, kematian, kejahatan, konflik, kepercayaan publik pemda, *lost generation*
- c. Solusi: pendidikan nilai/ edukasi sosial, efektivitas pengendalian sosial, penegakkan hukum yang kuat, kebijakan dan perda, pengendalian sosial terpadu, pelibatan keluarga dan tokoh masyarakat, riset dan rekomendasi

Mengetahui,
Sub Koordinator Kebijakan Wilayah
dan Sektor



Siska Wardeni, ST.M.Eng
Penata Tk.I
NIP. 19810502 201001 2 028

Notulis,



Darma Hayeni, ST
Penata Tk.I
NIP. 19761028 200904 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 445571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website <http://dlh.sumbarprov.go.id>, Email: dlh@sumbarprov.go.id

Padang, 13 Juli 2023
Ditujukan 1444 H

Nomor : 065/ 1380/ TL-2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario
Pembangunan Berkelanjutan Pilar
Pembangunan Ekonomi dalam
Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi
Sumatera Barat**

Yth Sdr.

(sebagaimana daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan dan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penjaringan Isu Strategis Lingkungan Hidup dan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tim Ahli pendamping penyusunan KLHS dan Narasumber Pembahas untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan terhadap isu strategis tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada acara FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu / 15 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang
Acara : Rapat FGD Skenario Pembangunan berkelanjutan **Pilar
Pembangunan Ekonomi** dalam Penyusunan KLHS RPJPD
Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
SELAKU KETUA TIM PENYUSUNAN KLHS
RPJPD PROV. SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19631209 198611 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).
2. Peninggal.

Lampiran Surat Nomor : 665/1288/TL-2023

Tanggal : 13 Juli 2023

Perihal : **Undangan Rapat FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Ekonomi dalam Peyusunan KLHS RPJPD
Prov. Sumbar**

Daftar Tujuan /Alamat Surat

A. TIM AHLI

1. Prof.Dr.H. Werry Darta Taifur, SE, MA
2. Dr. Ardinis Arbain
3. Dr. Ir. Suparno, M.Si
4. Dr. Marganof, M.Si
5. Sdri. Eneng Fathonah, MA
6. Sdri. Rahma Wirni, ST, M.Si
7. Sdr. Febrian, S.Pi, M.Si

B. OPD/SKPD dan LSM (KELOMPOK MASYARAKAT DAN ASOSIASI)

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
2. Kepala UPTD Persampahan DLH Prov. Sumbar
3. Kepala Bidang P2KLPHL DLH Prov. Sumbar
4. Kepala Bidang PSLB3PK DLH Prov. Sumbar
5. Yudha Prima SSTP, M.Si (Bappeda Prov. Sumbar)
6. Devi Malinda, SE, Akt, MM (Bappeda Prov. Sumbar)
7. Benny Ricardho, SE (Bappeda Prov. Sumbar)
8. Adrian, ST (Fungsional Perencana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar)
9. Direktur LSM Q Bar
10. Direktur WALHI Sumatera Barat
11. Sdr/Sdri.Fungsional Pedal DLH Prov.Sumbar
12. Sdr/Sdri Staf Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Sumbar

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL : Sabtu, 15 Juli 2023
 PUKUL : 09.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Lt.II Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar
 ACARA : FGD Skenario Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi dalam Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Andhian Ardian	Tim KLHS	081363600451	1
2	Ahan Sapriha	Perkumpulan Oskar	082169764047	2
3	MERRY DARMA	NARA SUMBER	08466290	3
4	Rosa Gustiuk	DLH		
5	Rahma Wanni	Tim KLHS	081374990295	5
6	DETRIZAL	Ka. UPTD DLH		
7	Fenjan	URH	08222592093	7
8	DEVI MARINDA	BABESDA	08126708343	8
9	SUPARNO	URH	0815100037	9
10	Devi Henduz	DLH		
11	Yonke Yon	DLH Prov	08136302013	11
12	Siska Wardani	-		12
13	DARMA HARYANI	DLH PROV. SUMBAR	081363216300	13
14	Sura Raha			14
15	Pi Pin dan Persada	DH	0823 7185 9636	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Lampiran 4

PENJAMINAN KUALITAS KLHS RPJPD



KLHS RPJPD | 2025-2045
PROVINSI SUMATERA BARAT

BERITA ACARA

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENGINTEGRASIAN KLHS RPJPD KE DALAM DOKUMEN RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

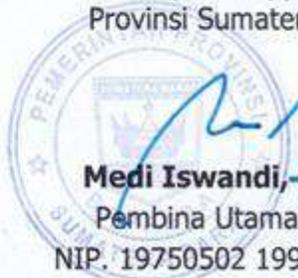
Telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-214-2023 Tanggal 17 Maret 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 telah dilakukan penjaminan kualitas dan akan dilakukan pengintegrasian KLHS ke dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 19 PP 46 tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pasal 31 Permenlhk No.P.69/Menlhk/Setjen/KUM.I/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang pelaksanaan PP 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung Jawab Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat.

Padang, Desember 2023

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Barat



Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat



Asben Hendri, SE, MM
Pembina Utama
NIP. 19631209 198611 1 002

Mengetahui,
Gubernur Sumatera Barat



Mahyeldi

Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Nama KLHS	KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045	
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045	
Instansi Penanggung Jawab	Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2045	
Tahun Pelaksanaan	2023	
Penilaian : Desain proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Tidak	Motoda penyusunan Ex-ante (KLHS disusun terlebih dahulu baru KRP)
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	Ya	SK Tim Pokja dan FGD yang dilaksanakan (Bukti foto terlampir)
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	Ya	Bukti foto terlampir
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	SK Tim Pokja
Ringkasan kesimpulan: Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan yang terkait)		
Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria	Penilaian	Ket
Apakah Laporan KLHS telah memuat :		
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Ada	Terdapat pada Bab I hal I-1 s/d I-3
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Ada	Terdapat pada Bab I Hal I-6 s/d I-13
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan Alternatif muatan KRP	Ada	Terdapat pada Bab I Hal I-6 s/d I-13
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Ada	Terdapat pada Bab I Hal I-11
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Ada	Terdapat pada Bab I Hal I-11
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Ada	Melalui KP 1 dan Kp 2
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS	Ada	Lampiran
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil	Ada	Dalam Dokumen RE

keputusan secara jelas			
Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		Penilaian	Ket
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?		Sudah	Bab V Hal V-6 s/d V-8 Dan Notulen Lampiran KP 1
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :			
1	Karakteristik wilayah	Sudah	Bab V hal V-2 s/d V-3
2	Tingkat pentingnya potensi dampak		
3	Keterkaitan antar isu strategis	Sudah	Bab V hal V-3 s/d V-4
4	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program		
5	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Sudah	Bab V hal V-5 s/d V-6
6	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.	Sudah	Bab V hal V-4 s/d V-5
Apakah rumusan isu prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait ketersediaan air Hal III-112
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-185
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-115
4	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-185
5	Status mutu dan ketersediaan SDA.	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-152
6	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-172
7	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim.	ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-176
8	Tingkat dan status jumlah penduduk	Ada	Berdasarkan informasi

	miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.		BAB III terkait Kebencanaan Hal III-31
9	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-15
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	-	
Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas?		Jelas	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-1 s/d II-33
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait Kebencanaan Hal III-51
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?			
Kriteria		Penilaian	
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?		Ada	Bab V hal V.I s/d V.9
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?		Ada	Berdasarkan informasi BAB III terkait ketersediaan air Hal III-112
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?			Moteda penyusunan Ex-ante (KLHS disusun terlebih dahulu baru KRP)
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?			
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?			
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh : isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi			
Kriteria		Penilaian	
Apakah pengkajian memuat :			
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Ada	BAB III terkait ketersediaan air Hal III-112 dan BAB VI Hal VI-146 s/d III-151
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ada	BAB III terkait Kebencanaan Hal III-185 s/d III-228
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Ada	BAB III terkait Jasa

			Ekosistem Hal III-115 s/d III-144
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Ada	BAB III terkait SDA Hal III-152 s/d III-171
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim; dan	Ada	BAB III terkait Tingkat Kerentanan dan kapasitas Adaptasi terhadap Iklim Hal III-176 s/d III-185
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ada	BAB III terkait Kehati Hal III-1172 s/d III-176
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		Ya	Ada perhitungan proyeksi Bab III dan Bab V
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		Ada	Bab I Dasar hukum Bab II Landasan Teori
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		Ada	Bab III dan Bab IV (peta-peta)
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		tidak	Motoda penyusunan Ex-ante (KLHS disusun terlebih dahulu baru KRP)
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		Sudah	Bab VI
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?		Sudah	Bab VI
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?		Sudah	Bab VI
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?		Sudah	Bab VI
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?		Sudah	BAB III dan BAB VI
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?		Sudah	BAB III
Kriteria		Penilaian	
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai dibawah ini:			Tidak menyempurnakan KRP namun memberikan masukan terhadap penyusunan KRP terutama masukan untuk kretistik wilayah, skenario TPB (strategi dan arah kebijakan) terkait dengan hasil analisis TPB pada Bab VI
1	Tujuan atau target strategi pencapaian target		
2	atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi		
3	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
4	perkembangan ilmu pengetahuan dan		

	teknologi		
5	Penundaan, perbaikan urutan, atau prioritas pelaksanaan		
6	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau		
7	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup		
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?			Rekomendasi terkait dengan strategi dan arah kebijakan mengacu kepada hasil analisis TPB pada Bab VI
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?			
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?			
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?			
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?			
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?			
Kriteria		Penilaian	
Apakah telah terpenuhi :			
Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)		ada	Lampiran
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan sebelum dan sesudah		tidak	Motoda penyusunan Ex-ante (KLHS disusun terlebih dahulu baru KRP)
Dokumen penjaminan kualitas		Ada	Lampiran
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS		Ada	Lampiran
SK Kelompok Kerja KLHS		Ada	Lampiran
Kriteria		Penilaian	
Apakah telah terpenuhi :			
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP		ada	Telah ada berita acara bahwa akan diintegrasikan
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP			
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP		ada	Telah ada berita acara bahwa akan diintegrasikan
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)		-	
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus		-	

mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?		
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	-	
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini	-	
Kriteria	Penilaian	
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Bab I Bukti pelaksanaan pada lampiran
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Bukti pada lampiran foto absen dll
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Lampiran (Notulensi KP1 dan KP2)
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	